

A photograph of two athletes running on a green field. The athlete in the foreground is wearing a blue shirt, white shorts, white socks with black stripes, and blue and black cleats. They are running over a series of light green cones. The background shows a blurred fence and a clear sky.

AGILITY FOR TRANSFORMATION

LAPORAN TAHUNAN
TERINTEGRASI
2019

PT BFI Finance Indonesia Tbk

Daya tahan, kekuatan, dan ketangkasan—ketiganya hanya dapat dibangun sejalan dengan waktu, melalui latihan rutin dan kerja keras. Tak hanya kelincahan kaki atau kelenturan tubuh untuk mengubah arah dan posisi secara efektif dan terkendali, namun kecepatan refleks, koordinasi, keseimbangan, dan kemampuan untuk menanggapi situasi yang terus berubah juga sama pentingnya.

Untuk menjadi tangkas, kita perlu memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, memiliki kemampuan untuk memproses informasi dan cepat tanggap, sambil tetap menjaga keseimbangan dan kendali. Secara strategis, Anda memposisikan diri untuk memampukan diri Anda dalam mengambil tindakan terbaik. Ketangkasan adalah perihal pola pikir, dan tekad yang kuat untuk bertindak dengan kecepatan dan ketepatan. Oleh karena itu, latihan ketangkasan fisik biasanya bertujuan untuk transformasi tubuh secara menyeluruh.

Latihan *cone drills* sering dilakukan sebagai cara untuk membangun ketangkasan dalam olahraga. Anda berlari kencang dari satu titik ke titik lainnya, kemudian berbalik dengan sigap, dan lari kembali ke titik awal. Jenis latihan ini dilakukan di lintasan lari, dan juga dilakukan dengan menggunakan *cones*, yang ditampilkan dalam desain sampul tahun ini.

Jika ketangkasan merupakan salah satu komponen inti dari kebugaran, maka dalam konteks bisnis, ketangkasan kini menjadi semakin penting dalam memastikan keberlanjutan jangka panjang suatu bisnis, karena perubahan terjadi semakin cepat hari demi hari.

Kami memahami betapa pentingnya ketangkasan dalam berbisnis, agar dapat terus menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan internal dan eksternal dengan cekatan, termasuk di pasar, tanpa kehilangan momentum ataupun visi, dan tanpa menurunkan produktivitas ataupun efektivitas. Perusahaan telah mentransformasi dan mempersiapkan sistem, infrastruktur, dan proses bisnisnya, bersamaan dengan sumber daya manusianya, agar dapat bertindak dengan cepat dan menghadapi setiap tantangan seefisien mungkin. Dengan ketangkasan yang lebih baik, kami berusaha untuk melanjutkan langkah pertumbuhan kami, menjadi lebih baik dan lebih kuat.

Disclaimer

PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance atau Perusahaan) telah melakukan segala upaya untuk memastikan akurasi informasi dalam Laporan Tahunan Terintegrasi ini. Namun, Perusahaan tidak menjamin kesesuaian, ketepatan, kegunaan atau hal lain apapun mengenai informasi ini. Laporan Tahunan Terintegrasi ini memuat beberapa pernyataan berwawasan ke depan tentang harapan masa depan, rencana, dan strategi yang bukan merupakan fakta sejarah. Hal-hal tersebut didasarkan pada harapan, perkiraan, prakiraan, dan proyeksi saat ini tentang bisnis dan lingkungan di mana Perusahaan beroperasi dan keyakinan dan asumsi yang dibuat oleh manajemen. Sehubungan dengan harapan, perkiraan, prakiraan, dan proyeksi tersebut yang tergantung pada sejumlah risiko, ketidakpastian, dan asumsi, hasil aktual mungkin berbeda secara material dari yang diproyeksikan sebelumnya. Oleh karena itu, pembaca diingatkan untuk tidak menempatkan ketergantungan sepenuhnya pada pernyataan berwawasan ke depan. Selain itu, Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan tersebut sebagai hasil dari informasi baru, kejadian di masa depan, atau perkembangan lainnya. Pihak-pihak yang mengandalkan isi dari Laporan Tahunan Terintegrasi dan Laporan Keuangan ini sepenuhnya menanggung risiko mereka sendiri. Perlu diketahui juga bahwa seluruh angka dalam Laporan Tahunan Terintegrasi ini telah dibulatkan ke bilangan dalam juta atau miliar rupiah terdekat, dan dengan demikian, mungkin terdapat perbedaan dalam perhitungan persentase perubahannya, dibandingkan dengan hasil perhitungan menggunakan angka dari Laporan Keuangan Tahunan.

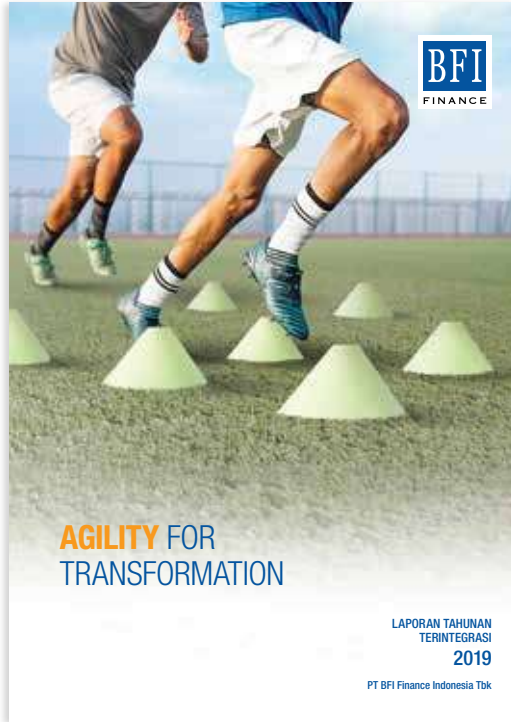
AGILITY FOR TRANSFORMATION

Kita telah menyaksikan berbagai perubahan drastis dalam industri jasa keuangan global beberapa tahun belakangan ini. Faktor yang menyebabkan perubahan terbesar, paling destruktif namun sekaligus kreatif, adalah teknologi, dan cepatnya langkah perubahan dari teknologi tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menanggapi disrupsi ini? Ketangkasan dalam berbisnis berarti kemampuan untuk bersaing dan berkembang di era digital ini dengan tanggap merespons perubahan di pasar dan peluang yang muncul. Teknologi telah mengubah kebiasaan di masyarakat secara radikal. Masalah yang kita hadapi saat ini adalah banyak perusahaan besar dan tradisional yang menyadari ancaman dari disrupsi digital, namun mereka gagal melakukan transisi untuk bertahan di masa mendatang. Oleh karena itu, tahun ini kami memilih untuk berfokus pada tema *Agility*.

Sebagai organisasi berorientasi bisnis, kami senantiasa berfokus untuk menjadi perusahaan yang lincah/gesit. Kegesitan dalam berbisnis tidak hanya berkaitan dengan sistem atau proses yang lincah, tetapi juga membutuhkan para pemimpin yang tangkas. Pemimpin yang tangkas membentuk tim kerja yang tangkas pula. Hal ini bukan hanya sekadar metodologi atau sistem, tetapi suatu pola pikir yang harus ditanamkan di seluruh organisasi. Ketangkasan dalam berbisnis juga mampu menerobos berbagai batasan dalam organisasi dan menumbuhkan kreativitas dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah, berkat ide-ide yang dapat tumbuh subur di lingkungan yang kondusif. Untuk menjalankan strategi ini di seluruh organisasi, diperlukan komitmen menyeluruh dari para pemimpin di seluruh negeri, selain juga perubahan yang

fundamental dalam struktur dan operasi organisasi.

Di 2019, transformasi Perusahaan menuju bisnis yang lincah dilaksanakan melalui berbagai proyek rintisan dan tes ulang sejumlah inisiatif baru sebelum memperluas skalanya. Sebelumnya, berbagai inisiatif tersebut perlu waktu yang lebih lama untuk diterapkan karena proses pengambilan keputusan yang kaku. Akan tetapi, kini kami berani mengambil lebih banyak risiko berskala kecil, sehingga meminimalisasi risiko kegagalan pada skala yang lebih besar, dan secara bersamaan, mengakselerasi pembentukan kapabilitas organisasi untuk belajar, dan menciptakan peluang baru untuk terus menyempurnakan diri.



AGILITY FOR TRANSFORMATION

Berlandaskan semangat untuk berkembang seiring dengan pasar seraya meraih peluang yang muncul, BFI Finance terus menanamkan budaya perubahan dan transformasi di dalam organisasinya, sehingga menjadi lebih tangkas dan tangguh dalam menghadapi tantangan di masa depan. Upaya ini membutuhkan kecakapan dan kekuatan dalam setiap sistem dan proses, dan tentunya dalam pola pikir semua pihak di seluruh organisasi.



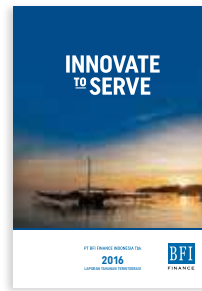
EMBRACING A NEW NORMAL

Di dunia saat ini, peran teknologi informasi dalam mendukung kinerja Perusahaan dan sebagai katalis proses bisnis semakin penting. Untuk mengembangkan layanan yang senantiasa mampu memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen, Perusahaan telah menyelaraskan strategi bisnisnya dan berfokus untuk senantiasa memberikan layanan yang lebih baik, sambil mempercepat pengembangan teknologi informasi berbasis digital, demi menjawab tantangan di era modern dan berkembang bersama dengan konsumennya.



GROW LEADS, CREATE VALUE

Upaya menciptakan nilai dengan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan diwujudkan dengan terus mengembangkan kapabilitas internal Perusahaan dan menjangkau pasar yang lebih luas secara optimal.



INNOVATE TO SERVE

Merupakan inisiatif Perusahaan untuk memperbaiki cara menjalankan usaha. Perusahaan yakin bahwa peluang perubahan selalu ada, sekecil apapun perubahan itu.



OPTIMIZE • GROW • LEAD

Strategi optimalisasi untuk mencetak kinerja unggul dalam rangka memperkuat pertumbuhan Perusahaan tidak hanya saat ini, melainkan juga untuk jangka menengah dan jangka panjang, dan terutama di masa-masa yang penuh tantangan.

BFI Finance menyajikan Laporan Tahunan 2019 ini dalam bentuk Laporan Terintegrasi.

Laporan ini menjelaskan keseimbangan *Triple Bottom Line (Profit–People–Planet* atau 3P) yang berkontribusi terhadap pencapaian BFI Finance dalam jangka panjang, serta bagaimana Perusahaan, yang bergerak di jasa keuangan, menumbuhkan inovasi agar mampu memenuhi aspirasi para pemegang saham, berinteraksi lintas generasi, menjawab kebutuhan konsumen dan rekanan bisnis Perusahaan yang bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

Setelah berkiprah di Indonesia selama lebih dari 37 tahun, BFI Finance tetap bersemangat untuk memantapkan posisinya sebagai salah satu perusahaan pembiayaan paling berpengalaman dan terpercaya di Indonesia. Perusahaan ingin selalu hadir di tengah masyarakat dan tumbuh bersama masyarakat, mengikuti dinamika perubahan dan tren dari masa ke masa. BFI Finance membuktikan diri mampu bergerak tangkas seiring dengan perubahan zaman, perkembangan gaya hidup generasi muda, dan kemajuan teknologi. Dalam mendukung upayanya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, Perusahaan menggunakan berbagai sarana untuk memahami kebutuhan mereka, memberikan berbagai solusi dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan finansial konsumen yang demikian beragam secara nyaman, aman, dan dapat diandalkan.

Dalam menjalankan aktivitas bisnis dan kegiatan operasional hariannya, Perusahaan selalu mengedepankan etika, menjunjung prinsip ketaatan terhadap peraturan perundangan, berbagai norma dan aturan yang berlaku dari lembaga-lembaga regulator terkait. Di tengah bergulirnya roda perekonomian dan kencangnya persaingan bisnis, BFI Finance selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan penerapan manajemen risiko yang terarah dan berkelanjutan.

Perusahaan juga berkiprah secara aktif dalam pembangunan aspek sosial kemasyarakatan, melakukan berbagai upaya konservasi energi di lingkup internal organisasi. BFI Finance berkomitmen untuk mempertahankan reputasinya sebagai perusahaan pembiayaan dengan penerapan tata kelola berkelanjutan di industri keuangan dan jasa pembiayaan Indonesia.

BFI Finance berpegang teguh pada komitmennya untuk menciptakan nilai-nilai positif dan memberikan manfaat berdasarkan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan, seiring dengan visinya untuk menjadi mitra solusi keuangan yang terpercaya dan turut menjadi pilar pengembangan taraf hidup masyarakat di Indonesia.

Referensi dalam Pelaporan

Laporan Terintegrasi BFI Finance 2019 ini memadukan Laporan Tahunan (termasuk laporan keuangan dari auditor independen) dan Laporan Keberlanjutan. Praktik ini telah dilakukan secara konsisten sejak penyampaian Laporan Terintegrasi BFI Finance 2016 sebagai Laporan Terintegrasi edisi yang pertama, yang diterbitkan pada 24 Maret 2017.

Periode pelaporan dalam Laporan Terintegrasi 2019 ini adalah dari 1 Januari hingga 31 Desember 2019. Perusahaan menerbitkan Laporan Terintegrasi setiap satu tahun sekali.

Dalam penyusunannya, laporan ini mengacu pada peraturan perundangan yang terkait dengan penyajian Laporan Tahunan Perseroan Terbatas serta panduan pembuatan Laporan Keberlanjutan dari Global Reporting Initiative (GRI) dan International Integrated Reporting Council (IIRC).

Data dan informasi finansial dalam laporan ini disajikan sesuai dengan PSAK yang berlaku di Indonesia. Data dan informasi non-finansial disajikan sesuai dengan ketentuan dari Panduan Pembuatan Laporan Keberlanjutan dari *GRI Standards*. Laporan ini telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI: Pilihan Inti. Perusahaan tidak meminta pihak eksternal untuk melakukan penjaminan atas Laporan Terintegrasi 2019 ini.

Keterpaduan laporan finansial dan non-finansial dalam laporan ini disusun mengikuti prinsip panduan dari *The International Integrated Reporting Framework* yang diterbitkan oleh IIRC. Laporan ini menyajikan beragam topik non-finansial yang material bagi BFI Finance dan pandangan pemangku kepentingannya. Pemilihan topik dalam laporan ini, "Agility for Transformation", dijelaskan lebih lanjut di bagian Penjelasan Tema (lihat halaman 1).

Cakupan dan Pernyataan Ulang

Cakupan pelaporan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan 2019 adalah seluruh operasi bisnis Perusahaan dan entitas anaknya.

Dalam Laporan Terintegrasi 2019, Perusahaan tidak melakukan pernyataan ulang apapun terhadap semua data yang telah disampaikan di Laporan Terintegrasi 2018. Perusahaan juga tidak melakukan perubahan apapun yang bersifat substansial terhadap cakupan dan topik material yang dipilih untuk dibahas dalam laporan.

Tentang Laporan Terintegrasi

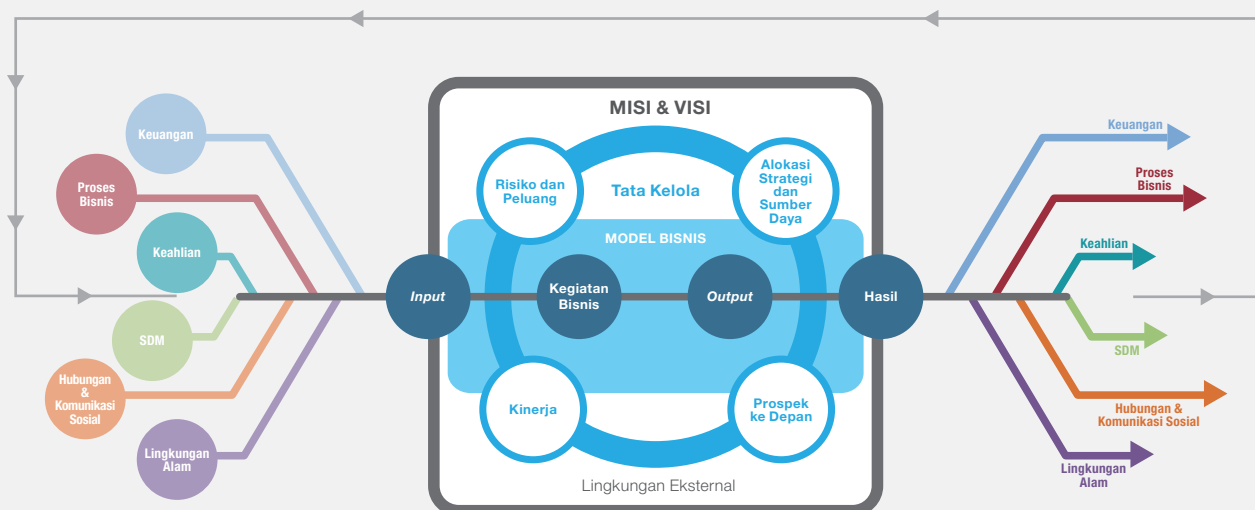
Penggunaan kerangka Laporan Terintegrasi atau *Integrated Reporting* (IR) yang disusun oleh IIRC ditujukan untuk menyajikan pelaporan Perusahaan agar menjadi lebih efisien dan produktif.

Sesuai dengan namanya, Laporan Terintegrasi menunjukkan bagaimana sumber daya Perusahaan berinteraksi dengan lingkungan eksternal dan

sumber-sumber permodalan yang ada, dalam rangka menciptakan nilai tambah untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.

Karena interaksi sumber daya dipandang secara holistik dalam kemampuannya menciptakan nilai secara berkelanjutan, maka informasi yang ada di dalam laporan ini, selain bermanfaat bagi kalangan finansial, juga bermanfaat bagi karyawan, pelanggan, pemasok, mitra, masyarakat sekitar, regulator, dan pembuat kebijakan.

GRAFIK 1 _INTERNATIONAL INTEGRATED REPORTING COUNCIL (IIRC) REPORTING FRAMEWORK



Penciptaan nilai (pemeliharaan, pengurangan/penyusutan) dari waktu ke waktu

Informasi lebih lanjut mengenai kerangka IR dan informasi pendukungnya tersedia pada situs web <https://integratedreporting.org>.

Materi Bahasan

Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 PT BFI Finance Indonesia Tbk merupakan gabungan dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang memuat sepuluh bab mengenai pembahasan terkait aktivitas bisnis dan nonbisnis Perusahaan yang terdiri dari:

- | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| ✓ Kilas Kinerja 2019 | ✓ Unit Pendukung Bisnis | ✓ Tanggung Jawab Sosial Perusahaan |
| ✓ Laporan Manajemen | ✓ Analisis dan Pembahasan Manajemen | ✓ Data Penunjang Perusahaan |
| ✓ Profil Perusahaan | ✓ Tata Kelola Perusahaan yang Baik | ✓ Laporan Keuangan Tahunan |
| ✓ Sumber Daya Manusia | | |

Selain bentuk buku cetakan, laporan ini dapat diakses secara online melalui situs web Perusahaan:



<https://www.bfi.co.id/investor-relations/annual-report>

Referensi

Acuan utama dalam pembuatan Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 PT BFI Finance Indonesia Tbk ini adalah seluruh ketentuan dari lembaga regulator atau otoritas mengenai penerbitan laporan tahunan oleh perusahaan publik atau emiten dan panduan standar internasional mengenai laporan keberlanjutan, antara lain:

- 1 **UU No. 40 Tahun 2007** tentang Perseroan Terbatas (UU PT);
- 2 **POJK No. 29/POJK.04/2016** tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
- 3 **SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016** tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik;
- 4 **Peraturan terkait bursa efek dan pasar modal** yang diterbitkan oleh BEI;
- 5 **UU, POJK, SEOJK**, dan peraturan-peraturan lainnya yang menjadi acuan isi dan materi pembahasan dalam laporan tahunan terintegrasi; dan
- 6 **GRI Standards dari Global Reporting Initiative (GRI)** sebagai acuan dari kriteria-kriteria pengungkapan unsur Laporan Keberlanjutan yang dipilih oleh Perusahaan.

Unsur Laporan Keberlanjutan

Dimasukkannya unsur Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report* atau SR) dalam Laporan Tahunan Terintegrasi merupakan bentuk kepatuhan Perusahaan terhadap POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Keuangan Berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Unsur Laporan Keberlanjutan ini juga berpedoman pada *GRI Standards* sebagai standar pelaporan keberlanjutan yang dikeluarkan oleh GRI.

Implementasi Standar Laporan Terintegrasi (*Integrated Reporting* atau IR)

BFI Finance mulai menerbitkan Laporan Tahunan Terintegrasi sejak 2017 untuk pelaporan kinerja 2016. Perusahaan mengacu pada *Integrated Reporting Framework* atau Kerangka IR yang diterbitkan oleh IIRC dan menerapkannya secara bertahap dari tahun ke tahun sebagai langkah pembelajaran.

BFI Finance menyajikan laporannya dengan memberikan penekanan pada integrasi proses bisnis dengan unsur-unsur kapital yang dimiliki Perusahaan, dan bagaimana integrasi tersebut kemudian memberikan nilai tambah bagi berbagai pemangku kepentingan Perusahaan. Dengan penerapan hal ini, diharapkan laporan tahunan Perusahaan mampu menyajikan fakta-fakta seputar aktivitas dan kinerja bisnis dan nonbisnis secara transparan dan terstruktur.

Keputusan manajemen Perusahaan dalam membuat Laporan Tahunan Terintegrasi merupakan upaya Perusahaan untuk menerbitkan Laporan Terintegrasi yang berstandar internasional, namun tetap berpedoman pada dan menerapkan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Kapital Perusahaan

Berdasarkan acuan dari Kerangka IR, proses bisnis Perusahaan terdiri dari enam kapital utama, yaitu:



Financial
(Keuangan)



Manufactured
(Proses Bisnis)



Intellectual
(Keahlian)



Human
(SDM)



Relationship & Social
(Hubungan &
Komunikasi Sosial)



Natural
(Lingkungan Alam)

Pemangku Kepentingan Perusahaan

Berdasarkan bidang usaha BFI Finance sebagai perusahaan jasa pembiayaan dan penyelarasannya dengan enam kapital utama, kinerja dan pencapaian bisnis dan nonbisnis Perusahaan akan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan utama, antara lain:



Konsumen



Pemegang Saham/Investor



Karyawan



Regulator



Masyarakat Umum



Lingkungan Hidup

Pernyataan Keberlanjutan

Kami menjalankan bisnis secara bertanggung jawab untuk memberdayakan dan mengangkat derajat hidup konsumen kami dengan memberikan akses keuangan melalui produk-produk pembiayaan kami, serta dengan memperhatikan upaya pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Distribusi Nilai BFI Finance

Melalui kegiatan bisnis pembiayaan yang kami jalankan, di sepanjang 2019 kami telah:

- Menyediakan produk pembiayaan bagi lebih dari 550 ribu konsumen di 33 provinsi di Indonesia dan mengangkat kemampuan dan kemandirian ekonomi mereka;
- Menyerap tenaga kerja dengan mempekerjakan 12.127 karyawan;
- Memanfaatkan produk dan jasa yang disediakan oleh lebih dari 800 pemasok yang bermitra dengan kami dari seluruh Indonesia;
- Berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan sekitar melalui aktivitas CSR, literasi keuangan, dan pajak yang kami bayarkan kepada pemerintah; dan
- Menciptakan nilai dan imbal hasil yang memuaskan bagi pemegang Saham/Investor melalui reputasi yang unggul di industri dan kebijakan pembayaran dividen yang atraktif.







Penciptaan dan Distribusi Nilai Finansial

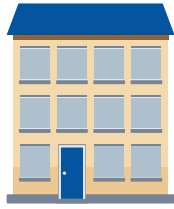
BFI Finance menciptakan nilai dan kapital finansial melalui berbagai proses bisnisnya, dan mendistribusikannya kepada berbagai pemangku kepentingan dalam berbagai wujud dan cara. Jumlah nilai finansial yang didistribusikan oleh BFI Finance di 2019, antara lain (dalam Rp juta):

Pendapatan	5.240.729
Pemegang Saham/Investor	733.255*
Karyawan	1.216.813
Pemerintah	495.076
Keberlanjutan Usaha	711.682

* Dividen final 2018 yang dibayarkan di 2019, termasuk PPh Pasal 26 atas dividen

Pemanfaatan Kapital dan Penciptaan Nilai bagi Pemangku Kepentingan

Jenis Kapital	Wujud Kapital	Aktivitas Pemanfaatan dan Penciptaan Nilai	Pemangku Kepentingan Penerima Manfaat	Dijelaskan dalam Bab	
 Keuangan	Fasilitas pembiayaan	Kegiatan bisnis normal	Konsumen, Pemegang Saham/Investor, Pemasok	2, 3, 5, 6, 10	
	Ekuitas	Eksekusi strategi bisnis			
 Proses Bisnis	Jaringan bisnis operasional	Perluasan keberadaan fisik dan digital, serta penguatan melalui kemitraan	Konsumen, Pemegang Saham/Investor, Karyawan, Pemasok	2, 3, 5, 9	
	Infrastruktur operasional	Investasi, penyempurnaan, dan pengembangan			2, 3, 5
	Teknologi informasi (TI)	Pengembangan dan investasi TI			2, 5
 Keahlian	Model usaha	Pengembangan model usaha yang tangguh dan adaptif	Konsumen, Pemegang Saham/Investor, Karyawan, Pemasok	2, 3, 5, 6	
	Inisiatif digitalisasi	Formulasi dan implementasi digitalisasi di berbagai proses bisnis			2, 4, 5
 SDM	Karyawan	Pelatihan, pemberdayaan, pengembangan profesionalisme	Karyawan, Regulator	2, 4, 8	
	Budaya kerja	Sosialisasi kepada dan penerapan oleh seluruh karyawan			4
	Praktik ketenagakerjaan	Penyempurnaan dan penyesuaian dengan standar dan praktik terbaik yang berlaku			4, 7, 8
 Hubungan & Komunikasi Sosial	Kerjasama dengan pemerintah	Dukungan terhadap upaya dan program pemerintah untuk menyejahterakan bangsa, kepatuhan terhadap peraturan	Regulator	2, 6, 7, 8	
	Interaksi dengan masyarakat sekitar	Pemberdayaan dan peningkatan kemandirian ekonomi, perbaikan kualitas hidup	Masyarakat Umum	8	
	Program beasiswa	Implementasi dan penyempurnaan	Masyarakat Umum, Karyawan	8	
	Program CSR	Formulasi, implementasi, evaluasi, dan penyempurnaan berkelanjutan	Masyarakat Umum	8	
 Lingkungan Alam			Lingkungan Hidup	8	
	Penggunaan sumber daya	Penghematan dan pemanfaatan secara efisien	Lingkungan Hidup	8	



423

outlet



12,1 ribu

karyawan



608,6 ribu

kontrak

di seluruh Indonesia,
tidak termasuk 45 cabang
perwakilan syariah



5,7%

ROAA

11,6%

ROAE

0,85%

NPF

Jumlah
Pendapatan
(Rp miliar)

▲ 4,4%

2019
5.2412018
5.018

Piutang
Pembiayaan-Bersih
(Rp miliar)

▲ 0,9%

2019
17.4392018
17.283

Jumlah
Aset
(Rp miliar)

▼ 0,1%

2019
19.0902018
19.117

Laba
Tahun Berjalan
(Rp miliar)

▼ 51,5%

2019
7122018
1.468

Penghargaan



Infobank Multifinance Awards 2019

- Trofi Platinum Infobank Multifinance Awards 2019 untuk “Kinerja Keuangan Sangat Bagus” **10 tahun berturut-turut** (2009-2018)
- Peringkat ke-2 Infobank Multifinance Awards 2019 kategori “Perusahaan Pembiayaan Beraset Rp10 Triliun ke Atas”



HR Asia Awards Indonesia 2019

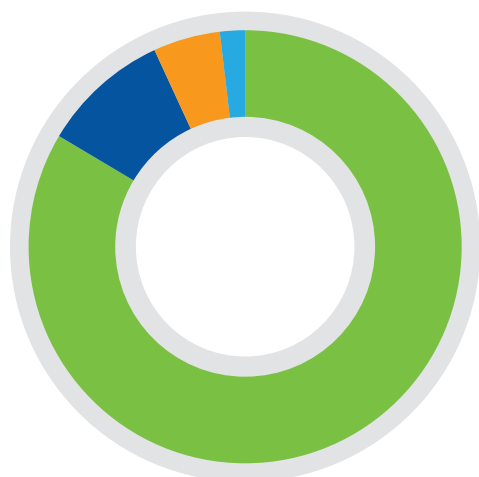
HR Asia Awards Indonesia “Best Companies to Work for in Asia” tiga tahun berturut-turut (2017-2019)



Best of the Best Awards 2019 by Forbes Indonesia

Forbes Best of the Best Awards 2019 sebagai “The Top 50 Listed Companies for 2019” dan “Trifecta Award for Winning Three Years in a Row” (2017-2019)

Piutang yang Dikelola berdasarkan Jenis Aset



Mobil	71,7%
Alat Berat	15,0%
Motor	11,1%
Properti dan Lain-Lain	2,2%



Pemegang Saham

Trinugraha Capital & Co SCA	42,80%
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	41,02%
NT Asian Discovery Fund	9,90%
PT BFI Finance Indonesia Tbk	6,28%



Wilayah Outlet

Jawa, Bali & Nusa Tenggara (termasuk Jadeta)	55%
Indonesia Timur	17%
Sumatra	17%
Kalimantan	11%

<i>Cover Story</i>	ii	Struktur Organisasi	66
<i>Agility for Transformation</i>	1	Struktur Korporasi	68
Kesinambungan Tema	2	Entitas Anak dan Perusahaan Asosiasi	69
Pengantar Laporan Terintegrasi	3	Profil Dewan Komisaris	70
Ringkasan Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	6	Profil Direksi	74
Ringkasan Kinerja Keberlanjutan 2019	8	Profil Dewan Pengawas Syariah	77
Ikhtisar Penting 2019	10	Profil Komite-Komite Dewan Komisaris	
		Komite Audit	78
		Komite Manajemen Risiko	80
		Komite Nominasi dan Remunerasi	81
		Profil Manajemen Senior	82
		Komposisi Kepemilikan Saham	88
		Profil Pemegang Saham Mayoritas	90
		Kronologi Pencatatan Saham dan Perubahan Jumlah Saham	91
		Kronologi Pencatatan Efek Lainnya	96
		Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	103
KILAS KINERJA 2019	14		
Ikhtisar Data Keuangan Penting	16		
Ikhtisar Saham	18		
Struktur Pemegang Saham	20		
Ikhtisar Obligasi	21		
Peristiwa Penting 2019	22		
Penghargaan dan Pengakuan	26		
LAPORAN MANAJEMEN	28	SUMBER DAYA MANUSIA	104
Laporan Dewan Komisaris	30	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	106
Laporan direksi	38	Manajemen Rekrutmen	109
Tanggung Jawab Laporan Tahunan Terintegrasi		Pengembangan Sumber Daya Manusia	110
Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 PT BFI Finance Indonesia Tbk	46	Pengelolaan Kinerja	112
Surat Pernyataan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 PT BFI Finance Indonesia Tbk	47	Pengembangan Karier	113
		Kesejahteraan Karyawan	114
		Hubungan Industrial	116
		Kesehatan dan Keselamatan Kerja	116
		Teknologi Pendukung Human Capital	117
		Demografi Karyawan	118
PROFIL PERUSAHAAN	50	UNIT PENDUKUNG BISNIS	122
Informasi Umum Perusahaan	52	Teknologi Informasi	124
Visi dan Misi Perusahaan	53	Pengembangan Jaringan dan Operasional	128
Riwayat Singkat Perusahaan	54	Pelayanan Konsumen	130
Jejak Langkah	56		
Nilai-Nilai Dasar dan Budaya Perusahaan	58		
Identitas Perusahaan	60		
Bidang Usaha	61		
Peta dan Jaringan Operasional	64		

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN **135**

Tinjauan Ekonomi dan Industri	136
Tinjauan Bisnis	138
Pemasaran	146
Tinjauan Kinerja Keuangan	150
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	151
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	166
Laporan Arus Kas Konsolidasian	174
Analisis Rasio Penting	175
Perbandingan Target dan Realisasi 2019	177
Struktur Modal (Kecukupan Modal)	178
Investasi Material atas Barang Modal	179
Peristiwa Setelah Periode Pelaporan	179
Dividen	180
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	180
Investasi, Divestasi, Merger & Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang atau Modal yang Material	181
Transaksi dengan Potensi Benturan Kepentingan dan Pihak Berelasi	181
Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Perusahaan	182
Perubahan Kebijakan Akuntansi	183
Prospek Bisnis 2020	185

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK **186**

Laporan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	188
Rapat Umum Pemegang Saham	199
Dewan Komisaris	210
Direksi	222
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi	232
Rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi	233
Dewan Pengawas Syariah	239
Komite Audit	243
Komite Manajemen Risiko	249
Komite Nominasi dan Remunerasi	252
Sekretaris Perusahaan	257
Audit Internal	260
Audit Eksternal	264
Sistem Pengendalian Internal	266
Manajemen Risiko	268

Kasus Hukum 2019	273
Sanksi Administratif	281
Akses Informasi dan Komunikasi	282
Hubungan Investor	286
Kepatuhan	287
Kode Etik dan Budaya Perusahaan	288
Kebijakan Antikorupsi	291
Kebijakan Pengadaan	292
Sistem Pelaporan Pelanggaran	295
Aksi Korporasi	296
Opsi Saham	296
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya	297
Pernyataan Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka	298

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN **301**

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	303
Program CSR	305
Kontribusi untuk Pembangunan	312

DATA PENUNJANG PERUSAHAAN **315**

Alamat Outlet	316
---------------	-----

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN **338**

Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019, dan Laporan Auditor Independen	340
---	-----

Pemilihan Topik dalam Laporan	445
Topik Material dan Rantai Pasokan Perusahaan	446
Pelibatan Pemangku Kepentingan	446
Glosarium	448
Referensi Silang SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016 – Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik	449
Indeks Isi GRI (Opsis Inti)	459

KILAS KINERJA 2019

Ikhtisar Data Keuangan Penting	16
Ikhtisar Saham	18
Struktur Pemegang Saham	20
Ikhtisar Obligasi	21
Peristiwa Penting 2019	22
Penghargaan dan Pengakuan	26





Angka-angka dalam tabel dan grafik di bawah ini disajikan dalam miliar rupiah (kecuali disebutkan lain).

TABEL 1_IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN DAN RASIO

Keterangan	2017	2018	2019
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian			
Pendapatan Pembiayaan	3.936	4.893	5.000
Lain-Lain	106	125	241
Jumlah Pendapatan	4.042	5.018	5.241
Bunga dan Keuangan	895	1.036	1.008
Gaji dan Tunjangan	889	1.075	1.217
Umum dan Administrasi	462	542	705
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	303	509	426
Lain-Lain	5	16	793
Jumlah Beban	2.554	3.178	4.149
Laba Sebelum Pajak	1.488	1.840	1.092
Beban Pajak Penghasilan	300	372	380
Laba Tahun Berjalan	1.188	1.468	712
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak	(29)	71	(102)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	1.159	1.539	610
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian			
Kas dan Setara Kas	225	755	660
Piutang Pembiayaan - Bersih	15.175	17.283	17.439
Piutang Lain-Lain - Bersih	414	198	154
Aset Derivatif	0	110	0
Aset Tetap - Bersih	457	530	541
Aset Tak Berwujud - Bersih	20	32	30
Aset Lain-Lain	192	209	266
Jumlah Aset	16.483	19.117	19.090
Pinjaman yang Diterima	6.819	6.900	7.730
Surat Berharga yang Diterbitkan - Bersih	3.909	5.196	3.758
Utang Lain-Lain	851	817	1.522
Jumlah Liabilitas	11.579	12.913	13.010
Ekuitas	4.904	6.204	6.080
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	16.483	19.117	19.090

total pendapatan
▲ 4,4%

Keterangan	2017	2018	2019
Data Saham			
Saham Beredar (juta) *	15.967	15.967	15.967
Laba per Saham Dasar (Nilai Rupiah Penuh) *	79	98	48
Dividen per Saham (Nilai Rupiah Penuh) *	39	49	- **
Rasio-Rasio			
Profitabilitas			
Imbal Hasil atas Rata-Rata Aset (ROAA) ***	10,3%	10,3%	5,7%
Imbal Hasil atas Rata-Rata Ekuitas (ROAE) ****	25,9%	26,4%	11,6%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Pendapatan	29,4%	29,2%	13,6%
Kualitas Aset			
NPF (termasuk Pembiayaan Bersama)	0,95%	1,21%	0,85%
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai terhadap Piutang Pembiayaan yang Dikelola	1,5%	2,1%	1,9%
<i>NPF Coverage</i>	1,6 x	1,7 x	2,3 x
Likuiditas			
Rasio Lancar ^	1,5 x	1,4 x	1,5 x
Solvabilitas			
Rasio Liabilitas terhadap Aset ^^	0,7 x	0,7 x	0,7 x
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas ^^	2,4 x	2,1 x	2,1 x
Rasio <i>Gearing</i> ^^	2,2 x	1,9 x	1,9 x
Rasio Keuangan yang Relevan Lainnya			
<i>Financing-to-Assets Ratio</i> (FAR)	92,1%	90,4%	91,4%
Rasio Modal Sendiri-Modal Disetor (MSMD)	1.228,6%	1.554,1%	1.523,2%
Rasio Beban Operasional-Pendapatan Operasional (BOPO)	64,8%	64,6%	67,1%
Informasi Lainnya			
Jumlah Outlet ^^^	342	401	423
Jumlah Karyawan	9.884	11.171	12.127

* Disajikan kembali sesuai Pemecahan Saham 10-untuk-1 pada Mei 2017

** Menunggu keputusan RUPS 2020

*** Laba Sebelum Pajak / Rata-Rata Aset

**** Laba Tahun Berjalan / Rata-Rata Ekuitas

^ Aset Lancar / Liabilitas Lancar

^^ Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset

^^^ Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas

^^^^ (Pinjaman yang Diterima dan Surat Berharga yang Diterbitkan) / Ekuitas

^^^^^ Terdiri dari 232 cabang (tidak termasuk 45 cabang perwakilan syariah) dan 191 gerai

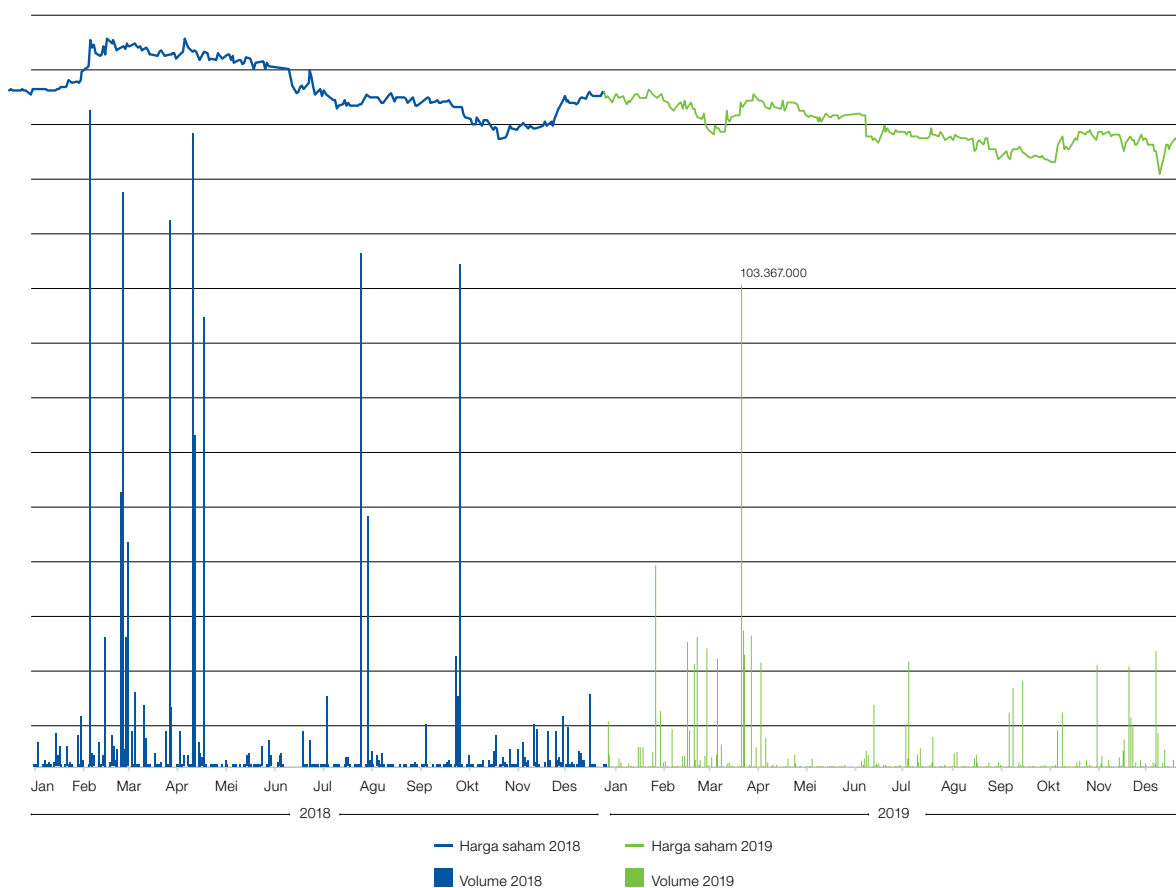
TABEL 2_SEJARAH PENERBITAN SAHAM

Aksi Korporasi	Periode	Saham Baru Diterbitkan (juta)	Saham Ditempatkan (juta)
IPO @Rp5.750,00	April 1990	2,1	10,5
1 untuk 10 Saham Dividen	Januari 1993	1,2	11,7
17 untuk 20 Saham Bonus	Juli 1993	9,9	21,6
1 untuk 3 Saham Dividen	Januari 1994	7,2	28,8
1 untuk 1 Penawaran Umum Terbatas @Rp1.500,00	Mei 1994	28,9	57,7
2 untuk 1 Penawaran Umum Terbatas @Rp1.000,00	Maret 1997	115,4	173,1
2 untuk 1 Pemecahan Saham	September 1997	173,1	346,2
Saham Baru dari Konversi Obligasi Wajib Konversi	Agustus 2002-Mei 2006	414,2	760,4
2 untuk 1 Pemecahan Saham	Agustus 2012	760,3	1.520,7
MESOP Tahap I-Grant Date 1	Mei 2013	5,9	1.526,6
MESOP Tahap I-Grant Date 2	Mei 2014	23,3	1.549,9
MESOP Tahap II-Grant Date 1	Mei 2015	16,0	1.566,0
MESOP Tahap II-Grant Date 2	Mei 2016	30,8	1.596,7
10 untuk 1 Pemecahan Saham	Juni 2017	14.370,4	15.967,1

TABEL 3_RINGKASAN HARGA SAHAM

Periode	Harga Saham						Peredaran Saham di Pasar Reguler				Kapitalisasi Pasar (Rp miliar)	
	Tertinggi (Rp)		Terendah (Rp)		Penutupan (Rp)		Volume Transaksi (unit)		Nilai Transaksi (Rp miliar)			
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Triwulan 1	920	740	660	640	800	660	87.820.000	64.227.500	64,1	42,5	12.773,7	10.538,3
Triwulan 2	900	700	660	615	680	600	15.450.700	55.916.800	11,9	35,6	10.857,6	9.580,3
Triwulan 3	770	620	580	510	615	540	65.283.000	58.956.700	41,5	33,4	9.819,8	8.622,2
Triwulan 4	700	615	500	490	665	560	73.783.900	108.845.100	43,3	61,7	10.618,1	8.941,6

GRAFIK 2_KINERJA SAHAM



Kapitalisasi pasar saham BFI Finance per akhir 2019 mencapai Rp8,9 triliun, turun 16,0% dari Rp10,6 triliun per akhir 2018.

Jumlah volume saham BFI Finance yang diperdagangkan di 2019 mencapai 287.946.100 unit saham atau senilai Rp173,3 miliar.

Perbandingan Kinerja Harga Saham BFI Finance (BFIN) terhadap IHSG 2019

Perdagangan saham BFIN dibuka 2 Januari 2019 dengan harga pembukaan Rp665,00 dan ditutup 30 Desember 2019 dengan harga penutupan Rp560,00 per saham. Ini menunjukkan penurunan 15,8%, sementara IHSG sepanjang 2019 menguat 1,7%.

Struktur Pemegang Saham

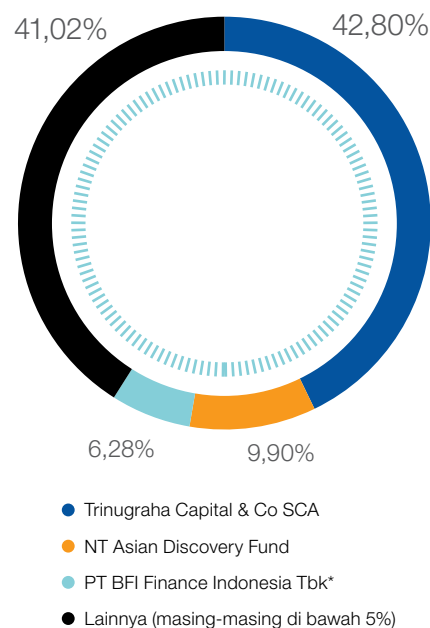
Struktur pemegang saham BFI Finance dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

TABEL 4_STRUKTUR PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham	2019		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Trinugraha Capital & Co SCA	6.835.249.660	170.881.241.500	42,80
NT Asian Discovery Fund	1.581.275.640	39.531.891.000	9,90
PT BFI Finance Indonesia Tbk*	1.002.732.000	25.068.300.000	6,28
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	6.547.858.320	163.696.458.000	41,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.967.115.620	399.177.890.500	100,00

* Hasil pembelian kembali saham Perusahaan sesuai keputusan RUPSLB 15 April 2015

GRAFIK 3_KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM



Riwayat Pembayaran Dividen

Riwayat pembayaran dividen oleh Perusahaan selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

TABEL 5_PEMBAYARAN DIVIDEN SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR

Tahun Buku	2015*	2016*	2017*	2018	2019
Tanggal Rapat Direksi / RUPS	19 November 2015 / 25 April 2016	21 November 2016 / 18 April 2017	21 November 2017 / 17 April 2018	28 Mei 2019 (RUPS)	
Jumlah Dividen per Saham (dalam nilai penuh - mata uang rupiah)					
Interim**	14	15	23	-	***
Final****	7	11	16	49	****
Jumlah	21	26	39	49	-
Rasio Pembayaran	49,7%	48,7%	49,1%	49,9%	****
Tanggal Pembayaran					
Interim**	16 Desember 2015	16 Desember 2016	18 Desember 2017	-	***
Final****	25 Mei 2016	18 Mei 2017	18 Mei 2018	28 Juni 2019	****
Jumlah Dividen (Rp miliar)	323	389	584	733	-

* Disajikan kembali sesuai Pemecahan Saham 10-untuk-1 pada Mei 2017

** Dividen tunai interim diputuskan oleh Rapat Direksi

*** Tidak ada pembayaran dividen tunai interim di 2019

**** Perusahaan menentukan pembayaran dividen final untuk 2019 pada RUPS 2020

Efek Perusahaan yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

TABEL 6_PENERBITAN OBLIGASI SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR

Efek Utang yang Diterbitkan	Tanggal Pencatatan di BEI	Tanggal Efektif	Peringkat Obligasi	Jumlah (Rp Juta)	Nominal yang Diterbitkan (Rp Juta)	Tanggal Jatuh Tempo	Status	
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014	Seri A:	10 Maret 2014	28 Februari 2014 (No.S-121/D.04/2014)	AA-(idn)	500.000	225.000	17 Maret 2015	Lunas
	Seri B:					55.000	7 Maret 2016	
	Seri C:					220.000	7 Maret 2017	
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015	Seri A:	20 Maret 2015	28 Februari 2014 (No.S-121/D.04/2014)	AA-(idn)	1.000.000	345.000	29 Maret 2016	Lunas
	Seri B:					105.000	19 Maret 2017	
	Seri C:					550.000	19 Maret 2018	
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016	Seri A:	26 Februari 2016	28 Februari 2014 (No.S-121/D.04/2014)	AA-(idn)	1.000.000	200.000	5 Maret 2017	Lunas
	Seri B:					142.000	25 Februari 2018	
	Seri C:					658.000	25 Februari 2019	
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016	Seri A:	26 Oktober 2016	17 Oktober 2016 (No.S588/D.04/2016)	AA-(idn)	1.000.000	317.000	5 November 2017	Lunas
	Seri B:					550.000	25 Oktober 2019	
	Seri C:					133.000	25 Oktober 2021	
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017	Seri A:	3 Maret 2017	17 Oktober 2016 (No.S588/D.04/2016)	AA-(idn)	1.000.000	540.000	12 Maret 2018	Lunas
	Seri B:					460.000	2 Maret 2020	Belum jatuh tempo
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017	Seri A:	10 November 2017	17 Oktober 2016 (No.S588/D.04/2016)	AA-(idn)	835.000	335.000	19 November 2018	Lunas
	Seri B:					100.000	9 November 2019	
	Seri C:					400.000	9 November 2020	
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018	Seri A:	7 Maret 2018	17 Oktober 2016 (No.S588/D.04/2016)	AA-(idn)	2.165.000	946.000	16 Maret 2019	Lunas
	Seri B:					253.000	6 Maret 2020	
	Seri C:					966.000	6 Maret 2021	
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018	Seri A:	27 Juni 2018	7 Juni 2018 (No.S-67/D.04/2018)	AA-(idn)	740.000	188.000	6 Juli 2019	Lunas
	Seri B:					552.000	26 Juni 2021	Belum jatuh tempo
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019	Seri A:	25 Februari 2019	7 Juni 2018 (No.S-67/D.04/2018)	A+(idn)	1.000.000	500.000	2 Maret 2020	Belum jatuh tempo
	Seri B:					500.000	22 Februari 2022	

JANUARI

- 7 Penyelenggaraan National Kick-off Meeting 2019 bertema “Agility for Transformation” di ICE BSD City, Tangerang Selatan



- 19 Pengundian Program UBER Milyaran 2018 Periode Akhir Nasional di Bandar Lampung, Lampung

- 24 Peresmian Kantor Cabang Wonogiri, Jawa Tengah

FEBRUARI

- 9
- Peresmian Kantor Cabang Manggarai, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur
 - Peluncuran BFI Srikandi, program pembiayaan dan pelayanan keuangan inklusif khusus bagi pemberdayaan kaum perempuan, di Surabaya, Jawa Timur

- 27 Penyelenggaraan *talk show* bertema “BFI Education >> Pintaria: Kuliah Sambil Kerja, Bisa!” bersama pembicara dari Pintaria.com, Zanetti Sugiharti, di BFI Tower, BSD City

MARET

- 2 Penyelenggaraan “Road to BFI RUN 2019” dan *run clinic* di AEON Mall BSD City

APRIL

- 7 Penyelenggaraan “BFI RUN 2019” dengan titik *start* dan *finish* di AEON Mall BSD City, diikuti oleh sekitar 6.000 pelari untuk kategori 21,1K (*Half Marathon*) Nasional, 10K Nasional, dan 5K Nasional



MEI

- 5 Serah terima *Grand Prize* Program UBER Milyaran 2018 (hasil Pengundian Periode Akhir Nasional) kepada pelanggan Cabang Jambi
- 10 Penandatanganan perubahan Perjanjian Sindikasi Fasilitas Pinjaman Berjangka dari USD55 juta menjadi USD200 juta dari empat bank (Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank, dan ANZ) di Singapura
- 25 Penyelenggaraan seremoni kegiatan CSR “Gerakan 1000 Seragam dan Alat Tulis Sekolah” bagi 1.000 siswa di 12 SD daerah Sintang, Kalimantan Barat, dan buka puasa bersama para siswa, orang tua siswa, kepala sekolah, dan guru

- 28 RUPST dan RUPSLB 2019 serta Paparan Publik Tahunan di Hotel The Dharmawangsa Jakarta



- 29 Konferensi pers dan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia (ILUNI FTUI) dan BFI Finance untuk proyek “Sekolah Indonesia Cepat Tanggap” (SICT) dan sanitasi air bersih di Palu, Sulawesi Tengah

JUNI

- 21 Penyelenggaraan *Leaders Talk* bertema “Digital Communication: How to Communicate Effectively in Today’s Generation Workplace” bersama Becky Tumewu, *founder* dari TALKINC., di BFI Tower, BSD City



JULI

- 1 Peresmian sub-branch Digital Channel – Unit Digital Processing (UDP) di Kantor Cabang Surabaya, Jawa Timur
- 20 Pengundian tahap I “Semarak Kemilau BFI”, program undian bagi konsumen yang berhadiah miliaran rupiah, di Pekanbaru, Riau
- 30 Penyelenggaraan “BFI GeekCreathon 2019” bertema “Big Data & AI in Financial Services Business” di Universitas AMIKOM Yogyakarta



31 Juli - 2 Agustus

Penyelenggaraan “BFI Educational Trip 2019” bagi para siswa SD berprestasi dari daerah Sintang, Kalimantan Barat, dengan mengunjungi beberapa tempat wisata edukasi di Jakarta

AGUSTUS

- 3** Pengundian tahap II “Semarak Kemilau BFI” di Balikpapan, Kalimantan Timur



- 24** Pengundian tahap III “Semarak Kemilau BFI” di Manado, Sulawesi Utara

SEPTEMBER

- 1** Partisipasi dalam “Parade Simpatik Hari Pelanggan Nasional 2019” yang diselenggarakan oleh Frontier Group saat *Car Free Day* di Jakarta



- 2** Peresmian perpindahan Kantor Cabang Mataram 2 ke gedung baru dan berubah menjadi Kantor Cabang Mataram Barat, Nusa Tenggara Barat

- 14** Pengundian tahap IV dan terakhir “Semarak Kemilau BFI” di Bekasi, Jawa Barat

OKTOBER

- 2** Penyelenggaraan *talk show* program “BFI 4 U” bertema “Share to Care” bersama pembicara dari The Body Shop Indonesia, Dita Agustia, di BFI Tower, BSD City

- 17** Penyelenggaraan *Leaders Talk* bertema “Self Development from Within” bersama Edhie Sarwono, Direktur PT United Tractors Tbk, di BFI Tower, BSD City

- 18-19** Penyelenggaraan pelatihan bisnis mikro (UMKM) dan bazar aneka produk bertema “#SelaluAdaJalan Awali Usaha dari Hal Sederhana” kerja sama dengan komunitas UMKM PontiMarket di Pontianak, Kalimantan Barat





- 25** Peresmian selesainya proyek “Sekolah Indonesia Cepat Tanggap” (SICT) dan seremoni peletakan batu pertama dimulainya proyek sanitasi air bersih di Palu, Sulawesi Tengah



- 28** Penyelenggaraan Program Edukasi Literasi Keuangan 2019 bertema “Membangun Pola Pikir Keuangan yang Sehat” di SMA Charitas, Jakarta

NOVEMBER

- 7**
- Peresmian *sub-branch* Digital Channel – Unit Digital Processing (UDP) di Kantor Cabang Bekasi, Jawa Barat
 - Meraih penghargaan Silver Achievement dalam “Indonesia Operational Excellence Conference and Award (OPEXCON) Project Competition 2019” kategori *Service* dari majalah *SHIFT Indonesia* di Jakarta
- 16** Peresmian proyek CSR berupa renovasi perpustakaan dan fasilitas toilet sekolah di salah satu SD Negeri di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bekerja sama dengan para relawan dari Universitas Mercu Buana Jakarta



DESEMBER

- 3** Penyelenggaraan “BFI Agile Thought Community (BATIC) Meetup” bersama Joshua Partogi, Professional Scrum Master & Trainer, di BFI Tower, BSD City



- 18** Peresmian *sub-branch* Digital Channel – Unit Digital Processing (UDP) di Kantor Cabang Jakarta Timur
- 19** Peresmian Kantor Cabang Pemalang, Jawa Tengah
- 20** Penyelenggaraan “Wonder Mom Day” dan *Parenting Talk Show* bertema “Edukasi Seksualitas kepada Anak Bukan Hal Tabu” dengan pembicara Anna Surti Ariani, S.Psi., M.Si., Psikolog
- 27** Peresmian Kantor Cabang Pati, Jawa Tengah
- 31** Peresmian Kantor Cabang Balikpapan 2, Kalimantan Timur



Indonesia Millennials Top Brand Award 2019

1st Millennials Choice in Vehicle Financing Product Category

Majalah *Warta Ekonomi*, 25 Januari 2019 di Jakarta

Indonesia Digital Innovation Award 2019

Innovative Company in Providing Sharia Digital Service Platform

Majalah *Warta Ekonomi*, 22 Februari 2019 di Jakarta

Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2019

Silver Winner kategori "Brand Visual Identity"

Majalah *PR INDONESIA*, 28 Maret 2019 di Bandung

HR Excellence Award 2019

- Rating AA kategori *HR Technology*
- Rating A kategori *HR Transformation*

Majalah *SWA* bekerja sama dengan Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Bank Mandiri, 10 April 2019 di Jakarta

Indonesia Financial Top Leader Award 2019

Kategori Pembiayaan Mobil

Majalah *Warta Ekonomi*, 30 April 2019 di Jakarta

Infobank 8th Digital Brand Awards 2019

- Peringkat 1 Kategori Perusahaan Pembiayaan (Multifinance) Aset Rp10 Triliun ke Atas
- Peringkat 2 Best Overall Kategori Perusahaan Pembiayaan (Multifinance)

Infobank dan *Isentia Indonesia*, 16 Mei 2019 di Jakarta

Indonesia's 100 Most Valuable Brands 2019

Brand Finance Indonesia dan majalah *SWA*, 12 Juni 2019 di Jakarta

HR Asia Awards Indonesia 2019

"Best Companies to Work for in Asia 2019"

Majalah *HR Asia*, 17 Juni 2019 di Jakarta

Indonesia Corporate PR Award 2019

Kategori "Top 3 Perusahaan Pembiayaan Terpopuler 2019"

Majalah *Warta Ekonomi*, 26 Juli 2019 di Jakarta

Top Finance 2019

Kategori "Top Multifinance 2019" kelompok aset Rp10–20 triliun

Majalah *TopBusiness*, 28 Agustus 2019 di Jakarta

The Best Contact Center Indonesia 2019

- "The Best Telesales Teamwork"
- Silver Winner kategori "Telemarketing Sales Operation Outbound"

Indonesia Contact Center Association (ICCA), 10 September 2019 di Jakarta

Infobank 15th Multifinance Awards 2019

- Perusahaan Multifinance dengan "Kinerja Keuangan Sangat Bagus Tahun 2018"
- Peringkat kedua kategori "Perusahaan Pembiayaan Beraset Rp10 Triliun ke Atas" se-Indonesia

134-185

analisis dan
pembahasan manajemen

186-299

tata kelola perusahaan
yang baik

300-313

tanggung jawab
sosial perusahaan

314-337

data penunjang
perusahaan

338-443

laporan keuangan
tahunan



- Trofi Platinum untuk Perusahaan Multifinance dengan Kinerja Keuangan Sangat Bagus selama Sepuluh Tahun Berturut-turut (2009–2018)
- Penghargaan Khusus “The Most Efficient Finance Company” kategori perusahaan pembiayaan beraset Rp10 triliun ke atas
- Penghargaan Khusus “The Biggest Leasing Financing” sebagai perusahaan pembiayaan dengan pencapaian terbaik di bidang usaha Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*)

Majalah *Infobank*, 19 September 2019 di Jakarta

Indonesia Multifinance Company of the Year 2019

- “Outstanding Financial Performance for Multifinance Company with Assets between Rp10–20 Trillion”
- “Top 5 Consumer Choice for Car Multifinance”

Majalah *Warta Ekonomi*, 4 Oktober 2019 di Jakarta

The 11th IICD Corporate Governance and Award

- “Top 50 Big Capitalization Public-Listed Company” dengan Praktik Tata Kelola Perusahaan (GCG) Terbaik

- Trofi “Best Equitable Treatment of Shareholders”

Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), 14 Oktober 2019 di Jakarta

Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within Award 2019

Kategori “Financing Institution”

Majalah *SWA* dan *NBO Indonesia*, 29 Oktober 2019 di Jakarta

Forbes Best of the Best Awards 2019

- “The Top 50 Listed Companies for 2019”
- “Trifecta Award for Winning Three Years in a Row”

Majalah *Forbes Indonesia*, 30 Oktober 2019 di Jakarta

Universitas Indonesia (UI) Award 2019

Kontribusi di Bidang Pengabdian Masyarakat (Sekolah Indonesia Cepat Tanggap)

Universitas Indonesia, 1 November 2019 di Jakarta

Perusahaan Pembiayaan Terbaik 2019

Peringkat 3 kategori aset di atas Rp5 triliun

APPI, 6 November 2019 di Jakarta

Indonesia Operational Excellence Conference and Award (OPEXCON) Project Competition 2019

Silver Achievement kategori “Service”

Majalah *SHIFT Indonesia*, 7 November 2019 di Jakarta

Indonesian Employers of Choice Awards 2019

Majalah *SWA* dan *Korn Ferry Indonesia*, 21 November 2019 di Jakarta

Top 20 Financial Institutions 2019

“The Best Performing Multifinance 2019 Based on Financial Performance 2017-2019, Category Assets Above Rp10 Trillion”

The Finance (majalah digital dari Infobank Group), 11 Desember 2019 di Jakarta

LAPORAN MANAJEMEN

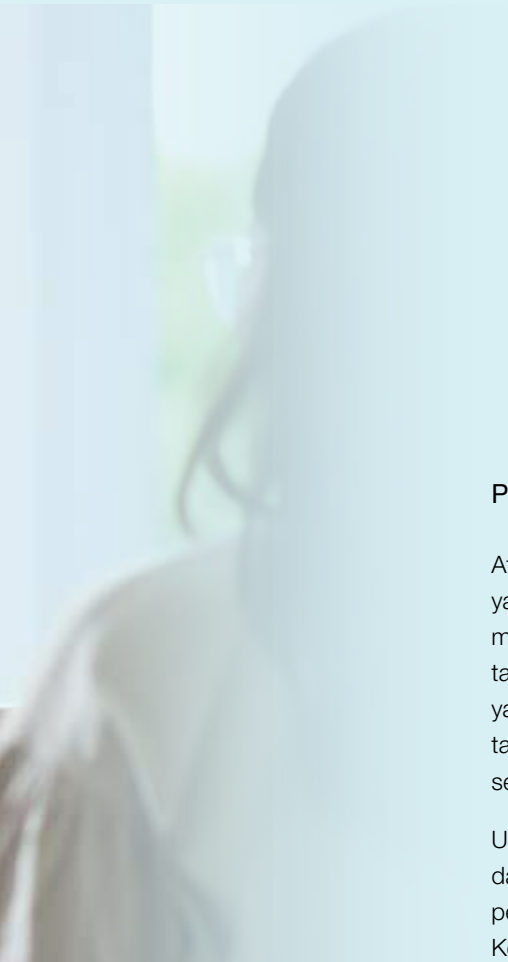
Laporan Dewan Komisaris	30
Laporan direksi	38
Tanggung Jawab Laporan Tahunan Terintegrasi	
Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 PT BFI Finance Indonesia Tbk	46
Surat Pernyataan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 PT BFI Finance Indonesia Tbk	47





Kusmayanto Kadiman:

“... Inilah yang membuat kami mampu melaju dengan kecepatan dan ketahanan dalam industri multifinance dan dalam arus digitalisasi yang berdampak pada semua aspek.”



Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Atas nama Dewan Komisaris, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyaksikan keberhasilan BFI Finance menutup 2019 dengan sukses dan menjadi semakin kuat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang tahun. Kami mengapresiasi manajemen yang baik dari Direksi, yang berhasil menginovasi bisnis untuk mengatasi tantangan tersebut. Kami yakin, Perusahaan siap bersaing di era digital yang segalanya bergerak dengan cepat dan konstan ini.

Untuk dapat terus tumbuh, BFI Finance perlu membekali diri dengan energi dan sumber daya baru demi meningkatkan ketangkasan bisnisnya. Berbagai penyesuaian diperlukan untuk menanggapi tantangan dan perubahan. Kemampuan Perusahaan untuk melaju secara adaptif membutuhkan vitalitas dan semangat untuk senantiasa memberikan kinerja terbaik dalam segala situasi.

Faktor penggerak bisnis yang utama di 2019, sebagaimana tercermin dari tema laporan yaitu “Agility for Transformation”, adalah energi yang dibangkitkan dalam BFI Finance sebagai badan usaha yang matang, dengan memanfaatkan pengalaman bisnis yang telah terbukti mampu menghadapi berbagai kondisi ekonomi di Indonesia. Inilah yang membuat kami mampu melaju dengan kecepatan dan ketahanan dalam industri multifinance dan dalam arus digitalisasi yang berdampak pada semua aspek.

Tinjauan Industri Pembiayaan

Sejak paruh kedua 2018, tekanan pada pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang pada umumnya dan Indonesia khususnya masih menjadi faktor yang dominan pada 2019. Faktor-faktor utama pada 2019, antara lain, perang dagang yang berkepanjangan antara AS dan Tiongkok, berdampak pada sejumlah ekonomi, terutama yang sangat bergantung pada ekspor. Kebijakan Federal Reserve AS untuk memangkas suku bunga acuannya menyebabkan berbagai mata uang negara berkembang terapresiasi, termasuk di Indonesia, dan memberatkan kinerja ekspor mereka.

Dari dalam Indonesia, tantangan bagi pemerintah saat ini—pasca-pemilihan umum April 2019—adalah bagaimana menggerakkan ekonomi dengan memanfaatkan momentum dari proyek-proyek pembangunan infrastruktur berskala besar untuk memberikan hasil yang diharapkan. Namun, di luar ekspektasi, terjadi penurunan dalam permintaan untuk barang modal, penjualan kendaraan bermotor, dan belanja konsumen. Akibatnya, ekonomi Indonesia tumbuh 5,02% pada 2019, lebih rendah dari tingkat pertumbuhan 2018 sebesar 5,17%. Stagnasi pertumbuhan PDB ini berdampak pada industri perbankan dan multifinance. Pinjaman macet di 2019 juga secara umum meningkat, karena banyak industri harus berjuang dengan adanya perlambatan ini.

Mempertimbangkan itu semua, kami gembira melihat BFI Finance melakukan inovasi untuk memperluas jaringannya dan meningkatkan produktivitasnya melalui pengembangan teknologi, digitalisasi proses pembiayaan, dan peningkatan pengelolaan risiko bisnis, sehingga dapat mempertahankan pertumbuhan pada segmen-segmen yang lebih menguntungkan dan dengan risiko yang dapat diterima.

Kinerja Operasional dan Keuangan

Di tengah perlambatan ekonomi di 2019, Direksi dan manajemen dapat memfokuskan upaya bisnis Perusahaan pada produk-produk dengan imbal hasil keuangan yang lebih baik. Dengan demikian, pertumbuhan Perusahaan dapat dipertahankan meskipun persaingan bisnis semakin ketat.

Akibat turunnya kualitas kredit secara umum di industri perbankan dan multifinance sepanjang 2019, BFI Finance secara bijak memanfaatkan jaringan operasionalnya yang luas untuk menyalurkan produk-produk pembiayaannya ke sektor dan segmen geografis yang dianggap berpotensi pertumbuhan tinggi dalam jangka panjang. Dengan demikian, meskipun pertumbuhan portofolio Perusahaan lebih lambat dibandingkan 2018, hal ini diimbangi dengan kualitas portofolio kredit yang lebih baik dan margin laba yang relatif lebih tinggi.

Evaluasi Kinerja Direksi

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris mengapresiasi kepemimpinan Direksi dalam mengarahkan bisnis Perusahaan untuk meraih profitabilitas yang tinggi, mengingat banyaknya perubahan fundamental yang terjadi pada 2019. Dewan Komisaris menilai strategi dan rekomendasi yang diambil dalam mengembangkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kualitas portofolio, produktivitas pinjaman, efisiensi operasional, dan penagihan melalui manajemen data yang lebih baik tidak hanya positif, namun juga tepat waktu.

Kami memandang baik upaya Direksi dalam menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk mendapatkan bisnis baru, serta langkah-langkah strategis lainnya untuk memperkuat kinerja jaringan dan pengembangan sumber daya manusia. Direksi juga telah menerapkan manajemen risiko secara keseluruhan, terbukti melalui keberhasilan dalam menjaga NPF secara sehat pada 0,85%, dibandingkan dengan rata-rata industri multifinance sebesar 2,40% pada 2019.

Sebagai pengakuan atas keunggulan Direksi dalam kepemimpinannya, di 2019 BFI Finance menerima sejumlah penghargaan bergengsi, antara lain, Infobank Multifinance Award 2019 sebagai Perusahaan Multifinance dengan Kinerja Keuangan Sangat Baik pada 2018 dan untuk 10 tahun berturut-turut (2009-2018),

Peringkat 3 Teratas dalam kategori “Perusahaan Multifinance dengan Aset di Atas Rp10 Triliun” beserta dua penghargaan khusus lainnya dari majalah *Infobank*; HR Asia Award Indonesia sebagai “Best Companies to Work for in Asia 2019” selama tiga tahun berturut-turut dari majalah *HR Asia*; “Indonesia’s 100 Most Valuable Brands 2019” dari Brand Finance Indonesia dan majalah *SWA*; Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2019 dalam kategori “Brand Visual Identity” dari majalah *PR INDONESIA*; “The Top 50 Listed Companies for 2019 and Trifecta Award for Winning Three Years in a Row” dari majalah *Forbes Indonesia*; serta Peringkat 3 Teratas di The Best Multifinance 2019 untuk kategori aset di atas Rp5 triliun dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Penghargaan-penghargaan ini mencerminkan keunggulan BFI Finance

sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terkuat dan terkemuka di Indonesia.

Terkait kasus hukum yang Perusahaan hadapi yang melibatkan pemegang saham terdahulu, kami menggarisbawahi bahwa seluruhnya telah berhasil diselesaikan melalui kesepakatan bersama dari seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, operasi dan pengembangan bisnis Perusahaan dapat berlanjut sesuai rencana, dan Perusahaan tetap dapat melayani seluruh pemangku kepentingannya. Oleh karena itu, kami sangat menghargai upaya Direksi dan manajemen dalam mengantisipasi, menangani, dan akhirnya menyelesaikan kasus-kasus hukum tersebut dengan hasil yang baik bagi bisnis Perusahaan.

“Dewan Komisaris mengapresiasi kepemimpinan Direksi dalam mengarahkan bisnis Perusahaan untuk meraih profitabilitas yang tinggi, mengingat banyaknya perubahan fundamental yang terjadi pada 2019.”

DEWAN KOMISARIS, kiri ke kanan:

- | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| 1 | Johanes Sutrisno
Komisaris (Independen) | 5 | Cornellius Henry Kho
Komisaris |
| 2 | Emmy Yuhassarie
Komisaris (Independen) | 6 | Dominic John Picone
Komisaris |
| 3 | Kusmayanto Kadiman
Presiden Komisaris | 7 | Sunata Tjiterosampurno
Komisaris |
| 4 | Alfonso Napitupulu
Komisaris (Independen) | | |



134-185
analisis dan
pembahasan manajemen

186-299
tata kelola perusahaan
yang baik

300-313
tanggung jawab
sosial perusahaan

314-337
data penunjang
perusahaan

338-443
laporan keuangan
tahunan



“Dewan Komisaris mencatat bahwa kinerja BFI Finance telah meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun, baik dalam hal keuangan maupun kepatuhan dan penerapan tata kelola perusahaan.”

Kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dewan Komisaris mencatat bahwa kinerja BFI Finance telah meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun, baik dalam hal keuangan maupun kepatuhan dan penerapan tata kelola perusahaan. Hal ini juga telah diakui oleh berbagai lembaga eksternal.

Sejalan dengan praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan, Direksi secara teratur melaporkan setiap kemajuan Perusahaan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya, kami memberikan arahan dan rekomendasi serta menjalankan fungsi pengawasan. Perusahaan menggunakan *triple line of defense* melalui pengawasan oleh pihak-pihak internal, juga oleh Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, dan

akhirnya oleh auditor publik yang ditunjuk. Skema pengawasan yang berjalan efektif selama 2019 ini menghasilkan kolaborasi produktif antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengawasi semua aspek.

Komisaris dan Komite Independen di Bawah Kinerja Dewan Komisaris

Tidak ada perubahan pada komposisi Dewan Komisaris di 2019, dan sejalan dengan peraturan yang berlaku, terdapat tiga orang Komisaris Independen sebagai bagian dari Dewan Komisaris Perusahaan. Komposisi tersebut memungkinkan Dewan Komisaris melaksanakan mandat dan tanggung jawab yang ditugaskan untuk mewakili kepentingan minoritas dan eksternal, sesuai

prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam menjalankan tugas kami sepanjang 2019, kami tidak menghadapi halangan dari pihak manapun.

Berdasarkan Anggaran Dasar dan prinsip-prinsip GCG Perusahaan, Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi tentang kegiatan bisnis Perusahaan. Dalam melakukan tugas tersebut, kami dibantu oleh Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

Komite Audit melakukan peninjauan menyeluruh dan cermat atas laporan keuangan Perusahaan dan memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap semua peraturan yang terkait pelaporan keuangan dan proses audit internal dan eksternal, termasuk mengevaluasi kinerja auditor eksternal. Komite Manajemen Risiko memastikan semua risiko yang Perusahaan hadapi telah diidentifikasi dengan tepat dan dimitigasi secara hati-hati untuk mengantisipasi segala potensi bahaya bagi bisnisnya. Komite Nominasi dan Remunerasi memberlakukan dan meninjau sistem nominasi dan remunerasi Perusahaan, dan mencermati cara-cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kualitasnya.

Selain menjalankan tugas dan tanggung jawab rutinnya, anggota Dewan Komisaris juga berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Perusahaan yang terkait dengan kegiatan sosial dan lainnya, yang dilaksanakan di luar lingkup bisnis sebagai bagian dari peran kami dalam upaya pelibatan pemangku kepentingan.

Prospek dan Rencana Bisnis 2020

Setelah terjadinya pelemahan ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir, yang telah menciutkan tingkat kepercayaan korporasi dan menurunkan belanja modal, tampak adanya sentimen positif dari pembicaraan dagang antara AS dengan Tiongkok, yang diharapkan mengarah pada hasil yang baik dan mendorong perekonomian. Kombinasi antara penyelesaian terhadap sengketa tarif dagang dan dukungan kebijakan yang stabil di Tiongkok dapat meningkatkan kepercayaan korporasi dan membuat kelas konsumen di seluruh dunia terus berkembang. Namun, jika ketidakpastian perdagangan masih bertahan dan tarif-tarif baru diterapkan, opsi yang dimiliki bank sentral akan lebih terbatas dibandingkan sebelumnya untuk menanggapi segala gejolak global secara memadai.

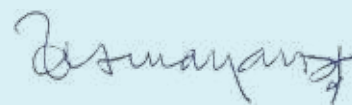
Menyadari tantangan dan peluang bisnis pada 2020 dan seterusnya, Dewan Komisaris telah meninjau rencana bisnis yang telah Direksi rumuskan. Kami mendukung langkah-langkah Direksi untuk melaksanakan rencana tersebut, seraya berharap Direksi dan manajemen dapat terus mencari peluang bisnis baru. BFI Finance tidak hanya harus memperkuat basisnya saat ini yang sudah stabil, tetapi juga harus memperhatikan persaingan yang timbul dari pemain yang non-konvensional—seperti perusahaan rintisan *fintech*— demi memperkuat daya saing bisnis dan pertumbuhannya di masa depan.

Terkait bisnis syariah, yang baru dijalankan di 2018 dan tumbuh dengan baik di 2019 namun kontribusinya belum signifikan terhadap kinerja bisnis secara keseluruhan, kami melihat perlunya terobosan dalam pengembangan produk pembiayaan syariah. Untuk bisnis pinjaman berbasis digital, BFI Finance perlu berupaya lebih untuk menjalin aliansi baru dengan para pemain kunci di lapangan, karena pertumbuhan pasar online akan segera mendominasi belanja rumah tangga dan berpotensi mentransformasi pasar pembiayaan konvensional ke arah digital.

Ucapan Terima Kasih

Mewakili Dewan Komisaris, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Direksi dan semua karyawan atas upaya dan kinerja yang solid di 2019. Kami berterima kasih atas dukungan dari pemegang saham, pelanggan, mitra bisnis, dan seluruh pemangku kepentingan. Kontribusi mereka melalui perannya masing-masing telah membuat Perusahaan berkembang secara tangguh dan menghadirkan manfaat bagi semua, tidak hanya dalam bentuk dukungan keuangan tetapi juga dalam peningkatan kualitas setiap aspek kehidupan. Semoga hal-hal baik yang telah kami kembangkan hingga hari ini dapat membuahkan hasil jangka panjang yang melimpah bagi semua.

Atas nama Dewan Komisaris
PT BFI Finance Indonesia Tbk,



Kusmayanto Kadiman
Presiden Komisaris

Francis Lay Sioe Ho:

“... Kami berfokus pada penguatan neraca Perusahaan, penyelarasan produk-produk yang kami tawarkan, beserta serangkaian inisiatif digital untuk menyempurnakan berbagai proses operasional bisnis kami dari tahap awal hingga akhir.”

Pemegang saham yang terhormat,

Mewakili Direksi, saya dengan bangga menyampaikan Laporan Tahunan Terintegrasi BFI Finance 2019. Laporan ini memuat berbagai kinerja finansial dan operasional kami, beserta tantangan yang telah dihadapi dan pencapaian yang telah kami raih. Seiring langkah kami mengarungi tahun dengan pertumbuhan ekonomi yang lamban dan kondisi yang cukup berat ini, kami berfokus pada penguatan neraca Perusahaan, penyelarasan produk-produk yang kami tawarkan, beserta serangkaian inisiatif digital untuk menyempurnakan berbagai proses operasional bisnis kami dari tahap awal hingga akhir.



Dinamika global ini memperburuk situasi permintaan pasar global dan menekan harga berbagai komoditas internasional.

Untuk Indonesia, harga batu bara yang rendah dan melemahnya daya beli diperburuk oleh sentimen investor yang cenderung menunggu selama masa politik menjelang Pemilu April 2019. Bank Indonesia menurunkan *7-Day (Reverse) Repo Rate*-nya sebanyak empat kali di paruh kedua 2019, dari 6% menjadi 5%, sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tren global yang melambat. Meski begitu, PDB Indonesia tumbuh 5,02% pada 2019, sementara inflasi terjaga pada 2,72%, dalam target 2,50-3,00% dan lebih rendah dibandingkan di 2018.

Di 2019, Rupiah menguat terhadap banyak mata uang asing, termasuk dolar AS, sebagian berkat stabilnya tingkat inflasi dan penurunan drastis dalam defisit neraca perdagangan 2019 dibandingkan di 2018.

Tinjauan Umum

Perseteruan perdagangan antara AS dan Tiongkok menghambat pertumbuhan global hampir sepanjang 2019, sehingga banyak industri yang menghadapi ketidakpastian. Meskipun ekonomi AS tetap kuat, pemangkasan *Fed Funds Rate* oleh Federal Reserve menunjukkan indikasi pertumbuhan yang melemah. Di sisi lain, tingkat pertumbuhan di Tiongkok turun ke titik terendahnya selama tiga dekade. Perdagangan global melemah, dan konsumsi di negara maju dan berkembang melambat.

Industri multifinance Indonesia tumbuh 3,7% di 2019, turun dari 5,2% di 2018. Jumlah piutang pembiayaan meningkat dari Rp436,3 triliun pada akhir 2018 menjadi Rp452,2 triliun pada akhir 2019. Kualitas pembiayaan membaik seiring NPF turun ke 2,40%, dari 2,71% per Desember 2018. Pertumbuhan industri multifinance yang lamban ini disebabkan oleh melemahnya penjualan dan permintaan untuk kendaraan mobil, meskipun regulator telah berupaya menerapkan persyaratan uang muka yang lebih rendah untuk mendorong pertumbuhan.

DIREKSI, kiri ke kanan:

- 1 Sudjono
Direktur Keuangan
- 2 Francis Lay Sioe Ho
Presiden Direktur
- 3 Andrew Adiwijanto
Direktur Operasional
dan Sumber Daya Manusia
- 4 Sutadi
Direktur Bisnis
- 5 Sigit Hendra Gunawan
Direktur Risiko Perusahaan
(Independen)



134-185
analisis dan
pembahasan manajemen

186-299
tata kelola perusahaan
yang baik

300-313
tanggung jawab
sosial perusahaan

314-337
data penunjang
perusahaan

338-443
laporan keuangan
tahunan



Di 2019, *fintech* mengalami pertumbuhan yang pesat, didominasi oleh *peer-to-peer lending*, yang meskipun porsi dari keseluruhan pinjaman masih sangat kecil, tetapi menunjukkan kenaikan signifikan dalam dua tahun terakhir. Akibatnya, para pemain konvensional di industri ini dituntut untuk terus mentransformasi model bisnis mereka ke arah model yang lebih gesit, ulet, dan berfokus pada ranah digital.

Kinerja Keuangan 2019

Di akhir 2019, BFI Finance membukukan jumlah aset sebesar Rp19.090 miliar, relatif stabil dari Rp19.117 miliar yang dibukukan per akhir 2018. Piutang bersih mencapai Rp17.439 miliar dengan NPF yang baik, yakni 0,85% per akhir tahun. Hal ini membuktikan komitmen jangka panjang kami yang kuat untuk terus menjaga kualitas aset di tengah situasi pasar yang menantang sepanjang tahun.

Laba bersih tahun berjalan sebesar Rp712 miliar, turun 51,5% dibandingkan 2018. Di 2019, kami membukukan satu beban luar biasa yang dicatat Perusahaan sebagai Biaya Lain-Lain senilai Rp774 miliar. Beban luar biasa ini merupakan pembayaran kompensasi terkait Kesepakatan Perdamaian dengan PT Aryaputra Teguharta (APT) untuk mengakhiri sengketa hukum yang berlangsung

selama 16 tahun. Kesepakatan Perdamaian ini mengakhiri perseteruan hukum dengan mantan pemegang saham Perusahaan. Rincian kasus hukum ini beserta penyelesaiannya kami sajikan di halaman 273-281 pada bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Upaya ini diperlukan untuk memastikan tidak ada lagi gangguan hukum yang akan mempengaruhi pertumbuhan Perusahaan ke depan. Tanpa adanya beban luar biasa ini, laba bersih mencapai Rp1.484 miliar, 1,1% lebih tinggi dibandingkan dengan Rp1.468 miliar di 2018. Kinerja ini memuaskan, mengingat sulitnya kondisi bisnis sepanjang tahun, melemahnya aktivitas penyaluran pinjaman dan kinerja piutang bersih yang cenderung tak bertumbuh.

Penyaluran pinjaman baru turun 2,9% menjadi Rp15.896 miliar, sehingga pertumbuhan piutang bersih cenderung datar, sementara pembiayaan Mobil Bekas melalui *Dealer Financing* mengalami penurunan terbesar. Hal ini sejalan dengan strategi Perusahaan untuk beralih ke produk-produk *Non-Dealer*. Strategi peralihan ini terbukti berhasil dari segi kualitas aset dan profitabilitas: rasio NPF di 2019 membaik, sementara pendapatan bunga dan laba bertumbuh kendati pertumbuhan portofolio pembiayaan cenderung stagnan. Akibat pergeseran fokus tersebut, imbal hasil dari portofolio pinjaman kami mencapai 20,6%, dibandingkan dengan 20,5% di 2018. Biaya dana mencapai 8,8%,

20 basis poin lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Biaya dana kami bergerak lambat mengikuti tren suku bunga acuan, karena berlakunya suku bunga tetap atas pinjaman bank.

Dengan mempertahankan kualitas proses *underwriting* dan efektivitas dalam penagihan, per akhir Desember 2019, NPF kami mencapai 0,85%, lebih baik daripada NPF rata-rata industri sebesar 2,40%. Di paruh pertama 2019, NPF meningkat karena perlambatan pertumbuhan ekonomi dan dampak dari pemilu, namun keadaan ini berbalik menjelang akhir tahun. Kami sungguh berfokus pada pengelolaan NPF dengan cara memantau setiap cabang dengan NPF tinggi secara cermat, dan memastikan proses *underwriting* dan penagihan yang lebih ketat.

Kinerja Operasional 2019

Kami melanjutkan upaya pengembangan jaringan secara lebih agresif selama semester kedua 2019. BFI Finance saat ini mengoperasikan 423 outlet, yang terdiri dari 232 cabang dan 191 gerai di seluruh Indonesia, tidak termasuk 45 kantor perwakilan syariah di sejumlah cabang. Jaringan operasional kami bertambah sebanyak 18 gerai dan 4 cabang di 2019.

Didorong oleh semangat untuk terus memperbaiki diri, kami melakukan banyak proyek rintisan mini yang kami sebut “*Micro-battles*” untuk menguji sejumlah proses bisnis atau inovasi baru sebelum diterapkan pada skala penuh. Dengan cara ini, kami dapat berinovasi dalam kondisi yang terkendali dan mempercepat waktu implementasi di pasar, dengan cara menyesuaikan proyek tersebut dengan input dan umpan balik yang kami terima selama periode pengujian. Inisiatif ini juga mampu meminimalkan risiko kegagalan sekaligus mempercepat kemampuan pembelajaran organisasi, menciptakan tingkat urgensi, dan mendapatkan dukungan yang memadai dari manajemen dan berbagai unit kerja terkait.

Di 2019, kami mengembangkan sejumlah ide baru dan meningkatkan skala dari beberapa inisiatif yang siap diimplementasikan secara nasional. Di antara inisiatif yang diberlakukan secara nasional di 2019 adalah peningkatan penanganan penagihan melalui peran *telecenter*. Inisiatif ini berkontribusi terhadap perbaikan NPF secara keseluruhan dan kinerja biaya kredit, serta pengembangan berkelanjutan dalam pengelolaan peran agensi yang menjadi andalan kami dalam mendorong peningkatan bisnis *Non-Dealer*.

Teknologi Informasi (TI) turut berperan penting dalam menerapkan strategi organisasi Perusahaan, yang berfokus pada unsur Manusia, Proses, dan Teknologi. Dalam hal proses dan teknologi, berbagai langkah penting telah kami tempuh untuk menjadikan sistem dan teknologi yang ada saat ini menjadi lebih gesit dalam memenuhi tuntutan para pengguna, dan mampu mengimbangi perubahan yang terus terjadi di lingkungan bisnis. Kami mengadopsi metodologi *agile* berbasis Scrum untuk mempercepat proses implementasi, memacu laju inovasi, dan meningkatkan transparansi secara signifikan dalam berbagai proses pengembangan, dan yang terpenting, semakin menyelaraskan interaksi antara bisnis dan TI untuk mewujudkan sasaran Perusahaan. Kami juga memodernisasi sejumlah sistem *legacy* yang bersifat monolitik, bergerak menuju teknologi yang lebih fleksibel dan canggih untuk integrasi operasional yang lebih baik serta meningkatkan proses pengajuan pembiayaan.

Selama beberapa tahun terakhir, kami selalu menegaskan pentingnya peran data bagi bisnis kami dan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam manajemen dan analisis data. Hal ini terus menjadi prioritas kami sebagai organisasi, seiring dengan upaya kami untuk terus menerapkan manajemen data yang lebih baik, tata kelola dan keamanan data yang lebih ketat, dan analisis data yang lebih kokoh. Kami juga telah menerapkan beberapa inisiatif dalam pengelolaan data: (i) Validasi Data dan kerangka kerja Kualitas Data untuk meningkatkan Indeks Kepercayaan terhadap Data, (ii) Model Operasional Tata Kelola Data Perusahaan, dan (iii) membangun *roadmap* Analisis Data, khususnya untuk produk *Non-Dealer*, segmentasi pelanggan dan penilaian perilaku, optimasi penagihan, dan Master Data untuk kontak pelanggan; meningkatkan *contacted rates* dan biaya kredit yang lebih baik. Semua perangkat ini merupakan bagian-bagian dasar bagi organisasi dalam rangka memulai perjalanan kami untuk menjadi perusahaan yang lebih prediktif.

“Kami percaya bahwa ketahanan dan kemampuan berinovasi, dua ciri khas Perusahaan yang telah kami tunjukkan selama bertahun-tahun, akan mempersiapkan kami dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.”

Sumber Daya Manusia

Selain upaya kami untuk terus menumbuhkan budaya kerja yang gesit di tempat kerja, terutama di tengah maraknya gaya hidup digital, kami mempersiapkan SDM kami untuk memiliki pola pikir yang adaptif terhadap perubahan, terbuka untuk inovasi, dan progresif dalam memperoleh pembelajaran. Di 2019, kami mengadakan sejumlah upaya *employer branding* untuk merekrut calon karyawan berpotensi dari generasi muda—talenta yang memahami teknologi dan inovatif di dunia digital—melalui *roadshow* di sejumlah universitas terkemuka di seluruh Indonesia. Kami terus mengembangkan SDM kami melalui penyelenggaraan berbagai program pelatihan dan kepemimpinan, dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing dan ketajaman nalar di ranah digital di semua lapisan organisasi.

Tata Kelola Perusahaan

BFI Finance menjunjung tinggi tata kelola perusahaan sebagai badan usaha yang menjalankan praktik-praktik bisnis yang etis, tata kelola perusahaan yang sehat, dan kesadaran lingkungan dan sosial yang tinggi. Kepercayaan dari para pemangku kepentingan kami sangat penting dalam memastikan keberlanjutan bisnis kami.

Sepanjang 2019, Direksi mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan independen dalam memimpin kegiatan bisnis sehari-hari dan proses pengambilan keputusan bagi Perusahaan. Direksi juga menerima rekomendasi dan dukungan yang solid dari Dewan Komisaris dan komite-komitennya. Hal ini menjadikan kami mampu memenuhi harapan pemegang saham dan memberikan nilai yang bermakna kepada para pemangku kepentingan Perusahaan.

Di 2019, tim Audit Internal dan Manajemen Risiko bekerja secara efektif dan akurat, dan memperoleh dan mencatat sejumlah temuan audit dari operasional bisnis kami. Hal ini menghasilkan pengambilan tindakan yang lebih cepat dan strategis, dan pengambilan keputusan yang dilandaskan pada informasi dan data yang memadai. Kami yakin BFI Finance akan terus mampu menunjukkan keunggulannya dalam tata kelola perusahaan.

Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Perusahaan

Seperti tahun-tahun sebelumnya, BFI Finance terus berkomitmen terhadap peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kualitas pendidikan di masyarakat. Manfaat atas kehadiran kami sebagai badan usaha tidak hanya dirasakan oleh para pelanggan langsung dan pemegang saham Perusahaan, tetapi juga bagi mereka yang berada di sekitar wilayah operasional kami.

Dengan semangat ini, pada 2019, kami memberikan anugerah beasiswa, mengadakan sejumlah program pendidikan, dan berbagai proyek pengembangan infrastruktur sekolah bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, kami menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi usaha kecil, dengan pemanfaatan teknologi

sebagai salah satu topik utamanya. Proyek kesehatan dan sanitasi rutin yang telah berlangsung selama bertahun-tahun juga dilakukan di 2019. Tim CSR kami turut terlibat dalam upaya penanggulangan bencana alam di sejumlah daerah di Indonesia, seperti di Lampung dan Riau.

Prospek dan Strategi Bisnis 2020

Persetujuan AS-Tiongkok yang terus berlangsung akan sangat menentukan wajah ekonomi global di 2020. Kami mengharapkan adanya tanda-tanda pemulihan secara menyeluruh. Sektor industri dan manufaktur diperkirakan tetap datar, tetapi harga komoditas utama kemungkinan akan terus menurun di 2020, sehingga kondisi pasar akan semakin ketat di berbagai industri. Penyebaran *Coronavirus* (COVID-19) telah melumpuhkan pertumbuhan ekonomi di sejumlah kawasan, khususnya Tiongkok sebagai pusat penyebaran virus. Pertumbuhan di 2020 perlu terus diwaspadai karena akan sangat bergantung pada seberapa lama dan luasnya dampak dari COVID-19 ini.

Di 2020, di tengah atmosfer ekonomi global yang sangat reaktif, ditambah ketatnya persaingan di industri multifinance, BFI Finance akan terus melakukan transformasi menyeluruh, dalam perjalanannya menjadi perusahaan yang prediktif, yang dalam jangka panjang akan mampu meningkatkan kualitas

eksekusinya dan semakin memiliki kendali dalam membentuk bisnisnya. Kami tengah beralih dari model bisnis yang konvensional menjadi organisasi yang gesit dan berbasis data, yang melibatkan seluruh karyawan untuk mendorong proses transformasi ini seterusnya. Kami percaya bahwa ketahanan dan kemampuan berinovasi, dua ciri khas Perusahaan yang telah kami tunjukkan selama bertahun-tahun, akan mempersiapkan kami dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Terlepas dari kekhawatiran terkait kinerja makroekonomi dan industri multifinance secara umum, kami tetap optimis bahwa kegesitan kami dalam berbisnis akan membawa kami terus bergerak untuk mencapai kemajuan, peningkatan ke level yang canggih, dan kinerja yang memuaskan sebagaimana yang telah kami tunjukkan dari tahun ke tahun. Kami antusias untuk mengawali dekade baru ini dengan semangat positif, terutama dengan telah diselesaikannya sengketa hukum dengan mantan pemegang saham yang telah membayangi kinerja bisnis Perusahaan selama 16 tahun. Kini kami dapat melangkah ke depan dengan sepenuhnya memfokuskan waktu, energi, dan segala upaya kami untuk menumbuhkan bisnis dan operasional Perusahaan, mencari peluang yang lebih besar, dan membuka kemungkinan tanpa batas untuk menyambut sejumlah mitra baru dalam membangun kemitraan dan aliansi bisnis yang solid.

Ucapan Terima Kasih

Kami menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan kepercayaan tanpa henti dari para pemegang saham, pelanggan, mitra bisnis, dan semua pemangku kepentingan Perusahaan, karena hal ini sangat penting dalam menjadikan BFI Finance lebih tangguh di 2019. Kami berterima kasih atas kontribusi, dedikasi, dan semangat para karyawan kami yang telah memberikan keyakinan yang kuat dalam diri kami untuk memimpin Perusahaan dalam proses transformasi berkelanjutan. Semoga proses ini dapat terus menginspirasi kita semua, dan hasilnya dapat kita banggakan.

Atas nama Direksi
PT BFI Finance Indonesia Tbk,



Francis Lay Sioe Ho
Presiden Direktur

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN TERINTEGRASI 2019 PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 PT BFI Finance Indonesia Tbk telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Terintegrasi Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, Maret 2020

DEWAN KOMISARIS



Kusmayanto Kadiman

Presiden Komisaris



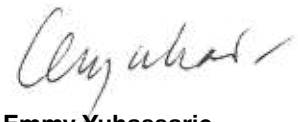
Johanes Sutrisno

Komisaris (Independen)



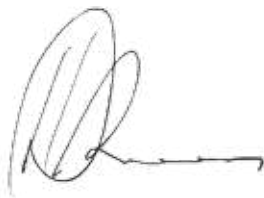
Alfonso Napitupulu

Komisaris (Independen)



Emmy Yuhassarie

Komisaris (Independen)



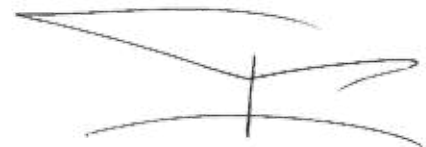
Dominic John Picone

Komisaris



Sunata Tjiterosampurno

Komisaris



Cornelius Henry Kho

Komisaris

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN TERINTEGRASI 2019 PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 PT BFI Finance Indonesia Tbk telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Terintegrasi Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, Maret 2020

DIREKSI



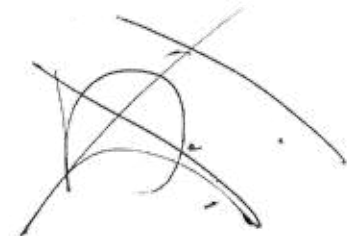
Francis Lay Sioe Ho

Presiden Direktur



Sudjono

Direktur Keuangan



Sutadi

Direktur Bisnis



Andrew Adiwijanto

Direktur Operasional
dan Sumber Daya Manusia



Sigit Hendra Gunawan

Direktur Risiko Perusahaan
(Independen)

DEWAN KOMISARIS



Kusmayanto Kadiman
Presiden Komisaris

Emmy Yuhassarie
Komisaris (Independen)

Johanes Sutrisno
Komisaris (Independen)

Sunata Tjiterosampurno
Komisaris

Alfonso Napitupulu
Komisaris (Independen)

Dominic John Picone
Komisaris

Cornellius Henry Kho
Komisaris

DIREKSI



Francis Lay Sioe Ho
Presiden Direktur

Sigit Hendra Gunawan
Direktur Risiko Perusahaan (Independen)

Sudjono
Direktur Keuangan

Sutadi
Direktur Bisnis

Andrew Adiwijanto
Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia

PROFIL PERUSAHAAN

Informasi Umum Perusahaan	52
Visi dan Misi Perusahaan	53
Riwayat Singkat Perusahaan	54
Jejak Langkah	56
Nilai-Nilai Dasar dan Budaya Perusahaan	58
Identitas Perusahaan	60
Bidang Usaha	61
Peta dan Jaringan Operasional	64
Struktur Organisasi	66
Struktur Korporasi	68
Entitas Anak dan Perusahaan Asosiasi	69
Profil Dewan Komisaris	70
Profil Direksi	74
Profil Dewan Pengawas Syariah	77
Profil Komite-Komite Dewan Komisaris	
Komite Audit	78
Komite Manajemen Risiko	80
Komite Nominasi dan Remunerasi	81
Profil Manajemen Senior	82
Komposisi Kepemilikan Saham	88
Profil Pemegang Saham Mayoritas	90
Kronologi Pencatatan Saham dan Perubahan Jumlah Saham	91
Kronologi Pencatatan Efek Lainnya	96
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	103



Nama Perusahaan

PT BFI Finance Indonesia Tbk
(disingkat BFI Finance)

Kedudukan

Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia

Pendirian Perusahaan

7 April 1982

Dasar Hukum Pendirian

Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 57 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-2091-HT.01.01.TH.82 tanggal 28 Oktober 1982 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 102 tanggal 21 Desember 1982, Tambahan No. 1390

Bursa Efek

Saham BFI Finance dicatat dan diperdagangkan di BEI

Tanggal Pencatatan Saham

16 Mei 1990

Kode Saham

BFIN

Modal Dasar

Rp500 miliar

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Rp399,2 miliar

Kepemilikan Saham

- Trinugraha Capital & Co SCA: 42,80%
- NT Asian Discovery Fund: 9,90%
- PT BFI Finance Indonesia Tbk*: 6,28%
- Publik/Lainnya (masing-masing di bawah 5%): 41,02%

* Hasil pembelian kembali saham Perusahaan sesuai keputusan RUPSLB 15 April 2015

Keanggotaan dalam Asosiasi

- Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)
- Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)
- Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
- Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)
- Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI)

Sekretaris Perusahaan

corsec@bfi.co.id

Hubungan Investor

investor@bfi.co.id

Situs Web

www.bfi.co.id

Call Center

1500018

Media Sosial

 BFI Finance

 @BFIFinance

 bffinance

 PT BFI Finance Indonesia Tbk

 BFI Finance Official

Kegiatan Usaha Utama

Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, Pembiayaan Syariah

Jumlah Outlet: 423 terdiri dari 232 cabang (tidak termasuk 45 cabang perwakilan syariah) dan 191 gerai

Jumlah Karyawan: 12.127

Kantor Pusat

BFI Tower, Sunburst CBD Lot 1.2
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City-Tangerang Selatan 15322
Indonesia

Telepon : (62-21) 2965 0300, 2965 0500

Faksimili : (62-21) 2966 0757, 2966 0758

Menjadi mitra solusi
keuangan yang terpercaya
yang turut berkontribusi
terhadap peningkatan taraf
hidup masyarakat

VISI

MISI

- Menyediakan solusi keuangan yang terpercaya dan efektif kepada pelanggan kami
- Mencapai tingkat pengembalian modal yang superior dan mempertahankan reputasi kami sebagai perusahaan publik yang terpercaya
- Menyediakan lingkungan komunitas yang mendidik para pemimpin masa depan dari organisasi
- Membangun hubungan kerja sama jangka panjang dengan mitra bisnis kami berdasarkan saling percaya dan menguntungkan
- Memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat

Visi dan Misi Perusahaan telah dikaji secara mendalam, sejalan dengan perkembangan bisnis Perusahaan yang dinamis. Visi dan Misi tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, untuk menjadi sasaran dari setiap kegiatan bisnis Perusahaan.

Pendirian

BFI Finance merupakan salah satu pelopor perusahaan pembiayaan di Indonesia. Awalnya dibentuk sebagai PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia, perusahaan kongsi dengan Manufacturers Hanover Leasing Corporation dari Amerika Serikat, Perusahaan didirikan pada 7 April 1982 berdasarkan Akta Notaris No. 57 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-2091-HT.01.01.TH.82 tanggal 28 Oktober 1982 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 102 tanggal 21 Desember 1982, Tambahan No. 1390. Kepemilikan saham Manufacturers Hanover Leasing Corporation pada Perusahaan adalah 70%, sedangkan sisanya dimiliki warga Indonesia.

Perusahaan memperoleh izin usaha lembaga pembiayaan sebagai perusahaan *leasing* dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-038/KM.11/1982 tanggal 12 Agustus 1982.

Pada 1986, PT Bank Umum Nasional dan Essompark Ltd, Hong Kong, mengambil alih kepemilikan PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia di Perusahaan, kemudian mengubah nama Perusahaan menjadi PT Bunas Intitama Leasing Indonesia berdasarkan akta yang dibuat di hadapan Inge Hendarmin, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 17 September 1986, dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-6977.HT.01.04.TH.86 tanggal 7 Oktober 1986 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 94 tanggal 25 November 1986, Tambahan No. 1451.



Perkembangan

Pada 1990, Perusahaan menjadi salah satu perusahaan pembiayaan pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang BEI) dengan kode saham BFIN. Nama dan status Perusahaan disesuaikan menjadi PT Bunas Finance Indonesia Tbk. Perusahaan juga mengubah izin operasinya menjadi perusahaan bisnis *multifinance* berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 493/KMK.013/1990 tanggal 23 April 1990.

Setelah melewati krisis keuangan Asia 1997, Perusahaan berhasil merestrukturisasi utangnya pada 2001 dan mengubah namanya menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk, berdasarkan Akta Notaris No. 116 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebelumnya Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 27 Juni 2001, disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-03668.HT.01.04.TH.2001 tanggal 24 Juli 2001 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 35 tanggal 30 April 2002, Tambahan No. 4195.



Pada 20 Februari 2006, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengamandemen izin usaha Perusahaan melalui Keputusan No. KEP-038/ KM.5/2006 untuk memberlakukan secara surut izin usaha yang sebelumnya diberikan kepada PT Bunas Finance Indonesia Tbk sejak tanggal disetujuinya perubahan nama Perusahaan menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-03668. HT.01.04.TH.2001 tanggal 24 Juli 2001.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 55 tanggal 25 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, mengenai persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-0033646.AH.01.02. TAHUN 2019 tanggal 28 Juni 2019. Sampai dengan Laporan Tahunan Terintegrasi ini diselesaikan, perubahan ini belum diumumkan dalam Lembaran Berita Negara.

BFI Finance Kini

BFI Finance kini termasuk perusahaan pembiayaan besar di Indonesia, dengan jaringan dan cakupan produk terluas, didukung oleh 12.127 karyawan di 232 kantor cabang (tidak termasuk 45 cabang perwakilan syariah) dan 191 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia.

BFI Finance telah menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan, dibuktikan dengan diraihnya berbagai penghargaan dari segi bisnis, antara lain, predikat “Perusahaan Multifinance dengan Kinerja Keuangan Sangat Bagus” dari majalah *Infobank* selama empat belas tahun berturut-

turut (2006–2019). Perusahaan juga mengukir prestasi tersendiri dengan mencetak *hat-trick*, yaitu meraih Peringkat Pertama “Infobank Multifinance Awards” untuk kategori aset di atas Rp10 triliun selama tiga tahun berturut-turut (2016–2018). Di 2019, Perusahaan kembali meraih peringkat tiga besar “Infobank Multifinance Awards” berdasarkan hasil pemeringkatan atau *rating* 176 perusahaan *multifinance* di Indonesia oleh lembaga riset majalah *Infobank* (sumber: majalah *Infobank* edisi “Rating 176 Multifinance 2019” No. 495 – Agustus 2019 – Vol. XLI). Selain penghargaan dalam kinerja bisnis dan keuangan, BFI Finance juga meraih berbagai penghargaan dan pengakuan di bidang-bidang lainnya, seperti manajemen sumber daya manusia, tata kelola perusahaan yang baik, komunikasi publik (*public relations*), dan tanggung jawab sosial perusahaan. Keterangan lengkap mengenai penghargaan dan pengakuan yang diraih Perusahaan selama 2019 disajikan pada bagian Penghargaan dan Pengakuan dalam bab Kilas Kinerja 2019 (halaman 26-27).

Per 31 Desember 2019, Trinugraha Capital & Co SCA, lembaga keuangan yang berbasis di Luxembourg, adalah pemegang saham mayoritas BFI Finance, dengan kepemilikan sebesar 42,80%.

Sejak 2013, kantor pusat Perusahaan berlokasi di BFI Tower, Sunburst CBD Lot 1.2, Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

- Perusahaan didirikan dengan nama PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia
- Memperoleh izin usaha dalam bidang usaha lembaga pembiayaan (perusahaan *leasing*)

1982

- Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) sebanyak 28.829.558 saham

1994

- Amandemen izin usaha Perusahaan pada 20 Februari 2006 untuk mengakomodasi perubahan nama Perusahaan
- Pelunasan seluruh utang sesuai dengan proses restrukturisasi keuangan

2006

1990

- Memperoleh izin operasi untuk menjalankan bisnis *multifinance* yang diperbarui pada 1990
- *Go Public* di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia atau BEI) dengan kode saham BFIN dengan menerbitkan 25% saham baru (2.125.000 lembar) yang ditawarkan ke publik dengan nominal Rp1.000,00 per saham seharga Rp5.750,00 per saham
- Status dan nama Perusahaan berubah menjadi PT Bunas Finance Indonesia Tbk

2001

- Menyelesaikan restrukturisasi keuangan yang menyebabkan perubahan pemegang saham mayoritas
- Nama Perusahaan berubah menjadi **PT BFI Finance Indonesia Tbk**

2007

- Penerbitan obligasi perdana berupa Obligasi BFI Finance Indonesia Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Meraih peringkat 'Baa1(id)' dari Moody's Investors Service

2011

- Trinugraha Capital & Co SCA menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 44,95%
- Meraih peringkat 'A(idn)' dari Fitch Ratings

2016

- Perusahaan meraih peringkat 'AA-(idn)' Outlook Stabil dari Fitch Ratings dari sebelumnya 'A+(idn)' Outlook Positif

2018

- Perusahaan mendapatkan izin dari OJK untuk menjalankan Unit Usaha Syariah dengan penawaran produk yang dipasarkan secara online dan konvensional melalui cabang-cabang syariah di berbagai wilayah Indonesia, dan meluncurkan dua produk pembiayaan syariah perdana untuk perjalanan umrah dan wisata halal
- PT FIT terdaftar di OJK dan mulai beroperasi resmi melalui platform www.pinjammodal.id

2015

- Program pembelian kembali saham yang beredar (*stock buyback*) untuk meningkatkan manajemen permodalan Perusahaan

2017

- Pendirian entitas anak Perusahaan, PT Finansial Integrasi Teknologi (FIT), yang bergerak di bidang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dan berkonsep *peer-to-peer (P2P) lending*

2019

- Perusahaan menyelesaikan seluruh sengketa hukum dengan mantan pemegang saham yang berlangsung sejak 2003



GROW AND IMPROVE CONTINUOUSLY

Giat Memperbaiki Diri secara Berkesinambungan

Definisi

Selalu mengembangkan diri untuk berkontribusi bagi Perusahaan

Nilai ini diterjemahkan ke dalam tiga perilaku utama, yaitu:

- Belajar
- Inovatif
- Proaktif



RESPECT AND CARE

Realisasikan Saling Menghormati dan Peduli

Definisi

Menumbuhkan sikap saling menghargai dan peduli untuk menjaga lingkungan kerja yang positif

Nilai ini diterjemahkan ke dalam tiga perilaku utama, yaitu:

- Hormat
- Solusi Positif
- Peduli

Nilai-Nilai Dasar yang menjadi landasan Budaya Perusahaan ini telah dikaji secara mendalam, sehingga sejalan dengan perkembangan bisnis Perusahaan yang dinamis. Nilai-Nilai Dasar dan Budaya Perusahaan ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi, untuk menjadi pedoman perilaku utama bagi seluruh karyawan dalam mencapai sasaran dari setiap kegiatan bisnis Perusahaan.

TABEL 7_SOSIALISASI DAN INTERNALISASI BUDAYA PERUSAHAAN

Jadwal	Nama Kegiatan	Tempat	Fasilitator
Jan-Des 2019	<i>Town Hall Meeting</i>	Kantor Pusat dan Kantor Cabang	Tim Corporate Culture (kantor pusat) dan staf HC di cabang-cabang
Jan-Des 2019	<i>Vlog Competition</i>	Kantor Pusat dan Kantor Cabang	Tim Corporate Culture (kantor pusat)
Jan-Des 2019	<i>Leaders Inspire</i>	Kantor Cabang	Tim Corporate Culture (kantor pusat)/ Division Head



EXCELLENT SERVICE

Ekstra Layanan kepada Pelanggan Internal dan Eksternal

Definisi

Memberikan pelayanan terbaik untuk kepuasan konsumen internal dan eksternal

Nilai ini diterjemahkan ke dalam tiga perilaku utama, yaitu:

- Sikap Positif
- Responsif
- Profesional



ABSOLUTE INTEGRITY

Absolut dalam Integritas

Definisi

Selalu mengutamakan integritas dalam setiap tindakan untuk menjaga reputasi diri dan Perusahaan yang profesional

Nilai ini diterjemahkan ke dalam tiga perilaku utama, yaitu:

- Jujur
- Konsisten
- Taat



TRUST AND TEAM SPIRIT

Tim Kerja yang Solid dan Saling Percaya

Definisi

Semangat kerja sama dan saling percaya untuk mencapai tujuan bersama

Nilai ini diterjemahkan ke dalam tiga perilaku utama, yaitu:

- Komunikatif
- Kooperatif
- Sinergis

Tujuan

Peserta

Jumlah Peserta

Implementasi nilai-nilai BFI Finance

Nasional (seluruh kantor cabang dan pusat)

377

Implementasi nilai-nilai BFI Finance

Nasional (seluruh kantor cabang dan pusat)

377

Sharing dan motivasi

Staf Cabang, Branch Manager, Area Manager/Regional Manager

10



Logo BFI Finance dibuat untuk mencerminkan identitas dan nilai-nilai dari Perusahaan. Logo tersebut terdiri dari tiga elemen utama, yakni *logogram*, *logotype*, dan nama perusahaan. Dalam penggunaannya untuk keperluan apapun, *logogram* dan *logotype* tersebut tidak dapat dipisahkan. Berbagai konfigurasi penempatan *logogram*, *logotype*, dan nama perusahaan, serta pilihan warna logo yang diperbolehkan, telah dijabarkan dalam dokumen Panduan Identitas Perusahaan di bagian “Identitas Visual Brand” yang dimiliki BFI Finance.

Kegiatan Usaha

Sesuai POJK No. 35/POJK.05/2018 (POJK 35) tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang merupakan pembaruan dari POJK 29, ruang lingkup bisnis Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Pembiayaan Investasi;
- Pembiayaan Modal Kerja;
- Pembiayaan Multiguna; dan
- Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

Ruang lingkup kegiatan usaha tersebut dituangkan dengan cara-cara berikut:

- Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
- Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*);
- *Installment Financing* (pembiayaan dengan angsuran) atau dikenal dengan istilah Pembiayaan Konsumen;
- Fasilitas Modal Usaha atau Fasilitas Dana;
- Anjak Piutang (*with recourse*);
- Pembiayaan proyek, infrastruktur, dan pembiayaan lainnya.

Saat ini kegiatan usaha yang sudah dilaksanakan Perusahaan adalah sebagai berikut:

TABEL 8_KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN

Jenis Kegiatan Usaha	Cara Pembiayaan					
	Sewa Pembiayaan	Jual dan Sewa-Balik	Pembiayaan Konsumen	Fasilitas Modal Usaha/Dana	Anjak Piutang	Pembiayaan Proyek dan Lain-Lain
Pembiayaan Investasi	√	√	√	X	X	X
Pembiayaan Modal Kerja	X	√	X	√	X	X
Pembiayaan Multiguna	√	X	√	√	X	X
Pembiayaan Lainnya	X	X	X	X	X	X

Ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan kembali diubah dengan disetujuinya Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dalam RUPSLB Perusahaan 25 Oktober 2017, yang diaktakan dengan Akta No. 6 tanggal 25 Oktober 2017 *juncto* Akta No. 7 tanggal 25 Oktober 2017, keduanya dibuat di hadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang antara lain memutuskan mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan yaitu penambahan kegiatan usaha pembiayaan Perusahaan berdasarkan prinsip syariah yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-0024031.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 16 November 2017.

Dengan demikian, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan berbasis syariah berdasarkan Pasal 4 POJK No. 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (POJK 10), yang terdiri dari:

- a. Pembiayaan Jual Beli;
- b. Pembiayaan Investasi; dan/atau
- c. Pembiayaan Jasa.

Segmen Usaha

Sehubungan dengan pembagian kegiatan usaha yang dijalankan Perusahaan sebagaimana disebutkan di atas, jenis-jenis kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan segmen adalah sebagai berikut:

Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan Konsumen meliputi pembiayaan mobil baru dan bekas yang dibeli melalui *dealer*, dan pembiayaan dengan agunan mobil bekas dan motor bekas.

1. Pembiayaan Mobil dengan Perantara *Dealer*

Pembiayaan mobil melalui *dealer* telah menjadi bisnis inti di Perusahaan selama lebih dari 20 tahun. Produk yang dipasarkan di hampir semua kantor cabang ini menyediakan fasilitas pembiayaan untuk pengadaan mobil melalui rekanan *dealer*. Jangka waktu pembiayaan antara satu hingga empat tahun dengan suku bunga tetap.

2. Pembiayaan Mobil dan Sepeda Motor *Non-Dealer*

Pembiayaan *non-dealer* diperkenalkan pertama kali pada 2006 untuk melayani kebutuhan para konsumen secara langsung (pemilik mobil dan sepeda motor), juga para pelanggan yang melakukan transaksi *repeat order*, konsumen baru dari referensi pelanggan (program *Customer-Get-Customer*), atau melalui agen penjualan lepas dan *telesales call center* (pemasaran dan penjualan langsung). Target pemasaran Perusahaan adalah kalangan masyarakat berpenghasilan bawah hingga menengah.

Sewa Pembiayaan

Bisnis Sewa Pembiayaan meliputi jasa keuangan yang ditujukan bagi pelanggan perorangan dan badan usaha yang melakukan pembelian atau *sale and leaseback* atas alat-alat berat, mesin-mesin, kendaraan bermotor dan peralatan lainnya, baik untuk kondisi baru maupun bekas. Pelanggan Sewa Pembiayaan di BFI Finance umumnya berasal dari sektor industri pertambangan, perdagangan, konstruksi, jasa, pertanian, manufaktur, transportasi, infrastruktur, dan lain-lain.



Benhi Kowiranata

Pemilik Dealer
Auto Ben Mobilindo,
Baturaja, Lampung

“Sejak mengenal BFI Finance lewat program promosi perusahaan. Perusahaan saya telah menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan BFI Finance, dan saya puas dengan kerja sama ini karena proses pencairan dananya mudah dan cepat. Selain itu, bunga kompetitif dan persyaratan administrasi yang mudah menjadi keunggulan dari BFI Finance dibandingkan dengan perusahaan pembiayaan lainnya.”

Pembiayaan Konsumen Berbasis Syariah

Pembiayaan berbasis syariah mulai dijalankan Perusahaan pada Maret 2018 berdasarkan Surat Salinan Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan PT BFI Finance Indonesia Tbk dari OJK Nomor S-218/NB.223/2018 tanggal 14 Februari 2018. Mengacu pada definisi di POJK 10, Unit Usaha Syariah (UUS) ini adalah unit kerja dari kantor pusat BFI Finance yang berfungsi sebagai induk dari cabang-cabang yang melaksanakan pembiayaan syariah (disebut cabang perwakilan syariah).

Berdasarkan Surat Persetujuan Penggunaan Akad Pembiayaan Syariah PT BFI Finance Indonesia Tbk dari OJK Nomor S-219/NB.223/2018 tanggal 14 Februari 2018, OJK menyetujui UUS BFI Finance untuk menjalankan dan memasarkan penggunaan akad-akad dari pembiayaan berkonsep syariah, yaitu:

1. Akad *Ijarah* untuk pembiayaan umrah;
2. Akad *Ijarah* untuk pembiayaan wisata halal; dan
3. Akad *Murabahah* untuk pembiayaan kendaraan bermotor.

Di 2018, UUS BFI Finance meluncurkan empat produk pembiayaan syariah untuk memfasilitasi kebutuhan konsumen secara langsung; baik perorangan maupun badan usaha; dan kemudian ditambah dengan peluncuran dua produk pembiayaan syariah lainnya di 2019. Keenam produk pembiayaan syariah tersebut terdiri dari:

1. *My Ihram* untuk pembiayaan umrah;
2. *My Safar* untuk pembiayaan wisata halal;
3. *My Ta'lim* untuk pembiayaan pendidikan;
4. *My Hajat* untuk pembiayaan multiguna dan berbagai keperluan jasa, seperti jasa penyewaan rumah atau ruko, renovasi rumah, dan konsultan;
5. *My Cars* untuk pembiayaan kendaraan bermotor roda empat; dan
6. *My Faedah* untuk pembiayaan multiguna dan berbagai keperluan pembelian barang seperti bahan material bangunan, kebutuhan barang rumah tangga, dan barang lainnya yang memiliki manfaat untuk masyarakat.

Seluruh produk pembiayaan di atas ini dipasarkan secara online melalui *microsite* BFI Finance Syariah, <https://syariah.bfi.co.id/>, dan secara konvensional melalui cabang-cabang syariah yang tersebar di 45 lokasi di berbagai wilayah Indonesia.

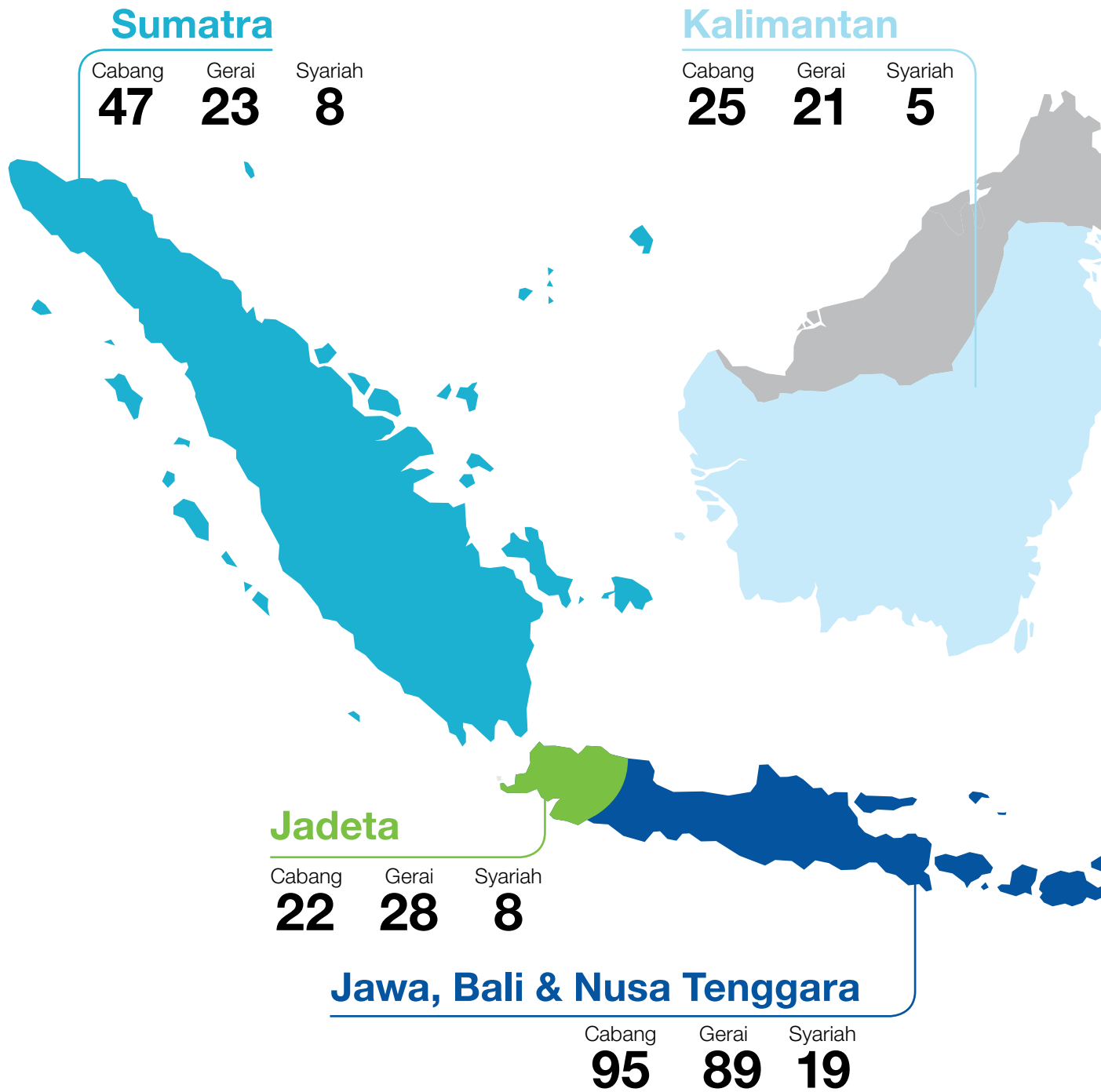
Berdasarkan Pasal 12 POJK 10, BFI Finance sudah membentuk Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah yang diketuai oleh pimpinan UUS dan mempunyai anggota lima orang.

Produk Pembiayaan berdasarkan Jenis Aset

Segmen usaha Pembiayaan Konsumen dan Sewa Perusahaan mencakup portofolio produk berdasarkan jenis aset sebagai berikut:

1. Mobil baru;
2. Mobil bekas;
3. Motor bekas;
4. Alat berat, terdiri dari:
 - Alat berat;
 - Truk dan alat transportasi umum;
 - Mesin;
 - Lain-lain; dan
5. Properti.

Pembahasan lebih lanjut mengenai portofolio produk Perusahaan disajikan dalam bab Analisis dan Pembahasan Manajemen di Laporan Tahunan Terintegrasi ini (halaman 138-145).



Indonesia Timur (Sulawesi, Maluku, Papua)

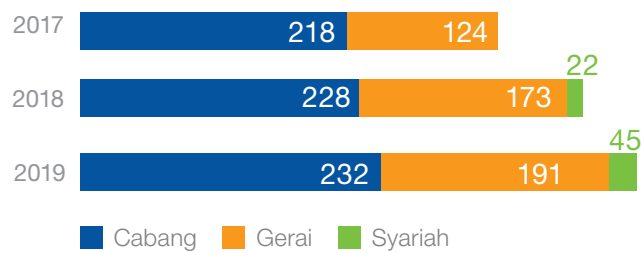
Cabang
43

Gerai
30

Syariah
5

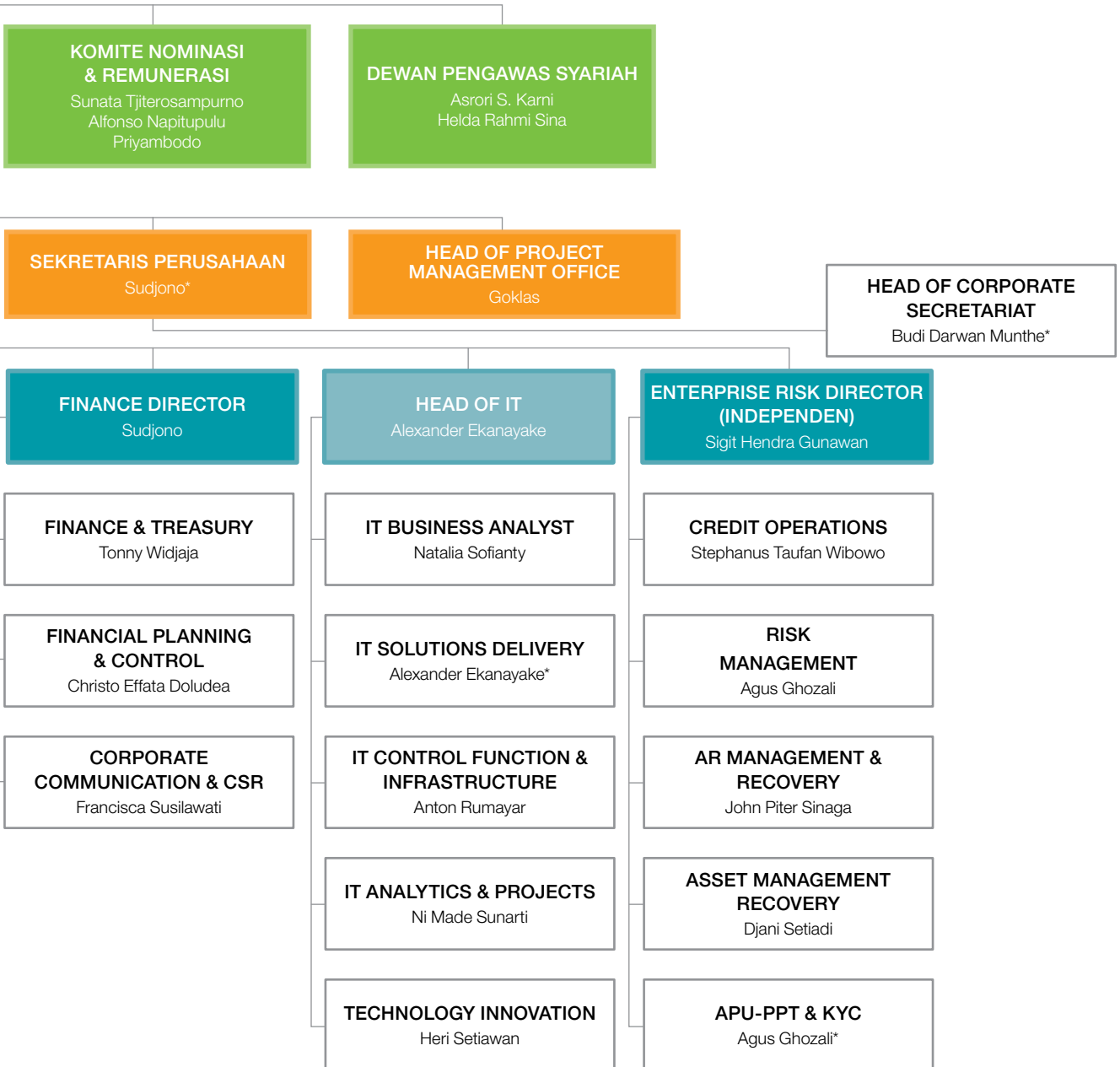


GRAFIK 4_DISTRIBUSI CABANG, GERAI, DAN SYARIAH



Struktur organisasi BFI Finance pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

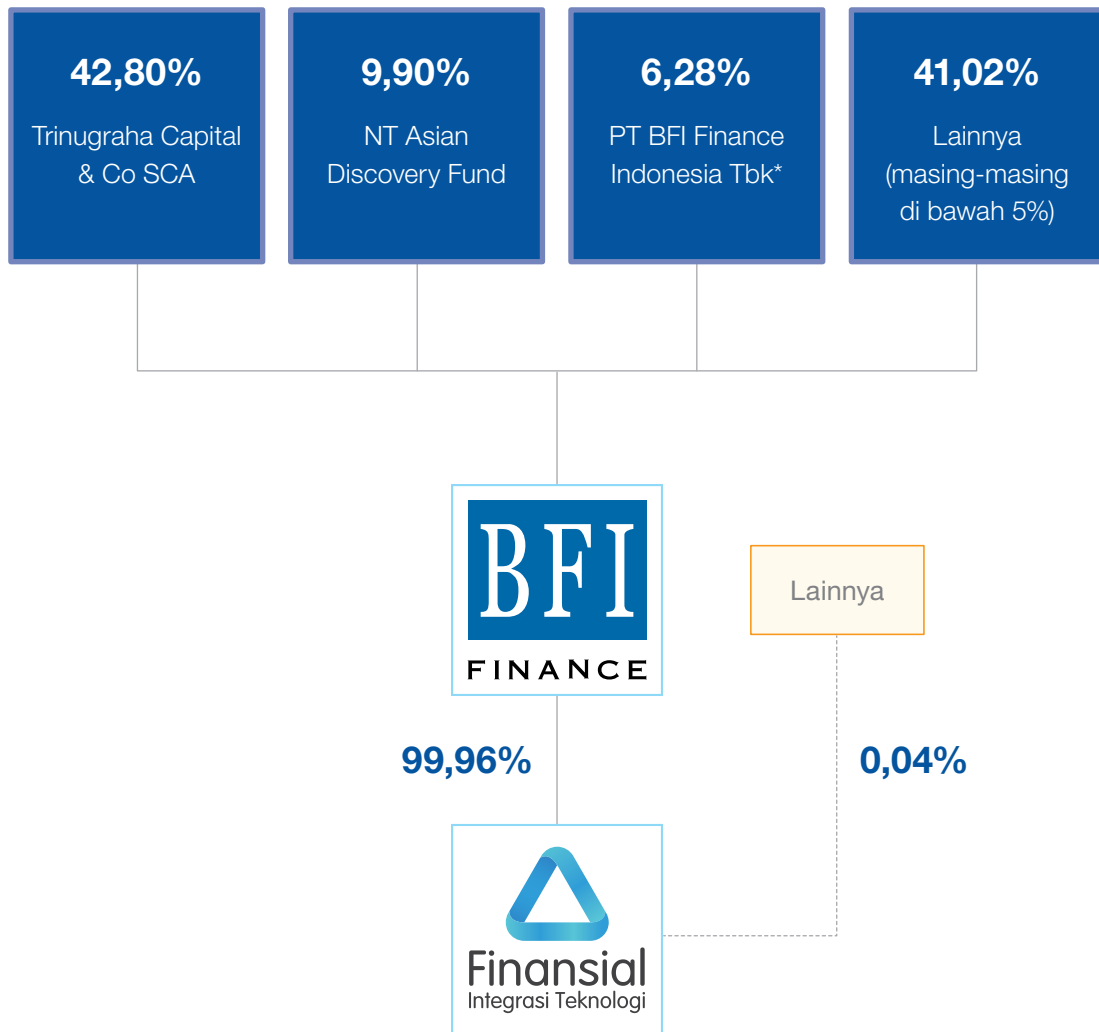




* Jabatan rangkap

** Bergabung sejak 2 Desember 2019

Struktur Korporasi BFI Finance per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:



* Hasil pembelian kembali saham Perusahaan sesuai keputusan RUPSLB 15 April 2015

Entitas Anak

Hingga akhir 2019, BFI Finance memiliki satu entitas anak, PT Finansial Integrasi Teknologi (FIT).

PT Finansial Integrasi Teknologi (FIT)

Alamat Kantor

BFI Tower Lantai 2, Sunburst CBD Lot 1.2,
Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo,
BSD City, Tangerang Selatan 15322

Tanggal Pendirian

15 September 2017

Dasar Hukum Pendirian

Akta Notaris Herna Gunawan, S.H., M.Kn. No. 4 tanggal 15 September 2017, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-0043022.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 29 September 2017.

Bidang Usaha

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, melalui platform <https://pinjammodal.id>

Visi

Menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat Indonesia untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umum

Misi

- Memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat dengan menggunakan teknologi terdepan
- Layanan jasa keuangan yang kompetitif dan praktis untuk digunakan secara luas bagi masyarakat Indonesia
- Tumbuh menjadi perusahaan yang sehat, kuat, dan berintegrasi

Kepemilikan

- PT BFI Finance Indonesia Tbk 99,96%
- Lainnya 0,04%

Surat Tanda Terdaftar OJK

No. S-588/NB.213/2018 tanggal 31 Juli 2018

Jumlah Aset per 31 Desember 2019

Rp19 miliar

Perusahaan Asosiasi

Hingga akhir 2019, BFI Finance tidak memiliki perusahaan asosiasi.



Kusmayanto Kadiman

Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia

Usia: 65 tahun

Domisili: Tangerang, Banten

Beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPST No. 80 tanggal 15 Juni 2011, dan diangkat kembali berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016 untuk periode 2016–2021.

Beliau juga menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Adaro Power, Komisaris PT Tamaris Hidro, Presiden Komisaris PT Setiabudi Investment Management, dan Komisaris PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo).

Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai komisaris dan penasihat di beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam dan pembangkit listrik sejak 2009, Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia periode 2004–2009, Ketua Asian–Europe University Network (ASEA–UNINET) pada 2002–2004, Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2001–2004, Kepala Pusat Pengembangan Teknologi ITB (1998–2001), Kepala Laboratorium Kontrol ITB (1995–1998), Direktur Kelompok Usaha di Jakarta (1993–1995), dan Direktur Pusat Komputer ITB (1990–1993).

Beliau meraih gelar Doctor of Philosophy dari Australian National University, Canberra, Australia, pada 1988, serta Sarjana Teknik Fisika dari ITB pada 1977.



Johanes Sutrisno

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia

Usia: 68 tahun

Domisili: Jakarta, DKI Jakarta

Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPST No. 80 tanggal 15 Juni 2011 dan diangkat kembali berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016 untuk periode 2016–2021, dan juga sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko.

Beliau bergabung dengan BFI Finance sebagai Credit Officer (1982–1991), kemudian menjabat sebagai Direktur (1991–1999) dan Presiden Komisaris (2000–2011).

Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Bentoel Internasional Investama Tbk dari Maret 2010 hingga 31 Maret 2016, Direktur Keuangan PT Carsurin dari April 2007 hingga Juni 2013, bergabung dengan Mutual International Finance Corporation (1980–1982), dan Auditor di SGV, Utomo, Mulia & Co. (1973–1976).

Beliau meraih gelar Master of Business Administration (M.B.A.) dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 2009, dan Sarjana Ekonomi Manajemen (Drs.) dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada 1980.



Alfonso Napitupulu

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia

Usia: 69 tahun

Domisili: Jakarta, DKI Jakarta

Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 80 tanggal 15 Juni 2011, dan diangkat kembali berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016 untuk periode 2016–2021, serta menjadi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Managing Partner Kantor Hukum atau Law Office of Alfonso Napitupulu & Partners, Jakarta sejak 1993, Direktur Utama PT Nana Mandiri Dwikarya sejak 1989, Komisaris Independen PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (BRINS General Insurance) sejak 2015, dan Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Sebelum bergabung dengan BFI Finance, beliau pernah bekerja di Kantor Pengacara Alfonso, Giunseng & Kolopaking, Jakarta (1988–1993), Praktisi *International Lawyer* di Law Office of Bronson, Bronson & McKinnon, San Francisco, California, Amerika Serikat (1984–1985), Kantor Hukum Gani Djemat & Partners (1975–1988), dan Advokat Konsultan Hukum untuk Pasar Modal dan Hak Kepemilikan Intelektual (1976).

Beliau meraih gelar Sarjana Hukum (Perdata) dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada 1975.



Emmy Yuhassarie

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia

Usia: 69 tahun

Domisili: Jakarta, DKI Jakarta

Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPST No. 80 tanggal 15 Juni 2011, dan diangkat kembali berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016 untuk periode 2016–2021, serta menjabat pula sebagai Ketua Komite Audit.

Beliau saat ini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Indonesian Institute of Corporate Directorship (IICD), berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dosen Program Studi Hukum Universitas Prasetiya Mulya, dan Tim Kajian Asosiasi Emiten Indonesia (AEI).

Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM (2007-2018), Staf Khusus Menteri Negara BUMN Republik Indonesia (2007–2012), Konsultan Domestik Bank Dunia dan Indonesia National Committee of Good Governance (2004–2005).

Beliau meraih gelar Master of Law (L.L.M.) dari University of California (UC), Berkeley, Amerika Serikat, pada 1982, dan Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya, pada 1979.



Dominic John Picone

Komisaris

Warga Negara Australia

Usia: 41 tahun

Domisili: Singapura

Beliau menjabat sebagai Komisaris Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 44 tanggal 15 April 2015 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 6 Juli 2015 untuk periode 2015–2020.

Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Anggota Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi dari 2011 hingga Maret 2015.

Saat ini beliau juga menduduki posisi sebagai Managing Director dan Partner TPG Capital (S) Pte. Ltd. di Singapura, tempat beliau bekerja sejak 2005. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Analis di Divisi Investment Banking Credit Suisse First Boston di Melbourne, Australia (2004–2005), dan beberapa posisi lainnya di Divisi Consumer Finance ANZ Bank, Australia (1998–2004).

Beliau meraih gelar Bachelor of Law pada 2003 dan Bachelor of Commerce (Honours–Finance) pada 2001 dari University of Melbourne, Australia.



Sunata Tjiterosampurno

Komisaris

Warga Negara Indonesia

Usia: 47 tahun

Domisili: Jakarta, DKI Jakarta

Beliau menjabat sebagai Komisaris Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 44 tanggal 15 April 2015 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 6 Juli 2015 untuk periode 2015–2020, dan juga sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko dari Mei 2013 hingga September 2014.

Beliau saat ini juga menjabat sebagai Managing Director Northstar Advisors Pte. Ltd. sejak 2006, Presiden Komisaris PT Bukit Makmur Mandiri Utama sejak 2009, Komisaris PT Delta Dunia Makmur Tbk sejak 2011, dan Komisaris PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sejak 2013.

Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris, anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2008–2015), Direktur Investment Banking PT Danareksa Sekuritas (2004–2006), dan Konsultan di Boston Consulting Group, Jakarta (1998–2004). Karir beliau dimulai sebagai Assistant Vice President untuk Riset Ekuitas PT Lippo Securities-SBC Warburg (1995–1998).

Beliau memperoleh gelar Master of Finance (Merit) dari London Business School, Inggris, pada 2002, dan Bachelor of Business Administration (Distinction) dari University of Wisconsin–Madison, Amerika Serikat, pada 1995.



Cornellius Henry Kho

Komisaris

Warga Negara Indonesia

Usia: 53 tahun

Domisili: Jakarta, DKI Jakarta

Beliau menjabat sebagai Komisaris Perusahaan untuk periode 2017–2022 berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 25 tanggal 18 April 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 13 Juni 2017.

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPST No. 80 tanggal 15 Juni 2011, diangkat kembali untuk jabatan yang sama berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016 untuk periode 2016–2021, dan kemudian mengundurkan diri pada 31 Januari 2017.

Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Operasional sejak Mei 2014 yang membawahi Divisi Operasional, Pengembangan Jaringan dan Pembiayaan Korporasi, Direktur yang membawahi berbagai departemen di BFI Finance (2007–2014), antara lain, Human Capital hingga 2012, Finance & Treasury serta Audit Internal hingga 2014, dan pernah merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan hingga Juni 2014. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Pengawas Keuangan dan Treasury BFI Finance (1996–1997), Pengawas Keuangan BFI Finance (1992–1996), dan Auditor di Prasetio, Utomo and Co. (1989–1992).

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta, pada 1990.



Francis Lay Sioe Ho

Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia

Usia: 71 tahun

Domisili: Jakarta, DKI Jakarta

Beliau diangkat sebagai Direktur Perusahaan pada 1983, kemudian sebagai Presiden Direktur pada 1986. Beliau diangkat kembali untuk jabatan yang sama berdasarkan Akta Berita Acara RUPST No. 80 tanggal 15 Juni 2011 untuk periode 2011–2016 dan Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016 untuk periode 2016–2021.

Sebelum bergabung dengan BFI Finance, beliau bekerja sebagai Executive Officer di Kementerian Keuangan (Ministry of Finance) di Singapura pada 1972–1973, kemudian bergabung dengan PT Indovest sebagai Treasury Officer pada 1975, menjabat sebagai Credit Manager hingga 1980, dan Credit Department Head pada 1980–1983.

Beliau meraih gelar Bachelor of Business Administration (B.B.A.) dari University of Singapore (sekarang National University of Singapore atau NUS) di Singapura pada 1972, dan Master of Business Management (M.B.M.) dari Asian Institute of Management (AIM) di Manila, Filipina, pada 1975.



Sudjono

Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia

Usia: 49 tahun

Domisili: Tangerang Selatan, Banten

Beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 18 tanggal 6 Mei 2014 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 25 Juni 2014 (periode 2014–2019). Kemudian berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 59 tanggal 28 Mei 2019 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 56 tanggal 25 Juni 2019, beliau diangkat kembali untuk periode 2019–2024. Beliau merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. BOD–BOC/VI/2014–0011 tanggal 24 Juni 2014.

Sebelumnya, beliau juga merangkap sebagai Direktur Teknologi Informasi dari Mei 2014 hingga Mei 2017. Sebelum diangkat sebagai Direktur, beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Teknologi Informasi dan berbagai jabatan lainnya dari 1993 hingga April 2014, serta Anggota Komite Manajemen Risiko pada 2003–2013.

Sebelum bergabung dengan BFI Finance, beliau pernah menjabat sebagai Auditor Senior KAP Hans Tuanakotta Mustofa-anggota Deloitte Touche Tohmatsu International pada 1991–1993.

Beliau meraih gelar Enterprise Risk Manager (ERM™) dari Asia Risk Management Institute (ARiMI) dan National University of Singapore (NUS) di Singapura pada 2009, Master of Business Administration (M.B.A.) dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), Jakarta, pada 2006, dan Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Tarumanagara, Jakarta, pada 1993.



Sutadi

Direktur Bisnis

Warga Negara Indonesia

Usia: 45 tahun

Domisili: Tangerang, Banten

Beliau menjabat sebagai Direktur Bisnis Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 18 tanggal 6 Mei 2014 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 25 Juni 2014 (periode 2014–2019). Kemudian berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 59 tanggal 28 Mei 2019 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 56 tanggal 25 Juni 2019, beliau diangkat kembali untuk periode 2019–2024.

Sebelumnya, beliau pernah menduduki berbagai jabatan lainnya di Perusahaan, antara lain, Retail Business Division Head hingga April 2014, Department Head dan Associate Division Head (2008–2012), Regional Manager (2006–2008), Branch Manager (2004–2006), Branch Establishment Manager (2001–2004), dan Branch Manager (2000–2001).

Beliau juga pernah menjabat sebagai Sales Executive bidang Marketing Export di PT Tjiwi Kimia Pulp & Paper (1999–2000) dan Collection & Credit Analyst Officer PT Bunas Finance Indonesia (1997–1999).

Beliau meraih gelar Executive M.B.A. dari IPMI International Business School di Jakarta pada 2018 dan Sarjana Teknik Industri dari Universitas Trisakti di Jakarta pada 1998.



Andrew Adiwijanto

Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia

Warga Negara Indonesia

Usia: 51 tahun

Domisili: Jakarta, DKI Jakarta

Beliau menjabat sebagai Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 25 tanggal 18 April 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 13 Juni 2017 untuk periode 2017–2022.

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dari April 2015 hingga April 2017, Head of Operations & Control (2012–2017), dan Head of Compensation & Benefit (2014–2017).

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 1993 sebagai Marketing Officer dan pernah menjabat berbagai posisi lainnya, antara lain, Branch Manager di Makassar, Denpasar dan Palembang, Regional Manager untuk wilayah Sumatra, dan Department Head Quality Service, Corporate Services, Human Resources, serta Branch Operations.

Beliau memperoleh gelar Master of Business Administration (M.B.A.) dari Universitas Gadjah Mada, Jakarta, pada 2013, dan Sarjana Teknik Elektro dari Sekolah Tinggi Teknik Surabaya (STTS), Jawa Timur, pada 1992. Beliau memperoleh sertifikat khusus mengikuti kursus intensif “Human Capital Management: Making HR & Business Partnership Work” dari Asian Institute of Management (AIM) di Manila, Filipina, pada 2008.



Sigit Hendra Gunawan

Direktur Risiko Perusahaan (Independen)

Warga Negara Indonesia

Usia: 51 tahun

Domisili: Tangerang, Banten

Beliau bergabung di Perusahaan sebagai Kepala Divisi Risiko Perusahaan pada 2015 dan kemudian menjabat sebagai Direktur Risiko Perusahaan (Independen) sejak April 2016 berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016 untuk periode 2016–2021.

Sebelumnya, beliau berkarier di PT Astra Sedaya Finance (1994–2005) dengan jabatan terakhir sebagai Account Management & Credit Analyst Department Head (Fleet Division), dan di Adira Finance (2005–2015) dengan jabatan terakhir sebagai Deputy Director – Head of Credit & Collection.

Beliau memperoleh Sertifikat *Master Class* “Enterprise Risk Governance” dari CRMS (Center for Risk Management & Sustainability) Indonesia dan *Certificate of Competence* dalam *Risk Management – QRGP (Qualified Risk Governance Professional)* dari Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS), Komite Akreditasi Nasional (KAN), dan International Accreditation Forum (IAF) pada 2019. Selain itu, beliau juga memperoleh Sertifikasi Manajemen Bisnis (Certified Business Management) pada 2004 dan Certified Business Management–Operation pada 2003, keduanya dari Prasetya Mulya Business School, Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Universitas Trisakti, Jakarta, pada 1993.



Asrori S. Karni

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia

Usia 44 tahun

Domisili: Jakarta, DKI Jakarta

Beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 6 tanggal 25 Oktober 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 21 Desember 2017 untuk periode 2017–2022.

Sertifikat Kompetensi sebagai Pengawas Syariah beliau peroleh dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Saat ini, beliau berprofesi sebagai Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Qanuniyah (Hukum) di Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU), dan Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi di MUI Pusat.

Beliau tengah menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Beliau meraih gelar Magister Hukum konsentrasi Hukum Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 2010, dan Sarjana Agama dari Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah; kini bernama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; pada 1998.



Helda Rahmi Sina

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia

Usia: 46 tahun

Domisili: Jakarta, DKI Jakarta

Beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 6 tanggal 25 Oktober 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 21 Desember 2017 untuk periode 2017–2022.

Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta (YPFJ), Dosen Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Rawamangun, Jakarta Timur, dan Kepala Divisi Konsultasi dan Pengembangan Program Keuangan Syariah di International Center for Development in Islamic Finance – Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (ICDIF–LPPi).

Sebelumnya, beliau merupakan Anggota Dewan Pakar Ekonomi Syariah di Universitas Azzahra di Jakarta Timur (2010–2014), berprofesi sebagai Dosen Mata Kuliah *Sharia Contracts & Products* pada Program *M.B.A. in Sharia Banking & Finance* di ITB (2009–2015), Kepala Bagian Penyelenggaraan Program Keuangan Syariah di ICDIF–LPPi (2008–2014), dan Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tiara (STEI Tiara) Rawamangun, Jakarta Timur (2006–2008).

Beliau menyelesaikan Program Doktor bidang Ekonomi Syariah di Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, pada 2007, memperoleh gelar Master in Islamic Economics (M.A.) dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada 2000, dan Sarjana Syariah Islamiyyah (Lc) dari Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab, Al-Azhar University di Kairo, Mesir, pada 1996.

KOMITE AUDIT



Emmy Yuhassarie

Ketua Komite Audit

Warga Negara Indonesia

Usia: 69 tahun

Domisili: Jakarta, DKI Jakarta

Jabatan beliau selaku Ketua Komite Audit dikukuhkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016 untuk periode 2016–2021. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen yang diangkat kembali berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016 untuk periode 2016–2021. Profil beliau disajikan pada bagian Profil Dewan Komisaris (halaman 72).



Friso Palilingan

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia

Usia: 36 tahun

Domisili: Jakarta, DKI Jakarta

Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/IV/2015-0081 tanggal 13 April 2015 dan dikukuhkan kembali melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016 untuk periode 2016–2021.

Beliau saat ini juga menjabat sebagai Senior Partner di KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF Indonesia, anggota PKF International), Vice Chairman di NBP Capital, anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta Anggota Komite Audit di PT Intiland Development Tbk, PT Duta Intidaya Tbk, PT Medikaloka Hermina Tbk, dan PT Asahimas Flat Glass Tbk.

Sebelumnya, beliau merupakan partner dari salah satu kantor akuntan peringkat lima besar dunia. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi pada 2005 dan Magister Akuntansi pada 2008, keduanya dari Kwik Kian Gie School of Business (sebelumnya Institut Bisnis dan Informatika Indonesia atau IBII) di Jakarta. Beliau memperoleh gelar Certified Public Accountant (CPA) pada 2008 dan Chartered Accountant (CA) pada 2013, keduanya dari IAI, serta Certified Audit Committee Practitioner dari Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) pada 2016.



Edy Sugito

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia

Usia: 55 tahun

Domisili: Jakarta, DKI Jakarta

Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016 untuk periode 2016–2021.

Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Gayatri Kapital Indonesia dan Komisaris Independen pada beberapa perusahaan, antara lain, PT PP London Sumatra Indonesia Tbk, PT Wisnilak Inti Makmur Tbk, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (2005–2012), Direktur PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (2000–2005), dan Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (1998–2000).

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta, pada 1991.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO



Johanes Sutrisno

**Ketua Komite
Manajemen Risiko**

Warga Negara Indonesia

Usia: 68 tahun

Domisili: Jakarta, DKI Jakarta

Beliau diangkat sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016 untuk periode 2016–2021. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen yang diangkat kembali berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016 untuk periode 2016–2021. Profil beliau disajikan pada bagian Profil Dewan Komisaris (halaman 71).



Jono Effendy

Anggota Komite Manajemen Risiko

Warga Negara Indonesia

Usia: 45 tahun

Domisili: Jakarta, DKI Jakarta

Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/IV/2015-0081 tanggal 13 April 2015 dan dikukuhkan kembali melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016 untuk periode 2016–2021.

Beliau adalah Founder dan Managing Director PT Mudita Finansial Teknologi (sejak September 2018), serta Founder dan Presiden Direktur PT Pasar Jasa Profesional (sejak Juli 2019). Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko di PT Commonwealth Life (sejak November 2014), anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Commonwealth (sejak Maret 2013).

Sebelumnya beliau pernah menjadi Managing Director di PT Kiran Resources Indonesia selama 14 tahun dan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di beberapa bank dan lembaga keuangan, seperti PT Bank BNP Paribas Indonesia (11 tahun), PT Bank Barclays Indonesia (1 tahun), dan PT BII Finance Centre (2 tahun). Selama periode Juli 2001 hingga Februari 2004, beliau memegang beberapa posisi di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Beliau memulai kariernya di PT Tanjung Johor Wood Industry, Jakarta (Desember 1993–Juli 1996) sebagai Akuntan, kemudian sebagai Auditor Senior di Arthur Andersen, Jakarta (Agustus 1996–Juli 1998), dan Konsultan Senior di Deloitte Touche, Jakarta (Desember 1998–Juli 2001).

Beliau memperoleh gelar Magister Keuangan dari Universitas Pelita Harapan di Tangerang pada 2003, Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Tarumanagara di Jakarta pada 1996, Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 3 dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) di Indonesia, dan International Certificate in Banking and Regulation dari Global Association of Risk Professionals (GARP) pada 2011. Beliau juga memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko untuk Perusahaan Asuransi Tingkat 5 dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) pada 2015, dan Certified in Enterprise Risk Governance (CERG) dari Enterprise Risk Management Academy (ERMA), Singapura, pada 2017.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI



Alfonso Napitupulu

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Warga Negara Indonesia

Usia: 69 tahun

Domisili: Jakarta, DKI Jakarta

Jabatan beliau selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dikukuhkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/IV/2015-0081 tanggal 13 April 2015 dan dikukuhkan kembali melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016 untuk periode 2016–2021. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen yang diangkat kembali berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016 untuk periode 2016–2021. Profil beliau disajikan pada bagian Profil Dewan Komisaris (halaman 71).



Sunata

Tjiterosampurno

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Warga Negara Indonesia

Usia 47 tahun

Domisili: Jakarta, DKI Jakarta

Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/VI/2017-0103 tanggal 2 Juni 2017 untuk periode hingga 2021. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 44 tanggal 15 April 2015 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 6 Juli 2015 untuk periode 2015–2020. Profil beliau disajikan pada bagian Profil Dewan Komisaris (halaman 73).



Priyambodo

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Warga Negara Indonesia

Usia: 66 tahun

Domisili: Jakarta, DKI Jakarta

Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/IV/2015-0081 tanggal 13 April 2015 dan dikukuhkan kembali melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016 untuk periode 2016–2021.

Beliau pernah bergabung di BFI Finance pada 1983–2013 dengan jabatan terakhir sebagai Senior Manager Payroll Compensation, dan pernah menjabat berbagai posisi lainnya sebelumnya, antara lain, Accounting Manager dan Payroll Unit Head. Beliau memperoleh gelar Diploma Akuntansi dari Sekolah Akademi Akuntansi Indonesia, Jakarta, pada 1980.

KANTOR PUSAT

Berikut adalah Manajemen Senior Kantor Pusat yang kedudukannya setingkat di bawah Direksi:



Djani Setiadi

Warga Negara Indonesia

Usia: 52 tahun

Domisili: Tangerang, Banten

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 1997, sempat menjabat sebagai Head of Commercial Business yang mencakup Corporate Business dan Inventory Management pada 2016, dan kemudian menjabat sebagai **Head of Asset Management Recovery** sejak 2019.



Goklas

Warga Negara Indonesia

Usia: 41 tahun

Domisili: Jakarta, DKI Jakarta

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 2001 dan menjabat sebagai **Head of Project Management Office** sejak 2015.



Herman Handoko

Warga Negara Indonesia

Usia: 41 tahun

Domisili: Jakarta, DKI Jakarta

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 2003. Beliau pernah menjabat sebagai Head of Channel pada 2017-2018, dan ditunjuk sebagai **Direktur PT Finansial Integrasi Teknologi (FIT)**, sebuah entitas anak BFI Finance yang fokus di bidang teknologi finansial (*fintech*) *peer-to-peer lending*, sejak 2018.



Iwan

Warga Negara Indonesia

Usia: 49 tahun

Domisili: Tangerang, Banten

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 1995, sempat menjabat sebagai Regional Manager yang mencakup area Palembang, Jambi, dan Bandar Lampung sejak 2005 hingga awal 2019, dan kemudian menjabat sebagai **Head of Network Development & Management** hingga kini.



John Piter Sinaga

Warga Negara Indonesia

Usia: 50 tahun

Domisili: Tangerang, Banten

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 1997, sempat menjabat sebagai Regional Manager dengan cakupan area Bekasi dan Bogor pada 2017 hingga awal 2019, dan kemudian menjabat sebagai **Head of AR Management & Recovery** hingga kini.



Tan Rudy Eddywidjaja

Warga Negara Indonesia

Usia: 49 tahun

Domisili: Jakarta, DKI Jakarta

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 1997 dan menjabat sebagai **Head of Consumer Business** sejak 2017.



Tonny Widjaja

Warga Negara Indonesia

Usia: 52 tahun

Domisili: Jakarta, DKI Jakarta

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 1994 dan menjabat sebagai **Head of Finance & Treasury** sejak 1996.

KANTOR WILAYAH

Berikut adalah Manajemen Senior yang menjabat sebagai Pimpinan Wilayah (Regional Manager):



Sudi Hartono

Warga Negara Indonesia

Usia: 48 tahun

Domisili: Medan, Sumatra Utara

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 1994 dan menjabat sebagai **Regional Manager** yang mencakup area Medan dan Pekanbaru sejak 2014, serta area Batam sejak 2018.



Sastero Wijaya Gunawan

Warga Negara Indonesia

Usia: 40 tahun

Domisili: Tangerang Selatan, Banten

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 2002 dan menjabat sebagai **Regional Manager** yang mencakup area Palembang, Jambi, dan Bandar Lampung sejak 2019.



Susinto Tenggono Then

Warga Negara Indonesia

Usia: 46 tahun

Domisili: Tangerang Selatan, Banten

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 1994 dan menjabat sebagai **Regional Manager** yang mencakup area Jakarta dan Tangerang sejak 2017.



Stefanus Wibowo

Warga Negara Indonesia

Usia: 38 tahun

Domisili: Bandung, Jawa Barat

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 2003 dan menjabat sebagai **Regional Manager** yang mencakup area Bandung dan Cirebon sejak 2015.



Stanly Darisang

Warga Negara Indonesia

Usia: 48 tahun

Domisili: Surabaya, Jawa Timur

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 1996 dan menjabat sebagai **Regional Manager** yang mencakup area Surabaya dan Kediri sejak 2019.



Khenriek Tjandra

Warga Negara Indonesia

Usia: 46 tahun

Domisili: Makassar, Sulawesi Selatan

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 2002 dan menjabat sebagai **Regional Manager** yang mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Barat, Tengah, dan Tenggara sejak 2015.



Medy Mirdianata

Warga Negara Indonesia

Usia: 46 tahun

Domisili: Surabaya, Jawa Timur

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 1997 dan menjabat sebagai **Regional Manager** yang mencakup area Banjarmasin dan Pontianak sejak 2019.



Rachmadi

Warga Negara Indonesia

Usia: 49 tahun

Domisili: Semarang, Jawa Tengah

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 2006 dan menjabat sebagai **Regional Manager** untuk Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 2011.



Hernandi Kusno

Warga Negara Indonesia

Usia: 51 tahun

Domisili: Samarinda, Kalimantan Timur

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 1994 dan menjabat sebagai **Regional Manager** yang mencakup Provinsi Kalimantan Timur dan Utara sejak 2007.



Tan Eng Han

Warga Negara Indonesia

Usia: 44 tahun

Domisili: Tangerang Selatan, Banten

Bergabung dengan BFI Finance pada 1997 dan menjabat sebagai **Regional Manager** yang mencakup area Bekasi dan Bogor sejak 2019.



Augusten Silalahi

Warga Negara Indonesia

Usia: 47 tahun

Domisili: Tangerang, Banten

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 1999 dan menjabat sebagai **Regional Manager** yang mencakup area Manado di Provinsi Sulawesi Utara, area Ambon dan Papua sejak 2017.



I Kadek Tirtayasa

Warga Negara Indonesia

Usia: 48 tahun

Domisili: Denpasar, Bali

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 1997 dan menjabat sebagai **Regional Manager** yang mencakup area Bali dan Nusa Tenggara sejak 2014, serta area Malang di Provinsi Jawa Timur sejak 2019.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perusahaan yang dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana selaku BAE Perusahaan, komposisi pemegang saham BFI Finance per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

TABEL 9_KOMPOSISI SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM

Keterangan	Nominal Rp25,00 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.967.115.620	399.177.890.500	79,84
Jumlah Saham dalam Portepel	4.032.884.380	100.822.109.500	20,16
Pemegang Saham			
Trinugraha Capital & Co SCA	6.835.249.660	170.881.241.500	42,80
NT Asian Discovery Fund	1.581.275.640	39.531.891.000	9,90
PT BFI Finance Indonesia Tbk*	1.002.732.000	25.068.300.000	6,28
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	6.547.858.320	163.696.458.000	41,02
Jumlah	15.967.115.620	399.177.890.500	100,00

* Hasil pembelian kembali saham Perusahaan sesuai keputusan RUPSLB 15 April 2015

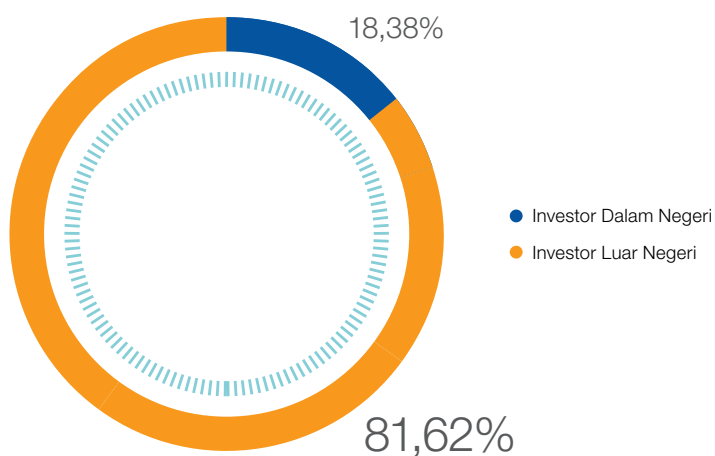
Kepemilikan saham dari anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

TABEL 10_KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

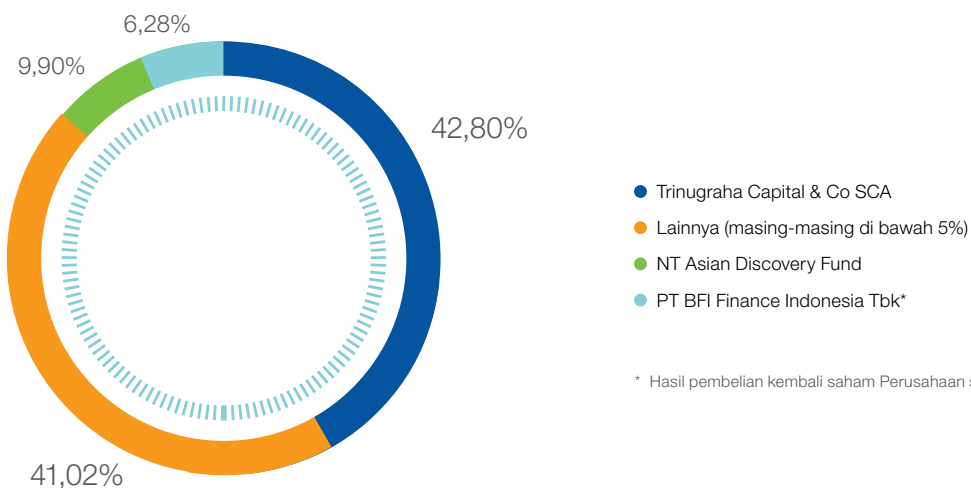
Nama	Jabatan	Jumlah Saham	% Saham
Francis Lay Sioe Ho	Presiden Direktur	389.885.080	2,44
Sudjono	Direktur	33.380.000	0,21
Sutadi	Direktur	21.382.800	0,14
Sigit Hendra Gunawan	Direktur (Independen)	10.000.000	0,06
Andrew Adiwijanto	Direktur	10.120.000	0,06
Johanes Sutrisno	Komisaris (Independen)	2.480	0,00
Jumlah		464.770.360	2,91

Struktur kepemilikan saham PT BFI Finance Indonesia Tbk per akhir 2019 terdiri dari 1.754 individu dan institusi, di mana 81,62% di antaranya terdaftar di luar negeri dan 18,38% sisanya di dalam negeri. Terdapat tiga institusi yang memegang saham melebihi 5%, yaitu Trinugraha Capital & Co SCA, Luxembourg, dengan kepemilikan 42,80%, NT Asian Discovery Fund dengan kepemilikan 9,90%, dan PT BFI Finance Indonesia Tbk sebesar 6,28%. Saham atas nama PT BFI Finance Indonesia Tbk merupakan hasil pembelian kembali saham Perusahaan.

GRAFIK 5 _KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM BERDASARKAN KEWARGANEGARAAN



GRAFIK 6 _KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM BERDASARKAN STRUKTUR KORPORASI



Trinugraha Capital & Co SCA

Manager

Trinugraha Capital (TC Sarl)

Supervisory Board

Anggota

Garibaldi Thohir

John Viola

Doug Puckett

Sejarah Singkat

Trinugraha Capital & Co SCA (TC&Co) adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Luxembourg dengan akta pendirian yang dibuat di hadapan Maitre Joseph Elvinger, Notaris di Luxembourg dan terdaftar pada Registre de Commerce et des Sociétés di Luxembourg di bawah nomor B 160504. Anggaran dasar TC&Co telah diubah beberapa kali dan perubahan yang terakhir telah berlaku secara efektif berdasarkan keputusan-keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa TC&Co tertanggal 20 Mei 2011, dibuat di hadapan Maitre Joseph Elvinger, Notaris di Luxembourg.

Maksud dan Tujuan TC&Co

Maksud dan tujuan usaha yang dijalankan oleh TC&Co adalah untuk melakukan penyertaan, dalam bentuk apapun, pada perusahaan, kemitraan (*partnership*) atau jenis badan usaha lainnya. TC&Co dapat menjalankan semua hal komersial, teknis dan keuangan atau operasi lainnya, yang berhubungan langsung atau tidak langsung pada semua lingkup dalam rangka untuk menunjang keberhasilan dari tujuannya.

Pengurus dan Pengawas TC&Co

Sesuai dengan anggaran dasar TC&Co, TC&Co dikelola oleh satu atau beberapa manager yang merupakan pemegang saham tanpa tanggung jawab terbatas (*unlimited liability shareholders/ commandite*). TC Sarl, sebuah *societe a responsabilite limitee*, ditunjuk menjadi Manager tunggal dari TC&Co. Segala hal terkait TC&Co dan kondisi keuangan termasuk secara khusus pembukuan dan rekeningnya diawasi oleh TC&Co Supervisory Board.

Kronologi Pencatatan Saham

Berdasarkan Akta No. 57 tanggal 7 April 1982 yang kemudian diubah dengan Akta No. 40 tanggal 6 Oktober 1982, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, modal dasar Perusahaan pada saat didirikan adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 terbagi atas 100 saham prioritas dan 1.900 saham biasa, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.500.000,00, sedangkan modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sejumlah Rp1.500.000.000,00, yang terbagi atas 100 saham prioritas dan 900 saham biasa.

Berdasarkan Akta No. 80 tanggal 22 November 1989 dan Akta No. 27 tanggal 8 Maret 1990, modal dasar Perusahaan pada saat Perusahaan hendak melakukan penawaran umum ditingkatkan dari Rp3.000.000.000,00 yang terbagi atas 100 saham prioritas dan 1.900 saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp1.500.000,00 menjadi sebesar Rp15.000.000.000,00 yang terbagi atas 15.000.000 saham biasa masing-masing bernilai nominal Rp1.000,00 sedangkan modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sejumlah Rp8.500.000.000,00 yang terbagi atas 8.500.000 saham.

1. Penawaran Umum Saham Perdana

Pada 1990, Perusahaan melakukan penawaran umum perdana atas 2.125.000 sahamnya dengan nilai nominal Rp1.000,00 per saham melalui bursa efek di Indonesia dengan harga penawaran sejumlah Rp5.750,00 per saham.

Pada 16 Mei 1990, Perusahaan mencatatkan sahamnya sebanyak 2.125.000 lembar di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang BEI).

2. Dividen Saham

Berdasarkan Akta No. 31 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., tertanggal 8 April 1993, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen saham sebesar Rp1.062.500.000,00 atau 1.062.500 lembar saham kepada pemegang saham yang tercatat pada 11 Mei 1993 dengan mengeluarkan satu saham baru untuk setiap sepuluh saham yang dimiliki.

Perusahaan mencatatkan sahamnya sebanyak 1.062.500 lembar saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya masing-masing pada 14 Juni 1993 dan 11 Juni 1993.

3. Saham Bonus

Berdasarkan Akta No. 32, tanggal 8 April 1993, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, Modal Dasar Perusahaan ditingkatkan dari Rp15.000.000.000,00 yang terbagi atas 15.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000,00, menjadi sebesar Rp30.000.000.000,00 yang terbagi atas 30.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000,00. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah Rp10.625.000.000,00 yang terbagi atas 10.625.000 saham. Selain itu para pemegang saham juga menyetujui untuk mengkapitalisasi agio saham dengan mengeluarkan saham bonus sebanyak 17 lembar untuk setiap 20 lembar saham yang dimiliki. Total jumlah saham bonus yang dibagikan pada 17 September 1993 adalah 9.934.668 lembar saham atau dengan jumlah nominal sejumlah Rp9.934.668.000,00.

Perusahaan mencatatkan sahamnya sebanyak 9.934.668 lembar saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya masing-masing pada 22 September 1993 dan 13 September 1993.

4. Company Listing

Pada 1993, sesuai dengan surat persetujuan No. S-303/BEJ.I.1/XI/1993 tanggal 30 November 1993 dan No. 177/EMT/LIST/BES/XI/93 tanggal 19 November 1993, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya telah menyetujui untuk mencatatkan tambahan sebanyak 8.500.000 saham dengan nilai nominal Rp8.500.000.000,00 per saham yang sama dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya masing-masing pada 6 Desember 1993 dan 2 Desember 1993.

Dengan demikian jumlah saham Perusahaan telah tercatat sejumlah 21.622.168 di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

5. Dividen Saham

Berdasarkan Akta No. 107 tanggal 22 Januari 1994, yang dibuat oleh Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan antara lain telah menyetujui pembagian dividen saham seluruhnya sebesar Rp7.207.390.000,00 atau sejumlah 7.207.390 lembar saham, dengan perhitungan 3:1, yaitu untuk setiap tiga lembar saham yang dimiliki para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada 21 Februari 1994, akan memperoleh satu lembar saham baru.

Perusahaan mencatatkan sahamnya sebanyak 7.207.390 lembar saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya masing-masing tanggal 22 Maret 1994 dan 21 Maret 1994.

6. Penawaran Umum Terbatas I (PUT I)

Berdasarkan Akta No. 2, tanggal 1 Desember 1993, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, modal dasar Perusahaan ditingkatkan dari Rp30.000.000.000,00 yang terbagi atas 30.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000,00, menjadi sebesar Rp100.000.000.000,00 yang terbagi atas 100.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000,00. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah Rp21.622.168.000,00 yang terbagi atas 21.622.168 saham.

Pada 18 April 1994, Perusahaan memperoleh surat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal (kemudian berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan/Bapepam-LK dan terakhir dikenal sebagai OJK) melalui surat No. S-639/PM/1994 dalam rangka Penawaran Umum Terbatas Pertama (PUT I) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perusahaan sebanyak 28.829.558 saham di mana setiap satu saham yang dimiliki berhak atas satu saham baru.

Pada 9 Mei 1994, Perusahaan mencatatkan sahamnya sebanyak 28.829.558 saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sehingga saham perusahaan yang beredar menjadi sebanyak 57.659.116 saham.

7. Penawaran Umum Terbatas II (PUT II)

Pada 17 Januari 1997, Perusahaan memperoleh surat pernyataan efektif dari Bapepam-LK melalui surat No.S-71/PM/1997 dalam rangka Penawaran Umum Terbatas Kedua (PUT II) Perusahaan sebanyak 115.318.232 saham dengan harga penawaran Rp1.000,00 per saham di mana setiap satu saham yang dimiliki berhak atas dua saham baru.

Pada 12 Februari 1997, Perusahaan mencatatkan saham-sahamnya sebanyak 115.318.232 saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sehingga saham Perusahaan yang beredar menjadi sebanyak 172.977.348 saham.

8. Pemecahan Nilai Nominal Saham

Berdasarkan Akta No.97 tanggal 17 Juni 1997, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan nilai nominal saham dari Rp1.000,00 per saham menjadi Rp500,00 per saham,

sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah saham beredar Perusahaan dari sebanyak 172.977.348 saham menjadi sebanyak 345.954.696 saham.

Pada 3 November 1997, setelah Pemecahan Nilai Nominal Saham tersebut, Perusahaan mencatatkan sahamnya sebanyak 172.977.348 saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sehingga saham Perusahaan yang beredar menjadi sebanyak 345.954.696 saham.

9. Saham Baru dari Konversi Obligasi Wajib Konversi

Dalam rangka restrukturisasi utang, para pemegang saham Perusahaan dalam RUPS Luar Biasa tanggal 27 Januari 2000 menyetujui penerbitan *Mandatory Convertible Bonds (MCB)* atau Obligasi Wajib Konversi yang wajib dikonversikan menjadi sebanyak 414.384.585 saham Perusahaan.

Berdasarkan Akta No. 67 tanggal 9 Agustus 2006 dengan telah dikonversinya seluruh MCB sebanyak 414.384.585 lembar saham biasa maka jumlah saham beredar Perusahaan menjadi sebanyak 760.339.281 saham.

Perusahaan mencatatkan sahamnya sebanyak 414.384.585 lembar saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya masing-masing pada 11 Mei 2006 dan 5 Juni 2006.

10. Pemecahan Nilai Nominal Saham

Berdasarkan Akta No. 65 tanggal 21 Juni 2012 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perusahaan mengenai perubahan nilai nominal saham Perusahaan (pemecahan saham) dari sebesar Rp500,00 per saham menjadi sebesar Rp250,00 per saham, sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah saham beredar Perusahaan dari semula sebanyak 760.339.281 saham menjadi sebanyak 1.520.678.562 saham.

Pemecahan nilai nominal saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari BEI melalui surat No. S-05439/BEI.PPJ/07-2012 tertanggal 31 Juli 2012.

Pada 10 Agustus 2012, setelah Pemecahan Nilai Nominal Saham tersebut, Perusahaan mencatatkan sahamnya sebanyak 760.339.281 di BEI sehingga saham Perusahaan yang beredar menjadi sebanyak 1.520.678.562 saham.

11. Penerbitan Saham untuk Pelaksanaan MESOP Tahap I-Grant Date 1

Berdasarkan Akta No. 65 tanggal 21 Juni 2012 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan penerbitan saham untuk pelaksanaan MESOP untuk Tahap I di BEI sebanyak 60.826.400 saham dengan nilai nominal sebesar Rp250,00 per saham untuk periode sampai dengan 20 Juni 2014.

BEI melalui suratnya No. S-04847/BEI.PPJ/07-2012 tertanggal 6 Juli 2012 telah menyetujui pencatatan saham Perusahaan hasil pelaksanaan MESOP Tahap I tersebut secara pra-pencatatan di BEI.

Pada 31 Mei 2013, Perusahaan telah menerbitkan saham baru sebanyak 5.936.000 saham sebagai pelaksanaan MESOP Tahap I - *Grant Date 1*, yang telah dieksekusi sehingga jumlah saham beredar Perusahaan menjadi 1.526.614.562 saham.

12. Penerbitan Saham untuk Pelaksanaan MESOP Tahap I-Grant Date 2

Pada 30 Mei 2014, Perusahaan telah menerbitkan saham baru sebanyak 23.320.000 saham sebagai pelaksanaan MESOP Tahap I - *Grant Date 2*, yang telah dieksekusi sehingga jumlah saham beredar Perusahaan menjadi 1.549.934.562.

13. Penerbitan Saham untuk Pelaksanaan MESOP Tahap II-Grant Date 1

Berdasarkan Akta No. 18 tanggal 6 Mei 2014 yang dibuat oleh Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan penerbitan saham untuk pelaksanaan MESOP untuk Tahap II di BEI. Besarnya saham untuk MESOP Tahap II adalah sebesar sisa saham yang telah dialokasikan pada MESOP Tahap I yang belum dilaksanakan ditambah Hak Opsi Tahap II.

BEI melalui suratnya No. S-02280/BEI.PGI/06-2014 tertanggal 6 Juni 2014 telah menyetujui pencatatan saham Perusahaan hasil pelaksanaan MESOP Tahap II tersebut secara pra-pencatatan di BEI sebanyak 46.777.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp250,00 per saham.

Pada 29 Mei 2015, Perusahaan telah menerbitkan saham baru sebanyak 16.025.000 saham sebagai pelaksanaan MESOP Tahap II - *Grant Date* 1, yang telah dieksekusi sehingga jumlah saham beredar Perusahaan menjadi 1.565.959.562.

14. Penerbitan Saham untuk Pelaksanaan MESOP Tahap II-Grant Date 2

Pada 31 Mei 2016, Perusahaan telah menerbitkan saham baru sebanyak 30.752.000 saham sebagai pelaksanaan MESOP Tahap II - *Grant Date* 2, yang telah dieksekusi sehingga jumlah saham beredar Perusahaan menjadi 1.596.711.562.

15. Pembelian Kembali Saham Perusahaan (*Stock Buyback*)

Pada 15 April 2015, RUPSLB menyetujui pembelian kembali saham yang beredar Perusahaan sampai jumlah maksimum sebanyak 10% dari seluruh jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan atau sebanyak-banyaknya sebesar 154.993.456 saham. Dana yang dicadangkan untuk pembelian kembali saham untuk periode paling lama delapan belas bulan sejak RUPSLB adalah tidak lebih dari Rp341.000.000.000,00.

Sampai dengan 31 Desember 2016, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham sebanyak 100.273.200 saham dengan nilai pembelian sebesar Rp252.160.169.658,00.

16. Pemecahan Nilai Nominal Saham

Berdasarkan Akta No. 25 tanggal 18 April 2017 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perusahaan mengenai perubahan nilai nominal saham Perusahaan (pemecahan saham) dari sebesar Rp250,00 per saham menjadi sebesar Rp25,00 per saham, sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah saham beredar Perusahaan dari semula sebanyak 1.596.711.562 saham menjadi sebanyak 15.967.115.620 saham.

Pemecahan nilai nominal saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari BEI melalui surat No. S-02820/BEI.PP1/05-2017 tanggal 23 Mei 2017.

Pada 5 Juni 2017, setelah Pemecahan Nilai Nominal Saham tersebut, Perusahaan mencatatkan sahamnya sebanyak 14.370.404.058 di BEI sehingga saham Perusahaan yang beredar menjadi sebanyak 15.967.115.620 saham.

Perubahan Jumlah Saham

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ringkasan kronologi pencatatan saham dan perubahan jumlah saham beredar Perusahaan adalah sebagai berikut:

TABEL 11_KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM DAN PERUBAHAN JUMLAH SAHAM BEREDAR

Aksi Korporasi	Bursa Saham	Tanggal Pencatatan	Saham Tercatat	Jumlah Saham Tercatat	Jumlah Nominal (Rp)
Penawaran Umum Saham Perdana	BEJ & BES	16 Mei 1990	2.125.000	2.125.000	2.125.000.000
Dividen Saham	BEJ & BES	14 Juni 1993, 11 Juni 1993	1.062.500	3.187.500	3.187.500.000
Saham Bonus	BEJ & BES	22 September 1993, 13 September 1993	9.934.668	13.122.168	13.122.168.000
<i>Company Listing</i>	BEJ & BES	6 Desember 1993, 2 Desember 1993	8.500.000	21.622.168	21.622.168.000
Dividen Saham	BEJ & BES	22 Maret 1994, 21 Maret 1994	7.207.390	28.829.558	28.829.558.000
Penawaran Umum Terbatas I (PUT I)	BEJ & BES	9 Mei 1994	28.829.558	57.659.116	57.659.116.000
Penawaran Umum Terbatas II (PUT II)	BEJ & BES	12 Februari 1997	115.318.232	172.977.348	172.977.348.000
Pemecahan Nilai Nominal Saham	BEJ & BES	3 November 1997	172.977.348	345.954.696	172.977.348.000
Saham Baru dari Konversi Obligasi Wajib Konversi	BEJ & BES	11 Mei 2006, 5 Juni 2006	414.384.585	760.339.281	380.169.640.500
Pemecahan Nilai Nominal Saham	BEI	7 Agustus 2012	760.339.281	1.520.678.562	380.169.640.500
Penerbitan Saham untuk Pelaksanaan MESOP Tahap I-Grant Date 1	BEI	31 Mei 2013	5.936.000	1.526.614.562	381.653.640.500
Penerbitan Saham untuk Pelaksanaan MESOP Tahap I-Grant Date 2	BEI	30 Mei 2014	23.320.000	1.549.934.562	387.483.640.500
Penerbitan Saham untuk Pelaksanaan MESOP Tahap II-Grant Date 1	BEI	29 Mei 2015	16.025.000	1.565.959.562	391.489.890.500
Penerbitan Saham untuk Pelaksanaan MESOP Tahap II-Grant Date 2	BEI	31 Mei 2016	30.752.000	1.596.711.562	399.177.890.500
Pemecahan Nilai Nominal Saham	BEI	5 Juni 2017	1.596.711.562	15.967.115.620	399.177.890.500

Pencatatan Obligasi

TABEL 12_IKHTISAR PENCATATAN OBLIGASI

Efek Utang yang Diterbitkan	Tanggal Pencatatan di BEI	Tanggal Efektif	Peringkat Obligasi	Jumlah (Rp juta)	Nominal yang Diterbitkan (Rp juta)	Tanggal Jatuh Tempo	Status	
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014	Seri A:	10 Maret 2014	28 Februari 2014 (No. S-121/D.04/2014)		500.000	225.000	17 Maret 2015	Lunas
	Seri B:					55.000	7 Maret 2016	
	Seri C:					220.000	7 Maret 2017	
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015	Seri A:	20 Maret 2015	28 Februari 2014 (No. S-121/D.04/2014)		1.000.000	345.000	29 Maret 2016	Lunas
	Seri B:					105.000	19 Maret 2017	
	Seri C:					550.000	19 Maret 2018	
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016	Seri A:	26 Februari 2016	28 Februari 2014 (No. S-121/D.04/2014)		1.000.000	200.000	5 Maret 2017	Lunas
	Seri B:					142.000	25 Februari 2018	
	Seri C:					658.000	25 Februari 2019	
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016	Seri A:	26 Oktober 2016	17 Oktober 2016 (No. S588/D.04/2016)		1.000.000	317.000	5 November 2017	Lunas
	Seri B:					550.000	25 Oktober 2019	
	Seri C:					133.000	25 Oktober 2021	
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017	Seri A:	3 Maret 2017	17 Oktober 2016 (No. S-588/D.04/2016)		1.000.000	540.000	12 Maret 2018	Lunas
	Seri B:					460.000	2 Maret 2020	Belum jatuh tempo
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017	Seri A:	10 November 2017	17 Oktober 2016 (No. S-588/D.04/2016)		835.000	335.000	19 November 2018	Lunas
	Seri B:					100.000	9 November 2019	
	Seri C:					400.000	9 November 2020	
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018	Seri A:	7 Maret 2018	17 Oktober 2016 (No. S-588/D.04/2016)		2.165.000	946.000	16 Maret 2019	Lunas
	Seri B:					253.000	6 Maret 2020	Belum jatuh tempo
	Seri C:					966.000	6 Maret 2021	

Efek Utang yang Diterbitkan	Tanggal Pencatatan di BEI	Tanggal Efektif	Peringkat Obligasi	Jumlah (Rp juta)	Nominal yang Diterbitkan (Rp juta)	Tanggal Jatuh Tempo	Status
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018	Seri A:	27 Juni 2018	A+(idn) (No. S-67/D.04/2018)	740.000	188.000	6 Juli 2019	Lunas
	Seri B:	2018			552.000	26 Juni 2021	Belum jatuh tempo
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019	Seri A:	25 Februari 2019	A+(idn) (No. S-67/D.04/2018)	1.000.000	500.000	2 Maret 2020	Belum jatuh tempo
	Seri B:				500.000	22 Februari 2022	

2014

Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 Seri A, Seri B dan Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp500 miliar tercatat di BEI pada 10 Maret 2014. Obligasi ini mendapatkan peringkat 'AA-(idn)'. Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 dibantu oleh lembaga dan profesional bidang pasar modal, sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT Danareksa Sekuritas

Gedung Danareksa, Lt. 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110, Indonesia
Tel.: (62-21) 350 9777, 350 9888
Fax: (62-21) 350 0989, 350 1817

PT Indo Premier Securities

Wisma GKBI, Lt. 7, Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia
Tel.: (62-21) 5793 1168, 2806 1168
Fax: (62-21) 5793 2076, 5793 1220

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk

Kresna Tower, Lt. 6
Parc 18 Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (62-21) 2555 7000
Fax: (62-21) 2939 1950, 2939 1951

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha, Lt. 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (62-21) 2924 9088
Fax: (62-21) 2924 9168

Wali Amanat

PT Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega
Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790, Indonesia
Tel.: (62-21) 7917 5000
Fax: (62-21) 799 0720

Akuntan Publik

Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan

Prudential Tower, Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910, Indonesia
Tel.: (62-21) 5795 7300
Fax: (62-21) 5795 7301

Konsultan Hukum

Jusuf Indradewa & Partners*

Jl. Arteri Kedoya No. 8
Kedoya Selatan, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11520, Indonesia
Tel.: (62-21) 2254 4117 ext. 107
Fax: (62-21) 2254 436

* Alamat telah berubah dan keterangan alamat baru ada di bagian Pencatatan Obligasi 2017

Notaris

Fathiah Helmi, S.H.

Graha Irama, Lt. 6, Suite 6C
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2
Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Tel.: (62-21) 5290 7304-06
Fax: (62-21) 526 1136

Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia

Prudential Tower, Lt. 20
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta Selatan 12910, Indonesia
Tel.: (62-21) 5795 7755
Fax: (62-21) 5795 7750

Pada 17 Maret 2015, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 Seri A.

Pada 7 Maret 2016, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 Seri B.

Pada 7 Maret 2017, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 Seri C.

Pada 31 Desember 2017, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 Seri A, Seri B, dan Seri C.

2015

Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 Seri A, Seri B, dan Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp1 triliun tercatat di BEI pada 20 Maret 2015. Obligasi ini mendapatkan peringkat 'AA-(idn)'. Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 dibantu oleh lembaga dan profesional bidang pasar modal, sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT Danareksa Sekuritas

PT Indo Premier Securities

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Wali Amanat

PT Bank Mega Tbk

Akuntan Publik

Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan

Konsultan Hukum

Jusuf Indradewa & Partners

Notaris

Fathiah Helmi, S.H.

Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia

Pada 29 Maret 2016, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 Seri A.

Pada 19 Maret 2017, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 Seri B.

Pada 19 Maret 2018, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 Seri C.

Pada 31 Desember 2018, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 Seri A, Seri B, dan Seri C.

2016

Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016 Seri A, Seri B, dan Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp1 triliun tercatat di BEI pada 26 Februari 2016. Obligasi ini mendapatkan peringkat 'AA-(idn)'. Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016 dibantu oleh lembaga dan profesional bidang pasar modal, sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT Danareksa Sekuritas

PT Indo Premier Securities

PT Mandiri Sekuritas

Plaza Mandiri Lantai 28

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (62-21) 526 3445
Fax: (62-21) 526 3603, 526 3507

**PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk**

Wali Amanat

**PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk**

Menara BTN Lt. 18 Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130, Indonesia
Tel.: (62-21) 633 6789
Fax: (62-21) 634 6873

Akuntan Publik

**Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
& Rekan**

Konsultan Hukum

Jusuf Indradewa & Partners

Notaris

**Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi
Warsito, S.H.**

Jl. Panglima Polim V/11 Kebayoran Baru
Jakarta 12160, Indonesia
Tel.: (62-21) 739 2801
Fax: (62-21) 726 5090

Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia

Pada 5 Maret 2017, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016 Seri A.

Pada 25 Februari 2018, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016 Seri B.

Pada 25 Februari 2019, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016 Seri C.

Pada 31 Desember 2019, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016 Seri A, Seri B, dan Seri C.

2016

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 Seri A, Seri B, dan Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp1 triliun tercatat di BEI pada 26 Oktober 2016. Obligasi ini mendapatkan peringkat 'A+(idn)'. Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 dibantu oleh lembaga dan profesional bidang pasar modal, sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT Danareksa Sekuritas

PT DBS Vickers Securities Indonesia

DBS Bank Tower Lantai 32 Ciputra
World Jakarta 1
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Tel.: (62-21) 3003 4900
Fax: (62-21) 3003 4944

PT Mandiri Sekuritas

**PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk**

Wali Amanat

**PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk**

Akuntan Publik

**Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
& Rekan**

Konsultan Hukum

Jusuf Indradewa & Partners

Notaris

**Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi
Warsito, S.H.**

Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia

Pada 5 November 2017, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 Seri A.

Pada 25 Oktober 2019, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 Seri B.

Pada 31 Desember 2019, saldo pokok Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 yang terutang sebesar Rp133 miliar.

2017

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 Seri A dan Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1 triliun tercatat di BEI pada 3 Maret 2017. Obligasi ini mendapatkan peringkat 'A+(idn)'. Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 dibantu oleh lembaga dan profesional bidang pasar modal, sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT Danareksa Sekuritas

PT DBS Vickers Securities Indonesia

PT Mandiri Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk

Wali Amanat

PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk

Akuntan Publik

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
& Rekan

Konsultan Hukum

Jusuf Indradewa & Partners

Menara BCA (Grand Indonesia) Lt. 50
Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta Pusat 10310, Indonesia
Tel.: (62-21) 2254 4117 (*Hunting*)
Fax: (62-21) 2254 4367

Notaris

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi
Warsito, S.H.

Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia

Pada 12 Maret 2018, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 Seri A.

Pada 31 Desember 2019, saldo pokok Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 yang terutang sebesar Rp460 miliar.

2017

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 Seri A, Seri B, dan Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp835 miliar tercatat di BEI pada 10 November 2017. Obligasi ini mendapatkan peringkat 'A+(idn)'. Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 dibantu oleh lembaga dan profesional bidang pasar modal, sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk

Wali Amanat

PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk

Akuntan Publik

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
& Rekan

Konsultan Hukum

Jusuf Indradewa & Partners

Notaris

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi
Warsito, S.H.

Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia

Pada 19 November 2018, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 Seri A.

Pada 9 November 2019, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 Seri B.

Pada 31 Desember 2019, saldo pokok Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 yang terutang sebesar Rp400 miliar.

2018

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 Seri A, Seri B, dan Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp2,165 triliun tercatat di BEI pada 7 Maret 2018. Obligasi ini mendapatkan peringkat 'A+(idn)'. Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 dibantu oleh lembaga dan profesional bidang pasar modal, sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT Danareksa Sekuritas

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

PT Mandiri Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk

Wali Amanat

PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk

Akuntan Publik

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
& Rekan

Konsultan Hukum

Jusuf Indradewa & Partners

Notaris

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi
Warsito, S.H.

Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia

Pada 16 Maret 2019, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 Seri A.

Pada 31 Desember 2019, saldo pokok Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 yang terutang sebesar Rp1,219 triliun.

2018

Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 Seri A dan Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp740 miliar tercatat di BEI pada 27 Juni 2018. Obligasi ini mendapatkan peringkat 'A+(idn)'. Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 dibantu oleh lembaga dan profesional bidang pasar modal, sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT Danareksa Sekuritas

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk

Wali Amanat

PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk

Akuntan Publik

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
& Rekan

Konsultan Hukum

Jusuf Indradewa & Partners

Notaris

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi
Warsito, S.H.

Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia

Pada 6 Juli 2019, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 Seri A.

Pada 31 Desember 2019, saldo pokok Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 yang terutang sebesar Rp552 miliar.

2019

Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019 Seri A dan Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1 triliun tercatat di BEI pada 25 Februari 2019. Obligasi ini mendapatkan peringkat 'A+(idn)'. Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019 dibantu oleh lembaga dan profesional bidang pasar modal, sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT Danareksa Sekuritas

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Wali Amanat

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Akuntan Publik

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan

Konsultan Hukum

Jusuf Inradewa & Partners

Notaris

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia

DBS Bank Tower Lt. 24, Suite 2403
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Tel: (62-21) 2988 6800
Fax: (62-21) 2988 6822

Pada 31 Desember 2019, saldo pokok Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019 yang terutang sebesar Rp1 triliun.

Wali Amanat

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Menara BTN
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130
Indonesia
Tel: (62-21) 633 6789 ext. 1844-1847
www.btn.co.id

Biaya jasa untuk periode penugasan 2016–2022 berkisar antara 0,0025%-0,0088% dari jumlah emisi obligasi.

Konsultan Hukum

Jusuf Indradewa & Partners

Menara BCA (Grand Indonesia) Lt. 50
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta Pusat 10310
Indonesia
Tel.: (62-21) 2254 4117 (*Hunting*)
Fax: (62-21) 2254 4367
www.jusufind.com

Biaya jasa untuk periode penugasan 2019–2022 berkisar 0,0138% dari jumlah emisi obligasi.

Kantor Akuntan Publik

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan

Prudential Tower Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910
Indonesia
Tel: (62-21) 5795 7300
Fax: (62-21) 5795 7301
www.bdo.co.id

Biaya jasa untuk periode penugasan 2019 adalah Rp742,5 juta.

Biro Administrasi Efek

PT Sirca Datapro Perdana

Wisma Sirca
Jl. Johar No. 18, Menteng
Jakarta 10340
Indonesia
Tel: (62-21) 314 0032, 390 0645
Fax: (62-21) 314 0185, 390 0652, 390 0671

Biaya jasa untuk periode penugasan 2019–2020 adalah Rp118,8 juta.

Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia

DBS Bank Tower Lt. 24, Suite 2403
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Indonesia
Tel: (62-21) 2988 6800
Fax: (62-21) 2988 6822
www.fitchratings.com/site/indonesia

Biaya jasa untuk periode penugasan 2019 adalah Rp385 juta.





SUMBER DAYA MANUSIA

Pengelolaan Sumber Daya Manusia	106
Manajemen Rekrutmen	109
Pengembangan Sumber Daya Manusia	110
Pengelolaan Kinerja	112
Pengembangan Karier	113
Kesejahteraan Karyawan	114
Hubungan Industrial	116
Kesehatan dan Keselamatan Kerja	116
Teknologi Pendukung Human Capital	117
Demografi Karyawan	118

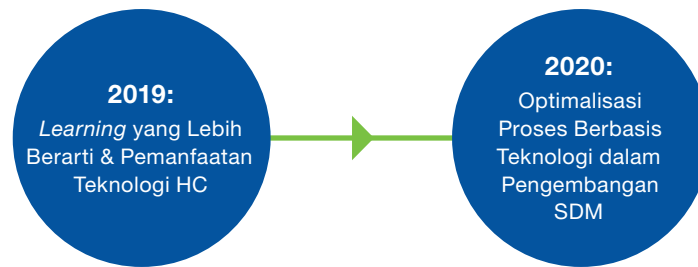


“Dengan penugasan orang-orang yang tepat sesuai kompetensi dan keahlian mereka, setiap individu dapat terus berkarya dan menunjukkan kinerja terbaik mereka.”



dan kemampuan SDM dalam beradaptasi dengan perubahan erat kaitannya dengan kegigihan dan kelincihan organisasi dalam menerapkan kebijakan serta mengelola bisnis secara dinamis dan adaptif terhadap perubahan.

GRAFIK 7_KERANGKA KERJA HUMAN CAPITAL



Dimulai dari perancangan organisasi dan SDM yang disesuaikan dengan tujuan organisasi, strategi rekrutmen yang efektif sekaligus kreatif, pengelolaan *talent* berbasis model kompetensi yang relevan, internalisasi budaya yang mendorong proses transformasi, penyusunan *performance-based reward*, penerapan HC Business Partner yang mumpuni, dan tentunya didukung oleh penerapan teknologi SDM terkini.

Kelima faktor ini juga yang menjadi strategi Departemen Human Capital dalam mengelola SDM untuk membawa Perusahaan dalam jalur transformasi yang diinginkan. Manajemen terus menyelaraskan teknik-teknik rekrutmennya agar dapat menarik minat generasi masa kini, sehingga mampu mengidentifikasi dan memberikan program-program pengembangan *talent* yang terbaik. Karakter utama generasi muda, yakni sangat cepat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, diberdayakan seoptimal mungkin agar dapat menghadirkan gaya manajemen yang “lincah” dan bergerak cepat mengikuti gelombang dan ritme bisnis yang dinamis di Perusahaan. Untuk mendukung hal ini, manajemen menyediakan ruang yang cukup untuk berinovasi dan bertumbuh bagi seluruh generasi sehingga membuat Perusahaan mampu bersaing di pasar industri pembiayaan.

Budaya Perusahaan

Nilai-nilai budaya GREAT serta keteladanan (*role-modeling*) dari para *Leaders* di organisasi terus diinternalisasikan ke seluruh karyawan, agar selalu menerapkan perilaku berbasis nilai-nilai GREAT dalam keseharian mereka. Proses internalisasi budaya memadukan pelaksanaan kegiatannya dengan sarana media digital. Internalisasi budaya dilaksanakan melalui program-program berikut yang berlangsung di kantor pusat dan seluruh kantor cabang:

Integritas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memberikan kemampuan bagi BFI Finance untuk menghadirkan nilai lebih dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan sekitar. Dengan penugasan orang-orang yang tepat sesuai kompetensi dan keahlian mereka, setiap individu dapat terus berkarya dan menunjukkan kinerja terbaik mereka.

Transformasi Perusahaan bersandar pada peranan Departemen Human Capital dan seluruh manajemen puncak dalam pengelolaan dan pemberdayaan SDM secara berkelanjutan. Keluwesan

- Kunjungan *Leaders* ke cabang melalui program *Leaders Inspire*;
- *Town Hall Meeting*;
- *Annual Kick-Off*;
- *GREAT Video Competition* (setiap dua bulan);
- Pembuatan *vlog* oleh *Leaders*, bernama *BFI Captain's Vlog*;
- *E-flyer* berisi kutipan *Leaders*, bernama *Captains Inspire*; dan
- Video pendek kegiatan sehari-hari bertajuk *BFIdaily*.

Berbagai materi terkait internalisasi budaya perusahaan ini disebarluaskan menggunakan media digital, seperti e-mail, grup WhatsApp, dan saluran media sosial resmi yang dikelola Departemen Human Capital BFI Finance (#BFIners) di Instagram dan YouTube.

Pencapaian Human Capital 2019

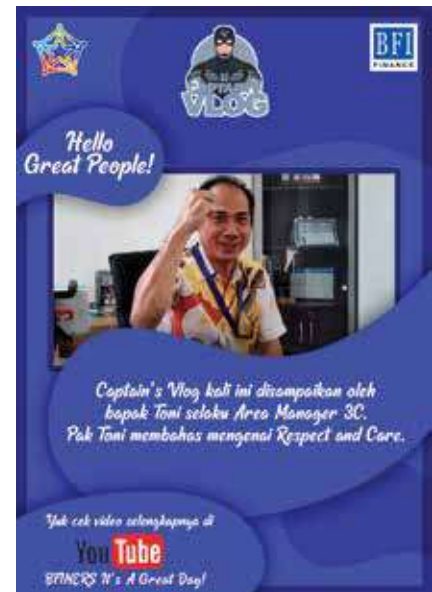
Keberhasilan sebuah organisasi tidak terlepas dari kualitas SDM-nya. Sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan-perusahaan

yang telah menjalankan strategi pengelolaan manajemen SDM yang selaras dengan strategi bisnisnya, majalah *SWA* bersama Lembaga Manajemen FEB Universitas Indonesia menggelar ajang *HR Excellence Award* di tiap tahunnya. Di 2019, BFI Finance pertama kali mengikuti ajang tersebut dan berhasil meraih dua penghargaan untuk dua kategori, yaitu "HR Technology (AA Rating)" dan "HR Transformation (A Rating)".

BFI Finance juga masuk di sembilan besar perusahaan idaman pilihan karyawan untuk bekerja. Penghargaan ini diraih oleh Perusahaan dari ajang *Employer of Choice Survey* yang diselenggarakan oleh Korn Ferry, dengan melibatkan 2.000 karyawan kantor cabang dan kantor pusat BFI Finance sebagai responden.

Selain itu, Perusahaan juga kembali meraih penghargaan *HR Asia Awards Indonesia "Best Companies to Work for 2019"* dari majalah *HR Asia* untuk tahun yang ketiga berturut-turut (2017–2019), sebagai bukti pengelolaan SDM-nya yang prima. *HR Asia Awards* menggunakan hasil pengukuran indeks keterlibatan karyawan sebagai kriteria penilaiannya.

Captain's Vlog



Captain's Inspire



MANAJEMEN REKRUTMEN

Untuk mengisi kebutuhan yang muncul seiring perkembangan bisnis, BFI Finance melakukan rekrutmen secara berkala, baik untuk mengisi posisi strategis, fungsional di lapangan dan juga *trainee*. Rekrutmen untuk mengisi posisi-posisi strategis dan *trainee* dilakukan di kantor pusat, sedangkan delegasi rekrutmen untuk posisi fungsi lapangan berlangsung di setiap cabang.

Dalam rekrutmen karyawan, manajemen menyelaraskan teknik rekrutmennya untuk menjaring generasi milenial dan tenaga ahli khusus. Efektivitas rekrutmen di Perusahaan terus ditingkatkan melalui penerapan teknologi, seperti:

- Analisis kebutuhan dengan pendekatan antisipatif;
- Penyebaran lowongan pekerjaan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, [Career.com](https://www.career.com), LinkedIn, dan JobStreet;
- Pemanfaatan platform digital *BFI Jobs* dan *Applicant Tracking System* untuk menerima dan memproses calon karyawan baru;

- Kerja sama dengan *startup* dan *coding school* (Tech in Asia, Hacktiv8, Purwadhika, dan Glints) untuk pencarian *talent* yang berkompentensi khusus di dunia teknologi; serta
- Pemberian program beasiswa untuk mencari calon-calon inovator, *data scientist*, dan *web developer* yang akan menggerakkan bisnis pembiayaan *peer-to-peer lending* berbasis digital melalui FIT.

Untuk mendapatkan sumber-sumber tenaga kerja yang andal, Perusahaan melakukan *sourcing* melalui kolaborasi dengan pihak eksternal sekaligus memanfaatkan jaringan dari relasi karyawan internal. Di 2019, program rekrutmen yang memiliki *join rate* tertinggi adalah melalui karyawan BFI Finance sendiri, yaitu program *employee-get-employee*. Perusahaan juga bekerja sama dengan banyak universitas di Indonesia, melalui program beasiswa, kesempatan magang, rekrutmen di kampus, dan *campus awareness*.



Seiring dengan perkembangan bisnis, pemenuhan kebutuhan SDM yang berkualitas merupakan tantangan terbesar dalam pengelolaan SDM di Perusahaan. Dengan jumlah karyawan 12.127 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan cakupan 423 outlet, Perusahaan terus memastikan kompetensi seluruh karyawan berkembang secara merata.

Selama 2019, Perusahaan memberikan 16 program pelatihan bagi 26.574 karyawan, naik 7,65% dari 2018 sebesar 24.685 karyawan dari seluruh level, status ketenagakerjaan, fungsi, dan daerah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Program pengembangan SDM dikoordinasikan dan difasilitasi oleh BFI Learning Institute, yang bertugas merumuskan program-program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan bisnis yang kerap dijumpai, melalui metode-metode penyampaian yang atraktif dan efektif agar mudah diserap pesertanya.

BFI Learning Institute juga mendorong karyawan untuk aktif menggunakan platform M-BEAT (Mobile BFI Edustream & Training). Fitur M-BEAT berupa *Video Library* memuat lebih dari 266 modul video pembelajaran, selain itu fitur *Mobile Video Streaming* dapat diakses seluruh karyawan secara interaktif pada saat berlangsungnya kegiatan penting di Perusahaan. Melalui pemanfaatan M-BEAT, bentuk pembelajaran melalui *smartphone* yang lebih disukai para karyawan kaum milenial menjadi terfasilitasi.

Program-program pelatihan yang konvensional (*offline*) terus dilaksanakan, baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Program-program ini antara lain berbentuk:

- *Sharing Session/Leader's Talk*;
- *Great Leaders Program* (GLP) untuk persiapan dan pembekalan karier;
- Program Peningkatan Kompetensi (*Enhancement Programs*) yang disinergikan dengan GLP;
- Pelatihan dan sertifikasi eksternal; serta
- Bantuan Pendidikan Profesional.





Di 2019, biaya pelatihan mencapai Rp12,8 miliar, yang mencakup pengembangan kompetensi dan kapabilitas karyawan, sekaligus penggantian biaya akomodasi selama pelatihan dan komponen pendukung lainnya. Menurunnya biaya pelatihan di 2019 karena inisiasi Perusahaan dalam memanfaatkan saluran digital melalui optimasi penggunaan M-BEAT, sehingga pelatihan banyak dilakukan secara online/mobile. BFI Learning Institute juga memanfaatkan teknologi (Zoom) untuk melakukan *video conference*, sehingga karyawan yang berada di cabang, tidak perlu hadir ke kantor pusat lagi untuk melakukan presentasi proyek pelatihan.

TABEL 13_METRIKS PENGEMBANGAN SDM

	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya
Biaya Pelatihan	Rp32,3 miliar	Rp12,8 miliar	-Rp19,5 miliar
Jumlah Peserta Pelatihan	24.685	26.574	1.889
Jumlah Program Pelatihan	56	16	-40

TABEL 14_PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jenis Pelatihan	Jumlah Program	Jumlah Peserta
Pelatihan Internal	7	24.855
Pelatihan Eksternal	9	1.719
Jumlah	16	26.574

TABEL 15_PESERTA PELATIHAN BERDASARKAN JENJANG KEPANGKATAN

Jenjang Kepangkatan	Pelatihan Internal	Pelatihan Eksternal	Jumlah Peserta Pelatihan
Dewan Komisaris & Direksi	-	7	7
Senior Manager	237	258	495
Junior Manager	304	139	443
Officer	8.906	383	9.289
Staff	15.408	932	16.340
Jumlah	24.855	1.719	26.574

TABEL 16_RATA-RATA JAM PELATIHAN PER KARYAWAN PER TAHUN

Jenjang Kepangkatan	Laki-laki			Perempuan			Rata-Rata Jam Pelatihan per Karyawan
	Jumlah Jam Pelatihan	Jumlah Karyawan	Rata-Rata Jam Pelatihan per Karyawan	Jumlah Jam Pelatihan	Jumlah Karyawan	Rata-Rata Jam Pelatihan per Karyawan	
Dewan Komisaris & Direksi	95	11	9	9	1	9	8,7
Senior Manager	5.634	367	15	1.428	93	15	15,4
Junior Manager	11.665	269	43	3.339	77	43	43,4
Officer	136.458	2.342	58	53.021	910	58	58,3
Staff	167.232	6.042	28	55.439	2.003	28	27,7
Jumlah	321.084	9.031	36	113.236	3.084	37	35,8

Untuk memastikan setiap karyawannya bekerja dengan standar kinerja tinggi, BFI Finance melaksanakan sejumlah mekanisme pengelolaan kinerja secara berkelanjutan dengan tahapan-tahapan implementasi pengelolaan kinerja sebagai berikut:

1. *Employee Goal Setting*:

- Karyawan menyusun Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicators* (KPI).
- KPI karyawan diturunkan secara *cascade* dari KPI atasannya untuk menjamin kesinambungan kinerja.

- Atasan memberikan masukan dan persetujuan terhadap KPI yang disusun bawahannya.

2. *Performance Review*: atasan melakukan penilaian pencapaian KPI setiap bawahan, setiap tengah tahun.
3. *Performance Appraisal*: atasan menilai pencapaian KPI bawahannya dalam setahun pada akhir tahun untuk menentukan pemberian insentif dan *profit sharing* bagi karyawan yang berkinerja unggul.

Di 2019, struktur KPI BFI Finance mengalami perubahan dengan adanya aspek “peranan pimpinan dalam mengembangkan timnya”, dan dengan diperkuatnya aspek “keberadaan suksesor”. Perubahan ini membuat KPI saat ini lebih berimbang dalam hal manajerial, kepemimpinan, dan transformasi, dibandingkan sebelumnya.

Selain itu, di 2019 Perusahaan mengembangkan *Employee Dashboard* bagi para pimpinan, untuk melihat komposisi tim di bawah mereka, status kepegawaian, dan produktivitas secara *real-time*. Inovasi ini memungkinkan pemantauan kinerja dan penerapan langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk mencari solusi bagi isu kinerja yang muncul.

TABEL 17_ PRODUKTIVITAS KARYAWAN

Deskripsi	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Jumlah Karyawan	11.171	12.127	956	8,6%
Jumlah Outlet	401	423	22	5,5%
Karyawan/Jaringan	27,9	28,7	0,9	2,9%
Jumlah Kontrak Baru/Jumlah Karyawan	39,3	40,2	0,9	2,3%

PENGEMBANGAN KARIER

BFI Finance berupaya mewujudkan potensi seluruh karyawannya secara terarah, dengan menerapkan mekanisme pengembangan karier yang dikelola bersama-sama antara karyawan dengan manajemen (melalui Departemen Human Capital) yang terbagi menjadi dua tahapan, yaitu *GREAT Talent Review* dan *People Development*.

Pada tahapan *GREAT Talent Review*, potensi karyawan dipetakan menggunakan metode *Human Asset Value* (HAV) dan diproyeksikan terhadap kompetensi mereka masing-masing yang mencakup aspek kepemimpinan, fungsional, dan teknis.

Untuk karyawan berkinerja dan berpotensi tinggi (disebut *talent*), manajemen secara khusus mengembangkan mereka melalui program *Talent Development* yang mencakup kegiatan *bootcamp*, *flex-learning* dan *coaching* reguler dari para *Leaders* setingkat Direksi dan manajemen senior, secara langsung maupun melalui media digital.



Lily Listyani Ongkodjojo

Corporate Manager Cabang Surabaya

"*Humble* adalah kata yang tidak lepas dari ingatan saya ketika masuk BFI Finance dan melihat Direksi pertama kali duduk makan di kantin karyawan seperti kami. Maret 2013 merupakan awal perjalanan karir saya bergabung sebagai Marketing di BFI Finance Cabang Surabaya. Pengetahuan dari pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh BFI Finance sangat berharga bagi kami. Hingga saya menduduki posisi Corporate Business Manager Surabaya, banyak nilai-nilai yang bertambah dalam diri saya, salah satunya adalah kemauan untuk terus bertumbuh tanpa batas. Melalui nilai-nilai ini serta diimbangi oleh dinamika Perusahaan, saya menjadi wanita karier yang gigih dalam menghadapi situasi apapun. Saya bersyukur dapat menjadi bagian dalam nilai-nilai dan dinamika di PT BFI Finance Indonesia Tbk dalam menghadapi setiap perubahan dalam kondisi perekonomian."

TABEL 18_JUMLAH KARYAWAN PESERTA PROGRAM MANAJEMEN TALENTA DAN SUKSESI

Jenjang Kepangkatan	31 Desember 2018			31 Desember 2019			Perbandingan Tahun Sebelumnya	
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah	Persentase
Manajerial ke atas	110	44	154	172	40	212	58	37,7%
Supervisor	243	51	294	844	278	1.122	828	281,6%
Jumlah	353	95	448	1.016	318	1.334	886	197,8%

KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat loyalitas dan keterikatan karyawan terhadap Perusahaan, serta memastikan karyawan menunjukkan kinerja terbaiknya, BFI Finance menerapkan standar kompetitif dalam merumuskan paket dan struktur remunerasi yang berlaku untuk seluruh lapisan karyawannya. Kebijakan remunerasi Perusahaan juga disesuaikan dari waktu ke waktu, sesuai kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di industri pembiayaan dan pasar tenaga kerja di wilayah operasional Perusahaan.

Selain berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku terkait pengupahan dan standar upah minimum, struktur gaji dan bonus kinerja karyawan juga ditentukan oleh faktor dasar (jenjang kepangkatan) dan faktor lainnya (seperti prestasi dan kontribusi terhadap kemajuan individual, tim, dan Perusahaan). Di 2019, Perusahaan telah menetapkan struktur upah yang ketentuannya secara bertahap disosialisasikan kepada karyawan.



Toni Hanafir Nanda

Operational Quality Assurance Unit Head, Kantor Pusat

“Banyak kesempatan yang telah diberikan oleh BFI Finance untuk pengembangan karier saya sejak bergabung di 2010 sebagai BOSH, Regional Operation, Branch Manager, Network Management hingga menjabat sebagai QA Unit Head. Dalam perjalanan karier saya, BFI Finance senantiasa memberikan berbagai fasilitas pelatihan, termasuk *soft skills*. Selain kesempatan karier yang terbuka lebar, suasana kerja yang nyaman, kekeluargaan yang baik, tingkat kesejahteraan karyawan pun tidak luput dari perhatian manajemen. Hal ini menjadi alasan bagi saya untuk terus berkembang bersama BFI Finance.”

Paket remunerasi yang berlaku di Perusahaan untuk seluruh karyawan tetapnya mencakup:

1. Gaji pokok;
2. Tunjangan karyawan, meliputi:
 - a. Tunjangan perumahan;
 - b. Tunjangan perjalanan (transportasi);
 - c. Tunjangan kesusahan (*hardship allowance*);
 - d. Tunjangan hari raya (THR) setahun sekali;
 - e. Tunjangan medis (penggantian biaya perawatan rumah sakit);
3. Program Kepemilikan Motor (*Motorcycle Ownership Program—MOP*) dan Program Kepemilikan Mobil (*Car Ownership Program—COP*);
4. Program kepemilikan fasilitas penunjang kerja;
5. Cuti melahirkan;
6. Keanggotaan dalam program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian);
7. Asuransi kecelakaan diri dan asuransi jiwa; serta
8. Bonus kinerja (opsional).

Semangat kerja karyawan juga berkaitan erat dengan kinerja mereka. Oleh karena itu, Perusahaan gencar menyelenggarakan aktivitas untuk membangun kebersamaan antarkaryawan dan menghilangkan batasan-batasan kepangkatan melalui interaksi informal. Aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan di 2019 termasuk kegiatan olahraga (bulutangkis, bola basket, tenis meja, futsal, senam zumba, dan lari), kompetisi video (tentang pengamalan budaya Perusahaan), acara *outbound*, *outing*, serta kegiatan komunitas (*music corner*, nonton bareng, buka puasa bersama).

Terciptanya hubungan industrial yang produktif dan saling menguntungkan merupakan sasaran BFI Finance dalam mengelola interaksinya dengan seluruh karyawan. Untuk itu, BFI Finance senantiasa mematuhi seluruh peraturan yang berlaku terkait ketenagakerjaan dan juga menerapkan Peraturan Perusahaan untuk dipatuhi bersama.

Peraturan Perusahaan memuat aspek-aspek ketenagakerjaan yang penting, seperti kondisi kerja, dialog, pengembangan kompetensi, kesetaraan hak dan keadilan, dan perlindungan hukum. Peraturan Perusahaan melindungi seluruh hak karyawan Perusahaan.

Peraturan Perusahaan yang berlaku selama 2019 disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang berlaku untuk periode tiga tahun.

Dalam lingkungan BFI Finance tidak terdapat serikat pekerja, dengan pertimbangan bahwa karyawan Perusahaan belum memandang perlunya pembentukan serikat pekerja untuk menyalurkan aspirasi mereka.

Setiap keluhan karyawan terkait dengan pemenuhan hak-hak mereka dan pelanggaran terhadap kesepakatan dalam Peraturan Perusahaan dapat langsung ditunjukkan oleh karyawan kepada pihak manajemen, secara lisan ataupun tertulis, untuk kemudian diselesaikan secara berjenjang berdasarkan struktur organisasi BFI Finance.

Di 2019, BFI Finance tidak menerima keluhan yang berarti dari karyawan terkait pelaksanaan hubungan industrialnya.

Perusahaan mengupayakan pembentukan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif menunjang produktivitas pekerja. Oleh karenanya, BFI Finance menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) yang dikelola oleh Departemen Human Capital dan Unit Infrastructure Development di bawah Divisi Operations.

Klausul-klausul terkait K3 dicantumkan dalam Peraturan Perusahaan tentang Pencegahan dan Penanggulangan. Perusahaan mewajibkan seluruh karyawannya untuk mencegah dan menghindari potensi terjadinya kerusakan, kecelakaan kerja atau musibah di tempat kerja atau peristiwa lainnya yang berpotensi merugikan aset Perusahaan, serta untuk berinisiatif menanggulangnya apabila kejadian tersebut dijumpai saat mereka bekerja.

Karyawan Perusahaan dilindungi oleh beberapa jenis asuransi, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja dari BPJS Ketenagakerjaan, serta asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan diri dari perusahaan asuransi mitra.

BFI Finance memastikan bahwa standar dan perizinan terkait keamanan untuk gedung dan fasilitas perkantoran yang BFI Finance gunakan senantiasa terpenuhi dan mutakhir. Setiap sistem dan infrastruktur yang mendukung operasional gedung (misalnya lift, genset, dan pengolahan limbah) dipastikan bekerja dengan baik secara berkala, dan perizinannya dimutakhirkan. Sementara itu, aset-aset penting termasuk dokumen milik pelanggan pada Pusat Kustodian (*Custodian Center*) dilindungi di dalam ruangan tahan gempa dan kebakaran, yang terletak di Kantor Pusat BFI Finance (BFI Tower).

BFI Finance rutin menyelenggarakan latihan evakuasi, uji coba peralatan pemadaman kebakaran, dan pemeliharaan rutin fasilitas gedung. Di setiap lantai, tersedia sarana penyelamatan atas bencana kebakaran dan kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). Tim keadaan darurat siaga untuk menanggulangi kejadian-kejadian darurat dan mempersiapkan seluruh karyawan untuk tanggap dan bertindak tepat terhadap kejadian tersebut.

Karyawan BFI Finance yang bekerja di lapangan, antara lain mereka yang menjalankan fungsi pemasaran, penagihan, dan operasional, menghabiskan banyak waktu mereka di jalan. Untuk melindungi mereka dari kemungkinan kecelakaan lalu lintas, BFI Finance senantiasa memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan berlalu lintas dan mengenakan alat perlindungan yang memadai saat berkendara.

TABEL 19_KECELAKAAN KERJA

Tingkat Kecelakaan Kerja	Karyawan Lapangan	Karyawan Non-Lapangan	Jumlah
Kecelakaan Berat	1	2	3
Kecelakaan Ringan	15	9	24
Jumlah Kasus	16	11	27

BFI Finance mendorong semua karyawannya untuk peduli dengan kesehatan mereka dan lingkungan di mana mereka berada, serta memahami potensi berbagai penyakit akibat kerja yang mungkin timbul dari aktivitas sehari-hari mereka. Di 2019, kampanye kesehatan yang Perusahaan selenggarakan meliputi pemeriksaan kesehatan secara berkala, pembekalan informasi seputar wabah penyakit, kondisi lingkungan yang menyebabkan bahaya kesehatan, dan promosi gaya hidup sehat.

TEKNOLOGI PENDUKUNG HUMAN CAPITAL

Pada 2019, Departemen Human Capital melakukan terobosan untuk memberikan kemudahan layanan informasi karyawan internal dengan menghadirkan BELLA (*BFI Employee Personal Assistant*) yang dapat diakses melalui aplikasi LINE. BELLA merupakan asisten virtual khusus untuk karyawan BFI Finance, yang berfungsi sebagai pemberi informasi terbaru dan menjadi sarana tercepat untuk bertanya hal-hal seputar SDM.

Untuk menerapkan pembelajaran yang efektif bagi karyawan, terutama generasi milenial, metode belajar dilengkapi dengan aplikasi *mobile digital* M-BEAT, yang dapat diakses seluruh karyawan untuk mengikuti pelatihan secara online menggunakan *smartphone* kapan saja dan di mana saja. Selain itu, Perusahaan juga menyediakan wadah *HC Dashboard* karyawan yang dapat diakses melalui aplikasi *mobile* secara *real-time*. Penyempurnaan *Human Capital Information System* (HCIS) juga terus berjalan sehingga meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan karyawan dalam hal informasi dan transaksi terkait kepegawaian.

Seluruh aspek pengelolaan SDM di BFI Finance didukung oleh HCIS sebagai suatu sistem informasi terintegrasi. Setiap tahunnya dilakukan pembaruan, peningkatan, serta penyempurnaan terhadap fitur-fitur HCIS. Tujuannya adalah untuk mengotomasi kegiatan pengelolaan SDM Perusahaan secara optimal dan efektif.

Karyawan dapat memanfaatkan layanan *employee self-service* dalam fitur-fitur HCIS, antara lain, pengajuan cuti, lembur, *medical reimbursement*, pembaruan profil karyawan, dan izin perjalanan dinas.

Para pimpinan dan jajaran manajemen dapat memantau produktivitas kinerja setiap tim dan individu secara *real-time*, melalui *Human Capital Dashboard* sehingga mereka dapat mengambil keputusan strategis dan menyusun rencana kerja secara lebih cepat dan akurat.

Pada 2019, BFI Finance merekrut karyawan baru untuk mengisi posisi-posisi baru yang tercipta seiring perluasan bisnisnya dan menggantikan karyawan-karyawan lama yang meninggalkan pekerjaannya karena berbagai alasan. Jumlah karyawan Perusahaan per akhir 2019 meningkat 956 orang atau 8,6% dibandingkan per akhir 2018.

Lebih dari 90% dari karyawan baru yang direkrut di 2019 merupakan generasi milenial. Kondisi ini mencerminkan profil demografis karyawan BFI Finance yang sangat muda dan tanggap terhadap perkembangan teknologi digital.



TABEL 20_JUMLAH KARYAWAN

Deskripsi	31 Desember 2018	31 Desember 2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Jumlah Karyawan	11.171	12.127	956	8,6%

TABEL 21_JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN DIREKTORAT

Deskripsi	31 Desember 2018			31 Desember 2019			Perbandingan Tahun Sebelumnya	
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah	Persentase
Dewan Komisaris	7	2	9	7	2	9	0	0%
Direksi	5	-	5	5	-	5	0	0%
Direktorat CEO (Presiden Direktur)	146	57	203	224	124	348	145	71,4%
Direktorat Bisnis	4.319	805	5.124	4.271	872	5.143	19	0,4%
Direktorat Operasional & SDM	731	1.477	2.208	1.087	1.580	2.667	459	20,8%
Direktorat Risiko Perusahaan	2.917	448	3.365	3.204	484	3.688	323	9,6%
Direktorat Keuangan	204	53	257	218	49	267	10	3,9%
Jumlah	8.329	2.842	11.171	9.016	3.111	12.127	956	8,6%

TABEL 22_JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

Status Kepegawaian	31 Desember 2018			31 Desember 2019			Perbandingan Tahun Sebelumnya	
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah	Persentase
Karyawan Tetap	4.797	1.849	6.646	4.933	1.918	6.851	205	3,1%
Karyawan Kontrak	3.532	993	4.525	4.083	1.193	5.276	751	16,6%
Jumlah	8.329	2.842	11.171	9.016	3.111	12.127	956	8,6%

TABEL 23_JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN KONTRAK KERJA

Kontrak Kerja	31 Desember 2018			31 Desember 2019			Perbandingan Tahun Sebelumnya	
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah	Persentase
Purnawaktu	8.329	2.842	11.171	9.016	3.111	12.127	956	8,6%
Paruh Waktu	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	8.329	2.842	11.171	9.016	3.111	12.127	956	8,6%

TABEL 24_JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN WILAYAH KERJA

Wilayah Kerja	31 Desember 2018			31 Desember 2019			Perbandingan Tahun Sebelumnya	
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah	Persentase
Kantor Pusat	499	398	897	610	480	1.090	193	21,5%
Jadeta	830	232	1.062	892	269	1.161	99	9,3%
Jawa & Bali	3.417	1.043	4.460	3.717	1.145	4.862	402	9,0%
Sumatra	1.400	476	1.876	1.455	486	1.941	65	3,5%
Kalimantan	790	243	1.033	883	270	1.153	120	11,6%
Indonesia Timur	1.393	450	1.843	1.459	461	1.920	77	4,2%
Jumlah	8.329	2.842	11.171	9.016	3.111	12.127	956	8,6%

TABEL 25_JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan	31 Desember 2018			31 Desember 2019			Perbandingan Tahun Sebelumnya	
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah	Persentase
Magister & Doktor	36	16	52	37	18	55	3	5,8%
Sarjana	4.775	2.029	6.804	5.350	2.274	7.624	820	12,1%
Diploma	2.831	727	3.558	889	413	1.302	(2.256)	-63,4%
SMA atau di bawahnya	687	70	757	2.740	406	3.146	2.389	315,6%
Jumlah	8.329	2.842	11.171	9.016	3.111	12.127	956	8,6%

TABEL 26_JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN JENJANG KEPANGKATAN

Jenjang Kepangkatan	31 Desember 2018			31 Desember 2019			Perbandingan Tahun Sebelumnya	
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah	Persentase
Dewan Komisaris & Direksi	12	2	14	12	2	14	0	0%
Senior Manager	142	37	179	162	44	206	27	15,1%
Junior Manager	447	102	549	494	134	628	79	14,4%
Officer	2.099	822	2.921	2.368	922	3.290	369	12,6%
Staff	5.629	1.879	7.508	5.980	2.009	7.989	481	6,4%
Jumlah	8.329	2.842	11.171	9.016	3.111	12.127	956	8,6%

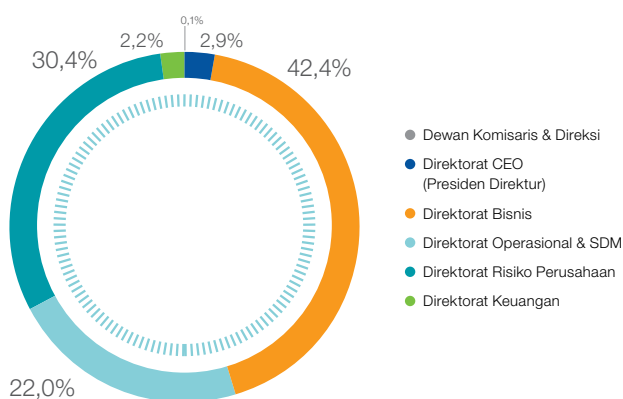
TABEL 27_JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN KELOMPOK USIA

Kelompok Usia	31 Desember 2018			31 Desember 2019			Perbandingan Tahun Sebelumnya	
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah	Persentase
< 25 tahun	2.077	1.217	3.294	1.559	1.011	2.570	(724)	-22,0%
25-30 tahun	3.965	1.177	5.142	4.401	1.447	5.848	706	13,8%
31-40 tahun	2.041	391	2.432	2.730	584	3.314	882	36,3%
41-50 tahun	222	49	271	290	52	342	71	26,2%
> 50 tahun	24	8	32	36	17	53	21	65,6%
Jumlah	8.329	2.842	11.171	9.016	3.111	12.127	956	8,6%

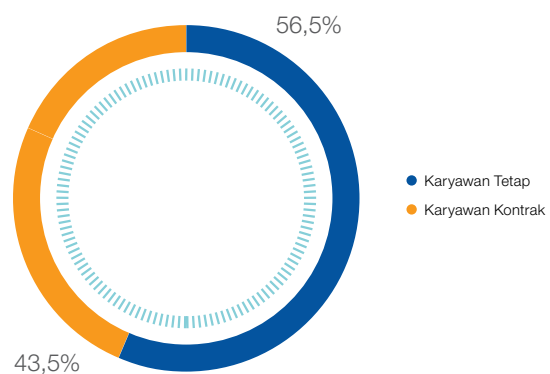
TABEL 28_JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN MASA KERJA

Masa Kerja	31 Desember 2018			31 Desember 2019			Perbandingan Tahun Sebelumnya	
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah	Persentase
< 3 tahun	5.508	1.708	7.216	6.097	1.951	8.048	832	11,5%
3-5 tahun	1.450	536	1.986	1.347	488	1.835	(151)	-7,6%
6-10 tahun	1.020	437	1.457	1.173	490	1.663	206	14,1%
> 11 tahun	351	161	512	399	182	581	69	13,5%
Jumlah	8.329	2.842	11.171	9.016	3.111	12.127	956	8,6%

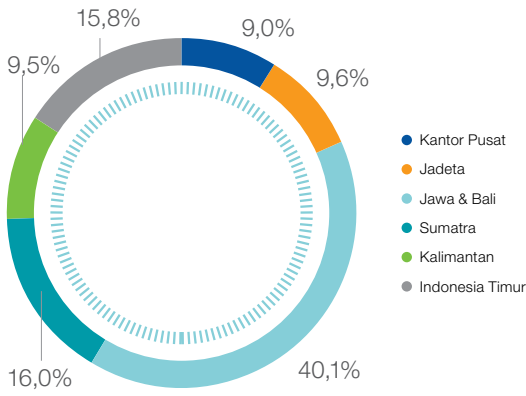
GRAFIK 8_JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN DIREKTORAT



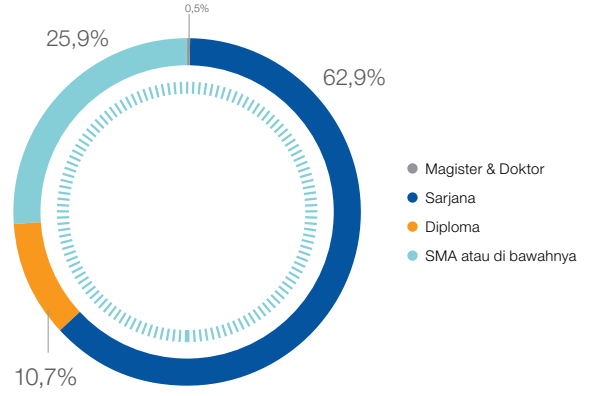
GRAFIK 9_JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN



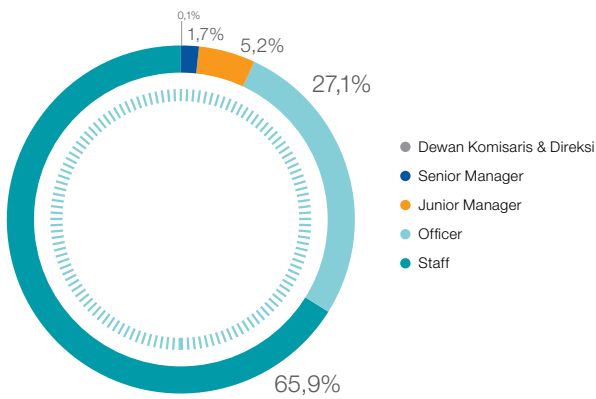
GRAFIK 10_JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN WILAYAH KERJA



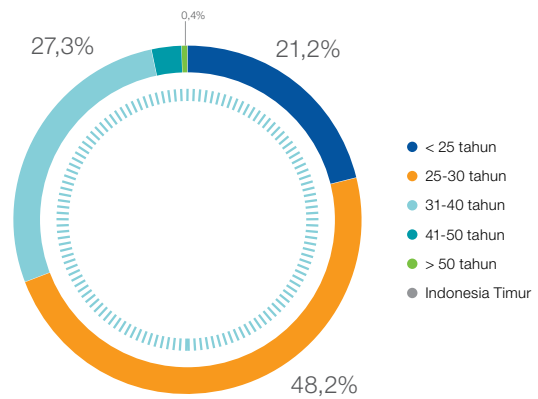
GRAFIK 11_JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN



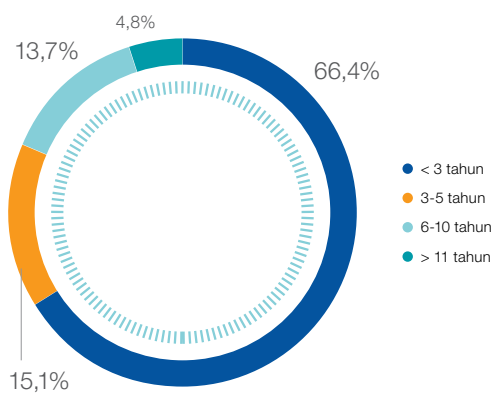
GRAFIK 12_JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN JENJANG KEPANGKATAN



GRAFIK 13_JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN KELOMPOK USIA



GRAFIK 14_JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN MASA KERJA



UNIT PENDUKUNG BISNIS

Teknologi Informasi	124
Pengembangan Jaringan dan Operasional	128
Pelayanan Konsumen	130





“Teknologi Informasi (TI) berperan penting dalam strategi organisasi BFI Finance, terutama sebagai katalis dan penggerak manajemen perubahan di Perusahaan.”



Teknologi Informasi (TI) berperan penting dalam strategi organisasi BFI Finance, terutama sebagai katalis dan penggerak manajemen perubahan di Perusahaan. Penggunaan aplikasi TI secara luas dan taktis—yang melibatkan berbagai sistem sebagai solusi, infrastruktur, mekanisme, dan tata kelola yang terkait—dalam mendukung dan mempercepat evolusi BFI Finance menjadi pemimpin yang gesit dan tangguh dalam industri pembiayaan.

Rancangan Strategis TI

Rancangan strategis Departemen TI untuk memfasilitasi transformasi BFI Finance mencakup tiga bidang yang saling berinteraksi: Manusia, Proses, dan Teknologi.

Di bidang pertama, Manusia, TI terus meningkatkan daya saingnya melalui rekrutmen talenta baru dengan keahlian khusus di bidangnya, seperti *Data Analytics*, *Data Governance*, *Agile Coach*, *Technology Innovation*, *Solutions Architect*, *Network & Infrastructure Specialist*, *DevOps*, dll. Perusahaan juga menyelenggarakan sesi berbagi pengalaman tentang metodologi *agile* dalam acara rutin BFI Agile Thought Community (BATC, dibaca 'batik') sebagai kontribusi BFI Finance terhadap komunitas TI.

Di bidang Proses, Departemen TI menerapkan Scrum *framework* yang melibatkan berbagai bagian untuk membuat proses kerja lebih gesit. Ini dimulai dari dalam Departemen TI sendiri, dan diarahkan untuk membuat Perusahaan semakin gesit. Departemen TI juga telah membentuk tim pengembangan perangkat lunak yang lintas-fungsional (*Squad*) untuk menyelesaikan prioritas bisnis tertentu. Proses-proses pengelolaan vendor TI, IT BCP (*Business Continuity Plan*), dan kepatuhan di bidang TI juga dioptimalkan sebagai bagian dari langkah penyempurnaan tata kelola TI. Proses kerja ini juga ditingkatkan dengan memperkenalkan konsep *Continuous Integration – Continuous Development (CI/CD)* dalam siklus pengembangan perangkat lunak di Perusahaan, dengan menerapkan sistem otomasi untuk pengembangan, *versioning*, pengujian, dan penerapan perangkat lunak.

Di bidang Teknologi, Departemen TI tengah mengalihkan sistem dan arsitektur di Perusahaan dari yang bersifat monolitik menjadi modular, sehingga lebih fleksibel yang menekankan arsitektur *microservices*, pembuatan infrastruktur *communication backbone*, *Robotics Process Automation (RPA)*, dan ekosistem *Data Analytics*.

Perubahan dan pembaruan yang diterapkan oleh Perusahaan untuk bidang TI di 2019 sangat substansial, menghabiskan biaya sekitar Rp60 miliar, untuk berbagai perbaikan dan peningkatan di bagian sistem dan infrastruktur.

Dalam hal Data, Perusahaan telah memulai proses pengembangan *Data Management* yang melibatkan aspek-aspek *data governance*, *data analytics modelling*, *data analytics infrastructure*, serta membangun budaya berbasis data, mengembangkan struktur organisasi, menerapkan prosedur standar operasi terkait kualitas data dan tata kelola data, dan menciptakan *Enterprise Data Governance Operating Model*.

Prestasi Penting pada 2019

Pada 2019, pencapaian utama Departemen TI adalah sebagai berikut:

- Mendefinisikan dan evaluasi kebutuhan bisnis atas *Loan Origination System* yang dapat mendukung proses bisnis yang fleksibel;
- Menetapkan solusi untuk *platform* penilaian kredit yang didukung oleh *decision engine* untuk lebih mudah dikustomisasi oleh fungsi manajemen risiko;
- Memulai modernisasi siklus pengembangan perangkat lunak dengan membentuk 10 *Squad* dalam waktu 6 bulan untuk menangani prioritas bisnis spesifik;
- Membangun dan menggunakan *platform* komunikasi antarsistem (yakni *API gateway* dan *message broker*) untuk mendukung arsitektur *microservices* dan inisiatif *Open API*, untuk mengekspos layanan digital Perusahaan kepada mitra eksternal;
- Memulai modernisasi sistem yang sudah berjalan ke arah arsitektur *microservices* dan penggunaannya untuk layanan-layanan baru;
- Penyelenggaraan *BFI Agile Thought Community* (BATC) pertama di bulan Desember;
- Penyelenggaraan Mini Hackathon di AMIKOM Yogyakarta, dan menjadi pembicara tamu di sejumlah institusi, misalnya Unika Soegijapranata Semarang dan ITHB Bandung;
- Membentuk organisasi tata kelola data yang memiliki kemampuan untuk membuat pemodelan data dan memastikan kualitas data yang dipakai oleh seluruh komponen organisasi dalam bentuk penyelesaian 30 permasalahan (*use case*) dan pemodelan data;
- Memperkuat Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana dengan menerapkan sistem *multi-tier firewall* dan *security operation center*, memperluas infrastruktur TI, misalnya server, *backup & restore*, kapasitas penyimpanan, serta uji keamanan beberapa aplikasi utama; dan
- Bekerja sama dengan Departemen Human Capital (HC) untuk membuat pengembangan lebih lanjut dalam mengelola karyawan. Ini termasuk fitur M-BEAT, LMS, dan BELLA ChatBot.





Rencana Kerja 2020

Terkait transformasi BFI Finance menjadi suatu badan usaha yang gesit, berbasis data, dan prediktif, dukungan dari Departemen TI akan terwujud dalam tindakan-tindakan berikut di 2020:

- Melanjutkan pengembangan *Loan Origination System* baru yang didukung kemampuan data analitik dan penilaian kredit yang lebih canggih;
- Meningkatkan fleksibilitas penggunaan data dengan aplikasi sistem keamanan data untuk menghasilkan model *Data Analytics* yang lebih akurat yang akan diterapkan dalam seluruh aspek proses bisnis, mulai dari akuisisi pelanggan hingga proses penagihan dan pemulihan;
- Melanjutkan modernisasi sistem untuk modul insentif, asuransi, dan penagihan;
- Merancang program pengembangan *Agile* untuk *Squad*, *Scrum Master*, dan *Product Owner* sebagai bagian dari upaya menjadikan Perusahaan lebih gesit;
- Menerapkan *Agile toolchain* untuk *Squad*, manajemen proyek, dan *support* TI;
- Melanjutkan acara rutin BATC sebagai komitmen untuk meningkatkan pengetahuan dan praktik *Agile*;
- Memperluas pemanfaatan *Open API* untuk lebih banyak mitra dengan berbagai bentuk kerja samanya;
- Menerapkan proses otomatisasi (*CI/CD pipeline*) untuk semua modul yang telah dimodernisasi;
- Menerapkan Sistem Manajemen Dokumen untuk mendukung Operasional dan *Loan Origination System* baru;
- Mengembangkan Teknologi Analitik (*Data Analytics Ecosystem: Data Hub, Data Ingestion, Data Quality, Master Data Management, Data Virtualization*);
- Membangun kesadaran pentingnya Tata Kelola Data (kualitas data dan keamanan data untuk konsumen sejalan dengan standar Manajemen Keamanan Informasi) yang melibatkan semua karyawan dalam aspek Budaya kerja dan Sumber Daya Manusia; serta
- Peningkatan lebih lanjut terhadap Pusat Data melalui modernisasi *data replication*, penguatan keamanan jaringan dan pengguna akhir, dan penyempurnaan sistem pemantauan.



“Pembukaan outlet baru pada paruh kedua 2019, merupakan bagian dari strategi intensifikasi jaringan usaha Perusahaan.”



Perluasan jaringan usaha BFI Finance di 2019 mencakup pembukaan 22 outlet baru di berbagai wilayah di Indonesia yang berpotensi mendorong pertumbuhan. Faktor-faktor seperti skala ekonomi, daya saing, kepadatan penduduk, dan keberadaan perguruan tinggi di daerah-daerah sasaran menjadi dasar ekspansi usaha Perusahaan.

Dari outlet-outlet baru ini, 18 di antaranya merupakan gerai baru dan 4 cabang baru, yang memperluas cakupan operasional BFI Finance dari 228 cabang dan 173 gerai pada akhir 2018 menjadi 232 cabang dan 191 gerai pada akhir 2019.

Pembukaan outlet baru pada paruh kedua 2019, merupakan bagian dari strategi intensifikasi jaringan usaha Perusahaan. Pada paruh pertama 2019, BFI Finance fokus pada peningkatan kualitas aset dan peralihan model bisnis utamanya, dari pembiayaan dealer ke pembiayaan non-dealer. Inisiatif tersebut menghasilkan NPF yang rendah yaitu 0,85%, jauh lebih rendah dari rata-rata industri sebesar 2,40% di 2019.

Sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas, BFI Finance mengembangkan infrastrukturnya melalui pemanfaatan dan optimalisasi sistem teknologi informasi terintegrasi dan mutakhir di seluruh proses bisnisnya. Hal ini juga diterapkan dengan memperhitungkan perkembangan terbaru dalam industri pembiayaan beserta potensinya. Langkah ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan konsumen yang bervariasi dan cepat berubah.

Peningkatan kompetensi SDM Perusahaan telah memungkinkan berlangsungnya pengembangan infrastruktur Perusahaan tanpa hambatan yang berarti. Transformasi yang dialami karyawan BFI Finance membimbing mereka untuk

berkembang bersama dengan transformasi digital yang mencakup seluruh proses bisnis. Ini membantu Perusahaan untuk menstandarisasi dan merampingkan berbagai prosedur, terutama di cabang-cabang yang lebih kecil, yang mengarah pada peningkatan efektivitas dan efisiensi.

Pada 2017, BFI Finance memprakarsai tiga pilar jaringan dan operasi—yang terdiri dari sentralisasi proses bisnis, otomatisasi fungsi outlet, dan ekosistem transaksi tanpa uang tunai—yang terus diterapkan pada 2019. Perusahaan mulai memfasilitasi para konsumennya dengan teknologi pembayaran digital lewat kerja sama dengan sejumlah platform multi-layanan, seperti Gojek melalui fitur GoBills, dan Tokopedia.

Pada 2019, sistem arsip digital baru tengah dikembangkan secara internal untuk selanjutnya diperluas menjadi Sistem Manajemen Dokumen menyeluruh dalam waktu dekat. Sistem ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi sebagai bagian dari inisiatif transformasi digital yang saat ini dalam tahap eksplorasi dan akan sepenuhnya diterapkan pada 2020.

Business Continuity Plan (BCP) BFI Finance diuji pada 2018 dalam mengawasi dan melaksanakan rehabilitasi dan relokasi aset yang rusak akibat bencana alam yang terjadi pada tahun tersebut. Sejak itu, bencana bantuan bencana telah diperbarui dan pada 2019 telah dievaluasi untuk mempersiapkan upaya penanggulangan dan mengurangi dampak buruk di masa depan.

Inisiatif pelayanan konsumen Perusahaan diterapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Layanan Keuangan, dan peraturan terkait lainnya. Upaya dan langkah strategis pelayanan konsumen dengan tingkat layanan terbaik dirangkum dalam kerangka kerja *Service Quality Strategy*. Kerangka kerja ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan Perusahaan secara komprehensif dan dengan demikian mempertahankan bisnisnya di tengah persaingan yang lebih menantang di industri pembiayaan.

Kerangka kerja *Service Quality Strategy* BFI Finance terdiri dari empat langkah utama:

1. *Sustaining Service Insight* (Mempertahankan Wawasan Layanan);
2. *Customer Relationship & Engagement* (Hubungan & Keterlibatan Konsumen);
3. *Converting Customer Service into Sales* (Mengonversi Layanan Konsumen menjadi Penjualan); dan
4. *Complaint Handling & Service Recovery* (Penanganan Pengaduan & Pemulihan Layanan).

Masing-masing inisiatif tersebut, beserta inisiatif yang dilaksanakan pada 2019, pada bagian selanjutnya.

Sustaining Service Insight

Nilai inti *Service Insight* ditanamkan di seluruh karyawan, terutama yang berhubungan langsung dengan konsumen. Diselaraskan dengan salah satu Nilai Inti Perusahaan, yaitu *Excellent Service*, *Service Insight* mengupayakan layanan terbaik untuk menciptakan kepuasan konsumen internal dan eksternal, dan diterapkan dalam lima dimensi layanan:

- Nyata (*Tangibles*): Penampilan fasilitas fisik, peralatan, karyawan, dan materi komunikasi;
- Keandalan (*Reliability*): Kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan secara andal dan akurat;
- Daya Tanggap (*Responsiveness*): Kesungguhan dalam membantu konsumen dan menyediakan layanan cepat;
- Kepastian/Jaminan (*Assurance*): Pengetahuan dan kesantunan karyawan yang layak dipercaya;
- Empati (*Empathy*): Perhatian dan perhatian khusus bagi konsumen.



Customer Relationship & Engagement

Kompetensi dan pemahaman terbaru terkait kualitas layanan dan identifikasi kebutuhan konsumen telah ditanamkan pada semua karyawan, terutama *frontliner* dan *marketing*, untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif dan terbaik bagi semua konsumen, serta untuk mempertahankan loyalitas konsumen yang kuat kepada Perusahaan.

Untuk mendukung peningkatan kualitas layanan konsumen, telah diselenggarakan beberapa pelatihan, yakni:

- Pelatihan *service awareness* terkait dengan lima dimensi layanan yaitu *Responsiveness*, *Assurance*, *Tangible*, *Empathy* dan *Reliability*, yang dalam implementasinya untuk menciptakan standar layanan karyawan berpedoman pada *core values excellent service* yaitu sikap positif, responsif dan profesional. Pelatihan yang diberikan adalah program *Service Star* dan *Service Insight*.



- Di 2019, sebagai perwujudan sisi layanan di masyarakat luas, Perusahaan mengikuti *event* apresiasi terhadap konsumen pada momentum Hari Pelanggan Nasional. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan *service awareness*, pengenalan produk dan *corporate branding* kepada masyarakat luas, serta menunjukkan semangat dalam memberikan pelayanan yang semakin baik ke depan.
- Untuk menjamin pelayanan prima, dilakukan penanaman *Service Mindset*. Karena peran Area Service Quality Specialist (ASQS) di setiap area di seluruh Indonesia sebagai garda terdepan dalam strategi pelayanan, dibutuhkan kemampuan dan kreativitas untuk dapat memberikan *service excellence*. Oleh karena itu, setiap tahunnya secara rutin dilaksanakan pelatihan dalam upaya peningkatan *skill* dan *service mindset* yang juga dilakukan untuk menggali potensi dan kreatifitas ASQS dalam melakukan dan memastikan standardisasi layanan cabang di Perusahaan.

Layanan istimewa sebagai apresiasi terhadap konsumen yang setia diberikan dalam bentuk program-program berikut:

- Maju Berkat Pembiayaan di Tingkat APPI, yang melibatkan dua kandidat dari cabang Cawang (Jakarta Timur) dan cabang Banjarmasin.

- Pada *special moment* seperti HUT BFI, Hari Lebaran, Natal, Hari Pelanggan Nasional dan hari ulang tahun konsumen, BFI Finance memberikan perlakuan khusus dengan melakukan kunjungan atau memberikan *surprise*, atau undangan makan bersama dalam



Pitriya

Konsumen Produk
Pembiayaan Motor, Jambi

“Saya mendengar tentang BFI Finance dari kerabat saya dan kini telah menjadi konsumen BFI Finance sejak 2012. Saya puas dengan pelayanan BFI Finance terutama karena prosedur pelayanannya yang cepat dan mudah, serta ketelitian petugasnya dalam melayani konsumen. Selain itu, para petugas memiliki pengetahuan dan kecakapan yang memadai dalam memberikan informasi kepada konsumen, sehingga melancarkan proses pembiayaan.”



bentuk *gathering*. Selain itu, sebagai bentuk apresiasi terhadap konsumen prioritas, Perusahaan memberikan kartu khusus kepada konsumen prioritas yang memberikan hak kepada pemegang kartu atas *privilege* sebagai *benefit* lebih.

- Dalam rangka mengapresiasi pelanggan di Hari Pelanggan Nasional 2019, segenap jajaran pimpinan cabang hingga Direktur Perusahaan turut serta melayani pelanggan secara langsung di kantor BFI Finance. Kegiatan ini merupakan program tahunan dengan agenda menyapa dan mendengarkan kebutuhan pelanggan untuk meningkatkan pelayanan prima.

Pada 2019, BFI Finance telah memperluas saluran komunikasinya. Selain telepon, konsumen didorong untuk berinteraksi pada platform media sosial Perusahaan, yaitu Facebook, Instagram, dan Twitter.

Converting Customer Service into Sales

Sales Promotion Advisor (SEPIA) merupakan program yang dibuat dalam rangka peningkatan *booking* cabang khususnya melalui *booking* Customer Service. Dengan adanya SEPIA, terjadi pemisahan peran dan fungsi *frontliners* di cabang, yaitu Customer Service reguler yang berperan melayani konsumen *walk-in* dengan keperluan operasional, dan Customer Service SEPIA yang khusus menangani konsumen *walk-in* dengan keperluan informasi pembiayaan. Pemisahan peran dan fungsi ini bertujuan agar kedua pihak tersebut dapat fokus menjalankan tugas masing-masing dan memenuhi target yang ditetapkan. Terdapat penambahan cabang SEPIA 2019 hingga mencapai 20 unit SEPIA di cabang besar per akhir tahun.

Pada 2019, konsumen BFI Finance diberikan akses yang lebih mudah dan lebih cepat untuk mengunduh salinan digital dari dokumen kontrak mereka.

Ini sejalan dengan langkah-langkah Perusahaan dalam merampingkan prosedur serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Ke depannya, BFI Finance berencana untuk mengembangkan *one-touch point* untuk akses aplikasi kredit yang jauh lebih sederhana bagi konsumen potensial.

Complaint Handling & Service Recovery

Bekerja sama dengan unit terkait, Unit Layanan Konsumen bertanggung jawab untuk segera menindaklanjuti semua pengaduan yang diterima oleh BFI Finance demi memastikan respons yang cepat, akurat, menyeluruh, dan memuaskan. Karena itu, komunikasi dan integrasi yang baik antara Unit Layanan Konsumen dan kantor cabang terkait penting dalam menunjang kegiatan usaha sehari-hari.



Pada 2019, BFI Finance menerima 15.130 umpan balik dalam bentuk pengaduan dan saran, yang secara spesifik meminta keterangan lebih lanjut tentang karakteristik produk-produk BFI Finance. Tidak terdapat pengaduan dari konsumen terkait kasus pelanggaran hak privasi konsumen dan data konsumen.

Sejalan dengan kebijakan internal Perusahaan dan peraturan yang berlaku di Indonesia, BFI Finance telah menetapkan *Service Level Agreement* (SLA) dalam bentuk periode respons untuk setiap pengaduan yang diterima. Pencapaian SLA BFI Finance pada 2019 tercermin dari tindak lanjut tuntas dari setiap pengaduan dalam waktu maksimal 20 hari.

Di 2019, strategi layanan difokuskan pada konsumen dengan metodologi *Listen to Our Customer*, agar Perusahaan dapat lebih mengetahui serta memahami kebutuhan dan ekspektasi konsumennya, sehingga dapat terus meningkatkan pelayanan konsumen dan menciptakan pengalaman positif bagi setiap konsumen.

Konsumen dapat secara langsung memberikan *feedback* tingkat kepuasan atas pengalaman mereka setelah dilayani saat datang ke kantor cabang, dengan mengisi SRS (*Smart Rating System*) pada *smartphone tablet* yang tersedia di cabang.

Pengukuran Kepuasan Konsumen

Keberhasilan inisiatif layanan konsumen Perusahaan diukur secara berkala dengan menggunakan Indeks Kepuasan Konsumen (*Customer Satisfaction Index*) atau CSI. Pada 2019, BFI Finance menerima masukan dari 158.772 konsumen baru yang menjadi responden survei indeks kepuasan konsumen, yang

menghasilkan skor CSI 4,48. Ini sama dengan skor CSI tahun sebelumnya.

Internal Customer Care

Bertujuan meningkatkan kualitas layanan bagi konsumen internal, yaitu sesama karyawan, BFI Finance telah membentuk program *Internal Customer Care* untuk mengumpulkan pengaduan dari konsumen internal. Pengaduan dapat mencakup penilaian oleh karyawan cabang atas kinerja rekan kantor pusat mereka, dan sebaliknya. Program ini memberikan gambaran tingkat kepuasan masing-masing unit kerja dalam struktur organisasi Perusahaan, dan hasilnya kemudian dipertimbangkan dalam menyusun langkah-langkah perbaikan.



Maman Muhammad Yamin
Konsumen Produk Pembiayaan Mobil, Cilegon, Banten

“Saya memperoleh informasi tentang BFI Finance melalui telemarketing, dan telah menjadi konsumen sejak 2019. Saya sangat puas dengan layanan BFI Finance karena prosedur pelayanannya sangat cepat dan mudah. Petugasnya juga sangat tanggap dalam melayani konsumen, sehingga kebutuhan saya sebagai konsumen terasa sangat diperhatikan. Saya tentunya akan tetap memilih BFI Finance untuk keperluan pembiayaan baru di masa mendatang.”



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Tinjauan Ekonomi dan Industri	136
Tinjauan Bisnis	138
Pemasaran	146
Tinjauan Kinerja Keuangan	150
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	151
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	166
Laporan Arus Kas Konsolidasian	174
Analisis Rasio Penting	175
Perbandingan Target dan Realisasi 2019	177
Struktur Modal (Kecukupan Modal)	178
Investasi Material atas Barang Modal	179
Peristiwa Setelah Periode Pelaporan	179
Dividen	180
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	180
Investasi, Divestasi, Merger & Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang atau Modal yang Material	181
Transaksi dengan Potensi Benturan Kepentingan dan Pihak Berelasi	181
Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Perusahaan	182
Perubahan Kebijakan Akuntansi	183
Prospek Bisnis 2020	185



“Kendati pertumbuhan melemah, kualitas aset secara keseluruhan mengalami peningkatan seiring NPF industri menurun dari 2,71% di 2018 menjadi 2,40% di 2019.”



Situasi Makroekonomi Global

Gejolak perekonomian global yang disebabkan oleh perang dagang antara dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, berlangsung sepanjang 2019. Ketegangan ini terus dirasakan meskipun sedikit mereda menjelang penghujung tahun, dengan adanya prospek kedua negara tersebut menandatangani kesepakatan perdagangan tahap satu.

Situasi geopolitik global, khususnya di Hong Kong dan Timur Tengah, memperburuk sentimen ketidakpastian yang menyebar pada skala global dengan adanya keprihatinan terkait tingkat utang yang meningkat di beberapa bagian dunia.

Di negara-negara dengan perekonomian yang besar, aktivitas ekonomi berlangsung dengan lebih lambat dibandingkan yang diperkirakan. Aktivitas manufaktur yang lemah menghambat jalur pertumbuhan di negara-negara maju, sementara ketidakpastian terkait kebijakan, yang juga melibatkan tarif yang sulit diprediksi, tak hanya memberatkan aktivitas perdagangan antara AS dan Tiongkok, tetapi dampaknya juga dirasakan di seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok mencapai titik terendahnya selama tiga dekade terakhir, sebesar 6%, dan dampaknya, banyak negara yang berorientasi ekspor harus menghadapi situasi harga rendah untuk komoditas mereka. Perkembangan tersebut memperburuk tingkat kesehatan ekonomi global, yang pertumbuhannya melemah ke 2,4% di 2019 berdasarkan data Bank Dunia.

Federal Reserve AS memotong suku bunga acuannya sebanyak tiga kali di 2019, ke kisaran 1,5–1,75% pada akhir tahun, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di AS. Bank Indonesia (BI) melakukan langkah yang sama dengan memotong suku bunga acuannya, *7-Day (Reverse) Repo Rate* empat kali di paruh kedua 2019, ke tingkat 5%, seiring BI berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tren melambatnya ekonomi global.

Tinjauan Ekonomi Indonesia di 2019

Harga batu bara yang rendah dan melemahnya daya beli menciutkan keyakinan investor untuk masuk ke pasar domestik di Indonesia menjelang masa Pemilihan Umum 2019. Kendati demikian, setelah hasil pemilu keluar, dan jurang politik yang sebelumnya membentang dapat dijematani oleh pemilihan anggota kabinet Presiden Joko Widodo, tingkat kepercayaan investor kembali meningkat.

Sepanjang 2019, Rupiah mengalami penguatan terhadap Dolar AS dengan mencapai nilai tukar rata-rata Rp14.000/USD, 2,3% di bawah sasaran pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu Rp14.400/USD. Ini terjadi sebagian karena laju inflasi yang stabil dan penurunan drastis dalam defisit neraca perdagangan di 2019 dibandingkan dengan di 2018.

Pertumbuhan PDB Indonesia diperkirakan mencapai 5,02% di 2019, di tengah berbagai ketegangan global dan gejolak politik di dalam negeri, karena didorong sebagian oleh belanja pemerintah pada sektor infrastruktur, serta inisiatif deregulasi untuk mempermudah investor memulai kegiatan usaha di Indonesia. Laju inflasi tahunan tercatat sebesar 2,72%, terendah sejak 1999 dan jauh di bawah prakiraan di awal tahun sebesar 3,11%.

Pertumbuhan industri otomotif, khususnya untuk mobil, di Indonesia mengalami perlambatan di 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah penjualan mobil di 2019 mencapai 1.030.126 unit,

sementara di 2018 jumlah penjualan tercatat 1.151.291 unit. Penjualan motor, di sisi lain, masih tumbuh 1,6%, dengan jumlah penjualan sebanyak 6.487.460 unit untuk 2019.

Perkembangan Industri Multifinance di 2019

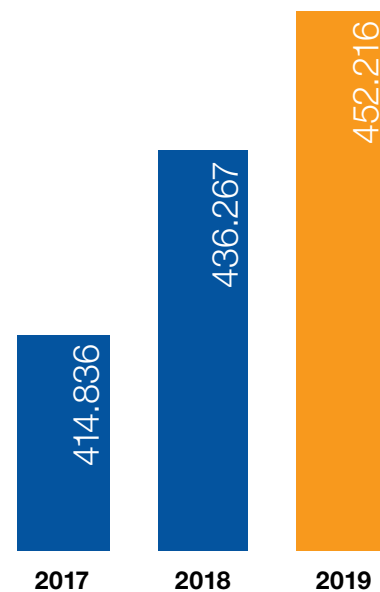
Jumlah penyaluran pinjaman oleh industri perbankan di Indonesia meningkat 6,1% di 2019 dari nilainya di 2018, namun di bawah laju pertumbuhan dua digit di 2018, yakni sebesar 12%. Banyak bank yang lebih berhati-hati dalam menyalurkan pinjaman karena adanya pengetatan likuiditas dan ketegangan politik sebelum masa pemilihan umum, selain juga karena perlambatan di pasar global.

Jumlah piutang di industri multifinance di 2019 tumbuh 3,7%, menjadi Rp452,2 triliun. Pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan di 2018 (5,2%) ini sejalan dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi dan pasar keuangan Indonesia, ditambah dengan masuknya sejumlah pemain baru dari ranah digital. Kendati pertumbuhan melemah, kualitas aset secara keseluruhan mengalami peningkatan seiring NPF industri menurun dari 2,71% di 2018 menjadi 2,40% di 2019.

Dari jumlah piutang tersebut, piutang pembiayaan konvensional mencapai Rp436.294 miliar di 2019, naik 4,7% dari Rp416.794 miliar di 2018. Nilai tersebut terdiri dari

pembiayaan multiguna, yang tumbuh dari Rp256.417 miliar di 2018 menjadi Rp274.836 miliar di 2019; pembiayaan investasi yang jumlahnya mencapai Rp134.825 miliar di 2019 dibandingkan Rp136.208 miliar di 2018; serta pembiayaan modal kerja dan lainnya, yang tumbuh dari Rp24.037 miliar di 2018 menjadi Rp26.474 miliar di 2019. Jumlah piutang pembiayaan berbasis syariah, di sisi lain, menurun dari Rp19.472 miliar di 2018 menjadi Rp15.922 miliar di 2019.

GRAFIK 15_PIUTANG INDUSTRI MULTIFINANCE (RP MILIAR)



Kegiatan bisnis Perusahaan meliputi pembiayaan mobil, sepeda motor, alat berat, mesin dan peralatan lainnya, dan juga pembiayaan beragun aset berupa mobil, sepeda motor, dan properti.

Perusahaan menjalankan bisnisnya sesuai dengan POJK No. 29/POJK.05/2014 yang kemudian diperbarui dengan POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Sesuai peraturan

tersebut, ruang lingkup perusahaan pembiayaan dapat terdiri dari pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan kegiatan pembiayaan lainnya di bawah persetujuan OJK. Selain keempat bidang tersebut, perusahaan pembiayaan dapat melakukan sewa operasi dan/atau kegiatan berbasis biaya selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di sektor jasa keuangan.

TABEL 29_PEMBIAYAAN BARU BERDASARKAN JENIS ASET

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Pembiayaan Mobil Bekas	11.226	10.641	(585)	-5,2%
Pembiayaan Mobil Baru	301	161	(140)	-46,5%
Pembiayaan Mobil	11.527	10.802	(725)	-6,3%
Pembiayaan Sepeda Motor Bekas	2.388	2.820	432	18,1%
Pembiayaan Alat Berat	2.309	1.998	(311)	-13,5%
Pembiayaan Properti	145	219	74	51,0%
Pembiayaan Syariah	3	57	54	1.800,0%
Jumlah	16.372	15.896	(476)	-2,9%

Persentase dari Jumlah

Pembiayaan Mobil Bekas	68,6%	66,9%	n/a	-1,7%
Pembiayaan Mobil Baru	1,8%	1,0%	n/a	-0,8%
Pembiayaan Mobil	70,4%	67,9%	n/a	-2,5%
Pembiayaan Sepeda Motor Bekas	14,6%	17,7%	n/a	3,1%
Pembiayaan Alat Berat	14,1%	12,6%	n/a	-1,5%
Pembiayaan Properti	0,9%	1,4%	n/a	0,5%
Pembiayaan Syariah	0,0%	0,4%	n/a	0,4%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Keterangan (unit)

Pembiayaan Mobil Bekas	121.040	117.507	(3.533)	-2,9%
Pembiayaan Mobil Baru	1.491	838	(653)	-43,8%
Pembiayaan Mobil	122.531	118.345	(4.186)	-3,4%
Pembiayaan Sepeda Motor Bekas	331.426	381.258	49.832	15,0%
Pembiayaan Alat Berat	3.515	3.344	(171)	-4,9%
Pembiayaan Properti	455	682	227	49,9%
Pembiayaan Syariah	176	2.724	2.548	1.447,7%
Jumlah	458.103	506.353	48.250	10,5%

Pembiayaan Baru

BFI Finance mencatat Jumlah Pembiayaan Baru sebesar Rp15.896 miliar pada 2019, menurun 2,9% dari Rp16.372 miliar dari Jumlah Pembiayaan Baru pada 2018.

Pada 2019, 67,9% dari Jumlah Pembiayaan Baru berasal dari Pembiayaan Mobil sebesar Rp10.802 miliar. Pembiayaan Mobil Bekas merupakan kontributor terbesar pada portofolio Mobil, dengan jumlah mencapai Rp10.641 miliar atau 98,5% dari keseluruhannya. Pembiayaan Sepeda Motor Bekas berkontribusi sebesar 17,7%, Alat Berat 12,6%, Properti 1,4%, dan Syariah 0,4%.

TABEL 30_PEMBIAYAAN BARU MOBIL (BARU DAN BEKAS) BERDASARKAN SUMBER PEMBIAYAAN

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
<i>Non-Dealer Financing</i>	8.730	9.998	1.268	14,5%
<i>Dealer Financing</i>				
Pembiayaan Mobil Bekas	2.496	643	(1.853)	-74,2%
Pembiayaan Mobil Baru	301	161	(140)	-46,5%
Jumlah	11.527	10.802	(725)	-6,3%
Keterangan (unit)				
<i>Non-Dealer Financing</i>	97.485	111.394	13.909	14,3%
<i>Dealer Financing</i>				
Pembiayaan Mobil Bekas	23.555	6.113	(17.442)	-74,0%
Pembiayaan Mobil Baru	1.491	838	(653)	-43,8%
Jumlah	122.531	118.345	(4.186)	-3,4%

TABEL 31_PEMBIAYAAN BARU MOBIL (BARU DAN BEKAS) BERDASARKAN KATEGORI DAN JENIS MOBIL

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Mobil Penumpang	8.900	8.349	(551)	-6,2%
Mobil Komersial	2.627	2.453	(174)	-6,6%
Jumlah	11.527	10.802	(725)	-6,3%
Persentase dari Jumlah				
Mobil Penumpang	77,2%	77,3%	n/a	0,1%
Mobil Komersial	22,8%	22,7%	n/a	-0,1%
Jumlah	100,0%	100,0%		
Minibus/MPV	5.982	5.619	(363)	-6,1%
Jip	2.132	2.056	(76)	-3,6%
Truk	1.406	1.298	(108)	-7,7%
Pick-up	1.128	1.068	(60)	-5,3%
Sedan	785	675	(110)	-14,0%
Bus	94	86	(8)	-8,5%
Jumlah	11.527	10.802	(725)	-6,3%
Persentase dari Jumlah				
Minibus/MPV	51,9%	52,0%	n/a	0,1%
Jip	18,5%	19,0%	n/a	0,5%
Truk	12,2%	12,0%	n/a	-0,2%
Pick-up	9,8%	9,9%	n/a	0,1%
Sedan	6,8%	6,3%	n/a	-0,5%
Bus	0,8%	0,8%	n/a	0,0%
Jumlah	100,0%	100,0%		

TABEL 32_PEMBIAYAAN BARU MOBIL (BARU DAN BEKAS) BERDASARKAN MEREK

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Toyota	4.249	4.017	(232)	-5,5%
Mitsubishi	1.717	1.576	(141)	-8,2%
Honda	1.526	1.453	(73)	-4,8%
Daihatsu	1.486	1.389	(97)	-6,5%
Suzuki	1.066	962	(104)	-9,8%
Isuzu	159	160	1	0,6%
Merek Jepang Lain-Lain	990	918	(72)	-7,3%
Di Luar Merek Jepang	334	327	(7)	-2,1%
Jumlah	11.527	10.802	(725)	-6,3%
Persentase dari Jumlah				
Toyota	36,9%	37,2%	n/a	0,3%
Mitsubishi	14,9%	14,6%	n/a	-0,3%
Honda	13,2%	13,4%	n/a	0,2%
Daihatsu	12,9%	12,9%	n/a	0,0%
Suzuki	9,2%	8,9%	n/a	-0,3%
Isuzu	1,4%	1,5%	n/a	0,1%
Merek Jepang Lain-Lain	8,6%	8,5%	n/a	-0,1%
Di Luar Merek Jepang	2,9%	3,0%	n/a	0,1%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Pembiayaan Mobil

Penjualan mobil di Indonesia pada 2019 menurun 11,8%, dari 1.151.291 unit pada 2018 menjadi 1.030.126 unit. Penjualan ini terdiri dari 244.587 unit kendaraan komersial dan 785.539 unit mobil penumpang. Penjualan mobil komersial menurun 13,1% dari 276.631 unit, sementara penjualan mobil penumpang menurun 11,3% dari 874.677 unit pada 2018.

Portofolio Pembiayaan Mobil BFI Finance terdiri dari Mobil Baru dan Bekas dengan berbagai tujuan pembiayaan, yaitu untuk pembelian Mobil Baru dan Bekas, serta Pembiayaan yang didukung oleh Mobil Bekas sebagai agunan.

Jumlah Pembiayaan Mobil yang disalurkan oleh Perusahaan pada 2019 adalah sebesar Rp10.802 miliar, berkontribusi 67,9% terhadap Jumlah Pembiayaan Baru. Terdapat penurunan Pembiayaan Mobil sebesar 6,3% pada 2019, dari Rp11.527 miliar yang tercatat di 2018. Hal ini sejalan dengan

melemahnya penjualan mobil nasional, selain juga karena berbagai kondisi ekonomi dan politik di sepanjang tahun. Perusahaan juga mengambil langkah untuk lebih berhati-hati dalam mengupayakan pertumbuhan, dan memilih untuk berfokus pada kualitas aset.

Jumlah Pembiayaan Baru BFI Finance di 2019 terdiri dari 118.345 unit mobil baru dan bekas, menurun 3,4% dari jumlahnya di 2018. Berdasarkan sumber pembiayaan, sebagian besar atau 92,6% dari Jumlah Pembiayaan Mobil berasal dari *Non-Dealer Financing* yang melibatkan pembiayaan 111.394 unit mobil di 2019. Nilai pembiayaannya sendiri tumbuh 14,5% di 2019, meningkat dari Rp8.730 miliar di 2018 menjadi Rp9.998 miliar, sementara *Dealer Financing* menurun 74,2% dan 46,5% dari nilainya di 2018, masing-masing untuk Mobil Bekas dan Mobil Baru. Bagian dari *Dealer Financing* dibandingkan secara keseluruhan menurun dari Rp2.797 miliar atau 24,3% di 2018 menjadi Rp804 miliar atau 7,4% dari jumlahnya di 2019.

Minibus/MPV menyumbang 52,0% atau Rp5.619 miliar, sebagai bagian terbesar dari Pembiayaan Mobil berdasarkan Jenis. Peringkat kedua adalah Jip, yang menyumbang 19,0% dari Jumlah Pembiayaan Mobil, dan diikuti oleh Truk, sebesar 12,0%.

Pembiayaan Mobil pada 2019 tetap didominasi oleh merek Jepang, yang menyumbang 97,0% dari nilai keseluruhannya, dengan merek Toyota memberikan kontribusi 37,2% pada Jumlah Pembiayaan Mobil Baru di 2019.

TABEL 33_PEMBIAYAAN BARU SEPEDA MOTOR BEKAS BERDASARKAN MEREK

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Honda	1.292	1.634	342	26,5%
Yamaha	924	1.012	88	9,5%
Suzuki	114	109	(5)	-4,4%
Lain-Lain	58	65	7	12,1%
Jumlah	2.388	2.820	432	18,1%
Persentase dari Jumlah				
Honda	54,1%	57,9%	n/a	3,8%
Yamaha	38,7%	35,9%	n/a	-2,8%
Suzuki	4,8%	3,9%	n/a	-0,9%
Lain-Lain	2,4%	2,3%	n/a	-0,1%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Pembiayaan Sepeda Motor

Pada 2019, Jumlah Pembiayaan Baru Sepeda Motor Bekas adalah sebesar Rp2.820 miliar, meningkat 18,1% dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.388 miliar. Kenaikan ini didorong oleh penetrasi yang lebih besar di segmen yang relevan melalui inisiatif pemasaran yang ditargetkan Perusahaan sepanjang tahun.

Dari Jumlah Pembiayaan Baru Sepeda Motor Bekas, 93,8% disumbangkan oleh Honda dan Yamaha, dua merek sepeda motor paling populer di Indonesia. Honda memperkuat keunggulannya dengan 57,9% (naik 3,8% dari 2018), diikuti oleh Yamaha dengan 35,9% (turun 2,8% dari 2018).

Bisnis sepeda motor BFI Finance difokuskan pada Pembiayaan Sepeda Motor Bekas sebagai agunan. Pembiayaan Sepeda Motor Bekas didorong oleh berbagai kebutuhan di kalangan kelas menengah ke bawah. Perusahaan tidak membiayai pembelian sepeda motor, dan oleh karena itu bisnis ini tidak berkorelasi langsung dengan penjualan sepeda motor baru.

TABEL 34_PEMBIAYAAN BARU ALAT BERAT, MESIN, DAN LAINNYA BERDASARKAN INDUSTRI

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Konstruksi	590	591	1	0,2%
Pertambangan	634	499	(135)	-21,3%
Industri dan Manufaktur	255	305	50	19,6%
Jasa	311	273	(38)	-12,2%
Perkebunan	153	104	(49)	-32,0%
Perhutanan	156	75	(81)	-51,9%
Perdagangan dan Distribusi	100	63	(37)	-37,0%
Lain-Lain	110	88	(22)	-20,0%
Jumlah	2.309	1.998	(311)	-13,5%
Persentase dari Jumlah				
Konstruksi	25,6%	29,6%	n/a	4,0%
Pertambangan	27,4%	25,0%	n/a	-2,4%
Industri dan Manufaktur	11,0%	15,3%	n/a	4,3%
Jasa	13,5%	13,7%	n/a	0,2%
Perkebunan	6,6%	5,2%	n/a	-1,4%
Perhutanan	6,8%	3,7%	n/a	-3,1%
Perdagangan dan Distribusi	4,3%	3,1%	n/a	-1,2%
Lain-Lain	4,8%	4,4%	n/a	-0,4%
Jumlah	100,0%	100,0%		

TABEL 35_PEMBIAYAAN BARU ALAT BERAT, MESIN, DAN LAINNYA BERDASARKAN JENIS ALAT

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Ekskavator	1.120	869	(251)	-22,4%
Truk	302	272	(30)	-9,9%
Bulldozer	90	79	(11)	-12,2%
Wheel Loader	45	44	(1)	-2,2%
Forklift	48	36	(12)	-25,0%
Alat Berat Lainnya	156	138	(18)	-11,5%
Jumlah Alat Berat	1.761	1.438	(323)	-18,3%
Mesin	524	530	6	1,1%
Lain-Lain	24	30	6	25,0%
Jumlah	2.309	1.998	(311)	-13,5%

TABEL 35_PEMBIAYAAN BARU ALAT BERAT, MESIN, DAN LAINNYA BERDASARKAN JENIS ALAT

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Persentase dari Jumlah				
Ekskavator	48,5%	43,5%	n/a	-5,0%
Truk	13,1%	13,6%	n/a	0,5%
Bulldoser	3,9%	4,0%	n/a	0,1%
Wheel Loader	1,9%	2,2%	n/a	0,3%
Forklift	2,1%	1,8%	n/a	-0,3%
Alat Berat Lainnya	6,8%	6,9%	n/a	0,1%
Jumlah Alat Berat	76,3%	72,0%	n/a	-4,3%
Mesin	22,7%	26,5%	n/a	3,8%
Lain-Lain	1,0%	1,5%	n/a	0,5%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Pembiayaan Alat Berat, Mesin, dan Peralatan Lainnya

Bisnis Pembiayaan Alat Berat, Mesin, dan Peralatan lainnya BFI Finance mencakup berbagai industri di Indonesia. Pada 2019, industri-industri ini meliputi Pertambangan, Konstruksi, Layanan, Industri dan Manufaktur, Pertanian, serta Perdagangan dan Distribusi.

Pembiayaan Baru Alat Berat, Mesin, dan Peralatan Lainnya yang dicatat Perusahaan pada 2019 mencapai Rp1.998 miliar, menurun 13,5% dari

Rp2.309 miliar di 2018. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan sektor ekonomi yang secara umum relatif lebih lamban di 2019 akibat sentimen pemilik usaha dan investor yang lebih berhati-hati menjelang Pemilu 2019, selain juga karena kinerja permintaan dan ekspor komoditas yang belum kunjung pulih.

Kendati demikian, Perusahaan berhasil memperluas bisnis Pembiayaan Baru untuk Alat Berat, Mesin, dan Peralatan Lainnya di Sektor Industri dan Manufaktur sebesar 19,6%, sehingga sektor ini menjadi kontributor terbesar ketiga terhadap Jumlah Pembiayaan Baru Alat Berat, Mesin, dan Peralatan Lainnya, dengan porsi 15,3%.

Sektor Konstruksi mengambil alih posisi kontributor utama dalam Pembiayaan Baru Alat Berat, Mesin, dan Peralatan Lainnya, dengan porsi 29,6% dari nilai keseluruhan di 2019. Hal ini konsisten dengan dorongan Pemerintah RI dalam mendorong pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang negara. Sektor Pertambangan, yang menempati urutan teratas pada 2018, berada di urutan kedua pada 2019 dengan kontribusi 25,0% terhadap jumlahnya.

Dalam hal Jenis Peralatan, Pembiayaan Ekskavator berkontribusi 43,5% terhadap Jumlah Pembiayaan Alat Berat, Mesin, dan Peralatan Lainnya, sebesar Rp869 miliar, pada 2019.

TABEL 36_PEMBIAYAAN BARU PROPERTI BERDASARKAN JENIS

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Rumah	139	214	75	54,0%
Ruko	6	5	(1)	-16,7%
Jumlah	145	219	74	51,0%
Persentase dari Jumlah				
Rumah	95,9%	97,7%	n/a	1,8%
Ruko	4,1%	2,3%	n/a	-1,8%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Pembiayaan Properti

Pembiayaan dengan Agunan Properti Baru yang dibukukan oleh BFI Finance menunjukkan peningkatan setelah penerapan serangkaian upaya peningkatan produk dan peluncuran beberapa proyek percontohan pada 2018. Jumlahnya meningkat 51,0%, dari Rp145 miliar di 2018 menjadi Rp219 miliar di 2019, atau hanya 1,4% dari Jumlah Pembiayaan Baru. Sebagian besar pembiayaan baru berasal dari Pembiayaan dengan Rumah sebagai agunan, yaitu sebesar 97,7%. Pencapaian ini didukung oleh skema pemasaran yang dijalankan oleh agensi Perusahaan.

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan Syariah BFI Finance di 2019 mencapai Rp57 miliar, meningkat 18 kali lipat dari Rp3 miliar yang dibukukan di 2018, saat operasi pembiayaan syariah mulai dilakukan dan produk pembiayaan syariah baru diluncurkan. Meskipun pertumbuhannya relatif tinggi, porsi Pembiayaan Syariah dalam Pembiayaan Baru Perusahaan masih yang terkecil, yaitu hanya 0,4%. Pertumbuhan Pembiayaan Syariah BFI Finance ini didorong oleh pembukaan cabang syariah baru sepanjang tahun, serta kemitraan dengan berbagai usaha yang mengadopsi prinsip syariah di Indonesia.

Target Pasar dan Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran BFI Finance diatur berdasarkan kriteria geografis dan demografis serta tren perilaku konsumen yang terus berubah. Strategi segmentasi pasar ini dievaluasi secara berkala, sehingga Perusahaan dapat selalu menawarkan produk-produk pembiayaan unggulan ke berbagai sektor, antara lain, aneka industri UMKM yang bergerak di bidang perdagangan umum, jasa, infrastruktur, komoditas, percetakan, manufaktur, makanan dan minuman, transportasi, dan lain-lain. Dengan penetrasi pasarnya yang kuat di wilayah-wilayah yang cukup terpencil, BFI Finance memiliki basis konsumen yang tersebar luas di seluruh Indonesia.

Strategi pemasaran BFI Finance melibatkan beberapa *channel* utama, yaitu:

- *Dealer/Supplier*: untuk memasarkan pembiayaan mobil, alat berat, dan mesin;
- *Agen*: untuk memasarkan pembiayaan multiguna dengan mobil, motor, dan sertifikat rumah atau ruko sebagai jaminan;
- *In-house Telemarketing*: berfungsi sebagai jalur komunikasi langsung dengan konsumen, untuk memasarkan produk dan layanan Perusahaan melalui telepon, pesan singkat (SMS), dan jaringan *hotline* 1500018; dan
- *Media Sosial*: jaringan sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube digunakan sebagai jalur pemasaran untuk memungkinkan adanya komunikasi langsung dengan konsumen.

Di 2019, strategi pemasaran BFI Finance lebih ditekankan pada pengembangan jalur pemasaran *non-dealer*, dengan tujuan mendiversifikasi portofolio pembiayaan sekaligus meningkatkan kualitas aset Perusahaan. Melalui upaya strategis tersebut, Perusahaan dapat memperkuat posisi keuangannya dan menambah jumlah konsumen pembiayaannya.

Pengembangan Jaringan

Hingga akhir 2019, BFI Finance mengoperasikan 423 outlet, terdiri dari 232 cabang (tidak termasuk 45 cabang perwakilan syariah) dan 191 gerai di seluruh Indonesia, naik 5% atau 22 outlet dari posisi akhir 2018.

Sebagian besar outlet BFI Finance tersebar di pulau Jawa dan Bali, yaitu sebesar 55%, diikuti oleh Sumatra, Indonesia Timur (termasuk Sulawesi, Maluku, dan Papua), serta Kalimantan, masing-masing dengan persentase 17%, 17%, dan 11% dari keseluruhan.

Manajemen Basis Data dan Pemasaran Digital

Sejalan dengan inisiatif transformasi digital BFI Finance di seluruh lapisan, berbagai media digital dimanfaatkan oleh strategi penetrasi target pasarnya. Oleh karena itu, kampanye pemasaran digital, paparan di media sosial, serta *profiling* yang didasarkan pada kriteria geografis dan demografis dan juga kualifikasi dan riwayat konsumen dapat terus ditingkatkan.

Manajemen basis data tersebut membuat Perusahaan mampu menjalankan kegiatan pemasarannya secara lebih efektif dan efisien, serta menjangkau cakupan wilayah yang lebih luas. Di 2019, BFI Finance memperkuat kehadirannya pada berbagai *platform* media sosial (Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube) sebagai bagian dari jalur pemasarannya, agar membuat konsumen merasa lebih dekat dengan Perusahaan.

Perusahaan membina kemitraan yang erat dengan hampir 50 mitra online, termasuk Tokopedia, Cermati, dan Julu. Mereka ikut meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya yang melek digital, akan posisi BFI Finance sebagai perusahaan pembiayaan terkemuka di industri multifinance.

Di 2019, Perusahaan mulai membangun kapabilitas *Search Engine Optimization* untuk merespons tren perubahan perilaku pasar di Indonesia, mengingat kini sebelum melakukan pembelian, konsumen kerap mencari informasi pertama-tama dari internet. Oleh karena itu, Perusahaan tengah membangun kemitraan dengan Google dan Facebook Indonesia untuk mengoptimalkan pemahaman dan penerapan strategi pemasarannya sesuai dengan tren di kalangan konsumen. Hasilnya sangat memuaskan: di 2019, di tengah ketegangan politis dan situasi ekonomi yang cukup menantang, Perusahaan dapat menghasilkan 33,5% lebih banyak *lead* dan membukukan 30,1% lebih banyak kontrak baru dibandingkan di tahun sebelumnya, melalui jalur digitalnya. Semua ini dicapai dengan biaya pemasaran yang bahkan 10% lebih rendah dibandingkan di 2018.

Penguatan Jalur *Telesales*

BFI Finance melibatkan 330 personel *in-house telemarketing* untuk membantu pelanggannya mendapatkan informasi lengkap tentang promosi produk dan layanan serta proses pembiayaan. Selain menampung umpan balik dari pelanggan terhadap layanannya, jalur *telesales*—yang lebih difokuskan untuk retensi pelanggan—juga membantu Perusahaan menawarkan paket-paket istimewa, misalnya proses persetujuan pembiayaan yang lebih ramping.

Ini diarahkan untuk memberikan nilai lebih bagi pelanggan setia, sekaligus meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

One Stop Solution dari BFI Finance, yaitu jalur *telesales* melalui *hotline* 1500018, memudahkan pelanggan untuk mengakses informasi secara cepat dan akurat tentang semua produk Perusahaan, selain juga dapat digunakan untuk mengirimkan aplikasi, mengisi survei, dan mentransfer dana, semuanya dalam satu jalur.

Selain Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya, penguatan jalur *telemarketing* juga telah mendorong pertumbuhan bisnis. Kontribusinya terhadap jumlah pembiayaan mobil dan motor di 2019 masing-masing mencapai 69% dan 59%.

Kemitraan dengan *Dealer*

Sebagai bagian dari upaya intensifikasi BFI Finance untuk meningkatkan kualitas aset, meskipun saat ini Perusahaan secara bertahap membatasi kemitraannya dengan *dealer*, Perusahaan terus menjaga hubungan kerja sama yang baik dan saling menguntungkan dengan sejumlah *dealer* terpilih dalam rangka memasarkan produk pembiayaan mobilnya. Hingga akhir 2019, BFI Finance telah bermitra dengan 861 *dealer* mobil di seluruh Indonesia.

Hubungan dengan Agen

BFI Finance bekerja sama dengan para agen untuk memasarkan produk pembiayaan multigunanya. Inisiatif ini difokuskan untuk menarik pelanggan baru. Saat ini, jaringan keagenan BFI Finance adalah salah satu yang terluas di industri, karena model akuisisi Perusahaan yang tidak bergantung pada pihak ketiga manapun. Rata-rata bulanan jumlah agen yang aktif bekerja sama dengan BFI Finance di 2019 adalah 2.772 agen mobil dan 6.327 agen motor.

Apresiasi bagi agen atas kontribusi mereka terhadap pemasaran produk Perusahaan antara lain:

- Bonus finansial: bonus aplikasi, bonus bulanan, dan bonus tiga bulanan, yang jumlahnya disesuaikan dengan prestasi agen yang bersangkutan;
- Bonus non-finansial: hadiah tamasya dan pemberian mobil dan motor bagi agen-agen terbaik nasional; dan
- Program *Privilege*: para agen dengan hasil pencapaian tinggi mendapatkan keuntungan dalam prioritas proses aplikasi.



Zainal Abidin

Konsumen Produk Pembiayaan Motor, Batam, Kepulauan Riau

“Sejak menjadi konsumen BFI Finance di 2015, saya selalu puas dengan pelayanan BFI Finance karena persyaratannya sangat sederhana. Para petugas pelayanan konsumen melayani dengan penuh perhatian, tanpa membedakan status sosial sehingga saya merasa nyaman sepanjang proses pembiayaan. Saya akan tetap memilih BFI Finance untuk keperluan pembiayaan lainnya. Semoga di masa mendatang ada lebih banyak program hadiah bagi konsumen yang telah berulang kali melakukan pinjaman.”

Pengembangan Bisnis Korporat

BFI Finance menjaga komitmen, profesionalisme, dan integritas yang kuat dalam memberikan layanan terbaik melalui kemitraannya dengan para pemasok dan pelanggan alat berat, permesinan, serta peralatan komersial lainnya. Posisi BFI Finance yang termasuk dalam tiga besar di pasar membuktikan bahwa mitra bisnis korporatnya sangat percaya dengan keandalan Perusahaan.

Di 2019, pembiayaan mesin oleh BFI Finance tergolong stabil. Di berbagai pameran, Perusahaan mengintensifkan komunikasi tentang merek-merek mesin yang ditawarkan pembiayaannya. Perusahaan juga menjalankan strategi diversifikasi industri dengan memasuki industri perawatan kesehatan, usaha binatu, serta makanan dan minuman.

Meskipun bisnis alat berat di 2019 sangat menantang akibat harga-harga komoditas yang rendah, BFI Finance terus mendiversifikasi pemasok alat beratnya dengan mengakuisisi sejumlah merek yang semakin diterima oleh pasar, seiring persepsi pasar terhadap kualitas dan harga dari merek-merek ini semakin baik. Di 2019, Perusahaan mengembangkan produk pembiayaan suku cadang, mengingat di tengah kondisi pasar komoditas yang tak kunjung menggembirakan, banyak pelaku bisnis yang memilih untuk memperbaiki alat berat mereka dibandingkan membeli baru.

BFI Finance terus memperkuat pemanfaatan basis data pelanggannya dengan menerapkan analisis yang lebih mendalam, khususnya terhadap data pelanggan prioritasnya. Sejumlah perlakuan khusus diberikan kepada mereka, misalnya proses persetujuan pembiayaan yang lebih cepat.

Perusahaan menunjukkan apresiasinya kepada para pelanggan produk pembiayaan alat berat dan mesin yang potensi pertumbuhannya masih sangat menjanjikan.

Pemasaran Pembiayaan Syariah

UUS BFI Finance menjalankan strategi pemasaran digital secara terpadu, yang turut didukung oleh kehadiran di media sosial, untuk menjangkau target pasar pembiayaan syariah yang terus meluas. Hingga akhir 2019, Perusahaan memiliki 45 cabang perwakilan syariah sesuai izin operasinya. Kemitraan UUS dengan pihak ketiga untuk memasarkan berbagai produk pembiayaan syariahnya terus dikembangkan di 2019, melalui kerja sama baru dengan berbagai agen perjalanan umrah, *event organizer*, *wedding organizer*, kontraktor bangunan, dan toko bahan bangunan.

Promosi Produk Property-Backed Financing (PBF)

Setelah produknya diluncurkan di 2018 dan sejak saat itu terus disempurnakan, pembiayaan PBF BFI Finance telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Ini terlihat dari model akuisisinya yang solid dan profil risikonya yang semakin baik. Pertumbuhan produk PBF di 2019 terutama didukung oleh pemasaran melalui agen. Sebaliknya, pertumbuhan bisnis keagenan juga sebagian besar berasal dari PBF.

BFI Education dan BFI Leisure

BFI Education dan BFI Leisure adalah dua produk Pembiayaan Multiguna yang memberikan solusi keuangan terhadap kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan dan liburan. Tingkat pendidikan yang dibiayai melalui BFI Education dimulai dari pendidikan dasar hingga universitas, dan juga pendidikan informal seperti kursus bahasa dan pemrograman. BFI Leisure menawarkan pembiayaan bagi mereka yang ingin berwisata. Kedua produk ini tidak membutuhkan jaminan, dan para pelanggan cukup mengisi survei online untuk memperoleh pembiayaan. Sejak peluncurannya di pertengahan 2018, peminat kedua produk ini cukup banyak, sehingga pada akhir 2019 aset pembiayaannya telah tumbuh lebih dari 350%.

Apresiasi bagi Pelanggan

Di 2019, BFI Finance meluncurkan program apresiasi pelanggan setia “KEMILAU BFI”, dengan slogan “Maksimum Cairnya, Kemilau Hadiahnya”. Program baru ini merupakan kelanjutan dari “UBER MILYARAN”, program sejenis yang sebelumnya dijalankan sejak 2015 sebagai salah satu wujud kampanye pemasaran Perusahaan.

Program KEMILAU BFI bertujuan untuk:

- Mengapresiasi pelanggan BFI Finance yang aktif (“Sahabat BFI”);
- Menjaga hubungan baik antara BFI Finance dengan pelanggannya;
- Membuka peluang kolaborasi bisnis baru antara BFI Finance dengan pelanggannya; dan
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nama BFI Finance melalui penarikan undian dan pemasangan iklan di media.

Sebelumnya, lewat program UBER MILYARAN, Perusahaan melakukan penarikan undian di setiap area. Mulai 2019, penarikan undian untuk program KEMILAU BFI membagi pelanggan ke dalam empat area, yakni Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur. Mekanisme penarikan undiannya sebagai berikut:

Produk	Kupon Undian
Pembiayaan Motor	Setiap 1 kontrak dan kelipatannya = 1 kupon
BFI Education BFI Leisure	Setiap 1 kontrak dan kelipatannya = 1 kupon (minimum Rp5 juta)
Pembiayaan Mobil Pembiayaan Properti	Setiap Rp25 juta dan kelipatannya = 1 kupon
Pembiayaan Mesin Pembiayaan Alat Berat	Setiap Rp50 juta dan kelipatannya = 1 kupon

Fokus Pemasaran 2020

Strategi dan inisiatif pemasaran BFI Finance di tahun-tahun mendatang akan lebih terarah dengan mengandalkan data, sehingga penetrasi pasarnya lebih optimal. Dengan dukungan dari sistem manajemen data yang lebih baik dan memungkinkan analisis data dan perilaku pelanggan secara lebih mendalam, BFI Finance dapat menjalankan strategi pemasaran yang lebih ramping, terarah, dan tetap berfokus pada konsumen.



“Jumlah Pendapatan BFI Finance di 2019 meningkat 4,4% dari Rp5.018 miliar di 2018 menjadi Rp5.241 miliar di 2019.”



Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Aset

TABEL 37_JUMLAH ASET

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Kas dan Setara Kas	755	660	(95)	-12,6%
Piutang Pembiayaan - Bersih	17.281	17.396	115	0,7%
Aset <i>Ijarah</i> - Bersih	2	43	41	2,050,0%
Jumlah Piutang Bersih	17.283	17.439	156	0,9%
Piutang Lain-Lain - Bersih	198	154	(44)	-22,2%
Aset Derivatif	110	0	(110)	-100,0%
Beban Dibayar di Muka dan Uang Muka	54	73	19	35,2%
Aset Tetap - Bersih	530	541	11	2,1%
Aset Tak Berwujud - Bersih	32	30	(2)	-6,3%
Aset Pajak Tangguhan	68	110	42	61,8%
Aset Lain-Lain	87	83	(4)	-4,6%
Jumlah Aset	19.117	19.090	(27)	-0,1%

Persentase dari Jumlah

Kas dan Setara Kas	3,9%	3,5%	n/a	-0,4%
Piutang Pembiayaan - Bersih	90,4%	91,1%	n/a	0,7%
Aset <i>Ijarah</i> - Bersih	0,0%	0,2%	n/a	0,2%
Jumlah Piutang Bersih	90,4%	91,3%	n/a	0,9%
Piutang Lain-Lain - Bersih	1,0%	0,8%	n/a	-0,2%
Aset Derivatif	0,6%	0,0%	n/a	-0,6%
Beban Dibayar di Muka dan Uang Muka	0,3%	0,4%	n/a	0,1%
Aset Tetap - Bersih	2,8%	2,9%	n/a	0,1%
Aset Tak Berwujud - Bersih	0,2%	0,1%	n/a	0,1%
Aset Pajak Tangguhan	0,4%	0,6%	n/a	0,2%
Aset Lain-Lain	0,4%	0,4%	n/a	0,0%
Jumlah Aset	100,0%	100,0%		

Jumlah Aset BFI Finance mencapai Rp19.090 miliar per 31 Desember 2019, relatif stabil dari posisi tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp19.117 miliar.

Jumlah Piutang Bersih berkontribusi paling besar terhadap Jumlah Aset di 2019, dengan nilai Rp17.439 miliar atau 91,3% dari Jumlah Aset. Jumlah ini meningkat 0,9% dari Jumlah Piutang Bersih di tahun sebelumnya, yang mencapai Rp17.283 miliar (90,4% dari Jumlah Aset di 2018).

Jumlah Piutang Bersih

Dalam periode pelaporan sebelumnya, Piutang Bersih terdiri dari Piutang Sewa Pembiayaan Bersih, Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih, dan Aset *Ijarah* Bersih. Sejak 2019, terdapat suatu komponen tambahan pada Piutang Bersih, yaitu Piutang Pembiayaan *Murabahah* Bersih. Kontribusinya terhadap nilai keseluruhan pada akhir 2019 adalah Rp4 miliar.

Jumlah Piutang Bersih di 2019 bernilai Rp17.439 miliar, meningkat 0,9% dari nilainya di 2018 sebesar Rp17.283 miliar.

TABEL 38_PIUTANG BERSIH

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Piutang Pembiayaan Bersih	17.281	17.396	115	0,7%
Aset <i>Ijarah</i> - Bersih	2	43	41	2.050,0%
Jumlah Piutang Bersih	17.283	17.439	156	0,9%

Jumlah Piutang Bersih berasal dari Jumlah Piutang yang Dikelola dikurangi porsi Pembiayaan Bersama yang dicatat oleh pihak ketiga, yang jumlahnya meningkat dari Rp682 miliar di 2018 menjadi Rp715 miliar di 2019, dan setelah disesuaikan dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang bernilai Rp355 miliar pada akhir 2019, menurun 6,1% dari Rp378 miliar di 2018. Hal ini ditampilkan pada Tabel 39 di bawah ini.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dijelaskan secara rinci pada halaman 158.

TABEL 39_PIUTANG YANG DIKELOLA VS PIUTANG BERSIH

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Piutang Pembiayaan	18.340	18.466	126	0,7%
Aset <i>Ijarah</i>	3	43	40	1.333,3%
Jumlah Piutang yang Dikelola	18.343	18.509	166	0,9%
Dikurangi Pembiayaan Bersama - dicatat oleh pihak ketiga	(682)	(715)	(33)	4,8%
Jumlah Piutang Sebelum Cadangan Kerugian	17.661	17.794	133	0,8%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	378	355	(23)	-6,1%
Jumlah Piutang - Bersih	17.283	17.439	156	0,9%

Untuk analisis yang lebih mendalam dan representatif, pembahasan Piutang akan difokuskan pada Jumlah Piutang yang Dikelola berdasarkan Jenis Aset, karena hal ini mencerminkan klasifikasi bisnis Perusahaan dengan lebih jelas.

TABEL 40_DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS ASET

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Pembiayaan Mobil Bekas	12.959	12.868	(91)	-0,7%
Pembiayaan Mobil Baru	554	397	(157)	-28,3%
Pembiayaan Mobil	13.513	13.265	(248)	-1,8%
Pembiayaan Alat Berat	2.802	2.776	(26)	-0,9%
Pembiayaan Sepeda Motor Bekas	1.720	2.058	338	19,7%
Pembiayaan Properti	305	363	58	19,0%
Pembiayaan Syariah	3	47	44	1.466,7%
Jumlah Piutang yang Dikelola	18.343	18.509	166	0,9%
Persentase dari Jumlah				
Pembiayaan Mobil Bekas	70,6%	69,5%	n/a	-1,1%
Pembiayaan Mobil Baru	3,0%	2,2%	n/a	-0,8%
Pembiayaan Mobil	73,6%	71,7%	n/a	-1,9%
Pembiayaan Alat Berat	15,3%	15,0%	n/a	-0,3%
Pembiayaan Sepeda Motor Bekas	9,4%	11,1%	n/a	1,7%
Pembiayaan Properti	1,7%	2,0%	n/a	0,3%
Pembiayaan Syariah	0,0%	0,2%	n/a	0,2%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Bagian terbesar dari Jumlah Piutang yang Dikelola di 2019, sebesar 71,7%, adalah Pembiayaan Mobil, baik Bekas maupun Baru, senilai Rp13.265 miliar. Hal ini terdiri dari Pembiayaan Mobil Bekas sebesar Rp12.868 miliar dan Pembiayaan Mobil Baru sebesar Rp397 miliar. Sisanya sebesar 28,3% dari nilai keseluruhan Piutang yang Dikelola terdiri dari Pembiayaan Alat Berat (15,0%), diikuti oleh Pembiayaan Sepeda Motor Bekas (11,1%), Pembiayaan Properti (2,0%), dan Pembiayaan Syariah (0,2%).

Jumlah Piutang yang Dikelola – Mobil

Pembiayaan Mobil Bekas dan Pembiayaan Mobil Baru berkontribusi terhadap Jumlah Piutang yang Dikelola di 2019 masing-masing adalah 69,5% dan 2,2%. Pembiayaan Mobil Bekas sedikit menurun, sebesar 0,7%, dari Rp12.959 miliar di 2018 menjadi Rp12.868 miliar di 2019, sementara Pembiayaan Mobil Baru menurun 28,3% dari Rp554 miliar menjadi Rp397 miliar pada akhir 2019, karena adanya perubahan strategi Perusahaan dari tahun sebelumnya untuk mengurangi fokus pada bisnis Pembiayaan Mobil Baru.

Pembiayaan Mobil oleh Perusahaan mencakup jenis-jenis Minibus/MPV, Truk, Pick-up, Jip, Sedan, dan Bus. Lebih dari setengah portofolio Pembiayaan Mobil didominasi oleh Minibus/MPV, dengan porsi 52,6% dari nilai keseluruhan, diikuti oleh Jip sebesar 17,8% dan Truk sebesar 12,5%. Rincian lebih lanjut diberikan dalam tabel berikut.

TABEL 41_DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO PEMBIAYAAN MOBIL BERDASARKAN JENIS MOBIL

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Minibus/MPV	7.072	6.978	(94)	-1,3%
Jip	2.306	2.365	59	2,6%
Truk	1.738	1.659	(79)	-4,5%
Pick-up	1.392	1.303	(89)	-6,4%
Sedan	899	849	(50)	-5,6%
Bus	106	111	5	4,7%
Jumlah	13.513	13.265	(248)	-1,8%
Persentase dari Jumlah				
Minibus/MPV	52,3%	52,6%	n/a	0,3%
Jip	17,1%	17,8%	n/a	0,7%
Truk	12,9%	12,5%	n/a	-0,4%
Pick-up	10,3%	9,8%	n/a	-0,5%
Sedan	6,6%	6,4%	n/a	-0,2%
Bus	0,8%	0,9%	n/a	0,1%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Merek Jepang masih mendominasi bisnis ini, mencakup 97,3% dari keseluruhan portofolio Pembiayaan Mobil Perusahaan pada akhir 2019. Porsi ini relatif tidak berubah dari nilainya pada akhir 2018. Toyota masih menjadi kontributor utama, dengan porsi 37,3%, diikuti oleh Mitsubishi, Daihatsu, dan Honda, masing-masing sebesar 14,7%, 13,4%, dan 12,9%.

TABEL 42_DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO PEMBIAYAAN MOBIL BERDASARKAN MEREK

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Toyota	4.970	4.944	(26)	-0,5%
Mitsubishi	2.043	1.944	(99)	-4,8%
Daihatsu	1.809	1.776	(33)	-1,8%
Honda	1.692	1.705	13	0,8%
Suzuki	1.303	1.223	(80)	-6,1%
Isuzu	180	176	(4)	-2,2%
Merek Jepang Lain-Lain	1.151	1.132	(19)	-1,7%
Di Luar Merek Jepang	365	365	-	0,0%
Jumlah	13.513	13.265	(248)	-1,8%
Persentase dari Jumlah				
Toyota	36,8%	37,3%	n/a	0,5%
Mitsubishi	15,1%	14,7%	n/a	-0,4%
Daihatsu	13,4%	13,4%	n/a	0,0%
Honda	12,5%	12,9%	n/a	0,4%
Suzuki	9,7%	9,2%	n/a	-0,5%
Isuzu	1,3%	1,3%	n/a	0,0%
Merek Jepang Lain-Lain	8,5%	8,5%	n/a	0,0%
Di Luar Merek Jepang	2,7%	2,7%	n/a	0,0%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Jumlah Piutang yang Dikelola – Sepeda Motor Bekas

Jumlah Piutang yang Dikelola – Sepeda Motor Bekas di Perusahaan pada akhir 2019 mencapai Rp2.058 miliar, meningkat 19,7% dari Rp1.720 miliar pada akhir 2018. Pertumbuhan tersebut didukung terutama oleh kenaikan dalam sepeda motor Honda, sebanyak 28,2% atau Rp265 miliar dibandingkan nilainya pada tahun sebelumnya. Merek Honda mengambil porsi 58,5% dari Jumlah Portofolio Pembiayaan Sepeda Motor Bekas per 31 Desember 2019. Porsi merek Yamaha sebagai kontributor terbesar kedua terhadap Jumlah Pembiayaan Sepeda Motor Bekas adalah 35,5%, atau senilai Rp730 miliar.

TABEL 43_DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR BEKAS BERDASARKAN MEREK

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Honda	940	1.205	265	28,2%
Yamaha	660	730	70	10,6%
Suzuki	79	77	(2)	-2,5%
Lain-Lain	41	46	5	12,2%
Jumlah	1.720	2.058	338	19,7%

TABEL 43_DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR BEKAS BERDASARKAN MEREK

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Persentase dari Jumlah				
Honda	54,6%	58,5%	n/a	3,9%
Yamaha	38,4%	35,5%	n/a	-2,9%
Suzuki	4,6%	3,8%	n/a	-0,8%
Lain-Lain	2,4%	2,2%	n/a	-0,2%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Jumlah Piutang yang Dikelola – Alat Berat, Mesin, dan Lain-Lain

BFI Finance menyediakan Pembiayaan Alat Berat, Mesin, dan Lain-Lain. Pembiayaan di segmen ini menurun 0,9% per akhir 2019, dari Rp2.802 miliar di 2018 menjadi Rp2.776 miliar di 2019, sejalan dengan pertumbuhan ekspor Indonesia yang melemah, khususnya di paruh pertama 2019.

Komponen terbesar dalam segmen ini per akhir 2019 adalah pembiayaan Ekskavator, yang mencapai 46,1% dari portofolio keseluruhan, dengan nilai piutang yang dikelola sebesar Rp1.280 miliar. Jumlah Pembiayaan Alat Berat di 2019 berkontribusi Rp2.091 miliar, atau 75,4% terhadap portofolio keseluruhan segmen ini, sementara 23,5% berasal dari Pembiayaan Mesin, dan 1,1% sisanya dari Pembiayaan Lain-Lain.

Kontributor terbesar terhadap Portofolio Pembiayaan Alat Berat, Mesin, dan Lain-Lain berdasarkan Industri adalah sektor Konstruksi, dengan porsi 28,7% dari portofolio keseluruhan segmen ini. Kontribusi sektor ini tumbuh 12,1% dari Rp712 miliar di 2018 menjadi Rp798 miliar di 2019. Kontributor utama lainnya, secara berurutan, adalah sektor Pertambangan dengan 26,6%, sektor Jasa dengan 13,0%, dan sektor Industri dan Manufaktur sebesar 12,7% dari nilai keseluruhan.

TABEL 44_DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO PEMBIAYAAN ALAT BERAT, MESIN, DAN LAIN-LAIN BERDASARKAN JENIS ASET

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Ekskavator	1.297	1.280	(17)	-1,3%
Truk	402	382	(20)	-5,0%
Bulldoser	119	108	(11)	-9,2%
Wheel Loader	53	59	6	11,3%
Forklift	59	52	(7)	-11,9%
Alat Berat Lainnya	207	210	3	1,4%
Jumlah Alat Berat	2.137	2.091	(46)	-2,2%
Mesin	639	654	15	2,3%
Lain-Lain	26	31	5	19,2%
Jumlah	2.802	2.776	(26)	-0,9%

TABEL 44_DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO PEMBIAYAAN ALAT BERAT, MESIN, DAN LAIN-LAIN BERDASARKAN JENIS ASET

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Persentase dari Jumlah				
Ekskavator	46,3%	46,1%	n/a	-0,2%
Truk	14,3%	13,8%	n/a	-0,5%
Bulldoser	4,3%	3,9%	n/a	-0,4%
Wheel Loader	1,9%	2,1%	n/a	0,2%
Forklift	2,1%	1,9%	n/a	-0,2%
Alat Berat Lainnya	7,4%	7,6%	n/a	0,2%
Jumlah Alat Berat	76,3%	75,4%	n/a	-0,9%
Mesin	22,8%	23,5%	n/a	0,7%
Lain-Lain	0,9%	1,1%	n/a	0,2%
Jumlah	100,0%	100,0%		

TABEL 45_DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO PEMBIAYAAN ALAT BERAT, MESIN, DAN LAIN-LAIN BERDASARKAN INDUSTRI

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Konstruksi	712	798	86	12,1%
Pertambangan	762	738	(24)	-3,1%
Jasa	400	360	(40)	-10,0%
Industri dan Manufaktur	300	354	54	18,0%
Perkebunan	166	158	(8)	-4,8%
Perhutanan	206	152	(54)	-26,2%
Perdagangan dan Distribusi	115	88	(27)	-23,5%
Lain-Lain	141	128	(13)	-9,2%
Jumlah	2.802	2.776	(26)	-0,9%
Persentase dari Jumlah				
Konstruksi	25,4%	28,7%	n/a	3,3%
Pertambangan	27,2%	26,6%	n/a	-0,6%
Jasa	14,3%	13,0%	n/a	-1,3%
Industri dan Manufaktur	10,7%	12,7%	n/a	2,0%
Perkebunan	5,9%	5,7%	n/a	-0,2%
Perhutanan	7,4%	5,5%	n/a	-1,9%
Perdagangan dan Distribusi	4,1%	3,2%	n/a	-0,9%
Lain-Lain	5,0%	4,6%	n/a	-0,4%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Jumlah Piutang yang Dikelola – Properti

Pembiayaan Beragun Properti BFI Finance tumbuh 19,0%, dari Rp305 miliar pada akhir 2018 menjadi Rp363 miliar pada akhir 2019. Dari keseluruhan Pembiayaan Beragun Properti, 97,0% berasal dari Pembiayaan dengan Rumah sebagai agunan, yang jumlahnya meningkat 20,5% menjadi Rp352 miliar pada akhir 2019.

TABEL 46_DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO PROPERTI BERDASARKAN JENIS

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Rumah	292	352	60	20,5%
Ruko	13	11	(2)	-15,4%
Jumlah	305	363	58	19,0%
Persentase dari Jumlah				
Rumah	95,7%	97,0%	n/a	1,3%
Ruko	4,3%	3,0%	n/a	-1,3%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Jumlah Piutang yang Dikelola – Aset *Ijarah*

Perusahaan mencatat nilai Aset *Ijarah* (termasuk porsi Piutang *Ijarah*) pada akhir 2019 sebesar Rp43 miliar, dibandingkan dengan Rp3 miliar pada akhir 2018. Perusahaan mulai memasarkan produk *Ijarah* di 2018 yang semakin bertumbuh sepanjang 2019.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai adalah nilai yang disisihkan dari Jumlah Piutang yang Dikelola untuk mengantisipasi kerugian potensial terhadap Piutang di masa mendatang. Nilainya dihitung secara statistik dan terdapat nilai masing-masing untuk setiap eksposur dan jenis aset.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada akhir 2019 menunjukkan penurunan 6,1%, dari Rp378 miliar di tahun sebelumnya menjadi Rp355 miliar, sejalan dengan perbaikan kualitas aset dan NPF.

TABEL 47_CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Jumlah Piutang yang Dikelola	18.343	18.509	166	0,9%
NPF (termasuk Pembiayaan Bersama)	222	157	(65)	-29,3%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	378	355	(23)	-6,1%
<i>NPF Coverage</i>	1,7 x	2,3 x	n/a	55,8%

Kas dan Setara Kas

Pada 31 Desember 2019, Kas dan Setara Kas BFI Finance bernilai Rp660 miliar, menurun 12,6% dari Rp755 miliar per 31 Desember 2018. Perusahaan terus mempertahankan posisi kasnya untuk mendukung bisnisnya secara berkelanjutan.

Piutang Lain-Lain – Bersih

Perusahaan mencatat Piutang Lain-Lain dalam berbagai bentuk, antara lain, Piutang dalam Proses Penyelesaian (nilai buku dari aset agunan yang dikembalikan oleh atau diambil dari konsumen yang tidak dapat meneruskan pembayaran piutang), Piutang Penerimaan Angsuran Konsumen (di mana pembayarannya telah dilakukan oleh konsumen dan sudah diterima oleh mitra pembayaran BFI Finance, namun dananya baru akan dikreditkan ke rekening bank Perusahaan di hari kerja berikutnya), Piutang Karyawan, Piutang MESOP, dan Premi Asuransi.

Jumlah Piutang Lain-Lain yang tercatat per 31 Desember 2019 mencapai Rp154 miliar, 22,2% lebih rendah dibandingkan Rp198 miliar di 2018. Penurunan ini sebagian besar berasal dari penurunan dalam Piutang Penerimaan Angsuran Konsumen, sebesar 42,6% atau Rp26 miliar dari Rp61 miliar per 31 Desember 2018 menjadi Rp35 miliar per 31 Desember 2019, dan diikuti oleh penurunan dalam Piutang dalam Proses Penyelesaian, dari Rp93 miliar menjadi Rp81 miliar.

TABEL 48_PIUTANG LAIN-LAIN

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Piutang dalam Proses Penyelesaian - Bersih	93	81	(12)	-12,9%
Piutang Penerimaan Angsuran Konsumen	61	35	(26)	-42,6%
Piutang Karyawan	22	20	(2)	-9,1%
Piutang MESOP	8	6	(2)	-25,0%
Premi Asuransi	2	4	2	100,0%
Piutang Lain-Lain	12	8	(4)	-33,3%
Jumlah	198	154	(44)	-22,2%

Aset (Liabilitas) Derivatif

Aset (Liabilitas) Derivatif berasal dari perjanjian-perjanjian *swap* Perusahaan untuk melakukan lindung nilai atas pinjaman dalam mata uang asing—khususnya pinjaman luar negeri dalam mata uang USD—sebagai salah satu sumber pendanaannya, untuk mengantisipasi risiko tingkat bunga dan risiko nilai tukar mata uang. Langkah mitigasi Perusahaan untuk risiko ini sebagai bagian dari manajemen risikonya yang komprehensif adalah menerapkan kebijakan lindung nilai yang ketat untuk pinjaman dalam mata uang asing dan dengan suku bunga mengambang. Semua aktivitas lindung nilai dilakukan melalui perjanjian *swap* mata uang dengan bank-bank terkemuka. Saat ini, atas seluruh pinjaman dalam mata uang asing telah dilakukan lindung nilai, dan tidak ada posisi yang terekspos pada risiko mata uang asing dan risiko tingkat bunga.

Liabilitas Derivatif sebesar Rp130 miliar tercatat per 31 Desember 2019, sementara pada akhir 2018 tercatat Aset Derivatif sebesar Rp110 miliar. Rincian Aset dan Liabilitas Derivatif diberikan dalam tabel berikut.

TABEL 49_ASET (LIABILITAS) DERIVATIF

Keterangan	2018		2019	
	Nilai Nosional USD (nilai penuh)	Aset (Liabilitas) Derivatif (Rp miliar)	Nilai Nosional USD (nilai penuh)	Aset (Liabilitas) Derivatif (Rp miliar)
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	42.000.000	48	155.000.000	(74)
PT Bank ANZ Indonesia	-	-	67.500.000	(29)
PT Bank Permata Tbk	-	-	65.000.000	(38)
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	56.500.000	47	30.500.000	9
PT Bank CIMB Niaga Tbk	14.833.333	15	6.166.667	2
Jumlah	113.333.333	110	324.166.667	(130)

Beban Dibayar di Muka dan Uang Muka

Beban Dibayar di Muka dan Uang Muka meningkat 35,2% dari posisinya di tahun lalu terutama karena adanya beban dibayar di muka yang terkait pembelian kuota atas akses informasi ke biro kredit, yang akan diamortisasi sesuai penggunaannya.

Aset Tetap – Bersih

Aset Tetap – Bersih di BFI Finance meningkat 2,1% di 2019, mencapai Rp541 miliar per 31 Desember 2019, dibandingkan Rp530 miliar yang dicatat satu tahun sebelumnya. Kontributor terbesar untuk peningkatan Aset Tetap ini adalah dalam bentuk Kendaraan dan Peralatan Kantor, yang jumlah bersihnya pada akhir 2019 tercatat sebesar Rp128 miliar dan Rp69 miliar. Rincian penambahan diberikan pada bagian Investasi Material atas Barang Modal.

Aset Tak Berwujud – Bersih

Aset Tak Berwujud terdiri dari pembelian perangkat lunak. Per 31 Desember 2019, Aset Tak Berwujud – Bersih di BFI Finance menurun 6,3% dari Rp32 miliar di tahun sebelumnya menjadi Rp30 miliar.

Aset Pajak Tangguhan

BFI Finance mencatat Aset Pajak Tangguhan sejumlah Rp110 miliar per 31 Desember 2019, meningkat 61,8% dari Rp68 miliar per 31 Desember 2018, terutama karena adanya perbedaan dalam waktu pengakuan pajak terkait Penghasilan Komprehensif Lain.

Liabilitas

TABEL 50_JUMLAH LIABILITAS

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Pinjaman yang Diterima	6.900	7.730	830	12,0%
Surat Berharga yang Diterbitkan - Bersih	5.196	3.758	(1.438)	-27,7%
Beban yang Masih Harus Dibayar	283	797	514	181,6%
Liabilitas Imbalan Pascakerja	202	258	56	27,7%
Liabilitas Derivatif	-	130	130	n/a
Utang Pajak	67	73	6	9,0%
Utang Lain-Lain	265	262	(3)	-1,1%
Jumlah	12.913	13.008	95	0,7%
Persentase dari Jumlah				
Pinjaman yang Diterima	53,4%	59,4%	n/a	6,0%
Surat Berharga yang Diterbitkan - Bersih	40,2%	28,9%	n/a	-11,3%
Beban yang Masih Harus Dibayar	2,2%	6,1%	n/a	3,9%
Liabilitas Imbalan Pascakerja	1,6%	2,0%	n/a	0,4%
Liabilitas Derivatif	0,0%	1,0%	n/a	1,0%
Utang Pajak	0,5%	0,6%	n/a	0,1%
Utang Lain-Lain	2,1%	2,0%	n/a	-0,1%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Jumlah Liabilitas BFI Finance per 31 Desember 2019 mencapai Rp13.008 miliar, meningkat sedikit yaitu 0,7% dari liabilitas di tahun sebelumnya sejumlah Rp12.913 miliar. Bagian terbesar dari Jumlah Liabilitas berupa Pinjaman yang Diterima dan Surat Berharga yang Diterbitkan - Bersih, masing-masing berkontribusi sebesar 59,4% dan 28,9% terhadap nilai secara keseluruhan.

TABEL 51_SUMBER DANA

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Pinjaman yang Diterima				
Pinjaman Bank (Mata Uang Asing)	1.851	4.481	2.630	142,1%
Pinjaman Bank (Rupiah)	5.049	3.249	(1.800)	-35,7%
Jumlah Pinjaman yang Diterima	6.900	7.730	830	12,0%
Surat Berharga yang Diterbitkan				
Utang Obligasi	5.196	3.758	(1.438)	-27,7%
Jumlah Surat Berharga yang Diterbitkan - Bersih	5.196	3.758	(1.438)	-27,7%
Jumlah Sumber Dana	12.096	11.488	(608)	-5,0%

Pinjaman yang Diterima

Jumlah Pinjaman yang Diterima yang tercatat per 31 Desember 2019 mencapai Rp7.730 miliar, meningkat 12,0% dari Rp6.900 miliar di 2018. Peningkatan signifikan berasal dari Pinjaman yang Diterima dalam dolar AS (USD), sebesar Rp2.630 miliar atau 142,1%, dari Rp1.851 miliar di 2018 menjadi Rp4.481 miliar di 2019. Sebaliknya, Pinjaman yang Diterima dalam Rupiah menurun Rp1.800 miliar atau 35,7%, karena Perusahaan memanfaatkan nilai tukar yang lebih baik serta ketersediaan pendanaan dari luar negeri.

TABEL 52_RINCIAN PINJAMAN YANG DITERIMA

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya
Pinjaman (USD)			
Pinjaman Sindikasi (Agen: PT Bank Central Asia Tbk)	-	2.688	2.688
Pinjaman Berjangka yang Dijamin (Agen: Standard Chartered Bank)	-	1.036	1.036
Pinjaman Sindikasi (Agen: Standard Chartered Bank)	1.274	532	(742)
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	145	139	(6)
PT Bank CTBC Indonesia	154	74	(80)
JA Mitsui Leasing Singapore Pte. Ltd.	60	12	(48)
PT Bank ANZ Indonesia	218	-	(218)
Jumlah Pinjaman (USD)	1.851	4.481	2.630
Pinjaman (Rupiah)			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.782	1.164	(618)
PT United Tractors Tbk	1.032	856	(176)
PT Bank Central Asia Tbk	622	601	(21)
PT Bank ANZ Indonesia	-	218	218
PT Bank Permata Tbk	446	188	(258)
PT Bank Pan Indonesia Tbk	225	91	(134)
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (d/h PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk)	136	66	(70)
PT Bank KEB Hana Indonesia	253	29	(224)
PT Bank Bukopin Tbk	-	25	25
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	108	11	(97)
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	340	-	(340)
PT Bank CIMB Niaga Tbk	66	-	(66)
Bank of China Limited, Jakarta Branch	37	-	(37)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2	-	(2)
Jumlah Pinjaman (Rupiah)	5.049	3.249	(1.800)
Pinjaman - Bersih	6.900	7.730	830

Surat Berharga yang Diterbitkan - Bersih

Selain pinjaman bank, BFI Finance juga memperoleh pendanaan dari pasar surat utang dalam bentuk Obligasi Rupiah. Per 31 Desember 2019, Surat Berharga yang Diterbitkan - Bersih mencapai Rp3.758 miliar, menurun 27,7% dari Rp5.196 miliar di 2018 karena Perusahaan mengambil pinjaman yang lebih besar dari bank-bank dibandingkan dari pasar modal. Rincian dari surat berharga yang diterbitkan Perusahaan diberikan dalam tabel berikut.

TABEL 53_SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019
Obligasi		
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016	658	-
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016	683	133
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017	460	460
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017	500	400
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018	2.165	1.219
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018	740	552
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019	-	1.000
Jumlah Nilai Nominal	5.206	3.764
Dikurangi Biaya Emisi Obligasi yang Belum Diamortisasi	10	6
Jumlah - Bersih	5.196	3.758
Jumlah Surat Berharga yang Diterbitkan	5.196	3.758

Beban yang Masih Harus Dibayar

Kenaikan dalam Beban yang Masih Harus Dibayar disebabkan oleh kewajiban yang timbul sebagai bagian dari Kesepakatan Perdamaian dengan PT Aryaputra Teguharta pada 20 November 2019—yang dirinci pada halaman 273, dalam bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan pada Catatan 37, halaman 90 dari Catatan atas Laporan Keuangan—yang telah dicatat dan belum dibayarkan pada tanggal pelaporan keuangan, karena masih menunggu pemenuhan syarat-syarat dari penyelesaian kewajiban yang dicantumkan dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut. Per tanggal laporan audit, semua Beban yang Masih Harus Dibayar terkait Kesepakatan Perdamaian ini telah dibayarkan seluruhnya.

Liabilitas Imbalan Pascakerja

Kenaikan dalam Liabilitas Imbalan Pascakerja disebabkan oleh perubahan dalam tingkat diskon dalam menghitung nilai sekarang dari Liabilitas Imbalan Pascakerja Perusahaan, dari 8,8% di 2018 menjadi 8,2% di 2019.

Utang Pajak

Utang Pajak meningkat sebesar 9,0% dari Rp67 miliar di 2018 menjadi Rp73 miliar di 2019.

Utang Lain-Lain

Utang Lain-Lain terutama terdiri dari Titipan Konsumen, Premi Asuransi, Utang kepada *Supplier*, Perolehan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud, dan Lain-Lain. Jumlah Utang Lain-Lain per 31 Desember 2019 bernilai Rp262 miliar, 1,1% lebih rendah dibandingkan Rp265 miliar di 2018.

TABEL 54_UTANG LAIN-LAIN

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Titipan Konsumen	120	144	24	20,0%
Premi Asuransi	27	37	10	37,0%
Utang kepada <i>Supplier</i>	5	25	20	400,0%
Perolehan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud	58	1	(57)	-98,3%
Utang Lain-Lain	55	55	-	0,0%
Jumlah	265	262	(3)	-1,1%

Perjanjian Pembiayaan Bersama

Perusahaan memiliki perjanjian Pembiayaan Bersama dengan satu bank terkemuka di Indonesia. Porsi Perusahaan dalam Pembiayaan Bersama berkisar antara 5 hingga 10%, sementara sisanya dibiayai oleh bank mitra. Dalam Pembiayaan Bersama ini, Perusahaan berperan sebagai penyedia jasa, yang bertanggung jawab, antara lain, untuk menarik dan menerima pembayaran dari pelanggan dan meneruskan pembayaran ke bank pemberi pinjaman, serta sebagai kustodian dokumen aset yang digunakan sebagai jaminan.

Perjanjian Pembiayaan Bersama BFI Finance per akhir 2019 bernilai Rp726 miliar, meningkat 6,1% dari Rp684 miliar di tahun sebelumnya. Kenaikan ini sepenuhnya berasal dari kemitraan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang meningkat sebesar Rp60 miliar dari nilainya di 2018 menjadi Rp726 miliar di 2019.

Rincian perjanjian Pembiayaan Bersama Perusahaan diberikan dalam tabel berikut.

TABEL 55_PEMBIAYAAN BERSAMA

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Porsi BFI Finance	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
				Jumlah	Persentase
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	666	726	5%	60	9,0%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	12	-	5%	(12)	-100,0%
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	6	-	10%	(6)	-100,0%
Jumlah	684	726		42	6,1%

Ekuitas

TABEL 56_JUMLAH EKUITAS

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Modal Saham	399	399	-	0,0%
Tambahan Modal Disetor - Bersih	553	553	-	0,0%
Saham Treasuri	(252)	(252)	-	0,0%
Penghasilan Komprehensif Lain				
Keuntungan (Kerugian) Kumulatif atas Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai Arus Kas - Bersih	2	(88)	(90)	-4.500,0%
Kerugian Aktuarial Program Manfaat Pasti	(42)	(54)	(12)	28,6%
Saldo Laba				
Telah Ditentukan Penggunaannya	86	100	14	16,3%
Belum Ditentukan Penggunaannya	5.458	5.422	(36)	-0,7%
Jumlah	6.204	6.080	(124)	-2,0%

Jumlah Ekuitas BFI Finance per 31 Desember 2019 mencapai Rp6.080 miliar, menurun 2,0% dari Rp6.204 miliar per akhir 2018. Penurunan tersebut terutama berasal dari Kerugian Kumulatif atas Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai Arus Kas – Bersih, yang nilainya mencapai Rp88 miliar pada akhir 2019, sementara tercatat Keuntungan Kumulatif atas Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai Arus Kas – Bersih sejumlah Rp2 miliar pada akhir 2018.

Tambahan Modal Disetor – Bersih

Per 31 Desember 2019, Perusahaan mencatat Tambahan Modal Disetor sebesar Rp553 miliar, yang nilainya tidak berubah dari tahun sebelumnya.

Saham Treasuri

Tidak terdapat perubahan apapun terhadap jumlah Saham Treasuri, yang mencapai Rp252 miliar (1.002.732.000 lembar saham) per 31 Desember 2019 dan 2018. Saham Treasuri berasal dari program pembelian kembali saham di 2015 dan 2016, berdasarkan keputusan RUPSLB pada 15 April 2015.

TABEL 57_SAHAM TREASURI

Keterangan	Lembar Saham	Persentase
Saham Treasuri	1.002.732.000	6,28%

Program MESOP

Perusahaan menerapkan program MESOP berdasarkan keputusan RUPSLB pada 21 Juni 2012. Program tersebut berakhir pada 30 Juni 2016.

Jumlah saham baru yang diterbitkan selama program tersebut adalah 5% dari jumlah Modal Disetor Perusahaan, dan diberikan kepada manajemen dan karyawan yang telah memenuhi syarat dan telah mendapatkan persetujuan pemegang saham.

TABEL 58_KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	% Saham
Francis Lay Sioe Ho	Presiden Direktur	389.885.080	2,44
Sudjono	Direktur	33.380.000	0,21
Sutadi	Direktur	21.382.800	0,14
Andrew Adiwijanto	Direktur	10.120.000	0,06
Sigit Hendra Gunawan	Direktur (Independen)	10.000.000	0,06
Johanes Sutrisno	Komisaris	2.480	0,00
Jumlah		464.770.360	2,91

Saldo Laba

Jumlah Saldo Laba Perusahaan di 2019 bernilai Rp5.522 miliar, 0,4% lebih rendah dibandingkan dengan Saldo Laba di 2018 yang mencapai Rp5.544 miliar.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

BFI Finance membukukan Laba Tahun Berjalan sejumlah Rp712 miliar di 2019, menurun 51,5% dari Rp1.468 miliar di 2018.

Pendapatan

Pendapatan Perusahaan berasal dari Pendapatan Pembiayaan, Pendapatan Keuangan, dan Pendapatan Lain-Lain. Jumlah Pendapatan BFI Finance di 2019 meningkat 4,4% dari Rp5.018 miliar di 2018 menjadi Rp5.241 miliar di 2019.

Pendapatan Pembiayaan

Pendapatan Pembiayaan terutama berasal dari pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan, pendapatan berbasis jasa dari pembiayaan baru, dan biaya transaksi yang berulang, seperti biaya keterlambatan pembayaran dan penalti atas pelunasan lebih awal. Di 2019, Pendapatan Pembiayaan (Pembiayaan Bersama Bersih) mencapai Rp5 triliun, meningkat 2,2% dari Rp4.894 miliar di 2018. Peningkatan ini dapat dicapai kendati pertumbuhan pinjaman cenderung stagnan, terutama disebabkan oleh perbaikan komposisi piutang pembiayaan sehingga dapat mempertahankan tingkat margin bunga pembiayaan yang berkontribusi pada peningkatan jumlah pendapatan.

TABEL 59_PENDAPATAN

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Pendapatan				
Pembiayaan Sendiri & Bersama	4.937	5.082	145	2,9%
Pendapatan Lain-Lain	124	241	117	94,4%
Jumlah	5.061	5.323	262	5,2%
Dikurangi Pembiayaan Bersama	(43)	(82)	(39)	90,7%
Jumlah Pendapatan	5.018	5.241	223	4,4%
Pendapatan (Pembiayaan Sendiri)				
Piutang Pembiayaan				
Pendapatan Pembiayaan	3.739	3.838	99	2,6%
Administrasi	679	639	(40)	-5,9%
Denda Keterlambatan	314	339	25	8,0%
Terminasi	161	180	19	11,8%
Jumlah Pendapatan Piutang Pembiayaan	4.893	4.996	103	2,1%
Pembiayaan Syariah	1	4	3	300,0%
Jumlah Pendapatan Pembiayaan	4.894	5.000	106	2,2%
Pendapatan Lain-Lain	124	241	117	94,4%
Jumlah Pendapatan	5.018	5.241	223	4,4%

Pendapatan Administrasi di 2019 mencapai Rp639 miliar, dibandingkan Rp679 miliar di 2018, menurun sebesar 5,9%. Hal ini dipengaruhi oleh turunnya nilai penyaluran pembiayaan baru sepanjang tahun 2019. Denda Keterlambatan dan Terminasi meningkat masing-masing sebesar 8,0% dan 11,8%.

Sama halnya dengan analisis Jumlah Piutang yang Dikelola, pembahasan Pendapatan Pembiayaan juga akan dilakukan berdasarkan Jenis Aset, di mana kontributor terbesar di 2019 adalah Pembiayaan Mobil Bekas, senilai Rp3.393 miliar, dengan porsi 66,8% dari keseluruhan Jumlah Pendapatan Pembiayaan. Pendapatan dari Pembiayaan Mobil Bekas meningkat sedikit sebesar 0,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu Rp3.371 miliar. Namun, peningkatan terbesar dalam jumlah mutlak di 2019 tercatat pada Pembiayaan Sepeda Motor Bekas, yang meningkat Rp144 miliar atau 15,6% dari nilai di 2018. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan aset dalam kategori tersebut. Hal ini juga konsisten dengan strategi Perusahaan untuk berfokus pada Mobil Bekas dan Sepeda Motor Bekas dalam bisnis Pembiayaan dengan Agunan, dan menurunkan porsi bisnis *Dealer Financing*.

TABEL 60_PENDAPATAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS ASET

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Rincian berdasarkan Jenis Aset				
Pembiayaan Mobil Bekas	3.371	3.393	22	0,7%
Pembiayaan Sepeda Motor Bekas	921	1.065	144	15,6%
Pembiayaan Alat Berat	435	454	19	4,4%
Pembiayaan Mobil Baru	139	95	(44)	-31,7%
Pembiayaan Properti	70	71	1	1,4%
Pembiayaan Syariah	1	4	3	300,0%
Jumlah Pendapatan Pembiayaan (termasuk Pembiayaan Bersama)	4.937	5.082	145	2,9%
Persentase Jenis Aset				
Pembiayaan Mobil Bekas	68,3%	66,8%	n/a	-1,5%
Pembiayaan Sepeda Motor Bekas	18,7%	21,0%	n/a	2,3%
Pembiayaan Alat Berat	8,8%	8,9%	n/a	0,1%
Pembiayaan Mobil Baru	2,8%	1,9%	n/a	-0,9%
Pembiayaan Properti	1,4%	1,4%	n/a	0,0%
Pembiayaan Syariah	0,0%	0,0%	n/a	0,0%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan Lain-Lain mencakup seluruh sumber pendapatan non-inti yang berasal dari kegiatan utama Perusahaan di luar kegiatan pembiayaan, termasuk bunga dari kas yang ditempatkan di bank, serta dari kegiatan lainnya seperti pemulihan piutang yang dihapusbukukan, Keuntungan Bersih atas Penjualan Aset Tetap, dan Lain-Lain. Di 2019, Pendapatan Lain-Lain tumbuh 94,4% dari Rp124 miliar di 2018 menjadi Rp241 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh Pemulihan dari Piutang yang Dihapusbukukan dan Piutang dalam Proses Penyelesaian, yang tumbuh 83,5% dari Rp91 miliar menjadi Rp167 miliar, berkat upaya pemulihan yang intensif sekaligus upaya pengelolaan inventori yang lebih baik.

TABEL 61_PENDAPATAN LAIN-LAIN

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Pemulihan dari Piutang yang Dihapusbukukan dan Piutang dalam Proses Penyelesaian	91	167	76	83,5%
Keuangan	20	53	33	165,0%
Keuntungan Bersih atas Penjualan Aset Tetap	9	11	2	22,2%
Lain-Lain	4	10	6	150,0%
Jumlah	124	241	117	94,4%

Beban

TABEL 62_BEBAN

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Gaji dan Tunjangan	1.075	1.217	142	13,2%
Bunga dan Keuangan	1.036	1.008	(28)	-2,7%
Umum dan Administrasi	542	705	163	30,1%
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	509	426	(83)	-16,3%
Lain-Lain	16	793	777	4.856,3%
Jumlah	3.178	4.149	971	30,6%

Jumlah Beban BFI Finance di 2019 bernilai Rp4.149 miliar. Dua kontributor terbesar terhadap Jumlah Beban di 2019 adalah Gaji dan Tunjangan (senilai Rp1.217 miliar) dan Bunga dan Keuangan (senilai Rp1.008 miliar), masing-masing mengambil bagian 29,3% dan 24,3% dari jumlah keseluruhan.

Terdapat kenaikan 30,6% dalam Jumlah Beban dibandingkan dengan 2018, terutama dari Beban Lain-Lain, yang diikuti oleh Beban Umum dan Administrasi serta Gaji dan Tunjangan.

Gaji dan Tunjangan

Gaji dan Tunjangan terdiri dari seluruh Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan di sepanjang tahun berjalan, termasuk seluruh jenis imbalan kerja seperti bonus kinerja, tunjangan karyawan, dan kompensasi pensiun yang telah ditetapkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Gaji dan Tunjangan meningkat 13,2% dari Rp1.075 miliar di 2018 menjadi Rp1.217 miliar di 2019. Kenaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah karyawan Perusahaan sebesar 8,6%, dari 11.171 karyawan menjadi 12.127 karyawan di 2019.

TABEL 63_BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Gaji dan Imbalan Kerja	1.016	1.158	142	14,0%
Imbalan Pascakerja	59	59	-	0,0%
Jumlah	1.075	1.217	142	13,2%

Beban Bunga dan Keuangan

Beban Bunga dan Keuangan berasal dari kegiatan pendanaan Perusahaan, baik berupa pinjaman bank maupun surat berharga yang diterbitkan, serta biaya dan beban yang terkait.

Pinjaman yang Diterima di 2019 meningkat 12,0% menjadi Rp7.730 miliar di 2019, sementara jumlah Surat Berharga yang Diterbitkan – Bersih menurun 27,7% menjadi Rp3.758 miliar. Jumlah Pinjaman di 2019 yang secara keseluruhan lebih rendah menyebabkan turunnya Beban Bunga dan Keuangan di 2019 sebesar 2,7%, dari Rp1.036 miliar di 2018 menjadi Rp1.008 miliar. Rata-Rata Biaya Dana sepanjang tahun adalah 8,8%, atau 0,2% lebih tinggi dibandingkan di 2018, sebesar 8,6%. Suku bunga acuan Bank Indonesia, *7-Day Repo Rate* stabil sepanjang enam bulan pertama di 2019, dan mulai dipangkas pada Juli 2019, dan mencapai nilai 5,0% pada Desember 2019. Pada umumnya, Perusahaan mengalami dampak yang lebih lambat atas suku bunga yang berlaku, karena diberlakukannya suku bunga tetap terhadap pinjaman bank Perusahaan.

TABEL 64_PINJAMAN, BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN, DAN BIAYA DANA

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Pinjaman yang Diterima	6.900	7.730	830	12,0%
Surat Berharga yang Diterbitkan - Bersih	5.196	3.758	(1.438)	-27,7%
Jumlah Pinjaman	12.096	11.488	(608)	-5,0%
Beban Bunga dan Keuangan	1.036	1.008	(28)	-2,7%
Rata-Rata Biaya Dana	8,6%	8,8%		0,2%

Beban Umum dan Administrasi

Beban Umum dan Administrasi terdiri dari beban yang dibayarkan untuk mendukung kegiatan operasional dan pertumbuhan bisnis Perusahaan.

TABEL 65_BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Honorarium Tenaga Ahli	41	125	84	204,9%
Beban Penerimaan Angsuran	56	85	29	51,8%
Penyusutan Aset Tetap	75	82	7	9,3%
Perbaikan dan Pemeliharaan	61	70	9	14,8%
Perjalanan Dinas dan Transportasi	47	53	6	12,8%
Pemasaran	38	34	(4)	-10,5%
Pendidikan dan Pelatihan	32	34	2	6,3%
Pengiriman, Perangko, dan Materai	25	28	3	12,0%
Beban Kantor	21	27	6	28,6%
Sewa Kantor dan Gudang	23	26	3	13,0%
Komunikasi	20	23	3	15,0%
Keanggotaan dan Langganan	22	19	(3)	-13,6%
Listrik dan Air	16	18	2	12,5%

TABEL 65_BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Asuransi	15	16	1	6,7%
Biaya Pihak Ketiga	6	11	5	83,3%
Amortisasi Aset Tak Berwujud	9	10	1	11,1%
Legalisir Dokumen dan Fotokopi	3	5	2	66,7%
Beban Administrasi Bank	2	2	-	0,0%
Program CSR	2	2	-	0,0%
Lain-Lain	28	35	7	25,0%
Jumlah	542	705	163	30,1%

Beban Umum dan Administrasi di 2019 bernilai Rp705 miliar, 30,1% lebih tinggi dibandingkan Rp542 miliar yang tercatat di 2018. Komponen terbesar di 2019 adalah Honorarium Tenaga Ahli, yang meningkat dari Rp41 miliar di 2018 menjadi Rp125 miliar di 2019. Honorarium Tenaga Ahli terutama terdiri dari biaya konsultan manajemen sepanjang tahun untuk membantu Perusahaan melakukan sejumlah perbaikan strategis dan operasional, serta biaya terkait konsultan hukum yang dibayarkan di tahun tersebut. Peningkatan substansial lainnya berasal dari Beban Penerimaan Angsuran, yang sejalan dengan strategi penagihan yang lebih intensif oleh Perusahaan sepanjang tahun. Beban ini terkait, antara lain, dengan biaya pengambilalihan aset.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai adalah nilai yang disisihkan berdasarkan evaluasi atas nilai Piutang Pembiayaan Perusahaan, baik secara individual maupun secara kolektif, yang dihitung secara bulanan untuk memastikan kecukupan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai dalam Piutang yang dinyatakan dalam Laporan Posisi Keuangan, yang merepresentasikan nilai wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (IFRS 39/PSAK 55).

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai pada akhir 2019 bernilai Rp426 miliar, 16,3% lebih rendah dibandingkan Rp509 miliar di 2018. Hal ini sejalan dengan perbaikan kualitas aset secara keseluruhan, yang mencakup perbaikan NPF dari 1,21% menjadi 0,85%.

TABEL 66_PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai - Piutang Pembiayaan	509	426	(83)	-16,3%
Jumlah	509	426	(83)	-16,3%

Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain terdiri dari beban-beban yang sifatnya tidak rutin atau langsung mendukung kegiatan operasional dan pertumbuhan bisnis Perusahaan.

Beban Lain-Lain di 2019 bernilai Rp793 miliar, sementara di 2018 nilainya mencapai Rp16 miliar. Peningkatan signifikan ini disebabkan oleh adanya pembayaran Biaya Terkait Penyelesaian Litigasi senilai Rp774 miliar yang dibebankan secara keseluruhan, berkaitan dengan penandatanganan Kesepakatan Perdamaian dengan PT Aryaputra Teguharta pada 20 November 2019, dan dirinci pada halaman 273, di dalam bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan dalam Catatan 37, halaman 90 dari Catatan atas Laporan Keuangan.

TABEL 67_BEBAN LAIN-LAIN

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Biaya Terkait Penyelesaian Litigasi	-	774	774	n/a
Penghapusan Piutang dalam Proses Penyelesaian	14	23	9	64,3%
Penyisihan (Pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai atas Piutang dalam Proses Penyelesaian	2	(4)	(6)	-300,0%
Jumlah	16	793	777	4.856,3%

Laba Tahun Berjalan

TABEL 68_LABA TAHUN BERJALAN

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Laba Sebelum Pajak	1.840	1.092	(748)	-40,7%
Beban Pajak Penghasilan	372	380	8	2,2%
Laba Tahun Berjalan	1.468	712	(756)	-51,5%
Rasio Beban Pajak Penghasilan	20,2%	34,8%	n/a	14,6%

Laba Sebelum Pajak berasal dari Jumlah Pendapatan, yang meningkat sebesar Rp223 miliar dari tahun sebelumnya, dikurangi oleh Jumlah Beban, yang meningkat sebesar Rp971 miliar dalam periode yang sama. Oleh karena itu, Laba Sebelum Pajak yang dicatat Perusahaan di 2019 lebih rendah Rp748 miliar atau 40,7% dibandingkan dengan 2018, dari Rp1.840 miliar menjadi Rp1.092 miliar di 2019.

Oleh karena itu, Laba Tahun Berjalan, yang diperoleh dengan mengurangi Laba Sebelum Pajak dengan Beban Pajak Penghasilan, menurun 51,5%, dari Rp1.468 miliar di 2018 menjadi Rp712 miliar di 2019.

Beban Pajak Penghasilan meningkat 2,2% kendati terdapat penurunan yang besar dalam Laba Sebelum Pajak, karena Biaya Terkait Penyelesaian Litigasi bersifat tidak mengurangkan pajak (*non-tax deductible*).

Perusahaan saat ini menerapkan tarif pajak penghasilan 20% yang berlaku untuk perusahaan publik, yang seluruh kriterianya telah dipenuhi oleh Perusahaan, sebagai berikut:

- Setidaknya 40% dari saham yang diterbitkan dimiliki oleh publik;
- Publik harus terdiri dari minimum 300 individu, masing-masing memegang kurang dari 5% dari saham yang diterbitkan; dan
- Kedua syarat ini harus dipenuhi setidaknya selama enam bulan (183 hari) dalam satu tahun pajak.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Selisih antara laba bersih dan laba komprehensif disebabkan oleh standar akuntansi yang mengharuskan Perusahaan untuk melakukan perhitungan pada program imbalan pascakerja, di mana kerugian disajikan dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain sebagai bagian yang tidak diklasifikasikan ke dalam laporan laba rugi.

Selain itu, perbedaan tersebut juga berasal dari instrumen derivatif untuk tujuan manajemen risiko yang digunakan untuk lindung nilai atas risiko mata uang dan risiko tingkat bunga dari transaksi pinjaman dalam mata uang asing. Selisih tersebut merupakan bentuk penyesuaian sementara dan akan kembali normal ketika kontrak lindung nilai (*swap*) mencapai tenggat waktu.

TABEL 69_PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Laba Tahun Berjalan	1.468	712	(756)	-51,5%
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak	71	(102)	(173)	-243,7%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	1.539	610	(929)	-60,4%

Akibat Laba Tahun Berjalan yang lebih rendah, dan Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan – Setelah Pajak yang bernilai negatif di 2019, maka Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang dibukukan Perusahaan menurun 60,4% menjadi Rp610 miliar.

Laba per Saham Dasar

TABEL 70_LABA PER SAHAM DASAR

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Laba Tahun Berjalan	1.468	712	(756)	-51,5%
Laba per Saham Dasar (nilai penuh)	98	48	(50)	-51,0%

Laba per Saham Dasar di 2019 bernilai Rp48 per saham, 51,0% lebih rendah dibandingkan dengan Rp98 per saham di 2018.

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Laporan Arus Kas BFI Finance diklasifikasikan ke dalam Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan, sebagaimana dirinci di bawah ini:

TABEL 71_LAPORAN ARUS KAS

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	225	755	530	235,6%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(367)	1.200	1.567	-427,0%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(158)	(89)	69	-43,7%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	1.055	(1.206)	(2.261)	-214,3%
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	530	(95)	(625)	-117,9%
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	755	660	(95)	-12,6%

Kas dan Setara Kas yang dicatat oleh BFI Finance per 31 Desember 2019 berjumlah Rp660 miliar, menurun sebesar Rp95 miliar dari Rp755 miliar yang dicatat per 31 Desember 2018. Pergerakan Kas dan Setara Kas dijelaskan berikut ini.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari/untuk Aktivitas Operasi menjelaskan pergerakan kas untuk mendanai kegiatan bisnis Perusahaan, terutama untuk penyaluran pembiayaan baru. Di 2019, arus kas masuk dari aktivitas operasi mencapai Rp1.200 miliar, sementara di 2018 terdapat arus kas keluar untuk aktivitas operasi sebesar Rp367 miliar. Hal ini disebabkan oleh pembayaran dari konsumen yang nilainya lebih besar dibandingkan jumlah penyaluran pembiayaan baru.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari/untuk Aktivitas Investasi berasal dari keuntungan dan kerugian terkait aktivitas investasi Perusahaan, serta pembelanjaan modal. Arus kas keluar untuk aktivitas investasi di 2019 menurun 43,7%, dari Rp158 miliar di 2018 menjadi Rp89 miliar, akibat jumlah pembelian aset tetap dan aset tidak berwujud yang lebih rendah di 2019 dibandingkan dengan di 2018.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari/untuk Aktivitas Pendanaan menyajikan jumlah kas terkait transaksi pendanaan, termasuk pendanaan baru, pelunasan utang dari pendanaan, dan pembayaran bunga atas sumber-sumber dana. Arus kas keluar untuk aktivitas pendanaan di 2019 mencapai Rp1.206 miliar, dibandingkan dengan arus kas masuk dari aktivitas pendanaan di 2018 sejumlah Rp1.055 miliar. Hal ini disebabkan oleh adanya pelunasan dari beberapa surat utang yang jatuh tempo di 2019.

Profitabilitas

Imbal Hasil Rata-Rata atas Aset (ROAA) dan Imbal Hasil Rata-Rata atas Ekuitas (ROAE)

BFI Finance mencatat ROAA sebesar 5,7% di 2019, yang tetap lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri sebesar 4,8%. Akan tetapi, nilai ini lebih rendah dibandingkan ROAA di 2018 sebesar 10,3%, akibat dari menurunnya profitabilitas, sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan Laba Tahun Berjalan pada halaman 172.

Sejalan dengan itu, ROAE di 2019 juga menurun, dari 26,4% di 2018 menjadi 11,6% di 2019.

TABEL 72_ROAA DAN ROAE

Rasio	2018	2019	Rata-Rata Industri*
ROAA	10,3%	5,7%	4,8%
ROAE	26,4%	11,6%	14,3%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Pendapatan	29,2%	13,6%	15,8%

* Sumber: Data Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK

Kemampuan Membayar Utang

Untuk menentukan kemampuannya dalam membayar Utang, Perusahaan melakukan pengukuran sebagai berikut:

- Rasio Solvabilitas Aset untuk mengukur jumlah aset yang dibiayai menggunakan kewajiban;
- Rasio Solvabilitas Ekuitas untuk mengukur rasio kewajiban terhadap modal sendiri (Ekuitas); dan
- Rasio *Gearing* untuk mengukur rasio utang terhadap modal sendiri (Ekuitas).

Kemampuan Membayar Utang Perusahaan dijelaskan berikut ini:

TABEL 73_RASIO KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Rasio	2018	2019
Solvabilitas		
Rasio Liabilitas terhadap Aset	0,7 x	0,7 x
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	2,1 x	2,1 x
Rasio <i>Gearing</i>	1,9 x	1,9 x

Tingkat Kolektibilitas Piutang (Kualitas Aset)

Perusahaan mengklasifikasikan Kolektibilitas Piutang berdasarkan jumlah hari jatuh tempo. Sepanjang 2019, Perusahaan berhasil mempertahankan Rasio Kolektibilitasnya, sebagaimana ditunjukkan oleh rasio NPF yang lebih rendah dibandingkan dengan NPF industri pembiayaan, karena standar penjaminan di Perusahaan telah diterapkan secara ketat dengan meminimalkan kegiatan pembiayaan di sektor-sektor berisiko tinggi. Sepanjang 2019, Perusahaan melakukan koordinasi secara erat dengan tim penagihan, untuk memperkuat langkah-langkah pengendalian kredit, dan menerapkan metode manajemen risiko yang lebih kokoh untuk memperkuat proses pengambilan keputusan.

Rasio NPF Perusahaan pada akhir 2019, yang dihitung dari rasio piutang tertunggak lebih dari 90 hari, adalah 0,85%. Nilai ini berada jauh di bawah NPF rata-rata industri sebesar 2,40%.

TABEL 74_TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG (KUALITAS ASET)

Keterangan (Rp miliar)	Hari Tunggakan	Jumlah Piutang		Persentase	
		2018	2019	2018	2019
1 - Lancar	0 - 10 hari*	16.156	16.498	88,08%	89,14%
2a - Dalam Perhatian Khusus	11 - 60 hari*	1.847	1.744	10,07%	9,42%
2b - Dalam Perhatian Khusus	61 - 90 hari	118	108	0,64%	0,59%
3a - Kurang Lancar	91 -120 hari	81	54	0,44%	0,29%
3b - Kurang Lancar	121 - 150 hari	51	38	0,27%	0,21%
4 - Diragukan	151 - 180 hari	45	34	0,25%	0,18%
5 - Macet	> 180 hari	45	32	0,25%	0,17%
Jumlah		18.343	18.509	100,00%	100,00%
Non-NPF	0-90 hari	18.121	18.351	98,79%	99,15%
NPF	> 90 hari	222	158	1,21%	0,85%

* Berdasarkan POJK 35, yang diimplementasikan pada 2019, di mana terdapat perubahan klasifikasi Lancar dari 0-30 hari menjadi 0-10 hari, dan Dalam Perhatian Khusus dari 31-60 hari menjadi 11-60 hari

Rasio Keuangan yang Relevan Lainnya

Perusahaan secara konsisten memantau kepatuhannya terhadap peraturan-peraturan Bank Indonesia dan OJK yang berlaku, termasuk peraturan mengenai Rasio Keuangan.

Tabel 75 menyajikan perbandingan kinerja Rasio Keuangan yang Relevan Lainnya di Perusahaan dengan kinerja rata-rata industri keuangan di 2019. Berdasarkan kriteria ini, operasi bisnis Perusahaan di 2019 adalah lebih sehat dibandingkan rata-rata industri.

TABEL 75_RASIO KEUANGAN YANG RELEVAN LAINNYA

Rasio	2018	2019	Rata-rata Industri*
<i>Financing-to-Assets Ratio</i> (FAR)	90,4%	91,4%	87,3%
Rasio Modal Sendiri-Modal Disetor (MSMD)	1.554,1%	1.523,2%	271,1%
Rasio Beban Operasional-Pendapatan Operasional (BOPO)	64,6%	67,1%	78,9%

* Sumber: Data Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK

TABEL 76_PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI

Keterangan	Target	Realisasi	Penjelasan atas Pencapaian Budget
Pertumbuhan Penyaluran Pembiayaan Baru	5%	-2,9%	Tidak mencapai target anggaran, sebagaimana dijelaskan di bagian Tinjauan Bisnis
Pertumbuhan Piutang Bersih	5%	0,9%	Tidak mencapai target anggaran, sebagaimana dijelaskan di bagian Tinjauan Kinerja Keuangan
Pertumbuhan Aset	5%	-0,1%	Tidak mencapai target anggaran, sebagaimana dijelaskan di bagian Tinjauan Kinerja Keuangan
Pertumbuhan Pendapatan	5%	4,4%	Hampir mencapai target anggaran, sebagaimana dijelaskan di bagian Tinjauan Kinerja Keuangan
Laba Bersih	Sama atau di Atas Laba Bersih 2018	-51,5%	Tidak mencapai target anggaran, sebagaimana dijelaskan di bagian Tinjauan Kinerja Keuangan
NPF	≤ 1,5%	0,85%	Lebih baik dari target anggaran, sebagaimana dijelaskan di bagian Tingkat Kolektibilitas Piutang
Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas (<i>Gearing Ratio</i>)	< 2,5x	1,9 x	Lebih baik dari target anggaran, sebagaimana dijelaskan di bagian Struktur Modal
Rasio Pembagian Dividen (<i>Dividend Payout Ratio</i>)	Up to 50%	*	Sama dengan target anggaran, sebagaimana dijelaskan di bagian Dividen

* Menunggu keputusan RUPS 2020

Sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya dari bab ini, dinamika perekonomian global sepanjang 2019, yang menyebabkan pelemahan aktivitas perdagangan dan konsumsi global, memperburuk situasi harga-harga komoditas yang sebelumnya sudah cukup rendah dan menurunkan daya beli di Indonesia. Selain itu, sentimen politik menjelang pemilihan umum nasional di 2019 juga berpengaruh terhadap kinerja bisnis Perusahaan secara umum.

Namun, Perusahaan tetap mampu mempertahankan dan mencapai sasarannya dalam hal NPF dan Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas untuk 2019. Hal ini tercapai berkat pengelolaan kualitas proses penjaminan yang terus dikelola dengan baik, selain juga berkat efektivitas penagihan dan strategi bisnis Perusahaan untuk membidik produk-produk berimbang hasil lebih tinggi agar dapat menghadirkan kinerja keuangan yang lebih baik.

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Anggaran Dasar Perusahaan menetapkan bahwa Modal Dasar Perusahaan adalah Rp500 miliar, yang terdiri dari 20 miliar lembar saham dengan nilai nominal Rp25 per saham. Dari Modal Dasar tersebut, 15.967.115.620 saham telah diterbitkan dan disetor penuh. Selanjutnya, 1.002.732.000 saham telah dibeli kembali oleh Perusahaan per 31 Desember 2019.

Untuk pengelolaan modalnya, Perusahaan mengacu pada POJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan—yang selanjutnya diperbarui dengan POJK No. 35/POJK.05/2018—yang mensyaratkan:

- Modal minimum Rp100 miliar;
- Ekuitas minimum 50% dari jumlah Modal Disetor; dan
- *Gearing Ratio*, yaitu rasio jumlah pembiayaan terhadap ekuitas dikurangi obligasi subordinasi dengan investasi, sebesar maksimum 10 kali, baik untuk pembiayaan domestik maupun internasional.

Sesuai dengan peraturan tersebut, Perusahaan melaporkan sebagai berikut:

TABEL 77_STRUKTUR MODAL

Keterangan (Rp miliar)	Ketentuan POJK	Realisasi Perusahaan	
		2018	2019
Ekuitas	Minimal Rp100 miliar	6.204	6.080
Rasio Jumlah Ekuitas terhadap Modal Disetor	Minimal 50%	1.554%	1.523%
Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas	Maksimal 10 x	1,9 x	1,9 x

Komitmen Material

Sepanjang 2019, Perusahaan tidak membuat komitmen material apapun selain yang telah dibahas pada bagian-bagian sebelumnya.

Belanja Modal Perusahaan di 2019 secara umum berupa investasi dalam Peralatan Kantor dan Tanah (berupa uang muka untuk Pembebasan Lahan). Sumber-sumber pendanaan untuk Belanja Modal ini terutama berasal dari dana Perusahaan sendiri.

Di 2019, Jumlah Belanja Modal mencapai Rp112 miliar, atau 0,6% dari Jumlah Aset, di mana Rp97 miliar dari nilai tersebut telah selesai, dan Rp15 miliar masih dalam penyelesaian.

TABEL 78_NILAI INVESTASI BARANG MODAL

Jenis Investasi Barang Modal	Nilai Investasi Barang Modal		
	Selesai	Dalam Penyelesaian	Jumlah
Tanah	3	-	3
Bangunan dan Prasarana	4	8	12
Peralatan Kantor	31	7	38
Kendaraan	58	-	58
Perabot dan Perlengkapan Kantor	1	-	1
Jumlah	97	15	112

Tidak terdapat peristiwa yang signifikan dalam periode antara tanggal penerbitan Laporan Keuangan Tahunan dengan tanggal penerbitan Laporan Tahunan Terintegrasi ini.

Kebijakan Dividen Perusahaan dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

- Seluruh saham yang telah diterbitkan dan disetor penuh mempunyai hak yang sama, termasuk hak atas Dividen, kecuali saham yang dibeli kembali (Saham Treasury); dan
- Pembagian Dividen dapat dilakukan sekaligus maupun lebih dari satu kali melalui Dividen Interim.

Perusahaan melakukan pembagian Dividen atas Laba Bersih 2018 dan 2019 sebagai berikut:

TABEL 79_KEBIJAKAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

Keterangan (Rp miliar)	2018	2019
Laba Bersih Tahun Berjalan	1.468	712
Dividen Tunai	733	*
% Dividen Tunai terhadap Laba Bersih Tahun Sebelumnya	49,9%	*

* Menunggu keputusan RUPS 2020

Di 2019, Perusahaan melakukan Penawaran Umum Obligasi berdenominasi Rupiah, yaitu Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019 Seri A dan Seri B pada 25 Februari 2019, dengan jumlah nominal Rp1 triliun.

Untuk memenuhi persyaratan POJK No.30/POJK.04/2015 tentang kewajiban menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perusahaan menyampaikan informasi terkait penggunaan dana dari penawaran umum tersebut. Sebagaimana diungkapkan dalam prospektus dan informasi tambahan yang diterbitkan terkait penawaran umum, dana tersebut telah digunakan untuk kebutuhan modal kerja.

Semua dana hasil penawaran umum telah digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis utama Perusahaan, dan dengan demikian sisa dana yang belum digunakan adalah nihil. Tidak ada perubahan dalam penggunaan dana dari penawaran umum tersebut, dan seluruhnya telah dilaporkan ke pihak otoritas.

INVESTASI, DIVESTASI, MERGER & AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG ATAU MODAL YANG MATERIAL

Perusahaan tidak melakukan Investasi, Divestasi, Merger & Akuisisi, maupun Restrukturisasi Utang atau Modal yang bersifat material apapun di 2019, selain dari penambahan investasi senilai Rp15 miliar yang dilakukan terhadap entitas anaknya, PT FIT.

TRANSAKSI DENGAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN DAN PIHAK BERELASI

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, Perusahaan dan anak perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tertentu, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Pihak Terkait	Sifat Hubungan	Transaksi
Karyawan	Personel manajemen kunci	<ul style="list-style-type: none"> • Imbalan karyawan jangka pendek • Imbalan pascakerja

Transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa di atas terdiri dari Gaji dan Tunjangan karyawan, sejumlah Rp67 miliar di 2019, yang merupakan 1,6% dari Jumlah Beban di tahun tersebut. Di 2018, jumlahnya mencapai Rp65 miliar (2,1%).

Transaksi-transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi ini, kecuali Beban Gaji dan Imbalan Kerja yang dibayarkan kepada personel manajemen kunci, dilakukan dengan persyaratan operasi bisnis normal.

Sepanjang 2019, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan sepuluh peraturan baru yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional perusahaan pembiayaan, yakni sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang;
6. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan dan Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
7. POJK No. 26/POJK.01/2019 tentang Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan;
8. POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
9. POJK No. 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan; dan
10. POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Perubahan peraturan tersebut berpengaruh terhadap kegiatan usaha dan operasional Perusahaan, dalam hal peningkatan pelayanan pembiayaan kepada konsumen, serta dapat menimbulkan dampak timbal baliknya terhadap operasional dan kinerja Perusahaan untuk jangka panjang. Perusahaan meyakini bahwa perubahan tersebut merupakan suatu tindakan tepat dalam menciptakan iklim usaha yang sehat.

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Terdapat beberapa PSAK dan ISAK yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019, yakni:

- Penyesuaian PSAK 22 “Kombinasi Bisnis”;
- Amandemen PSAK 24 “Imbalan Kerja”;
- Penyesuaian PSAK 26, “Biaya Pinjaman”;
- Penyesuaian PSAK 46 “Pajak Penghasilan – Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi”; dan
- Penyesuaian PSAK 66 “Pengaturan Bersama”.

Penerapan atas penyesuaian dan amandemen di atas tidak menyebabkan perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan, dan dengan demikian tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap nilai apapun yang dilaporkan pada periode tahun fiskal berjalan ataupun tahun-tahun sebelumnya.

Tabel berikut menampilkan analisis dampak dari standar-standar akuntansi yang relevan terhadap bisnis Perusahaan:

TABEL 80_PERUBAHAN PSAK YANG BERDAMPAK TERHADAP PERUSAHAAN

Standar Akuntansi	Ringkasan Perubahan	Alasan Perubahan	Dampak terhadap Perusahaan
PSAK 22 (Penyesuaian 2018), “Kombinasi Bisnis”	Amandemen ini menjelaskan ketika salah satu pihak memperoleh pengendalian atas bisnis yang merupakan suatu operasi bersama, dan memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas terkait dengan operasi bersama tersebut sesaat sebelum tanggal akuisisi, adalah kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, pihak pengakuisisi mengukur kembali seluruh kepentingan yang dimiliki sebelumnya dalam operasi bersama tersebut.	Meningkatkan relevansi, keandalan, daya banding informasi mengenai kombinasi bisnis dan dampaknya.	Belum berdampak terhadap Perusahaan dan entitas anaknya.
PSAK 24 (Amandemen 2018), “Imbalan Kerja tentang Amandemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program”	Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk menggunakan asumsi yang diperbarui untuk menentukan biaya jasa kini dan bunga bersih untuk sisa periode setelah amandemen rencana, kurtailmen, atau penyelesaian.	Untuk melaporkan perubahan kewajiban imbalan pasti dan aset program didefinisikan dengan cara yang lebih mudah dipahami.	Perubahan yang terjadi sudah tercermin dalam perhitungan aktuarial untuk liabilitas imbalan pascakerja (Catatan 17).

TABEL 80_PERUBAHAN PSAK YANG BERDAMPAK TERHADAP PERUSAHAAN

Standar Akuntansi	Ringkasan Perubahan	Alasan Perubahan	Dampak terhadap Perusahaan
PSAK 26 (Penyesuaian 2018), "Biaya Pinjaman"	Amandemen ini mengklarifikasi tentang pengecualian atas tarif kapitalisasi biaya pinjaman. Pinjaman yang didapatkan secara spesifik untuk memperoleh aset kualifikasian sampai secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual telah selesai dapat dikapitalisasi seluruhnya. Namun jika pinjaman khusus belum dilunasi setelah aset kualifikasian siap untuk digunakan atau dijual, hal itu menjadi bagian dari pinjaman umum.	Entitas harus mengkapitalisasi biaya pinjaman pada aset kualifikasian sebagai bagian dari biaya perolehan.	Belum berdampak terhadap Perusahaan dan entitas anaknya.
PSAK 46 (Penyesuaian 2018), "Pajak Penghasilan – Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi"	Penyesuaian atas persyaratan bahwa pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan mengklarifikasi bahwa estimasi kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset yang melebihi jumlah tercatatnya jika terdapat bukti yang memadai bahwa kemungkinan besar entitas akan mencapai hal tersebut.	Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan apabila besar kemungkinan laba kena pajak masa depan akan memadai untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.	Belum berdampak terhadap Perusahaan dan entitas anaknya.
PSAK 66 (Penyesuaian 2018), "Pengaturan Bersama"	Amandemen tersebut mengklarifikasi bahwa pihak yang berpartisipasi dalam, tetapi tidak memiliki pengendalian bersama atas suatu operasi bersama dapat memperoleh pengendalian bersama atas operasi bersama, dalam hal aktivitas operasi bersama yang merupakan suatu bisnis, tidak boleh mengukur kembali kepentingan yang sebelumnya dimiliki dalam operasi bersama.	Untuk menetapkan prinsip-prinsip pelaporan keuangan entitas yang memiliki kepentingan dalam pengaturan yang dikendalikan bersama (yaitu pengaturan bersama).	Belum berdampak terhadap Perusahaan dan entitas anaknya.

Setelah mengalami masa yang sulit di 2019, industri multifinance diharapkan akan mengalami sedikit pemulihan di 2020. Perusahaan-perusahaan multifinance kini dituntut untuk secara bijak memperbaiki kualitas aset mereka dan memperkuat tingkat kesehatan bisnis mereka, seiring mereka menghadapi persaingan dari sejumlah penyedia pembiayaan baru yang non-konvensional, misalnya platform *peer-to-peer lending*.

Pertumbuhan GDP Indonesia, yang ditargetkan berada di atas 5% oleh pemerintah, akan menjadi faktor penggerak bagi industri multifinance, khususnya dari sektor belanja rumah tangga. Momentum pembangunan infrastruktur dari pemerintah juga akan membantu pertumbuhan bisnis pembiayaan alat berat. Akan tetapi, mengingat harga-harga komoditas diperkirakan masih tertekan di pasar global, pertumbuhan segmen ini masih akan sangat terbatas.

Di tengah berbagai kondisi ini, dan dengan adanya tuntutan untuk beradaptasi terhadap perkembangan terkini di pasar, BFI Finance berencana untuk menerapkan suatu model operasional baru di 2020, dalam rangka menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, Perusahaan berupaya mencapai sasaran-sasaran pertumbuhan yang dinyatakan dalam Tabel 81 di bawah ini, sementara menjaga kualitas asetnya dan terus meningkatkan nilai pemegang saham.

TABEL 81_TARGET USAHA 2020

Keterangan	Target
Pertumbuhan Penyaluran Pembiayaan Baru	Sekitar 5% di atas realisasi 2019
Pertumbuhan Piutang Bersih	Sekitar 5% di atas realisasi 2019
Pertumbuhan Aset	Sekitar 5% di atas realisasi 2019
Pertumbuhan Pendapatan	Sekitar 7-10% di atas realisasi 2019
Laba Bersih	Lebih dari 75% di atas Laba Bersih 2019
NPF	< 1,5%
Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas (<i>Gearing Ratio</i>)	< 2,5 x
Rasio Pembagian Dividen (<i>Dividend Payout Ratio</i>)	Sampai dengan 50%

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Laporan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	188
Rapat Umum Pemegang Saham	199
Dewan Komisaris	210
Direksi	222
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi	232
Rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi	233
Dewan Pengawas Syariah	239
Komite Audit	243
Komite Manajemen Risiko	249
Komite Nominasi dan Remunerasi	252
Sekretaris Perusahaan	257
Audit Internal	260
Audit Eksternal	264
Sistem Pengendalian Internal	266
Manajemen Risiko	268
Kasus Hukum 2019	273
Sanksi Administratif	281
Akses Informasi dan Komunikasi	282
Hubungan Investor	286
Kepatuhan	287
Kode Etik dan Budaya Perusahaan	288
Kebijakan Antikorupsi	291
Kebijakan Pengadaan	292
Sistem Pelaporan Pelanggaran	295
Aksi Korporasi	296
Opsi Saham	296
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya	297
Pernyataan Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka	298





“BFI Finance menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan usahanya dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.”



Penerapan GCG merupakan pedoman dan bentuk tanggung jawab dari manajemen dan karyawan Perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan, untuk memelihara keberlanjutan Perusahaan dalam jangka panjang.

Dasar Hukum

BFI Finance berkomitmen untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya secara sehat dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan industri jasa keuangan. Praktik GCG Perusahaan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

TABEL 82_DASAR HUKUM IMPLEMENTASI GCG

No.	Dasar Hukum	Judul
1.	Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku, antara lain:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2.	Peraturan Presiden Republik Indonesia, antara lain:	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, antara lain:	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan

TABEL 82_DASAR HUKUM IMPLEMENTASI GCG

No. Dasar Hukum	Judul
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan 2. Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia 3. Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 4. Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
5. Peraturan OJK, antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan 2. Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan 3. Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 4. Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan 5. Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan 6. Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan 7. Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 8. Peraturan OJK No. 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 9. Peraturan OJK No. 17/SEOJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan 10. Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan 11. Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan 12. Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka 13. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik 14. Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik 15. Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik 16. Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk 17. Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 18. Peraturan OJK No. 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 19. Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2015 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan 20. Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik 21. Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

TABEL 82_DASAR HUKUM IMPLEMENTASI GCG

No. Dasar Hukum	Judul
22.	Peraturan OJK No. 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan
23.	Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
24.	Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
25.	Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
26.	Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
27.	Peraturan OJK No. 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan
28.	Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
29.	Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
30.	Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
31.	Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
32.	Peraturan OJK No. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat
33.	Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
34.	Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk
35.	Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
36.	Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang
37.	Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
38.	Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
39.	Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
40.	Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
41.	Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
42.	Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka
43.	Peraturan OJK No. 51/POJK.04/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
44.	Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik
45.	Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
46.	Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

TABEL 82_DASAR HUKUM IMPLEMENTASI GCG

No. Dasar Hukum	Judul
	47. Peraturan OJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
	48. Peraturan OJK No. 22/POJK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh OJK
	49. Peraturan OJK No. 26/POJK.02/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan
	50. Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
	51. Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
	52. Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal
	53. Peraturan OJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
	54. Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan
	55. Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
	56. Peraturan OJK No. 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
	57. Peraturan OJK No. 26/POJK.01/2019 tentang Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan
	58. Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2019 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan
6. Surat Edaran OJK, antara lain:	1. Surat Edaran OJK No. 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau Masyarakat 2. Surat Edaran OJK No. 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan 3. Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.02/2014 tentang Mekanisme Pembayaran Pungutan OJK 4. Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.04/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Secara Elektronik oleh Emiten atau Perusahaan Publik 5. Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan 6. Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen 7. Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Pembiayaan 8. Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan 9. Surat Edaran OJK No. 17/SEOJK.05/2015 tentang Penunjukan Akuntan Publik, Aktuaris, dan/atau Penilai Independen sebagai Pemeriksa Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 10. Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka 11. Surat Edaran OJK No. 1/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan 12. Surat Edaran OJK No. 2/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah 13. Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan 14. Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Pembiayaan

TABEL 82_DASAR HUKUM IMPLEMENTASI GCG

No. Dasar Hukum	Judul
	15. Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
	16. Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan
	17. Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
	18. Surat Edaran OJK No. 31/SEOJK.05/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
	19. Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017
	20. Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan
	21. Surat Edaran OJK No. 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan
	22. Surat Edaran OJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
	23. Surat Edaran OJK No. 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank
	24. Surat Edaran OJK No. 38/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Pemblokiran secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
	25. Surat Edaran OJK No. 50/SEOJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
	26. Surat Edaran OJK No. 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
	27. Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.05/2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
	28. Surat Edaran OJK No. 23/SEOJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah
	29. Surat Edaran OJK No. 26/SEOJK.05/2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan
	30. Surat Edaran OJK No. 27/SEOJK.05/2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Pembiayaan
7. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK; sekarang OJK) dan Keputusan Ketua Bapepam-LK, antara lain:	1. Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-179/BL/2008 Tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik 2. Peraturan Bapepam-LK No. X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-346/BL/2011 Tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik 3. Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-347/BL/2012 Tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik
8. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia, antara lain:	Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 perihal Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat

Selain peraturan yang terdaftar pada tabel di atas, Perusahaan juga mengacu pada beberapa pedoman GCG, antara lain:

- Pedoman Umum GCG Indonesia yang diterbitkan pertama kali oleh KNKG pada 1999 dan telah beberapa kali mengalami revisi digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan pengelolaan dan penerapan GCG;
- *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan OJK; dan
- Anggaran dasar Perusahaan.

Prinsip Utama

BFI Finance menerapkan prinsip-prinsip GCG berikut dalam kegiatan usahanya pada seluruh jenjang organisasi:

TABEL 83_DASAR HUKUM IMPLEMENTASI GCG

No.	Prinsip GCG	Implementasi
1.	<p>Keterbukaan (<i>Transparency</i>)</p> <p>Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat</p>	<p>BFI Finance mengelola usahanya secara transparan bagi seluruh pemangku kepentingan. Prinsip transparansi diwujudkan dengan memberikan informasi kepada pemegang saham dengan jujur, dan diwujudkan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan penerbitan Laporan Tahunan Terintegrasi; • Penyusunan dan penjelasan program kerja Perusahaan; • Laporan keuangan berkala yang meliputi laporan keuangan triwulan dan tahunan; • Penyediaan laporan keterbukaan informasi terkait kegiatan usaha Perusahaan; dan • Pemanfaatan situs web untuk menyampaikan informasi Perusahaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
2.	<p>Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)</p> <p>Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien</p>	<p>Terdapat <i>job description</i> yang jelas bagi semua karyawan, dengan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Seluruh organ Perusahaan memiliki kejelasan hak dan kewajiban, fungsi dan tanggung jawab, serta kewenangannya dalam setiap kebijakan Perusahaan. Prinsip ini diterapkan dalam pembagian tugas di antara organ-organ Perusahaan, termasuk dengan merinci tugas dan wewenang RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, serta indikator kinerjanya.</p>
3.	<p>Pertanggungjawaban (<i>Responsibility</i>)</p> <p>Kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat</p>	<p>BFI Finance berkomitmen untuk melaksanakan CSR sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan usahanya. Prinsip pertanggungjawaban diterapkan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan terhadap ketentuan anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu; • Pelaksanaan program dan kegiatan CSR; dan • Pelaksanaan kewajiban keterbukaan informasi sesuai peraturan.

TABEL 83_DASAR HUKUM IMPLEMENTASI GCG

No.	Prinsip GCG	Implementasi
4.	<p>Kemandirian (<i>Independence</i>) Keadaan Perusahaan yang dikelola secara profesional dan bebas dari benturan kepentingan serta pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat</p>	<p>BFI Finance memandang independensi dalam pengelolaan usaha mutlak diperlukan dalam proses pengambilan keputusan, dengan mempertimbangkan peraturan dari otoritas terkait secara penuh tanpa intervensi pihak luar. Dengan penerapan prinsip independensi, BFI Finance merangkul seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencapai kesejahteraan. Penerapan prinsip independensi memperkuat profesionalisme, kreativitas, dan kemandirian dalam pengelolaan bisnis. Penerapan prinsip ini diterapkan antara lain dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab di antara organ-organ Perusahaan; • Pemegang saham dan Dewan Komisaris tidak melakukan intervensi terhadap pengurusan Perusahaan; • Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan senantiasa menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan; dan • Kegiatan Perusahaan yang memiliki benturan kepentingan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen atau wakilnya yang diberi wewenang dalam RUPS sebagaimana diatur, serta mematuhi peraturan tentang benturan kepentingan.
5.	<p>Kesetaraan dan Kewajaran (<i>Fairness</i>) Kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat</p>	<p>BFI Finance bersikap adil serta patuh terhadap seluruh peraturan untuk melindungi pemangku kepentingan. BFI Finance berkomitmen untuk memperlakukan seluruh karyawan secara adil serta bebas dari prasangka yang dapat muncul karena perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja. Prinsip ini diterapkan antara lain dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemegang saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • BFI Finance melaporkan informasi terkait rekanan kepada pemangku kepentingan secara adil dan transparan; dan • BFI Finance menghadirkan kondisi kerja yang baik dan aman bagi seluruh karyawan sesuai dengan kemampuan Perusahaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku; serta adanya penilaian kinerja secara periodik serta kesempatan promosi yang sama bagi seluruh karyawan.

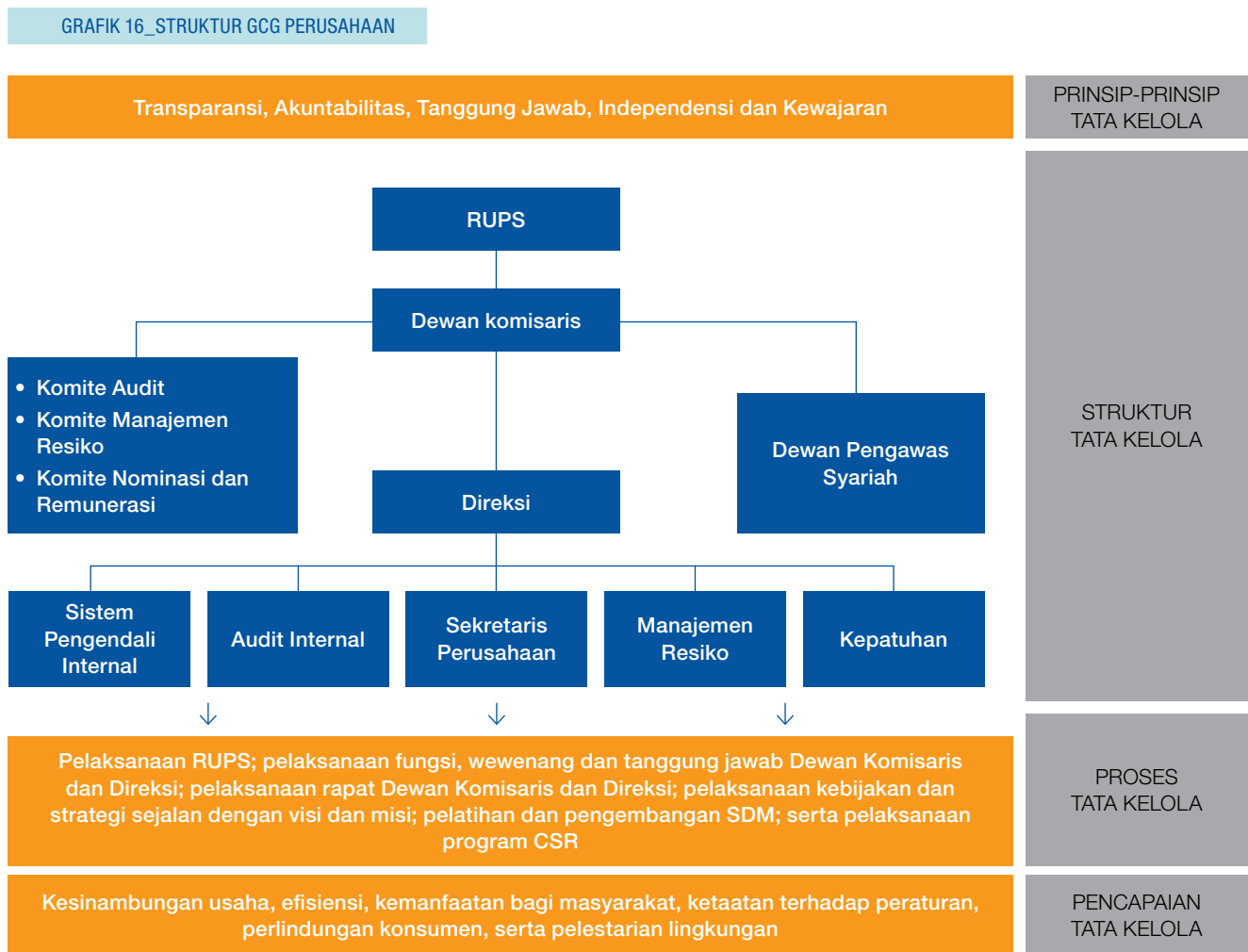
Tujuan GCG

BFI Finance menerapkan prinsip-prinsip GCG antara lain untuk:

1. Mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi para pemangku kepentingan;
2. Meningkatkan pengelolaan Perusahaan secara profesional, efektif dan efisien;
3. Meningkatkan kepatuhan organ Perusahaan serta jajaran di bawahnya pada standar etika yang tinggi, peraturan perundang-undangan, dan kesadaran akan tanggung jawab sosial;
4. Mewujudkan Perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, serta berdaya saing kuat, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan; dan
5. Meningkatkan kontribusi Perusahaan bagi perekonomian nasional.

Struktur dan Mekanisme GCG

Struktur GCG di BFI Finance terdiri dari organ-organ dalam bagan berikut:



Keberadaan struktur organ Perusahaan merupakan salah satu wujud pelaksanaan GCG yang berfungsi memastikan pemetaan fungsi atau kegiatan bisnis yang jelas untuk menghindari potensi benturan kepentingan, serta memastikan bahwa mekanisme *checks and balances* berlangsung efektif dan efisien.

Mekanisme pelaksanaan GCG oleh organ-organ dalam struktur GCG di BFI Finance berlangsung dalam suatu kerangka infrastruktur GCG, yang mencakup kebijakan, prosedur, sistem informasi manajemen, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing organ. Infrastruktur GCG dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan terkini serta *best practices* dalam penerapan GCG. Infrastruktur GCG di BFI Finance terakhir kali disempurnakan melalui SK Direksi No. 24/SK/WK/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Prosedur Perusahaan di Bidang Tata Kelola Perusahaan.

TABEL 84_INFRASTRUKTUR GCG PERUSAHAAN

No.	Infrastruktur GCG	Bentuk
1.	Pedoman Prinsip-Prinsip Berusaha (<i>Code of Business Principles</i>), yang berlaku bagi seluruh kegiatan BFI Finance, baik di kantor pusat maupun kantor cabang, serta bagi setiap karyawannya	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai-Nilai Dasar Perusahaan (GREAT) sebagai pedoman perilaku dan budaya Perusahaan • Tanggung Jawab Perusahaan • Integritas Usaha • Komitmen Kegiatan Operasional • Peraturan Perusahaan 2018-2020
2.	Tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi	Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (<i>Board Manual</i>)
3.	Kelengkapan dan tata cara pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal	<ul style="list-style-type: none"> • Piagam Komite Audit • Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi
4.	Kebijakan dan prosedur penerapan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Prinsip-Prinsip Berusaha (<i>Code of Business Principles</i>) • GREAT yang merupakan Nilai-Nilai Dasar Perusahaan, pedoman untuk panduan perilaku dan budaya yang berlaku bagi seluruh karyawan • Peraturan Perusahaan 2018-2020 • Piagam Audit Internal • Berbagai kebijakan, SK, SOP, dan panduan yang berlaku di Perusahaan
5.	Kebijakan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Keuangan Triwulanan • Laporan Keuangan Tengah Tahunan • Laporan Keuangan Tahunan • Laporan Tahunan Terintegrasi (gabungan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan)

Roadmap GCG

Sebagai perusahaan publik, BFI Finance memenuhi arahan dari OJK terkait pelaksanaan *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia 2014.

Roadmap GCG di Perusahaan dinyatakan secara implisit dan disesuaikan dengan arahan OJK tersebut dalam setiap praktik penerapannya. Beberapa struktur dan mekanisme penting yang telah berjalan dalam penerapan GCG di Perusahaan adalah Pedoman Prinsip-Prinsip Berusaha (*Code of Business Principles*), Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi beserta Komite-Komite, serta prosedur dan kebijakan pendukung lainnya, seperti Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), Kebijakan Manajemen Risiko, dan Kebijakan Kepatuhan.

Sebagai bagian dari *Roadmap* GCG, Perusahaan secara berkelanjutan juga melakukan evaluasi, pengkinian, dan sosialisasi GCG kepada seluruh karyawan.

Fokus Penerapan GCG

Pada 2019, fokus implementasi GCG di Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kepatuhan terhadap berbagai peraturan eksternal dan internal yang relevan. Langkah ini dilakukan di seluruh jenjang organisasi Perusahaan melalui berbagai media komunikasi di Perusahaan, termasuk sosialisasi peraturan baru di Perusahaan ke karyawan melalui fasilitas intranet dan media internal lainnya.
2. Penilaian kualitas *outcome* (hasil implementasi) yang memenuhi harapan pemangku kepentingan. Ini merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang didukung kecukupan struktur dan infrastruktur GCG. *Outcome* ini mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, termasuk:
 - a. Kecukupan transparansi laporan;
 - b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. Penanganan perlindungan pelanggan;
 - d. Independensi audit; dan
 - e. Pencapaian kinerja Perusahaan, baik finansial maupun operasional.

Evaluasi Penerapan GCG

BFI Finance melakukan evaluasi atas penerapan GCG untuk memastikan terjadi peningkatan dalam kualitas penerapannya agar dapat berdampak positif terhadap keberlanjutan proses bisnis Perusahaan.

Pada 2019, BFI Finance melakukan penilaian pencapaian GCG secara internal. Hasilnya menyatakan bahwa Manajemen Perusahaan telah melakukan penerapan GCG dengan baik, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

TABEL 85_EVALUASI PENERAPAN GCG

Aspek	Faktor Positif	Faktor Negatif
A Struktur Tata Kelola		
1. Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris, Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, dan Direksi	Secara umum telah sesuai dengan kompleksitas dan ukuran Perusahaan serta memenuhi peraturan yang berlaku.	Tidak ada
2. Struktur Organisasi	Secara umum, BFI Finance memiliki struktur organisasi yang terdiri atas direktorat, divisi, departemen, dan unit/fungsi kerja, dengan pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas dan dapat mendukung kegiatan bisnis dan operasional, serta penerapan pengendalian internal.	Tidak ada
3. Kebijakan dan Prosedur	BFI Finance telah memiliki kebijakan dan prosedur yang meliputi Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi, Piagam Komite Audit, Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, Piagam Audit Internal, Pedoman Prinsip-Prinsip Berusaha, Peraturan Perusahaan 2018–2020, Komitmen Kegiatan Operasional, Nilai-Nilai Dasar, serta Kebijakan dan Prosedur Teknologi Informasi (TI).	Tidak ada
4. Sistem Informasi	BFI Finance menjalankan <i>Management Information System</i> (MIS) untuk mendukung aktivitas bisnis dan operasional, dan sistem pengendalian internal.	Tidak ada
B Proses Tata Kelola		
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab	Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris telah berlangsung dengan baik.	Tidak ada
2. SDM	BFI Finance telah meningkatkan kualitas dan jumlah SDM dengan mengintensifkan pelatihan-pelatihan serta berfokus pada kecukupan ketersediaan SDM.	Tidak ada
3. Manajemen Risiko	BFI Finance secara berkala melakukan tinjauan atas limit risiko, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, dan penilaian model internal atas pengelolaan risiko.	Tidak ada
4. Pengaduan Pelanggan	BFI Finance mengelola dan menyelesaikan pengaduan pelanggan sesuai ketentuan SLA.	Tidak ada
5. Budaya Disiplin dan Kepatuhan	BFI Finance terus menegakkan budaya disiplin dan kepatuhan di seluruh jenjang organisasi dengan menyusun Pakta Integritas untuk meningkatkan penegakan hukum, menjalankan kebijakan <i>anti-fraud</i> , dan Sistem Pelaporan Pelanggaran, menerapkan GREAT sebagai Nilai-Nilai Dasar Perusahaan, dan memperkuat Sistem Pengendalian Internal.	Tidak ada
6. CSR	BFI Finance telah menjalankan CSR sebagai bagian dari proses bisnis.	Tidak ada

TABEL 85_EVALUASI PENERAPAN GCG

Aspek	Faktor Positif	Faktor Negatif
C Hasil Tata Kelola		
1. Rekomendasi Dewan Komisaris dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris	Rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris terdokumentasi dalam risalah rapat, dan menjadi masukan dan pertimbangan Direksi dalam pengambilan keputusan.	Tidak ada
2. Benturan Kepentingan	Tidak ada indikasi benturan kepentingan yang mengakibatkan kerugian Perusahaan.	Tidak ada
3. Penyampaian Informasi kepada Publik	BFI Finance telah menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik secara transparan, antara lain melalui pelaporan keuangan triwulanan, tengah tahunan, tahunan, Laporan Tahunan Terintegrasi (gabungan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan).	Tidak ada
4. Kinerja Perusahaan	BFI Finance mencatat pertumbuhan dan kinerja positif, tercermin dari pertumbuhan aset dan laba dan juga terkendalinya piutang macet (NPF).	Tidak ada

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RUPS adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.

RUPS merupakan wadah bagi pemegang saham untuk memberikan pengaruh terhadap pengelolaan usaha Perusahaan, serta forum bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kinerja mereka kepada para pemegang saham.

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) yang penyelenggaraannya wajib disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perusahaan.

Wewenang RUPS

RUPS memiliki wewenang, antara lain, untuk:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan kebijakan/pedoman yang ditetapkan oleh pemegang saham;
2. Memberikan pengesahan/keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;
3. Memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;
4. Menetapkan target dan menilai kinerja Direksi dan Dewan Komisaris;
5. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;

6. Menetapkan auditor eksternal;
7. Menyetujui atau menolak rencana kerja dan anggaran Perusahaan serta rencana kerja jangka panjang Perusahaan;
8. Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
9. Melaksanakan GCG sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Hak Pemegang Saham

Pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan mata acara dalam setiap RUPS yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan, mengajukan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perusahaan, terutama untuk tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan di muka dari pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan mempersiapkan pemberitahuan dan pemanggilan untuk pelaksanaan RUPS, termasuk mata acara yang akan dibicarakan dalam RUPS.

Pelaksanaan RUPS di 2019

Selama 2019, BFI Finance melaksanakan 1 kali RUPST dan 1 kali RUPSLB. RUPS Perusahaan telah diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perusahaan.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS 2019

BFI Finance menyelenggarakan RUPS 2019 dengan melaksanakan tata cara penyelenggaraan berdasarkan POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 32), sebagai berikut:

TABEL 86_TATA CARA PENYELENGGARAAN RUPST DAN RUPSLB

No.	Kegiatan	Pelaksanaan RUPST & RUPSLB 28 Mei 2019	Dasar Hukum
1.	Pemberitahuan rencana dan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat lima hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS	Surat BFI Finance kepada OJK No. Corp/Sjn/L/IV/19-0070 tanggal 11 April 2019, dengan tembusan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB), BEI, KSEI, PT Sirca Datapro Perdana, dan CaMEL	Pasal 8 POJK 32
2.	Pemberitahuan kepada Pemegang Saham, minimal di: <ul style="list-style-type: none"> • Satu surat kabar harian Bahasa Indonesia berperedaran nasional; • Situs web BEI; dan • Situs web Perusahaan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling kurang adalah bahasa Inggris, paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Iklan Pemberitahuan Rencana RUPS kepada Pemegang Saham di surat kabar <i>Bisnis Indonesia</i> pada 18 April 2019 • Pemberitahuan Rencana RUPS di situs web BEI pada 18 April 2019 • Pemberitahuan Rencana RUPS di situs web Perusahaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris pada 18 April 2019 	Pasal 10 ayat (1) dan (4) POJK 32

TABEL 86_TATA CARA PENYELENGGARAAN RUPST DAN RUPSLB

No.	Kegiatan	Pelaksanaan RUPST & RUPSLB 28 Mei 2019	Dasar Hukum
3.	Pemberitahuan kepada OJK atas Pengumuman Pemberitahuan kepada Pemegang Saham di surat kabar paling lambat dua hari kerja setelah pengumuman RUPS	Surat BFI Finance kepada OJK, Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, dan BEI No. Corp/SJN/L/IV/19-0074 tanggal 18 April 2019, dengan tembusan kepada IKNB dan CaMEL disertai Bukti Iklan Pemberitahuan kepada Pemegang Saham	Pasal 10 ayat (8) POJK 32
4.	Tanggal terakhir Daftar Pemegang Saham, pukul 16.00 WIB, satu hari sebelum tanggal Panggilan RUPS	Meminta kepada BAE (PT Sirca Datapro Perdana) rekap nama pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS	Pasal 19 ayat (2) POJK 32
5.	Pemanggilan RUPS, minimal di: <ul style="list-style-type: none"> Satu surat kabar harian bahasa Indonesia berperedaran nasional; Situs web BEI; dan Situs web Perusahaan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling kurang adalah bahasa Inggris, paling lambat 21 hari sebelum pelaksanaan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. 	Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham di surat kabar <i>Bisnis Indonesia</i> pada 6 Mei 2019 <ul style="list-style-type: none"> Pemanggilan RUPS di situs web BEI pada 6 Mei 2019 Pemberitahuan Pemanggilan RUPS di situs web Perusahaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris pada 6 Mei 2019 	Pasal 13 ayat (3) POJK 32
6.	Pemberitahuan kepada OJK atas Pengumuman Pemanggilan kepada Pemegang Saham di surat kabar paling lambat dua hari kerja setelah pemanggilan RUPS	Surat BFI Finance kepada OJK dengan tembusan kepada Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, BEI, PT Sirca Datapro Perdana, dan CaMEL No. Corp./Sjn/L/V/19-0082 tanggal 6 Mei 2019, disertai Bukti Iklan Pemberitahuan Pemanggilan kepada Pemegang Saham	Pasal 13 ayat (7) POJK 32
7.	Pelaksanaan RUPS	Tanggal 28 Mei 2019 di The Dharmawangsa, Nusantara Ballroom, Jl. Brawijaya Raya No.26, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia	
8.	Menyampaikan Risalah RUPS kepada OJK paling lambat 30 hari setelah tanggal RUPS	Surat BFI Finance kepada OJK No. Corp./Sjn/L/V/19-0091 tanggal 29 Mei 2019, dengan tembusan kepada Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, BEI, KSEI, Sirca Datapro Perdana, dan CaMEL	Pasal 32 dan 33 POJK 32
9.	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS, minimal di: <ul style="list-style-type: none"> Satu surat kabar harian bahasa Indonesia berperedaran nasional; Situs web BEI; dan Situs web Perusahaan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling kurang adalah bahasa Inggris, paling lambat dua hari kerja setelah tanggal RUPS. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengumuman Risalah RUPST dan RUPSLB di surat kabar <i>Bisnis Indonesia</i> pada 31 Mei 2019 Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS di situs web BEI pada 31 Mei 2019 Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS di situs web Perusahaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris pada 31 Mei 2019 	Pasal 34 ayat (2) POJK 32
10.	Pemberitahuan kepada OJK atas Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat, paling lambat dua hari kerja setelah pengumuman surat kabar atas Ringkasan Risalah Rapat	Surat BFI Finance kepada OJK No. Corp/SJN/L/V/19-0093 tanggal 31 Mei 2019, tembusan kepada BEI, KSEI, PT Sirca Datapro Perdana, dan CaMEL dengan melampirkan bukti iklan pengumuman surat kabar atas Ringkasan Risalah Rapat pada 31 Mei 2019	Pasal 34 ayat (7) POJK 32

Uraian Pelaksanaan dan Keputusan RUPS 2019

RUPST dan RUPSLB 28 Mei 2019

Pada Selasa, 28 Mei 2019, di The Dharmawangsa, Nusantara Ballroom, Jalan Brawijaya Raya No. 26, Jakarta Selatan, telah diselenggarakan RUPST dan RUPSLB Perusahaan dan ringkasan risalahnya masing-masing adalah sebagai berikut:

I. Kehadiran Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan

RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh para anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan:

Dewan Komisaris

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Kusmayanto Kadiman | Presiden Komisaris |
| 2. Johannes Sutrisno | Komisaris Independen |
| 3. Alfonso Napitupulu | Komisaris Independen |
| 4. Emmy Yuhassarie | Komisaris Independen |
| 5. Sunata Tjiterosampurno | Komisaris |

Direksi

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Francis Lay Sioe Ho | Presiden Direktur |
| 2. Sudjono | Direktur |
| 3. Sutadi | Direktur |
| 4. Andrew Adiwijanto | Direktur |
| 5. Sigit Hendra Gunawan | Direktur Independen |

Dewan Pengawas Syariah

- | | |
|---------------------|---------|
| 1. Asrori S. Karni | Ketua |
| 2. Helda Rahmi Sina | Anggota |

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

- RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham sejumlah 11.451.669.579 saham 76,53% dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 14.964.383.620 saham setelah dikurangi pembelian kembali saham oleh Perseroan sebanyak 1.002.732.000 saham (*Treasury Stock*).
- RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham sejumlah 13.361.432.515 saham 89,29% dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 14.964.383.620 saham setelah dikurangi pembelian kembali saham oleh Perseroan sebanyak 1.002.732.000 saham (*Treasury Stock*).

Masing-masing sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

III. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa untuk setiap mata acara, para pemegang saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai materi yang dibicarakan (kecuali dalam mata acara kelima RUPS Tahunan tidak dilakukan sesi tanya jawab karena hanya bersifat laporan), namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan dalam setiap mata acara RUPST dan RUPSLB diambil berdasarkan pemungutan suara kecuali dalam mata acara kelima RUPST tidak dilakukan pengambilan keputusan karena hanya bersifat laporan.

V. Keputusan RUPS Tahunan

Keputusan dalam Mata Acara Pertama:

- Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

2. Menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan" sesuai laporannya No. 00078/2.1068/AU.1/09/1042-1/1/II/2019 dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasian", dengan demikian memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018.

Dasar Pengambilan Keputusan dalam Mata Acara Pertama:

Suara: Setuju - 11.444.161.976 (99,93%); Abstain - 0 (0%); Tidak Setuju - 7.507.600 (0,07%).

Keputusan dalam Mata Acara Kedua:

1. Membagikan sebagai dividen tunai final sebesar Rp49,00 per lembar saham dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan. Dividen tunai final tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 16.00 WIB dan akan dibayarkan kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal 28 Juni 2019.
2. Menyisihkan sebesar Rp13.693.000.000,00 untuk cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Sisa laba bersih tahun buku 2018 akan dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat modal Perseroan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan rencana penggunaan laba bersih sebagaimana disebutkan di atas, termasuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan dan untuk hadir dan menghadap pihak yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Dasar Pengambilan Keputusan dalam Mata Acara Kedua:

Suara: Setuju - 11.427.880.776 (99,79%); Abstain - 0 (0%); Tidak Setuju - 23.788.800 (0,21%).

Keputusan dalam Mata Acara Ketiga:

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.

Dasar Pengambilan Keputusan dalam Mata Acara Ketiga:

Suara: Setuju - 11.372.298.776 (99,31%); Abstain - 16.281.200 (0,14%); Tidak Setuju - 63.089.600 (0,55%).

Keputusan dalam Mata Acara Keempat:

1. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dengan total seluruhnya sejumlah Rp363.100.000,00 per bulan setelah dipotong pajak untuk tahun 2019 dan memberikan tantiem kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018 sejumlah Rp3.125.000.000,00.
2. Melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya masing-masing di antara anggota Dewan Komisaris dan melakukan penyesuaian atas total remunerasi dalam hal terdapat perubahan jumlah anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku 2019.
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang kepada masing-masing Direksi dan menentukan remunerasi bagi anggota Direksi.

Dasar Pengambilan Keputusan dalam Mata Acara Keempat:

Suara: Setuju - 11.427.880.776 (99,79%); Abstain - 0 (0%); Tidak Setuju - 23.788.800 (0,21%).

Keputusan dalam Mata Acara Kelima:

Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 dan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana yang tertuang dalam Prospektus.

Dasar Pengambilan Keputusan dalam Mata Acara Kelima:

Oleh karena Mata Acara Kelima Rapat hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya jawab maupun pengambilan keputusan.

Keputusan dalam Mata Acara Keenam:

1. Menyetujui untuk mengubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan usaha Perseroan, khususnya POJK No. 35/POJK.05/2018.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan menyusun kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/ atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyampaikan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen permohonan lainnya, singkatnya melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Pengambilan Keputusan dalam Mata Acara Keenam:

Suara: Setuju - 10.372.662.451 (90,58%);
Abstain - 0 (0%); Tidak Setuju - 1.079.007.125 (9,42%).

VI. Keputusan RUPS Luar Biasa**Keputusan dalam Mata Acara Pertama:**

1. Menyetujui mengalihkan kekayaan Perseroan dan/ atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 tahun buku atau lebih termasuk dalam rangka menerbitkan Obligasi, *Medium Term Notes* (MTN) dan jenis pinjaman lainnya, melakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank, sekuritisasi dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan dalam kegiatan usaha normal Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan tersebut di atas termasuk dalam rangka menerbitkan Obligasi, *Medium Term Notes* (MTN) dan jenis pinjaman lainnya, melakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank, sekuritisasi dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan dalam kegiatan usaha normal Perseroan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.

Dasar Pengambilan Keputusan dalam Mata Acara Pertama:

Suara: Setuju - 12.306.144.190 (92,10%); Abstain - 0 (0%);
Tidak Setuju - 1.055.288.325 (7,90%).

Keputusan dalam Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui mengangkat kembali Bapak Sudjono dan Bapak Sutadi masing-masing sebagai Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk jangka waktu 5 tahun sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

PRESIDEN KOMISARIS Bapak Kusmayanto Kadiman

KOMISARIS INDEPENDEN Bapak Johannes Sutrisno

KOMISARIS INDEPENDEN Ibu Emmy Yuhassarie

KOMISARIS INDEPENDEN Bapak Alfonso Napitupulu

KOMISARIS Bapak Dominic John Picone

KOMISARIS Bapak Sunata Tjiterosampurno

KOMISARIS Bapak Cornelius Henry Kho

Direksi

PRESIDEN DIREKTUR Bapak Francis Lay Sioe Ho

DIREKTUR Bapak Sudjono

DIREKTUR Bapak Sutadi

DIREKTUR Bapak Andrew Adiwijanto

DIREKTUR INDEPENDEN Bapak Sigit Hendra Gunawan

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan keputusan mata acara Rapat.

Dasar Pengambilan Keputusan dalam

Mata Acara Kedua:

Suara: Setuju - 11.910.372.090 (89,14%); Abstain - 0 (0%);

Tidak Setuju - 1.451.060.425 (10,86%).

VII. Pembagian Dividen Tunai

Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tahun buku 2018 maka jadwal pembagian dividen tunai tahun buku 2018 adalah sebagai berikut:

TABEL 87_JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Penyelenggaraan RUPS	28 Mei 2019
2.	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS ke OJK dan Bursa	29 Mei 2019
3.	Pengumuman di Bursa, Iklan Hasil RUPS dan Jadwal Pembagian Dividen di surat kabar	31 Mei 2019

No.	Keterangan	Tanggal
4.	Cum dividend di pasar reguler dan negosiasi	13 Juni 2019
5.	Ex dividend di pasar reguler dan negosiasi	14 Juni 2019
6.	Cum dividend di pasar tunai	17 Juni 2019
7.	Ex dividend di pasar tunai	18 Juni 2019
8.	Recording date untuk dividen	17 Juni 2019
9.	Pembayaran dividen	28 Juni 2019

Tata cara pembagian dividen tunai adalah sebagai berikut:

- Pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 17 Juni 2019 pukul 16.00 WIB.
- Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Perseroan akan membayar Dividen Tunai melalui KSEI ke rekening Pemegang Rekening KSEI dan Pemegang Saham Perseroan akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (fisik) dan menginginkan pembayaran Dividen Tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, dapat memberitahukan nama dan alamat banknya serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham itu sendiri, dengan disertai fotokopi KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui surat yang bermaterai Rp6.000,- yang sudah harus diterima selambatnya tanggal 17 Juni 2019 pukul 16.00 WIB, kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan:
PT Sirca Datapro Perdana
Jalan Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340
Tel.: (021) 390-0645, 390-5920
- Dividen Tunai yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan NPWP diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 17 Juni 2019 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya NPWP tersebut, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.
6. Khusus bagi Pemegang Saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri maka pemotongan pajaknya disesuaikan dengan Peraturan Pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan. Bagi Wajib Pajak Luar Negeri agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya sebagai berikut:
 - a. Untuk Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (fisik), maka asli Surat Keterangan Domisilinya dikirimkan kepada PT Sirca Datapro Perdana.
 - b. Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada KSEI melalui partisipan yang ditunjuk oleh masing-masing Pemegang Saham.
 - c. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut, telah diterima oleh KSEI atau BAE selambatnya tanggal 17 Juni 2019 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI untuk saham dalam penitipan kolektif. Tanpa adanya Surat Keterangan Domisili tersebut, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada para Pemegang Saham asing akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.

Keputusan RUPS 2019 dan Realisasinya

Seluruh keputusan RUPS 2019, baik RUPST maupun RUPSLB pada 28 Mei 2019, telah direalisasikan sepenuhnya di 2019, sebagaimana dirangkum pada Tabel 88, 89, 90 dan 91 berikut.

TABEL 88_REALISASI RUPST 28 MEI 2019

Keputusan	Telah Direalisasikan (Y) Belum Direalisasikan (N)	Alasan Belum Direalisasikan
Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan.	Y	-
Menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan" sesuai laporannya Nomor: 00078/2.1068/AU.1/09/1042-1/1/II/2019 dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasi", dengan demikian memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018.	Y	-

TABEL 88_REALISASI RUPST 28 MEI 2019

Keputusan	Telah Direalisasikan (Y) Belum Direalisasikan (N)	Alasan Belum Direalisasikan
Membagikan sebagai dividen tunai final sebesar Rp49,00 per lembar saham dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan. Dividen tunai final tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 16.00 WIB dan akan dibayarkan kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal 28 Juni 2019.	Y	-
Menyisihkan sebesar Rp13.693.000.000,00 untuk cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	Y	-
Sisa laba bersih tahun buku 2018 akan dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan.	Y	-
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan rencana penggunaan laba bersih sebagaimana disebutkan di atas, termasuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan dan untuk hadir dan menghadap pihak yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.	Y	-
Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.	Y	-
Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dengan total seluruhnya sejumlah Rp363.100.000,00 per bulan setelah dipotong pajak untuk tahun 2019 dan memberikan tantiem kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018 sejumlah Rp3.125.000.000,00.	Y	-
Melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya masing-masing di antara anggota Dewan Komisaris dan melakukan penyesuaian atas total remunerasi dalam hal terdapat perubahan jumlah anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku 2019.	Y	-
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang kepada masing-masing Direksi dan menentukan remunerasi bagi anggota Direksi.	Y	-
Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 dan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana yang tertuang dalam Prospektus.	Y	-
Menyetujui untuk mengubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan usaha Perseroan, khususnya POJK No. 35/POJK.05/2018.	Y	-
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan menyusun kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyampaikan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen permohonan lainnya, singkatnya melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Y	-

TABEL 89_REALISASI RUPSLB 28 MEI 2019

Keputusan	Telah Direalisasikan (Y) Belum Direalisasikan (N)	Alasan Belum Direalisasikan
Menyetujui mengalihkan kekayaan Perseroan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 tahun buku atau lebih termasuk dalam rangka menerbitkan Obligasi, <i>Medium Term Notes</i> (MTN) dan jenis pinjaman lainnya, melakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank, sekuritisasi dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan dalam kegiatan usaha normal Perseroan.	Y	-
Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan tersebut di atas termasuk dalam rangka menerbitkan Obligasi, <i>Medium Term Notes</i> (MTN) dan jenis pinjaman lainnya, melakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank, sekuritisasi dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan dalam kegiatan usaha normal Perseroan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.	Y	-
Menyetujui mengangkat kembali Bapak Sudjono dan Bapak Sutadi masing-masing sebagai Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:		
DEWAN KOMISARIS		
Presiden Komisaris: Bapak Kusmayanto Kadiman		
Komisaris Independen: Bapak Johannes Sutrisno		
Komisaris Independen: Ibu Emmy Yuhassarie		
Komisaris Independen: Bapak Alfonso Napitupulu		
Komisaris: Bapak Dominic John Picone	Y	-
Komisaris: Bapak Sunata Tjiterosampurno		
Komisaris: Bapak Cornellius Henry Kho		
DIREKSI		
Presiden Direktur: Bapak Francis Lay Sioe Ho		
Direktur: Bapak Sudjono		
Direktur: Bapak Sutadi		
Direktur: Bapak Andrew Adiwijanto		
Direktur Independen: Bapak Sigit Hendra Gunawan		
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan keputusan mata acara Rapat.	Y	-

TABEL 90_REALISASI RUPST 17 APRIL 2018

Keputusan	Telah Direalisasikan (Y) Belum Direalisasikan (N)	Alasan Belum Direalisasikan
Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017, termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan.	Y	-
Menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Tanubranta Sutanto Fahmi Bambang & Rekan" sesuai Lapornya Nomor 160/2. B008/FH.1/12.17 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian", dengan demikian memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan Perusahaan untuk tahun buku 2017.	Y	-
Membagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp39,00 per lembar saham dari laba bersih Perusahaan. Jumlah dividen tunai final yang akan dibagikan adalah sebesar Rp16,00 per lembar saham, setelah diperhitungkan dengan dividen tunai interim sebesar Rp23,00 per lembar saham yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada 18 Desember 2017. Dividen tunai final tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham Perusahaan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan pada 27 April 2018 pukul 16.00 WIB dan akan dibayarkan kepada pemegang saham Perusahaan pada 18 Mei 2018.	Y	-
Menyisihkan sebesar Rp13.574.000.000,00 untuk cadangan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	Y	-
Sisa laba bersih tahun buku 2017 akan dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat permodalan Perusahaan.	Y	-
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk melaksanakan rencana penggunaan laba bersih sebagaimana disebutkan di atas, termasuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perusahaan dan untuk hadir dan menghadap pihak yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.	Y	-
Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.	Y	-
Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dengan total seluruhnya sejumlah Rp344.100.000,00 per bulan setelah dipotong pajak untuk tahun buku 2018 dan memberikan tantiem kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 sejumlah Rp2.882.000.000,00.	Y	-
Melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya masing-masing di antara anggota Dewan Komisaris dan melakukan penyesuaian atas total remunerasi dalam hal terdapat perubahan jumlah anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku 2018.	Y	-
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang kepada masing-masing anggota Direksi dan menentukan remunerasi bagi anggota Direksi.	Y	-
Laporan yang disampaikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham adalah sebagai berikut: Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 dan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana yang tertuang dalam Prospektus.	Y	-

TABEL 91_REALISASI RUPSLB 17 APRIL 2018

Keputusan	Telah Direalisasikan (Y) Belum Direalisasikan (N)	Alasan Belum Direalisasikan
Menyetujui mengalihkan kekayaan Perusahaan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun buku atau lebih termasuk dalam rangka menerbitkan Obligasi, MTN, dan jenis pinjaman lainnya, melakukan kerja sama pembiayaan dengan Bank, sekuritisasi, dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan dalam kegiatan usaha normal Perusahaan.	Y	-
Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan untuk melakukan tindakan tersebut di atas termasuk dalam rangka menerbitkan Obligasi, MTN, dan jenis pinjaman lainnya, melakukan kerja sama pembiayaan dengan Bank, sekuritisasi, dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan dalam kegiatan usaha normal Perusahaan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.	Y	-

Tugas Pokok

Dewan Komisaris dibentuk sebagai perwakilan dari pemegang saham untuk melakukan fungsi pengawasan sesuai anggaran dasar dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan, serta memantau efektivitas penerapan praktik GCG di Perusahaan.

Fungsi pengawasan Dewan Komisaris berlangsung pada dua level, yakni:

1. Level *Performance*, yaitu pengawasan dengan memberikan nasihat kepada Direksi dan menyampaikan usulan dalam RUPS.
2. Level *Conformance*, yaitu pelaksanaan pengawasan pada tahap selanjutnya, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Dalam melakukan fungsi pengawasan:

- Dewan Komisaris bertindak secara kolektif sebagai dewan dan tidak bertindak sendiri-sendiri.

- Dewan Komisaris tidak diperbolehkan menjadi pelaksana tugas-tugas eksekutif yang merupakan kewenangan Direksi, kecuali dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.
- Pengawasan dilakukan terhadap keputusan-keputusan yang telah diambil (*ex-post facto*) dan/atau keputusan-keputusan yang akan diambil (*preventive basis*).
- Pengawasan dilakukan dengan menerima informasi dari Direksi atau RUPS, dan dapat juga melalui tindakan-tindakan lain sesuai informasi dari sumber lain yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Dewan Komisaris tidak hanya menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, tetapi juga mengawasi seluruh aspek bisnis dan aspek korporat Perusahaan.

- Dewan Komisaris memastikan bahwa Laporan Tahunan Perusahaan telah memuat informasi mengenai identitas anggota Dewan Komisaris, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan anggota Dewan Komisaris di Perusahaan lain, jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai anggota Komite di Perusahaan maupun perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (Rapat Dewan Komisaris maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta jumlah honorarium yang diterima dari Perusahaan serta informasi lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Berdasarkan anggaran dasar Perusahaan, para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu lima tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, jika anggota Dewan Komisaris tersebut dinilai tidak dapat menjalankan

tugasnya sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, kandidat diwajibkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh POJK No. 34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan *juncto* POJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Kandidat diwajibkan untuk lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh OJK. Tetapi jika calon anggota Dewan Komisaris sebelumnya telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum berlakunya POJK ini, dan masih menjabat atau bekerja pada Perusahaan pada saat mulai berlakunya POJK, hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris tersebut masih dinyatakan berlaku.

Seluruh anggota Dewan Komisaris saat ini telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Jika masa jabatan anggota Dewan Komisaris telah habis, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali namun tergantung pada penilaian kinerja yang diawasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Setelah penilaian,

Komite Nominasi dan Remunerasi akan membuat rekomendasi jika Komite akan mengesahkan anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya untuk diangkat kembali. Berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris akan mengusulkan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris tersebut dalam RUPS.

Persyaratan bagi Anggota Dewan Komisaris

Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah mereka yang memenuhi persyaratan berikut, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan yang pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam lima tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;

- d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
- Pernah tidak menyelenggarakan RUPST;
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
- e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- f. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.
4. Memenuhi kriteria tambahan bagi Komisaris yang juga merupakan Komisaris Independen, sebagaimana diuraikan pada bagian Komisaris Independen dalam bab ini.

Komposisi dan Profil Anggota Dewan Komisaris

Selama periode 2019, jumlah anggota dan susunan Dewan Komisaris BFI Finance tidak mengalami perubahan. Susunan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat adalah berdasarkan Berita Acara RUPSLB Perusahaan melalui Akta No. 59 tanggal 28 Mei 2019 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 56 tanggal 25 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0291918 tanggal 28 Juni 2019.

Susunan Dewan Komisaris sejak 25 Juni 2019 dapat dilihat di Tabel 92.

TABEL 92_KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

No.	Nama	Jabatan	Negara Domisili	Tanggal Pengangkatan	Akhir Masa Jabatan	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan
1.	Kusmayanto Kadiman	Presiden Komisaris	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016	RUPS 2021	Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-473/BL/2011 tanggal 11 Agustus 2011
2.	Johanes Sutrisno	Komisaris (Independen)	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016	RUPS 2021	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-2020/NB.1/2014 tanggal 4 Agustus 2014
3.	Alfonso Napitupulu	Komisaris (Independen)	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016	RUPS 2021	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-2019/NB.1/2014 tanggal 4 Agustus 2014
4.	Emmy Yuhassarie	Komisaris (Independen)	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016	RUPS 2021	Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-474/BL/2011 tanggal 11 Agustus 2011
5.	Dominic John Picone	Komisaris	Singapura	Akta Berita Acara RUPSLB No. 44 tanggal 15 April 2015	RUPS 2020	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: Kep-283-NB.11-2015 tanggal 1 Juni 2015

TABEL 92_KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

No.	Nama	Jabatan	Negara Domisili	Tanggal Pengangkatan	Akhir Masa Jabatan	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan
6.	Sunata Tjiterosampurno	Komisaris	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 44 tanggal 15 April 2015	RUPS 2020	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: Kep-282-NB.11-2015 tanggal 1 Juni 2015
7.	Cornellius Henry Kho	Komisaris	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 25 tanggal 18 April 2017	RUPS 2022	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: Kep-263/NB.11/2017 tanggal 24 Mei 2017

Profil masing-masing anggota Dewan Komisaris disajikan pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan (halaman 70-73).

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mengacu pada pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris yang diatur dalam Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi PT BFI Finance Indonesia Tbk (Pedoman), diterbitkan pada 1 Desember 2015.

Pedoman tersebut bertujuan untuk dijadikan rujukan dan/atau pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai organ Perusahaan, meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi, dan menerapkan prinsip-prinsip GCG.

Pedoman tersebut memuat kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan dalam anggaran dasar Perusahaan yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Pedoman tersebut merupakan hasil kodifikasi berbagai peraturan

yang berlaku bagi Perusahaan dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) penerapan GCG.

Terkait Dewan Komisaris, Pedoman mengatur:

1. Fungsi Dewan Komisaris
2. Keanggotaan Dewan Komisaris
3. Pedoman Umum Pengawasan Dewan Komisaris
4. Etika Jabatan Dewan Komisaris
5. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
6. Hak Dewan Komisaris
7. Rapat Dewan Komisaris
8. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
9. Organ Pendukung Dewan Komisaris
10. Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi

Etika Jabatan Dewan Komisaris

Etika Jabatan Dewan Komisaris mengatur prinsip-prinsip etika bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya, yang berkaitan dengan aspek:

1. Keteladanan
2. Kepatutan terhadap Peraturan Perundang-undangan
3. Peluang Perusahaan
4. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
5. Benturan Kepentingan
6. Keuntungan Pribadi
7. Etika Berusaha dan Antikorupsi

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Secara umum, Dewan Komisaris bertanggung jawab pada hal-hal berikut ini:

1. Mengevaluasi dan memberi persetujuan atas strategi bisnis secara keseluruhan, anggaran tahunan, kebijakan manajemen risiko, serta tindakan Direksi lainnya yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perusahaan;

2. Memastikan bahwa keputusan dan pengeluaran modal mempertimbangkan sasaran strategis jangka panjang Perusahaan;
3. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pembuatan keputusan operasional, dengan pengecualian pada persetujuan atas usulan kredit yang eksposurnya melampaui wewenang persetujuan kredit dari Direksi;
4. Memastikan bahwa Perusahaan menjaga integritas finansial dan sesuai dengan rencana bisnis yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan keputusan yang diambil dalam RUPS; dan
5. Memastikan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan pedoman dan kode etik dalam segala aspek kegiatan Perusahaan, ikatan bisnis dan di semua tingkatan Perusahaan.

Pembagian tugas dan tanggung jawab antara Komisaris dan Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

1. Presiden Komisaris:
 - Meninjau secara luas dan menyeluruh atas pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik;
 - Meninjau ulang masalah ekonomi makro dan keuangan;
 - Berkomunikasi dengan pemegang saham pengendali sehubungan dengan hal-hal yang melibatkan pemegang saham; dan
 - Memimpin Rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan dengan Direksi.

2. Komisaris Independen:
 - Mengawasi dan memberikan nasihat atas pelaksanaan GCG;
 - Meninjau ulang dan menyampaikan rekomendasi tentang setiap usulan dari Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan Ketua Komite Audit;
 - Memberikan nasihat dalam masalah hukum;
 - Memberikan nasihat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan; dan
 - Menjaga hubungan baik dengan pihak regulator.
3. Komisaris:
 - Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perusahaan;
 - Memberi nasihat kepada Direksi dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian; dan
 - Melakukan pengawasan terhadap keputusan-keputusan yang sudah ada maupun yang belum diambil oleh Direksi Perusahaan.

Hak Dewan Komisaris

Secara umum, Dewan Komisaris mempunyai hak untuk:

1. Memperoleh akses atas informasi Perusahaan secara tepat waktu, lengkap, dan transparan;
2. Memperoleh penjelasan dari Direksi dan/atau anggota Direksi tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris;

3. Memberhentikan sementara waktu Anggota Direksi sesuai ketentuan anggaran dasar;
4. Membentuk Komite Audit dan komite-komite lainnya (jika dianggap perlu) dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan;
5. Menggunakan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan (jika dianggap perlu);
6. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
7. Menerima honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purnajabatan; dan
8. Mendapatkan sarana dan fasilitas Perusahaan.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris saat ini telah mencerminkan keberagaman anggotanya, dalam hal pendidikan, pengalaman kerja, usia, dan juga keahlian. Masing-masing anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris dalam rangka memastikan Perusahaan berkinerja secara optimal.

TABEL 93_KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

No.	Nama	Jabatan	Kompetensi
1.	Kusmayanto Kadiman	Presiden Komisaris	Pendidikan: Doctor of Philosophy dan Sarjana Teknik Fisika Pengalaman kerja: Presiden Komisaris, Wakil Presiden Komisaris, Komisaris, Direktur, Rektor ITB, Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Usia: 65 tahun
2.	Johanes Sutrisno	Komisaris (Independen)	Pendidikan: Master of Business Administration (M.B.A.) dan Sarjana Ekonomi Manajemen Pengalaman kerja: Presiden Komisaris, Komisaris, Direktur, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko Usia: 68 tahun
3.	Alfonso Napitupulu	Komisaris (Independen)	Pendidikan: Sarjana Hukum Pengalaman kerja: Pengacara, Konsultan Hukum, Komisaris, Komisaris Independen, Direktur Utama Usia: 69 tahun
4.	Emmy Yuhassarie	Komisaris (Independen)	Pendidikan: Master of Law dan Sarjana Hukum Pengalaman kerja: Konsultan Hukum, Dosen, Komisaris, Komisaris Independen, Komite Manajemen Risiko, Komite Audit Usia: 69 tahun
5.	Dominic John Picone	Komisaris	Pendidikan: Bachelor's Degree in Laws dan Bachelor of Commerce (Honours-Finance) Pengalaman kerja: berbagai jabatan di bidang pembiayaan konsumen (consumer finance), investment banking, investment services, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Manajemen Risiko, Komisaris, Managing Director, Head of Financial Services Usia: 41 tahun
6.	Sunata Tjiterosampurno	Komisaris	Pendidikan: Master of Finance dan Bachelor of Business Administration Pengalaman kerja: Konsultan, Direktur, Managing Director, Komisaris, Presiden Komisaris, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi Usia: 47 tahun
7.	Cornellius Henry Kho	Komisaris	Pendidikan: Sarjana Ekonomi Akuntansi Pengalaman kerja: Auditor, Pengawas Keuangan, Direktur, Sekretaris Perusahaan Usia: 53 tahun

Independensi Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris BFI Finance tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Perusahaan, kecuali Kusmayanto Kadiman (Presiden Komisaris), Dominic John Picone, dan Sunata Tjiterosampurno yang memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali. Sementara Cornellius Henry Kho (Komisaris) bukan merupakan Komisaris Independen karena sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perusahaan sehingga tidak memenuhi salah satu syarat sebagai Komisaris Independen, yaitu bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan dalam waktu enam bulan sebelum menjabat sebagai Komisaris.

TABEL 94_INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Pengendali		Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Kusmayanto Kadiman	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	-	√
Johanes Sutrisno	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Alfonso Napitupulu	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Emmy Yuhassarie	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Dominic John Picone	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	-	√
Sunata Tjiterosampurno	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	-	√
Cornellius Henry Kho	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

TABEL 95_KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS YANG JUMLAHNYA 5% ATAU LEBIH DARI MODAL DISETOR

Nama	Jabatan	BFI Finance	Perusahaan Lain
Kusmayanto Kadiman	Presiden Komisaris	Tidak ada	Tidak ada
Johanes Sutrisno	Komisaris (Independen)	Tidak ada	Tidak ada
Alfonso Napitupulu	Komisaris (Independen)	Tidak ada	Tidak ada
Emmy Yuhassarie	Komisaris (Independen)	Tidak ada	Tidak ada
Dominic John Picone	Komisaris	Tidak ada	Tidak ada
Sunata Tjiterosampurno	Komisaris	Tidak ada	Tidak ada
Cornellius Henry Kho	Komisaris	Tidak ada	Tidak ada

Komisaris Independen

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang objektif, menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pemegang saham minoritas serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Komisaris Independen harus dapat terlepas dari benturan kepentingan.

Berdasarkan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 33), Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari dua orang anggota Dewan Komisaris, satu di antaranya adalah Komisaris Independen.

Selain memenuhi ketentuan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan berikut:

- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya;

- Tidak memiliki saham; baik langsung maupun tidak langsung; pada Perusahaan;
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan; dan
- Tidak mempunyai hubungan usaha; baik langsung maupun tidak langsung; yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
- Komisaris Independen yang telah menjabat selama dua periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

Pernyataan independensi Komisaris Independen diungkapkan dalam laporan tahunan Perusahaan. Dalam hal Komisaris Independen menjabat di Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali untuk satu periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

Berdasarkan Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif Perusahaan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Perusahaan, sebelum menjalani masa tunggu selama satu tahun.

Dari tujuh orang anggota Dewan Komisaris yang menjabat per 31 Desember 2019, tiga di antaranya merupakan Komisaris Independen. Ini berarti lebih dari 40% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen, sesuai dengan ketentuan OJK.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Mengacu pada Pasal 25 POJK 33, masing-masing Komisaris Independen Perusahaan, yaitu Johannes Sutrisno, Alfonso Napitupulu dan Emmy Yuhassarie, telah memenuhi kriteria sebagai Komisaris Independen. Masing-masing dari mereka tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan GCG bagi perusahaan pembiayaan.

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

TABEL 96_RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama	Jabatan	Jabatan di Luar Perusahaan
Kusmayanto Kadiman	Presiden Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Komisaris of PT Adaro Power • Komisaris of PT Tamaris Hidro • Presiden Komisaris PT Setiabudi Investment Management • Komisaris PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo)
Johanes Sutrisno	Komisaris (Independen)	Tidak ada

TABEL 96_RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama	Jabatan	Jabatan di Luar Perusahaan
Alfonso Napitupulu	Komisaris (Independen)	<ul style="list-style-type: none"> • Managing Partner Kantor Hukum Alfonso Napitupulu & Partners • Direktur Utama PT Nana Mandiri Dwikarya • Komisaris Independen PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (BRINS General Insurance) • Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
Emmy Yuhassarie	Komisaris (Independen)	Tidak ada
Dominic John Picone	Komisaris	Managing Director dan Partner TPG Capital (S) Pte. Ltd., Singapura
Sunata Tjiterosampurno	Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> • Managing Director Northstar Advisors Pte. Ltd. • Presiden Komisaris PT Bukit Makmur Mandiri Utama • Komisaris PT Delta Dunia Makmur Tbk • Komisaris PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Cornellius Henry Kho	Komisaris	Tidak ada

Berdasarkan Pasal 24 POJK 33, anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak pada dua emiten atau perusahaan publik lain, dan anggota Dewan Komisaris paling banyak pada dua emiten atau perusahaan publik lain. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada empat emiten atau perusahaan publik lain. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada lima komite di emiten atau perusahaan publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan Pasal 18 POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (POJK 30), anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari tiga perusahaan lain. Hal ini tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila anggota Dewan Komisaris non-independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham perusahaan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan per 31 Desember 2019 telah mematuhi ketentuan POJK 30 dan POJK 33 dimaksud.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Pada 2019, Dewan Komisaris melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain:

1. Menyelenggarakan 11 kali Rapat Dewan Komisaris;
2. Menyelenggarakan 11 kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Menyetujui penunjukan KAP untuk tahun buku 2019;
4. Menyetujui rencana operasional Perusahaan 2019; dan
5. Menyetujui usulan Direksi atas anggaran 2019.

Selama 2019, Dewan Komisaris merekomendasikan, antara lain:

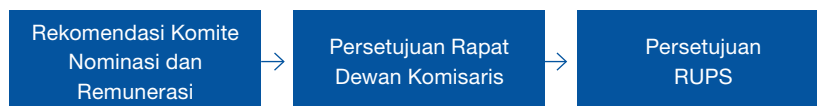
1. Usulan nominasi pejabat internal Perusahaan;
2. Usulan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Penetapan KAP;
4. Tindak lanjut rekomendasi KAP;
5. Usulan penggunaan laba tahun buku 2018;
6. Usulan mengenai hal-hal strategis terkait kegiatan bisnis Perusahaan;
7. Usulan mengenai penanganan kasus hukum yang berasal dari pemegang saham terdahulu; dan
8. Persetujuan atas tindakan Direksi sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar Perusahaan.

Kebijakan Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Perusahaan menerapkan kebijakan remunerasi berdasarkan Pasal 113 UUPD dan Pasal 17 ayat (10) Anggaran Dasar Perusahaan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditentukan oleh RUPS. Namun demikian, RUPS dapat memberikan kuasa pada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan dan menyetujui jumlah remunerasi yang diusulkan.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, berdasarkan formulasi remunerasi yang mengacu pada kebijakan internal Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan kinerja Perusahaan.

GRAFIK 17_MEKANISME REMUNERASI DEWAN KOMISARIS



Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi diserahkan kepada Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS. Mekanisme remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:

- Direksi, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perusahaan, mengajukan usulan untuk jumlah remunerasi bagi Dewan Komisaris kepada Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Komite Nominasi dan Remunerasi memeriksa remunerasi yang diusulkan oleh Direksi dengan kondisi pasar untuk industri yang relevan dengan ukuran dan bisnis yang sebanding.
- Dengan mempertimbangkan kinerja bisnis Perusahaan dan kontribusi anggota, Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan rekomendasi pada Rapat Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Rapat Dewan Komisaris, sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh RUPST, menyetujui jumlah remunerasi, dan menentukan distribusi remunerasi itu di antara anggota Dewan Komisaris sendiri. Jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilaporkan kepada Pemegang Saham dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

Struktur dan Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris

Struktur remunerasi seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan selama 2019 terdiri dari:

- Honorarium;
- Tunjangan; dan
- Tantiem.

RUPST 28 Mei 2019 telah menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dengan total seluruhnya sejumlah Rp363.100.000,00 per bulan setelah dipotong pajak untuk 2019 dan memberikan tantiem kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018 sejumlah Rp3.125.000.000,00. Jumlah keseluruhan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris pada 2019 adalah sebesar Rp11.917.332.909,00.

Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris

BFI Finance memberikan program orientasi bagi anggota baru Dewan Komisaris, untuk memberikan pengetahuan mengenai kondisi Perusahaan secara umum dan agar anggota Dewan Komisaris saling mengenal satu sama lain serta dapat bekerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, dan efektif dalam menjalankan fungsi-fungsi Dewan Komisaris. Orientasi bagi anggota baru Dewan Komisaris dilaksanakan dalam Rapat Dewan Komisaris yang pertama kali dihadiri oleh anggota baru tersebut.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Perusahaan mengalokasikan anggaran bagi anggota Dewan Komisaris untuk mengembangkan kompetensi mereka melalui berbagai seminar dan pelatihan. Daftar pelatihan di 2019 yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris tercantum pada Tabel 97.

TABEL 97_PELATIHAN DAN SEMINAR UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Nama	Jabatan	Tanggal	Judul/Tema	Lokasi	Penyelenggara
Kusmayanto Kadiman	Presiden Komisaris	25 Juli 2019	Seminar Nasional "Industri Pembiayaan Di Tengah Gejolak Politik dan Ekonomi"	Jakarta	APPI
Johanes Sutrisno	Komisaris (Independen)	25 Juli 2019	Seminar Nasional "Industri Pembiayaan Di Tengah Gejolak Politik dan Ekonomi"	Jakarta	APPI
Alfonso Napitupulu	Komisaris (Independen)	25 Juli 2019	Seminar Nasional "Industri Pembiayaan Di Tengah Gejolak Politik dan Ekonomi"	Jakarta	APPI
Emmy Yuhassarie	Komisaris (Independen)	25 Juli 2019	Seminar Nasional "Industri Pembiayaan Di Tengah Gejolak Politik dan Ekonomi"	Jakarta	APPI
Dominic John Picone	Komisaris	20 September 2019	TPG Asia Partners Meeting	Singapura	TPG
		30 Oktober 2019	Private Equity Investment & Mid-market M&As	Bangkok	Citi
Sunata Tjiterosampurno	Komisaris	25 Juli 2019	Seminar Nasional "Industri Pembiayaan Di Tengah Gejolak Politik dan Ekonomi"	Jakarta	APPI
Cornellius Henry Kho	Komisaris	25 Juli 2019	Seminar Nasional "Industri Pembiayaan Di Tengah Gejolak Politik dan Ekonomi"	Jakarta	APPI

Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi

Terciptanya sebuah hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ Perusahaan dapat bekerja sesuai fungsinya dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, Perusahaan menjaga hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dan Direksi dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peranan Direksi dalam mengurus Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar Perusahaan.
2. Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan.
3. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal, yang senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Perusahaan secara tepat waktu, akurat, dan lengkap.
6. Dalam rangka memperoleh informasi lebih lanjut atas suatu hal, Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan tersebut kepada pejabat di bawah Direksi dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Direksi sehingga tercipta keseimbangan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi dengan tujuan komunikasi korporasi melalui informasi satu pintu (*one-gate policy*) dapat tercapai.
7. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu, akurat, konsisten dan lengkap.
8. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan kelembagaan. Dalam arti bahwa Dewan Komisaris dan Direksi merupakan jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan setiap anggotanya, sehingga hubungan kerja antara Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi diketahui oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya.

Komite-Komite Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh tiga komite, yakni Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Setiap komite bertemu secara teratur atau jika diperlukan. Masing-masing komite terdiri atas Ketua Komite yang merupakan Komisaris Independen dan anggota komite lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Semua komite di bawah Dewan Komisaris di tahun 2019 telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan mandat masing-masing dengan baik.

Pekerjaan yang dilakukan oleh ketiga komite tersebut dijelaskan dalam piagam masing-masing komite. Ketiga komite tersebut melapor kepada Dewan Komisaris. Atas biaya Perusahaan, setiap komite berhak untuk meminta saran dari pihak eksternal jika diperlukan. Penjelasan masing-masing komite di bawah Dewan Komisaris disajikan pada bagian-bagian selanjutnya dalam bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik (halaman 243-257).

Tugas Pokok

Direksi dibentuk sebagai organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dalam segala hal dan dalam segala kejadian.

Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Berdasarkan anggaran dasar Perusahaan, anggota Direksi diangkat oleh para pemegang saham dalam RUPS untuk masa jabatan dimulai sejak tanggal pengangkatan sampai dengan penutupan RUPST kelima, dan anggota Direksi dapat diberhentikan oleh para pemegang saham dalam RUPS setiap saat sebelum masa jabatan masing-masing berakhir.

Sebelum diangkat sebagai anggota Direksi, kandidat diwajibkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh POJK No. 34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan *juncto* POJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Kandidat diwajibkan untuk lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK.

Seluruh anggota Direksi saat ini telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Jika masa jabatan anggota Direksi telah habis, pengangkatan anggota Direksi dapat dilakukan kembali, namun tergantung pada penilaian kinerja yang diawasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Setelah penilaian, Komite Nominasi dan Remunerasi akan membuat rekomendasi jika Komite akan mengesahkan anggota Direksi yang telah habis masa jabatannya untuk diangkat kembali. Berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris akan mengusulkan pengangkatan kembali anggota Direksi tersebut dalam RUPS.

Persyaratan bagi Anggota Direksi

Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain:

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam lima tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPST;
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;

- e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - f. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - g. Memenuhi persyaratan tambahan untuk Direktur Independen.
- Selain hal-hal di atas, anggota Direksi juga harus memenuhi persyaratan berikut:
1. Memiliki pengetahuan yang cukup dan relevan mengenai jabatannya;
 2. Memiliki pemahaman atas hukum dan peraturan mengenai perusahaan pembiayaan serta hukum dan peraturan lain yang berhubungan dengan perusahaan pembiayaan;
 3. Memiliki pengalaman bekerja di perusahaan pembiayaan dan bidang lain yang relevan dengan posisinya; dan
 4. Memiliki kemampuan untuk membuat keputusan manajemen yang strategis agar dapat mengembangkan Perusahaan menjadi lembaga keuangan yang sehat.

Komposisi dan Profil Anggota Direksi

Selama periode 2019, susunan Direksi BFI Finance mengalami perubahan. Susunan Direksi yang saat ini menjabat adalah berdasarkan Berita Acara RUPSLB Perusahaan melalui Akta No.59 tanggal 28 Mei 2019 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.56 tanggal 25 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0291918 tanggal 28 Juni 2019.

Susunan Direksi sejak 25 Juni 2019 dapat dilihat di Tabel 98.

TABEL 98_KOMPOSISI DIREKSI

No.	Nama	Jabatan	Negara Domisili	Tanggal Pengangkatan	Akhir Masa Jabatan	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan
1.	Francis Lay Sioe Ho	Presiden Direktur	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016	RUPS 2021	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-2021/NB.1/2014 tanggal 4 Agustus 2014
2.	Sudjono	Direktur Keuangan	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 59 tanggal 28 Mei 2019	RUPS 2024	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-1294/NB.1/2014 tanggal 3 Juni 2014
3.	Sutadi	Direktur Bisnis	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 59 tanggal 28 Mei 2019	RUPS 2024	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-1292/NB.1/2014 tanggal 3 Juni 2014
4.	Andrew Adiwijanto	Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 25 tanggal 18 April 2017	RUPS 2022	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-465/NB.11/2017 tanggal 14 Agustus 2017
5.	Sigit Hendra Gunawan	Direktur Risiko Perusahaan (Independen)	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016	RUPS 2021	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-218/NB.11/2016 tanggal 29 Maret 2016

Profil masing-masing anggota Direksi disajikan pada bagian Profil Direksi dalam bab Profil Perusahaan (halaman 74-76).

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mengacu kepada pedoman dan tata tertib kerja Direksi yang diatur dalam Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi PT BFI Finance Indonesia Tbk, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Dewan Komisaris dalam bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik (halaman 210).

Terkait Direksi, Pedoman tersebut mengatur:

1. Fungsi Direksi
2. Keanggotaan Direksi
3. Syarat Menjadi Anggota Direksi
4. Etika Jabatan Direksi
5. Tugas dan Kewajiban Direksi
6. Wewenang Direksi
7. Hak Direksi
8. Rapat Direksi
9. Evaluasi Kinerja Direksi
10. Organ Pendukung Direksi

Etika Jabatan Direksi

Etika Jabatan Direksi mengatur prinsip-prinsip etika bagi Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang berkaitan dengan aspek:

1. Keteladanan
2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
3. Peluang Perusahaan
4. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
5. Benturan Kepentingan
6. Keuntungan Pribadi
7. Etika Berusaha dan Antikorupsi

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Utama

Tugas dan tanggung jawab utama Direksi adalah menjaga aset Perusahaan dan memberikan imbal balik yang pantas atas investasi para pemegang saham, juga sambil mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Tanggung jawab ini meliputi:

1. Mengembangkan visi, misi, dan nilai-nilai dasar Perusahaan, serta rencana strategis yang dikonsolidasikan dalam anggaran bisnis;
2. Membangun struktur organisasi yang kuat dan dengan jelas menentukan fungsi-fungsi dari setiap unit kerja dan mengelola sumber daya manusia secara efektif;
3. Membentuk suatu sistem bagi mekanisme kontrol internal dan manajemen risiko yang memastikan implementasi fungsi audit internal di seluruh jajaran manajemen, yang konsisten dengan kebijakan dan prosedur; dan
4. Mengelola kepentingan para pemangku kepentingan Perusahaan.

Tugas Khusus

Secara khusus, tugas dan kewajiban Direksi adalah sebagai berikut:

1. Terkait etika berusaha dan antikorupsi, anggota Direksi:
 - a. Dilarang untuk menerima, baik langsung ataupun tidak langsung, sesuatu yang berharga dan bernilai dari pihak-pihak lain yang mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya.
 - b. Wajib menandatangani Pakta Integritas untuk tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, dan/atau RUPS.
 - c. Wajib melaporkan kepada Perusahaan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perusahaan dan perusahaan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
2. Terkait sistem pengendalian internal dan audit internal, anggota Direksi wajib:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi, kegiatan usaha dan aset Perusahaan;
 - b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko sesuai kriteria yang ditetapkan;
 - c. Melaksanakan aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan

- pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perusahaan;
- d. Melaksanakan sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi Perusahaan;
 - e. Melaksanakan monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi audit internal pada setiap tingkat dan unit Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan segala temuan penyimpangan dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris;
 - f. Membuat *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk masing-masing butir di atas, sesuai kebutuhan Perusahaan;
 - g. Membentuk Sistem Pengendalian Internal untuk mengarahkan dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan, serta mampu mencegah penyimpangan, kebocoran dan pemborosan keuangan organisasi, serta mendeteksi dan mencegah praktik korupsi dan kolusi;
 - h. Memastikan sistem pengendalian internal yang efektif, dengan Presiden Direktur secara struktural dibantu oleh seluruh Pejabat Struktural sampai dengan tingkat Kepala Departemen/Unit;
 - i. Menetapkan Piagam Unit Audit Internal yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari tugas dan fungsi Unit Audit Internal sesuai dengan Keputusan Direksi; dan
 - j. Mendorong terciptanya lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
 - Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;
 - Filosofi dan gaya manajemen;
 - Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab;
 - Pengorganisasian dan pengembangan SDM; dan
 - Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
3. Terkait aspek keterbukaan dan kerahasiaan informasi, anggota Direksi wajib:
 - a. Mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kepada pihak lain, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif;
 - b. Memastikan informasi mengenai Perusahaan dapat diperoleh Dewan Komisaris secara tepat waktu, terukur dan lengkap;
 - c. Mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan prinsip GCG;
 - d. Menyampaikan rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris);
 - e. Tetap merahasiakan informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. Mengutamakan kepentingan Perusahaan daripada kepentingan individu atau kelompok dalam menjaga kerahasiaan informasi.
 4. Terkait strategi dan rencana kerja, anggota Direksi wajib:
 - a. Mempersiapkan visi, misi, tujuan, strategi dan budaya Perusahaan;
 - b. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
 - c. Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan Perusahaan, Rencana Kerja Tahunan, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan pengesahan;
 - d. Menyiapkan rancangan Rencana Jangka Panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai;

- e. Mengupayakan tercapainya sasaran-sasaran jangka panjang yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang; dan
- f. Mengupayakan tercapainya target-target jangka pendek yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan.
5. Terkait manajemen risiko, Direksi wajib mengembangkan sistem manajemen risiko dan melaksanakannya secara konsisten. Sistem manajemen risiko yang dikembangkan terdiri dari tahapan berikut:
- Identifikasi Risiko
 - Pengukuran Risiko
 - Penyusunan Profil Risiko
 - Penanganan Risiko
 - Pemantauan Risiko
 - Evaluasi Risiko
 - Pelaporan dan Pengungkapan
6. Terkait hubungan dengan pemangku kepentingan, Direksi wajib memastikan terjaminnya hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan semua pemangku kepentingannya, serta memastikan Perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya.
7. Direksi menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Rincian pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi disajikan pada Tabel 99.

TABEL 99_TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Nama dan Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Francis Lay Sioe Ho Presiden Direktur	Sebagai Chief Executive Officer (CEO), beliau merupakan pengambil keputusan tertinggi di Perusahaan dan bertanggung jawab atas pencapaian sasaran dan target bisnis. Bersama anggota Direksi lainnya, beliau memimpin formulasi dan implementasi tujuan strategis dan rencana bisnis Perusahaan. Beliau menerima laporan langsung dari seluruh Direktur dan pimpinan dari unit-unit kerja, yang terdiri dari Head of Information Technology (IT), dan Head of Channel yang menangani segmen Digital Business dan Direct Marketing. Beliau juga mengawasi fungsi Kepatuhan (Compliance), Audit Internal, Sekretaris Perusahaan, dan Project Management Office (PMO).
Sudjono Direktur Keuangan	Sebagai Chief Financial Officer (CFO), beliau bertanggung jawab mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan keuangan, termasuk penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta peraturan yang diterapkan. Beliau berperan rangkap sebagai Sekretaris Perusahaan dan menjadi mitra bagi setiap unit bisnis dan regional business operation atas pelaporan, analisis kinerja keuangan dan operasional dari setiap lini bisnis. Unit-unit kerja di bawah pengawasan beliau terdiri dari Financial Planning & Control, Finance & Treasury, Budgeting & Performance Monitoring, Corporate Secretariat (termasuk Corporate Regulatory & Compliance), Hubungan Investor (Investor Relations), dan Corporate Communication & CSR.
Sutadi Direktur Bisnis	Sebagai Chief Marketing Officer (CMO), beliau bertanggung jawab merumuskan strategi dan rencana kerja pemasaran untuk memastikan pencapaian target bisnis tahunan, menyusun rencana anggaran tahunan untuk bisnis pembiayaan yang meliputi segmen produk untuk pelanggan ritel (kendaraan bermotor roda empat, roda dua, properti), produk komersial untuk pelanggan korporasi (alat berat dan mesin), dan pembiayaan berbasis syariah. Beliau bekerja sama dengan Divisi Risiko Perusahaan (Enterprise Risk) dalam mengelola tingkat risiko setiap segmen produk ritel dan korporasi untuk mendukung pencapaian target profitabilitas. Unit-unit kerja di bawah pengawasan beliau, antara lain, Product Management & Development untuk Kendaraan Roda Empat dan Dua, Alat Berat dan Mesin, Property-Backed Financing (PBF), Channel Acquisition, Telemarketing, Business Development, Marketing Communication, dan Unit Usaha Syariah (UUS).

TABEL 99_TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Nama dan Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Andrew Adiwijanto Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia	Sebagai Chief Operating Officer (COO), beliau bertanggung jawab dalam memastikan penyelarasan fungsi-fungsi di organisasi agar operasional Perusahaan berjalan dengan baik dan mematuhi kebijakan internal, serta mengawasi dan memastikan standarisasi pelayanan konsumen demi tercapainya tingkat kepuasan konsumen dan pelanggan secara berkelanjutan. Merangkap sebagai Chief Human Capital Officer (CHCO), beliau juga bertanggung jawab memantau pengembangan dan manajemen SDM. Beliau menerima laporan langsung dari Head of Human Capital, Head of Network Development & Management, dan Head of Branch Operations & Services.
Sigit Hendra Gunawan Direktur Risiko Perusahaan (Independen)	Sebagai Chief Risk Officer (CRO), beliau bertanggung jawab mengawasi manajemen risiko di seluruh Perusahaan, yang meliputi risiko-risiko dari sisi kredit/pembiayaan, likuiditas dan pendanaan, operasional, hukum dan peraturan, strategi/bisnis, serta reputasi. Tugas utamanya adalah meninjau ulang dan menyetujui risiko bisnis yang diajukan, implementasi dan pemantauan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, manajemen operasional kredit untuk mendukung tujuan bisnis, dan menjaga Sistem Manajemen Informasi (MIS) yang komprehensif dan prasarana analitis. Beliau bekerja sama dengan unit-unit bisnis dan operasional untuk memastikan risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan dapat diidentifikasi, diukur, dan dikelola dalam batas-batas yang telah ditetapkan. Unit-unit kerja di bawah pengawasan beliau, antara lain, Collection & Recovery (termasuk Legal & Litigation), Credit Operations, dan Risk Portfolio & Policy.

Wewenang dan Hak Direksi

Direksi memiliki wewenang berikut dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasional:

1. Melaksanakan pengembangan usaha;
2. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian termasuk pengangkatan, mutasi, suksesi dan pemberhentian, penetapan gaji, imbalan pascakerja dan jaminan hari tua, serta penghasilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Perusahaan; dan
5. Menetapkan keputusan strategis dan operasional yang mengandung risiko dan ketidakpastian.

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasional, Direksi juga memiliki hak-hak berikut:

1. Setiap anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis maksudnya tersebut kepada Perusahaan sekurang-kurangnya tiga puluh hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
2. Setiap anggota Direksi berhak melakukan pembelaan dalam RUPS jika RUPS sewaktu-waktu memberhentikan anggota Direksi.
3. Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan memberikan kuasa khusus yang diatur dalam surat kuasa.
4. Direksi berhak mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian serta melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai

pengurusan maupun pemilikan, serta mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perusahaan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

5. Anggota Direksi berhak memperoleh gaji dan/atau tunjangan.

Keberagaman Komposisi Direksi

Komposisi Direksi saat ini telah mencerminkan keberagaman anggotanya, dalam hal pendidikan, pengalaman kerja, usia, dan juga keahlian. Masing-masing anggota Direksi memiliki kompetensi yang mendukung Perusahaan untuk berkinerja secara optimal. Kondisi keberagaman dari anggota Direksi telah terpenuhi secara implisit dengan terpenuhinya persyaratan sebagai anggota Direksi, yang salah satunya adalah memiliki keahlian dalam bidang-bidang yang dibutuhkan Perusahaan.

TABEL 100_KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

No.	Nama	Jabatan	Kompetensi
1.	Francis Lay Sioe Ho	Presiden Direktur	Pendidikan: Master of Business Management (M.B.M.), Bachelor of Business Administration (B.B.A.) Pengalaman kerja: Presiden Direktur, Direktur dan Pendiri Perusahaan, Credit Manager, Treasury Officer, Executive Officer Kementerian Keuangan (Ministry of Finance) di Singapura Usia: 71 tahun
2.	Sudjono	Direktur Keuangan	Pendidikan: Enterprise Risk Manager (ERM™), Master of Business Administration (M.B.A.), Sarjana Ekonomi Akuntansi Pengalaman kerja: Direktur, Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Keuangan dan Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko, Auditor Senior Usia: 49 tahun
3.	Sutadi	Direktur Bisnis	Pendidikan: Sarjana Teknik Industri Pengalaman kerja: Kepala Divisi, Regional Manager, Branch Manager, Sales Executive, Collection & Credit Analyst Officer Usia: 45 tahun
4.	Andrew Adiwijanto	Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia	Pendidikan: Master of Business Administration (M.B.A.), Sarjana Teknik Elektro Pengalaman kerja: Marketing Officer, Branch Manager dan Regional Manager di berbagai daerah di Indonesia, Department Head dan Division Head berbagai bagian di kantor pusat, Komite Nominasi dan Remunerasi Usia: 51 tahun
5.	Sigit Hendra Gunawan	Direktur Risiko Perusahaan (Independen)	Pendidikan: Certified Business Management, Certified Business Management-Operation, Sarjana Teknik Industri Pengalaman kerja: Direktur, Head of Enterprise Risk, Kepala Divisi Kredit, Deputy Director-Head of Credit & Collection, Account Management Department Head, Credit Analyst & Risk Department Head (Fleet Division) Usia: 51 tahun

Independensi Direksi

Semua anggota Direksi BFI Finance tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Perusahaan.

TABEL 101_INDEPENDENSI DIREKSI

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Pengendali		Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Francis Lay Sioe Ho	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sudjono	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sutadi	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Andrew Adiwijanto	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sigit Hendra Gunawan	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

TABEL 102_KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI YANG JUMLAHNYA 5% ATAU LEBIH DARI MODAL DISETOR

Nama	Jabatan	BFI Finance	Perusahaan Lain
Francis Lay Sioe Ho	Presiden Direktur	Tidak ada	Tidak ada
Sudjono	Direktur Keuangan	Tidak ada	Tidak ada
Sutadi	Direktur Bisnis	Tidak ada	Tidak ada
Andrew Adiwijanto	Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia	Tidak ada	Tidak ada
Sigit Hendra Gunawan	Direktur Risiko Perusahaan (Independen)	Tidak ada	Tidak ada

Direktur Independen

Mengacu pada Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep- 305/ BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang antara lain menetapkan bahwa Perusahaan harus mengangkat Direktur yang Tidak Terafiliasi, dan sesuai dengan perubahan peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran I Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014), di mana istilah 'Direktur Tidak Terafiliasi' digantikan dengan istilah 'Direktur Independen', Perusahaan telah mengangkat Direktur Independen yaitu Sigit Hendra Gunawan.

Selain memenuhi ketentuan persyaratan sebagai anggota Direksi, Direktur Independen wajib memenuhi persyaratan berikut:

- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengendali Perusahaan paling kurang selama enam bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen;

- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari Calon Perusahaan Tercatat;
- Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur pada perusahaan lain; dan
- Tidak menjadi Orang Dalam pada Lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Calon Perusahaan Tercatat selama enam bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.

Masa jabatan Direktur Independen adalah paling banyak dua periode berturut-turut berdasarkan Surat Edaran BEI No. SE-00001/BEI/02-2014 tentang Penjelasan mengenai Masa Jabatan Komisaris Independen dan Direktur Independen Perusahaan Tercatat.

Rangkap Jabatan Anggota Direksi

Berdasarkan Pasal 9 POJK 30, anggota Direksi Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain, kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris

paling banyak pada tiga perusahaan lain, kecuali anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan yang memiliki usaha di bidang pembiayaan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 6 POJK 33, anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak pada satu emiten atau perusahaan publik lain, anggota Dewan Komisaris paling banyak pada tiga emiten atau perusahaan publik lain, dan anggota komite paling banyak pada lima komite di emiten atau perusahaan publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.v

Seluruh anggota Direksi Perusahaan per 31 Desember 2019 telah mematuhi ketentuan POJK 30 dan POJK 33 dimaksud.

TABEL 103_RANGKAP JABATAN ANGGOTA DIREKSI

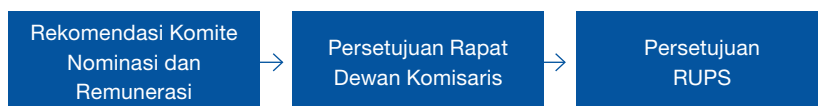
Nama	Jabatan	Jabatan di Luar Perusahaan
Francis Lay Sioe Ho	Presiden Direktur	Tidak ada
Sudjono	Direktur Keuangan	Tidak ada
Sutadi	Direktur Bisnis	Tidak ada
Andrew Adiwijanto	Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia	Tidak ada
Sigit Hendra Gunawan	Direktur Risiko Perusahaan (Independen)	Tidak ada

Kebijakan Penetapan Remunerasi Direksi

Sesuai anggaran dasar Perusahaan, penetapan gaji dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi ditentukan oleh Dewan Komisaris yang diberikan kuasa berdasarkan RUPST. Remunerasi Direksi ditetapkan melalui Rapat Dewan Komisaris setiap tahunnya.

RUPST 28 Mei 2019 menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang kepada masing-masing anggota Direksi dan menentukan remunerasi bagi anggota Direksi.

GRAFIK 18_MEKANISME REMUNERASI DIREKSI



Mekanisme remunerasi Direksi ditetapkan sebagai berikut:

- Direksi, dengan mempertimbangkan posisi keuangan Perusahaan, mengajukan usulan jumlah remunerasi bagi Direksi kepada Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Komite Nominasi dan Remunerasi mempelajari usulan remunerasi bagi Direksi berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing, kondisi keuangan Perusahaan dan perbandingan dengan industri yang relevan dengan ukuran dan bisnis yang sebanding.
- Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan rekomendasi kepada Rapat Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dan disampaikan dalam RUPS.

Struktur Remunerasi Direksi

Struktur remunerasi Direksi terdiri dari:

- Gaji;
- tunjangan;
- Fasilitas; dan
- Tantiem/insentif kinerja.

Jumlah keseluruhan gaji dan tunjangan Direksi untuk 2019 adalah sebesar Rp48.482.685.346,00.

Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru

BFI Finance memberikan program orientasi bagi anggota baru Direksi, untuk memberikan pengetahuan mengenai kondisi Perusahaan secara umum dan agar anggota Direksi saling mengenal satu sama lain dan dapat bekerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, dan efektif. Orientasi bagi anggota baru Direksi dilaksanakan dalam Rapat Direksi yang pertama kali dihadiri oleh anggota baru tersebut.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi

Perusahaan mengalokasikan anggaran bagi anggota Direksi untuk mengembangkan kompetensi mereka melalui berbagai seminar dan pelatihan. Daftar pelatihan di 2019 yang diikuti anggota Direksi tercantum pada Tabel 104.

TABEL 104_PELATIHAN DAN SEMINAR UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI DIREKSI

Nama	Jabatan	Tanggal	Judul/Tema	Lokasi	Penyelenggara
Francis Lay Sioe Ho	Presiden Direktur	25 Juli 2019	Seminar Nasional "Industri Pembiayaan Di Tengah Gejolak Politik dan Ekonomi"	Jakarta	APPI
		26 November 2019	Seminar Nasional "Peluang & Tantangan Tahun 2020"	Jakarta	APPI
Sudjono	Direktur Keuangan	25 Juli 2019	Seminar Nasional "Industri Pembiayaan Di Tengah Gejolak Politik dan Ekonomi"	Jakarta	APPI
		26 November 2019	Seminar Nasional "Peluang & Tantangan Tahun 2020"	Jakarta	APPI
Sutadi	Direktur Bisnis	25 Juli 2019	Seminar Nasional "Industri Pembiayaan Di Tengah Gejolak Politik dan Ekonomi"	Jakarta	APPI
		26 November 2019	Seminar Nasional "Peluang & Tantangan Tahun 2020"	Jakarta	APPI
Andrew Adiwijanto	Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia	25 Juli 2019	Seminar Nasional "Industri Pembiayaan Di Tengah Gejolak Politik dan Ekonomi"	Jakarta	APPI
		26 November 2019	Seminar Nasional "Peluang & Tantangan Tahun 2020"	Jakarta	APPI
Sigit Hendra Gunawan	Direktur Risiko Perusahaan (Independen)	25 Juli 2019	Seminar Nasional "Industri Pembiayaan Di Tengah Gejolak Politik dan Ekonomi"	Jakarta	APPI
		7-8 Oktober 2019	"Master Class: Enterprise Risk Governance"	Jakarta	CRMS
		26 November 2019	Seminar Nasional "Peluang & Tantangan Tahun 2020"	Jakarta	APPI

Komite di Bawah Direksi

Hingga akhir 2019, seluruh organ yang dibawah Direksi berbentuk divisi, departemen, atau unit kerja. Dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan usaha dan kapasitas internalnya, Perusahaan belum memandang kebutuhan yang mendesak bagi Direksi untuk membentuk suatu komite di bawahnya. Sementara itu, penilaian kinerja dari setiap divisi, departemen, dan unit kerja dilakukan dengan menggunakan pencapaian KPI sebagai kriteria penilaiannya.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kebijakan Umum

Secara umum, kinerja Dewan Komisaris dinilai berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perusahaan maupun amanat Pemegang Saham. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan menjadi bagian tak terpisahkan yang dipertimbangkan dalam penyusunan skema kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris setidaknya memuat hal berikut:

1. Tingkat tercapainya kuorum dalam setiap Rapat Dewan Komisaris, rapat koordinasi, dan rapat dengan komite-komite;
2. Kontribusi dalam proses pengawasan Perusahaan;
3. Keterlibatan dalam penugasan-penugasan tertentu;
4. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perusahaan; dan
5. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, ketentuan RUPS, serta kebijakan Perusahaan.

Penilaian Kinerja Direksi

Kebijakan Umum

Kinerja Direksi beserta anggotanya dinilai oleh Dewan Komisaris. Secara umum, kinerja Direksi ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perusahaan.

Hasil penilaian terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Direksi secara individual terhadap dua penilaian, yaitu penilaian kolektif berdasarkan pencapaian anggaran perusahaan dan penilaian individu berdasarkan KPI masing-masing Direktur, menjadi bagian tak terpisahkan yang dipertimbangkan dalam penyusunan skema kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota Direksi.

Hasil penilaian kinerja masing-masing anggota Direksi secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan, khususnya bagi Pemegang Saham, untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Direksi yang bersangkutan. Hasil penilaian kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Direksi.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Kriteria penilaian kinerja Direksi dituangkan dalam KPI. Kriteria kinerja Direksi secara kolegal maupun individu yang berdasarkan usulan Komite Nominasi dan Remunerasi atau komite lain yang memiliki fungsi nominasi dan remunerasi diajukan oleh Dewan Komisaris kepada pemegang saham untuk disetujui. KPI Direksi sekurang-kurangnya mencakup:

1. Kontribusi dalam aktivitas bisnis Perusahaan;
2. Keterlibatan dalam penugasan-penugasan tertentu;
3. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perusahaan;
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan;
5. Pencapaian target Perusahaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan dan Kontrak Manajemen; dan
6. Pencapaian kinerja sesuai target individual yang telah ditetapkan.

Hasil penilaian atas kinerja BOD disampaikan tertulis pada Laporan Dewan Komisaris bab Laporan Manajemen halaman 33.

Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang satu kali dalam dua bulan yang dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas atau dua pertiga dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris juga mengadakan rapat gabungan secara teratur dengan Direksi, dan jika diperlukan Rapat Dewan Komisaris diadakan setelah rapat gabungan, jika dianggap perlu oleh satu anggota Dewan Komisaris melalui permintaan tertulis dari satu atau lebih anggota Direksi atau jika diminta oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki sepersepuluh dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan hak suara yang sah.

Keputusan Rapat Dewan Komisaris dibuat berdasarkan keputusan bersama. Dalam hal keputusan tidak mencapai mufakat, maka keputusan akan dibuat dengan cara pemungutan suara dengan lebih dari setengah dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat. Setiap anggota Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan pada keputusan yang dibuat tidak boleh memberikan suara atas keputusan yang akan dibuat tersebut.

Dewan Komisaris juga dapat membuat keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris resmi, dengan syarat bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan tertulis atas usulan tersebut dan menandatangani dokumen yang bersangkutan. Keputusan yang dibuat dengan cara demikian memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang dibuat secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris resmi.

Pembuatan Risalah Rapat Dewan Komisaris

Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris dibuat Risalah Rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan (*dissenting opinion*) anggota Dewan Komisaris (jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.

Risalah Rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Di 2019, Dewan Komisaris menyelenggarakan 22 kali rapat, yang terdiri dari:

1. Rapat Dewan Komisaris sebanyak 11 kali; dan
2. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 11 kali.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihatnya kepada Direksi, Dewan Komisaris mengadakan rapat gabungan bersama Direksi guna membicarakan implementasi keputusan yang dibuat dalam rapat sebelumnya, kinerja keuangan, manajemen risiko dan hal-hal lain yang mungkin berdampak pada kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perusahaan.

Tanggal penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris di 2019 disajikan pada Tabel 105. Tanggal penyelenggaraan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Gabungan selama 2019 disajikan pada Tabel 107.

TABEL 105_JADWAL DAN KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Tanggal	Kusmayanto Kadiman	Johanes Sutrisno	Alfonso Napitupulu	Emmy Yuhassarie	Dominic John Picone	Sunata Tjiterosampurno	Cornellius Henry Kho
22 Januari 2019	√	√	√	√	√	√	√
19 Februari 2019	√	√	√	√	√	√	√
19 Maret 2019	√	√	√	√	√	√	√
25 April 2019	√	√	√	√	√	√	√
28 Mei 2019	√	√	√	√	√	√	√
20 Juni 2019	√	√	√	√	√	√	√
24 Juli 2019	√	√	√	√	√	√	√
20 Agustus 2019	√	√	√	√	√	√	√
24 September 2019	√	√	√	√	√	√	√
22 Oktober 2019	√	√	√	√	√	√	√
19 November 2019	√	√	√	√	√	√	√
Jumlah Kehadiran per Anggota	11	11	11	11	11	11	11
Persentase Kehadiran per Anggota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TABEL 106_AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS

Tanggal	Agenda Rapat
22 Januari 2019	Pembahasan kinerja Direksi dan Komite-Komite sebagai evaluasi akhir tahun 2019, kondisi ekonomi makro dan industri multifinance pada umumnya, hal lain-lain
19 Februari 2019	Pembahasan kinerja bulanan Direksi dan Komite-Komite per 31 Januari 2019, hal lain-lain
19 Maret 2019	Pembahasan kinerja bulanan Direksi dan Komite-Komite per 28 Februari 2019, tinjauan awal agenda RUPS 2019 dan draft Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, hal lain-lain
25 April 2019	Pembahasan kinerja bulanan dan triwulan I dari Direksi dan Komite-Komite (per 31 Maret 2019), kondisi ekonomi makro dan industri multifinance pada umumnya selama triwulan I 2019, tinjauan akhir dan persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk RUPS 2019, hal lain-lain
28 Mei 2019	Pembahasan kinerja bulanan Direksi dan Komite-Komite per 30 April 2019, kasus hukum dari pemegang saham terdahulu, hal lain-lain
20 Juni 2019	Pembahasan kinerja bulanan Direksi dan Komite-Komite per 31 Mei 2019, perkembangan kasus hukum dari pemegang saham terdahulu, hal lain-lain
24 Juli 2019	Pembahasan kinerja bulanan dan triwulan II dari Direksi dan Komite-Komite (per 30 Juni 2019), kondisi ekonomi makro dan industri multifinance pada umumnya selama triwulan II 2019, perkembangan kasus hukum dari pemegang saham terdahulu, hal lain-lain
20 Agustus 2019	Pembahasan kinerja bulanan Direksi dan Komite-Komite per 31 Juli 2019, hal lain-lain
24 September 2019	Pembahasan kinerja bulanan Direksi dan Komite-Komite per 31 Agustus 2019, perkembangan kasus hukum dari pemegang saham terdahulu, hal lain-lain
22 Oktober 2019	Pembahasan kinerja bulanan dan triwulan III dari Direksi dan Komite-Komite (per 30 September 2019), kondisi ekonomi makro dan industri multifinance pada umumnya selama triwulan III 2019, perkembangan kasus hukum dari pemegang saham terdahulu, hal lain-lain
19 November 2019	Pembahasan kinerja bulanan Direksi dan Komite-Komite per 31 October 2019, proyeksi bisnis hingga akhir November dan Desember 2019 serta 2020, hal lain-lain

TABEL 107_JADWAL DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Tanggal	Kusmayanto Kadiman	Johanes Sutrisno	Alfonso Napitupulu	Emmy Yuhassarie	Dominic John Picone	Sunata Tjiterosampurno	Cornellius Henry Kho
22 Januari 2019	√	√	√	√	√	√	√
19 Februari 2019	√	√	√	√	√	√	√
19 Maret 2019	√	√	√	√	√	√	√
25 April 2019	√	√	√	√	√	√	√
28 Mei 2019	√	√	√	√	√	√	√
20 Juni 2019	√	√	√	√	√	√	√
24 Juli 2019	√	√	√	√	√	√	√
20 Agustus 2019	√	√	√	√	√	√	√
24 September 2019	√	√	√	√	√	√	√
22 Oktober 2019	√	√	√	√	√	√	√
19 November 2019	√	√	√	√	√	√	√
Jumlah Kehadiran per Anggota	11	11	11	11	11	11	11
Persentase Kehadiran per Anggota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TABEL 108_AGENDA RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Tanggal	Agenda Rapat
22 Januari 2019	Pembahasan materi tertunda dari rapat sebelumnya per 21 November 2018, kinerja keuangan per triwulan IV 2018, draft anggaran 2019 dan manajemen risiko triwulan IV 2018, hal lain-lain
19 Februari 2019	Pembahasan materi tertunda dari rapat sebelumnya per 22 Januari 2019, laporan dari Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Manajemen Risiko, pembahasan kinerja keuangan bulan Januari 2019 dan anggaran 2019 dan manajemen risiko, hal lain-lain
19 Maret 2019	Pembahasan materi tertunda dari rapat sebelumnya per 19 Februari 2019, kinerja keuangan dan <i>update</i> manajemen risiko, hal lain-lain
25 April 2019	Pembahasan materi tertunda dari rapat sebelumnya per 19 Maret 2019, laporan dari Ketua Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, laporan keuangan dan <i>update</i> manajemen risiko bulan Maret 2019, hal lain-lain
28 Mei 2019	Pembahasan materi tertunda dari rapat sebelumnya per 25 April 2019, kinerja keuangan bulan April 2019 dan <i>update</i> manajemen risiko bulan April 2019, <i>update</i> bisnis, hal lain-lain
20 Juni 2019	Pembahasan materi tertunda dari rapat sebelumnya per 28 Mei 2019, kinerja keuangan bulan Mei 2019 dan <i>update</i> manajemen risiko bulan Mei 2019, <i>update</i> bisnis, hal lain-lain
24 Juli 2019	Pembahasan materi tertunda dari rapat sebelumnya per 20 Juni 2019, laporan dari Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, kinerja keuangan per 30 Juni 2019, <i>update</i> manajemen risiko dan <i>update</i> bisnis, hal lain-lain
20 Agustus 2019	Pembahasan materi tertunda dari rapat sebelumnya per 24 Juli 2019, kinerja keuangan bulan Juli 2019 dan manajemen risiko dan <i>update</i> bisnis, hal lain-lain
24 September 2019	Pembahasan materi tertunda dari rapat sebelumnya per 20 Agustus 2019, kinerja keuangan bulan Agustus 2019, manajemen risiko dan <i>update</i> bisnis, perkembangan kasus hukum dari pemegang saham terdahulu, hal lain-lain
22 Oktober 2019	Pembahasan materi tertunda dari rapat sebelumnya per 24 September 2019, laporan dari Ketua Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, kinerja keuangan 30 September 2019 dan <i>update</i> manajemen risiko per triwulan III 2019, hal lain-lain
19 November 2019	Pembahasan materi tertunda dari rapat sebelumnya per 22 Oktober 2019, kinerja keuangan bulan Oktober 2019, manajemen risiko dan perkembangan sumber daya, hal lain-lain

Rapat Direksi

Kebijakan mengenai Rapat Direksi

Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang satu kali dalam setiap bulan. Direksi juga wajib mengadakan rapat gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan.

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau tempat kegiatan usaha Perusahaan. Rapat Direksi dapat juga dilakukan dengan menggunakan sarana telepon konferensi (*teleconference*) atau sistem komunikasi lain sejenis di mana para anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat tersebut dapat saling berkomunikasi dan partisipasi dengan cara demikian dianggap sebagai kehadiran secara langsung dalam rapat.

Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan di antara para anggota Direksi yang hadir.

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. Dalam hal pemberi kuasa tidak memberikan kuasa khusus, maka pemberian kuasa tersebut bersifat mutlak. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

Rapat Direksi dihadiri oleh anggota Direksi, kecuali apabila diperlukan dapat juga dihadiri oleh pejabat satu level di bawah Direksi atau pejabat lain yang ditugaskan oleh Presiden Direktur.

Pembuatan Risalah Rapat Direksi

Risalah Rapat Direksi dibuat untuk setiap Rapat Direksi dan dalam risalah rapat tersebut wajib dicantumkan pula pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Direksi (jika ada). Risalah Rapat Direksi dapat dibuat dan didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan, termasuk menyimpan dan mendistribusikan kepada peserta rapat. Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan Risalah Rapat Direksi, terlepas apakah anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.

Pelaksanaan Rapat Direksi

Di 2019, Direksi menyelenggarakan rapat sebanyak 23 kali, terdiri dari:

1. Rapat Direksi sebanyak 12 kali; dan
2. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 11 kali.

Tanggal penyelenggaraan Rapat Direksi dan tingkat kehadiran anggota Direksi pada Rapat Direksi di 2019 disajikan pada Tabel 109.

TABEL 109_JADWAL DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

Tanggal	Francis Lay Sioe Ho	Sudjono	Sutadi	Andrew Adiwijanto	Sigit Hendra Gunawan
22 Januari 2019	√	√	√	√	√
19 Februari 2019	√	√	√	√	√
19 Maret 2019	√	√	√	√	√
25 April 2019	√	√	√	√	√
28 Mei 2019	√	√	√	√	√
20 Juni 2019	√	√	√	√	√
24 Juli 2019	√	√	√	√	√

TABEL 109_JADWAL DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

Tanggal	Francis Lay Sioe Ho	Sudjono	Sutadi	Andrew Adiwijanto	Sigit Hendra Gunawan
20 Agustus 2019	√	√	√	√	√
24 September 2019	√	√	√	√	√
22 Oktober 2019	√	√	√	√	√
19 November 2019	√	√	√	√	√
10 Desember 2019	√	√	√	√	√
Jumlah Kehadiran per Anggota	12	12	12	12	12
Persentase Kehadiran per Anggota	100%	100%	100%	100%	100%

TABEL 110_AGENDA RAPAT DIREKSI

Tanggal	Agenda Rapat
22 Januari 2019	Pembahasan dan evaluasi mengenai kinerja keuangan dan bisnis di 2018, laporan keuangan dan manajemen risiko per 31 Desember 2018, prediksi makroekonomi dan industri multifinance di 2020 pada umumnya, hal lain-lain
19 Februari 2019	Pembahasan kinerja keuangan dan manajemen risiko per 22 Januari 2019, hal lain-lain
19 Maret 2019	Pembahasan materi tertunda dari rapat sebelumnya per 19 Februari 2019, kinerja keuangan dan manajemen risiko per 28 Februari 2019, tinjauan awal agenda RUPS 2019 dan draft Laporan Direksi, hal lain-lain
25 April 2019	Pembahasan materi tertunda dari rapat sebelumnya per 19 Maret 2019, kinerja keuangan dan manajemen risiko per triwulan I 2019, tinjauan akhir dan persetujuan untuk agenda dan Laporan Direksi untuk RUPS 2019, hal lain-lain
28 Mei 2019	Pembahasan kinerja cabang baru yang dibuka selama 2019, kinerja bisnis ritel dan analisis produk ritel, perkembangan pembiayaan properti (PBF), kinerja keuangan dan manajemen risiko per 30 April 2019, kasus hukum dari pemegang saham terdahulu, hal lain-lain
20 Juni 2019	Pembahasan kinerja keuangan dan manajemen risiko per 31 Mei 2019, perkembangan kasus hukum dari pemegang saham terdahulu, hal lain-lain
24 Juli 2019	Pembahasan kinerja keuangan dan bisnis triwulan II 2019, laporan keuangan dan manajemen risiko per 30 Juni 2019, perkembangan kasus hukum dari pemegang saham terdahulu, hal lain-lain
20 Agustus 2019	Pembahasan kinerja keuangan dan manajemen risiko per 31 Juli 2019, perkembangan kasus hukum dari pemegang saham terdahulu, hal lain-lain
24 September 2019	Pembahasan materi tertunda dari rapat sebelumnya per 20 Agustus 2019, kinerja keuangan dan manajemen risiko per 31 Agustus 2019, perkembangan kasus hukum dari pemegang saham terdahulu, hal lain-lain
22 Oktober 2019	Pembahasan kinerja keuangan dan bisnis triwulan III 2019, laporan keuangan dan manajemen risiko per 30 September 2019, perkembangan kasus hukum dari pemegang saham terdahulu, hal lain-lain
19 November 2019	Pembahasan kinerja keuangan dan bisnis, laporan keuangan dan manajemen risiko per 31 Oktober 2019, proyeksi bisnis hingga akhir November dan Desember 2019, proyeksi bisnis di 2020, hal lain-lain
10 Desember 2019	Pembahasan mengenai kinerja keuangan dan manajemen risiko per 30 November 2019, hal lain-lain

Sebagaimana tercantum pada Tabel 109, Direksi telah memenuhi Pasal 16 ayat (2) POJK 30 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, yaitu Direksi wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% dari jumlah Rapat Direksi dalam periode satu tahun.

Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Secara rutin, Direksi mengadakan rapat gabungan bersama Dewan Komisaris. Di 2019, diselenggarakan 11 kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Tanggal penyelenggaraan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dan tingkat kehadiran anggota Direksi pada Rapat Gabungan selama 2019 disajikan pada Tabel 111.

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi disajikan pada bagian Dewan Komisaris dalam bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik (halaman 235).

TABEL 111_JADWAL DAN KEHADIRAN DIREKSI DALAM RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Tanggal	Francis Lay Sioe Ho	Sudjono	Sutadi	Andrew Adiwijanto	Sigit Hendra Gunawan
22 Januari 2019	√	√	√	√	√
19 Februari 2019	√	√	√	√	√
19 Maret 2019	√	√	√	√	√
25 April 2019	√	√	√	√	√
28 Mei 2019	√	√	√	√	√
20 Juni 2019	√	√	√	√	√
24 Juli 2019	√	√	√	√	√
20 Agustus 2019	√	√	√	√	√
24 September 2019	√	√	√	√	√
22 Oktober 2019	√	√	√	√	√
19 November 2019	√	√	√	√	√
Jumlah Kehadiran per Anggota	11	11	11	11	11
Persentase Kehadiran per Anggota	100%	100%	100%	100%	100%

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

BFI Finance menjalankan usaha pembiayaan syariah melalui terbentuknya Unit Usaha Syariah (UUS), sebagaimana telah tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Sebagai bentuk kepatuhan terkait bisnis yang dijalankan UUS, pada 2017 Perusahaan membentuk Dewan Pengawas Syariah.

Pembentukan Dewan Pengawas Syariah di BFI Finance didasarkan pada Keputusan RUPSLB 25 Oktober 2017. Komposisi Dewan Pengawas Syariah per 31 Desember 2019 adalah:

1. Asrori S. Karni (Ketua)
2. Helda Rahmi Sina (Anggota)

Profil kedua anggota Dewan Pengawas Syariah disajikan pada bagian Profil Dewan Pengawas Syariah dalam bab Profil Perusahaan, pada halaman 77.

Kedua anggota Dewan Pengawas Syariah BFI Finance telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK. Surat keputusan dari Anggota Dewan Komisiner OJK atas kelulusan *fit and proper test* tersebut telah disampaikan ke Perusahaan pada Januari 2018.

TABEL 112_KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

No.	Nama	Jabatan	Negara Domisili	Tanggal Pengangkatan	Akhir Masa Jabatan	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan
1.	Asrori S. Karni	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 6 tanggal 25 Oktober 2017	RUPS 2022	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-104/NB.22/2017 tanggal 27 Desember 2017
2.	Helda Rahmi Sina	Anggota	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 6 tanggal 25 Oktober 2017	RUPS 2022	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-105/NB.22/2017 tanggal 27 Desember 2017

Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan fungsi utama sebagai berikut:

1. Menjadi perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perusahaan;
2. Mengawasi kegiatan usaha Cabang Perwakilan Syariah Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
3. Menjadi penasihat dan pemberi sarana kepada Direksi, Pimpinan UUS, dan Pimpinan Cabang Perwakilan Syariah Perusahaan mengenai hal-hal yang terkait dengan Prinsip Syariah; dan
4. Menjadi mediator antara Perusahaan dengan Dewan Syariah Nasional dalam menyampaikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perusahaan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Independensi Dewan Pengawas Syariah

Semua anggota Dewan Pengawas Syariah BFI Finance tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Perusahaan.

TABEL 113_INDEPENDENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Pengendali		Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Asrori S. Karni	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Helda Rahmi Sina	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Pasal 35 POJK 30, anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada perusahaan pembiayaan yang sama, namun diperbolehkan merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas Syariah dari lebih dari empat lembaga keuangan syariah lainnya.

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan per 31 Desember 2019 telah mematuhi ketentuan POJK 30 dimaksud.

TABEL 114_RANGKAP JABATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Nama	Jabatan	Jabatan di Luar Perusahaan
Asrori S. Karni	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
		Dosen Program Studi Perbankan Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta
		Ketua Komisi Infokom MUI Pusat 2015-2020
		Wakil Ketua Bidang Hukum (Qanuniah) Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
Helda Rahmi Sina	Anggota	Kepala Divisi Pelatihan dan Konsultasi Keuangan Syariah, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		Sekretaris Umum Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta (YPFJ)
		Dosen Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia) Rawamangun Jakarta

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Pasal 40 dari Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (POJK 30), Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit enam kali dalam setahun.

Di 2019, Dewan Pengawas Syariah Perusahaan menyelenggarakan rapat sebanyak enam kali. Tanggal penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas Syariah dan tingkat kehadiran setiap anggota Dewan Pengawas Syariah pada rapat-rapat tersebut di 2019 disajikan pada Tabel 115, sementara agenda rapat-rapat tersebut dicantumkan pada Tabel 116.

TABEL 115_JADWAL DAN KEHADIRAN RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Tanggal Rapat	Asrori S. Karni	Helda Rahmi Sina
27 Maret 2019	√	√
15 Mei 2019	√	√
26 Juni 2019	√	√
10 September 2019	√	√
13 November 2019	√	√
11 Desember 2019	√	√
Jumlah Kehadiran per Anggota	6	6
Persentase Kehadiran per Anggota	100%	100%

TABEL 116_AGENDA RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Tanggal	Agenda Rapat
27 Maret 2019	Permintaan Persetujuan Perubahan <i>Personal Guarantee</i>
	Permintaan Persetujuan Perubahan <i>Payment Guarantee</i>
	Permintaan Persetujuan Perjanjian Pengadaan Jasa
	Permintaan Persetujuan Perjanjian Kerja Sama dengan <i>Digital Partner</i>
15 Mei 2019	<i>Update</i> perkembangan kegiatan UUS BFI Finance
	Permintaan Persetujuan Penghapusan IPPS <i>Murabahah</i>
	Permintaan Persetujuan IPPS <i>My Cars</i>
	Permintaan Persetujuan IPPS <i>My Faedah</i>
	Permintaan evaluasi DPS terhadap pemenuhan Prinsip Syariah oleh UUS BFI Finance sesuai Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan
26 Juni 2019	Permintaan Persetujuan Perubahan Akad <i>Ijarah</i> dan Struktur
	Permintaan Persetujuan Perubahan Akad <i>Murabahah</i> dan Struktur
	Permintaan Persetujuan Format Jadwal Angsuran Konsumen (Akad <i>Ijarah</i> dan <i>Murabahah</i>)
	Permintaan Persetujuan Nilai <i>Prepaid</i> yang Dapat Dialokasi oleh BFI Finance Jika Kontrak Konsumen <i>Expired</i>
10 September 2019	Tanda Tangan Persetujuan Perubahan Dokumen dan Dokumen Baru sebagai berikut:
	1. IPPS Pembiayaan <i>My Faedah</i>
	2. IPPS Pembiayaan <i>My Cars</i>
	3. Perjanjian Pembiayaan Syariah – <i>Ijarah</i> Multijasa
	4. Struktur Perjanjian Pembiayaan Syariah – <i>Ijarah</i> Multijasa
	5. Daftar Pembayaran Angsuran – <i>Ijarah</i> Multijasa

TABEL 116_AGENDA RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Tanggal	Agenda Rapat
	6. Perjanjian Pembiayaan Syariah – <i>Murabahah</i>
	7. Struktur Perjanjian Pembiayaan Syariah – <i>Murabahah</i>
	8. Daftar Pembayaran Angsuran – <i>Murabahah</i>
	9. <i>Payment Guarantee</i>
	10. <i>Personal Guarantee</i>
	11. Perjanjian Kerja Sama dengan <i>Digital Partner</i>
	12. Perjanjian Pengadaan Jasa
	<i>Review Nilai Prepaid yang Dapat Dialokasi oleh BFI Finance Jika Kontrak Konsumen Expired</i>
13 November 2019	<i>Review Perubahan Redaksional pada Dokumen Surat Pernyataan Perihal Asuransi Jiwa</i>
	Opini Dewan Pengawas Syariah terkait Biaya Administrasi <i>Payment Point Channel</i>
11 Desember 2019	Tanda Tangan Persetujuan Perubahan Redaksional pada Dokumen Surat Pernyataan Perihal Asuransi Jiwa
	Opini Dewan Pengawas Syariah terkait tentang pengelolaan Uang Kelebihan dari penjualan jaminan dan/atau angsuran konsumen

Program Pelatihan dan Seminar untuk Dewan Pengawas Syariah

Untuk meningkatkan kompetensi setiap anggota Dewan Pengawas Syariah, Perusahaan memiliki kebijakan untuk mendorong keikutsertaan anggota Dewan Pengawas Syariah dalam berbagai program pelatihan dan seminar secara teratur.

Di 2019, daftar program pelatihan dan seminar yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan tercantum dalam Tabel 117.

TABEL 117_PELATIHAN DAN SEMINAR UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Nama	Jabatan	Tanggal	Judul/Tema	Lokasi	Penyelenggara
Asrori S. Karni	Ketua Dewan Pengawas Syariah	25-27 Juli 2019	Pembicara 4th International Annual Conference on Fatwa Studies bertema "Argumen Legal Eksistensi Otoritas Syariah di Tangan MUI"	Depok, Jawa Barat	Komisi Fatwa MUI
		September-Desember 2019	Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Ekonomi Syariah di Program S3 Fakultas Hukum UI	Jakarta	Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI)
		19 September 2019	<i>Workshop</i> Pra-Ijtima Sanawi DPS 2019 Bidang Pembiayaan, Penjaminan, Modal Ventura, Pegadaian dan <i>Fintech</i> Syariah	Jakarta	DSN-MUI
		2-4 Oktober 2019	Peserta Semiloka Ijtima Sanawi DPS 2019 bertema "Peran DPS dalam Arus Baru Ekonomi Indonesia di Era Digital"	Bogor, Jawa Barat	DSN-MUI
		2 November 2019	Sertifikasi Kompetensi DPS dan Lulus dengan Sertifikat No. 74909 2631 7 0000196 2018, berlaku sampai 28 November 2021	Jakarta	LSP DSN-MUI

TABEL 117_PELATIHAN DAN SEMINAR UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Nama	Jabatan	Tanggal	Judul/Tema	Lokasi	Penyelenggara
		26 November 2019	Peserta Seminar Nasional APPI tentang "Peluang dan Tantangan Tahun 2020"	Jakarta	LSP DSN-MUI
Helda Rahmi Sina	Anggota	26 Februari 2019	<i>Knowing Your Leadership</i>	Jakarta	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		19 September 2019	<i>Workshop Pra-Ijtima Sanawi DPS 2019 Bidang Pembiayaan, Penjaminan, Modal Ventura, Pegadaian dan Fintech Syariah</i>	Jakarta	DSN-MUI
		2-4 Oktober 2019	Peserta Semiloka Ijtima Sanawi DPS 2019 bertema "Peran DPS dalam Arus Baru Ekonomi Indonesia di Era Digital"	Jakarta	DSN-MUI
		19 November 2019	<i>CEO Sharing Session; Dari Rugi Menjadi Untung, Dari Terpuruk Menjadi Bertumbuh</i>	Jakarta	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		26 November 2019	Seminar Nasional Peluang dan Tantangan 2020	Jakarta	APPI

KOMITE AUDIT

Dasar Pembentukan dan Tugas Pokok

Komite Audit dibentuk oleh Perusahaan pada tahun 2000, berdasarkan Peraturan Bursa Efek Jakarta No. 1-A mengenai Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Ref. No. 315/BEJ/06/2000 tanggal 30 Juni 2000, dan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (POJK 55).

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan pengelolaan Perusahaan, sesuai dengan anggaran dasar serta prinsip-prinsip GCG, memberikan pendapat dan membantu Dewan Komisaris mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris atau sesuai penugasan Dewan Komisaris.

Piagam Komite Audit

Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengacu pada pedoman kerja yang dirangkum dalam Piagam Komite Audit. Ini memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit berlangsung secara konsisten, transparan, dan independen, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piagam Komite Audit ditetapkan berdasarkan SK Dewan Komisaris No. BOC/I/2016-01 tanggal 26 Januari 2016, sesuai dengan ketentuan dalam POJK 55.

Piagam Komite Audit telah dipublikasikan di situs web Perusahaan dan mengatur, antara lain: tugas dan tanggung jawab, wewenang, jumlah anggota, komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja dalam pelaksanaan tugas, rapat, serta masa jabatan anggota Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Piagam Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan atau pihak otoritas lainnya; antara lain; laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
2. Menelaah ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan, khususnya yang menyangkut bidang akuntansi dan keuangan;

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, dengan bekerja sama dengan Komite Manajemen Risiko dari Perusahaan;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen data dan informasi Perusahaan.

Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit berwenang untuk:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan;

2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Audit Internal, Komite Manajemen Risiko dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas yang diperlukan; dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Jumlah Anggota, Komposisi dan Persyaratan Keanggotaan

Komite Audit paling kurang terdiri dari tiga orang, yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak luar Perusahaan. Per akhir 2019, Komite Audit terdiri dari 3 orang, yaitu 1 orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 orang sebagai anggota yang merupakan pihak luar Perusahaan. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Berdasarkan Piagam Komite Audit, persyaratan sebagai anggota Komite Audit Perusahaan adalah:

- Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;

- Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- Wajib memenuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan;
- Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/ atau jasa konsultasi lain pada Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir;
- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung, pada Perusahaan;
- Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut;

- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan;
- Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan
- Salah satu anggota Komite Audit wajib berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

Direksi atau Ketua Komite Audit dapat mengusulkan calon dari luar Dewan Komisaris Perusahaan untuk dinominasikan sebagai anggota Komite Audit. Selanjutnya, Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan wawancara dan memeriksa kualifikasi serta kompetensi calon. Setelah evaluasi, Komite Nominasi dan Remunerasi akan mengajukan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pengangkatan anggota Komite Audit. Jika rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi disetujui, Dewan Komisaris akan memberitahukan Direksi untuk menerbitkan surat pengangkatan bagi calon yang telah disetujui.

GRAFIK 19_PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT



Susunan Komite Audit

Susunan Komite Audit Perusahaan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

- Ketua: Emmy Yuhassarie (Komisaris Independen)
- Anggota:
 - Friso Palilingan
 - Edy Sugito

Susunan anggota Komite Audit ini dikukuhkan dengan SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 Juni 2016.

Profil Anggota Komite Audit

Profil masing-masing anggota Komite Audit disajikan dalam bab Profil Perusahaan (halaman 78-79).

Latar belakang pendidikan dan keahlian masing-masing anggota Komite Audit dapat dilihat pada Tabel 118.

Kebijakan dan Remunerasi untuk Komite Audit

Komite Nominasi dan Remunerasi membuat rekomendasi pada Dewan Komisaris mengenai remunerasi untuk anggota Komite Audit, berdasarkan kebijakan Perusahaan dan mempertimbangkan peninjauan pasar atas remunerasi Komite Audit. Remunerasi Komite Audit terdiri atas honorarium saja. Anggota Komite Audit yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota manajemen senior dari pemegang saham pengendali tidak berhak atas remunerasi tambahan sebagai anggota Komite Audit.

Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Audit

Piagam Komite Audit mengatur tata cara dan prosedur kerja dalam pelaksanaan tugas Komite Audit sebagai berikut:

1. Dalam hubungannya dengan sistem pengendalian internal Perusahaan, Komite Audit melakukan pertemuan berkala untuk membahas perencanaan kegiatan dan cakupan audit internal untuk periode yang akan datang, serta melakukan evaluasi atas hasil audit yang telah dilakukan.
2. Dalam hubungannya dengan penelaahan atas risiko yang terkait dengan risiko usaha Perusahaan, Komite Audit melakukan pembahasan dengan Komite Manajemen Risiko atas pengelolaan risiko yang telah dilakukan manajemen risiko Perusahaan.
3. Komite Audit memberikan pertanggungjawaban tahunan kepada Dewan Komisaris atas kinerjanya menjelang Laporan Dewan Komisaris atas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang akan dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan, sejalan dengan itu Komite Audit akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris setiap tahunnya.
4. Komite Audit bekerja sama dengan Sekretaris Perusahaan untuk pelaksanaan administrasi dokumentasi Komite Audit serta penyelenggaraan rapat-rapat Komite Audit.

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam tiga bulan. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*). Risalah rapat ditandatangani seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang 2019, Komite Audit melakukan empat kali rapat. Hasil rapat dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui rapat dengan Dewan Komisaris. Jadwal rapat dan kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat disajikan pada Tabel 120, sementara agenda rapat Komite Audit 2019 disajikan pada Tabel 121.

TABEL 120_JADWAL DAN KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Tanggal Rapat	Emmy Yuhassarie	Friso Palilingan	Edy Sugito
19 Februari 2019	√	√	√
25 April 2019	√	√	√
24 Juli 2019	√	√	√
22 Oktober 2019	√	√	√
Jumlah Kehadiran per Anggota	4	4	4
Persentase Kehadiran per Anggota	100%	100%	100%

TABEL 121_AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Tanggal	Agenda Rapat
19 Februari 2019	Pembahasan presentasi KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan mengenai draft Laporan Audit per 31 Desember 2018, laporan pelaksanaan kegiatan Audit Internal tahun 2018 dan Rencana Audit tahun 2019
25 April 2019	Pembahasan tinjauan draft Laporan Keuangan per 31 Maret 2019, laporan pelaksanaan kegiatan Audit Internal, dan hal lain-lain
24 Juli 2019	Pembahasan tinjauan draft Laporan Keuangan per 30 Juni 2019, laporan pelaksanaan kegiatan Audit Internal, dan presentasi rencana kerja audit tahunan 2019 oleh BDO Tanubrata
22 Oktober 2019	Pembahasan tinjauan draft Laporan Keuangan per 30 September 2019, laporan pelaksanaan kegiatan Audit Internal, dan hal lain-lain

Pelatihan Anggota Komite Audit

Di 2019, ketiga anggota Komite Audit mengikuti sejumlah pelatihan berikut:

- Emmy Yuhassarie mengikuti pelatihan Seminar Nasional "Industri Pembiayaan di Tengah Gejolak Politik dan Ekonomi" pada 25 Juli 2019, yang diselenggarakan oleh APPI;
- Friso Palilingan mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan Kode Etik Profesi Akuntan Publik pada 31 Juli 2019, yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia; dan
- Edy Sugito mengikuti Seminar "Macroeconomic Outlook 2020" pada 5 November 2019, yang diselenggarakan oleh Creco Research.

Sistem Pelaporan Kegiatan

Komite Audit wajib membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris dan/atau atas setiap penugasan yang diberikan, serta laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

Sistem Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Dugaan Pelanggaran terkait Pelaporan Keuangan

Berdasarkan Surat Penugasan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat melakukan penelaahan dan pemeriksaan atas adanya tindakan yang merugikan Perusahaan, termasuk dugaan pelanggaran terkait Pelaporan Keuangan, serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris. Atas persetujuan Dewan Komisaris, untuk pelaksanaan tugas investigasi tersebut, Komite Audit dapat menunjuk

pihak ketiga dalam pelaksanaan pencarian fakta penelaahan dan pemeriksaan. Semua biaya yang dikeluarkan atas penunjukan pihak ketiga tersebut ditanggung oleh Perusahaan.

Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Audit 2019

Program Kerja Komite Audit 2019 adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan rapat Komite Audit setiap tiga bulan sekali;
2. Mengevaluasi kinerja auditor eksternal dan memberikan rekomendasi penunjukan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris;
3. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan pembiayaan serta perusahaan publik; dan
4. Mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan pelaporan kegiatan Audit Internal.

Dasar Pembentukan dan Tugas Pokok

Komite Manajemen Risiko membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap pemegang saham. Komite ini bertanggung jawab untuk meninjau ulang risiko utama Perusahaan yang terkandung dalam register risiko Perusahaan dan memastikan bahwa semua risiko baik yang baru maupun yang timbul dievaluasi sewajarnya dan tindakan lebih lanjut diidentifikasi.

Komite Manajemen Risiko dibentuk berdasarkan SK Dewan Komisaris No. Com/JS/SK/III/2003 tanggal 18 Maret 2003. Tugas dan tanggung jawab, prosedur pengawasan, serta pelaporan Komite Manajemen Risiko telah disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (POJK 10) dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (SEOJK 14).

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Manajemen Risiko bertugas untuk memantau dan mengevaluasi rencana dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris. Untuk itu, tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah:

1. Mengevaluasi kebijakan dan praktik manajemen risiko yang digunakan dalam mengelola risiko, yang berhubungan dengan perubahan lingkungan bisnis dan parameter risiko;
2. Meninjau ulang identifikasi profil risiko oleh Divisi Manajemen Risiko dan peninjauan kriteria batas risiko maksimum yang dapat ditoleransi;
3. Memastikan kegiatan bisnis ada dalam parameter risiko yang dapat diterima; dan

4. Meninjau ulang analisis yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko mengenai faktor-faktor eksternal dan internal yang mempunyai potensi risiko bagi Perusahaan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Jumlah Anggota, Komposisi, dan Persyaratan Keanggotaan

Komite Manajemen Risiko setidaknya terdiri dari 2 orang, yaitu 1 orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 1 orang anggota yang merupakan pihak luar Perusahaan. Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Dalam pengangkatan anggota Komite Manajemen Risiko, Dewan Komisaris melihat beberapa kriteria yang merujuk pada tugas dan tanggung jawab Komite. Kriteria tersebut adalah:

- Berintegritas tinggi dan mampu menjadi independen dalam manajemen Perusahaan;
- Memahami bisnis, produk dan layanannya;
- Memiliki pengetahuan cukup tentang ekonomi makro dan dampaknya terhadap industri;
- Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi; dan
- Ketua Komite Manajemen Risiko harus merupakan anggota independen dari Dewan Komisaris.

Direksi atau Ketua Komite Manajemen Risiko dapat mengusulkan kandidat dari luar Dewan Komisaris Perusahaan untuk dinominasikan sebagai anggota Komite Manajemen Risiko. Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan wawancara dan memeriksa kualifikasi serta kompetensi calon. Setelah evaluasi, Komite Nominasi dan Remunerasi mengajukan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk pengangkatan sebagai anggota Komite Manajemen Risiko. Jika rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi disetujui, Dewan Komisaris akan memberitahukan Direksi untuk menerbitkan surat pengangkatan bagi calon yang telah disetujui.

GRAFIK 20_PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO



Profil Anggota Komite Manajemen Risiko

Profil masing-masing anggota Komite Manajemen Risiko disajikan dalam bab Profil Perusahaan (halaman 80).

Latar belakang pendidikan dan keahlian masing-masing anggota Komite Manajemen Risiko disajikan pada Tabel 122.

Susunan Komite Manajemen Risiko

Susunan Komite Manajemen Risiko per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

- Ketua: Johannes Sutrisno (Komisaris Independen)
- Anggota: Jono Effendy

Masa Jabatan Anggota Komite Manajemen Risiko

Masa tugas anggota Komite Manajemen Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan selanjutnya. Masa jabatan anggota Komite Manajemen Risiko yang menjabat per 31 Desember 2019 dicantumkan pada Tabel 122.

TABEL 122_PROFIL DAN MASA JABATAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Nama	Jabatan	Latar Belakang Pendidikan dan Keahlian	Tanggal dan Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan
Johanes Sutrisno	Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Manajemen Risiko	Keuangan, Akuntansi, Komite Audit, GCG	SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016	2016-2021
Jono Effendy	Anggota	Audit, Manajemen Risiko	SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/IV/2015-0081 tanggal 13 April 2015 dan dikukuhkan kembali dengan SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016	2016-2021

Independensi Komite Manajemen Risiko

Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko merupakan pribadi yang profesional dan tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan, untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, seluruh anggota Komite telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman dan integritas yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku. Independensi masing-masing anggota Komite Manajemen Risiko dijelaskan dalam Tabel 123.

TABEL 123_INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Pengendali		Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Johanes Sutrisno	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Jono Effendy	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Kebijakan dan Remunerasi untuk Komite Manajemen Risiko

Komite Nominasi dan Remunerasi membuat rekomendasi pada Dewan Komisaris mengenai remunerasi untuk anggota Komite Manajemen Risiko, berdasarkan kebijakan Perusahaan dan mempertimbangkan peninjauan pasar atas remunerasi Komite Manajemen Risiko. Remunerasi Komite Manajemen Risiko terdiri atas honorarium saja. Anggota Komite Manajemen Risiko yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota manajemen senior dari pemegang saham pengendali tidak berhak atas remunerasi tambahan sebagai anggota Komite Manajemen Risiko.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko menyelenggarakan rapat setidaknya empat kali dalam setahun dan melaporkan seluruh hasil rapat kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang 2019, Komite Manajemen Risiko melakukan empat kali rapat. Hasil rapat dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui rapat dengan Dewan Komisaris. Jadwal rapat dan kehadiran anggota komite dalam rapat disajikan pada Tabel 124, sementara agenda rapat Komite Manajemen Risiko 2019 disajikan pada Tabel 125.

TABEL 124_JADWAL DAN KEHADIRAN RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Tanggal Rapat	Johanes Sutrisno	Jono Effendy
19 Februari 2019	√	√
24 April 2019	√	√
12 Juli 2019	√	√
22 Oktober 2019	√	√
Jumlah Kehadiran per Anggota	4	4
Persentase Kehadiran per Anggota	100%	100%

TABEL 125_AGENDA RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Tanggal	Agenda Rapat
19 Februari 2019	Pembahasan <i>Executive Summary-Risk Dashboard</i> , update risiko finansial dan operasional
24 April 2019	Pembahasan <i>Executive Summary-Risk Dashboard</i> , update risiko finansial dan operasional
12 Juli 2019	Pembahasan <i>Executive Summary-Risk Dashboard</i> , update risiko finansial dan operasional, update perkembangan <i>Know Your Customer (KYC)</i> dan pembahasan proyek Manajemen Risiko pada PSAK 71
22 Oktober 2019	Pembahasan <i>Executive Summary-Risk Dashboard</i> , update risiko finansial dan operasional

Pelatihan Anggota Komite Manajemen Risiko

Di 2019, kedua anggota Komite Manajemen Risiko mengikuti sejumlah pelatihan berikut:

- Johannes Sutrisno mengikuti pelatihan Seminar Nasional “Industri Pembiayaan di Tengah Gejolak Politik dan Ekonomi” pada 25 Juli 2019, yang diselenggarakan oleh APPI; dan
- Jono Effendy mengikuti Seminar “Digital Disruption: Banking For The Future”, yang diselenggarakan oleh OJK pada 2 Mei 2019.

Laporan Pelaksanaan Program Komite Manajemen Risiko 2019

Program kerja Komite Manajemen Risiko ditujukan untuk memastikan bahwa manajemen mempunyai sistem peringatan dini atas kemungkinan timbulnya risiko yang dapat mempengaruhi jalannya Perusahaan, serta menghindari kejutan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Program tersebut meliputi:

1. Melakukan pertemuan tiga bulan sekali dengan Divisi Manajemen Risiko Perusahaan serta Direksi untuk membahas *risk monitoring dashboard*;

2. Memastikan bahwa kebijakan yang diambil di bidang manajemen risiko telah dilaksanakan dengan baik;
3. Menelaah laporan manajemen risiko atas evaluasi *risk exposure* Perusahaan, khususnya terkait risiko kegiatan perusahaan pembiayaan, yakni risiko strategi, risiko operasional, risiko aset dan liabilitas, risiko kepengurusan, risiko tata kelola, risiko dukungan dana, dan risiko pembiayaan, berdasarkan POJK 10 dan SEOJK 14.

Dasar Pembentukan dan Tugas Pokok

Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan dibentuk berdasarkan SK Dewan Komisaris No. Com/JS/SK/XII/2005-007 tanggal 29 Desember 2005. Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang saat ini menjabat ditetapkan berdasarkan SK Dewan Komisaris No. BOC/VI/2017-0103 tanggal 2 Juni 2017.

Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi terhadap anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.

Sejak 2015, pelaksanaan tugas pokok Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu pada POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 34).

Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi

Pada 1 Desember 2015, BFI Finance menerbitkan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, yang mengacu pada POJK 34 dan anggaran dasar Perusahaan, sebagai pedoman kerja bagi Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman Komite tersebut diterbitkan berdasarkan SK Dewan Komisaris Nomor: BOC/II/2015-05.

Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi mengatur tugas dan tanggung jawab, wewenang, komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja dalam pelaksanaan tugas, rapat, serta masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Terkait fungsi nominasi:
 - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta Komite-Komite;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta Komite-Komite;

- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta Komite-Komite berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta Komite-Komite; dan
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Terkait fungsi remunerasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Struktur remunerasi;
 - Kebijakan atas remunerasi; dan
 - Besaran atas remunerasi;
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta Komite-Komite.
3. Jika diperlukan, melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Jumlah Anggota, Komposisi, dan Persyaratan Keanggotaan

Komite Nominasi dan Remunerasi setidaknya terdiri dari tiga orang anggota, dengan ketentuan berikut:

1. Satu orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
2. Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - Anggota Dewan Komisaris;
 - Pihak yang berasal dari luar Perusahaan; atau
 - Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi SDM.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi SDM.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dari luar Perusahaan wajib memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama;
2. Memiliki pengalaman terkait nominasi dan/atau remunerasi; dan
3. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Komite lainnya yang dimiliki Perusahaan.

Wewenang

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang untuk:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi yang diperlukan dari Perusahaan;
2. Berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, dan pihak lain; dan

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Perusahaan mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perusahaan. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

- Ketua: Alfonso Napitupulu (Komisaris Independen)
- Anggota:
 - Sunata Tjiterosampurno (Komisaris)
 - Priyambodo

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi disajikan dalam bab Profil Perusahaan (halaman 81).

Latar belakang pendidikan dan keahlian dari masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi disajikan pada Tabel 126.

Masa Jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode jabatan berikutnya. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang menjabat per 31 Desember 2019 dicantumkan pada Tabel 126.

TABEL 126_PROFIL DAN MASA JABATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Nama	Jabatan	Latar Belakang Pendidikan dan Keahlian	Tanggal dan Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan
Alfonso Napitupulu	Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	Hukum, Konsultan Hukum	SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/IV/2015-0081 tanggal 13 April 2015 dan dikukuhkan kembali dengan SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016	2016-2021
Sunata Tjiterosampurno	Komisaris merangkap Anggota	Administrasi Bisnis, Keuangan, Riset Ekuitas, Investment Banking, Audit, Manajemen Risiko, Pemantau Risiko	SK Dewan Komisaris No. BOC/VI/2017-0103 tanggal 2 Juni 2017	2016-2021
Priyambodo	Anggota	Akuntansi, Manajemen SDM	SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/IV/2015-0081 tanggal 13 April 2015 dan dikukuhkan kembali dengan SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016	2016-2021

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Independensi masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dijelaskan dalam Tabel 127.

TABEL 127_INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Pengendali		Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Alfonso Napitupulu	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sunata Tjiterosampurno	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	-	√
Priyambodo	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Kebijakan dan Remunerasi untuk Komite Nominasi dan Remunerasi

Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi; baik secara langsung maupun tidak langsung; dari kegiatan BFI Finance selain penghasilan yang sah. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Dalam melaksanakan fungsi nominasi, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite wajib melakukan prosedur berikut:
 - a. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris;
 - b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris;
 - d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Dalam melaksanakan fungsi remunerasi, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite wajib melakukan prosedur berikut:
 - a. Menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - b. Menyusun kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - c. Menyusun besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

3. Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait kebijakan remunerasi wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi sesuai dengan:
- Remunerasi yang berlaku pada industri;
 - Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan;
 - Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi setidaknya satu kali dalam setahun.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala, paling kurang satu kali dalam empat bulan. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dan salah satunya yang hadir merupakan Ketua Komite.

Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Jika dalam pengambilan keputusan secara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil melalui mekanisme yang diatur

dalam Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan. Risalah rapat tersebut disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang 2019, Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan tiga kali rapat. Hasil rapat dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui rapat dengan Dewan Komisaris. Jadwal rapat dan kehadiran anggota komite dalam rapat disajikan pada Tabel 128, sementara agenda rapat Komite Nominasi dan Remunerasi 2019 disajikan pada Tabel 129.

TABEL 128_JADWAL DAN KEHADIRAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Tanggal Rapat	Alfonso Napitupulu	Sunata Tjiterosampurno	Priyambodo
19 Februari 2019	√	√	√
24 Juli 2019	√	√	√
22 Oktober 2019	√	√	√
Jumlah Kehadiran per Anggota	3	3	3
Persentase Kehadiran per Anggota	100%	100%	100%

TABEL 129_AGENDA RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Tanggal	Agenda Rapat
19 Februari 2019	Pembahasan gaji, tunjangan dan/atau tantiem Dewan Komisaris dan Direksi
24 Juli 2019	Review kebijakan remunerasi yang berlaku bagi karyawan Perusahaan
22 Oktober 2019	Pembahasan anggaran kenaikan gaji dan tunjangan karyawan

Pelatihan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Pelatihan yang diikuti oleh Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di 2019 (Alfonso Napitupulu dan Sunata Tjiterosampurno) dirinci pada Tabel 97, Pelatihan dan Seminar untuk Meningkatkan Kompetensi Dewan Komisaris. Satu anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu Priyambodo, tidak mengikuti pelatihan di 2019.

Sistem Pelaporan Kegiatan

Komite Nominasi dan Remunerasi melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur nominasi dan remunerasi, kepada Dewan Komisaris. Ini merupakan

bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS. Pelaksanaan fungsi terkait nominasi dan remunerasi telah dilaporkan oleh Perusahaan dalam Laporan Tahunan dan pada situs web Perusahaan.

Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi 2019

Komite Nominasi dan Remunerasi pada 2019 melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain, mengevaluasi usulan Direksi terkait penetapan remunerasi bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komite-Komite, untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dasar Pembentukan dan Tugas Pokok

BFI Finance memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan yang berperan sebagai pejabat penghubung (*liaison officer*) dalam memfasilitasi komunikasi yang efektif dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya termasuk investor.

Sesuai dengan POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 35), Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas pelaksanaan GCG, penyusunan laporan manajemen, serta kegiatan terkait kesekretariatan, penanganan hukum, pengelolaan kehumasan (*relations officer*), sistem manajemen mutu, dan sistem manajemen informasi Perusahaan. Setiap informasi yang disampaikan Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi dari BFI Finance.

Sekretaris Perusahaan di BFI Finance dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Corp/CH/L/VII/07-0115 tanggal 9 Juli 2007 dengan mengacu pada POJK 35. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi.

Sekretaris Perusahaan merupakan jabatan perorangan sekaligus penanggung jawab dari unit-unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan, antara lain:

- Departemen Corporate Secretariat, yang dikepalai seorang Head of Corporate Secretariat;
- Departemen Investor Relations (Hubungan Investor), yang dikepalai seorang Head of Investor Relations; dan
- Departemen Corporate Communication & CSR, yang dikepalai seorang Head of Corporate Communication & CSR.

Kedudukan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi. Jabatan Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh salah satu anggota Direksi. Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain.

Apabila terjadi kekosongan posisi Sekretaris Perusahaan, BFI Finance akan menunjuk penggantinya dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan tersebut. Selama periode kekosongan tersebut, jabatan Sekretaris Perusahaan dirangkap oleh seorang anggota Direksi atau individu lain yang ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan sementara, tanpa memperhatikan persyaratan Sekretaris Perusahaan yang diatur dalam POJK 35.

Sepanjang 2019, Sekretaris Perusahaan berdomisili di Indonesia.

Persyaratan Sekretaris Perusahaan

Persyaratan bagi Sekretaris Perusahaan adalah:

- Cakap melakukan perbuatan hukum;
- Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan, dan tata kelola perusahaan;

- Memahami kegiatan usaha Perusahaan;
- Dapat berkomunikasi dengan baik; dan
- Berdomisili di Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, berdasarkan POJK 35, adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan melakukan sosialisasinya kepada Dewan Komisaris, Direksi dan pemangku kepentingan Perusahaan;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan, yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK, BEI, dan lembaga regulator lainnya tepat waktu;
4. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS, termasuk mempersiapkan proses penyelenggaraan (pelaporan rencana RUPS, pengumuman, pemanggilan dan penyampaian hasil RUPS), mempersiapkan materi RUPS (termasuk Laporan Tahunan Perusahaan), dan pelaksanaan RUPS;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program pengenalan terhadap Perusahaan untuk anggota baru Direksi dan Dewan Komisaris serta Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris;

Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan per 31 Desember 2019 dijabat oleh Sudjono. Beliau adalah warga negara Indonesia, lahir pada 1970, usia 49 tahun dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.BOD-BOC/VI/2014-0011 tanggal 24 Juni 2014. Beliau adalah anggota Direksi yang menjabat sebagai Direktur Keuangan. Profil beliau disajikan dalam bab Profil Perusahaan bagian Profil Direksi (halaman 75).

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Sepanjang 2019, Sekretaris Perusahaan yang dirangkap oleh Direktur Keuangan, Sudjono, telah mengikuti seminar dan pelatihan sebagaimana diungkapkan pada Tabel 104.

Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan 2019

Sepanjang 2019, Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas dan tanggung jawab berikut dengan baik:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai perkembangan pasar modal, termasuk peraturan-peraturan baru di bidang pasar modal yang dikeluarkan oleh OJK dan BEI;
2. Menjaga hubungan baik dengan Otoritas Pasar Modal dan mempersiapkan laporan-laporan mengenai pengungkapan keterbukaan informasi Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Menyediakan informasi Perusahaan secara transparan, yang meliputi laporan keterbukaan informasi terkait informasi RUPS, laporan keuangan berkala, laporan tahunan, laporan keberlanjutan, paparan publik, laporan registrasi saham, laporan insidental terkait rencana pengembangan baru, serta memberikan informasi yang diperlukan pemegang saham;
4. Mengirimkan pemberitahuan dan mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan penyelenggaraan RUPS dan mempublikasikan hasil keputusan rapat;
5. Melakukan koordinasi dan administrasi pencatatan kepemilikan saham dan tindakan korporasi;
6. Membuat buku Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan, baik secara terpisah maupun terintegrasi dalam satu buku yang disebut Laporan Tahunan Terintegrasi;
7. Melaksanakan berbagai program dan kegiatan CSR bersifat pengembangan komunitas di lingkup eksternal dan internal Perusahaan melalui keberadaan Unit CSR di bawah koordinasi *Departemen Corporate Communication & CSR*;
8. Menjaga dan memelihara hubungan dengan media dan sarana informasi lainnya;
9. Mengoordinasikan rapat-rapat Perusahaan, seperti RUPS, rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, rapat Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, dan paparan publik;
10. Mencatat risalah rapat-rapat Perusahaan, seperti RUPS, rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, rapat Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, dan paparan publik;
11. Mengoordinasikan aksi korporasi Perusahaan, antara lain:
 - Pembelian kembali saham Perusahaan (*stock buyback*);
 - Penerbitan obligasi;
12. Menyampaikan 43 kali korespondensi Perusahaan ke OJK dan 35 kali ke BEI.

Dasar Pembentukan dan Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (POJK 56), Audit Internal di Perusahaan berfungsi memberikan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi independen dan objektif secara internal bagi Perusahaan.

Piagam Audit Internal

Departemen Audit Internal mempunyai Piagam Audit Internal yang ditetapkan pada 1 Maret 2009. Piagam Audit Internal memberikan pedoman kerja bagi Departemen Audit Internal dalam melaksanakan tugas dan amanat dari Direksi. Hal-hal lainnya yang menyangkut aspek teknis, operasional, dan etis dari setiap anggota Departemen Audit Internal juga dibahas dalam Piagam Audit Internal.

Struktur dan Kedudukan

Perusahaan membentuk Departemen Audit Internal pada 31 Maret 2010, berdasarkan Surat Pengangkatan Anggota Audit Internal Perusahaan. Departemen Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan mempunyai akses langsung kepada Komite Audit untuk menjamin pelaksanaan tugasnya secara independen dan memfasilitasi proses konsultasi rencana proses pemeriksaan.

Dalam struktur tata kelola perusahaan di BFI Finance, Departemen Audit Internal bertindak sebagai badan independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menyempurnakan proses-proses operasional Perusahaan. Departemen Audit Internal berkoordinasi dan bekerja sama dengan Komite Audit, yang secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Departemen Audit

Internal dipimpin oleh Kepala Departemen dan setidaknya harus beranggotakan sepuluh orang, yang seluruhnya berasal dari internal Perusahaan. Dengan demikian, semua staf Departemen Audit Internal tunduk kepada peraturan Perusahaan yang berlaku, termasuk prosedur pengangkatan dan pemberhentian serta penilaian kinerja anggota Audit Internal.

Department Head Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris. Jika Department Head Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, maka Presiden Direktur dapat memberhentikan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Auditor internal Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Department Head Audit Internal.

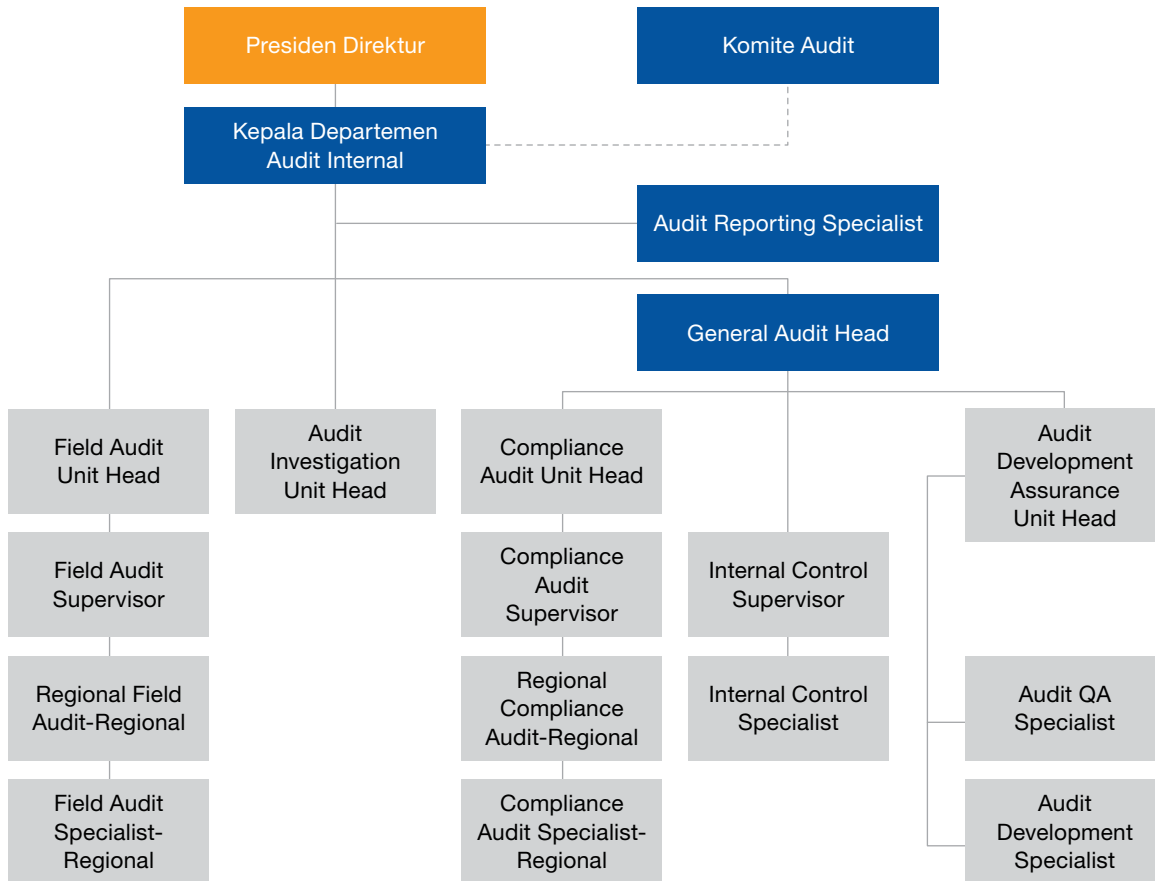
Jumlah pegawai (auditor internal) pada Departemen Audit Internal per 31 Desember 2019 adalah 199 orang, yang terdiri dari:

- Audit Umum: 39 orang;
- Audit Lapangan: 141 orang; dan
- Kantor Pusat: 19 orang.

Perusahaan mengikutsertakan auditor internalnya dalam program-program pelatihan dan pengembangan kompetensi, untuk meningkatkan kinerja masing-masing dan juga Departemen Audit Internal. Selama 2019, diselenggarakan sejumlah pelatihan peningkatan kompetensi, termasuk pelatihan tingkat lanjut untuk auditor, *Management Trainee Program (MTP)*, *Leadership Development Program (LDP)*, dan asesmen bagi auditor. Hingga akhir 2019, belum terdapat auditor internal yang telah memiliki sertifikasi atau kualifikasi keprofesian di bidang audit internal.

Pada 2019, struktur organisasi Departemen Audit Internal mengalami penyempurnaan dengan penambahan fungsi kerja baru yaitu Fraud Investigator Specialist.

GRAFIK 21_STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL



Tugas dan Tanggung Jawab

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal, tugas dan tanggung jawab fungsi Audit Internal meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai kebijakan Perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal;
9. Melakukan pemeriksaan/audit khusus jika diperlukan; dan
10. Menyusun peringkat hasil audit per kantor cabang untuk menilai tingkat kepatuhan masing-masing kantor cabang terhadap peraturan, kebijakan, dan ketentuan lainnya.

Departemen Audit Internal dalam menjalankan tugas-tugasnya berwenang untuk:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Standar Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal

Dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, Departemen Audit Internal secara independen menjalankan kegiatan audit di seluruh kantor cabang dan kantor pusat. Audit Internal mengaudit aspek keuangan dan memantau kepatuhan pihak yang diaudit terhadap kebijakan dan SOP Perusahaan, serta senantiasa mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan.

Proses audit internal dilakukan dengan konsep Audit Berbasis Risiko, dan difokuskan pada bidang-bidang dengan risiko terbesar sebagaimana ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko, sesuai masukan dari Komite Audit. Departemen Audit Internal melaporkan temuan dari semua kejadian merugikan kepada Komite Manajemen Risiko dan Komite Audit.

Departemen Audit Internal menjunjung tinggi independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Departemen Audit Internal merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan tugas auditnya secara bebas dan mandiri, tanpa dipengaruhi kepentingan manapun sesuai dengan pertimbangan profesionalisme dan standar audit yang berlaku serta berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Untuk memastikan independensi dan objektivitasnya, seluruh anggota Departemen Audit Internal tidak dapat menerima penugasan dan mengambil tanggung jawab operasional pada unit kerja atau fungsi bisnis. Apabila menjumpai kondisi yang berpotensi mengganggu independensi dan objektivitasnya, Departemen Audit Internal wajib melaporkannya kepada Presiden Direktur.

Kualifikasi Audit Internal

Secara umum, kualifikasi bagi anggota Departemen Audit Internal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya meliputi:

- Riset informasi mengenai ketentuan dan peraturan Perusahaan terkini terkait dengan ruang lingkup pemeriksaan dan aplikasinya;
 - Koordinasi dengan departemen dan unit kerja lain di Perusahaan untuk memperoleh jawaban, penjelasan dan masukan terhadap suatu masalah atau dugaan temuan;
 - Penyusunan laporan hasil audit, melakukan analisa temuan dan memberikan rekomendasi untuk solusi perbaikan serta sanksi yang diperlukan; dan
 - Pelaporan kepada Kepala Departemen Audit Internal mengenai temuan yang memerlukan penanganan segera.
- Kualifikasi bagi pemegang jabatan Department Head Audit Internal adalah:
- Mampu melakukan perencanaan dan pemantauan terhadap produktivitas Departemen Audit Internal;
 - Mampu menerapkan analisis dalam melakukan evaluasi dan memastikan tersedianya laporan audit yang berkualitas untuk dipertanggungjawabkan kepada Komite Audit dan Presiden Direktur; dan
 - Mampu memberikan rekomendasi terhadap hasil temuan audit.
- Perencanaan, penjadwalan dan pelaksanaan audit tahunan terhadap kinerja dan data-data pada sistem dan operasional kantor pusat dan kantor cabang;
 - Pengembangan sistem kerja, prosedur dan standar pelayanan dari masing-masing unit di Departemen Audit Internal;
 - Analisis cara kerja pengendalian internal di kantor pusat dan kantor cabang;

Kode Etik Audit Internal

1. Integritas

Auditor Internal menciptakan kepercayaan sehingga melahirkan keyakinan atas kesimpulan yang diambilnya.

2. Objektivitas

Auditor Internal menunjukkan tingkat objektivitas dan profesionalisme tertinggi dalam pengambilan, evaluasi, dan penyebaran informasi mengenai aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Auditor Internal melakukan asesmen yang berimbang atas seluruh kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain dalam membuat suatu kesimpulan.

3. Kerahasiaan

Auditor Internal menghargai nilai dan kepemilikan atas informasi dan data-data yang diterima dan tidak menyebarkan hal tersebut tanpa persetujuan dari pihak yang memiliki otoritas.

4. Kompetensi

Auditor Internal memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam menjalankan fungsinya.

Profil Head of Internal Audit



Fledy Rizmara

Warga Negara: Indonesia

Usia: 39

Domisili: Jakarta, DKI Jakarta

Beliau menjabat sejak 2014, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. SK/BOD/VII/14-009 tanggal 16 Juli 2014. Beliau berkarier di BFI Finance sejak 2005 sebagai Audit Staff, kemudian menjadi Audit Team Leader pada 2007, Audit Supervisor pada 2010, General Audit Unit Head pada Maret 2011, dan Field Audit Unit Head pada Agustus 2011. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Islam Indonesia (UII) pada 2004. Aktif sebagai *trainer* berbagai program pelatihan bagi karyawan Perusahaan sejak 2009, beliau juga pernah mengikuti program-program pengembangan kompetensi antara lain:

- Prinsip Dasar Audit Internal oleh BFI Finance (internal)
- Teknik Wawancara oleh BFI Finance (internal)
- Deteksi *Fraud* oleh BFI Finance (internal)
- *The Most Powerful Rules in Management* oleh ACADEMIA Education & Training
- *Proven Techniques Build Successful Teams* oleh ACADEMIA Education & Training
- *Middle-Management Development Program (MMDP) Batch 1* diselenggarakan dengan kerja sama BFI Finance dan Prasetya Mulya Business School
- *Know Your Customer* oleh BFI Finance (internal)
- *Problem Solving & Decision Making* oleh BFI Finance (internal)
- *Situational Leadership Training* oleh BFI Finance (internal)
- *Fraud Mitigation & Investigation Training* oleh BFI Finance (internal)
- *Training of Basic Certification Program*-program pelatihan oleh APPI untuk sertifikasi manajerial berupa Sertifikasi Dasar Pembiayaan dari PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI)
- Sosialisasi Pelatihan *Fraud Investigation*

Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal 2019 dan Tindak Lanjut atas Temuan Audit

Secara umum, Departemen Audit Internal secara independen dan objektif menjalankan kegiatan audit di seluruh kantor pusat ataupun cabang, yang meliputi audit keuangan, audit kepatuhan terhadap kebijakan dan SOP, dan evaluasi efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan.

Di 2019, proses audit internal di Perusahaan diperkaya oleh masukan dari Departemen Manajemen Risiko, sehingga proses audit internal menjadi lebih bersifat preventif, alih-alih korektif,

terhadap kasus-kasus yang sering dijumpai dalam audit. Masukan yang dimaksud antara lain hasil peringkat (*scoring*) kantor cabang di bidang manajemen risiko. Dengan demikian, mitigasi risiko dan penyelesaian masalah yang berakar dari faktor-faktor risiko Perusahaan menjadi lebih efektif.

Kegiatan Audit Internal pada 2019 meliputi:

- Penyusunan program kerja audit tahunan 2019 dan evaluasi realisasi pelaksanaan program kerja 2018;
- Audit atas unit kerja di kantor pusat dan cabang-cabang;
- Pemantauan pelaksanaan rekomendasi audit yang telah disepakati; dan

- Pelaksanaan rapat rutin dengan Komite Audit untuk membahas program kerja Audit Internal, dan hal-hal terkait temuan-temuan penting yang memerlukan perhatian manajemen sesuai dengan fungsi pengawasan Komite Audit.

Di 2019, Audit Internal melaksanakan 258 audit di 204 cabang, serta 4 pekerjaan audit di kantor pusat. Proses audit internal di 2019 berlangsung efektif. Manajemen telah menanggapi temuan-temuan audit internal, dan pada kasus penipuan yang terungkap, Perusahaan menerapkan penalti secara bertahap, mulai dari penggantian atas kerugian Perusahaan hingga pemutusan hubungan kerja. Jumlah nilai kerugian finansial Perusahaan di 2019 kurang dari 0,5% dari jumlah pendapatannya.

AUDIT EKSTERNAL

Audit eksternal atas laporan keuangan Perusahaan setiap tahunnya dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Perusahaan yakni Auditor Eksternal, dalam rangka memberikan pemastian bahwa laporan keuangan Perusahaan telah disajikan secara baik dan benar sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.7-No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sesuai keputusan RUPST 28 Mei 2019, Perusahaan menunjuk KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, anggota jaringan global BDO International Limited, sebagai Auditor Eksternal untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2019. RUPS telah memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya bagi KAP tersebut.

Penunjukan KAP tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Komite Audit telah meninjau dan mengkaji calon KAP yang akan digunakan, dan merekomendasikannya kepada Dewan Komisaris, yang telah mendapat kuasa dari RUPS untuk menunjuk KAP yang akan digunakan.

Auditor Eksternal yang ditunjuk Perusahaan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, ataupun pemegang saham pengendali Perusahaan, yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan dan mempengaruhi independensi akuntan publik serta para auditornya. Auditor Eksternal melaksanakan tugasnya secara independen sesuai standar profesional akuntan publik, perjanjian kerja, serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Biaya Jasa Audit

Biaya jasa audit profesional untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan tahun buku 2019 adalah Rp440 juta.

KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan juga memberikan jasa lain kepada Perusahaan, yaitu melakukan tinjauan atas laporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir 30 September 2019 dengan biaya jasa sebesar Rp302,5 juta.

Komunikasi Auditor Eksternal dan Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Auditor Eksternal berkomunikasi dengan Komite Audit melalui rapat-rapat Komite Audit dengan Auditor Eksternal. Hasil rapat dilaporkan oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris. Selama 2019, dilakukan dua kali rapat antara Komite Audit dan Auditor Eksternal. Pokok pembahasan dalam rapat-rapat ini beserta hal-hal yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris telah disampaikan dalam rapat berikutnya antara Komite Audit dengan Dewan Komisaris.

Pembahasan yang dilakukan dalam rapat-rapat Komite Audit dengan Auditor Eksternal meliputi:

1. Perencanaan audit, termasuk:
 - a. Susunan tim Auditor Eksternal;
 - b. Pendekatan tata cara dan kebijakan audit;
 - c. Jadwal pelaksanaan dan penyampaian laporan hasil audit;
 - d. Asumsi-asumsi yang akan digunakan dalam audit;
2. Hasil temuan audit;
3. Rekomendasi auditor;
4. Draft laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019; dan
5. Pernyataan opini Auditor Eksternal terhadap laporan keuangan hasil audit.

Laporan hasil audit atas laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 akan disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam RUPS yang akan diselenggarakan di 2020.

Riwayat Penunjukan KAP

Riwayat penunjukan KAP sebagai Auditor Eksternal bagi Perusahaan selama lima tahun ke belakang (2015–2019) adalah sebagai berikut:

TABEL 130_RIWAYAT PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Periode	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan	Opini
2015	Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan	Santanu Chandra	Wajar Tanpa Pengecualian
2016	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan	Asep Ugi Sugianto	Wajar Tanpa Pengecualian
2017	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan	Fahmi	Wajar Tanpa Pengecualian
2018	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan	Susanto Bong	Wajar Tanpa Modifikasi
2019	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan	Susanto Bong	Wajar Tanpa Modifikasi

Sistem pengendalian internal di BFI Finance merupakan bagian dari proses bisnis yang terintegrasi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan Perusahaan taat terhadap aturan dan mendukung pencapaian tujuan Perusahaan. Sistem pengendalian internal membantu Perusahaan memastikan kegiatan bisnisnya berjalan efektif dan efisien, laporan keuangannya akurat dan andal, serta asetnya dipelihara dengan bijak. Implementasi sistem pengendalian internal di Perusahaan tercermin dari pelaporan keuangan dan operasional bisnis Perusahaan yang senantiasa sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian Finansial dan Operasional

Dalam pengendalian aspek keuangan, Perusahaan memisahkan fungsi pencatatan dengan pengeluaran *cash*. Selain itu, Perusahaan menjalankan proses persetujuan pengeluaran anggaran secara berjenjang melalui proses *check and re-check*.

Dalam pengendalian aspek operasional, Perusahaan menilai tingkat kepatuhan setiap fungsi terhadap kebijakan dan prosedur yang relevan. Implementasinya antara lain diwujudkan dalam diberlakukannya Pedoman Prinsip-Prinsip Berusaha, pedoman operasional, prosedur, petunjuk pelaksanaan, instruksi kerja, dan dokumen acuan Perusahaan lainnya.

Komponen Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal di Perusahaan terdiri dari komponen-komponen berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Direksi dan seluruh karyawan harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan Perusahaan yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian internal dan manajemen yang sehat.
2. Penilaian Risiko

Masing-masing unit kerja harus mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai pengelolaan risiko yang relevan dan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasionalnya, baik dari dalam maupun luar Perusahaan.
3. Aktivitas Pengendalian

Pengendalian diterapkan pada pelaksanaan kegiatan Perusahaan di setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain melalui pengaturan mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan pengamanan aset Perusahaan.
4. Sistem Informasi dan Komunikasi

Perusahaan menyusun laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas, dan objektif.
5. Monitoring

Kegiatan monitoring dilakukan untuk menilai kualitas sistem pengendalian internal, termasuk fungsi Audit Internal pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan.

Secara keseluruhan, Perusahaan menyelenggarakan sistem pengendalian berjenjang yang meliputi organ tata kelola Perusahaan, sebagai berikut:

- Dewan Komisaris: melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan terkait proses pengelolaan Perusahaan, penyusunan laporan keuangan, serta pengelolaan risiko dengan menerapkan prinsip kehati-hatian;
- Direksi: menerapkan kebijakan dan prosedur kerja sesuai peraturan yang berlaku, antara lain dengan pengelolaan manajemen risiko, penetapan rencana strategis Perusahaan, serta pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing anggota Direksi;
- Audit Internal: melaksanakan audit dan senantiasa meningkatkan kinerja pengendalian internal dalam berbagai kegiatan operasional dan keuangan Perusahaan;
- Direksi menindaklanjuti segala temuan audit berdasarkan laporan hasil Audit Internal; dan
- Komite Audit: menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Audit Internal agar dapat memberikan rekomendasi penyempurnaan Sistem Pengendalian Internal. Komite Audit juga memastikan telah terdapat prosedur peninjauan atas informasi yang dikeluarkan Perusahaan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Evaluasi terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Melalui Departemen Audit Internal, Perusahaan mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan per 31 Desember 2019. Departemen Audit Internal menggunakan kriteria evaluasi yang ditetapkan Komite Audit.

Hasil evaluasi atas sistem pengendalian internal memuat rekomendasi hasil audit internal dan eksternal, yang dapat menjadi masukan bagi manajemen dalam mengambil langkah perbaikan atau menyempurnakan sistem pengendalian internal ataupun kebijakan (perubahan prosedur, pedoman kerja, dan lain-lain), sehingga pada akhirnya akan memperkuat kondisi dan mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.

Dewan Komisaris dan Direksi menyimpulkan bahwa hingga 31 Desember 2019, sistem pengendalian internal Perusahaan atas pelaporan keuangannya telah berjalan efektif.

BFI Finance menerapkan sistem manajemen risiko yang komprehensif untuk menjamin keberlangsungan bisnisnya, dengan mengelola Setiap faktor risiko dalam kegiatan operasionalnya. Sistem manajemen risiko ini juga dievaluasi efektivitasnya dan terus dilengkapi dengan fitur dan standar terbaru, untuk pengelolaan risiko yang lebih baik.

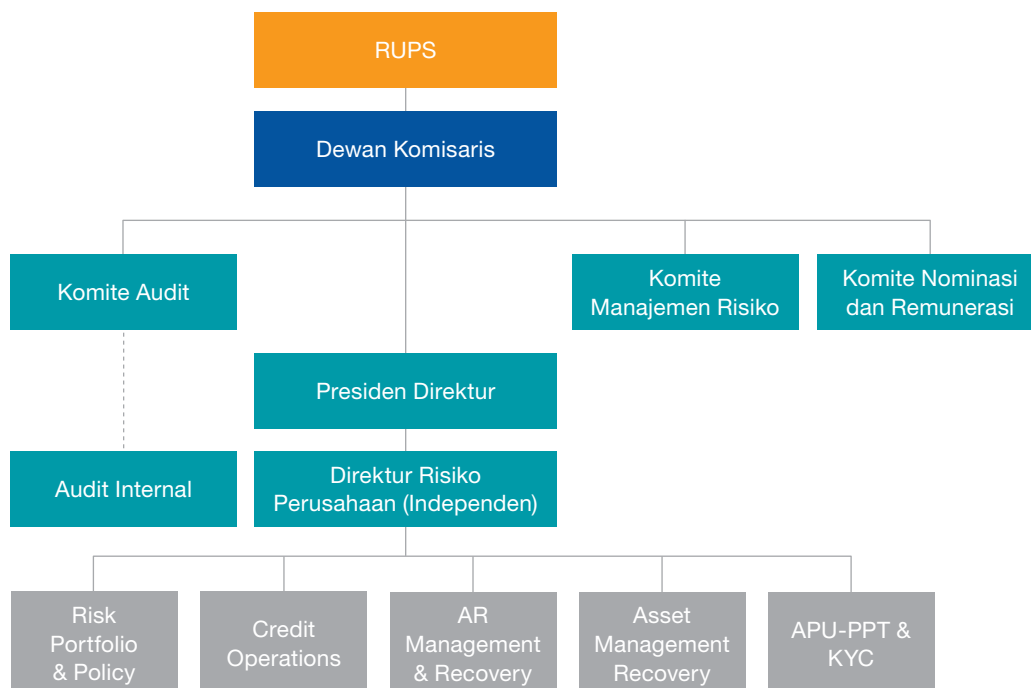
Pada 2019, sistem manajemen risiko BFI Finance diperkuat dengan adanya unit baru, yaitu Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dan Know Your Customer (KYC), sesuai dengan POJK 23/2019. Unit ini berfungsi mengelola risiko terkait APU-PPT dan KYC dengan menjalankan pemantauan intensif dan menyajikan laporan profil risiko terkait, selain juga bekerja sama dengan pihak ketiga termasuk otoritas pemerintahan dan mengelola pelatihan karyawan dengan pemahaman mengenai nasabah dan APU-PPT.

Manajemen risiko di Perusahaan mengacu pada POJK 1/2015, SEOJK 10/2016, SEOJK 15/2016, dan POJK 23/2019, mencakup hal-hal berikut:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris aktif menjalankan manajemen risiko sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Manajemen Risiko yang bertanggung jawab menyetujui kerangka kerja dan kebijakan risiko Perusahaan. Dewan Komisaris memberi wewenang kepada Direksi untuk menjalankan kegiatan bisnis sesuai profil risiko dan *risk appetite* Perusahaan.

GRAFIK 22_STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO



2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko

Perusahaan memiliki kebijakan, prosedur, dan limit terkait risiko secara rutin disesuaikan dengan kegiatan usaha, strategi bisnis, dan regulasi terkini. Kebijakan ini mencakup otorisasi transaksi kredit dan pencadangan kerugian piutang.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko

Terdapat mekanisme dan struktur yang memadai untuk mengelola risiko, mulai dari identifikasi hingga mitigasinya. Mekanisme ini dijalankan secara menyeluruh, sejak penetapan profil konsumen hingga penyelesaian kewajiban konsumen.

4. Sistem informasi manajemen risiko

Sistem manajemen risiko Perusahaan terintegrasi dengan

basis data yang kuat serta prosedur internal yang memadai untuk mendukung kualitas manajemen risiko dan pelaporan kinerja portofolio.

5. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Perusahaan menerapkan pendekatan Tiga Lini Pertahanan untuk sistem pengendalian internalnya: yakni fungsi pengawasan, pengendalian, dan pengelolaan.

- Pertahanan Lapis Pertama
Unit-unit bisnis dan operasional bertanggung jawab mengidentifikasi, menilai, mengawasi, dan menanggulangi risiko. Tanggung jawab utamanya adalah mengelola eksposur risiko harian, sesuai dengan target pasar, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan.

- Pertahanan Lapis Kedua
Direktorat Manajemen Risiko, Departemen Pengawasan Keuangan, dan Departemen Hukum dan Litigasi mengawasi secara independen. Direktorat Manajemen Risiko bertanggung jawab mengkaji dan menyetujui strategi dan tingkat risiko yang dapat diterima, serta bekerja sama dengan unit-unit bisnis dan operasional dalam memastikan pengelolaan risiko sesuai batasan yang ditetapkan. Departemen Hukum dan Litigasi mengelola risiko kepatuhan terkait hukum dan bertanggung jawab memastikan bahwa peraturan yang berlaku telah disosialisasikan dan dipatuhi seluruh unit terkait.
- Pertahanan Lapis Ketiga
Departemen Audit Internal melakukan pengujian dan audit secara independen terhadap setiap proses yang dijalankan unit-unit pada lapis pertama dan kedua.

GRAFIK 23_TIGA LINI PERTAHANAN DALAM MANAJEMEN RISIKO



Kinerja Manajemen Risiko 2019

Sepanjang 2019, penguatan fungsi manajemen risiko melibatkan inisiatif antara lain:

- Peningkatan segmentasi aplikasi *credit scoring* untuk mengklasifikasikan pelanggan berdasarkan tingkat risiko;
- Penerapan *Behaviour Scoring (B-Score)* dan metode penanganan risiko pelanggan yang terkait; dan
- Persiapan perubahan model perhitungan pencadangan kerugian sesuai dengan aturan PSAK 71.

Matriks Risiko 2019

BFI Finance menggolongkan berbagai risiko yang dihadapinya berdasarkan POJK 1/2015, dan telah mengembangkan matriks risiko yang mencantumkan potensi dampak dan mitigasi dari setiap faktor risiko. Profil risiko Perusahaan di 2019 sama dengan tahun-tahun sebelumnya, mengingat natur bisnis Perusahaan juga tidak berubah selama periode tersebut.

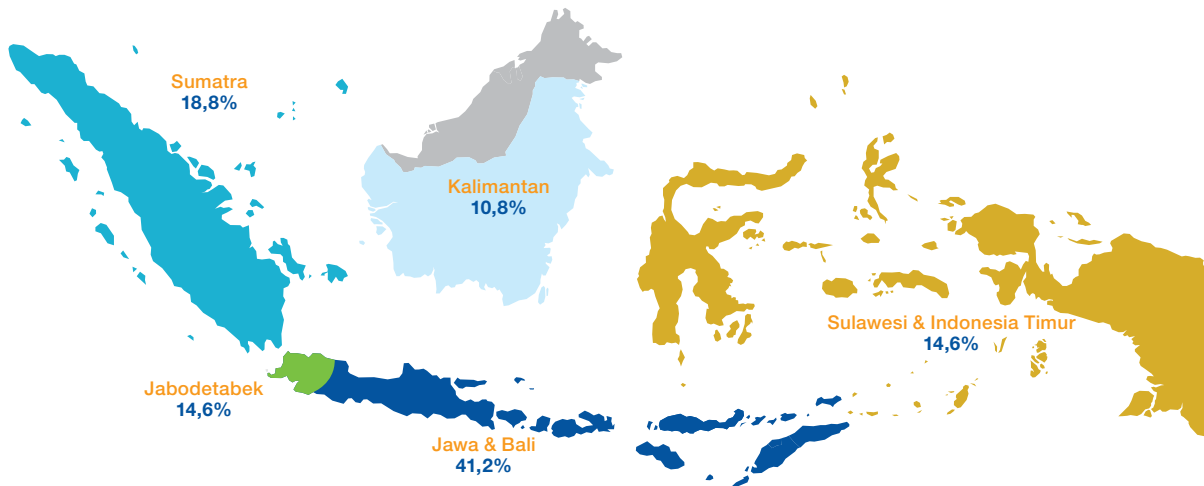
TABEL 131_MATRIKS RISIKO 2019

No.	Jenis Risiko	Sumber	Aspek yang Berpotensi Terdampak	Mitigasi	Peringkat Risiko
1.	Risiko Strategi	Kegagalan penetapan strategi yang tepat untuk mencapai sasaran utama	Seluruh aspek bisnis dan operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi 2. Evaluasi dan penyesuaian rencana strategis secara berkala 	Sedang-Rendah
2.	Risiko Operasional	Kegagalan proses di lingkungan internal dan eksternal; gangguan operasional dan keuangan; isu regulasi; kecurangan internal ataupun eksternal	Produk dan jasa; proses bisnis; kegiatan operasional; sistem dan infrastruktur; reputasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penerapan SOP untuk setiap proses kerja untuk menghindari penyimpangan 2. Keberadaan unit Operational Risk Management (ORM), Risk Quality Management, dan Operational Risk Monitoring 3. Keberadaan <i>Disaster Recovery Plan</i> dan <i>Disaster Recovery Center</i> 4. Pengawasan oleh Audit Internal 5. Program kesadaran dan pencegahan kecurangan yang komprehensif 6. Indikator peringatan dini 	Rendah-Sedang
3.	Risiko Aset dan Liabilitas	Kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas	Kondisi keuangan; reputasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan strategi dan kebijakan terkait aset dan liabilitas oleh Departemen Keuangan dan Treasuri 2. Pengumpulan dan analisis data dan indikator penting 3. Manajemen likuiditas, <i>gap</i>, dan <i>pricing</i> 	Rendah-Sedang
4.	Risiko Kepengurusan	Kegagalan untuk memelihara komposisi terbaik, kompetensi, dan integritas dari pengurus	Seluruh aspek bisnis dan operasional	Pembentukan komposisi kepengurusan yang terdiri dari para profesional yang kompeten di bidang-bidang yang relevan dalam industri pembiayaan	Rendah

TABEL 131_MATRIKS RISIKO 2019

No.	Jenis Risiko	Sumber	Aspek yang Berpotensi Terdampak	Mitigasi	Peringkat Risiko
5.	Risiko Tata Kelola	Kegagalan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola; ketidaktepatan gaya manajemen; kecurangan dan perilaku tidak terpuji	Seluruh aspek bisnis dan operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi informasi 2. Akuntabilitas setiap pihak yang terkait atas kinerja 3. Pertanggungjawaban setiap karyawan sesuai fungsi dan jabatan 4. Independensi antara sesama karyawan 5. Kesetaraan dan kewajaran dalam menjaga kepentingan pemegang saham dan semua pemangku kepentingan lainnya 	Rendah
6.	Risiko Pendanaan	Ketidalcukupan dana atau modal; kurangnya akses tambahan dana atau modal; keterbatasan sumber-sumber pendanaan	Kegiatan operasional penyaluran pembiayaan baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan oleh Komite Manajemen Risiko, Direksi, dan Departemen Treasury & Finance 2. Analisis kesenjangan likuiditas 3. Diversifikasi sumber dana 4. Pengelolaan arus kas internal secara bijak 5. Pengelolaan eksposur terhadap mata uang asing 6. Pengelolaan eksposur terhadap suku bunga melalui proporsi pendanaan yang tepat 	Rendah
7.	Risiko Pembiayaan (Kredit)	Kegagalan peminjam untuk memenuhi kewajiban terhadap Perusahaan; perubahan faktor-faktor eksternal	Kondisi keuangan; reputasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan kebijakan dan prosedur penentuan target pasar, persetujuan penerimaan kredit, tingkat bunga, pembatasan limit dan eksposur 2. Manajemen penagihan 3. Penerapan MIS untuk mengukur kinerja portofolio 4. Pengenalan masalah dan penyelesaian masalah secara cepat dan tepat 5. <i>Stress test</i> dan sistem deteksi dini 6. Kebijakan diversifikasi portofolio dan basis konsumen 7. Pencadangan kerugian pinjaman sesuai PSAK 55 	Rendah

GRAFIK 24_DIVERSIFIKASI PEMBIAYAAN BERDASARKAN PIUTANG YANG DIKELOLA



Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko 2019

Profil risiko Perusahaan untuk 2019 berada pada kategori Risiko Rendah (*Low Risk*), berdasarkan penilaian sendiri yang dilakukan sesuai POJK 10/2016. Profil risiko Perusahaan disampaikan setiap triwulan kepada Komite Manajemen Risiko untuk ditindaklanjuti.

Perusahaan memiliki struktur manajemen risiko yang memadai, dengan adanya Direktorat Manajemen Risiko yang bertanggung jawab menganalisis portofolio risiko, menjaga kualitas kredit, menjaga kualitas aset hingga *recovery*; fungsi Audit Internal yang independen melakukan pengawasan dan evaluasi proses operasional; serta Komite Manajemen Risiko dan Komite Audit, yang melakukan pengawasan independen secara rutin. Dengan demikian, sistem manajemen risiko BFI Finance berjalan efektif di 2019.

Fokus & Rencana Pengembangan Manajemen Risiko 2020

Di 2020, BFI Finance akan memperkuat kinerja sistem manajemen risikonya dengan:

- Merumuskan ulang profil risiko untuk dapat mengevaluasi risiko inheren secara lebih baik;
- Mengoptimalkan pengelolaan risiko operasional sebagai bagian risiko utama, antara lain dengan menguji rencana keberlangsungan usaha secara berkala; dan
- Meningkatkan kemampuan analitik dengan manajemen data yang lebih baik.

Perusahaan menghadapi 63 kasus hukum di wilayah operasionalnya, di mana 4 kasus telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap di 2019, dan 59 kasus masih dalam proses penyelesaian. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 132.

TABEL 132_KASUS HUKUM 2019

No.	Nomor Perkara	Subjek Hukum	Status Perkara
1.	Perkara No. 120/G/2018/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.	PT Aryaputra Teguharta (APT) selaku Penggugat melawan: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) selaku Tergugat; PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) mengajukan diri selaku Tergugat II Intervensi. 	Pada 20 November 2019, BFI Finance dan Ongko Group (APT dan Ongko Multicorpora atau OM) sepakat mencabut, mengakhiri, dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi secara penuh dan final dengan cara damai; baik atas perkara yang ada sekarang maupun yang mungkin ada di kemudian hari; termasuk segala perselisihan yang berkaitan dengan Putusan PK 240, yaitu Perkara No. 120/G/2018/PTUN-JKT di PTUN Jakarta dan tiga perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> Perkara No. 521/Pdt.G/2018/PN.Jkt. Pst; Perkara No. 527/Pdt.G/2018/PN.Jkt. Pst; dan Perkara No. 545/Pdt.G/2018/PN.Jkt. Pst.
2.	Perkara No. 521/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	APT selaku Penggugat melawan BFI Finance dan Direksi BFI Finance yang menjabat pada saat itu (Francis Lay Sioe Ho, Yan Peter Wangkar, dan Cornelius Henry Kho) selaku Tergugat, dengan tuntutan, antara lain, pembayaran uang paksa (<i>dwangsom</i>) karena belum mengembalikan atau menyerahkan saham-saham APT yang dihitung sampai dengan tanggal gugatan pada 19 September 2018 sebesar Rp80.360.000.000,00.	Perdamaian tersebut dilakukan dengan penandatanganan Kesepakatan Perdamaian oleh BFI Finance dan APT pada 20 November 2019, dan kemudian dikuatkan oleh Putusan Perdamaian tanggal 27 November 2019 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terhadap Perkara Tata Usaha Negara (TUN), perkara tersebut telah memperoleh Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia No. 368 K/TUN/2019 dan APT telah memberitahukan kepada MA, PTUN Jakarta dan Kemenkumham RI melalui surat tanggal 20 November 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa APT menerima dan melepaskan haknya untuk mengajukan upaya hukum lanjutan apapun, termasuk upaya hukum luar biasa, berupa Peninjauan Kembali atas Putusan MA No. 368 K/TUN/2019 tersebut.

TABEL 132_KASUS HUKUM 2019

No.	Nomor Perkara	Subjek Hukum	Status Perkara
3.	Perkara No. 527/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	<p>APT selaku Penggugat melawan:</p> <ul style="list-style-type: none"> BFI Finance dan Direksi BFI Finance yang menjabat pada saat ini (Francis Lay Sioe Ho, Sudjono, Sutadi, Sigit Hendra Gunawan, dan Andrew Adiwijanto), Direksi BFI Finance yang menjabat pada saat itu (Cornellius Henry Kho dan Yan Peter Wangkar), Harry Jesus Rodriquez Palmer (mantan Komisararis BFI Finance), Notaris BFI Finance (Aulia Taufani, S.H., Fathiah Helmi, S.H., dan Herna Gunawan, S.H.), yang seluruhnya selaku Tergugat; Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Sirca Datapro Perdana, ketiganya selaku Turut Tergugat; <p>dengan tuntutan, antara lain, pembayaran dividen tahun buku 2002-2017 sebesar Rp644.814.929.646,00, bunga sebesar Rp133.930.161.542,00, ganti rugi immaterial karena tidak membayarkan dividen sebesar Rp500.000.000.000,00, dan pembayaran bunga sebesar 6% per tahun dari sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan pembayaran dimaksud.</p>	<p>Pada 20 November 2019, BFI Finance dan Ongko Group (APT dan Ongko Multicorpora atau OM) sepakat mencabut, mengakhiri, dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi secara penuh dan final dengan cara damai; baik atas perkara yang ada sekarang maupun yang mungkin ada di kemudian hari; termasuk segala perselisihan yang berkaitan dengan Putusan PK 240, yaitu Perkara No. 120/G/2018/PTUN-JKT di PTUN Jakarta dan tiga perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkara No. 521/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst; Perkara No. 527/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst; dan Perkara No. 545/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. <p>Perdamaian tersebut dilakukan dengan penandatanganan Kesepakatan Perdamaian oleh BFI Finance dan APT pada 20 November 2019, dan kemudian dikuatkan oleh Putusan Perdamaian tanggal 27 November 2019 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.</p> <p>Terhadap Perkara Tata Usaha Negara (TUN), perkara tersebut telah memperoleh Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia No. 368 K/TUN/2019 dan APT telah memberitahukan kepada MA, PTUN Jakarta dan Kemenkumham RI melalui surat tanggal 20 November 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa APT menerima dan melepaskan haknya untuk mengajukan upaya hukum lanjutan apapun, termasuk upaya hukum luar biasa, berupa Peninjauan Kembali atas Putusan MA No. 368 K/TUN/2019 tersebut.</p>
4.	Perkara No. 545/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	<p>APT selaku Penggugat melawan:</p> <ul style="list-style-type: none"> BFI Finance, Garibaldi Thohir (Boy Thohir), Trinugraha Capital & Co SCA, TPG Capital, Northstar Group Pte. Ltd., Compass Banca SPA, Mediobanca SPA, OJK, BEI (seluruhnya selaku Tergugat); PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, PT KSEI, PT Sirca Datapro Perdana (ketiganya selaku Turut Tergugat); <p>dengan tuntutan, antara lain, pengembalian dan penyerahan 32,32% saham BFI Finance kepada APT, serta pembatalan transaksi jual-beli saham yang dibuat oleh Trinugraha Capital & Co SCA dengan Compass Banca SPA dan pihak ketiga lainnya.</p>	

TABEL 132_KASUS HUKUM 2019

No.	Nomor Perkara	Subjek Hukum	Status Perkara
5.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara No. 415/Pdt/2012/PT.Sby di Pengadilan Tinggi Surabaya, Perkara No. 35/Pdt.G/2011/PN.Mkt di Pengadilan Negeri Mojokerto. 	Edy Setiawan selaku Pembanding/Penggugat melawan BFI Finance selaku Terbanding/Tergugat.	Edy Setiawan mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Mojokerto, tetapi belum menyerahkan Memori Kasasi sampai dengan saat ini.
6.	Perkara No. 509/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	BFI Finance selaku Penggugat, melawan: <ul style="list-style-type: none"> Ahesa Panji Buana selaku Tergugat, Lalu Eka selaku Turut Tergugat. 	Lalu Eka mengajukan upaya hukum Banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
7.	Perkara No. 205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	BFI Finance selaku Penggugat melawan: <ul style="list-style-type: none"> Hermanto selaku Tergugat I, Artina Yuni Dhartuty selaku Tergugat II. 	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan Gugatan BFI Finance secara <i>verstek</i> . Saat ini masih dalam proses pemberitahuan isi Putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Hermanto dan Artina Yuni Dhartuty.
8.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Selamat Suyanto selaku Pengadu melawan BFI Finance selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
9.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Ngatiwan selaku Pengadu melawan BFI Finance selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
10.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Tasikmalaya.	Andri Rustiaji selaku Pengadu melawan BFI Finance selaku Teradu.	Secara lisan pengaduan dinyatakan telah selesai oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Tasikmalaya dikarenakan Andri Rustiaji melanjutkan pembayaran angsuran dan tidak jadi melakukan pelunasan, namun tidak ada salinan putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Tasikmalaya.
11.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintahan Kabupaten Batu Bara.	Sunarmen selaku Pengadu melawan BFI Finance selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
12.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintahan Kabupaten Batu Bara.	Titik Murda Ningsih selaku Pengadu melawan BFI Finance selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
13.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintahan Kabupaten Batu Bara.	Trimo selaku Pengadu melawan BFI Finance selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
14.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Samali selaku Pengadu melawan BFI Finance selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

TABEL 132_KASUS HUKUM 2019

No.	Nomor Perkara	Subjek Hukum	Status Perkara
15.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Abdul Rozak selaku Pengadu melawan BFI Finance selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
16.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Maruli Tua Sinurat selaku Pengadu melawan BFI Finance selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
17.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Berlin Siahaan selaku Pengadu melawan BFI Finance selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
18.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Hasan Basri Ginting selaku Pengadu melawan BFI Finance selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
19.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Sulaiman selaku Pengadu melawan BFI Finance selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
20.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Hotmatua Sitompul selaku Pengadu melawan BFI Finance selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
21.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Herry (selaku ahli waris dari Bambang Yamin) selaku Pengadu melawan BFI Finance selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
22.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Jumiin selaku Pengadu melawan BFI Finance selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
23.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Bukittinggi.	Yeni Hemilda selaku Pengadu melawan BFI Finance selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Bukittinggi.
24.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kotamobagu.	Fifi Aprianty Lantong selaku Pengadu melawan BFI Finance selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kotamobagu.
25.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Banyuwangi.	Hariyadi selaku Pengadu melawan BFI Finance selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Banyuwangi.

TABEL 132_KASUS HUKUM 2019

No.	Nomor Perkara	Subjek Hukum	Status Perkara
26.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara No. 1641 K/PDT/2019 di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara No. 223/PDT/2018/PT.SMG di Pengadilan Tinggi Semarang, Perkara No. 416/PDT.G/2017/PN.SMR di Pengadilan Negeri Semarang. 	Sya'roni selaku Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat melawan BFI Finance selaku Pemohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat.	Pengadilan Tinggi Semarang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang yang mengabulkan eksepsi mengenai kompetensi relatif BFI Finance. Saat ini BFI Finance mengajukan upaya kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan informasi pada situs web Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, permohonan Kasasi yang diajukan oleh BFI Finance telah ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
27.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara No. 297K/PDT/2019 di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara No. 226/PDT/2018/PT.SMG di Pengadilan Tinggi Semarang, Perkara No. 27/PDT.G/2017/PN.Rbg di Pengadilan Negeri Rembang. 	Kusnadi bin Sukandar (Alm) selaku Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Penggugat I dan Siti Muntafi'ah binti Sumardi selaku Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/Penggugat II melawan BFI Finance selaku Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat.	Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menolak upaya Kasasi yang dilakukan oleh Kusnadi bin Sukandar (Alm) dan Siti Muntafi'ah binti Sumardi. Saat ini Kusnadi bin Sukandar (Alm) dan Siti Muntafi'ah binti Sumardi mengajukan upaya Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
28.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara No. 3713 K/PDT/2019 di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara No. 371/PDT/2018/PT.MKS di Pengadilan Tinggi Makassar, Perkara No. 1/PDT.G/2018/PN.Mks di Pengadilan Negeri Makassar. 	Ir. Leonard Tjioemena selaku Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat melawan BFI Finance selaku Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat.	Pengadilan Tinggi Makassar telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar. Ir. Leonard Tjioemena mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan informasi pada situs web Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, permohonan Kasasi yang diajukan oleh Ir. Leonard Tjioemena telah ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
29.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara No. 1684K/PDT/2019 di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara No. 115/PDT/2018/PTSBR di Pengadilan Tinggi Samarinda, Perkara No. 08/PDT.G/2018/PN.Bon di Pengadilan Negeri Bontang. 	Abdul Rahman selaku Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat melawan: <ul style="list-style-type: none"> Kadapi Saputra selaku Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, BFI Finance selaku Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Notaris Silvia Eny Kristian, SH selaku Termohon Kasasi III/ Terbanding III/Tergugat III. 	Berdasarkan informasi pada situs web Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Abdul Rahman mengajukan upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menolak upaya Kasasi Abdul Rahman.
30.	Perkara No. 61/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.Niaga.JKT. PST di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	PT Gatramas Internusa selaku Termohon Paillit.	Sedang dalam proses pemberesan oleh Tim Kurator.

TABEL 132_KASUS HUKUM 2019

No.	Nomor Perkara	Subjek Hukum	Status Perkara
31.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banyuwangi,	Sumiyati selaku Pengadu melawan BFI Finance selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banyuwangi.
32.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara No. 24/PDT/2019/PT.PLG di Pengadilan Tinggi Palembang. Perkara No. 87/PDT.G/2018/PN.Plg di Pengadilan Negeri Palembang. 	Emmy Natalia selaku Pembanding/Penggugat melawan BFI Finance selaku Terbanding/Tergugat.	Pengadilan Tinggi Palembang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang yang pada intinya tidak menerima gugatan Emmy Natalia. Saat ini Emmy Natalia mengajukan upaya Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
33.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara No. 3081 K/PDT/2019 di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara No. 1/PDT/2019/PT.PAL di Pengadilan Tinggi Palu, Perkara No. 52/PDT.G/2018/PN.Pso di Pengadilan Negeri Poso. 	Charles Lamboutoh selaku Termohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat I dan Pulmin Galaento selaku Termohon Kasasi II/Pembanding II/Penggugat II melawan BFI Finance selaku Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat.	Pengadilan Tinggi Palu telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso. BFI Finance mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan informasi pada situs web Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, permohonan Kasasi yang diajukan oleh BFI Finance telah ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
34.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara No. 30/PDT/2019/PT.BPR di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Perkara No. 172/PDT.G/2018/PN.PBR di Pengadilan Negeri Pekanbaru. 	Wato Yuwono Ramli Matali selaku Pembanding/Penggugat melawan BFI Finance selaku Terbanding/Tergugat.	Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang pada intinya mengabulkan sebagian gugatan Wato Yuwono Ramli Matali. Saat ini BFI Finance mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
35.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara No. 34/PDT/2019/PT.PLG di Pengadilan Tinggi Palembang, Perkara No. 168/PDT.G/2018/PN.PLB di Pengadilan Negeri Palembang. 	Eli Darniawati selaku Pembanding/Penggugat melawan Indramaya selaku Tergugat/Terbanding dan BFI Finance selaku Turut Tergugat/Turut Terbanding.	Pengadilan Tinggi Palembang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang yang pada intinya menolak gugatan Eli Darniawati. Saat ini Eli Darniawati mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
36.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara No. 238/PDT/2019/PT.SBY di Pengadilan Tinggi Surabaya, Perkara No. 35/PDT.G/2018/PN.LMG di Pengadilan Negeri Lamongan. 	Sudarto selaku Pembanding/Penggugat melawan BFI Finance selaku Terbanding I/Tergugat I dan Iman Junaidi selaku Terbanding II/Tergugat II.	Pengadilan Tinggi Surabaya telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan yang pada intinya menolak gugatan Sudarto. Saat ini Sudarto mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
37.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara No. 95/PDT/2019/PT.BTN di Pengadilan Tinggi Banten, Perkara No. 799/PDT.G/2018/PN.TGR di Pengadilan Negeri Tangerang. 	Salehuddin Ahmad selaku Pembanding/Penggugat dan BFI Finance selaku Terbanding/Tergugat.	Pengadilan Tinggi Banten telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang pada intinya menolak gugatan Salehuddin Ahmad. Saat ini Salehuddin Ahmad mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

TABEL 132_KASUS HUKUM 2019

No.	Nomor Perkara	Subjek Hukum	Status Perkara
38.	Perkara No. 890/ PDT.G/2018/PN.SBY di Pengadilan Negeri Surabaya.	Nur Rachman selaku Penggugat melawan Ade Abrianto selaku Tergugat I, BFI Finance selaku Tergugat II, Giarta Sudira selaku Turut Tergugat I dan Martio selaku Turut Tergugat II.	Pengadilan Negeri Surabaya telah menyatakan gugatan Nur Rachman tidak diterima. Saat ini Nur Rachman mengajukan upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
39.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara No. 403/ PDT/2019/PT.BDG di Pengadilan Tinggi Bandung, Perkara No. 111/ PDT.G/2018/PN.BGR di Pengadilan Negeri Bogor. 	Auda Thariq selaku Pembanding I/ Penggugat I dan Muhammad Heikal selaku Pembanding II/Penggugat II melawan Hendra Winata selaku Terbanding I/Tergugat I, Josse Saputra selaku Terbanding II/Tergugat II dan BFI Finance selaku Terbanding III/ Tergugat III.	Pengadilan Negeri Bogor telah menolak Gugatan Auda Thariq dan Muhammad Heikal. Saat ini Auda Thariq dan Muhammad Heikal mengajukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung.
40.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lubuk Linggau.	Gema Fernando selaku Pengadu melawan BFI Finance selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lubuk Linggau.
41.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sarolangun.	Sayuti selaku Pengadu melawan BFI Finance selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sarolangun.
42.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Cirebon.	Eny Mutia selaku Pengadu melawan BFI Finance Indonesia selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Cirebon.
43.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kuningan.	Yadi selaku Pengadu melawan BFI Finance selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kuningan.
44.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara No. 1/ PDT.G/2019/PN.BGR di Pengadilan Negeri Bogor, Perkara No. 477/ PDT/2019/PT.BDG di Pengadilan Tinggi Bandung. 	Yosi Agustina selaku Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat melawan BFI Finance selaku Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat.	Pengadilan Tinggi Bandung telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor yang pada intinya mengabulkan sebagian gugatan Yosi Agustina. Saat ini BFI Finance mengajukan upaya kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
45.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin.	I.K. Wardana selaku Pengadu melawan BFI Finance selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin.
46.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bojonegoro.	Arvan Eko Yulianto selaku Pengadu melawan BFI Finance selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bojonegoro.
47.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Cirebon.	Mali Mustopa selaku Pengadu melawan BFI Finance selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Cirebon.
48.	Perkara No. 688/Pdt.G/2019/ PN.TGR di Pengadilan Negeri Tangerang.	Haedar selaku Penggugat melawan BFI Finance selaku Tergugat.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Tangerang.
49.	Perkara No. 48/Pdt.G/2019/ PN.CBN di Pengadilan Negeri Cirebon.	Udin Nurdin selaku Penggugat melawan PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk selaku Tergugat I dan BFI Finance selaku Tergugat II.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Cirebon.
50.	Perkara No. 218/Pdt.G/2019/ PN SMN di Pengadilan Negeri Sleman.	Supramana selaku Penggugat melawan Agus Triyanto selaku Tergugat I, BFI Finance selaku Tergugat II, dan PT Mata Raja selaku Tergugat III.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Sleman.

TABEL 132_KASUS HUKUM 2019

No.	Nomor Perkara	Subjek Hukum	Status Perkara
51.	Perkara No. 999/Pdt.G/2019/PN.SBY di Pengadilan Negeri Surabaya.	Samuel Tedjo selaku Penggugat melawan BFI Finance selaku Tergugat.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Surabaya.
52.	Perkara No. 946/Pdt.G/2019/PN.TNG di Pengadilan Negeri Tangerang.	Abdi Nur Soleh selaku Penggugat melawan BFI Finance selaku Tergugat.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Tangerang.
53.	Perkara No. 563/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	Fenny Djaja selaku Penggugat melawan Iyan Kusnadi selaku Tergugat, Nursilawati selaku Turut Tergugat I, PT Bank Perkreditan Rakyat Prima Kredit Mandiri selaku Turut Tergugat II dan BFI Finance selaku Turut Tergugat III.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
54.	Perkara No. 1/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN.PDG di Pengadilan Negeri Padang.	BFI Finance selaku Pemohon Keberatan melawan Ropi Porka Putra selaku Termohon Keberatan.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Padang.
55.	Perkara No. 30/Pdt.G/2019/PN.PRG di Pengadilan Negeri Parigi.	Abd. Azis selaku Penggugat melawan Aria Gumulya Abdul Muluk selaku Tergugat I dan BFI Finance selaku Tergugat II.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Parigi.
56.	Perkara No. 101/Pdt.G/2019/PN.KRG di Pengadilan Negeri Karanganyar.	Drs. Bambang Bagus Handoko, S.H., M.Hum. selaku Penggugat melawan BFI Finance cabang Karanganyar selaku Tergugat dan BFI Finance selaku Turut Tergugat.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar.
57.	Perkara No. 17/Pdt.G/2019/PN.GNS di Pengadilan Negeri Gunung Sugih.	Abdul Murod selaku Penggugat melawan BFI Finance selaku Tergugat.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih.
58.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bukittinggi.	Anwir selaku Pengadu melawan BFI Finance selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bukittinggi.
59.	Perkara No. 293/Pdt.G/2019/PN.SMN di Pengadilan Negeri Sleman.	Ulil Amri selaku Penggugat melawan BFI Finance selaku Tergugat.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Sleman.
60.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Karawang.	Deni Santosa selaku Pengadu melawan BFI Finance selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Karawang.
61.	Perkara No. 520/PDT.G/2019/PN.MND di Pengadilan Negeri Manado.	Chris Arter Lamangsiang, S.E. selaku Penggugat melawan Honda Martadinata, PT Remaja Jaya Mobilindo selaku Tergugat I, BFI Finance selaku Tergugat II, dan Kepala Kepolisian RI di Jakarta cq Kelapa Kepolisian Daerah Sulawesi Utara di Manado cq Kepala Kepolisian Bitung di Bitung.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Manado.
62.	Perkara No. 55/PDT.G/2019/PN.GTO di Pengadilan Negeri Gorontalo.	Lilis R. Daniel selaku Penggugat melawan BFI Finance selaku Tergugat.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo.

TABEL 132_KASUS HUKUM 2019

No.	Nomor Perkara	Subjek Hukum	Status Perkara
63.	<ul style="list-style-type: none">Perkara No. 391/PDT/2019/PT.SMG di Pengadilan Tinggi Semarang,Perkara No. 81/PDT/G/2018/PN.SLT di Pengadilan Negeri Salatiga.	Sodiq Fatkhur Rokhman selaku Penggugat melawan Ardiyono Sutopo selaku Tergugat I, Riris Febriani selaku Tergugat II, dan BFI Finance selaku Tergugat III.	Pengadilan Tinggi Semarang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga yang pada intinya mengabulkan sebagian gugatan Sodiq Fatkhur Rokhman. Saat ini BFI Finance mengajukan upaya kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Khusus perkara nomor 1–4 dalam tabel antara BFI Finance dan APT, Perusahaan telah memperoleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang secara keseluruhan membatalkan tuntutan APT terhadap BFI Finance. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Perdamaian yang dilakukan antara BFI Finance dan APT pada 20 November 2019 untuk mengakhiri seluruh sengketa hukum yang berlangsung sejak 2003.

Di luar perkara tersebut di atas, tidak terdapat pengaruh material terhadap Perusahaan dan merupakan bagian dari kegiatan bisnis rutin.

SANKSI ADMINISTRATIF

Di 2019, tidak ada sanksi administratif apapun, yang dikenakan kepada Perusahaan ataupun kepada anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, oleh OJK, BEI, ataupun otoritas lainnya.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Perusahaan berkepentingan untuk memastikan terciptanya mekanisme yang jelas dan efektif dalam hal penyebaran informasi kepada seluruh pemangku kepentingan, sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip transparansi atau keterbukaan informasi.

Mekanisme penyebaran informasi di Perusahaan mencakup mekanisme internal dan eksternal, yang ditujukan kepada pemangku kepentingan yang berbeda, bergantung pada jenis informasi yang mereka perlukan.

Perusahaan melaksanakan penyebaran informasi ke berbagai pemangku kepentingan dengan tujuan menyebarluaskan pengetahuan, pemahaman, dan mendorong terciptanya persepsi positif dari seluruh pemangku kepentingan terhadap kebijakan dan kegiatan Perusahaan.

Akses terhadap informasi dan data Perusahaan tersedia untuk seluruh pemangku kepentingan dan investor, melalui situs web bfi.co.id. Pada situs tersebut tercantum berbagai informasi mengenai profil, produk dan jasa, laporan kinerja dan keuangan Perusahaan, dan lain-lain.

Jalur-jalur penyebaran informasi lainnya yang dikelola Perusahaan termasuk:

1. *Customer Care Hotline*: 1500018 (*one-stop solution*)
2. *Email Customer Care*: customercare@bfi.co.id
3. *SMS Customer Care*: 0815 8767 234
4. Media sosial Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan LinkedIn:
 - Facebook: BFI Finance
 - Twitter: @BFIFinance
 - Instagram: bffinance
 - LinkedIn: PT BFI Finance Indonesia Tbk
 - YouTube: BFI Finance

Pemangku kepentingan yang ingin mendapatkan informasi lainnya yang tidak tersedia dari jalur-jalur di atas, dapat langsung menghubungi Kantor Pusat BFI Finance pada alamat berikut:

PT BFI Finance Indonesia Tbk

u.p. Unit Corporate Communication (CorComm)

BFI Tower
Sunburst CBD Lot 1.2
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City, Tangerang Selatan 15322
Indonesia

Tel: (62-21) 2965 0300, 2965 0500
Fax: (62-21) 2966 0757, 2966 0758
Email: corporate.communication@bfi.co.id
Situs web: bfi.co.id

Komunikasi Perusahaan

Fungsi untuk menyampaikan informasi, kabar terbaru, dan pesan yang mengatasmakan Perusahaan secara menyeluruh, sekaligus membangun koordinasi yang efektif di lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan, yang dapat membangun dan memelihara reputasi Perusahaan di mata para pemangku kepentingan ada di Corporate Communication.

Corporate Communication berada di bawah naungan Departemen Corporate Communication & Corporate Social Responsibility (CorComm & CSR), bertugas untuk mengelola berbagai kegiatan komunikasi dan mengatur seluruh fungsi komunikasi internal dan eksternal Perusahaan, menjaga kepuasan para pemangku kepentingan termasuk pemegang saham dan Pemerintah melalui penyediaan informasi dan data Perusahaan.

Komunikasi Perusahaan kepada para pemangku kepentingan yang dilakukan melalui tiga cara berikut:

- Komunikasi Eksternal (Umum);
- Komunikasi Internal; dan
- *Corporate Branding*.

Komunikasi Eksternal (Umum)

Perusahaan menjalankan kegiatan komunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal dengan cara mengelola dan menyebarkan informasi Perusahaan ke berbagai media massa serta pihak ketiga lainnya. Langkah ini diyakini membantu terciptanya hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan

dan kalangan masyarakat umum. Informasi yang diperlukan terkait kondisi bisnis Perusahaan disampaikan secara tepat waktu dan akurat.

Fungsi komunikasi eksternal Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi komunikasi di semua media komunikasi Perusahaan;
2. Mengembangkan materi publikasi untuk meningkatkan profil Perusahaan dan kegiatan pemasaran Perusahaan;
3. Memastikan adanya konten terkini dan sesuai, membuat perbaikan fungsi, menerapkan dan memperluas strategi media sosial untuk meningkatkan profil Perusahaan;
4. Memastikan komunikasi dan pedoman merek Perusahaan berjalan dengan baik dan memantau segala hal yang berkaitan dengan merek (*brand*) Perusahaan;
5. Bertanggung jawab atas isi dan informasi dalam setiap media komunikasi dan materi promosi, baik bersifat *above-the-line* maupun *below-the-line*, baik internal maupun eksternal;
6. Bekerja sama dengan unit-unit lain yang terkait untuk memastikan adanya fungsi komunikasi yang terintegrasi dan saling melengkapi;
7. Mendukung semua kegiatan atau acara Perusahaan yang berjalan baik internal maupun eksternal;
8. Bekerja sama dengan komunitas atau kelompok pemberdayaan masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan visi dan misi Perusahaan; dan

9. Bekerja sama secara komprehensif dengan regulator untuk menciptakan hubungan kerja yang baik dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Dalam kesehariannya, Perusahaan menggunakan saluran komunikasi eksternal sebagai berikut:

- Komunikasi melalui Situs Web Perusahaan
Situs web Perusahaan, bfi.co.id, merupakan jalur penyediaan informasi terkini terkait pencapaian kinerja keuangan Perusahaan secara triwulan, keterbukaan terkait aksi korporasi, serta informasi terkini lainnya tentang Perusahaan. Situs web Perusahaan diperbarui dari waktu ke waktu, sehingga memungkinkan pelanggan dan masyarakat mempelajari program-program promosi terbaru, kesaksian pelanggan, dan jasa-jasa pembiayaan yang Perusahaan tawarkan.
Pengunjung situs web dapat berkomunikasi dengan staf *Customer Care* seputar produk-produk jasa pembiayaan, menyampaikan keluhan atau saran, serta bertanya tentang lowongan pekerjaan dan beasiswa. Sejak 2016, situs web BFI Finance telah dilengkapi dengan fungsi komunikasi dan akses data untuk memudahkan masyarakat umum, pelanggan dan calon pelanggan, investor dan calon investor, serta regulator, mengetahui berbagai berita seputar kinerja, aktivitas, dan pencapaian Perusahaan terkini.

Pengembangan dan pengkinian situs web Perusahaan diterapkan sesuai dengan POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

- **Jejaring Sosial Perusahaan**
BFI Finance memperhatikan perkembangan terkini di dunia media sosial dan memanfaatkannya untuk menjalin komunikasi interaktif dengan seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan membuka saluran komunikasi online melalui Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, dan YouTube. Sarana ini dikelola secara bersama-sama oleh Unit Corporate Communication dan Unit Digital Marketing.
- **Siaran Pers**
BFI Finance menerbitkan siaran pers dalam rangka keterbukaan informasi kepada publik. Siaran pers ini dimuat di berbagai media, baik cetak maupun online, di seluruh Indonesia.
- **Jalur Komunikasi Lainnya**
Perusahaan mengelola jalur komunikasi lainnya untuk memudahkan interaksi dengan para pelanggan dan calon pelanggan (konsumen secara umum), yaitu:
 1. Fasilitas SMS *Customer Care*: 0815 8767 234;
 2. *Customer Care Hotline*: 1500018; dan
 3. *Email Customer Care*: customercare@bfi.co.id.

Komunikasi Internal

Perusahaan menyediakan akses terhadap informasi terkait berbagai aspek dalam bisnis Perusahaan bagi para karyawannya. Akses dan komunikasi internal ini memastikan karyawan mengetahui informasi dan memiliki pemahaman terkini yang akurat tentang kondisi Perusahaan, selain juga informasi umum lainnya yang relevan dengan aktivitas bisnis Perusahaan. Prinsip keterbukaan informasi yang Perusahaan terapkan dengan para pemangku kepentingan eksternal juga dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal dengan cara ini, sehingga kualitas interaksi antara manajemen dengan para pemangku kepentingan internal, khususnya para karyawan, semakin baik.

Perusahaan juga memberlakukan sistem komunikasi satu pintu untuk komunikasi internal dan eksternal. Seluruh informasi Perusahaan yang bersifat umum dikelola oleh Unit CorComm.

Bentuk-bentuk kegiatan komunikasi internal Perusahaan antara lain:

- **Media Elektronik**
Di Perusahaan, sarana komunikasi melalui media cetak (seperti buletin) telah lama digantikan dengan media digital yang menerapkan konsep bebas kertas (*paperless*) untuk meminimalkan penggunaan bahan kertas, meningkatkan efisiensi operasional, dan melestarikan lingkungan. Media elektronik yang Perusahaan gunakan untuk komunikasi internal ini termasuk *e-mail blast*, situs web Perusahaan, dan portal internal *Service Insight*

Community (SIC) yang merupakan pusat sarana informasi elektronik khusus bagi karyawan, yang memuat informasi terkini terkait aktivitas bisnis, aktivitas karyawan, sarana berbagi informasi dari karyawan untuk karyawan, informasi umum, serta kampanye hidup sehat dan peduli lingkungan.

- **Pertemuan**
Perusahaan menyelenggarakan pertemuan yang berisi dialog dan *sharing* dari para manajemen senior Perusahaan dan pembicara eksternal kepada para karyawan mengenai topik-topik terkini, baik yang berhubungan dengan aktivitas bisnis Perusahaan maupun pengembangan kepribadian.

Corporate Branding

Corporate branding berfungsi untuk melakukan koordinasi berbagai aktivitas Perusahaan untuk meningkatkan citra Perusahaan di mata publik, terutama pemangku kepentingan eksternal. Fungsi *corporate branding* adalah menstandarisasikan dan menentukan batasan baku untuk segala hal terkait identitas Perusahaan dan cara-cara yang efektif untuk mengomunikasikannya kepada para pemangku kepentingan eksternal dan internal.

Untuk mengatur bagaimana citra dan tampilan BFI Finance di muka publik serta mendukung perangkat komunikasi, pemasaran dan promosi Perusahaan, maka sejak 2017 Perusahaan telah memiliki Panduan Identitas Perusahaan atau *Corporate Brand Guidelines*.

Aktivitas *corporate branding* yang dilakukan di 2019, antara lain:

- Terus memantau standardisasi berbagai atribut terkait identitas Perusahaan;
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan *tagline* Perusahaan #SelaluAdaJalan sebagai salah satu kunci penyebarluasan visi dan misi BFI Finance sebagai perusahaan pembiayaan yang siap membantu kebutuhan masyarakat dan mendukung swasembada masyarakat melalui usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar;
- Memberikan konsultasi dan bantuan ke berbagai unit kerja di Perusahaan untuk mendukung aktivitas dan acara resmi Perusahaan, atau melibatkan partisipasi sponsor dari Perusahaan agar selaras dengan aturan-aturan standar identitas Perusahaan;
- Memberikan konsultasi dan bantuan untuk mendukung kampanye produk-produk pembiayaan dari Perusahaan;
- Memastikan bahwa segala atribut yang dipergunakan dan membawa nama Perusahaan, baik untuk kegiatan tingkat nasional maupun lokal di kantor cabang, telah sesuai dengan standar identitas Perusahaan;
- Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan bisnis digital sederhana lewat sosial media, bagi 250 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Pontianak, Kalimantan Barat, yang sekaligus memperkenalkan varian produk syariah baru dari UUS BFI Finance;

- Mengelola produk cetakan berupa souvenir Perusahaan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan eksistensi Perusahaan; dan
- Menyelenggarakan agenda rutin tahunan sebagai puncak perayaan ulang tahun Perusahaan, yaitu BFI RUN 2019.



Promosi Produk

Perusahaan menyebarluaskan informasi produknya untuk meningkatkan ketertarikan pelanggan dalam memanfaatkan layanan pembiayaan Perusahaan, menarik minat pelanggan baru, menjaga kestabilan penjualan dalam kondisi pasar yang lesu, membedakan serta menggugulkan produk layanan pembiayaan yang dimiliki oleh Perusahaan dibandingkan produk para pesaing, serta membentuk citra produk di mata pelanggan sesuai harapan Perusahaan.

Fungsi ini dikelola oleh Unit Marketing Communication atau MarComm (mencakup fungsi *strategic communication* dan *event activation*) dan Digital Marketing. Aktivitas yang dilakukan unit ini telah dirinci pada bagian Pemasaran dalam bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dari Laporan Tahunan Terintegrasi ini (halaman 146-149).

Korespondensi dengan OJK dan BEI

Selama 2019, Perusahaan berkorespondensi dengan OJK sebanyak 38 kali dan BEI sebanyak 35 kali. Fungsi ini dijalankan oleh Unit Capital Market Regulatory Compliance yang bernaung di bawah Departemen Corporate Secretariat.

Fungsi Hubungan Investor di BFI Finance adalah untuk membina komunikasi dan hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama dengan pemegang saham, investor prospektif, dan analis.

Melalui fungsi tersebut, Perusahaan berupaya untuk memungkinkan interaksi efektif antara Perusahaan dengan masyarakat luas, untuk menyebarkan perkembangan terkini dan informasi yang penting untuk diketahui oleh pasar, dengan cara penyampaian yang konsisten dan transparan. Ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelaksanaan *analyst meeting* (termasuk paparan publik), konferensi, kunjungan investor ke Perusahaan dan *conference call*, dan juga penyampaian informasi melalui situs resmi Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Unit Hubungan Investor memiliki tugas dan tanggung jawab berikut:

- Memfasilitasi komunikasi antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan eksternal, terutama pemegang saham, investor prospektif, dan lembaga pemerintah terkait pasar modal dan investasi;
- Mengoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan Perusahaan;
- Menangani proses publikasi laporan-laporan Perusahaan secara online di situs web Perusahaan, bfi.co.id; dan
- Bertindak sebagai penyelenggara, koordinator utama, dan pengawas berbagai kegiatan Perusahaan, seperti RUPS dan Paparan Publik.

Profil Investor Relations Head



Koon Pek, Ng

Warga Negara:
Malaysia

Usia: 42

Domisili: Jakarta,
DKI Jakarta

Beliau menjabat sebagai Head of Investor Relations sejak Januari 2011. Sebelum bergabung dengan BFI Finance, beliau menjabat sebagai Vice President Equity Capital Markets di CIMB Investment Bank di Malaysia dan Indonesia hingga 2009. Beliau mengawali kariernya sebagai Analis di Nikkei Pacific Corporate Advisors, Kuala Lumpur, pada 2001, dan selanjutnya mengikuti Program Manajemen Keuangan di General Electric pada 2002–2004. Beliau memegang gelar Bachelor of Arts atau B.A. (Hons) di bidang Ekonomi Industri dari University of Nottingham, Inggris, lulus pada 1999, dan Master of Science atau M.Sc. di bidang Sekuritas, Investasi, dan Perbankan Internasional dari ISMA Centre di University of Reading, Inggris, lulus pada 2000.

Pelaksanaan Tugas Hubungan Investor 2019

Pada tahun 2019, Unit Hubungan Investor melaksanakan pekerjaan-pekerjaan berikut:

TABEL 133_KEGIATAN HUBUNGAN INVESTOR 2019

Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan
<i>Analyst Meeting</i>	2 kali
Konferensi	2 kali
Kunjungan Investor	51 kali

Fungsi kepatuhan bertugas untuk memantau kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, dan kegiatan Perusahaan, serta memastikan pemenuhan peraturan yang berlaku. Melalui program-program yang terencana dan terpadu, Perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan budaya kepatuhan dan mempertahankan efektivitas manajemen risikonya.

Unit Kepatuhan di BFI Finance dikelola oleh Direksi. Melalui rapat Direksi, setiap bulan dilakukan pemantauan atas kepatuhan setiap pimpinan di divisi, departemen, dan unit Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Unit Kepatuhan berada di bawah pengawasan langsung Presiden Direktur dan Sekretaris Perusahaan.

Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

BFI Finance telah membentuk Departemen APU-PPT di bawah Direktorat Enterprise Risk, untuk menjalankan pengawasan atas berbagai kegiatan APU-PPT di Perusahaan.

Pembentukan departemen ini mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, rekomendasi dari Financial Action Task Force on Money Laundering tentang penerapan APU-PPT, POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (POJK 12), dan POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (POJK 23).

Dalam menjalankan pengawasannya, Departemen APU-PPT di 2019 telah melakukan berbagai inisiatif berdasarkan Lima Program APU-PPT berikut:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - a. Melakukan pembahasan *Framework* APU-PPT beserta tindak lanjut yang perlu dilakukan dengan mempertimbangkan semua aspek persyaratan regulasi dan strategi Perusahaan; dan
 - b. Melakukan pembahasan posisi Risiko APU-PPT beserta tindak lanjutnya bersama Komite Risiko setiap tiga bulan sekali, dan dalam penilaian risikonya mengacu pada *National Risk Assessment* yang diterbitkan oleh PPATK.
2. Kebijakan dan prosedur
 - a. Melakukan penyesuaian Kebijakan dan Prosedur Perusahaan sesuai dengan perubahan regulasi, seperti pada POJK 23;
 - b. Melakukan sosialisasi perubahan regulasi kepada fungsi-fungsi terkait;
 - c. Memastikan pendekatan analisis Risiko APU-PPT dilakukan dengan benar dengan mengacu pada *National Risk Assessment* terbaru; dan
 - d. Melakukan pelaporan Transaksi Tunai dan Transaksi Mencurigakan kepada PPATK melalui aplikasi GRIPS.
3. Pengendalian internal
 - a. Bekerja sama dengan Audit Internal melakukan audit Kebijakan dan Prosedur yang disesuaikan dengan POJK 12;
 - b. Bekerja sama dengan Audit Internal melakukan audit pelaksanaan Kebijakan dan Prosedur APU-PPT yang diterapkan Perusahaan; dan
 - c. Secara mandiri melakukan pengawasan terhadap debitur berisiko tinggi dengan melaksanakan program Pengkinian Data, yang rencana serta realisasinya dilaporkan kepada OJK.

4. Sistem informasi manajemen
 - a. Melakukan pelaporan tiga bulanan mengenai data debitur kepada PPATK melalui aplikasi SIPESAT;
 - b. Membuat "red flag tools" APU-PPT untuk pengawasan Transaksi Tunai dan Transaksi Mencurigakan;
 - c. Melakukan pengawasan Transaksi Tunai dan Transaksi Mencurigakan secara rutin;
 - d. Melakukan uji efektivitas pada sumber data "Watchlist" yang digunakan Perusahaan, dan melakukan pengembangan sumber data dengan menggunakan sumber-sumber data yang dikelola secara mandiri sesuai persyaratan regulasi dan strategi
- Perusahaan. Sumber-sumber data tidak hanya berorientasi pada persyaratan regulasi dalam negeri, tetapi juga kepentingan investor yang berasal dari Uni Eropa dan Amerika Serikat; dan
- e. Melakukan pengembangan indikator yang digunakan dalam "red flag tools" APU-PPT untuk memastikan bahwa Perusahaan tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang.
5. Sumber daya manusia dan pelatihan
 - a. Memastikan materi *e-learning* yang sudah dimiliki oleh Perusahaan, mudah untuk dijangkau dan dipelajari oleh seluruh karyawan Perusahaan;
 - b. Melakukan pelatihan APU-PPT untuk Senior Manager dengan mengundang pemateri dari bagian *National Risk Assessment* PPATK;
 - c. Melakukan pelatihan karyawan kantor pusat sampai level Manager untuk memastikan pemahaman yang benar tentang APU-PPT;
 - d. Melakukan pelatihan National Area Credit Analyst dengan pendekatan kasuistik untuk memberikan pemahaman praktis yang dapat mendukung pekerjaan sehari-hari; dan
 - e. Memastikan setiap karyawan di unit kerja APU-PPT dilengkapi dengan pemahaman yang luas dan *up-to-date*, dengan mengikuti pelatihan APU-PPT eksternal.

Kode Etik

BFI Finance memiliki dan menerapkan Kode Etik Perusahaan, yakni serangkaian kebijakan terkait standar etika bisnis dan perilaku bagi karyawannya dalam menjalankan setiap aktivitas bisnisnya, agar sesuai dengan visi, misi, dan budaya Perusahaan.

Kode Etik Perusahaan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip GCG berikut:

- Transparansi, diterapkan dengan memastikan setiap langkah dan proses penetapan kebijakan dan keputusan Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh jajaran Perusahaan dilakukan secara transparan dan dapat dikaji;
- Kemandirian, diterapkan dengan menjalankan kegiatan secara independen sesuai dengan profesionalisme dan kode etik tanpa dapat dipengaruhi pihak manapun;
- Akuntabilitas, diterapkan dengan menetapkan secara jelas tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh jajaran Perusahaan dalam struktur organisasi dan uraian jabatan masing-masing;
- Pertanggungjawaban, diterapkan dengan menyesuaikan pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; dan
- Kewajaran, diterapkan dengan memberikan rasa keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Isi Kode Etik

Kode Etik Perusahaan terdiri dari etika bisnis dan etika perilaku.

Etika bisnis menjelaskan tentang bagaimana Perusahaan sebagai suatu entitas bisnis bersikap, beretika, dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan segenap pemangku kepentingan, sesuai prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai dasar Perusahaan, dengan tetap menjaga profitabilitas.

Etika perilaku merupakan seperangkat aturan nilai yang mencerminkan suatu sikap dan komitmen dalam memenuhi ketentuan perilaku untuk menjaga nama baik, kerahasiaan, serta hal-hal penting lainnya yang berpengaruh terhadap reputasi Perusahaan.

Kode Etik Perusahaan memuat nilai-nilai dasar Perusahaan yang dimanifestasikan dalam perilaku-perilaku berikut:

1. Giat Memperbaiki Diri
Secara Berkesinambungan
2. Realisasikan Saling Menghormati dan Peduli
3. Ekstra Pelayanan untuk Pelanggan Internal dan Eksternal
4. Absolut dalam Integritas
5. Tim Kerja yang Solid dan Saling Percaya

Esensi dari Kode Etik Perusahaan ini selanjutnya dicerminkan dalam Pedoman Prinsip-Prinsip Berusaha yang berlaku di BFI Finance, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Tanggung Jawab Perusahaan

Di dalam Pedoman Prinsip-Prinsip Berusaha, BFI Finance mengakui adanya lima bidang tanggung jawab Perusahaan, sebagai berikut:

1. Kepada Pemegang Saham
 - BFI Finance akan menjalankan usaha untuk meningkatkan nilai pemegang saham berdasarkan prinsip-prinsip GCG;
 - BFI Finance akan memberikan hasil usaha yang optimal dengan senantiasa memelihara tingkat pengembalian investasi kepada para pemegang saham, serta mempertahankan kecukupan dana untuk menggerakkan pertumbuhan Perusahaan;
 - BFI Finance menghargai hubungan dengan para pemegang saham dan akan memberikan informasi tepat waktu, teratur, dan dapat dipercaya mengenai kegiatan, kondisi keuangan, dan hasil usaha Perusahaan.
2. Kepada Pelanggan
BFI Finance berkomitmen mendapatkan dan mempertahankan para pelanggan dengan menyediakan produk jasa pembiayaan yang memberikan nilai tambah bagi para pelanggan dari segi manfaat dan biayanya.
3. Kepada Karyawan
 - BFI Finance menghargai para karyawan sebagai sumber daya yang penting melalui komitmennya terhadap pengembangan mereka secara berkelanjutan;

- BFI Finance akan merekrut, mempekerjakan, memberikan pelatihan dan mempromosikan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kemampuan mereka;
 - BFI Finance bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi kerja yang sehat dan menjamin keselamatan para karyawan.
4. Kepada Seluruh Pemangku Kepentingan
BFI Finance senantiasa memelihara hubungan yang saling menguntungkan dengan para kreditur, mitra usaha dan pihak lainnya dengan siapa Perusahaan berbisnis, serta mendorong penerapan prinsip-prinsip ini dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
 5. Kepada Masyarakat
Sebagai anggota masyarakat, BFI Finance senantiasa menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dengan menghormati undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan berupaya untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatannya tidak melanggar hak-hak asasi manusia. Partisipasi Perusahaan, baik dalam pemberian sumbangan maupun penyelenggaraan pelatihan serta kegiatan sosial lainnya, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi lingkungan sekitarnya dan memberikan manfaat langsung bagi seluruh penerimanya.

Integritas Usaha

BFI Finance beserta seluruh kantor cabangnya dituntut untuk mengutamakan kejujuran, integritas dan kewajaran di semua aspek usaha perusahaan dan mengharapkan hal yang sama dalam hubungan dengan semua pihak dengan siapa BFI Finance berbisnis. Seluruh transaksi bisnis atas nama Perusahaan dicatat secara akurat sesuai dengan prosedur operasional standar dan tunduk pada audit. Para karyawan perlu mengesampingkan keperluan pribadi mereka ketika menjalankan bisnis Perusahaan.

Pemakaian dan Perlindungan Aset Perusahaan

BFI Finance memastikan setiap karyawan bertanggung jawab atas pemakaian yang wajar, perlindungan dan pelestarian aset dan sumber daya Perusahaan. Aset dan sumber daya Perusahaan, maupun kesempatan-kesempatan apapun yang timbul berdasarkan kedudukan seseorang, digunakan semata-mata untuk kepentingan pencapaian tujuan Perusahaan dan bukan untuk kepentingan pribadi. Karyawan BFI Finance dilarang mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri atau orang lain melalui penyalahgunaan jabatan.

Pengungkapan Informasi

BFI Finance menganggap informasi di bidang strategi bisnis merupakan aset penting bagi Perusahaan yang harus dilindungi terhadap kehilangan, pelanggaran serta pemakaian dan pengungkapan yang tidak selayaknya.

Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)

BFI Finance akan senantiasa memastikan bahwa semua karyawan mentaati aturan-aturan perdagangan orang dalam. Ini berarti bahwa adanya informasi bukan untuk umum yang dapat mempengaruhi harga saham BFI Finance dirahasiakan dengan baik sampai diumumkan oleh manajemen yang berwenang. Karyawan yang mempunyai informasi sensitif yang mungkin dapat mempengaruhi harga saham BFI Finance dan hak-hak terkait, tidak boleh melakukan transaksi langsung maupun tidak langsung atas saham BFI Finance dan hak-hak terkait tersebut. Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh karyawan berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan Pakta Integritas Perusahaan dengan sebaik-baiknya sejalan dengan pelaksanaan kebijakan strategis yang diterapkan dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Guna mendukung penerapan kode etik, Perusahaan mewajibkan beberapa hal berikut:

1. Kode etik yang ditetapkan Perusahaan berlaku bagi seluruh karyawan, termasuk seluruh anggota Dewan Komisaris, Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, serta Direksi dan manajemen;
2. Kode etik tersebut disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh karyawan; dan

3. Manajemen memberi teladan bagi bawahannya dalam penerapan kode etik tersebut.

Sosialisasi kode etik yang dilakukan di 2019 dilakukan bersamaan dengan sosialisasi Nilai-Nilai Dasar Perusahaan dan panduan perilaku karyawan. Selain itu, Departemen Human Capital menyebarkan informasi mengenai kode etik melalui *e-mail blast* dan di 2019 telah melakukan pembaruan Kebijakan Perusahaan.

Manajemen BFI Finance memiliki Pakta Integritas yang memuat komitmen Perusahaan terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG. Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh karyawan berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan Pakta Integritas Perusahaan dengan sebaik-baiknya. Pakta Integritas BFI Finance mengatur tentang Pedoman Prinsip-Prinsip Berusaha.

Dalam pelaksanaan Pedoman Prinsip-Prinsip Berusaha ini, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan, tanpa melihat posisinya, wajib mematuhi dengan sungguh-sungguh etika pada tingkat tertinggi yang ditanamkan dalam Nilai-Nilai Dasar Perusahaan. Manajemen dan karyawan Perusahaan wajib memahami dan mematuhi nilai-nilai dasar tersebut yang sangat penting dalam menjaga pertumbuhan Perusahaan yang berkesinambungan.

Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik

BFI Finance memantau penegakan Kode Etik Perusahaan dan menyediakan fasilitas pengaduan tentang pelanggaran Kode Etik tersebut. Karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran akan diperiksa oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan yang terdiri dari perwakilan Departemen Audit Internal dan Human Capital dan akan diberikan sanksi sesuai jenis dan tingkatan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Budaya Perusahaan

Perusahaan memiliki nilai-nilai dasar yang dianjurkan untuk dipahami dan dipatuhi sebagai budaya Perusahaan. Nilai-nilai dasar Perusahaan yang disingkat menjadi GREAT adalah:

- Giat Memperbaiki Diri secara Berkesinambungan;
- Realisasikan Saling Menghormati dan Peduli;
- Ekstra Layanan kepada Pelanggan Internal dan Eksternal;

- Absolut dalam Integritas; dan
- Tim Kerja yang Solid dan Saling Percaya.

Penjelasan mengenai GREAT sebagai nilai-nilai dasar BFI Finance dijelaskan pada bagian Nilai-Nilai Dasar dan Budaya Perusahaan dalam bab Profil Perusahaan (halaman 58-59).

KEBIJAKAN ANTIKORUPSI

BFI Finance mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawannya untuk menjunjung tinggi persaingan usaha yang adil, nilai sportivitas dan profesionalisme, serta prinsip-prinsip GCG.

Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan dan memelihara iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku, ataupun perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan komitmen tersebut, BFI Finance mematuhi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BFI Finance melakukan pelaporan mengenai pelanggan yang bermasalah kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara berkala.

Kebijakan antikorupsi di Perusahaan juga mencakup, antara lain, penerapan transparansi dalam sistem pengadaan barang dan jasa, serta pemberian dan penerimaan hadiah oleh dan bagi Perusahaan.

Prinsip dan Kebijakan

Perusahaan memiliki prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan secara cepat dan transparan, dengan menerapkan prinsip GCG tanpa benturan kepentingan.

Kebijakan pengadaan barang dan jasa serta hubungan dengan pemasok di Perusahaan meliputi:

1. Penerapan Memo Internal dan Prosedur Operasional untuk pengadaan barang dan jasa;
2. Proses pengadaan barang dilakukan berdasarkan nominal dan tingkat otoritas, khususnya di kantor cabang untuk mempercepat proses dalam pemenuhan barang dan jasa. Pengadaan barang di atas nominal tertentu dilakukan secara terpusat di kantor pusat;
3. Pemasok utama baik barang maupun jasa diwajibkan menyerahkan dokumen legalitas secara lengkap, untuk menjamin hak dan kewajiban dari Perusahaan maupun pemasok dilakukan sesuai dokumen yang ada;
4. Kode Etik dan Peraturan Perusahaan melarang karyawan Perusahaan untuk menerima janji atau pemberian dalam bentuk apapun dari pemasok; dan
5. Perusahaan melakukan evaluasi secara berkala untuk seluruh pemasok, untuk memastikan mereka dapat menunjang aktivitas Perusahaan.

Sistem Pengadaan

Perusahaan menyelenggarakan proses pengadaan dalam beberapa tahapan berikut:

1. Perencanaan: pembuatan rencana pengadaan;
2. Persiapan: kerangka acuan kerja, syarat prakualifikasi, dokumentasi pengadaan, strategi metode pemilihan penyedia barang dan jasa;

3. Pemilihan barang dan jasa: pengumuman atau undangan bagi vendor yang memiliki sertifikasi dan prakualifikasi, evaluasi penawaran dan negosiasi, penetapan pemenang, proses kontrak; dan
4. Penggunaan dan pengelolaan aset Perusahaan.

Sistem tersebut dijalankan secara terbuka dan kompetitif dengan mengikutsertakan calon penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat berdasarkan kemampuan dan kinerja yang sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. Selain melalui tahapan pengadaan barang dan jasa tersebut, Perusahaan juga menggunakan metode lain, seperti pelelangan, pemilihan langsung, dan pembelian langsung.

Kebijakan dan sistem tersebut membantu memastikan bahwa jumlah dan kualitas barang dan jasa yang diperoleh Perusahaan sesuai kebutuhan, dan diperoleh dengan harga yang kompetitif, pengiriman yang tepat waktu, dan pelayanan purnajual yang baik.

Pengadaan barang, baik di kantor cabang maupun kantor pusat dapat dipantau setiap saat melalui sistem *Fixed Assets Management*.

Asuransi atas Harta Tetap Perusahaan

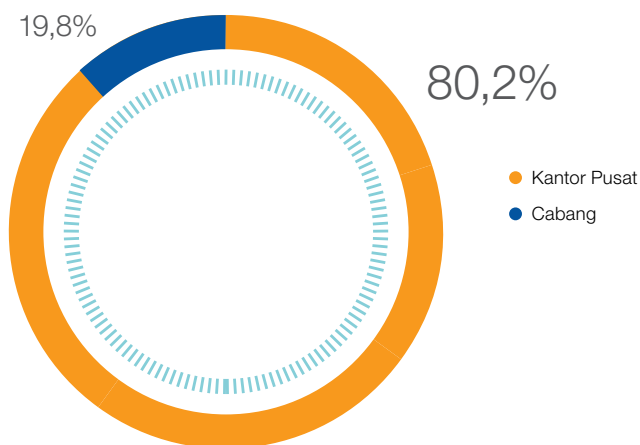
Untuk mengurangi risiko kerugian atau kehilangan atas harta tetap Perusahaan, Perusahaan telah mengasuransikan harta tetap berupa benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak, dengan rincian sebagai berikut:

1. Polis Asuransi atas Properti;
2. Polis Asuransi Kehilangan atas Barang Bergerak;
3. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor; dan
4. Polis Asuransi Tanggung Gugat (*Public Liabilities*).

TABEL 134_PENGELUARAN UNTUK PEMBELIAN ASET 2019 BERDASARKAN LOKASI PEMBELIAN

Lokasi	Nilai Pengadaan (Rp juta)	Persentase	Jumlah Pengadaan	Persentase
Kantor Pusat	89.136	80,2%	3.304	53,6%
Cabang	22.070	19,8%	2.859	46,4%
Jumlah	111.206	100,0%	6.163	100,0%

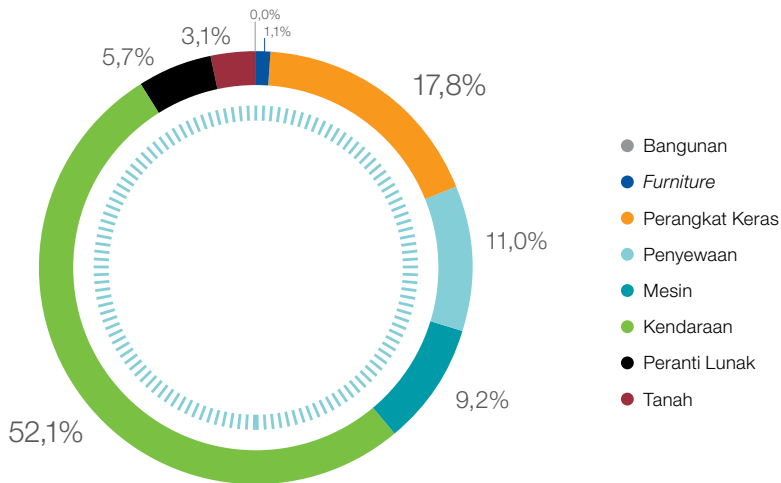
GRAFIK 25_PEMBELIAN ASET 2019 BERDASARKAN LOKASI PEMBELIAN



TABEL 135_PENGELUARAN UNTUK PEMBELIAN ASET 2019 BERDASARKAN JENIS

Jenis Aset	Nilai Pengadaan (Rp juta)	Persentase	Jumlah Pengadaan	Persentase
Bangunan	9	0,0%	1	0,0%
<i>Furniture</i>	1.256	1,1%	454	7,4%
Perangkat Keras	19.764	17,8%	2.195	35,6%
Penyewaan	12.280	11,0%	416	6,8%
Mesin	10.181	9,2%	2.559	41,5%
Kendaraan	57.990	52,1%	467	7,6%
Peranti Lunak	6.312	5,7%	70	1,1%
Tanah	3.414	3,1%	1	0,0%
Jumlah	111.206	100,0%	6.163	100,0%

GRAFIK 26_PENGELUARAN UNTUK PEMBELIAN ASET 2019 BERDASARKAN JENIS



Pemberian dan Penerimaan Hadiah

Pemberian hadiah didefinisikan sebagai segala macam bentuk pemberian oleh Perusahaan atau pihak yang mewakili Perusahaan kepada pihak-pihak tertentu, dengan maksud mempengaruhi pihak-pihak tersebut agar dapat menguntungkan Perusahaan di luar batas-batas kewajaran.

Sedangkan penerimaan hadiah didefinisikan sebagai segala macam bentuk penerimaan oleh Perusahaan atau pihak yang mewakili Perusahaan dari pihak-pihak yang berkepentingan, dengan maksud mempengaruhi keputusan jajaran Perusahaan yang menguntungkan pihak pemberi hadiah.

Terdapat peraturan di Perusahaan tentang pemberian hadiah, suap dan sejenisnya, pemberian kepada pihak lain dalam rangka tanda terima kasih, bingkisan hari besar keagamaan, cinderamata dan kenang-kenangan dalam bentuk barang atau jasa.

Dalam hal penerimaan hadiah, karyawan yang menerima hadiah, berapapun nilainya dan dalam bentuk apapun, wajib melaporkan kepada atasan langsung mereka. Penerimaan hadiah dari pihak manapun dalam rangka promosi Perusahaan, tanda terima kasih, bingkisan hari besar keagamaan, cinderamata dan kenang-kenangan, dapat diterima sebagai suatu kepatutan dalam pergaulan sehari-hari, dengan ketentuan:

- Mencantumkan logo/nama perusahaan pemberi, yang merupakan bagian dari kegiatan promosi perusahaan pemberi; dan
- Pemberian tersebut tidak dilakukan secara terus-menerus oleh pemberi yang sama kepada Perusahaan maksimal tiga kali dalam setahun. Setiap individu yang merupakan bagian dari Perusahaan tidak melakukan pembicaraan atau memberikan informasi internal Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau citra negatif bagi Perusahaan.

Perusahaan menjalankan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perusahaan No. SOP/031 tanggal 22 Maret 2013, sebagai bentuk penerapan prinsip-prinsip GCG, terutama tanggung jawab dan kewajaran. Sistem Pelaporan Pelanggaran ini memastikan kinerja yang optimal dan kepatuhan hukum dari setiap karyawan BFI Finance dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

Melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran BFI Finance, setiap individu di lingkungan Perusahaan dapat mengajukan keluhan dan/atau laporan tentang penipuan dan/atau pelanggaran atas tata tertib Perusahaan ataupun prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dengan mengirimkan laporan mereka melalui salah satu jalur berikut:

1. Surat elektronik (*e-mail*) di fraud_investigator@bfi.co.id;
2. Layanan pesan singkat (SMS) di nomor 0822 5888 8911;
3. Alamat surat-menyurat di:
Kantor Pusat PT BFI Finance Indonesia Tbk
BFI Tower, Sunburst CBD Lot 1.2
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City, Tangerang Selatan 15322
Indonesia
u.p. Departemen Audit Internal

Perlindungan bagi Pelapor dan Penanganan Pengaduan

Setiap pihak yang melakukan pengaduan atau pelaporan pelanggaran melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran BFI Finance dilindungi hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perusahaan juga bertanggung jawab secara moral untuk melindungi saksi atau pelapor tersebut.

Semua laporan pelanggaran yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran BFI Finance dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Perusahaan. Hak pelapor untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya juga dijamin.

Selama 2019, pengaduan dan laporan pelanggaran yang diterima berjumlah 91 laporan, semuanya melalui surat elektronik. Rinciannya disajikan pada Tabel 136 dan proses tindak lanjutnya dijelaskan pada Grafik 27.

TABEL 136_JUMLAH LAPORAN PELANGGARAN DI 2019 DAN PENANGANANNYA

Jenis Laporan/Keluhan	Dalam Proses	Selesai	Jumlah
Dugaan penipuan	0	60	60
Lain-lain	0	31	31
Jumlah	0	91	91

GRAFIK 27_TINDAK LANJUT LAPORAN PELANGGARAN



Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran

Sistem Pelaporan Pelanggaran menerima laporan atau pengaduan yang segera diperiksa oleh pihak pengelola pengaduan, yaitu Departemen Audit Internal dan Divisi Manajemen Risiko. Apabila hasil pemeriksaan terbukti sah sesuai prosedur, maka Perusahaan akan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran tersebut sesuai dengan SK yang berlaku di Perusahaan.

Pada 2019, seluruh laporan pelanggaran yang masuk telah diselesaikan, dan sanksi yang sepadan untuk setiap pelaku pelanggaran telah diberikan.

AKSI KORPORASI

Perusahaan menjalankan aksi korporasi berupa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II senilai Rp1 triliun pada Februari 2019. Perusahaan juga melakukan pembagian dividen tunai sebesar Rp49 per saham atau setara dengan Rp733 miliar dari laba bersih 2018, yang telah dibayarkan pada 28 Juni 2019.

OPSI SAHAM

Pada 2019, Perusahaan tidak menjalankan Program Kompensasi Manajemen dan Karyawan Berbasis Saham. Program sejenis terakhir kali dilaksanakan pada 2012 dan telah berakhir di 2016.

BFI Finance telah menyusun sejumlah laporan yang menyajikan secara transparan informasi keuangan dan non-keuangan kepada pemangku kepentingan dan lembaga lain yang dipersyaratkan, secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini, dan utuh.

Informasi kondisi keuangan dan non-keuangan Perusahaan disampaikan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, antara lain:

1. Laporan Tahunan Terintegrasi, yang mencakup:
 - a. Ikhtisar Data Keuangan Penting, termasuk Ikhtisar Saham, Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, Profil Perusahaan, Analisis dan Pembahasan Manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
 - b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk satu tahun buku dan disajikan dalam perbandingan dengan satu tahun buku sebelumnya.
 - c. Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan Terintegrasi.
2. Laporan Keuangan publikasi per triwulan yang dipublikasikan di media massa dan situs web BFI Finance pada bagian Siaran Pers dan Info.
3. Laporan Keuangan per triwulan, dipublikasikan pada situs web BFI Finance dan situs web BEI.
4. Laporan Keberlanjutan
BFI Finance telah melakukan pembahasan informasi kegiatan CSR dalam Laporan Keberlanjutan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Tahunan Terintegrasi.
5. Transparansi Kondisi Non-Keuangan
BFI Finance telah menyampaikan informasi produk secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut tersedia bagi pelanggan, antara lain dalam bentuk *leaflet*, brosur, atau bentuk tertulis lainnya, di setiap outlet BFI Finance pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh pelanggan, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui situs web BFI Finance, portal online dan media sosial Perusahaan yang menyediakan informasi mengenai karakteristik produk finansial di Indonesia serta perbandingan antarproduk tersebut.

Penerapan Rekomendasi Pedoman dari OJK

Kinerja penerapan GCG di BFI Finance dengan mengacu pada POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang mencakup 5 aspek, 8 prinsip, dan 25 rekomendasi penerapan, dirangkum dalam tabel berikut:

TABEL 137_PENERAPAN REKOMENDASI PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN UNTUK PERUSAHAAN PUBLIK

Aspek	Prinsip Rekomendasi	Pernyataan Kepatuhan/ Penjelasan	Penjelasan (apabila belum dipatuhi)
Aspek I: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-hak Pemegang Saham			
Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS			
	1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham.	Telah dipatuhi	-
	2. Seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPST dan RUPSLB.	Tidak terpenuhi	Dua anggota Dewan Komisaris tidak menghadiri RUPS 28 Mei 2019 dengan alasan yang telah dinyatakan kepada dan diterima oleh RUPS.
	3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Telah dipatuhi	-
Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor			
	4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Telah dipatuhi	-
	5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	Telah dipatuhi	-
Aspek II: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris			
Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris			
	6. Penentuan jumlah Anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Telah dipatuhi	-
	7. Penentuan komposisi Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Telah dipatuhi	-
Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris			
	8. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Telah dipatuhi	-
	9. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Terintegrasi Perusahaan Terbuka.	Telah dipatuhi	-
	10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Telah dipatuhi	-
	11. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi Anggota Direksi.	Telah dipatuhi	-

Aspek	Prinsip Rekomendasi	Pernyataan Kepatuhan/ Penjelasan	Penjelasan (apabila belum dipatuhi)
Aspek III: Fungsi dan Peran Direksi			
Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi			
	12. Penentuan jumlah Anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	Telah dipatuhi	-
	13. Penentuan komposisi Anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Telah dipatuhi	-
	14. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Telah dipatuhi	-
Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi			
	15. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	Telah dipatuhi	-
	16. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Telah dipatuhi	-
	17. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri Anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Telah dipatuhi	-
Aspek IV: Partisipasi Pemangku Kepentingan			
Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan			
	18. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Telah dipatuhi	-
	19. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan antikorupsi dan <i>anti-fraud</i> .	Telah dipatuhi	-
	20. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Telah dipatuhi	-
	21. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Telah dipatuhi	-
	22. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	Telah dipatuhi	-
	23. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Telah dipatuhi	-
Aspek V: Keterbukaan Informasi			
Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi			
	24. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.	Telah dipatuhi	-
	25. Laporan Tahunan Terintegrasi Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Telah dipatuhi	-





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	303
Program CSR	305
Kontribusi untuk Pembangunan	312



“Sasaran utama dari program-program CSR sesuai dengan skala kepentingan Perusahaan, yaitu pelanggan, karyawan, dan masyarakat umum.”

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) BFI Finance telah menjadi prioritas Perusahaan dalam mewujudkan visi dan misinya, yang cakupannya lebih dari sekadar dukungan finansial berupa donasi untuk masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.



Sektor-sektor yang menjadi fokus program CSR Perusahaan di 2019 adalah pelayanan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan, infrastruktur kemasyarakatan, kesehatan, dan donasi umum. Sasaran utama dari program-program CSR sesuai dengan skala kepentingan Perusahaan, yaitu pelanggan, karyawan, dan masyarakat umum.

- Berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan tinggi
- Pemberdayaan keluarga-keluarga ekonomi bawah melalui pembiayaan mikro
- Penyediaan saluran distribusi untuk usaha-usaha kecil
- Mengimplementasikan cara-cara konservasi energi dalam rutinitas bisnis sehari-hari

Tata Kelola CSR Perusahaan

Kebijakan Program CSR

Think

Semua lapisan, baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan, memikirkan dan merasakan isu-isu sosial yang terjadi di luar dan di dalam Perusahaan. Hal ini merupakan bentuk pola pikir diri sendiri yang sadar akan apa yang terjadi di lingkungan sekitar, dan mulai memikirkan cara untuk terlibat aktif di dalamnya.

Kebijakan Strategis CSR

BFI Finance memiliki kebijakan strategis CSR yang mencakup formulasi strategi, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan kegiatan CSR di berbagai wilayah operasionalnya. Kebijakan ini dirangkum dalam Visi dan Misi CSR Perusahaan berikut:

Act

Semua lapisan di dalam lingkungan Perusahaan membantu memberikan solusi atas isu-isu tersebut dan mengimplementasikan dalam bentuk tindakan nyata dari diri sendiri, sebagai hasil dari pemikiran dan keterlibatan secara aktif dalam lingkungan sekitar.

Visi CSR

Menjadi mitra dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan dengan menjaga keseimbangan 3P (*Profit, People, Planet*) dan membangun hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat.

Preserve

Hasil implementasi dan tindakan nyata tersebut dipertahankan dan dilakukan secara berkelanjutan oleh semua lapisan Perusahaan, sehingga memperlihatkan hasil yang positif dari tindakan nyata tersebut.

Misi CSR

- Memberantas keterbelakangan sosial-ekonomi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Perusahaan



Berdasarkan kebijakan tersebut, kegiatan CSR menjadi pilar pendukung bisnis BFI Finance dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta memperkuat citra Perusahaan di mata masyarakat untuk hubungan yang harmonis dan saling membangun antara Perusahaan dengan lingkungan internal dan eksternalnya.

Anggaran Program CSR

Pelaksanaan program CSR merupakan tanggung jawab Unit CSR yang berada di bawah pengawasan Divisi Keuangan, khususnya Departemen Corporate Communication & CSR. Alokasi anggaran untuk kegiatan CSR mempertimbangkan kesesuaian kegiatan dengan visi dan misi Perusahaan, proyeksi dan rencana bisnis tahunan Perusahaan, serta hasil evaluasi kegiatan CSR di tahun sebelumnya.

TABEL 138_AKTUALISASI ANGGARAN CSR 2019

Keterangan (Rp juta)	Jumlah
Konservasi Energi dan Infrastruktur	1.078
Praktik Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	81.974
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan	777
Tanggung Jawab kepada Konsumen	2.500
Jumlah	86.329

Perusahaan mengalokasikan Rp1,85 miliar untuk kegiatan CSR di bidang Lingkungan dan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan untuk 2019, meningkat 4,5% dari anggaran 2018 sebesar Rp1,77 miliar. Penggunaan terbesar anggaran CSR adalah untuk bidang lingkungan (termasuk infrastruktur), yang mencakup 58% dari jumlah anggaran.

Konservasi Energi dan Infrastruktur

Kegiatan operasional BFI Finance menghadirkan dampak tidak langsung terhadap lingkungan. Untuk menyeimbangkan dampak tersebut, Perusahaan mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui pengelolaan penggunaan sumber daya alam dan energi secara efektif dan efisien. Perusahaan menghemat material umum seperti air, kertas, dan bahan bakar yang digunakan dalam aktivitas operasionalnya. Ini mencakup:

1. Penggunaan peralatan kantor yang hemat energi;
2. Kewajiban mematikan lampu pada jam istirahat dan selepas kerja bagi yang terakhir meninggalkan area kerja;
3. Pembatasan operasi fasilitas pendingin udara;
4. Pengurangan pemakaian barang sekali pakai seperti kertas tisu, *styrofoam*, dan air minum dalam kemasan.

Program-program CSR untuk lingkungan dan infrastruktur di 2019 meliputi:

1. Pengadaan dan pembangunan fasilitas sanitasi air bersih dan toilet/kamar mandi;
2. Renovasi dan serta pembangunan fasilitas dan sarana pendidikan, seperti ruang kelas, perpustakaan, dan sarana lainnya (kelanjutan dari program CSR untuk pemulihan bencana Palu di 2018);
3. Pembangunan Sekolah Indonesia Cepat Tanggap dan sanitasi air;
4. Renovasi posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya.

Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Program pengembangan sosial dan kemasyarakatan Perusahaan terdiri dari tiga bidang utama, yaitu:

Bidang Pendidikan

Fokus jangka panjang bidang ini adalah pada program edukasi hidup sehat untuk anak sekolah, program Beasiswa S1 dengan jaminan bekerja, beasiswa anak berprestasi kurang mampu, pengembangan keterampilan untuk pemberdayaan masyarakat (misalnya fasilitas pengembangan komunitas usaha), dan pendidikan pengembangan usaha.

Sesuai dengan SDG 4, Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*), Perusahaan berkomitmen untuk melakukan berbagai program CSR yang mendukung pengembangan pendidikan di Indonesia. Inisiatif ini meliputi:

- Beasiswa Mahasiswa Strata Satu (S1)
Beasiswa S1 BFI Finance diberikan kepada mahasiswa S1 berprestasi di universitas negeri dan swasta di seluruh Indonesia yang mendaftar secara online melalui www.bfi.co.id. Penerima beasiswa menerima paket lengkap pembayaran biaya kuliah, uang saku, dan tunjangan lain, serta mendapatkan jaminan bekerja di BFI Finance setelah menamatkan kuliah. Selain itu, BFI Finance memberikan beasiswa untuk anak kurang mampu dan berprestasi di beberapa wilayah Indonesia.



Arista Ramadhana Harris

Penerima Beasiswa S1
BFI Finance, 2017

“Saya menerima beasiswa BFI Finance selama 3 tahun, sejak semester IV hingga saat ini. Saya sangat bangga telah menjadi bagian dari program beasiswa BFI Finance ini, karena selain diberikan uang saku dan tunjangan lainnya selama masa kuliah, saya juga mendapatkan peluang untuk bekerja di perusahaan pembiayaan dengan jaringan terluas di Indonesia. Ke depannya, saya harap beasiswa BFI Finance ini terus menyempurnakan program-program yang dapat meningkatkan kualitas SDM-nya.”

- Apresiasi Prestasi Anak Karyawan
BFI Finance memberikan beasiswa bagi anak karyawan yang berprestasi untuk jenjang SD hingga SMA/SMK di berbagai wilayah.
- Gerakan 1000 untuk Anak Bangsa
Gerakan 1000 Seragam Sekolah dan Alat Tulis kali ini diselenggarakan di Sintang, Sulawesi. Selain itu, BFI Finance menyelenggarakan *Edutrip* Gerakan 1000 sebagai kelanjutan program Gerakan 1000 untuk Anak Bangsa, dengan mengundang anak berprestasi dari beberapa sekolah pedalaman untuk berkunjung ke kantor Pusat BFI Finance dan berkeliling kota Jakarta selama tiga hari, dengan tujuan memperkenalkan sejarah sarana transportasi ibukota Indonesia.

- Pemberian peralatan dan perlengkapan sekolah, seperti alat tulis, seragam, dan perlengkapan mengajar dilakukan di beberapa wilayah melalui kantor-kantor cabang.
- Program pelatihan pengembangan usaha untuk usaha kecil menengah, meliputi penyediaan fasilitas dan penyuluhan pengembangan usaha untuk 80 pelaku usaha di Bandung dan Palembang, serta 3 mitra usaha BFI Finance, dan juga pendidikan dasar finansial “Literasi Keuangan” dengan tema “Membangun Pola Pikir Keuangan yang Sehat”.

Bidang Kesehatan

Berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat, BFI Finance melaksanakan berbagai program peduli kesehatan, antara lain:

- Donor Darah PMI dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis.
- Operasi Bibir Sumbing Gratis, melalui kerja sama dengan Yayasan Citra Baru (YCB).
- Khitanan Massal, Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan kegiatan Gerakan Menuju Sehat

Bidang Kemanusiaan, Sosial dan Donasi Umum Lainnya

Kegiatan di bidang ini mencakup program-program kepedulian masyarakat dalam rangka perayaan hari besar keagamaan serta pemberian bantuan bagi korban bencana alam, bakti sosial, atau fasilitas lainnya bagi masyarakat kurang mampu.

Sebagai perwujudan semangat berbagi untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat, BFI Finance menyelenggarakan kegiatan berikut:

- Bakti Sosial Ramadhan dan Perayaan Keagamaan Lain
Melalui Bakti Sosial Ramadhan 1440 H, Perusahaan membagikan makanan buka puasa (takjil) kepada warga kurang mampu di berbagai wilayah cabangnya. Distribusi makanan didasarkan pada data kependudukan setempat.
- BFI Berkurban
Melalui kegiatan tahunan ini, Perusahaan membagikan daging kurban kepada sejumlah yayasan panti asuhan, khususnya di Tangerang Selatan, lokasi kantor pusat Perusahaan.
- *Disaster recovery* berupa penyampaian bantuan bahan pokok atau lainnya bagi korban bencana alam (banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, dan musibah besar lainnya) di Indonesia.
- Bakti Sosial melalui penyaluran bahan pokok ke panti asuhan dan pihak lain yang membutuhkan, baik di hari besar keagamaan maupun ulang tahun kantor cabang, serta pemberian bantuan fasilitas fisik bagi sejumlah tempat ibadah dan yayasan di sekitar wilayah operasi Perusahaan.



Agus Adinata

Branch Corporate Manager Denpasar,
Penerima Beasiswa S1 BFI Finance, 2008

“Saya telah bekerja di BFI Finance sejak 2011 hingga sekarang. Beasiswa BFI Finance telah membuka pandangan saya terhadap dunia kerja profesional serta memberikan kesempatan untuk bergabung setelah menyelesaikan kuliah. Saya bangga telah menjadi bagian dari salah satu perusahaan pembiayaan terbaik di Indonesia, di mana saya dapat terus mengembangkan karier profesional saya. Saya harap ke depannya program beasiswa BFI Finance dapat lebih ditingkatkan, terutama untuk tujuan peningkatan *brand awareness* dan untuk melahirkan lebih banyak SDM unggul.”

Sebaran Program CSR berdasarkan Wilayah Indonesia



KESEHATAN



DONOR DARAH
802 kantong darah



**PERIKSA KESEHATAN
(TERMASUK OPERASI KESEHATAN)**
731 orang penerima manfaat

INFRASTRUKTUR (TERMASUK LINGKUNGAN)



PEMBANGUNAN DAN RENOVASI SANITASI AIR DI SEKOLAH DAN DESA
2.723 orang penerima manfaat



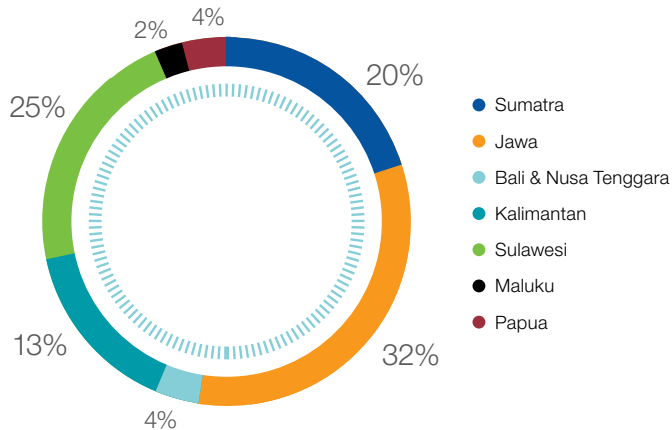
PEMBANGUNAN RENOVASI SEKOLAH (RUANG KELAS, GEDUNG SEKOLAH, LAPANGAN)
2.275 orang penerima manfaat



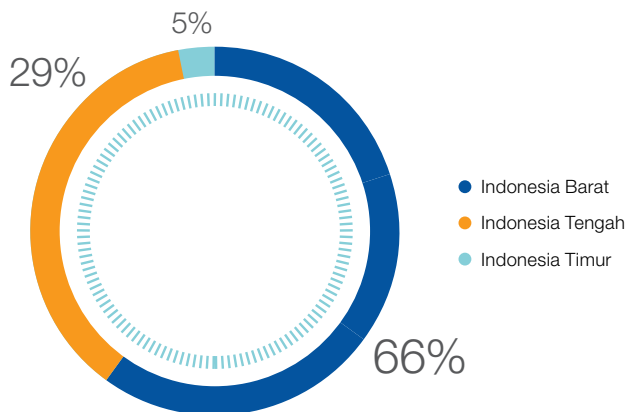
RENOVASI DAN PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH
1.148 orang penerima manfaat



GRAFIK 28_PERSENTASE PROGRAM CSR BERDASARKAN WILAYAH



GRAFIK 29_PERSENTASE PROGRAM BERDASARKAN WILAYAH INDONESIA



PENDIDIKAN



PEMBERIAN FASILITAS SEKOLAH SEPERTI MEJA KURSI, FASILITAS OLAHRAGA, LABORATORIUM)

1.064 orang penerima manfaat



PEMBERIAN FASILITAS BELAJAR ANAK SEKOLAH (SEPERTI SERAGAM DAN PERALATAN TULIS)

1.188 orang penerima manfaat



PELATIHAN DAN EDUKASI (PARENTING, KESEHATAN GIZI, KEUANGAN, DAN PENGEMBANGAN USAHA)

876 orang penerima manfaat

Pengembangan Sumber Daya Manusia

BFI Finance berkomitmen untuk mengembangkan kapasitas dan meningkatkan kualitas karyawannya agar dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, mereka dapat memberikan kinerja terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan Perusahaan. Program pengembangan sumber daya manusia di 2019 antara lain:

- Struktur gaji dan bonus kerja yang disesuaikan dengan prestasi dan kontribusi karyawan serta dengan standar upah minimum.
- Tunjangan dan fasilitas, antara lain: tunjangan kesehatan, transportasi, perumahan, program kepemilikan sepeda motor dan mobil, fasilitas perlindungan dalam bentuk program Asuransi Kecelakaan Diri dan Asuransi Jiwa, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan.
- Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) secara ketat. Klausul-klausul K3 dimuat dalam Perjanjian Kerja Bersama yang ditandatangani karyawan dan Perusahaan. Perusahaan juga mempromosikan gaya hidup seimbang dan sehat bagi karyawannya dengan menyediakan sarana olahraga, pemeriksaan kesehatan rutin, dan informasi pola hidup sehat.



- Program BFI 4 U, yaitu program pengembangan kemampuan kerja yang bersifat strategis sekaligus berkontribusi secara sosial yang diselenggarakan selama 2 bulan dan diikuti 5 kelompok karyawan kantor pusat, yang terdiri dari 5 karyawan dengan misi dan visi yang sama, namun memiliki konsep berbeda. Program ini meliputi penyusunan strategi dan rancangan eksekusi program sosial, pemantapan program, dan peningkatan kolaborasi tim dalam implementasi program yang akan dijalankan sesuai dengan visi dan misi CSR Perusahaan di berbagai bidang.
- Program kesehatan Healthy Movement, yaitu program diskusi dan praktik kesehatan yang diselenggarakan untuk karyawan dengan menghadirkan pakar kesehatan. Dalam program ini, para pekerja dibekali pengetahuan tentang pemeliharaan kualitas kesehatan di lingkungan kerja melalui diskusi "*Healthy Posture for Working and Exercise*" dan diskusi "*Eat Healthy Feel Healthy, Eat Bad Feel Bad*" tentang pola makan sehat. Acara ini dapat diikuti seluruh karyawan, baik dengan menyaksikan langsung maupun secara online melalui fasilitas M-Beat.



Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai kinerja Perusahaan dalam pengembangan SDM, lihat bab Sumber Daya Manusia halaman 110.

Fokus pada Layanan Pelanggan

Peningkatan kualitas layanan melalui penetapan standar layanan yang tinggi untuk diterapkan oleh semua karyawan merupakan upaya kunci Perusahaan dalam memastikan kepuasan pelanggan dalam produk pembiayaannya.

Di 2019, strategi layanan Perusahaan difokuskan pada pelanggan melalui metodologi *"Listen to Our Customers"*. Pendekatan yang berfokus pada pelanggan ini memungkinkan Perusahaan untuk memahami kebutuhan dan harapan pelanggan dengan lebih cermat, sehingga dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan menciptakan pengalaman positif dan menyenangkan bagi setiap pelanggan.

Sebagai bagian dari komitmen dan tanggung jawab Perusahaan kepada pelanggan, program-program berikut diselenggarakan di 2019:

1. Pelatihan karyawan tentang layanan pelanggan;
2. Penyediaan Perawatan Khusus untuk pelanggan terpilih dan loyal; dan
3. Partisipasi dalam acara apresiasi konsumen dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional.

BFI Finance memfasilitasi pelanggannya untuk mendapatkan informasi lengkap tentang produk-produk pembiayaannya serta mengakomodasi umpan balik mereka terkait produk dan layanannya. Informasi rinci tentang produk pembiayaan BFI Finance dapat diperoleh di situs web Perusahaan. Umpan balik yang diterima melalui berbagai jalur di 2019 tercatat sejumlah 15.130 umpan balik. Sekitar 56% dari umpan balik tersebut berkaitan dengan pemahaman pelanggan tentang karakteristik produk.

Di 2019, BFI Finance tidak menerima keluhan dari pelanggan terkait dengan pelanggaran hak privasi pelanggan dan data pelanggan.

Sesuai yang dicantumkan dalam Perjanjian Tingkat Layanan (SLA), di 2019 Perusahaan berhasil menyelesaikan setiap keluhan dalam waktu 20 hari.

Kontribusi BFI Finance kepada semua pemangku kepentingannya tidak hanya diwujudkan dalam penyediaan produk dan layanan pembiayaan bagi seluruh pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat sekitar. Perusahaan juga berkontribusi terhadap kemajuan pembangunan berkelanjutan masyarakat Indonesia, melalui distribusi nilai ekonomi yang diperoleh Perusahaan kepada berbagai pihak eksternal.

Dalam aspek ekonomi, BFI Finance berkontribusi terhadap pemangku kepentingan dalam bentuk pembayaran pajak kepada negara, dividen kepada pemegang saham, dan secara tidak langsung mendorong perekonomian melalui pembayaran remunerasi bagi karyawan.

TABEL 139_DISTRIBUSI NILAI EKONOMI

Kinerja Ekonomi (Rp juta)	2019	2018	2017
Nilai Ekonomi yang Dihasilkan			
- Pendapatan	5.240.729	5.017.721	4.042.317
Nilai Ekonomi yang Didistribusikan			
- Biaya Operasi	2.929.808	2.101.325	1.664.138
- Biaya Pegawai	1.216.813	1.074.939	888.746
- Pembayaran kepada Pemerintah (PPH Badan)	380.571	372.305	300.276
- Investasi Sosial (Biaya CSR)	1.855	1.358	1.647
Laba Ditahan (= Nilai Ekonomi yang Dihasilkan - Nilai Ekonomi yang Didistribusikan)	711.682	1.467.794	1.187.510
Dividen	*	733.255	583.611

*Tidak ada pembagian dividen tunai interim untuk 2019

Selama menjalankan operasinya, BFI Finance tidak pernah memberikan bantuan finansial ataupun bentuk lainnya kepada partai politik ataupun kepada kandidat politik manapun, dan tidak pernah menerima bantuan finansial dalam bentuk apapun dari pemerintah.



134-185
analisis dan
pembahasan manajemen

186-299
tata kelola perusahaan
yang baik

300-313
tanggung jawab
sosial perusahaan

314-337
data penunjang
perusahaan

338-443
laporan keuangan
tahunan







DATA PENUNJANG PERUSAHAAN

Alamat Outlet

316

Kantor Pusat

BFI Tower

Sunburst CBD Lot 1.2
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City, Tangerang Selatan 15322

Tel: (62-21) 2965 0300, 2965 0500

Fax: (62-21) 2966 0757, 2966 0758

Situs web: www.bfi.co.id

Cabang

JAWA, BALI & NUSA TENGGARA		
DKI JAKARTA		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Jakarta-Sunter	Rukan Puri Mutiara Blok A No. 80 Jl. Utama Griya, Sunter	Jakarta Utara
Jakarta Utara	Rukan Grand Orchard Square Blok C/20 Jl. Terusan Kelapa Hybrida Sukapura	Jakarta Utara
Jakarta Utara 2	Rukan Bandengan Indah Blok B-3 Jl. Bandengan Utara No. 80 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan	Jakarta Utara
Jakarta-Meruya	Jl. Lapangan Bola No. 1-1A Meruya, Kebon Jeruk	Jakarta Barat
Jakarta-Cengkareng	Sedayu Square Blok C-02 Jl. Outer Ring Road Cengkareng Barat	Jakarta Barat
Jakarta Timur	Ruko Radin Inten Center No. 8D Jl. Radin Inten, Duren Sawit	Jakarta Timur
Jakarta-Cawang	Jl. Dewi Sartika No. 292F RT 004/RW 005 Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati	Jakarta Timur
Jakarta Selatan	Jl. Ciputat Raya No. 1C RT 003/RW 010 Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama	Jakarta Selatan
Jakarta Selatan 2	Jl. Raya Rawa Bambu No. 18 RT 13/RW 5 Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu	Jakarta Selatan
Jakarta-Corporate Leasing	Rukan Graha Cempaka Mas Blok A No. 31 Jl. Let. Jend. Suprpto Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran	Jakarta Pusat
BANTEN		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Tangerang	Jl. Imam Bonjol No. 279-281 RT 01/RW 04 Kel. Bojong Jaya, Kel. Karawaci	Tangerang
Tangerang 2	Kompleks Balaraja Ultimate For Business Retail Ruko C No. 3A Jl. Raya Serang Km. 24 RT 001/RW 001 Desa Telagasari, Kec. Balaraja	Tangerang
Tangerang 3	Ruko Prabu Kian Santang No. 2 Jl. Prabu Kian Santang RT 01/RW 04 Kel. Sangiang Jaya, Kec. Periuk	Tangerang
Tangerang 5	Ruko Spark Blok C No. 12 Jl. Boulevard Gading Serpong Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua	Tangerang

JAWA, BALI & NUSA TENGGARA

Bintaro	Ruko Kebayoran Arcade 2 Blok B1 No. 09 Bintaro Jaya Sektor 7 Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren	Tangerang
Cikupa	Citra Raya Grand Boulevard Blok E1 No. 286-288 RT 03/RW 03 Desa Ciakar, Kec. Panongan	Tangerang
Pamulang	Jl. Raya Siliwangi No. 57G RT 01/RW 07 Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang	Tangerang
Cilegon	Jl. Ahmad Yani No. 135C RT 004/RW 002 Kel. Sukmajaya, Kec. Jombang	Cilegon
Serang	Ruko Titan Arum Blok F Jl. Raya Cilegon Km 3 Legok RT 01/RW 13 Desa Drangong, Kec. Taktakan	Serang
Serpong-Tangerang Selatan	BFI Tower Sunburst CBD Lot 1.2 Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City	Tangerang Selatan

JAWA BARAT

Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Bandung	Jl. Soekarno Hatta No. 472 Kel. Batu Nunggal, Kec. Bandung Kidul	Bandung
Bandung-Lengkong	Jl. Lengkong Kecil No. 12B	Bandung
Bandung 3	Ruko Soreang Square Blok B No. 10 Jl. Raya Soreang Kel. Cingcin, Kec. Soreang	Bandung
Bandung 4	Kompleks Tritan Point Bandung Blok B5 No. 10 Jl. Jend. A.H. Nasution Kel. Cipadung Wetan, Kec. Panyileukan	Bandung
Bandung 5	Komplek Ruko Sentra Duta Blok DRT 005/RW 006 Kel. Sarijadi, Kec. Sukasari	Bandung
Bandung 6	Istana Sudirman Square No. 12 RT 01/RW 05 Kel. Cibuntu, Kec. Bandung Kulon	Bandung
Bekasi	Kompleks Ruko Suncity Square Blok A No. 46-47 Jl. Mayor Hasibuan, Margajaya	Bekasi
Bekasi 2	Ruko Mega Boulevard Blok RV 2 No. 3A Jl. Harapan Indah Boulevard RT 10/ RW 08 Kel. Medan Satria, Kec. Medan Satria	Bekasi
Bekasi 3	Ruko Taman Jatimakmur Indah No. 11 Jl. Raya Jatimakmur Kel. Jatimakmur, Kec. Pondok Gede	Bekasi
Bekasi 4	Jl. Sultan Hasanudin No. 233 Desa Tambun, Kec. Tambun Selatan	Bekasi
Bekasi 5	Ruko Mall Ciputra Blok R.2 No. 18 Jl. Alternative Kel. Jati Karya, Kec. Jati Sempurna	Bekasi
Bogor	Jl. Raya Tajur No. 118 E-F RT 001/RW 006 Kel. Pakuan, Kec. Bogor Selatan	Bogor
Bogor 2	Ruko Taman Yasmin Sektor 6 Jl. Abdullah Bin Nuh No. 218 (Ring Road Bogor Utara) Kel. Curugmekar, Kec. Bogor Barat	Bogor
Cibinong	Cibinong City Centre A-30 Jl. Tegar Beriman I RT 05/RW 12 Kel. Pakansari, Kec. Cibinong	Bogor
Cikampek	Ruko Sudirman Center Blok A No. 6 Jl. Jenderal Sudirman No. 100 Desa Pucung, Kec. Kotabaru	Karawang
Cikarang	Ruko Golden Boulevard Blok CC.5 No. 3A Jl. Niaga Raya, Jababeka 2 Kel. Pasir Sari, Kec. Cikarang Selatan	Cikarang

JAWA, BALI & NUSA TENGGARA

Cimahi	Jl. Jend. Amirmachmud No. 572 RT 002/RW 001 Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah	Cimahi
Cirebon	Jl. Tuparev No. 115A Ds. Kertawinangun, Kec. Kedawung	Cirebon
Cirebon 2	Jl. Prabu Kiansantang RT 001/RW 08 Desa Sukadana, Kec. Pabuaran	Cirebon
Cirebon 3	Jl. Rd. Dewi Sartika, Blok Palsanga RT 005/RW 006 Kel. Kenanga, Kec. Sumber	Cirebon
Depok	Ruko Margonda Residen No. 12A-14 Jl. Margonda Raya Kav. 461	Depok
Depok 2	Ruko Galeria Sawangan Blok A No. 10 Jl. Raya Sawangan, RT 03/RW 05 Kel. Rangkapan Jasa, Kec. Pancoran Mas	Depok
Garut	Jl. Cikuray No. 72C RT 05/RW 06 Kel. Regol, Kec. Garut Kota	Garut
Indramayu	Jl. Raya Sleman No. 3B RT 01/RW 03 Desa Sleman Lor, Kec. Sliyeg	Indramayu
Karawang	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 73 Bypass RT 04/RW 12, Karangpawitan Karawang Barat	Karawang
Kuningan	Jl. RE Martadinata 53A Cijoho	Kuningan
Majalengka	Jl. K.H. Abdul Halim No. 104 Kel. Majalengka Kulon, Kec. Majalengka	Majalengka
Purwakarta	Jl. Veteran/Terusan Ibrahim Singadilaga Ruko No. 5-6, Kel. Nagrikaler	Purwakarta
Subang	Jl. Kapten Hanafiah Blok B No. 4 RT 98/RW 97 Kel. Karanganyar, Kec. Subang	Subang
Sukabumi	Jl. Brawijaya No. 4 RT 02/RW 12 Kel. Sriwidari, Kec. Gunung Puyuh	Sukabumi
Tasikmalaya	Kompleks Pertokoan Plaza Asia Blok B No. 12A Jl. H.Z. Mustofa	Tasikmalaya

JAWA TENGAH

Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Semarang	Ruko Mataram Plaza Blok D No. 03 Jl. M.T Haryono.	Semarang
Semarang 2	Jl. Taman Setiabudi Rukan A-8 RT 01/RW 18 Kel. Srandol Wetan, Kec. Banyumanik	Semarang
Semarang 3	Jl. Raya Kudungmundu RT 01/RW 25 Kel. Sedangmulyo, Kec. Tembalang	Semarang
Banjarnegara	Jl. S. Parman No. 28 RT 01/RW 04 Kel. Parakancangah, Kec. Banjarnegara	Banjarnegara
Cilacap	Ruko Dualima Jaya No. 7 Jl. Suprpto, RT 02/RW 02 Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah	Cilacap
Grobogan	Ruko The Grand City Blok E Jl. Letjen R. Suprpto No. 61-63 Purwodadi	Grobogan
Jepara	Jl. Pemuda No. 2 RT 03/RW 04 Kel. Potroyudan, Kec. Jepara	Jepara
Kebumen	Perum Graha Mahardika 2 Jl. Kutoarjo D3 Kel. Selang, Kec. Kebumen	Kebumen
Kendal	Jl. Lingkar Pasar 1 No. 1 RT 03/RW 02 Kel. Pekauman, Kec. Kendal	Kendal
Klaten	Jl. Veteran No. 256A Kel. Barend Lor, Kec. Klaten Utara	Klaten
Kudus	Ruko Bitingan Indah (Panjunan) Jl. Ahmad Yani, B 07-B 08 Kel. Panjunan, Kec. Kota Kudus	Kudus
Magelang	Ruko Metro Square F6 Jl. Mayjen Bambang Soegeng Mertoyudan	Magelang
Pati	Jl. Setia Budi No. 21E-21F RT 06/RW 01 Kel. Pati Wetan, Kec. Pati	Pati

JAWA, BALI & NUSA TENGGARA		
Pekalongan	Jl. Dr. Cipto No. 22D	Pekalongan
Pemalang	Komplek Ruko Sapphire Residence Blok B No. 7 Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Beji, Kec. Taman	Pemalang
Purwokerto-Banyumas	Jl. Gerliya Timur No. 35 Ruko No. 3 Kel. Teluk, Kec. Purwokerto Selatan	Purwokerto
Rembang	Jl. Pemuda No. 3B	Rembang
Salatiga	Ruko Wijaya Square Blok A3 Jl. Diponegoro RT 02/RW 05, Sidorejo Lor	Salatiga
Solo	Jl. R.M. Said No. 160C RT 2/RW 3 Kel. Punggawan, Kec. Banjarsari	Surakarta
Solo 2	Jl. Raya Solo Permai HD 03 Solo Baru	Sukoharjo
Sragen	Ruko Harlin Sragen Blok B-1 Jl. Raya Sukowati Kel. Sine, Kec. Sragen	Sragen
Tegal	Ruko Nirmala Estate No. 3-4 Jl. Yos Sudarso No. 20 Kel. Mintaragen, Kec. Tegal Timur	Tegal
Wonogiri	Jl. RM Said No. 19C Kel. Singodutan, Kec. Selogiri	Wonogiri
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Yogyakarta	Ruko Monjali Permai Kav. 2 Jl. Monjali Sinduadi Mlati Sleman	Yogyakarta
Yogyakarta 2	Jl. Gedongkuning No. 110, RT 35 Kel. Rejowinangun, Kec. Kota Gede	Yogyakarta
JAWA TIMUR		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Surabaya	Jl. Ngagel Jaya 39	Surabaya
Surabaya 2	Komp. Ruko Sentra Darmo Villa Blok A No. 6 Jl. Raya Darmo Permai Selatan Kel. Prada Kali Kendal, Kec. Dukuh Pakis	Surabaya
Surabaya 3	Jl. Soka 21C RT 004/RW 007 Kel. Tambaksari, Kec. Tambaksari	Surabaya
Surabaya 4	Jl. Kalibutih No. 91A RT 009/RW 006 Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan	Surabaya
Babat	Jl. Raya Plaosan RT 003/RW 003 Kel. Plaosan Kec. Babat	Lamongan
Banyuwangi	Jl. S. Parman No. 131D Kel. Kalirejo, Kec. Kabat	Banyuwangi
Blitar	Jl. Lawu RT 02/RW 02 Kel. Kauman, Kec. Kepanjen Kidul	Blitar
Bojonegoro	Jl. M.H. Thamrin 103	Bojonegoro
Gresik	Ruko Green Garden Blok A-2 Jl. Dr. Wahidin No. 3-4 Desa Dahanrejo, Kec. Kebomas	Gresik
Gresik 2	Komplek Ruko Gading Mutiara Blok AA No. 7 Jl. Raya Kepatihan Kel. Kepatihan, Kec. Menganti	Gresik
Jember	Jl. Diponegoro No. 32 Ruko 32B Kel. Jember Kidul, Kec. Kaliwates	Jember
Jombang	Jl. KH Wahid Hasyim No. 19 RT 001/RW 001 Kel. Jombang, Kec. Jombang	Jombang
Kediri	Kompleks Pertokoan Hayam Wuruk Trade Center Blok C No. 7-8 Jl. Hayam Wuruk	Kediri
Kediri 2	Ruko Business Park Kharisma No. 12 (B-1) Jl. PB Sudirman No. 114 RT 16/RW 04 Kel. Pare, Kec. Pare	Kediri

JAWA, BALI & NUSA TENGGARA

Lamongan	Jl. Basuki Rahmat No. 203 Kel. Sukomulyo, Kec. Lamongan	Lamongan
Madiun	Jl. Serayu Timur No. 144 RT 043/RW 015 Kel. Pandean, Kec. Taman	Madiun
Malang	Jl. Tumenggung Suryo No. 27 RT 05/RW 14 Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing	Malang
Malang 2	Jl. Ahmad Yani No. 8 Ruko Kepanjen Business Center A11-A12 Kel. Ardirejo, Kec. Kepanjen	Malang
Malang 3	Jl. Panglima Sudirman No. 148 Kav. E-E1 RT 003/RW 007 Kel. Pagentan, Kec. Singosari	Malang
Mojokerto	Ruko Kranggan Permai Blok A05-06 Jl. Pahlawan	Mojokerto
Nganjuk	Jl. Gatot Subroto No. 29 RT 03/RW 04 Kel. Kauman, Kec. Nganjuk	Nganjuk
Pandaan	Ruko Pandaan Central Business Kav. A3-A5 Jl. Raya Bypass Pandaan RT 01/RW 014 Desa Karangjati, Kec. Pandaan	Pasuruan
Pasuruan	Jl. Panglima Sudirman No. 40A Kel. Purworejo, Kec. Purworejo	Pasuruan
Ponorogo	Jl. Soekarno Hatta No. 238 Kel. Banyudono, Kec. Ponorogo	Ponorogo
Probolinggo	Jl. Panglima Sudirman No. 188 RT 04/RW 06 Kel. Jati, Kec. Mayangan	Probolinggo
Sidoarjo	Kompleks Ruko Gateway No. C1-C2 Jl. Raya Waru (Aloha) Desa Sawotratap, Kec. Gedangan	Sidoarjo
Sidoarjo 2	Jl. Mojopahit No. 32B-32C Kel. Sidorake, Kec. Sidoarjo	Sidoarjo
Sidoarjo 3	Ruko La Diva Junction No. 369-370 Jl. Gubernur Sunandar No. 136-138 RT 01/RW 01 Kel. Sidomulyo, Kec. Krian	Sidoarjo
Tuban	Jl. Letda Sucipto No. 5A, Perbon	Tuban
Tulungagung	Jl. W.R. Supratman No. 103 Kel. Kenayan, Kec. Tulungagung	Tulungagung
BALI		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Denpasar	Jl. Gatot Subroto No. 463 Desa Padangsabian Kaja Kec. Denpasar Barat	Denpasar
Denpasar-Sudirman	Kompleks Sudirman Agung Blok C No. 8 Jl. PB. Sudirman	Denpasar
Denpasar 3	Kompleks Imam Bonjol Square 555B Blok A 8-9 Jl. Imam Bonjol Desa Pemecutan Klod Denpasar Barat	Denpasar
Buleleng	Jl. A. Yani No. 85C Kel. Kaliuntu, Kec. Buleleng	Buleleng
Gianyar	Jl. Ciung Wanara No. 17 Lingkungan Candi Baru Kel. Gianyar, Kec. Gianyar	Gianyar
Tabanan	Jl. Ir. Soekarno Kel. Banjar Anyar, Kec. Kediri	Tabanan
NUSA TENGGARA BARAT		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Mataram	Jl. Brawijaya No. 22-24 RT. 02, Lingk.Karang Kelebut Kel. Cakranegara Selatan, Kec. Cakranegara	Mataram
Lombok Barat	Jl. Raya Dr. Sutomo No. 1A Ds. Bekele, Kec. Gerung	Lombok Barat
Manggarai	Jl. Wae Ces RT 004/RW 02 Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong	Manggarai
Sumbawa	Jl. Diponegoro No. 63 RT 002/RW 010 Kel. Bugis, Kec. Sumbawa	Sumbawa

JAWA, BALI & NUSA TENGGARA**NUSA TENGGARA TIMUR**

Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Kupang	Jl. Frans Seda Blok G RT 042/RW 013 Kel. Fatululi, Kec. Oebobo	Kupang

SUMATRA**SUMATRA UTARA**

Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Medan	Jl. Ir. H. Juanda No. 26 Lingkungan IV Kel. Sukadama, Kec. Medan Polonia	Medan
Medan 2	Jl. Bambu II No. 67 B-C Kel. Durian, Kec. Medan Timur	Medan
Asahan	Jl. Sisingamangaraja No. 48E, Lingk. III E Kel. Kisaran Timur, Kec. Kota Kisaran Timur, Kota Kisaran	Asahan
Binjai	Kompleks Ruko Surya Permai Jl. T. Amir Hamzah No. 1L	Binjai
Deli Serdang	Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 79 Kel. Lubuk Pakam, Kec. Lubuk Pakam	Deli Serdang
Karo	Jl. Veteran No. 57A Kel. Kampung Dalam, Kec. Kabanjahe	Karo
Rantauprapat	Jl. Ahmad Yani No. 104 A-B Labuhan Batu	Rantauprapat
Padangsidempuan	Jl. Sudirman No. 8F Kel. Losung Batu, Kec. Padangsidempuan Utara	Padangsidempuan
Pematangsiantar	Kompleks Megaland Blok N No. 10 Jl. Sangnawaluh Kel. Siopat Hulu, Kec. Siantar Timur	Pematangsiantar

RIAU

Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Pekanbaru	Jl. Soekarno Hatta No. 88 Kel. Delima, Kec. Tampan	Pekanbaru
Pekanbaru 3	Jl. Setiabudi No. 89-89A	Pekanbaru
Pekanbaru 5	Jl. H. Imam Munandar No. 341A RT 04/RW 13 Kel. Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya	Pekanbaru
Air Molek-Indragiri Hulu	Jl. Jend. Sudirman RT 02/RW 01 Kel. Kembang Harum, Kec. Pasir Penyau	Indragiri Hulu
Bagan Batu	Jl. Jendral Sudirman Kel. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah	Rokan Hilir
Dumai	Jl. Sultan Hasanuddin RT 14/RW 00 Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota	Dumai
Pelalawan	Jl. Maharaja Indah RT 001/RW 009 Pangkalan Kerinci Kota, Pangkalan Kerinci	Pelalawan
Ujung Batu	Jl. Sudirman Desa Ujung Batu Timur, Kec. Ujung Batu	Rokan Hulu

KEPULAUAN RIAU

Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Tanjung Pinang	Jl. D.I. Panjaitan Km. 08 Kel. Air Raja, Kec. Tanjung Pinang Timur	Tanjung Pinang
Batam	Komplek King Business Center Blok B2 No. 9 &10 Jl. Raja Isa Batam Center Kel. Belian, Kec. Batam Kota	Batam
Batam 2	Komplek Mahkota Raya Blok B No. 11 Kel. Teluk Tereng, Kec. Batam Kota	Batam
Karimun	Jl. Ahmad Yani, RT 005/RW 001 Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun	Karimun

SUMATRA		
SUMATRA BARAT		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Padang	Jl. Khatib Sulaiman No. 63 D-E Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara	Padang
Bukittinggi	Jl. Raya Kapas Panji No. 49B Jambu Air Nagari Taluak IV Suku Kec. Banuhampu, Agam	Bukittinggi
Dharmasraya	Jl. Lintas Sumatera Jorong Pasar Koto Baru	Dharmasraya
Pasaman Barat	Jl. Lintas Simpang Empat Manggopo 2 KM, Kompleks Gunung Tulas Lintang Selatan Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingsuang Aua Kec. Pasaman	Pasaman Barat
JAMBI		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Jambi	Jl. Prof. M. Yamin S.H. No. 65-66 RT 29, Kel. Lebak Bandung, Kec. Jelutung	Jambi
Muara Bungo	Jl. Sudirman No. 45-46 RT 003/RW 001 Kel. Pasir Putih, Kec. Rimbo Tengah	Muara Bungo
Muaro Jambi	Jl. Lintas Timur, RT 16/RW 02 Kel. Sengeti, Kec. Sekernan	Muaro Jambi
Rimbo Bujang	Jl. Pahlawan No. 3 Kel. Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang Tebo	Rimbo Bujang
Sarolangun	Jl. Lintas Sumatera Pasar Sarolangun No. 17 RT 06, Kel. Sukasari, Kec. Sarolangun	Sarolangun
BENGKULU		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Bengkulu	Jl. Danau No. 08 Kel. Dusun Besar, Kec. Singaran Pati	Bengkulu
SUMATRA SELATAN		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Palembang	Kompleks Ruko Rajawali No. B3-B4 RT 016/RW 012 Kel. 9 Ilir, Kec. Ilir Timur II	Palembang
Palembang 2	Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II No. 5 RT 20/RW 04 Kel. Alang-Alang Lebar, Kec. Alang-Alang Lebar	Palembang
Palembang 3	Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara No. R-19, RT 010/RW 02 Kel. Karang Jaya, Kec. Gandus	Palembang
Baturaja	Jl. Dr. Moh. Hatta, RT 04/RW 04 Kel. Sukaraya, Kec. Baturaja Timur Ogan Komerling Ulu (OKU)	Baturaja
Lahat	Jl. Kolonel Burlian No. 95 RT 09/RW 03 Kel. Bandar Agung, Kec. Lahat	Lahat
Lubuklinggau	Jl. Yos Sudarso No. 48, RT 003 Kel. Batu Urip Taba, Kec. Lubuklinggau Timur I	Lubuklinggau
Pangkalan Balai	Jl. Merdeka No. 2E RT 11/RW 04 Kel. Pangkalan Balai, Kec. Banyuasin III	Banyuasin
Prabumulih	Jl. Jend. Sudirman No. 10 Kel. Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur	Prabumulih

SUMATRA		
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Pangkal Pinang	Kompleks Bangka Square (Ruko No. 2) Jl. Raya Koba Km. 5 No. 17 Kec. Pangkalan Baru	Bangka Tengah
Belitung	Jl. Jend. Sudirman No. 32B RT 09/RW 04 Kel. Pangkal Lalang, Kec. Tanjung Pandan	Belitung
LAMPUNG		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Bandar Lampung	Jl. Gajah Mada No. 55 Kota Baru, Tanjung Karang Timur	Bandar Lampung
Bandar Lampung 2	Jl. Sultan Agung No. 19J Kel. Way Halim Permai, Kec. Sukarame	Bandar Lampung
Bandar Jaya	Jl. Proklamator Raya No. 28-29 Kec. Terbanggi Besar, Bandar Jaya	Lampung Tengah
Metro	Jl. Jend. Sudirman No. 282 Kel. Imopuro, Kec. Metro Pusat	Metro
Pringsewu	Jl. A. Yani, RT 012/RW 01 Kel. Pringsewu Utara, Kec. Pringsewu	Pringsewu
Tulang Bawang	Jl. Lintas Timur Sumatera Kel. Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung	Tulang Bawang
KALIMANTAN		
KALIMANTAN BARAT		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Pontianak	Jl. M. Sohor No. 45 Blok E-F RT 05/RW 02 Kel. Akcaya, Kec. Pontianak Selatan	Pontianak
Ketapang	Jl. D.I. Panjaitan No. B16 Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan	Ketapang
Sanggau	Jl. Jenderal Sudirman No. 23 RT 22/RW 08 Kel. Beringin, Kec. Kapuas	Sanggau
Sintang	Komplek Pertokoan Golden Square Jl. Lintas Melawi No. E6 RT 003/RW 001 Kel. Ladang, Kec. Sintang	Sintang
KALIMANTAN TENGAH		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Palangkaraya	Jl. RTA Milono Km. 3,5 No. 6-7 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya	Palangkaraya
Pangkalan Bun	Jl. Pasanah (Kawitan 1), RT 23 Sidorejo	Pangkalan Bun
Sampit	Jl. Jendral Sudirman Km. 1,5 No. 19 RT 43/RW 08 Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang Kotawaringin Timur	Sampit
KALIMANTAN SELATAN		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Banjarmasin	Jl. A. Yani Km. 7,8 No. 30 Kertak Hanyar, Kab. Banjar	Banjarmasin
Banjarbaru	Jl. Ahmad Yani Km. 34,500 RT 003/RW 002 Kel. Komet, Kec. Banjarbaru Utara	Banjarbaru
Barito Kuala	Jl. Trans Kalimantan No. 70 RT 022/RW 002 Kel. Berangas Timur, Kec. Alalak	Barito Kuala
Hulu Sungai Tengah	Jl. Bridgen H. Hasan Basry RT 001/RW 00 Kel. Barabai Barat, Kec. Barabai	Hulu Sungai Tengah

KALIMANTAN		
Tanah Bumbu	Jl. Raya Batulicin, RT 3/RW 1 Desa Sejahtera Kampung Baru-Simpang Empat	Tanah Bumbu
Tanjung	Jl. Ahmad Yani RT II Mabu'un Murung Pudak, Tabalong	Tanjung
KALIMANTAN TIMUR		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Samarinda	Jl. D.I. Panjaitan, Ruko No. 5-6	Samarinda
Samarinda 2 Seberang	Jl. Bung Tomo, RT 09 Kel. Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang	Samarinda
Balikpapan	Jl. Jend. Sudirman No. 14/295, RT 06 Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan	Balikpapan
Balikpapan 2	Jl. Soekarno Hatta Km. 25 No. 35D RT 082/RW 000 Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara	Balikpapan
Berau	Jl. Pemuda, RT 09 Kel. Tanjung Redep, Kec. Tanjung Redep	Berau
Bontang	Ruko Primagama Jl. Bhayangkara Km. 6 No. 16F	Bontang
Paser	Jl. R.A. Kartini No. 21A RT 13/RW 4 Kel. Tanah Grogot	Paser
Penajam Paser Utara	Jl. Propinsi, RT 007, Km.18 Kel. Petung, Kec. Penajam	Penajam Paser Utara
Sengata	Jl. A.W. Syahrani, RT 04/RW 01 Kel. Teluk Lingga, Kec. Sengata Utara	Kutai Timur
Tenggarong	Jl. Patin No. 99B Tenggarong	Kutai Kartanegara
KALIMANTAN UTARA		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Bulungan	Jl. Durian No. 87, RT 41/RW 05 Kel. Tanjung Selor Ilir, Kec. Tanjung Selor	Bulungan
Tarakan	Jl. Gajah Mada No. 75 Kel. Karang Anyar Pantai	Tarakan
SULAWESI		
SULAWESI UTARA		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Manado	Jl. Bethesda No. 18 Kel. Ranotana, Kec. Sario	Manado
Bitung	Jl. Wolter Monginsidi No. 45 Kel. Girian Bawah, Kec. Girian	Bitung
Bolaang Mongondow Utara	Jl. Trans Sulawesi Desa Bolang Itang Induk No. 26 Kec. Bolang Itang Barat	Bolaang Mongondow Utara
Kotamobagu	Jl. Brigjen Katamso, Kel. Kotobangun	Kotamobagu
Minahasa Selatan	Lingkungan IV Kel. Uwuran I, Kec. Amurang	Minahasa Selatan
Tahuna-Kepulauan Sangihe	Jl. Raramenusa Kel. Sawang Bendar, Lingkungan III	Tahuna
Tomohon	Jl. Samratulangi Lingkungan VI Kel. Manata 3, Kec. Tomohon Tengah	Tomohon

SULAWESI		
GORONTALO		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Gorontalo	Jl. Agus Salim No. 290 Kel. Wumialo, Kec. Kota Tengah	Gorontalo
Marisa	Graha Arwana, Jl. Trans Sulawesi Kel. Buntulia Selatan, Kec. Duhiada	Pohuwato
SULAWESI BARAT		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Mamuju	Jl. Diponegoro Ruko No. 2 Kel. Karema, Kec. Mamuju	Mamuju
Mamuju Utara	Jl. Ir. Soekarno Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu	Mamuju Utara
Polewali Mandar	Jl. H. Andi Depu, Ruko Taman Asri No. 1 Kel. Takkatidung, Kec. Polewali	Polewali Mandar
SULAWESI TENGAH		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Palu	Ruko Moh. Hatta Center Jl. Dr. Moh. Hatta No. 21 D-E RT 11/RW 03 Kel. Besusu Tengah, Kec. Palu Timur	Palu
Kotaraya	Jl. I Gusti Ngurah Rai Desa Kotaraya, Kec. Mepanga	Parigi Moutong
Luwuk	Jl. Yos Sudarso No. 15 Kel. Karaton, Kec. Luwuk	Banggai
Parigi Moutong	Jl. Trans Sulawesi Kel. Bantaya, Kec. Parigi	Parigi Moutong
Poso	Jl. Pulau Sumba No. 7 Kel. Gebangrejo, Kec. Poso Kota	Poso
Tolitoli	Jl. Magamu No. 63 Kel. Baru, Kec. Baolan	Tolitoli
SULAWESI SELATAN		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Makassar	Jl. Hertasning Baru (Aeropala) No. 98 Kel. Karunrung, Kec. Rappocini	Makassar
Makassar 2	Jl. Kima Raya 2 No. A20 Kel. Daya, Kec. Biringkanaya	Makassar
Makassar 3	Jl. Cendrawasih No. 69C RT 02/RW 03 Kel. Mario, Kec. Mariso	Makassar
Bone	Jl. Ahmad Yani Kel. Jeppee, Kec. Tanete Riattang Barat	Watampone
Bulukumba	Jl. Samratulangi, Dusun Lajae Desa Polewali, Kec. Gantarang	Bulukumba
Gowa	Kompleks Yasmin Square No. YS 8Jl. Tumanurung Raya Kel. Pandang-Pandang, Kec. Somba Opu	Gowa
Luwu Timur	Jl. Trans Sulawesi Desa Beringin Jaya, Kec. Tomoni	Luwu Timur
Luwu Utara	Jl. Ahmad Yani No. 76, RT 1/RW 1 Kel. Kappuna, Kec. Masamba	Luwu Utara
Palopo	Jl. Kelapa, Kel. Dangerakko Kec. Wara	Palopo
Parepare	Ruko Pelangi No. 1 Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung	Parepare
Toraja	Jl. Poros Makale-Rantepao No. 474A Kel. Tambunan, Kec. Makale Utara	Tana Toraja

SULAWESI**SULAWESI TENGGARA**

Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Kendari	Jl. Brigjend. Moh. Yunus Bypass	Kendari
Bau-Bau	Jl. Bataraguru No. 39 Kel. Wajo, Kec. Murhum	Bau-Bau
Kolaka	Jl. Dr. Sutomo No. 51 Kel. Lamokato, Kec. Kolaka	Kolaka
Konawe	Jl. Sapati No. 15D Kel. Tumpas, Kec. Unaha	Konawe

MALUKU & PAPUA**MALUKU**

Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Ambon	Perumahan Citraland The Arkade Blok 06-07 Jl. Wolter Monginsidi Kel. Lateri, Kec. Bagualan	Ambon
Maluku Tengah	Jl. Abdullah Souliissa No. 20 RT 02/RW 03 Kel. Namaelo, Kec. Kota Masohi	Maluku Tengah

MALUKU UTARA

Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Ternate	Jl. Stadion No. 36, RT 01/RW 01 Kel. Kampung Pisang, Kec. Kota Ternate Tengah	Ternate
Tobelo	Jl. Kemakmuran Desa Rawajaya, Kec. Tobelo	Halmahera Utara

PAPUA BARAT

Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Manokwari	Jl. Trikora Wosi, Ruko No. 3 RT 003/RW 007 Kel. Wosi, Kec. Manokwari Barat	Manokwari
Sorong	Jl. Basuki Rahmat Km. 9,5 Kel. Remu Selatan	Sorong

PAPUA

Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Jayapura	Komplek Ruko No. 11 & 12 Jl. Amphibi Hamadi Kel. Argapura, Kec. Jayapura Selatan	Jayapura
Biak Numfor	Jl. Selat Sunda No. 07, Fandoi, Biak	Biak Numfor
Merauke	Ruko Parako No. 03 Jl. Parakomando, RT 001/RW 001 Kel. Mandala, Kec. Merauke	Merauke
Nabire	Jl. Merdeka No. 69 Kel. Karang Mulia, Kec. Nabire	Nabire

Gerai

JAWA, BALI & NUSA TENGGARA		
DKI JAKARTA		
Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Cakung	Jl. Raya Penggilingan RT 03/RW 07 Kel. Penggilingan, Kec. Cakung	Jakarta Timur
Cijantung	Jl. Gongseng No. 28 Kel. Cijantung, Kec. Pasar Rebo	Jakarta Timur
Ciracas	Kompleks PERUMNAS Jl. Kelapa Dua Wetan Blok B No. 12 RT 04/RW 05 Kel. Kelapa Dua Wetan, Ciracas	Jakarta Timur
Matraman	Galur Sari Raya No. 26A Blok R RT 02/RW 01 Kel. Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman	Jakarta Timur
Johar Baru	Jl. Pangkalan Asem Raya No. 45 Kel. Galur, Kec. Johar Baru	Jakarta Pusat
Kalideres	Jl. Warung Pojok Kampung Asem No. 114 RT 005/RW 005 Kel. Semanan, Kec. Kalideres	Jakarta Barat
Pademangan	Jl. Pademangan III Gg. 18 No. 249B RT 07/RW 07 Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan	Jakarta Utara
Pesanggrahan	Jl. Ciledug Raya No. 6 RT 10/RW 04 Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan	Jakarta Selatan
Tebet	Gedung Regatama Blok A No. 106 Jl. Pariaman Kel. Manggarai, Kec. Tebet	Jakarta Selatan
BANTEN		
Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Babakan	Jl. Kisamaun No. 218 RT 04/RW 01 Kel. Babakan, Kec. Tangerang	Tangerang
Batuceper	Jl. Raya Poris Indah RT 02/RW 03 Kel. Poris Indah, Kec. Batuceper	Tangerang
Curug	Jl. Raya Curug RT 02/RW 07 Kel. Curug Wetan, Kec. Curug	Tangerang
Jatiuwung	Jl. Raya Gatot Subroto Kp. Jatake, RT 006/RW 002 Kel. Jatake, Kec. Jatiuwung	Tangerang
Karawaci	Jl. Mendut Raya Blok CC No. 19 Taman Borobudur 2 Perumnas II	Tangerang
Larangan	Jl. Inpres Raya No. 3 RT 1/RW 6 Kel. Larangan Utara, Kec. Larangan	Tangerang
Sepatan	Ruko Tangerang Golden City Blok R2 No. 9 Jl. Raya Mauk Km. 10 Kel. Sepatan, Kec. Sepatan	Tangerang
Tigaraksa	Jl. Raya Syeh Mubarak, RT 01/RW 04 Kel. Matagara, Kec. Tigaraksa	Tangerang
Ciputat	Jl. Raya Jombang No. 49 RT 002/RW 011 Kel. Jombang, Kec. Ciputat	Tangerang Selatan
Ciputat Timur	Jl. W.R. Supratman No. 3 RT 01/RW 08 Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat Timur	Tangerang Selatan
Ciputat Timur 2	Jl. Purnawarman No. 01 RT 05/RW 05 Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur	Tangerang Selatan
Pondok Aren	Kebon Manggis RT 03/RW 04 Kel. Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren	Tangerang Selatan
Serpong	Jl. Raya Ciater BSD, RT 003/RW 009 Kel. Rawa Mekar Jaya, Kec. Serpong	Tangerang Selatan
Serpong 2	Jl. Raya Ciater, RT 002/RW 009 Kel. Rawa Mekar Jaya, Kec. Serpong	Tangerang Selatan
Serpong Utara	Jl. Jelumpang Raya RT 003/RW 002, Kp. Buaran, Kel. Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara	Tangerang Selatan
Setu 2	Jl. Lingkar Selatan RT 01/RW 03 Kel. Muncul, Kec. Setu	Tangerang Selatan

JAWA, BALI & NUSA TENGGARA**JAWA BARAT**

Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Cibeunying Kidul	Jl. Padasuka No. 31 RT 02/RW 10 Kel. Pasirlayung, Kec. Cibeunying	Bandung
Cicendo	Jl. Sukaraja II No. 190 RT 01/RW 06 Kel. Sukaraja, Kec. Cicendo	Bandung
Ciparay	Jl. Raya Laswi Kp. Sukapura, RT 005/RW 014 Desa Bumiwangi, Kec. Ciparay	Bandung
Ciwidey	Kp. Sukasari, RT 02/RW 20 Desa Ciwidey, Kec. Ciwidey	Bandung
Katapang	Jl. Terusan Kopo No. 10 Ds. Cilampeni, Kec. Katapang	Bandung
Kiaracondong	Jl. Babakan Sari I No. 147 RT 10/RW 11 Kel. Babakan Sari, Kec. Kiaracondong	Bandung
Mandalajati	Jl. A.H. Nasution No. 135 RT 01/RW 06 Kel. Karangpamulang, Kec. Mandalajati	Bandung
Padalarang	Jl. Raya Ciburuy, RT 03/RW 17 Kel. Padalarang, Kec. Padalarang	Bandung Barat
Bantar Gebang	Ruko Persada Blok B19 Jl. Raya Narogong Km. 10 RT 03/RW 09 Kel. Bantar Gebang, Kec. Bantar Gebang	Bekasi
Bekasi Barat	Jl. Panjang, RT 04/RW 06B Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat	Bekasi
Bekasi Timur	Jl. Pahlawan, RT 001/RW 02 Kel. Aren Jaya, Kec. Bekasi Timur	Bekasi
Jatiasih	Jl. Raya Jatiasih No. 36A Kp. Kebantenan, RT 005/RW 010 Kel. Jatiasih, Kec. Jatiasih	Bekasi
Karang Bahagia	Kp. Sukamantri RT 06/RW 01 Desa Sukaraya, Kec. Karang Bahagia	Bekasi
Pondok Gede	Jl. Cempaka 2 No. 19 RT 06/RW 01 Kel. Jatibening, Kec. Pondok Gede	Bekasi
Serang Baru	Jl. Raya Serang Cibarusah Kp. Pasirandu, RT 07/RW 04 Desa Sukasari, Kec. Serang Baru	Bekasi
Jatisampurna	Jl. Kranggan Raya No. 48 RT 001/RW 010 Kp. Kranggan Kulon Kel. Jatiraden, Kec. Jati Sampurna	Bekasi
Setu	Dusun Pasirangin, RT 001/RW 003 Kel. Pasir Angin, Kec. Cileungsi	Bogor
Bogor Utara	Jl. Mandala Simpang Pomad No. 1 RT 005/RW 002 Kel. Ciparigi, Kec. Bogor Utara	Bogor
Bojong Gede	Gelunggong Tengah RT 04/RW 07 Kel. Kedungwaringin, Kec. Bojonggede	Bogor
Ciomas	Jl. Raya Kreteg Pagelaran Kp. Sukajaya, RT 001/RW 001 Kel. Pagelaran	Bogor
Citeureup	Jl. Raya Mayor Oking Atmaja No. 2A RT 02/RW 01 Kel. Puspanegara, Kec. Citeureup	Bogor
Gunung Putri	Jl. Pertigaan Mercedes Kp. Poncol, RT 003/RW 002 Kel. Tlajung Udik, Kec. Gunung Putri	Bogor
Parung	Jl. Raya Parung No. 667 Kel. Parung, Kec. Parung	Bogor
Cimanggis	Jl. Pekapuran, RT 01/RW 05 Kel. Curug, Kec. Cimanggis	Depok
Pancoran Mas	Jl. Pitara Raya No. 7 RT 04/RW 15 Kel. Pancoran Mas	Depok
Limo	Jl. Limo Raya Blok Kramat, RT 03/RW 05 Kel. Limo, Kec. Limo	Depok
Karangmalang	Jl. Pasar Baru Blok G No. 18 Jangkar Mas Residence, RT 17/RW 02 Kel. Karangmalang, Kec. Indramayu	Indramayu
Rengasdengklok	Jl. Proklamasi, RT 02/RW 06 Kel. Amansari, Kec. Rengasdengklok	Karawang
Telagasari	Jl. Syeh Quro Dusun Krajan I, RT 03/RW 01 Kec. Telagasari	Karawang

JAWA, BALI & NUSA TENGGARA		
Klari	Perumahan Puri Kosambi Blok B No. 4 Ds. Duren, Kec. Klari	Karawang
Talaga	Jl. Banjar Layungan RT 08/RW 02 Kel. Talaga Wetan, Kec. Talaga	Majalengka
JAWA TENGAH		
Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Ngaliyan	Jl. Untung Suropati Kav. 1219 Blok A5 RT 09/RW 04 Kel. Kalipancur, Kec. Ngaliyan	Semarang
Ungaran	Jl. Sutoyo No. 57 Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur	Semarang
Blora	Jl. Pemuda No. 71 RT 002/RW 001 Kel. Kedung Jenar, Kec. Blora	Blora
Boyolali	Jl. Pandanaran No. 127 Kp. Koplak, RT 03/RW 06 Kel. Siswodipuran, Kec. Boyolali	Boyolali
Wirosari	Jl. Kusuma Bangsa RT 005/RW 005 Kel. Kunden, Kec. Wirosari	Grobogan
Mayong	Kompleks Ruko Atthoyibah No. 2 Jl. Kudus, RT 3/RW 2 Pelemkerep, Kec. Mayong	Jepara
Tasikmadu	Jl. Lawu No. 196 RT 07/RW 10 Kel. Papahan, Kec. Tasikmadu	Karanganyar
Juwana	Jl. Dukutalit, RT 06/RW 02 Kel. Dukutalit, Kec. Juwana	Pati
Buaran	Jl. Raya Kertijayan No. 216 RT 09/RW 03 Kel. Kertijayan, Kec. Buaran	Pekalongan
Bayan	Jl. Gajah Mada, RT 04/RW 03 Kel. Bayan, Kec. Bayan	Purworejo
Gemolong	Jl. Lojirejo, RT 01/RW 03 Kel. Gemolong, Kec. Gemolong	Sragen
Kartasura	Jl. Adi Sumarmo No. 73 RT 01/RW 03 Ngabeyan, Kartasura	Sukoharjo
Sukoharjo	Jl. Slamet Riyadi No. 22, RT 22 Gayam	Sukoharjo
Adiwerna	Jl. Raya Tegal Slawi RT 17/RW 04 Kel. Tembok Luwung, Kec. Adiwerna	Tegal
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		
Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Sedayu	Jl. Wates Km. 10 No. 09, RT 01 Kel. Pedes Argomulyo, Kec. Sedayu	Bantul
Triharjo	Jl. Dr. Rajimin Dusun Paten, RT 01/RW 04 Kel. Tridadi, Kec. Sleman	Sleman
Kalasan	Jl. Keniten, RT 05/RW 02 Kel. Taman Martani, Kec. Kalasan	Sleman
JAWA TIMUR		
Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Benowo	Jl. Klakah Rejo BCD R6 RT 02/RW 08 Kel. Kandangan, Kec. Benowo	Surabaya
Gunung Anyar	Jl. Kyai Abdul Karim No. 67 RT 01/RW 04 Kel. Rungkut Menanggal, Kec. Gunung Anyar	Surabaya
Jambangan	Jl. Jambangan Tama No. 2A RT 07/RW 03 Kel. Jambangan, Kec. Jambangan	Surabaya
Sukolilo	Jl. Semolowaru Utara No. 149D RT 01/RW 01 Kel. Semolowaru, Kec. Sukolilo	Surabaya
Tenggiling Mejoyo	Jl. Kutisari Selatan No. 110 RT 04/RW 03 Kel. Kutisari, Kec. Tenggiling Mejoyo	Surabaya
Wiyung	Jl. Menganti Wiyung 121 RT 01/RW 04 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung	Surabaya
Wonokromo	Jl. Indragiri No. 4E RT 03/RW 08 Kel. Darmo, Kec. Wonokromo	Surabaya

JAWA, BALI & NUSA TENGGARA

Tandes	Jl. Manukan Dalam I Blok 17D-1 Kel. Manukan, Kec. Tandes	Surabaya
Palang	Jl. Raya Tuban Gresik Dusun Sidorejo, RT 02/RW 03 Desa Glodog, Kec. Palang	Tuban
Genteng	Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 7A RT 003/RW 004 Kel. Genteng Kulon, Kec. Genteng	Banyuwangi
Wlingi	Jl. Gajah Mada No. 39 RT 02/RW 04 Kel. Wlingi, Kec. Wlingi	Blitar
Srengat	Jl. Mastrip No. 22F Kel. Srengat, Kec. Srengat	Blitar
Bandung	Jl. Bandung-Campurdarat Dsn. Bakalan RT 01/RW 02 Ds. Suruhan Kidul, Kec. Bandung	Tulungagung
Sumberrejo	Jl. Raya Sumberrejo No. 210 Dusun Badug, RT 05/RW 02 Sumuragung, Kec. Sumberrejo	Bojonegoro
Balongpanggung	Dusun Banci, RT 01/RW 01 Desa Balongpanggung, Kec. Balongpanggung	Gresik
Cerme	Jl. Raya Cerme Kidul No. 104 RT 001/RW 006 Desa Cerme Kidul, Kec. Cerme	Gresik
Driyorejo	Jl. Raya Driyorejo No. 127 Kel. Driyorejo	Gresik
Kedamean	Jl. Raya Kedamean Dusun Watupasang, RT 12/RW 05 Desa Kedamean, Kec. Kedamean	Gresik
Menganti	Jl. Raya Bringkang, RT 003/RW 002 Kec. Menganti	Gresik
Sidayu	Jl. Pemuda No. 78, Sidayu	Gresik
Mojoagung	Jl. Raya Yos Sudarso No. 161 RT 001/RW 002 Kel. Janti, Kec. Mojoagung	Jombang
Ploso	Jl. Raya Ploso-Babat No. 09 Dusun Bawangan, RT 01/RW 02 Desa Bawangan	Jombang
Kandangan	Jl. Kandangan-Jombang RT 001/RW 021 Ds. Kandangan, Kec. Kandangan	Kediri
Ringinrejo	Jl. Raya Kediri Blitar No. 139 RT 02/RW 01 Kel. Ringinrejo, Kec. Ringinrejo	Kediri
Gurah	Jl. Pemuda, RT 01/RW 02 Kel. Gempolan, Kec. Gurah	Kediri
Mejayan	Jl. Ahmad Yani No. 04 RT 02/RW 01 Kel. Bangunsari, Kec. Mejayan	Madiun
Batu	Jl. Agus Salim No. 60 RT 01/RW 01 Kel. Sisi, Kec. Batu	Batu
Lawang	Ruko Dr. Wahidin No. 2 Jl. Dr Wahidin 19, RT 04/RW 01 Desa Kalirejo, Kec. Lawang	Malang
Pakis	Jl. Bunut Wetan, RT 8/RW 6 Kel. Bunut Wetan, Kec. Pakis	Malang
Gondang	Desa Pohjejer RT 001/RW 001 Kec. Gondang	Mojokerto
Mojosari	Jl. Gajah Mada, RT 007/RW 001 Kel. Menanggal, Kec. Mojosari	Mojokerto
Tanjunganom	Krajan Selatan, RT 05/RW 06 Kel. Kampung Baru, Kec. Tanjunganom	Nganjuk
Beji	Ds. Sidowayah, RT 03/RW 03 Kel. Sidowayah, Kec. Beji	Pasuruan
Porong	Jl. Bhayangkari, RT 12/RW 04 Kel. Juwetkenongo, Kec. Porong	Sidoarjo
Sukodono	Jl. Raya Dungus, RT 16/RW 04 Kel. Sukodono, Kec. Sukodono	Sidoarjo
Taman	Jl. Raya Kletek No. 115A RT 012/RW 006 Desa Kletek, Kec. Taman	Sidoarjo
Tulangan	Jl. Raya Tulangan No. 35 RT 03/RW 06 Kel. Tulangan, Kec. Tulangan	Sidoarjo
Waru	Jl. Raya Berbek No. 16 RT 002/RW 002 Kel. Berbek, Kec. Waru	Sidoarjo
Prambon	Jl. Raya, RT 09/RW 02 Kel. Kedungwonokerto, Kec. Prambon	Sidoarjo

JAWA, BALI & NUSA TENGGARA**BALI**

Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Denpasar Timur	Jl. Padma, Br. Kelod Kangin Desa Penatih, Kec. Denpasar Timur	Denpasar
Kuta	Jl. Uluwatu Kelan Lingkungan Kelan Desa Kel. Tuban, Kec. Kuta	Badung
Kuta Utara	Jl. Raya Anyar No. 7 Lingkungan Anyar Kaja Kerobokan Kec. Kuta Utara	Badung
Ubud	Jl. Raya Andong No. 26 Desa Peliatan, Kec. Ubud	Gianyar

NUSA TENGGARA BARAT

Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Narmada	Jl. Raya Ahmad Yani No. 68, RT 002 Desa Narmada, Kec. Narmada	Lombok Barat

SUMATRA**SUMATRA UTARA**

Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Medan Marelان	Jl. Marelان Raya No. 149, Link 12 Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelان	Medan
Medan Helvetia	Jl. Gaperta Ujung No. 7 Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia	Medan
Medan Tuntungan	Jl. Flamboyan No. 27B Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan	Medan
Percut Sei Tuan	Jl. Besar Tembung No. 26 Dusun IX, RT 010/RW 005 Kel. Bandar Klippa, Percut Sei Tuan	Deli Serdang
Tanjung Morawa	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 488/8C Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa	Deli Serdang
Bilah Hulu	Jl. Lintas Sumatera Dusun Perbaungan Bawah, Aek Nabara Kec. Bilah Hulu	Labuhan Batu
Stabat	Jl. Jend. Sudirman No. 46 Kel. Perdamaian, Kec. Stabat	Langkat
Pematang Bandar	Jl. Sangnawaluh Kel. Kerasaan I, Kec. Pematang Bandar	Simalungun

SUMATRA BARAT

Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Lubuk Kilangan	Jl. Bandar Buat No. 10 Kel. Bandar Buat, Kec. Lubuk Kilangan	Padang

RIAU

Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Marpoyan Damai	Jl. Kaharuddin Nasution No. 242A RT 001/RW 008 Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai	Pekanbaru
Rumbai	Jl. Sembilang No. 9 RT 03/RW 03 Kel. Lembah Sari	Pekanbaru
Tampar	Jl. Garuda Sakti Km. 15 Kel. Simpang Baru, Kec. Tampar	Pekanbaru
Tenayan Raya	Jl. Lintas Timur Km. 12 RT 003/RW 001 Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya	Pekanbaru

SUMATRA		
KEPULAUAN RIAU		
Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Bintan Timur	Jl. Perikanan No. 42 Kp. Kuala Lupur, Kel. Kijang Kota	Tanjung Pinang (Pulau Bintan)
Bintan Utara	Jl. Permaisuri No. 5A Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara	Bintan (Pulau Bintan)
Sagulung	Winner Bugis Junction Blok A3 No. 07 RT 8/RW 1 Kel. Sagulung, Kec. Sagulung	Batam (Pulau Batam)
JAMBI		
Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Alam Barajo	Jl. DR. Purwadi, RT 17/RW 00 Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo	Jambi
Jambi Timur	Jl. Sentot Alibasa, RT 07 Kel. Payo Selincah, Kec. Jambi Timur	Jambi
SUMATRA SELATAN		
Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Sako	Jl. Siaran Sako No. 15 RT 018/RW 07 Kel. Sako, Kec. Sako	Palembang
Betung	Jl. Raya Palembang Betung RT 006/RW 002 Kel. Betung, Kec. Betung	Banyuasin
BANGKA BELITUNG		
Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Taman Sari	Jl. Ahmad Yani Dalam No. 43 RT 03/RW 03 Kel. Kacang Pedang, Kec. Taman Sari	Pangkal Pinang
LAMPUNG		
Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Jati Agung	Jl. Raya Karang Anyar, RT 02/RW 01 Desa Karang Anyar, Kec. Jati Agung	Lampung Selatan
Tanjung Bintang	Jl. Raya Serdang, RT 24/RW 4B Kel. Serdang, Kec. Tanjung	Lampung Selatan
KALIMANTAN		
KALIMANTAN TIMUR		
Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Loa Janan	Jl. Cipto Mangunkusumo RT 09/RW 00 Kel. Simpang Tiga, Kec. Loa Janan Ilir	Samarinda
Palaran	Jl. Ampera, RT 13 Kel. Rawa Makmur, Kec. Palaran	Samarinda
Samarinda Ulu	Jl. Suryanata No. 61, RT 030 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu	Samarinda
Sambutan	Jl. Sultan Sulaiman RT 09/RW 01 Kel. Sambutan, Kec. Sambutan	Samarinda
Sungai Kunjang	Jl. Slamet Riyadi, RT 003 Kel. Karang Asem Ilir, Kec. Sungai Kunjang	Samarinda
Balikpapan Utara	Jl. SoekarNo. Hatta No. 17, RT 01 Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara	Balikpapan
Balikpapan Selatan	Jl. Mulawarman No. 52, RT 52 Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan	Balikpapan

KALIMANTAN		
Balikpapan Selatan 2	Jl. M.T. Haryono Dalam No. 96 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan	Balikpapan
Tenggarong Seberang	Jl. Mulawarman, RT 17 Kel. Manunggal Jaya, Kec. Tenggarong Seberang	Kutai Kartanegara
Loa Kulu	Ruko No. AG 11 Jl. A. Yani, RT 05 Ds. Sepakat, Kec. Loa Kulu	Kutai Kertanegara
Babulu	Desa Babulu Darat RT 003/RW 005 Kel. Babulu Darat, Kec. Babulu	Penajam Paser Utara
Teluk Bayur	Jl. Asam Labanan Jaya Kios Kampung No. 7 Kampung Labanan Jaya, Kec. Teluk Bayur	Berau
KALIMANTAN BARAT		
Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Pontianak Timur	Jl. Tanjung Raya 2 No. 99 RT 004/RW 002 Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur	Pontianak
Pontianak Utara	Jl. Gusti Situt Mahmud RT 03/RW 37 Kel. Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara	Pontianak
Sungai Raya	Jl. K.H. Abdurrahman Wahid No. 26 RT 03/RW 01 Kel. Kuala Dua, Kec. Sungai Raya	Kubu Raya
KALIMANTAN SELATAN		
Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Banjarmasin Barat	Jl. Belitung Laut No. 2 RT 03/RW 01 Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat	Banjarmasin
Banjarmasin Selatan	Jl. Laksana Intan, RT 015/RW 002 Kel. Kelayan Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan	Banjarmasin
Sungai Tabuk	Jl. Martapura Lama Km. 6,2, RT 4 Kel. Sungai Luhut, Kec. Sungai Tabuk	Banjar
Astambul	Pingaran Ilir, RT 01 Kel. Pingaran Ilir, Kec. Astambul	Banjar
Landasan Ulin	Jl. Hercules No. 3 RT 001/RW 002 Kel. Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin	Banjarbaru
KALIMANTAN UTARA		
Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Tarakan Utara	Jl. P. Aji Iskandar, RT 12 Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara	Tarakan
SULAWESI		
SULAWESI UTARA		
Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Tikala	Jl. Yos Sudarso Kel. Paal Dua, Kec. Tikala	Manado
Tuminting	Jl. Pogidon Raya No. 103 Kel. Tumumpa Satu Lingk I, Kec. Tuminting	Manado
Mapanget	Jl. A.A. Maramis Kel. Paniki Bawah Ling. III, Kec. Mapanget	Manado
Bolaang/Inobonto	Jl. AKD Trans Sulawesi Kel. Inobonto, Kec. Bolaang	Bolaang Mongondow
Tondano Timur	Jl. Walanda Maramis Kel. Katinggolan, Kec. Tondano Timur	Minahasa

SULAWESI		
Airmadidi	Komplek Terminal Tumatenden Airmadidi Jl. Arnold Mononutu Kec. Airmadidi, Kab. Minahasa Utara	Minahasa Utara
Kawangkoan	Kompleks Tugu Kacang Jl. Raya Kawangkoan Kel. Talikuran Barat Lingkungan I Kec. Kawangkoan Utara	Tomohon
Aertembaga	Jl. Daan Mogot No. 2 RT 001/RW 001 Kel. Winenet Satu, Kec. Aertembaga	Bitung
Kotamobagu Selatan	Jl. Labot Dugian Kel. Kopandakan I, Kec. Kotamobagu Selatan	Kotamobagu
GORONTALO		
Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Kabila	Jl. Prof. DR. BJ Habibie No. 03 RT 01/ RW 02 Kel. Tumbihe, Kec. Kabila	Gorontalo
Limboto	Jl. K.H. Wahid Hasyim, RT 008/RW 03 Desa Kayubulan, Kec. Limboto	Gorontalo
Tibawa	Jl. Trans Sulawesi Desa Isimu, Kec. Tibawa	Gorontalo
SULAWESI TENGAH		
Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Palu Barat	Jl. Diponegoro No. 104 RT 004/RW 005 Kel. Lere, Kec. Palu Barat	Palu
Tawaeli	Jl. Bulangisi, RT 001/RW 001 Kel. Lambara, Kec. Tawaeli	Palu
SULAWESI SELATAN		
Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Manggala	Jl. Ujung Bori Lama No. 15 RT 02/RW 03 Kel. Antang, Kec. Manggala	Makassar
Wajo	Jl. Tarakan No. 23 RT 001/RW 002 Kel. Mampu, Kec. Wajo	Makassar
Turikale	Jl. Jend. Sudirman No. 207 RT 003/RW 005 Kel. Pettuadae, Kec. Turikale	Maros
Walenrang Utara	Dusun Bolong No. 1 Km. 27 Kec. Walenrang Utara	Luwu
Ponrang	Jl. Poros Palopo-Makassar Kel. Padang Subur, Kec. Ponrang	Luwu
Tallunglipu	Jl. Poros Palopo-Bolu No. 53 Kel. Tallunglipu Mataallo, Kec. Tallunglipu	Toraja Utara
SULAWESI TENGGARA		
Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Abeli	Jl. Setiabudi Kel. Lapulu, Kec. Abeli	Kendari
Pomalaa	Jl. Poros Pomala Kolaka Kel. Pelambua, Kec. Pomalaa	Kolaka
MALUKU & PAPUA		
MALUKU		
Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Nusaniwe	Jl. NN Saar Sopacua No. 63 RT 005/RW 004 Kel. Kudamati, Kec. Nusaniwe	Ambon
Teluk Ambon	Jl. Ir. M. Putuhena No. 3 RT 007/RW 004 Kel. Wayame, Kec. Teluk Ambon	Ambon
Salahutu	Dusun Mamokeng No. 43 RT 02/RW 00 Kel. Tulehu, Kec. Salahutu	Maluku Tengah

MALUKU & PAPUA		
MALUKU UTARA		
Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Ternate Selatan	Jl. Flamboyan, RT 005/RW 002 Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan	Ternate
PAPUA BARAT		
Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Aimas	Jl. Buncis, RT 005/RW 010 Malaweke, Aimas	Sorong
Mariat	Jl. Nusa Indah No. 253 RT 003/RW 003 Kel. Mariyai, Kec. Mariat	Sorong
Sorong Barat	Jl. Arfak No. 41 RT 003/RW 003 Kel. Kampung Baru, Kec. Sorong Kota	Sorong
PAPUA		
Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Tanah Miring	Jl. Ampera Kuprik RT 003/RW 001 Kel. Kuprik, Kec. Semangga	Merauke

Cabang Perwakilan Syariah

JAWA, BALI & NUSA TENGGARA		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Jakarta Meruya Syariah	Jl. Lapangan Bola No. 1-1A Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk	Jakarta Barat
Jakarta Sunter Syariah	Rukan Puri Mutiara Blok A No. 80 Jl. Utama Griya, Sunter	Jakarta Utara
Jakarta Utara Syariah	Rukan Grand Orchard Square Blok C/20 Jl. Terusan Kelapa Hybrida Kel. Sukapura, Kec. Cilincing	Jakarta Utara
Jakarta Timur Syariah	Jl. Dewi Sartika No. 292F RT 004/RW 005 Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati	Jakarta Timur
Jakarta Selatan Syariah	Jl. Ciputat Raya No. 1C RT 003/RW 010 Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama	Jakarta Selatan
Tangerang Syariah	Jl. Imam Bonjol No. 279-281 RT 01/RW 04 Kel. Bojong Jaya, Kec. Karawaci	Tangerang
Serpong-Tangerang Selatan Syariah	BFI Tower, Sunburst CBD Lot.1.2 Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City	Tangerang Selatan
Bekasi Syariah	Kompleks Ruko Suncity Square Blok A No. 46-47 Jl. Mayor Hasibuan, Margajaya	Bekasi
Bogor Syariah	Jl. Raya Tajur No. 118 E-F RT 001/RW 006 Kel. Pakuan, Kec. Bogor Selatan	Bogor
Cirebon Syariah	Jl. Tuparev No. 115A Ds. Kertawinangun Kec. Kedawung	Cirebon
Depok Syariah	Ruko Margonda Residen No. 12A-14 Jl. Margonda Raya Kav. 461	Depok
Bandung Syariah	Jl. SoekarNo. Hatta No. 472 Kel. Batu Nunggal, Kec. Bandung Kidul	Bandung
Sukabumi Syariah	Jl. Brawijaya No. 4 RT 02/RW 12 Kel. Sriwidari, Kec. Gunung Puyuh	Sukabumi
Tasikmalaya Syariah	Kompleks Pertokoan Plaza Asia Blok B No. 12A Jl. H.Z. Mustofa Kel. Tugujaya, Kec. Cihideung	Tasikmalaya

JAWA, BALI & NUSA TENGGARA

Karawang Syariah	Jl. Jendral Ahmad Yani-Bypass Karawang RT 05/RW 12 Kel. Karangpawitan, Kec. Karawang Barat	Karawang
Purwokerto Syariah	Jl. Gerilya Timur No. 35 Ruko No. 3 Kel. Teluk, Kec. Purwokerto Selatan	Purwokerto
Semarang Syariah	Ruko Mataram Plaza Blok D No. 03 Jl. M.T. Haryono Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah	Semarang
Kudus Syariah	Jl. Ahmad Yani Ruko Bitingan Indah B-07 & B-08 Kel. Panjunan, Kec. Kota Kudus	Kudus
Solo Syariah	Jl. R.M. Said No. 160 C RT 002/RW 003 Kel. Punggawan, Kec. Banjarsari	Surakarta
Yogyakarta Syariah	Ruko Monjali Permai Kav. 2 Jl. Monjali RT 011/RW 034 Desa Sinduadi, Kec. Mlati	Yogyakarta
Surabaya Syariah	Jl. Ngagel Jaya No. 39 Kel. Pucang Sewu, Kec. Gubeng	Surabaya
Gresik Syariah	Ruko Green Garden Regency A2-03 & A2-04 Ds. Dahanrejo, Kec. Kebomas	Gresik
Kediri Syariah	Kompleks Pertokoan Hayam Wuruk Trade Center Blok C No. 7-8 Jl. Hayam Wuruk	Kediri
Malang Syariah	Jl. Tumenggung Suryo No. 27 RT 05/RW 14 Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing	Malang
Mojokerto Syariah	Ruko Kranggan Permai Blok A 05-06 Jl. Pahlawan Kel. Kranggan, Kec. Prajurit Kulon	Mojokerto
Sidoarjo Syariah	Ruko Gateway Blok C-1 & C-2 Jl. Raya Waru (Aloha)Ds. Sawotratap, Kec. Gedangan	Sidoarjo
Mataram Syariah	Jl. Brawijaya No. 22-24 RT 02, Lingk. Karang Kelebut Kel. Cakranegara Selatan, Kec. Cakranegara	Mataram

SUMATRA

Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Medan Syariah	Jl. Ir. H. Djuanda No. 26 Lingkungan IV Kel. Sukadama, Kec. Medan Polonia	Medan
Padang Syariah	Jl. Khatib Sulaiman No. 63 D-E Kel. Belanti Timur, Kec. Padang Utara	Padang
Batam Syariah	Ruko King Business Center Blok B2 No. 9-10 Jl. Raja Isa Kel. Belian, Kec. Batam Kota	Batam
Bukittinggi Syariah	Jl. Raya Kapas Panji No. 49B Kel. Jambu Air, Kec. Banuhampu	Agam
Pekanbaru Syariah	Jl. SoekarNo. Hatta No. 88 Kel. Delima, Kec. Tampan	Pekanbaru
Jambi Syariah	Jl. Prof. M. Yamin S.H. No. 65-66 RT 29, Kel. Lebak Bandung, Kec. Jelutung	Jambi
Palembang Syariah	Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara No. R-19 RT 10 RW 02 Kel. Karang Jaya, Kec. Gandus	Palembang
Lampung Syariah	Jl. Gajah Mada No. 55 Kel. Kota Baru, Kec. Tanjung Karang Timur	Bandar Lampung

KALIMANTAN		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Pontianak Syariah	Jl. M. Sohor No. 45 RT 05/RW 02 Kel. Akcaya, Kec. Pontianak Selatan	Pontianak
Palangkaraya Syariah	Jl. RTA Milono Km. 3,5 No. 6-7 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya	Palangkaraya
Banjarmasin Syariah	Jl. A. Yani Km. 8,1 No. 01 Kel. Kertak Hanyar, Kec. Banjar	Banjarmasin
Samarinda Syariah	Jl. D.I. Panjaitan, Ruko No. 5-6 Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Samarinda Utara	Samarinda
Balikpapan Syariah	Jl. Jend. Sudirman No. 14/295 RT 06, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan	Balikpapan
SULAWESI		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Gorontalo Syariah	Jl. Agus Salim No. 290 Kel. Wumialo, Kec. Kota Tengah	Gorontalo
Makassar Syariah	Jl. Hertasning Baru (Aeropala) Kel. Karunrung, Kec. Rappocini	Makassar
Kendari Syariah	Jl. Brigjend. Moh. Yunus Kel. Bende, Kec. Baruga	Kendari
MALUKU & PAPUA		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Ternate Syariah	Jl. Stadion No. 36 RT 01/RW 01 Kel. Kampung Pisang, Kec. Kota Ternate Tengah	Ternate
Sorong Syariah	Jl. Basuki Rahmat Km. 9,5 Kel. Remu Selatan, Kec. Sorong Timur	Sorong

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019,
dan Laporan Auditor Independen

340



PT BFI FINANCE INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
AND ITS SUBSIDIARY

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
FOR YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019**

DAFTAR ISI

CONTENTS

Pernyataan Direksi

Directors' Statement

**Ekshibit/
Exhibit**

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

A

Consolidated Statement of Financial Position

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif
Lain Konsolidasian

B

*Consolidated Statement of Profit or Loss and
Other Comprehensive Income*

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian

C

Consolidated Statement of Changes in Equity

Laporan Arus Kas Konsolidasian

D

Consolidated Statement of Cash Flows

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian

E

Notes to the Consolidated Financial Statement

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019
PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**

**DIRECTORS' STATEMENT REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2019
PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Francis Lay Sioe Ho
Alamat Kantor : BFI Tower - Sunburst CBD Lot 1.2
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City, Tangerang Selatan, 15322
Alamat Rumah : Jl. Duta Indah II No 6, RT 001
RW 014 Pondok Pinang Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 021 - 2965 0300, 2965 0500
Jabatan : Presiden Direktur
2. Nama : Sudjono
Alamat Kantor : BFI Tower - Sunburst CBD Lot 1.2
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City, Tangerang Selatan, 15322
Alamat Rumah : Taman Provence, Blok 3 A9 No. 36
RT 002 RW 025, Kelurahan Lengkong
Wetan, Kecamatan Serpong
Tangerang Selatan
Nomor Telepon : 021 - 2965 0300, 2965 0500
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT BFI Finance Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT BFI Finance Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- 3.a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT BFI Finance Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar;
- b. Laporan keuangan konsolidasian PT BFI Finance Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT BFI Finance Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned :

1. Name : Francis Lay Sioe Ho
Office Address : BFI Tower - Sunburst CBD Lot 1.2
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo,
BSD City, Tangerang Selatan, 15322
Residential Address : Jl. Duta Indah II No 6, RT 001
RW 014, Pondok Pinang Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan
Telephone Title : 021 - 2965 0300, 2965 0500
President Director
2. Name : Sudjono
Office Address : BFI Tower - Sunburst CBD Lot 1.2
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo,
BSD City, Tangerang Selatan, 15322
Residential Address : Taman Provence, Blok 3 A9 No. 36 RT
002 RW 025, Kelurahan Lengkong
Wetan, Kecamatan Serpong,
Tangerang Selatan
Telephone Title : 021 - 2965 0300, 2965 0500
Director

declare that :

1. We are responsible for the preparation and presentation of PT BFI Finance Indonesia Tbk and its Subsidiary's consolidated financial statements;
2. PT BFI Finance Indonesia Tbk and its Subsidiary's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards;
- 3.a. All information contained in PT BFI Finance Indonesia Tbk and its Subsidiary's consolidated financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner;
- b. PT BFI Finance Indonesia Tbk and its Subsidiary's consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;
4. We are responsible for PT BFI Finance Indonesia Tbk and its Subsidiary's internal control system.

We certify the accuracy of this statement.

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors*

Tangerang Selatan, 19 Februari 2020 / *South Tangerang, 19 February 2020*



Francis Lay Sioe Ho
 Presiden Direktur/President Director

 Sudjono
 Direktur/Director

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
 BFI Tower
 Sunburst CBD Lot 1.2
 Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City - Tangerang Selatan 15322
 Phone (021) 2965 0300, 2965 0500 Fax (021) 2966 0757, 2966 0758

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit A

Exhibit A

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF 31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019	2018 *)	1 January/ January 2018/ 31 Desember/ December 2017 *)	
ASET					ASSETS
KAS DAN SETARA KAS	2d,e,4	660.032	755.247	225.203	CASH AND CASH EQUIVALENTS
PIUTANG PEMBIAYAAN					FINANCING RECEIVABLES
- setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 354.682, Rp 377.862 dan Rp 237.482 pada tahun 2019, 2018 dan 2017	2d,f,g,h 5,38	17.395.920	17.280.458	15.174.725	- net of allowance for impairment losses of Rp 354,682, Rp 377,862 and Rp 237,482 in 2019, 2018 and 2017
PIUTANG IJARAH - bersih	2d,i	2.105	105	-	IJARAH RECEIVABLES - net
PIUTANG LAIN-LAIN - bersih	2d,j,6	153.494	198.271	414.127	OTHER RECEIVABLES - net
ASET DERIVATIF	2d,k,u,7	-	110.170	-	DERIVATIVE ASSETS
BEBAN DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA	2l,8	73.133	53.430	43.071	PREPAID EXPENSES AND ADVANCES
ASET IJARAH					IJARAH ASSETS
- setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 12.784 dan Rp 504 pada tahun 2019 dan 2018	2m,9,38	40.591	2.403	-	- net of accumulated depreciation of Rp 12,784 and Rp 504 in 2019 and 2018
ASET TETAP					FIXED ASSETS
- setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 400.062, Rp 349.566 dan Rp 298.954 pada tahun 2019, 2018 dan 2017	2n,10	541.056	530.145	457.376	- net of accumulated depreciation of Rp 400,062, Rp 349,566 and Rp 298,954 in 2019, 2018 and 2017
ASET TAK BERWUJUD					INTANGIBLE ASSETS
- setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 73.945, Rp 63.772 dan Rp 54.400 pada tahun 2019, 2018 dan 2017	2o,11	30.165	32.374	20.552	- net of accumulated amortization of Rp 73,945, Rp 63,772 and Rp 54,400 in 2019, 2018 and 2017
ASET PAJAK TANGGUHAN	2p,14c	110.362	68.382	65.588	DEFERRED TAX ASSETS
ASET LAIN-LAIN	2d,12	82.775	86.391	82.631	OTHER ASSETS
JUMLAH ASET		19.089.633	19.117.376	16.483.273	TOTAL ASSETS

*) direklasifikasi (Catatan 38)

*) as reclassified (Note 38)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on
Exhibit E which are an integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit A/2

Exhibit A/2

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF 31 DECEMBER 2019 (Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019	2018 *)	1 January/ January 2018/ 31 Desember/ December 2017 *)	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
Pinjaman yang diterima	2d,q,v,13	7.730.021	6.899.860	6.819.052	Fund borrowings
Utang pajak	2p,14a	73.271	67.063	140.151	Taxes payable
Surat berharga yang diterbitkan - setelah dikurangi biaya emisi surat berharga yang belum diamortisasi sebesar Rp 5.717, Rp 9.780 dan Rp 8.589 pada tahun 2019, 2018 dan 2017	2d,r,15	3.758.283	5.196.220	3.909.411	Securities issued - net of unamortized securities issuance cost of Rp 5,717, Rp 9,780 and Rp 8,589 as of in 2019, 2018 and 2017
Beban yang masih harus dibayar	2d,v,16,38	796.709	283.204	291.660	Accrued expenses
Liabilitas imbalan pasca-kerja	2s,17	258.337	202.498	199.716	Post-employment benefits liabilities
Liabilitas derivatif	2d,k,u,7	130.029	-	817	Derivative liabilities
Utang dividen	2aa,18	2.261	1.758	1.612	Dividend payables
Utang lain-lain	2d,19,38	260.542	262.977	216.588	Other payables
JUMLAH LIABILITAS		13.009.453	12.913.580	11.579.007	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					Equity attributable to owners of the parent
Modal saham - nilai nominal Rp 25 (nilai penuh) per saham Modal dasar - 20.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 15.967.115.620 saham	20	399.178	399.178	399.178	Share capital - par value of Rp 25 (full amount) per share Authorized capital - 20,000,000,000 shares Issued and fully paid capital - 15,967,115,620 shares
Tambahan modal disetor - bersih	21	553.286	553.286	553.286	Additional paid-in capital - net
Saham treasuri	2x,20	(252.160)	(252.160)	(252.160)	Treasury stock
Penghasilan komprehensif lain (Kerugian) keuntungan kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - bersih	2k,7,33	(87.938)	1.684	(35.477)	Other comprehensive income Cumulative (loss) gain on derivative instrument for cash flows hedges - net
Kerugian aktuarial program manfaat pasti	2s,17,33	(54.353)	(41.926)	(75.928)	Loss on defined benefit actuarial program
Saldo laba					Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya		100.000	86.307	72.733	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		5.422.160	5.457.423	4.242.633	Unappropriated
Kepentingan non-pengendali		6.080.173	6.203.792	4.904.265	Non-controlling interests
		7	4	1	
JUMLAH EKUITAS		6.080.180	6.203.796	4.904.266	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		19.089.633	19.117.376	16.483.273	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) direklasifikasi (Catatan 38)

*) as reclassified (Note 38)

Tangerang Selatan, 19 Februari/ February 2020



Sudjono
Direktur/ Director

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on
Exhibit E which are an integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit B

Exhibit B

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019	2018*)	
PENDAPATAN				INCOME
Piutang pembiayaan Keuangan	2d,f,g,t,22,38 2d,t	4.995.718 52.676	4.893.146 20.217	Financing receivables Finance
Syariah	2d,h,i,t,23,38	4.200	7	Sharia
Lain-lain	2d,n,t,24,38	188.135	104.351	Others
Jumlah Pendapatan		5.240.729	5.017.721	Total Income
BEBAN				EXPENSES
Gaji dan tunjangan	2s,t,25,29,38	(1.216.813)	(1.074.939)	Salaries and benefits
Bunga dan keuangan	2d,q,r,t,26	(1.008.160)	(1.035.650)	Interest and financing charges
Umum dan administrasi	2l,n,o,t,27,38	(704.883)	(541.668)	General and administrative
Penyisihan kerugian penurunan nilai				Provision for impairment losses
Piutang pembiayaan	2d,t,5,38	(425.747)	(509.182)	Financing receivables
Piutang ijarah	2d,t	(549)	(1)	Ijarah receivables
Lain-lain	2d,t,28,37,38	(792.324)	(16.182)	Others
Jumlah Beban		(4.148.476)	(3.177.622)	Total Expenses
LABA SEBELUM PAJAK		1.092.253	1.840.099	PROFIT BEFORE TAX
Beban Pajak Penghasilan	2p,14b	(380.571)	(372.305)	Income Tax Expenses
LABA TAHUN BERJALAN		711.682	1.467.794	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will be reclassified to profit or loss
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif - lindung nilai arus kas	2k,7,33	(112.028)	46.452	Effective portion of the fair value change of the derivative - instrument cash flow hedge
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	14c,33	22.406	(9.291)	Income tax relating to item that will be reclassified to profit or loss
		(89.622)	37.161	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit or loss
(Kerugian) keuntungan aktuarial program manfaat pasti	2s,17,33	(15.483)	42.502	(Loss) gain on defined benefit actuarial program
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	14c,33	3.056	(8.500)	Income tax relating to item that will not be reclassified to profit or loss
		(12.427)	34.002	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK		(102.049)	71.163	OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR - NET OF TAX
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		609.633	1.538.957	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

*) direklasifikasi (Catatan 38)

*) as reclassified (Note 38)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on
Exhibit E which are an integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit B/2

Exhibit B/2

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2019</u>	<u>2018*</u>	
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTTABLE TO:
Pemilik entitas induk		711.685	1.467.794	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali		(3)	-	Non-controlling interests
		<u>711.682</u>	<u>1.467.794</u>	
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTTABLE TO:
Pemilik entitas induk		609.636	1.538.957	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali		(3)	-	Non-controlling interests
		<u>609.633</u>	<u>1.538.957</u>	
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	2z,32	<u>48</u>	<u>98</u>	BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)

*) direklasifikasi (Catatan 38)

*) as reclassified (Note 38)

Tangerang Selatan, 19 Februari/ February 2020


Sudiono
 Direktur/ Director

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued in Indonesian Language

Exhibit C

Exhibit C

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA TBK AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Saldo per 31 Desember 2018	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/Equity attributable to owners of the parent										Jumlah ekuitas/ Total equity	Balance as of 31 December 2018
	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disor - bersih/ Additional paid-in capital - net	Saham treasury/ Treasury stock	Keuntungan (kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas bersih/ Cumulative gains (losses) on derivative instrument for cash flows hedges - net	Kerugian aktuarial manfaat pasti/ Losses on defined benefit actuarial program	Saldo laba/Retained earnings	Jumlah sebelum kepentingan non-pengendali/ Total before non-controlling interests	Keuntungan non-pengendali/ Non-controlling interests				
399.178	553.286	(252.160)	1.684	(41.926)	86.307	5.457.423	6.203.792	4	6.203.796			
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	-	711.685	711.685	(3)	711.682			
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak:												
Bagian yang efektif dari lindung nilai arus kas	2k, 7	-	-	(89.622)	-	-	(89.622)	-	(89.622)			
Kerugian aktuarial program pensiun	2s, 17	-	-	(12.427)	-	-	(12.427)	-	(12.427)			
Penerbitan saham entitas anak kepada kepentingan non-pengendali	1c	-	-	(89.622)	(12.427)	711.685	609.636	(3)	609.633			
Penyisihan saldo laba untuk cadangan umum	18	-	-	-	13.693	(13.693)	-	-	-			
Dividen tunai tahun 2018	2aa, 18	-	-	-	-	(733.255)	(733.255)	-	(733.255)			
Saldo per 31 Desember 2019	399.178	553.286	(252.160)	(87.938)	100.000	5.422.160	6.080.173	7	6.080.180			

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued in Indonesian Language

Ekshibit C/2

Exhibit C/2

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA TBK AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Saldo per 31 Desember 2017	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/Equity attributable to owners of the parent										Saldo per 31 Desember 2017
	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor - bersih/ Additional paid-in capital - net	Saham treasury/ Treasury stock	Keuntungan/ instrument derivatif untuk melindungi nilai arus kas bersih/ Cumulative gains (losses) on derivative instrument for cash flows hedges - net	Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pensiun/ Gains (losses) on defined actuarial program	Saldo laba/Retained earnings	Telaah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Jumlah sebelum non-pengendali/ Total before non-controlling interests	Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interests	
399.178	553.286	(252.160)	(35.477)	(75.928)	72.733	4.242.633	4.904.266	1	4.904.266	1	4.904.266
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	-	1.467.794	1.467.794	-	1.467.794	-	1.467.794
Laba tahun berjalan	-	-	-	37.161	-	-	37.161	-	37.161	-	37.161
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagian yang efektif dari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lindung nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
arus kas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keuntungan aktuarial program pensiun	-	-	-	-	34.002	-	34.002	-	34.002	-	34.002
	-	-	-	37.161	34.002	1.467.794	1.538.957	-	1.538.957	-	1.538.957
Penerbitan saham entitas anak kepada kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Penyisihan saldo laba untuk cadangan umum	-	-	-	-	-	(13.574)	(13.574)	-	(13.574)	-	(13.574)
Dividen tunai tahun 2017	-	-	-	-	-	(239.430)	(239.430)	-	(239.430)	-	(239.430)
Saldo per 31 Desember 2018	399.178	553.286	(252.160)	1.684	(41.926)	86.307	5.457.423	4	6.203.796	4	6.203.796

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Total comprehensive income for the year Profit for the year

Other comprehensive income net of tax:

Effective portion of cash flows hedges

Actuarial gains from pension plan

Issuance of subsidiary's share to non-controlling interests

Appropriation for general reserve

Cash dividends of 2017

Balance as of 31 December 2018

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit D

Exhibit D

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019	2018	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari:				Cash received from:
Transaksi pembiayaan		20.435.526	18.663.015	Financing transactions
Pembiayaan bersama	31a	602.299	540.443	Joint financing
Penghasilan bunga bank dan deposito berjangka		52.906	19.639	Interest income from banks and time deposits
Lain-lain		193.443	120.925	Others
Pengeluaran kas untuk:				Cash disbursement for:
Transaksi pembiayaan baru		(15.896.368)	(16.372.413)	New financing transactions
Beban umum dan administrasi		(1.728.866)	(1.414.488)	General and administrative expenses
Pembiayaan bersama dan penerusan pinjaman (<i>channeling</i>)	31a	(561.507)	(380.778)	Joint financing and channeling
Beban bunga dan keuangan		(1.079.123)	(1.077.455)	Interest and financing charges
Pajak penghasilan		(394.488)	(423.896)	Income taxes
Lain-lain		(423.878)	(41.653)	Others
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		1.199.944	(366.661)	Net cash flows provided by (used in) operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Hasil penjualan aset tetap	10	22.507	20.465	Proceeds from sale of fixed assets
Perolehan aset tetap	10	(104.877)	(158.519)	Acquisition of fixed assets
Perolehan aset tak berwujud	11	(6.313)	(20.296)	Acquisition of intangible assets
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(88.683)	(158.350)	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari:				Cash received from:
Pinjaman yang diterima	13,34	5.925.675	5.938.380	Fund borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	15,34	1.000.000	2.905.000	Securities issued
Penerimaan setoran modal dari kepentingan non-pengendali		6	3	Receipts of paid-in capital from non-controlling interests
Pengeluaran kas untuk:				Cash disbursement for:
Pinjaman yang diterima	13,34	(4.956.902)	(5.931.898)	Fund borrowings drawdown
Pelunasan pokok surat berharga yang diterbitkan	15,34	(2.442.000)	(1.617.000)	Repayment of securities issued principal
Dividen tunai	18	(733.255)	(239.430)	Cash dividends
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan		(1.206.476)	1.055.055	Net cash flows (used in) provided by financing activities
(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS (Saldo dipindahkan)		(95.215)	530.044	NET (DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (Balance broughtforward)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements
on Exhibit E which are an integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

*These Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit D/2

Exhibit D/2

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<i>Catatan/ Notes</i>	2019	2018	
(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS (Saldo pindahan)		(95.215)	530.044	<i>NET (DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (Balance carryforward)</i>
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		755.247	225.203	<i>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR</i>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		660.032	755.247	<i>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR</i>
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:				<i>CASH AND CASH EQUIVALENTS CONSIST OF:</i>
Kas dan bank	4	387.220	452.095	<i>Cash on hand and in banks</i>
Deposito berjangka	4	272.812	303.152	<i>Time deposits</i>
		<u>660.032</u>	<u>755.247</u>	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

*See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements
on Exhibit E which are an integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole*

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E

Exhibit E

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum Perusahaan

PT BFI Finance Indonesia Tbk (“Perusahaan”) didirikan dengan nama PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia pada tanggal 7 April 1982 berdasarkan Akta No. 57 yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-2091-HT01.01.TH82 tanggal 28 Oktober 1982 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 102 tanggal 21 Desember 1982, Tambahan No. 1390. Berdasarkan Akta No. 54 yang dibuat dihadapan Inge Hendarmin, S.H., pengganti dari Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 17 September 1986, nama Perusahaan diubah dari PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia menjadi PT Bunas Intitama Leasing Indonesia, perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-6977.HT.01.04.TH.86 tanggal 7 Oktober 1986 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 94 tanggal 25 November 1986, Tambahan No. 1451. Berdasarkan Akta No. 80 tanggal 22 November 1989 jo Akta No. 27 tanggal 8 Maret 1990 keduanya dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H., nama Perusahaan diubah dari PT Bunas Intitama Leasing Indonesia menjadi PT Bunas Finance Indonesia, perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-1441-HT.01.04.TH.90 tanggal 13 Maret 1990 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 34 tanggal 28 April 1990, Tambahan No. 1537. Berdasarkan Akta No. 37 yang dibuat dihadapan Achmad Abid, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 8 Agustus 1996, nama Perusahaan diubah dari PT Bunas Finance Indonesia menjadi PT Bunas Finance Indonesia Tbk, perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-9625-HT.01.04.TH.96 tanggal 21 Oktober 1996 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 11 tanggal 7 Februari 1997, Tambahan No. 552. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, salah satunya berdasarkan Akta No. 116 tanggal 27 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan nama Perusahaan dari PT Bunas Finance Indonesia Tbk menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-03668.HT.01.04.TH.2001 tanggal 24 Juli 2001 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 35 tanggal 30 April 2002, Tambahan No. 4195.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information of the Company

PT BFI Finance Indonesia Tbk (“the Company”) was established as PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia on 7 April 1982 based on Notarial Deed No. 57 of Kartini Muljadi, S.H., Notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice (recently known as the Ministry of Law and Human Rights) of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C2-2091-HT01.01.TH82 dated 28 October 1982 and was published in the State Gazette No. 102, dated 21 December 1982, Supplement No. 1390. Based on Notarial Deed No. 54 of Inge Hendarmin, S.H., a substitute of Kartini Muljadi S.H. in Jakarta dated 17 September 1986, the Company’s name changed from PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia to PT Bunas Intitama Leasing Indonesia, this amendment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C2-6977.HT.01.04.TH.86 dated 7 October 1986 and was published in the State Gazette No. 94 dated 25 November 1986, Supplement No. 1451. Based on Notarial Deed No. 80 dated 22 November 1989, number Deed 27 dated 8 March 1990, both of which were made before Kartini Muljadi S.H. the Company’s name changed from PT Bunas Intitama Leasing Indonesia to PT Bunas Finance Indonesia, this amendment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C2-1441-HT.01.04.TH.90 dated 13 March 1990 and was published in the State Gazette No. 34 dated 28 April 1990, Supplement No. 1537. Based on Deed No. 37 which were made before Achmad Abid, SH, a substitute of Sutjipto, S.H., Notary in Jakarta dated 8 August 1996, the name of the Company was changed from PT Bunas Finance Indonesia to PT Bunas Finance Indonesia Tbk, a change which has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. C2-9625-HT.01.04.TH.96 dated 21 October 1996 and was published in the State Gazette No. 11 dated 7 February 1997, Supplement No. 552. The Company’s Articles of Association has been amended several times, which one of the amendments was based on Notarial Deed No. 116 dated 27 June 2001 of Aulia Taufani, S.H., a substitute of Sutjipto, S.H., Notary in Jakarta, in connection with the change of name of the Company from PT Bunas Finance Indonesia Tbk to PT BFI Finance Indonesia Tbk. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C-03668.HT.01.04.TH.2001 dated 24 July 2001 and was published in the State Gazette No. 35 dated 30 April 2002, Supplement No. 4195.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/2

Exhibit E/2

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum Perusahaan (Lanjutan)

Perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 55 tanggal 25 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, mengenai persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan istilahnya dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0033646.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, perubahan ini masih dalam proses diumumkan dalam Lembaran Berita Negara.

Perusahaan memperoleh izin usaha dalam bidang usaha lembaga Pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-038/KM.11/1982 tanggal 12 Agustus 1982, yang telah diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan No. 493/KMK.013/1990 tanggal 23 April 1990.

Pada tanggal 20 Februari 2006, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengamandemen izin usaha Perusahaan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-038/KM.5/2006.

Melalui amandemen ini, izin usaha yang sebelumnya diberikan kepada PT Bunas Finance Indonesia Tbk berlaku surut sejak adanya persetujuan perubahan nama Perusahaan dari PT Bunas Finance Indonesia Tbk menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk dari instansi yang berwenang melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-03668.HT.01.04.TH.2001 tanggal 24 Juli 2001.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- I. Usaha Pembiayaan:
 - a. Pembiayaan investasi
 - b. Pembiayaan modal kerja
 - c. Pembiayaan multiguna
 - d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- II. Usaha Pembiayaan Syariah:
 - a. Pembiayaan jual beli
 - b. Pembiayaan investasi
 - c. Pembiayaan jasa.

1. GENERAL (Continued)

a. Establishment and General Information of the Company (Continued)

The latest amendment based on Deed No. 55 dated 25 June 2019 made before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, regarding approval for amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning Business Objectives and Activities to be adopted to the new Government Regulation No. 24 of 2018 "Indonesian Standard Field of Business year 2017" concerning Integrated Electronic Licensing Services, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree Number AHU-0033646.AH.01.02 Tahun 2019 dated 28 June 2019. Until the date of the consolidated financial statements, changes this is still in the process to be announced in the State Gazette.

The Company obtained its license to operate as a financing company from the Minister of Finance by virtue of his decree No. KEP-038/KM.11/1982 dated 12 August 1982 as amended by Decree No. 493/KMK.013/1990 dated 23 April 1990.

On 20 February 2006, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia amended the Company's license in its decision letter No. KEP-038/KM.5/2006.

Through this amendment, the previous license granted to PT Bunas Finance Indonesia Tbk was applied for retroactively since the approval of the change in the name of the Company from PT Bunas Finance Indonesia Tbk to PT BFI Finance Indonesia Tbk from the regulatory authority in its decision letter of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-03668.HT.01.04.TH.2001 dated 24 July 2001.

Based on Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company may carry out the following main business activities:

- I. Financing:
 - a. Investment financing
 - b. Working capital financing
 - c. Multipurpose financing
 - d. Other financing activities under the approval of the Financial Service Authority.
- II. Sharia Financing:
 - a. Financing sale and purchase
 - b. Investment financing
 - c. Financing services.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/3

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (Lanjutan)

**a. Pendirian dan Informasi Umum Perusahaan
(Lanjutan)**

Untuk menjalankan usaha pembiayaan syariah, Perusahaan telah menerima Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-27/NB.223/2018 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan kepada Perusahaan dan keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 8 Februari 2018.

Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1982. Kantor pusat Perusahaan terletak di BFI Tower, Sunburst CBD Lot 1.2, Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Tangerang Selatan.

Perusahaan dan entitas anaknya (secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai grup) mempunyai masing-masing 232 kantor cabang, 191 gerai dan 45 kantor cabang syariah pada tanggal 31 Desember 2019, dan 228 kantor cabang, 173 gerai dan 22 kantor cabang syariah pada tanggal 31 Desember 2018 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Pada tahun 1990, Perusahaan melakukan penawaran umum perdana atas 2.125.000 sahamnya dengan nilai nominal Rp 1.000 (nilai penuh) per saham melalui bursa efek di Indonesia dengan harga penawaran sejumlah Rp 5.750 (nilai penuh) per saham. Pada tahun 1993, Perusahaan melakukan penawaran tambahan sebanyak 8.500.000 saham dengan nilai nominal per saham yang sama melalui bursa efek di Indonesia.

Pada tanggal 8 April 1993, para pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk membagikan dividen saham dengan dasar 1 (satu) saham baru untuk 10 (sepuluh) saham yang dimiliki, sebanyak 1.062.500 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (nilai penuh) per saham. Pada tanggal yang sama, para pemegang saham Perusahaan juga menyetujui untuk menerbitkan saham bonus dengan dasar 17 (tujuh belas) saham baru untuk setiap 20 (dua puluh) saham yang dimiliki, sebanyak 9.934.668 saham dengan nilai nominal yang sama. Pada tanggal 22 Januari 1994, para pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk membagikan dividen saham dengan dasar 1 (satu) saham baru untuk 3 (tiga) saham yang dimiliki, sebanyak 7.207.390 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (nilai penuh) per saham.

Exhibit E/3

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

1. GENERAL (Continued)

**a. Establishment and General Information of the
Company (Continued)**

To undertake a sharia financing business, the Company has received a copy of the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Service Authority Number Kep-27/NB.223/2018 concerning the License to Open Sharia Business Unit to the Company and the Decree effective on 8 February 2018.

The Company started its commercial operations in 1982. The Company's registered office is located at BFI Tower, Sunburst CBD Lot 1.2, Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, South Tangerang.

The Company and its subsidiary (hereinafter collectively referred to as the group) have 232 branches, 191 kiosks and 45 sharia branch as of 31 December 2019, and 228 branches, 173 kiosks and 22 sharia branch as of 31 December 2018, throughout Indonesia.

b. Public Offering of the Company's Shares

In 1990, the Company conducted an initial public offering of its 2,125,000 shares with a par value of Rp 1,000 (full amount) per share through the stock exchanges in Indonesia at an offering price of Rp 5,750 (full amount) per share. In 1993, the Company offered an additional of 8,500,000 shares at the same par value per share through a stock exchange in Indonesia.

On 8 April 1993, the shareholders of the Company approved to distribute share dividends on the basis of 1 (one) new share for every 10 (ten) shares held totaling 1,062,500 shares with a par value of Rp 1,000 (full amount) per share. On the same date, the shareholders of the Company also approved to issue bonus shares on the basis of 17 (seventeen) new shares for every 20 (twenty) shares held totaling 9,934,668 shares at the same par value. On 22 January 1994, the shareholders of the Company approved to distribute share dividends on the basis of 1 (one) new share for every 3 (three) shares held totaling 7,207,390 shares at a par value of Rp 1,000 (full amount) per share.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/4

Exhibit E/4

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan (Lanjutan)

Pada tanggal 18 April 1994, Perusahaan memperoleh surat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal (kemudian berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan/BAPEPAM-LK dan terakhir dikenal sebagai Otoritas Jasa Keuangan/OJK) (BAPEPAM) melalui surat No. S-639/PM/1994 dalam rangka penawaran umum terbatas pertama (I) Perusahaan sebanyak 28.829.558 saham dengan harga penawaran sejumlah Rp 1.500 (nilai penuh) per saham dimana setiap 1 (satu) saham yang dimiliki berhak atas 1 (satu) saham baru. Selanjutnya, pada tanggal 17 Januari 1997, Perusahaan memperoleh surat pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK melalui surat No. S-71/PM/1997 dalam rangka penawaran umum terbatas kedua Perusahaan sebanyak 115.318.232 saham dengan harga penawaran Rp 1.000 (nilai penuh) per saham dimana setiap 1 (satu) saham yang dimiliki berhak atas 2 (dua) saham baru.

Pada tanggal 17 Juni 1997, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan nilai nominal saham dari Rp 1.000 (nilai penuh) per saham menjadi Rp 500 (nilai penuh) per saham, sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah saham beredar Perusahaan dari sebanyak 172.977.348 saham menjadi sebanyak 345.954.696 saham.

Dalam rangka restrukturisasi utang, para pemegang saham Perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 27 Januari 2000 menyetujui penerbitan *Mandatory Convertible Bonds* atau Obligasi Wajib Konversi (MCB) yang wajib dikonversikan menjadi sebanyak 414.384.585 saham Perusahaan.

Pada bulan Mei 2006, seluruh MCB telah dikonversi menjadi sebanyak 414.384.585 saham biasa sehingga jumlah saham beredar Perusahaan menjadi sebanyak 760.339.281 saham pada tanggal 31 Desember 2006.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang diaktakan dengan Akta notaris No. 65 tanggal 21 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perusahaan mengenai perubahan nilai nominal saham Perusahaan (pemecahan saham) dari sebesar Rp 500 (nilai penuh) per saham menjadi sebesar Rp 250 (nilai penuh) per saham, sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah saham beredar Perusahaan dari semula sebanyak 760.339.281 saham menjadi sebanyak 1.520.678.562 saham, dan menyetujui untuk mengubah Pasal 15 ayat 3b mengenai Tugas dan Wewenang Direksi.

Pemecahan saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari BEI melalui surat No. S-05439/BEI.PPJ/07-2012 tertanggal 31 Juli 2012.

1. GENERAL (Continued)

b. Public Offering of the Company's Shares (Continued)

On 18 April 1994, the Company received effective statement from the Capital Market Supervisory Board (was then changed to Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency/BAPEPAM-LK and recently known as the Financial Services Authority/OJK) (BAPEPAM) through letter No. S-639/PM/1994 to conduct the first rights issue of the Company's shares on a 1 (one) for 1 (one) basis totaling 28,829,558 shares at an offering price of Rp 1,500 (full amount) per share. Moreover, on 17 January 1997, the Company received effective statement from the BAPEPAM-LK through letter No. S-71/PM/1997 to conduct the second rights issue of the Company's shares on the basis of 2 (two) new shares for every 1 (one) shares held totaling 115,318,232 shares at an offering price of Rp 1,000 (full amount) per share.

On 17 June 1997, the shareholders of the Company approved a stock split, resulting in a change in par value per share from Rp 1,000 (full amount) to Rp 500 (full amount), thus resulting in the increase in number of the Company's shares outstanding from 172,977,348 shares to 345,954,696 shares.

In respect with the debt restructuring, the Company's shareholders through Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on 27 January 2000 approved to issue the Mandatory Convertible Bonds (MCB) which should be converted into 414,384,585 shares of the Company.

In May 2006, all of the MCB had been converted into ordinary shares totaling 414,384,585 shares, thus resulting in a total outstanding number of the Company's shares of 760,339,281 shares as of 31 December 2006.

Based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of the Company as covered by Notarial Deed No. 65 dated 21 June 2012 of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders approved the amendment to Paragraphs 1 and 2 of Article 4 of the Articles of Association concerning the changes in par value of the Company's share (stock split) from Rp 500 (full amount) to Rp 250 (full amount) per share, thus, resulting in the increase in number of the Company's shares outstanding from 760,339,281 shares to 1,520,678,562 shares, and Paragraph 3b of Article 15, concerning the Duties and Authorities of the Directors.

The stock split was approved by the BEI through letter No. S-05439/BEI.PPJ/07-2012 dated 31 July 2012.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/5

Exhibit E/5

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan (Lanjutan)

b. Public Offering of the Company's Shares (Continued)

RUPSLB tersebut juga telah menyetujui penerbitan saham untuk pelaksanaan program *Management & Employee Stock Option Program (MESOP)* untuk Tahap I di BEI sebanyak 60.826.400 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 250 (nilai penuh) per saham untuk periode sampai dengan tanggal 20 Juni 2014. BEI melalui suratnya No. S-04847/BEI.PPJ/07-2012 tertanggal 6 Juli 2012 telah menyetujui pencatatan saham Perusahaan hasil pelaksanaan Program MESOP untuk tahap I tersebut secara pra-pencatatan di BEI.

The EGM had also approved the issuance of shares for the implementation of the Phase 1 of the Management & Employee Stock Option Program (MESOP) on the Indonesia Stock Exchange, totaling 60,826,400 shares with par value of Rp 250 (full amount) per shares, up to 20 June 2014. BEI through its letter No. S-04847/BEI.PPJ/07-2012 dated 6 July 2012 had approved the Company's pre-listing of its MESOP on the Indonesia Stock Exchange for the implementation of phase I.

Pada tanggal 31 Mei 2013, 30 Mei 2014, 29 Mei 2015, dan 31 Mei 2016, Perusahaan telah menerbitkan saham baru masing-masing sebanyak 5.936.000, 23.320.000, 16.025.000 dan 30.752.000 saham sebagai pelaksanaan Management & Employee Stock Option Program (MESOP) untuk Tahap I - *Grant Date* 1 dan 2, dan Tahap II - *Grant Date* 1 dan 2, yang telah dieksekusi sehingga jumlah saham beredar Perusahaan menjadi 1.596.711.562 saham pada tanggal 31 Desember 2016.

On 31 May 2013, 30 May 2014, 29 May 2015, and 31 May 2016, the Company has issued the additional 5,936,000, 23,320,000, 16,025,000 and 30,752,000 shares, respectively, for the implementation of the MESOP for Phase I - Grant Date 1 and 2, and Phase II - Grant Date 1 and 2, for options that has been exercised, thus resulting in a total outstanding number of the Company's shares of 1,596,711,562 shares as of 31 December 2016.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris No. 18 pada tanggal 6 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta, telah disetujui penerbitan saham hasil pelaksanaan MESOP untuk tahap II untuk periode sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 dengan harga pelaksanaan yang mengacu kepada sebagaimana diatur dalam butir V.1 Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.

Based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of the Company as covered by Notarial Deed No. 18 dated 6 May 2014 of Aryanti Artisari, S.H., Notary in Jakarta, had approved the issuance of new shares the results of the implementations of the MESOP program phase II up to 30 June 2016 with exercised price which referred to point V.I Listing Regulation No. I-A as included in the Appendix of the Decision Decree of virtue of the Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 dated on 20 January 2014.

BEI melalui suratnya No. S-02280/BEI.PGI/06-2014 tertanggal 6 Juni 2014 telah menyetujui pencatatan saham Perusahaan hasil pelaksanaan Program MESOP untuk tahap II secara pra-pencatatan di BEI sebanyak-banyaknya 46.777.000 saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 2.205 (nilai penuh) per saham.

BEI through its letter No. S-02280/BEI.PGI/06-2014 dated 6 June 2014 approved the registration of the Company's pre-listing of its MESOP on the Stock Exchange for the implementation of phase II maximum 46,777,000 shares with exercised price Rp 2,205 (full amount) per share.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang diaktakan dengan Akta No. 25 tanggal 18 April 2017 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perusahaan (*stock split*) dari sebesar Rp 250 (nilai penuh) per saham menjadi Rp 25 (nilai penuh) per saham. Pemecahan nilai saham ini telah mendapat persetujuan dari BEI melalui surat No.S-02820/BEI.PP1/05-2017 tertanggal 23 Mei 2017. Dengan demikian, sejak 31 Desember 2017 jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh menjadi 15.967.115.620 saham.

Based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of the Company as covered by Notarial Deed No. 25 dated 18 April 2017 of Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the Company's shareholders approved the par value split of the Company's share from Rp 250 (full amount) per share to Rp 25 (full amount) per share (stock split). The stock split was approved by the BEI through its letter No.S-02820/BEI.PP1/05-2017 dated 23 May 2017. Therefore, since 31 December 2017 total issued and fully paid capital was 15,967,115,620 shares.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/6

Exhibit E/6

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

c. Entitas Anak

c. Subsidiary

Perusahaan mendirikan entitas anak dengan nama PT Finansial Integrasi Teknologi (FIT), berdasarkan akta notaris Herna Gunawan, S.H., M.Kn. No. 4 tanggal 15 September 2017, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-0043022.AH.01.01. Tahun 2017 tanggal 29 September 2017. FIT bergerak dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Perusahaan merupakan salah satu pemegang saham pendiri FIT dengan persentase kepemilikan 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen) dari modal yang ditempatkan dan modal disetor FIT.

The Company established a subsidiary under the name of PT Finansial Integrasi Teknologi (FIT), based on Notarial Deed No. 4 of Herna Gunawan, S.H., M.Kn on 15 September 2017. The deed of establishment was approved the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-0043022.AH.01.01 dated 29 September 2017. FIT is engaged in lending and borrowing services based on information technology. The Company is one of the founding shareholders of FIT with a percentage of ownership of 99.96% (ninety nine point ninety six percent) of the issued and fully paid capital of FIT.

OJK telah menyetujui permohonan FIT atas platform <http://www.pinjammodal.id> sebagai penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk terdaftar dan diawasi oleh OJK, melalui surat No.S-588/NB.213/2018 tertanggal 31 Juli 2018. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, FIT telah mengajukan permohonan izin usaha sebagai penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi, dan saat ini sedang dalam proses di OJK.

OJK has granted approval for FIT on the platform <http://www.pinjammodal.id> as the operator of Information Technology-Based Lending and Borrowing Services to be registered and supervised by the authority based on Decision Letter No.S-588/NB.213/2018 dated 31 July 2018. Furthermore, in accordance with applicable regulations, FIT has applied for a business license as an Information Technology-Based Money-Borrowing Service provider, and is currently in the process at OJK.

d. Pembelian Kembali (Buy-Back) Saham Perusahaan

d. Treasury Shares

Pada tanggal 15 April 2015, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menyetujui pembelian kembali saham yang beredar Perusahaan sampai jumlah maksimum sebanyak 10% dari seluruh jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan atau sebanyak-banyaknya sebesar 154.993.456 saham. Dana yang dicadangkan untuk pembelian kembali saham untuk periode paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak RUPSLB adalah tidak lebih dari Rp 341.000.

On 15 April 2015, the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) approved the buy-back of outstanding shares of the Company up to a maximum of 10% of the total shares issued and fully paid-up capital of the Company or as much of 154,993,456 shares. The funds reserved to repurchase shares for a maximum period of 18 (eighteen) months from the EGM should not more than Rp 341,000.

Per tanggal 15 Oktober 2016, program *buyback shares* ini dinyatakan berakhir.

As of 15 October 2016, the shares buyback program was officially ended.

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perusahaan adalah sebanyak 1.002.732.000 saham (setelah pemecahan saham) dengan nilai pembelian sebesar Rp 252.160.

As of 31 December 2019, total shares bought back by the Company was totaling 1,002,732,000 shares (after stock split) for a total purchase price of Rp 252,160.

Pelaksanaan pembelian kembali saham merupakan salah satu bentuk usaha Perusahaan untuk meningkatkan manajemen permodalan Perusahaan dimana pelaksanaannya diharapkan akan meningkatkan nilai laba bersih per saham (*Earnings per Share/EPS*).

This repurchase transaction was intended to increase the Company's capital management where the implementation expected to increase the value of Earnings per Share (EPS).

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit E/7

Exhibit E/7

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

e. Surat Berharga yang Diterbitkan

e. Securities Issued

Surat berharga yang diterbitkan selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Securities issued for the last 5 (five) years are as follows:

Surat berharga/ Securities	Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia/ Listing date	Tanggal efektif/ Effective date	Total emisi/ Amount issued	Jumlah per seri obligasi/ Amount per series	Tanggal jatuh tempo/ Due date	Status pembayaran/ Payment status
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Total limit : (Rp 2.500.000)		28 Februari/ February 2014 (No. S-121/D.04/2014)				
Tahap I Tahun 2014 Seri/Series A:	10 Maret/ March 2014		500.000	225.000	17 Maret/ March 2015	Lunas/Paid
Seri/Series B:				55.000	7 Maret/ March 2016	Lunas/Paid
Seri/Series C:				220.000	7 Maret/ March 2017	Lunas/Paid
Tahap II Tahun 2015	20 Maret/ March 2015		1.000.000			
Seri/Series A:				345.000	29 Maret/ March 2016	Lunas/Paid
Seri/Series B:				105.000	19 Maret/ March 2017	Lunas/Paid
Seri/Series C:				550.000	19 Maret/ March 2018	Lunas/Paid
Tahap III Tahun 2016	26 Februari/ February 2016		1.000.000			
Seri/Series A:				200.000	5 Maret/ March 2017	Lunas/Paid
Seri/Series B:				142.000	25 Februari/ February 2018	Lunas/Paid
Seri/Series C:				658.000	25 Februari/ February 2019	Lunas/Paid
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Total limit : (Rp 5.000.000)		17 Oktober/ October 2016 (No.S588/D.04/2016)				
Tahap I Tahun 2016 Seri/Series A:	26 Oktober/ October 2016		1.000.000	317.000	5 November 2017	Lunas/Paid
Seri/Series B:				550.000	25 Oktober/ October 2019	Lunas/Paid
Seri/Series C:				133.000	25 Oktober/ October 2021	Belum jatuh tempo/Not yet due
Tahap II Tahun 2017 Seri/Series A:	3 Maret/ March 2017		1.000.000	540.000	12 Maret/ March 2018	Lunas/Paid
Seri/Series B:				460.000	2 Maret/ March 2020	Belum jatuh tempo/Not yet due

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/8

Exhibit E/8

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

e. Surat Berharga yang Diterbitkan (Lanjutan)

Surat berharga yang diterbitkan selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

e. Securities Issued (Continued)

Securities issued for the last 5 (five) years are as follows: (Continued)

Surat berharga/ Securities	Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia/ Listing date	Tanggal efektif/ Effective date	Total emisi/ Amount issued	Jumlah per seri Obligasi/ Amount per series	Tanggal jatuh tempo/ Due date	Status pembayaran/ Payment status
Tahap III Tahun 2017 Seri/Series A:	10 November 2017		835.000	335.000	19 November 2018	Lunas/Paid
Seri/Series B:				100.000	9 November 2019	Lunas/Paid
Seri/Series C:				400.000	9 November 2020	Belum jatuh tempo/ Not yet due
Tahap IV Tahun 2018 Seri/Series A:	7 Maret / March 2018		2.165.000	946.000	16 Maret / March 2019	Lunas/Paid
Seri/Series B:				253.000	6 Maret / March 2020	Belum jatuh tempo/ Not yet due
Seri/Series B:				966.000	6 Maret / March 2021	Belum jatuh tempo/ Not yet due
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Total limit : (Rp 8.000.000)		7 Juni/ June 2018 (No.S-67/D.04/2018)				
Tahap I Tahun 2018 Seri/Series A:	27 Juni / June 2018		740.000	188.000	6 Juli/ July 2019	Lunas/Paid
Seri/Series B:				552.000	26 Juni/ June 2021	Belum jatuh tempo/ Not yet due
Tahap II Tahun 2019 Seri/Series A:	22 Februari / February 2019		1.000.000	500.000	2 Maret/ March 2020	Belum jatuh tempo/ Not yet due
Seri/Series B:				500.000	22 Februari/ February 2022	Belum jatuh tempo/ Not yet due
Medium Term Notes BFI Finance Indonesia II Tahun 2014	Tidak dicatatkan di Bursa Efek/ Not listed on Stock Exchange	4 Juni/ June 2014	130.000	130.000	14 Juni/ June 2015	Lunas/Paid
Medium Term Notes BFI Finance Indonesia III Tahun 2015	Tidak dicatatkan di Bursa Efek/ Not listed on Stock Exchange		100.000			
Seri/Series A:		13 April 2015		50.000	13 April 2017	Lunas/Paid
Seri/Series B:		13 Mei/ May 2015		50.000	13 Mei/ May 2018	Lunas/Paid
Medium Term Notes BFI Finance Indonesia IV Tahun 2015	Tidak dicatatkan di Bursa Efek/ Not listed on Stock Exchange	5 Agustus/ August 2015	155.000	155.000	15 Agustus/ August 2016	Lunas/Paid

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/9

Exhibit E/9

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah,
Komite Audit, Internal Audit, Sekretaris Perusahaan
dan Karyawan

f. *Boards of Commissioners, Directors, Sharia
Supervisory Board, Audit Committee, Internal Audit,
Corporate Secretary and Employees*

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 56 tanggal 25 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima oleh dan dicatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0291918 tanggal 28 Juni 2019, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Based on Deed of Meeting Decision Letter No. 56 dated 25 June 2019 made before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, which has been accepted and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0291918 dated 28 June 2019, the composition of the Company's Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board of as of 31 December 2019 and 2018 are as follows:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Kusmayanto Kadiman	:
Komisaris (Independen)	:	Johanes Sutrisno	:
Komisaris (Independen)	:	Alfonso Napitupulu	:
Komisaris (Independen)	:	Emmy Yuhassarie	:
Komisaris	:	Dominic John Picone	:
Komisaris	:	Sunata Tjiterosampurno	:
Komisaris	:	Cornellius Henry Kho	:

Board of Commissioners

Presiden Komisaris	:	President Commissioner
Komisaris (Independen)	:	Commissioner (Independent)
Komisaris (Independen)	:	Commissioner (Independent)
Komisaris (Independen)	:	Commissioner (Independent)
Komisaris	:	Commissioner
Komisaris	:	Commissioner
Komisaris	:	Commissioner

Direksi

Presiden Direktur	:	Francis Lay Sioe Ho	:	President Director
Direktur Keuangan	:	Sudjono	:	Finance Director
Direktur Bisnis	:	Sutadi	:	Business Director
Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia	:	Andrew Adiwijanto	:	Operations and Human Capital Director
Direktur Risiko Perusahaan (Independen)	:	Sigit Hendra Gunawan	:	Enterprise Risk Director (Independent)

Directors

Presiden Direktur	:	President Director
Direktur Keuangan	:	Finance Director
Direktur Bisnis	:	Business Director

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	:	Asrori S. Karni	:
Anggota	:	Helda Rahmi Sina	:

Sharia Supervisory Board

Ketua	:	Chairman
Anggota	:	Member

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/10

Exhibit E/10

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah,
Komite Audit, Internal Audit, Sekretaris Perusahaan
dan Karyawan (Lanjutan)

Susunan Komite Audit Perusahaan dan entitas anaknya
pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai
berikut:

Komite Audit

Ketua	:	Emmy Yuhassarie	:
Anggota	:	Edy Sugito	:
		Friso Palilingan	

Internal Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan
No. SK/BOD/VII/14-009 tanggal 16 Juli 2014, Kepala Unit
Internal Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember
2019 dan 2018 adalah Fledy Rizmara.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan
No. BOD-BOC/VI/2014-0011 tanggal 24 Juni 2014,
Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019
dan 2018 adalah Sudjono.

Karyawan

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anaknya pada
tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai
berikut:

	<u>2019</u>
Karyawan tetap	6.851
Karyawan tidak tetap	5.276
Jumlah	<u>12.127</u>

Personil manajemen kunci Perusahaan mencakup
anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

1. GENERAL (Continued)

f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia
Supervisory Board, Audit Committee, Internal Audit,
Corporate Secretary and Employees (Continued)

The composition of the Audit Committee of the
Company and its subsidiary as of 31 December 2019 and
2018, are as follows:

Audit Committee

Chairman
Members

Internal Audit

Based on the Virtue of the Board of Directors of
the Company No. SK/BOD/VII/14-009 dated 16 July
2014, Head of Internal Audit Unit of the Company as of
31 December 2019 and 2018 is Fledy Rizmara.

Corporate Secretary

Based on the Virtue of the Board of Directors of the
Company No. BOD-BOC/VI/2014-0011 dated 24 June
2014, Corporate Secretary as of 31 December 2019 and
2018 is Sudjono.

Employees

The total number of the Company and its subsidiary's
employees as of 31 December 2019 and 2018 was as
follows:

	<u>2018</u>	
	6.646	Permanent employees
	4.525	Non-permanent employees
	<u>11.171</u>	Total

Key management personnel of the Company consist of
members of Boards of Commissioners and Directors.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/11

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan-kebijakan akuntansi di bawah ini telah diterapkan secara konsisten pada seluruh periode yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 19 Februari 2020.

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("PSAK"), termasuk Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan, yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK", yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sejak tanggal 1 Januari 2013) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun atas dasar akrual dan berdasarkan konsep nilai historis, kecuali untuk instrumen keuangan derivatif yang diukur pada nilai wajar dan utang atas kewajiban imbalan pasca-kerja yang diakui sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti dikurangi dengan nilai wajar aset program.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan Rupiah yang terdekat, kecuali dinyatakan lain.

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian pada tiap entitas diukur dengan mata uang lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan dan entitas anaknya.

Kebijakan-kebijakan akuntansi di bawah ini telah ditetapkan secara konsisten pada seluruh periode yang disajikan dalam laporan keuangan ini.

Exhibit E/11

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these consolidated financial statements.

The consolidated financial statements of the Company and its subsidiary were authorized for issuance by Directors on 19 February 2020.

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("IFAS"), which includes the Interpretations of Financial Accounting Standards, issued by the Indonesian Institute of Accountants and the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency ("Bapepam-LK", which the function has been transferred to Financial Service Authority ("OJK") since 1 January 2013) Regulation No. VIII.G.7 regarding "Emiten or Public Company's Financial Statements Presentation and Disclosure Guidelines" as included in the Appendix of the Decision Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated 25 June 2012.

b. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements, except the consolidated statement of cash flows, were prepared on the accrual basis and under the historical cost concepts, excepts for derivative financial instruments which are measured at fair value and the liability for post-employment benefit obligations which is recognized at the present value of defined benefit obligations less the fair value of plan asset.

The consolidated statement of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

Figures in the consolidated financial statements are rounded to and expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

Items included in the consolidated financial statements of each entities are measured using the currency of primary economic environment in which the entity operates (the functional currency). The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company and its subsidiaries' functional and presentation currency.

The significant accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these financial statements.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/12

Exhibit E/12

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

c. Perubahan Kebijakan Akuntansi

c. Change in Accounting Policies

Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Changes to Statement of Financial Accounting Standards (" SFAS ") and Interpretations of Financial Accounting Standards (" IFAS ")

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019 yang relevan bagi Perusahaan dan entitas anaknya namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anaknya, yaitu Penyesuaian PSAK 22 "Kombinasi Bisnis", Amandemen PSAK 24 "Imbalan Kerja", Penyesuaian PSAK 26, "Biaya Pinjaman", Penyesuaian PSAK 46 "Pajak Penghasilan - Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi", Penyesuaian PSAK 66 "Pengaturan Bersama"

Amendments of the following standards and interpretations which effective for periods beginning on or after 1 January 2019 and relevant for Company and its subsidiary but did not result in substantial changes to the Company and its subsidiary's accounting policies, namely Improvement to SFAS 22, "Business Combination", Amendment to SFAS 24 "Employee Benefits", Improvement to SFAS 26 "Borrowing costs", Improvements to SFAS 46 "Income Taxes - Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses" Improvements to SFAS 66 "Joint Arrangement".

Standar baru dan amandemen yang telah diterbitkan dan relevan bagi Perusahaan dan entitas anaknya, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019 adalah Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif", PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", dan PSAK 73 "Sewa". Ketiganya akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020.

New standards and amendments issued and relevant for the Company and its subsidiary but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2019 are Amendment to SFAS 71 "Financial Instrument: Prepayment Features with Negative Compensation", SFAS 72 "Revenue from Contracts with Customers", and SFAS 73 "Leases". All three will be mandatorily effective for the financing year beginning on or after 1 January 2020.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, manajemen Perusahaan dan entitas anak masih mengevaluasi dampak dari standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

As of the issuance date of consolidated financial statements, the Company and its subsidiary's management was still evaluating the impact of these standards and interpretations on the Company's consolidated financial statements.

d. Aset dan Liabilitas Keuangan

d. Financial Assets and Liabilities

Aset keuangan Perusahaan dan entitas anaknya, terdiri dari kas dan setara kas, piutang pembiayaan, aset derivatif dan pinjaman kepada karyawan (dicatat sebagai bagian dari "piutang lain-lain").

The Company and its subsidiary's financial assets, consist of cash and cash equivalents, financing receivables, derivative assets and loans to employees (recorded as part of "other receivables").

Liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anaknya terdiri dari pinjaman yang diterima, beban yang masih harus dibayar, liabilitas derivatif, surat berharga yang diterbitkan, utang premi asuransi dan utang kepada *supplier* yang dicatat sebagai bagian dari liabilitas lain-lain.

The Company and its subsidiary's financial liabilities consist of fund borrowings, accrued expenses, derivative liabilities, securities issued, insurance premium payables and payable to supplier which are recorded as part of other liabilities.

d.1. Klasifikasi

d.1. Classification

Berdasarkan PSAK 55 (Revisi 2014), Perusahaan mengelompokkan seluruh aset keuangannya sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, kecuali untuk aset derivatif yang diklasifikasikan sebagai instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Based on PSAK 55 (2014 Revision), the Company classifies all of its financial assets as loans and receivables, except for derivative assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL").

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/13

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

d.1. Klasifikasi (Lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan Perusahaan tidak berniat untuk menjualnya segera atau dalam waktu dekat. Aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui sebagai laba atau rugi ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai.

Perusahaan dan entitas anaknya mengelompokkan seluruh liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk liabilitas derivatif yang diklasifikasikan sebagai instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

d.2. Pengakuan

Perusahaan dan entitas anaknya pada awalnya mengakui aset dan liabilitas keuangan pada tanggal perolehan aset dan liabilitas keuangan tersebut.

Pada saat pengakuan awal, aset atau liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anaknya diukur pada nilai wajar ditambah/dikurangi (untuk instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klarifikasi aset dan liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada awal pengakuan liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasikan selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan pembiayaan untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan dan sebagai bagian dari beban bunga dan keuangan untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

Exhibit E/13

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

d.1. Classification (Continued)

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market and the Company does not intend to sell immediately or in the near terms. Such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest method. Gains or losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired.

The Company and its subsidiary classifies all of its financial liabilities as other financial liabilities measured at amortized cost, except for derivative liabilities which are classified as financial instruments measured at fair value through profit or loss ("FVTPL").

d.2. Recognition

The Company and its subsidiary initially recognizes financial assets and liabilities on the date of their origination.

At intial recognition, the Company and its subsidiary's financial assets or liabilities are measured at fair value plus/minus (for financial instruments not subsequently measured at fair value through profit or loss) transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial assets or issue of financial liabilities. The subsequent measurement of financial assets and liabilities depends on their classifications.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and they are incremental costs that would not have been incurred if the instrument had not been acquired or issued. In the case of financial assets, transaction costs are added to the amount recognized initially, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized initially. Such transaction costs are amortized over the terms of the instruments based on the effective interest method and are recorded as part of financing income for transaction costs related to financial assets and as part of interest and financing charges for transaction costs related to financial liabilities.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/14

Exhibit E/14

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

d.2. Pengakuan (Lanjutan)

d.2. Recognition (Continued)

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Subsequent to initial recognition, loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan mengukur seluruh liabilitas keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Subsequent to initial recognition, the Company measures all financial liabilities at amortized cost using the effective interest method.

d.3. Penghentian pengakuan

d.3. Derecognition

Perusahaan dan entitas anaknya menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluarsa, atau pada saat Perusahaan dan entitas anaknya mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi di mana Perusahaan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau kewajiban atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perusahaan diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

The Company and its subsidiary derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when the Company and its subsidiary transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the Company is recognized as a separate asset or liability.

Perusahaan dan entitas anaknya menghentikan pengakuan piutang pembiayaan pada saat dilakukannya penarikan jaminan kendaraan. Selain itu, Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

The Company and its subsidiary derecognize financing receivables at the time when the vehicle collateral has been taken out. In addition, the Company derecognizes a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled or expired.

Dalam transaksi di mana Perusahaan dan entitas anaknya secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Perusahaan dan entitas anaknya menghentikan pengakuan aset tersebut jika Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer di mana pengendalian atas aset masih dimiliki, Perusahaan dan entitas anaknya tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan yang ditentukan oleh besarnya perubahan nilai aset yang ditransfer.

In transaction where the Company and its subsidiary neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of a financial asset, the Company and its subsidiary derecognizes the asset if it does not retain control over the asset. The right and obligation retained in the transfer are recognized separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers where control over the asset is retained, the Company and its subsidiary continues to recognize the asset to the extent of its continuing involvement determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/15

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

d.3. Penghentian pengakuan (Lanjutan)

Perusahaan dan entitas anaknya menghapus bukukan saldo piutang pembiayaan, pada saat Perusahaan dan entitas anaknya menentukan bahwa aset tersebut tidak dapat ditagih lagi. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada kemampuan keuangan konsumen sehingga konsumen tidak lagi dapat melunasi liabilitasnya, atau konsumen atau unit yang dibiayai tidak dapat ditemukan atau dikuasai oleh pihak ketiga atau nilai realisasi bersih atas jaminan yang dikuasai kembali diperkirakan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh ekposur piutang pembiayaan.

Penerimaan atau pemulihan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

d.4. Saling hapus

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan dan entitas anaknya memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

d.5. Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

d.6. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan dan entitas anaknya mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Exhibit E/15

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

d.3. Derecognition (Continued)

The Company and its subsidiary writes off a financing receivables, when the Company and its subsidiary determines that the asset is uncollectible. This decision was taken after consideration of information such as the occurrence of significant changes to the financial ability of consumers so that consumers can no longer pay the loan, or consumer or units being financed cannot be found or is controlled by third party or the net realizable value of collateral is not expected to be sufficient to pay the entire exposure for the financing receivables.

Collection or recovery of financial assets which had been written-off is recorded as other income.

d.4. Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position when and only when, the Company and its subsidiary has legally enforceable rights to offset the recognized amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

d.5. Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

d.6. Identification and measurement of impairment for financial assets

The Company and its subsidiary assesses at each reporting date, whether there is objective evidence that a financial assets are not carried at fair value through profit or loss are impaired. Financial assets are impaired when objective evidence demonstrates that a loss event has occurred after the initial recognition of the financial assets, and that the loss event has an impact on the future cash flows on the financial assets that can be reliably estimated.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/16

Exhibit E/16

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

**d.6. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai aset
keuangan (Lanjutan)**

**d.6. Identification and measurement of impairment
for financial assets (Continued)**

Bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi wanprestasi atau tunggakan pembayaran oleh debitur, restrukturisasi piutang oleh Perusahaan dan entitas anaknya dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, indikasi bahwa debitur akan dinyatakan pailit, atau data yang dapat diobservasi lainnya yang terkait dengan kelompok aset keuangan seperti memburuknya status pembayaran debitur dalam kelompok tersebut, atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Objective evidence that the financial assets are impaired can include default or delinquency by a borrower, restructuring of a loan or advance by the Company and its subsidiary on terms that the Company would not otherwise consider, indications that a borrower will enter bankruptcy, or other observable data relating to a group of assets such as adverse changes in the payment status of borrowers in the group, or economic conditions that correlate with defaults in the group.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan dan entitas anaknya awalnya menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

For financial assets carried at amortized cost, the Company and its subsidiary first assesses whether there is objective evidence of impairment for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

Penilaian secara individual dilakukan atas aset keuangan yang signifikan yang memiliki bukti objektif penurunan nilai. Aset keuangan yang tidak signifikan dan memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dinilai secara kolektif.

Individual assessment is performed on the significant financial assets that have objective evidence of impairment. The financial assets that are not individually significant and have similar credit characteristic are assessed collectively.

Dalam mengevaluasi penurunan nilai secara kolektif, Perusahaan dan entitas anaknya menggunakan model statistik dari tren historis atas probabilitas wanprestasi, waktu pemulihan kembali dan jumlah kerugian yang terjadi, yang disesuaikan dengan pertimbangan manajemen mengenai apakah kondisi ekonomi dan kredit terkini sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan kerugian aktual yang jumlahnya akan lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang ditentukan oleh model historis. Tingkat wanprestasi, tingkat kerugian dan waktu yang diharapkan untuk pemulihan di masa datang akan diperbandingkan secara berkala terhadap hasil actual untuk memastikan estimasi tersebut masih tepat.

In assessing collective impairment, the Company and its subsidiary uses statistical modeling of historical trends of the probability of default, timing of recoveries and the amount of loss incurred, adjusted for management's judgement as to whether current economic and credit conditions are such that the actual losses are likely to be greater or less than suggested by historical modeling. Default rates, loss rates and the expected timing of future recoveries are regularly benchmarked against actual outcomes to ensure that they remain appropriate.

Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laba rugi tahun berjalan.

When a subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, the previously recognized impairment loss is reversed by adjusting the allowance for impairment losses. The amount of the reversal is recognized in the current year profit or loss.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/17

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

d.7. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perusahaan dan entitas anaknya memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika harga kuotasi sewaktu-waktu dan secara berkala tersedia dan mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar.

Jika pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Perusahaan dan entitas anaknya menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang memahami, berkeinginan, dan jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, penggunaan analisa arus kas yang didiskonto dan penggunaan model penetapan harga opsi (*option pricing model*).

Teknik penilaian yang dipilih memaksimalkan penggunaan input pasar, dan meminimalkan penggunaan taksiran yang bersifat spesifik dari Perusahaan dan entitas anaknya, memasukkan semua faktor yang akan dipertimbangkan oleh para pelaku pasar dalam menetapkan suatu harga dan konsisten dengan metodologi ekonomi yang diterima dalam penetapan harga instrumen keuangan. Input yang digunakan dalam teknik penilaian secara memadai mencerminkan ekspektasi pasar dan ukuran atas faktor risiko dan pengembalian (*risk-return*) yang melekat pada instrumen keuangan. Perusahaan dan entitas anaknya mengkalibrasi teknik penilaian dan menguji validitasnya dengan menggunakan harga-harga dari transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi untuk instrumen yang sama atau atas dasar data pasar lainnya yang tersedia yang dapat diobservasi.

Exhibit E/17

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

d.7. Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company and its subsidiary has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Company and its subsidiary measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly occurring market transactions on an arm's length basis.

If a market for a financial instrument is not active, the Company and its subsidiary establishes fair value using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length transactions between knowledgeable and willing parties, and if available, reference to the current fair value of other instruments that are substantially the same, discounted cash flows analysis and option pricing models.

The chosen valuation technique makes maximum use of market inputs, relies as little as possible on estimates specific to the Company and its subsidiary, incorporates all factors that market participants would consider in setting a price, and is consistent with accepted economic methodologies for pricing financial instruments. Inputs to valuation techniques reasonably represent market expectations and measures of the risk-return factors inherent in the financial instrument. The Company and its subsidiary calibrates valuation techniques and tests them for validity using prices from observable current market transactions in the same instrument or based on other available observable market data.

Ekshibit E/18**Exhibit E/18****PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)****PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)****2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)****2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)****d. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)****d. Financial Assets and Liabilities (Continued)****d.7. Pengukuran nilai wajar (Lanjutan)****d.7. Fair value measurement (Continued)**

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima, kecuali jika nilai wajar dari instrumen keuangan tersebut ditentukan dengan perbandingan dengan transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi dari suatu instrumen yang sama (yaitu tanpa modifikasi atau pengemasan ulang), atau berdasarkan suatu teknik penilaian yang variabelnya hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi. Jika harga transaksi memberikan bukti terbaik atas nilai wajar pada saat pengakuan awal, maka instrumen keuangan pada awalnya diukur pada harga transaksi dan selisih antara harga transaksi dan nilai yang sebelumnya diperoleh dari model penilaian diakui dalam laporan laba rugi setelah pengakuan awal tergantung pada masing-masing fakta dan keadaan dari transaksi tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received, unless the fair value of that instrument is evidenced by comparison with the other observable current market transactions in the same instrument (i.e., without modification or repackaging), or based on a valuation technique whose variables include only data from observable markets. When transaction price provides the best evidence of fair value at initial recognition, the financial instrument is initially measured at the transaction price and any difference between this price and the value initially obtained from a valuation model is subsequently recognized in the statement of profit or loss depending on the individual facts and circumstances of the transaction but not later than when the valuation is supported wholly by observable market data or the transaction is closed out.

Nilai wajar mencerminkan risiko kredit atas instrumen keuangan dan termasuk penyesuaian yang dilakukan untuk memasukkan risiko kredit Perusahaan dan pihak lawan, mana yang lebih sesuai. Taksiran nilai wajar yang diperoleh dari model penilaian akan disesuaikan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, seperti risiko likuiditas atau ketidakpastian model penilaian, sepanjang Perusahaan yakin bahwa keterlibatan suatu pasar pihak ketiga akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam penetapan harga suatu transaksi.

Fair values reflect the credit risk of the financial instruments and include adjustments to take into account the credit risk of the Company and counterparty where appropriate. Fair value estimates obtained from models are adjusted for any other factors, such as liquidity risk or valuation model uncertainties, to the extent that the Company believes a third-party market participation would take them into account in pricing a transaction.

e. Kas dan Setara Kas**e. Cash and Cash Equivalents**

Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas di bank dan deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan, sepanjang deposito berjangka tersebut tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima, serta tidak dibatasi penggunaannya. Kas dan setara kas diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang (Catatan 2d).

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with a maturity period of three months or less since the date of placement, as long as these time deposits are not pledged as collaterals for borrowings nor restricted. Cash and cash equivalents are classified as loans and receivables (Note 2d).

f. Piutang Pembiayaan**f. Financing Receivables**

Perusahaan mengakui aset berupa piutang pembiayaan sebesar jumlah yang sama dengan piutang bersih. Penerimaan piutang diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan pembiayaan. Pengakuan pendapatan pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi Perusahaan.

The Company recognizes assets as financing receivables and present them at an amount equal to the net financing receivables. Receivables payment is treated as repayment of principal and financing income. The recognition of financing income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Company's financing receivables.

Ekshibit E/19

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

f. Piutang Pembiayaan (Lanjutan)

Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan dan pendapatan yang timbul terkait penyelesaian kontrak ini diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

Piutang pembiayaan akan dihapusbukukan setelah menunggak lebih dari 210 hari (untuk produk mobil dan motor) dan lebih dari 270 hari (untuk properti). Penerimaan dari piutang yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain pada saat diterima.

f.1. Sewa Pembiayaan

Berdasarkan PSAK 30 (Revisi 2011), suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklarifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Pada saat pengakuan awal, nilai wajar piutang sewa pembiayaan merupakan jumlah piutang sewa pembiayaan ditambah nilai sisa yang akan diterima oleh perusahaan sewa pada akhir masa sewa pembiayaan dikurangi dengan pendapatan sewa pembiayaan yang ditangguhkan dan simpanan jaminan. Selisih antara nilai piutang bruto dan nilai kini piutang diakui sebagai pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui. Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui dialokasikan sebagai pendapatan tahun berjalan menggunakan metode tingkat suku bunga efektif. Piutang sewa pembiayaan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang (Catatan 2d).

f.2. Pembiayaan Konsumen

Piutang pembiayaan konsumen merupakan jumlah piutang setelah ditambah (dikurangi) biaya (pendapatan) transaksi yang belum di amortisasi dan dikurangi dengan pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen.

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui, yang merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dan jumlah pokok pembiayaan, ditambah (dikurangi) biaya (pendapatan) transaksi yang belum diamortisasi, akan diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu kontrak dengan menggunakan metode suku bunga efektif dari piutang pembiayaan konsumen. Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang (Catatan 2d).

Exhibit E/19

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

f. Financing Receivables (Continued)

Early termination of a contract is treated as a cancellation of an existing contract and the resulting income related to this early termination of a contract is recognized in the current year profit or loss.

Financing receivables will be written-off when they are overdue for more than 210 days (for cars and motorcycles) and more than 270 days (for property). Recoveries from written-off receivables are recognized as other income upon receipt.

f.1. Finance Lease

Based on PSAK 30 (2011 Revision), leases are classified as finance leases if such leases transfer substantially all the risks and rewards related to the ownership of the lease assets. Leases are classified as operating leases if the leases do not transfer substantially all the risks and rewards related to the ownership of the leased assets.

At initial recognition, the fair value of finance lease receivables represents finance lease receivables plus the residual value at the end of the lease period deducted by unearned lease income and security deposits. The difference between the gross lease receivables and the present value of the lease receivables is recognised as unearned lease income. Unearned lease income is allocated to the current year statement of income using the effective interest rate. Finance lease receivables are classified as loans and receivables (Note 2d).

f.2. Consumer Financing

Consumer financing receivables are receivables plus (minus) unamortized transaction cost (fee) and minus unearned consumer financing income and allowance for impairment losses of consumer financing receivables.

Unearned consumer financing income, which represents the difference between total installments to be received from the consumer and the principal amount financed, plus or deducted with the unamortized transaction cost (income), will be recognized as income over the term of the contract using effective interest method of the related consumer financing receivable. Consumer financing receivables are classified as loans and receivables (Note 2d).

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/20

Exhibit E/20

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

f. Piutang Pembiayaan (Lanjutan)

f. Financing Receivables (Continued)

f.2. Pembiayaan Konsumen (Lanjutan)

f.2. Consumer Financing (Continued)

Biaya (pendapatan) transaksi yang belum diamortisasi adalah pendapatan administrasi proses pembiayaan dan biaya transaksi yang timbul pertama kali yang terkait langsung dengan pembiayaan konsumen tersebut.

Unamortized transaction cost (income) are financing administration income and transaction costs which are incurred at the first time the financing agreement is signed and directly attributable to consumer financing.

g. Pembiayaan Bersama

g. Joint Financing

Seluruh kontrak pembiayaan bersama yang dilakukan oleh Perusahaan merupakan pembiayaan bersama konsumen tanpa tanggung renteng (*without recourse*) dimana hanya porsi jumlah angsuran piutang yang dibiayai Perusahaan yang dicatat sebagai piutang pembiayaan di laporan posisi keuangan (pendekatan neto). Pendapatan pembiayaan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain setelah dikurangi dengan bagian yang merupakan hak pihak-pihak lain yang berpartisipasi pada transaksi pembiayaan bersama tersebut.

All joint financing agreements entered by the Company are joint financing without recourse in which only the Company's financing portion of the total installments are recorded as financing receivables in the statement of financing position (net approach). Financing income is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income after deducting the portions belong to other parties participated to these joint financing transactions.

Dalam pembiayaan bersama *without recourse*, antara Perusahaan dan penyedia fasilitas pembiayaan bersama, Perusahaan berhak menentukan tingkat bunga yang lebih tinggi kepada konsumen dibandingkan tingkat bunga yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan bersama dengan penyedia fasilitas pembiayaan bersama. Selisihnya merupakan pendapatan dan disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan Pembiayaan".

In joint financing without recourse, arrangements between the Company and the joint financing facility provider, the Company has the right to set higher interest rates to consumer than the interest rates stated in the joint financing agreement with the joint financing facility provider. The difference is recognized as revenue and disclosed as "Financing Income".

h. Piutang Pembiayaan Murabahah

h. Murabahah Financing Receivables

Murabahah merupakan akad jual-beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Perusahaan harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada konsumen. Pada saat akad murabahah, piutang pembiayaan murabahah diakui sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan (margin). Keuntungan murabahah diakui selama periode akad berdasarkan pengakuan margin dari piutang pembiayaan murabahah.

Murabahah is goods sell-buy contract with a sold price amounting to acquisition cost plus agreed margin and the Company must to disclose the acquisition cost to customer. When murabahah contract is signed, murabahah financing receivables are recognized at acquisition cost plus agreed margin. Murabahah margin are recognized over the period of the contract based on margin of the murabahah financing receivables.

Akad murabahah secara substansi merupakan suatu pembiayaan, sehingga pengakuan margin dilakukan berdasarkan standar yang mengatur pembiayaan, seperti yang disebutkan di kebijakan pembiayaan konsumen.

Substantially, murabahah contract is a financing, so that margin recognition is based on standards which regulate financing, as mentioned in consumer financing policy.

Pada setiap akhir periode laporan keuangan, piutang pembiayaan murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi margin yang ditangguhkan dan cadangan kerugian penurunan nilai.

At the end of each period of financial statement, murabahah financing receivables are state at net realizable value, consist of outstanding murabahah receivables less unearned margin and allowance for impairment loss.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/21

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

i. Piutang Ijarah

Piutang ijarah (porsi pokok sewa) merupakan akrual piutang sewa atas porsi pokok yang belum direalisasikan oleh nasabah dan piutang pendapatan ijarah merupakan akrual piutang sewa atas bagian keuntungan (ujroh) transaksi ijarah muntahiyah bittamlik dari angsuran nasabah pada bulan berikutnya yang diakui secara proporsional.

Akad ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut kepada penyewa.

Piutang pendapatan ijarah diakui pada saat jatuh tempo sebesar porsi ujroh dan piutang ijarah sebesar sewa porsi pokok yang belum diterima dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu sebesar saldo piutang.

j. Piutang dalam Proses Penyelesaian

Piutang dalam proses penyelesaian merupakan piutang atas jaminan yang dikuasai kembali dan dinyatakan berdasarkan nilai realisasi bersih yaitu nilai tercatat atau pokok piutang pembiayaan terkait dikurangi penyisihan penurunan nilai pasar atas jaminan yang dikuasai kembali. Piutang pembiayaan direklasifikasikan menjadi piutang dalam proses penyelesaian ketika jaminan ditarik karena konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah melalui proses tahapan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan dengan konsumen.

Pelanggan memberi kuasa kepada Perusahaan untuk menjual objek yang dijaminkan atau melakukan tindakan lainnya dalam upaya penyelesaian piutang bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan. Kelebihan hasil penyelesaian dengan jumlah seluruh kewajiban konsumen merupakan hak dari konsumen, sedangkan kekurangan hasil penyelesaian akan dibebankan sebagai penghapusan piutang lain-lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Piutang dalam proses penyelesaian diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang.

k. Instrumen Derivatif untuk Tujuan Manajemen Risiko

Seluruh instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan digunakan untuk tujuan manajemen risiko. Instrumen derivatif ini digunakan untuk lindung nilai eksposur risiko suku bunga dan risiko mata uang Perusahaan. Instrumen derivatif untuk tujuan manajemen risiko diukur pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Untuk memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai, beberapa kriteria tertentu harus dipenuhi, termasuk adanya dokumentasi formal pada awal lindung nilai.

Exhibit E/21

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

i. Ijarah Receivables

Ijarah receivables are based on unrealized accrual rent income from principal portion and ijarah receivable represents portion of accrual rent income from the following month's installment of ijarah muntahiyah bittamlik which is recognized proportionally.

Akad ijarah is a contract for the provision of funds in the context of transferring the use rights or benefits of a good or service based on a lease transaction, without being followed by the transfer of ownership of such goods to the lessee.

Ijarah revenue receivables are recognized at maturity amounting to the rent of ujroh and ijarah receivables amounting to the portion of the principal outstanding which has not been received and presented at net realizable value, which is the outstanding amount of the receivables.

j. Receivables in the Settlement Process

Receivables in the settlement process represent receivables from collateral recovered and stated at net realizable value which is carrying amount or principal amount of related financing receivables, less allowance for decline in market value of the collateral retained. Financing receivables are reclassified to receivables in the settlement process when the collateral is withdrawn because the consumer is not able to meet its obligations after going through the stages stipulated in the financing agreement with the consumer.

Customer authorizes the Company to sell the pledged object or performing other actions in solving the debts in the event of default of the financing agreement. Excess result of a settlement with the total obligations of the consumer is the right of the customer, while the shortage of the settlement proceeds will be charged to written-off other receivables in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Receivables in the settlement process are classified as financial assets classified as loans and receivables.

k. Derivative Instrument for Risk Management Purposes

All derivative instruments held by the Company are for risk management purposes. These derivative instruments are used to hedge the Company's exposures to interest rate risk and currency risk. Derivative instruments held for risk management are measured at fair value in the statement of financial position. To qualify for hedge accounting, certain criteria are to be met, including formal documentation to be in place at the inception of the hedge.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/22

Exhibit E/22

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**k. Instrumen Derivatif untuk Tujuan Manajemen Risiko
(Lanjutan)**

**k. Derivative Instrument for Risk Management
Purposes (Continued)**

Pada penetapan awal lindung nilai, Perusahaan mendokumentasikan secara formal hubungan antara instrumen lindung nilai dan unsur yang dilindung nilai, termasuk tujuan manajemen risiko dan strategi dalam melaksanakan transaksi lindung nilai, bersamaan dengan metode yang akan digunakan untuk menilai efektivitas hubungan lindung nilai. Perusahaan menilai, pada awal hubungan lindung nilai dan juga secara berkesinambungan, apakah instrumen lindung nilai diharapkan akan "sangat efektif" dalam rangka saling hapus atas perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas dari unsur yang dilindung nilai sepanjang periode dimana lindung nilai tersebut ditetapkan, dan apakah hasil aktual dari setiap lindung nilai berada dalam kisaran 80-125 persen.

On initial designation of the hedge, the Company formally documents the relationship between the hedging instruments and hedge items, including the risk management objective and strategy in undertaking the hedge transaction, together with the method that will be used to assess the effectiveness of the hedging relationship. The Company makes an assessment, both at the inception of the hedge relationship as well as on an ongoing basis, whether the hedging instruments are expected to be "highly effective" in offsetting the changes in the fair value or cash flows of the respective hedged item during the period for which the hedge is designated, and whether the actual results of each hedge are within a range of 80-125 percent.

Perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai dicatat dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan. Jika instrumen derivatif dirancang dan memenuhi syarat akuntansi lindung nilai, perubahan nilai wajar yang berkaitan dengan lindung nilai diakui sebagai penyesuaian terhadap unsur yang dilindungi nilainya dalam penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan atau disajikan dalam ekuitas, tergantung pada jenis transaksi dan efektivitas dari lindung nilai tersebut.

Changes in fair value of derivative instruments that do not qualify for hedge accounting are recognized in the current year statement of profit or loss. If derivative instruments are designated and qualify for hedge accounting, changes in fair value of derivative instruments are recorded as adjustments to the items being hedged in the current year other comprehensive income or in the equity, depending on the type of hedge transaction represented and the effectiveness of the hedge.

Perusahaan dan entitas anaknya menetapkan derivatif sebagai instrumen lindung nilai atas arus kas apabila instrumen tersebut melindungi nilai variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang telah diakui atau prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi. Bagian efektif dari perubahan nilai wajar derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai atas arus kas dalam hubungan lindung nilai yang memenuhi kualifikasi ditangguhkan pada keuntungan/(kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas, yang merupakan bagian dari ekuitas. Bagian yang tidak efektif diakui secara langsung pada laporan laba rugi. Jumlah yang ditangguhkan dalam ekuitas direklasifikasi ke dalam laporan laba rugi dalam tahun yang sama dimana arus kas yang dilindung nilai mempengaruhi laba atau rugi, dan pada unsur yang sama dalam laporan laba rugi.

The Company and its subsidiary designates derivatives as the hedging instruments of cash flows hedges where the instrument hedges the variability in cash flows attributable to a particular risk associated with a recognized asset or liability, or a highly probable forecast transaction that could affect profit or loss. The effective portion of changes in the fair value of derivatives designated as hedging instruments of cash flows hedges in qualifying hedging relationships is deferred to the cumulative gains/(losses) on derivative instruments for cash flows hedges, which forms part of equity. Any ineffective portion is recognized immediately in the statement of profit or loss. Amounts deferred in equity are reclassified to the statement of income as a reclassification adjustment in the same year as the hedged cash flows affect profit or loss, and in the same line item in the statement of profit or loss.

Ketika instrumen lindung nilai kadaluarsa atau dijual, dihentikan, dilaksanakan, atau tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang ditangguhkan di ekuitas tetap diakui pada keuntungan/(kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas dan direklasifikasi ke laporan laba rugi ketika unsur yang dilindung nilai diakui dalam laporan laba rugi.

When the hedging instrument expires or sold, terminated, exercised, or no longer qualifies for hedge accounting, the cumulative amount deferred in equity remains in the cumulative gains/(losses) on derivative instruments for cash flows hedges, and is subsequently transferred to the statement of profit or loss when the hedged item is recognized in the statement of profit or loss.

Ketika suatu prakiraan transaksi akan dilindung nilai tidak lagi diharapkan akan terjadi, jumlah yang ditangguhkan dalam ekuitas diakui segera dalam laporan laba rugi.

When a forecast hedged transaction is no longer expected to occur, the amount deferred in equity is recognized immediately in the statement of profit or loss.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/23

Exhibit E/23

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

l. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan selama masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus.

l. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized and charged as an expense over the periods of benefit using the straight-line method.

m. Aset Ijarah

Aset yang diperoleh untuk ijarah merupakan aset yang menjadi objek transaksi sewa (ijarah) dan dicatat di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aset dalam transaksi ijarah disusutkan sesuai dengan jangka waktu sewa.

m. Ijarah Asset

Assets acquired for ijarah represent object of leased assets and are recorded in the statements of financial positions at the acquisition cost, net of accumulated depreciation. Assets in ijarah transaction are depreciated over the lease period.

Pendapatan ijarah diakui selama masa akad menggunakan metode flat (proporsional).

Income from ijarah is recognised over the period of the contract with flat (proportional) method.

n. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya dinyatakan sebesar harga perolehan. Setelah pengukuran awal, aset tetap diukur dengan model biaya, dicatat pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai, jika ada.

n. Fixed Assets

Fixed assets are initially recognized at acquisition cost. After initial measurement, fixed assets are measured using the cost model, carried at cost less any accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any.

Harga perolehan mencakup harga pembelian dan semua beban yang terkait secara langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk memungkinkan aset tersebut beroperasi sebagaimana ditentukan oleh manajemen.

Acquisition cost includes purchase price and any costs directly attributable to bring the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

Land is stated at cost and not depreciated.

Penyusutan aset tetap selain tanah dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan hingga mencapai nilai sisa sepanjang estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets other than land are calculated on the straight-line method to allocate their cost to their residual values over their estimated useful lives as follows:

	<u>Masa manfaat/ Useful lives (Tahun/ Year)</u>	<u>Tarif/ Rates</u>	
Bangunan dan prasarana	20	5 %	<i>Building and improvements</i>
Peralatan kantor	5	20 %	<i>Office equipment</i>
Kendaraan	5	20 %	<i>Vehicles</i>
Perabot dan perlengkapan kantor	5	20 %	<i>Furniture and fixtures</i>

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi periode dimana beban-beban tersebut terjadi. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi dan disusutkan.

Repairs and maintenance costs, are charged to the the statement of profit or loss during the period in which they are incurred. Expenditures that extend the future life of assets or provide further economic benefits are capitalized and depreciated.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya.

The carrying amount of fixed assets are derecognized upon disposal or when there is no longer a future economic benefit expected from its use or disposal.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/24

Exhibit E/24

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

n. Aset Tetap (Lanjutan)

Apabila aset tetap dihentikan pengakuannya (tidak digunakan lagi atau dijual), maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

n. Fixed Assets (Continued)

When fixed assets are derecognized (retired or disposed of), their carrying values and the related accumulated depreciation are removed from the statement of financial position, and the resulting gains or losses are recognized in the statement of profit or loss.

Aset dalam penyelesaian untuk pengembangan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Asset in progress under development are stated at cost and presented as part of the fixed assets. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate fixed assets account when the installation is substantially completed and the asset is ready for its intended use.

Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat dipulihkan, nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat dipulihkan kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

When the carrying amount of fixed assets is greater than its estimated recoverable amount, it is written down to its recoverable amount which is determined at the higher of net selling price or value in use.

Pada setiap akhir tahun, nilai residu, umur dan metode penyusutan dikaji ulang dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.

At the end of each year, residual values, useful lives and method of depreciation are reviewed and adjusted prospectively, if necessary.

o. Aset Tak Berwujud

o. Intangible Assets

Perangkat lunak

Software

Perangkat lunak pada awalnya dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan awal perangkat lunak meliputi harga pembelian, termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa perangkat lunak siap dipakai. Setelah pengakuan awal, perangkat lunak diukur menggunakan model biaya, dicatat sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Software is initially recognized at acquisition cost. The acquisition cost of software consists of its purchase price, including any directly attributable costs in bringing the software to its intended use. After initial recognition, software is measured using cost model, stated at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses.

Pengeluaran selanjutnya untuk perangkat lunak akan dikapitalisasi hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomi di masa mendatang untuk aset yang bersangkutan. Semua pengeluaran lainnya dibebankan pada saat terjadinya.

Subsequent expenditure on software assets is capitalized only when it increases the future economic benefits embodied in the specific asset to which it relates. All other expenditures are expensed as incurred.

Amortisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaatnya, dimulai dari tanggal perangkat lunak tersebut tersedia untuk dipakai. Estimasi masa manfaat perangkat lunak adalah lima tahun.

Amortization is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line method over the estimated useful life of software, from the date that it is available for use. The estimated useful life of software is five years.

Metode amortisasi, estimasi masa manfaat dan nilai residual ditelaah pada setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan jika dianggap tepat.

Amortization methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and adjusted if appropriate.

Keuntungan atau kerugian pelepasan aset tak berwujud ditentukan dengan membandingkan penerimaan dengan nilai tercatat dan diakui di dalam laporan laba rugi.

Gains or losses on disposal of intangible assets are determined by comparing proceeds with the carrying amount and are recognized in profit or loss.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/25

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

p. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Beban pajak diakui pada laporan laba rugi kecuali untuk bagian yang langsung diakui di komponen ekuitas lainnya, dimana beban pajak yang terkait dengan bagian tersebut diakui di penghasilan komprehensif lain.

Beban pajak kini adalah utang pajak yang ditentukan berdasarkan laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Beban pajak tangguhan diakui sehubungan dengan adanya perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan, dan nilai aset dan liabilitas yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan untuk diterapkan atas perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan.

Metode ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak di masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer antara basis komersial dan basis fiskal atas aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dikaji ulang setiap tanggal pelaporan dan dikurangi apabila besar kemungkinan manfaat pajak terkait tidak lagi mungkin direalisasi. Pengurangan tersebut akan berlaku terbalik saat kemungkinan laba fiskal di masa depan membaik. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dikaji ulang pada setiap tanggal pelaporan dan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan tersedia untuk merealisasikan manfaat pajak tersebut.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Perpajakan lainnya

Penyesuaian atas liabilitas pajak dicatat pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika mengajukan keberatan dan banding, pada saat keputusan atas keberatan dan banding tersebut diterima.

Exhibit E/25

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

p. Income Tax

Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognized in the statement of profit or loss except to the extent it relates to items recognized directly in other equity components, in which case it is recognized in other comprehensive income.

Current tax is the expected tax payable on the taxable income for the current year, using tax rates enacted or substantively enacted at reporting date.

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

This method also requires the recognition of future tax benefits, such as tax loss carryforwards, to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and are reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realized; such reductions are reversed when the probability of future taxable profits improves. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will be available against which they can be used.

Current tax assets and current tax liabilities shall be offset and the net amount is presented in the statement of financial position when and only when, the Company has a legal enforceable right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Other taxation matters

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment letter is received and/or, if objected to and/or appealed against by Company, when the result of the objection and/or appeal is determined.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/26

Exhibit E/26

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

p. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

p. Income Tax (Continued)

Perpajakan lainnya (Lanjutan)

Other taxation matters (Continued)

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) diakui sebagai pendapatan atau beban dalam operasi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

The extra amount of tax principal and penalties stipulated by the Tax Assessment Letter (SKP) is recognized as income or expense in the current operations, unless further proposed settlement efforts. The extra amount of tax principal and penalties stipulated by SKP are deferred as long as it meets the criteria for asset recognition.

q. Pinjaman yang Diterima

q. Fund Borrowings

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari berbagai bank dan institusi keuangan, termasuk fasilitas pembiayaan bersama (*joint financing*) with recourse. Fasilitas pembiayaan bersama (*joint financing*) with recourse disajikan secara gross, yaitu sebanyak pinjaman yang diberikan kepada konsumen dan pinjaman yang diterima dari bank dicatat dalam nilai penuh dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Borrowings represent funds received from various banks and financial institutions, including with recourse joint financing facilities. With recourse joint financing facilities are presented gross, i.e loans granted to customers and borrowings received from banks are recorded at their full amount with repayment obligations in accordance with the terms of the agreement.

Pinjaman yang diterima diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan pinjaman dikurangkan dari jumlah pinjaman yang diterima. Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Borrowings are classified as financial liabilities measured at amortized cost. Additional costs that are directly attributable to the acquisition of loans are deducted from total borrowings. See Note 2d for the accounting policy on financial liabilities measured at amortized cost.

r. Surat Berharga yang Diterbitkan

r. Securities Issued

Surat berharga yang diterbitkan meliputi utang Obligasi dan *Medium Term Notes*.

Securities issued consist of Bonds payable and Medium Term Notes.

Surat berharga yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Securities issued are classified as financial liabilities at amortized cost.

Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan surat berharga diakui sebagai diskonto dan dikurangkan langsung dari hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu surat berharga yang diterbitkan tersebut dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Additional cost directly attributable to the issuance of securities are recognized as a discount and offset directly from the proceeds derived from such offerings and amortized over the period of the securities issued using effective interest rate method.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Refer to Note 2d for accounting policy of financial liabilities at amortized cost.

s. Imbalan Kerja

s. Employees' Benefits

Imbalan kerja jangka pendek

Short-term employees' benefits

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Short-term employees' benefits are recognized when they are owed to the employees based on an accrual method.

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca-kerja

Long-term and post-employment benefits

Perusahaan menerapkan PSAK 24 (Amandemen 2014): "Imbalan Kerja", yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2016.

The Company applies SFAS 24 (Amendment 2014): "Employee Benefits", which became effective as of 1 January 2016.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/27

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

s. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca-kerja
(Lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca-kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan, yaitu imbalan kerja jenis manfaat pasti, yang mencakup pensiun, uang pesangon, uang penghargaan dan imbalan lainnya, dihitung berdasarkan "Peraturan Perusahaan" yang telah sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2013.

Kewajiban imbalan pasca-kerja yang diakui di laporan posisi keuangan dihitung berdasarkan nilai kini dari estimasi kewajiban imbalan pasca-kerja dimasa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar aset neto dana pensiun. Perhitungan dilakukan oleh aktuaria independen dengan metode *projected-unit-credit*.

Beban jasa kini, beban bunga, beban jasa lalu yang telah menjadi hak karyawan, dan dampak kurtailmen atau penyelesaian (jika ada) diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan atau beban komprehensif lainnya pada tahun dimana keuntungan/(kerugian) aktuarial terjadi. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial dicatat di saldo laba.

Perusahaan dan entitas anaknya telah memiliki program pensiun iuran pasti yang mana Perusahaan membayar iuran ke dana pensiun lembaga keuangan yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan tetap yang diterima karyawan yang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan Perusahaan. Iuran dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terutang.

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari piutang pembiayaan (Catatan 2f dan 2g), pendapatan bunga dan beban bunga diakui sesuai dengan jangka waktu kontrak berdasarkan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran dan penerimaan kas di masa mendatang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Exhibit E/27

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

s. Employees' Benefits (Continued)

Long-term and post-employment benefits (Continued)

Long-term and post-employment benefits as stipulated under the Labor Law regarding to pension, severance pay, service pay, compensation pay and other benefits, are calculated in accordance with "Company Regulation" which is in line with Labor Law No. 13/2013.

The obligation for post-employment benefits recognized in the statement of financial position is calculated at present value of estimated future benefits that the employees have earned in return for their services in the current and prior years, deducted by any plan assets. The calculation is performed by an independent actuary using the projected-unit-credit method.

Current service costs, interest costs, vested past service costs, and effect of curtailment or settlement (if any) are recognized immediately in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are directly fully recognized to other comprehensive income or expense in the year when such actuarial gain/(losses) occur. Accumulated actuarial gains and losses are recorded in retained earnings.

The Company and its subsidiary has a defined contribution pension program where the Company pays contributions to a financial institution pension plan which is calculated at a certain percentage of fixed income of the employees who meet the Company's criteria. The contributions are charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income as they become payable.

t. Revenue and Expenses Recognition

Income from financing receivables (Notes 2f and 2g), interest income and interest expense are recognised over the term of the contract based on the effective interest method.

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial asset or a financial liability and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments and receipts through the expected life of the financial asset or financial liability (or, where appropriate, a shorter period) to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/28

Exhibit E/28

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan dan entitas anaknya mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut (seperti pelunasan dipercepat, opsi beli (*call option*) dan opsi serupa lainnya), tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang.

Perhitungan suku bunga efektif mencakup seluruh biaya yang dibayarkan atau diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Biaya transaksi merupakan biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan, penerbitan atau pelepasan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Biaya tambahan merupakan biaya yang tidak akan terjadi apabila Perusahaan dan entitas anaknya tidak memperoleh, menerbitkan atau melepaskan instrumen keuangan.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Pendapatan pembiayaan Perusahaan disajikan bersih setelah dikurangi dengan bagian pendapatan milik bank atau pihak lain sehubungan dengan transaksi-transaksi penerusan pinjaman, pembiayaan bersama, anjak piutang dan penunjukan selaku pengelola piutang.

Pendapatan selisih premi asuransi dan selisih atas beban komisi dan subsidi dealer, pendapatan administrasi, denda keterlambatan dan pendapatan terminasi diakui sebagai penyesuaian atas suku bunga efektif atas pinjaman yang diberikan dan piutang (Catatan 2d).

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

u. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pengujian penurunan nilai suatu aset non-keuangan menggunakan masa manfaat ekonomi tidak terbatas dilakukan setiap tahun pada akhir periode pelaporan keuangan. Aset non-keuangan lain duji penurunan nilai ketika telah terjadi atau ada perubahan dalam keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak terpulihkan. Apabila nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan (yaitu mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi untuk menjual), maka aset tersebut diturunkan nilainya.

t. Revenue and Expenses Recognition (Continued)

When calculating the effective interest rate, the Company and its subsidiary estimates future cash flow considering all contractual term of the financial instrument (for example, prepayment options, call option and other similar options) but does not consider future credit losses.

The calculation includes all fees, commissions and other fees paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs and all other premiums discounts.

Transaction costs are additional charges that are directly attributable to the acquisition, issuance or disposal of financial assets or financial liabilities.

Additional costs are costs that would not occur if the Company and its subsidiary does not obtain, publish or otherwise dispose of financial instruments.

Once a financial asset or a group of similar financial assets has been written down as a result of an impairment loss, interest income is recognised using the rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss.

The Company's financing income is presented net of with financing income belongs to the bank in relation with channeling transactions, joint financing cooperations, factoring, and the appointment as manager of accounts receivable.

Income from excess of insurance premiums and excess of commission expenses and subsidy to dealer, administration income, late charges and termination income are recognised as an adjustment to the effective interest rate of the loan and receivables (Note 2d).

Expenses are recognized as incurred on an accrual basis.

u. Impairment of non-financial assets

Impairment test on non-financial assets with indefinite useful economic lives are undertaken annually at the financial year end. Other non-financial assets are subject to impairment test whenever events or changes in circumstances indicate that their carrying amount may not be recoverable. Where the carrying value of an asset exceeds its recoverable amount (i.e. the higher of value in use and fair value less costs to sell), the asset is written down accordingly.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/29

Exhibit E/29

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

v. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

v. Balances in Foreign Currency Transactions

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Transactions denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rates prevailing at the date of the transaction. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the statement of financial position date.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Exchange gains and losses arising from transactions in foreign currencies and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognized in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

Kurs utama yang digunakan untuk penjabaran mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, yaitu sebagai berikut:

The main exchange rates used for translating the foreign currency as of 31 December 2019 and 2018 are based of the mid rates published by Bank Indonesia, are as follows:

	2019 (nilai penuh)/ (full amount)	2018 (nilai penuh)/ (full amount)	
1 Dollar Amerika Serikat (USD)	13.901	14.481	1 United States Dollars (USD)

Penjabaran mata uang asing dicatat sesuai dengan PSAK 10 (revisi 2010) - Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing.

Foreign currency translation is recorded in accordance with SFAS 10 (revised 2010) - The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates.

w. Segmen Operasi

w. Operating Segment

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

An operating segment is a component of entity which:

- (1) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- (2) hasil operasinya dikaji ulang secara *regular* oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- (3) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

- (1) involves with business activities to generate income and expenses (include income and expenses relating to the transactions with other components with the same entity);
- (2) operations result is observed regularly by chief decision maker to make decisions regarding the allocation of resources and to evaluate the works; and
- (3) separate financial information is available.

Hasil segmen yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional termasuk bagian yang dapat diatribusikan secara langsung kepada segmen dan juga yang dapat dialokasikan dengan basis yang wajar.

Segmen results that are reported to the chief operating decision maker include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis.

Perusahaan mengelola kegiatan usahanya dan mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis produk dan wilayah geografis.

The Company manages its business activities and identifies its segments reported based on product categories and geographic area.

Perusahaan menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan kepada pengambil keputusan operasional.

The Company determines and presents operating segments based on the information that is internally provided to the chief operating decision maker.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/30

Exhibit E/30

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

x. Saham Treasuri

Jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut (saham treasuri) dikurangkan dari ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan, atau pembatalan instrumen ekuitas entitas tersebut tidak diakui dalam laba rugi. Imbalan yang dibayarkan atau diterima diakui secara langsung di ekuitas.

x. Treasury Stock

If the entity regain its equity instruments, then those instruments (treasury shares) are deducted from equity. Gains or losses arising from the purchase, sale, issuance, or cancellation of the entity's equity instruments are not recognized in profit or loss. Compensation paid or received is recognized directly in equity.

y. Program Kompensasi Manajemen dan Karyawan Berbasis Saham

Karyawan (termasuk eksekutif senior) Perusahaan menerima remunerasi dalam bentuk pembayaran berbasis saham, dimana karyawan memberikan jasa sebagai pertimbangan untuk instrumen ekuitas ('equity-settled transactions'). Saat opsi di eksekusi, Perusahaan menerbitkan saham baru. Hasil bersih dari eksekusi berupa biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikreditkan ke modal saham (nilai nominal) dan premi saham.

y. Management and Employees Stock Option Program

Employees (including senior executives) of the Company receive remuneration in the form of share-based payment transactions, whereby employees render services as consideration for equity instruments ('equity-settled transactions'). When the options are exercised, the Company issues new shares. The proceeds received net of any directly attributable transaction costs are credited to share capital (nominal value) and share premium.

Dalam situasi di mana instrumen ekuitas yang diterbitkan dan beberapa atau seluruh barang atau jasa yang diterima oleh entitas sebagai pertimbangan tidak dapat diidentifikasi secara khusus, barang atau jasa yang diterima (atau yang akan diterima) yang tidak dapat diidentifikasi diukur sebagai selisih antara nilai wajar pembayaran berbasis saham dan nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima yang teridentifikasi pada tanggal pemberian hak. Hal ini kemudian dikapitalisasi atau dibebankan secara tepat.

In situations where equity instruments are issued and some or all of the goods or services received by the entity as consideration cannot be specifically identified, the unidentified goods or services received (or to be received) are measured as the difference between the fair value of the share-based payment transaction and the fair value of any identifiable goods or services received at the grant date. This is then capitalised or expensed as appropriate.

Beban program opsi karyawan berbasis saham dan beban program opsi manajemen diukur pada tanggal pemberian kompensasi (*grant date*) berdasarkan nilai wajar dari seluruh opsi yang diberikan yang dihitung dengan menggunakan metode *black-scholes*.

Employee stock option program and management option program costs are measured at grant date based on the fair value of the stock option using a black-scholes model.

z. Laba per Saham

Sesuai dengan PSAK 56 "Laba per saham", laba per saham dasar dihitung dengan cara membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang berjalan.

z. Earnings per Share

In accordance with SFAS 56 "Earning per share", earnings per share is calculated by dividing net profit available to shareholders by the weighted average number of common shares outstanding during current year.

Laba per saham dilusian dihitung dengan cara membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

Diluted earning per share is calculated by dividing net profit available to shareholders by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effect of all dilutive potential ordinary shares.

Jika jumlah saham yang beredar meningkat akibat dari pemisahan saham (*stock split*), maka perhitungan laba per saham dasar untuk seluruh periode penyajian harus disesuaikan secara retrospektif.

If the outstanding number of shares increase as result of stock split, the computation of basic earnings per share for all presentation periods is adjusted retrospectively.

Perusahaan dan entitas anaknya tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, oleh karena itu laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

The Company and its subsidiary has no outstanding dilutive potential dilutive ordinary shares as of 31 December 2019 and 2018, accordingly no diluted earnings per share is calculated and presented in the consolidated statements of profit or loss other comprehensive income.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/31

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

aa. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan diakui sebagai sebuah liabilitas dalam laporan keuangan pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan. Pembagian dividen interim diakui sebagai liabilitas ketika dividen disetujui berdasarkan keputusan rapat Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.

bb. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan dan entitas anaknya memiliki kewajiban legal maupun konstruktif sebagai hasil peristiwa lalu, yaitu kemungkinan besar arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dan suatu estimasi terhadap jumlah dapat dilakukan.

Provisi ditelaah pada akhir tiap periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik. Apabila tidak ada lagi kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, maka provisi tersebut dipulihkan.

Apabila dampak nilai waktu uang adalah material, maka provisi didiskontokan dengan menggunakan tarif sebelum pajak, jika lebih tepat, untuk mencerminkan risiko spesifik liabilitas. Ketika pendiskontoan digunakan, kenaikan provisi terkait dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.

cc. Kontinjensi

Liabilitas kontingen tidak diakui di dalam laporan keuangan. Liabilitas kontinjensi diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi adalah kecil.

Aset kontingen tidak diakui di dalam laporan keuangan, namun diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan jika terdapat kemungkinan suatu arus masuk manfaat ekonomis.

dd. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan yang menyajikan bukti dari kondisi yang terjadi pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuaian) yang dicerminkan di dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian, diungkapkan di dalam catatan laporan keuangan bila material.

Exhibit E/31

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

aa. Dividends

Dividend distributions to the Company's shareholders is recognised as a liability in the financial statement in the period which the dividends are approved by the Company's shareholders. Interim dividend distributions are recognised as a liability when the dividends are approved based on a Board of Directors resolution in accordance with the Company's Articles of Association.

bb. Provisions

Provisions are recognized when the Company and its subsidiary has a legal or constructive obligation as a result of past events, it is more likely than not that an outflow of resources will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount can be made.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of economic resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre - tax rate that reflects, where appropriate, the risk specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognized as a finance cost.

cc. Contingencies

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements. They are disclosed in the notes to the financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Contingent assets are not recognized in the financial statements but are disclosed in the notes to the financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

dd. Events After the Reporting Period

Events after the reporting period that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period (adjusting events) are reflected in the financial statements. Events after the reporting period that are not adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/32

Exhibit E/32

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN

Pertimbangan Akuntansi yang Penting, Estimasi dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mengharuskan manajemen membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi aset, liabilitas, komitmen dan kontinjensi yang dilaporkan. Karena adanya unsur ketidakpastian melekat dalam melakukan estimasi sehingga dapat menyebabkan jumlah sesungguhnya yang dilaporkan pada periode yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasikan.

I. Penggunaan Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

(i) Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan dan entitas anaknya menetapkan kategori atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK 55 (Revisi 2015) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2d.

(ii) Cadangan atas kerugian penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan dan entitas anaknya mengevaluasi akun tertentu yang diketahui bahwa para pelanggannya tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada jangka waktu, hubungan dengan pelanggan dan status piutang dari pelanggan berdasarkan catatan piutang pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat cadangan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan dan entitas anaknya.

3. USE OF ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Significant Accounting Judgements, Estimates and Assumptions

The preparation of the Company's financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets, liabilities, commitments and contingent liabilities which are reported. Due to inherent uncertainty in the estimates thus can lead to actual results reported in future periods differ from those estimates.

I. Use of Judgements

The following judgements are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

(i) Classification of financial assets and financial liabilities

The Company and its subsidiary determines the category of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS 55 (Revised 2015). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies as disclosed in Note 2d.

(ii) Allowance for impairment of financial assets

The Company and its subsidiary evaluate specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Company uses judgement, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current receivables status based on any available third party receivables reports and known market factors, to record specific allowance for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Company and its subsidiary expected to collect.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/33

Exhibit E/33

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN (Lanjutan)

3. USE OF ESTIMATES AND JUDGEMENTS (Continued)

**Pertimbangan Akuntansi yang Penting, Estimasi dan
Asumsi (Lanjutan)**

**Significant Accounting Judgements, Estimates and
Assumptions (Continued)**

I. Penggunaan Pertimbangan (Lanjutan)

I. Use of Judgements (Continued)

**(ii) Cadangan atas kerugian penurunan nilai aset
keuangan (Lanjutan)**

**(ii) Allowance for impairment of financial assets
(Continued)**

Cadangan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan. Nilai tercatat dari piutang pembiayaan sebelum cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 17.750.602 dan Rp 17.658.320. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 5.

These specific allowances are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of financing receivables. The carrying amount of the Company's financing receivables before allowance for impairment losses as of 31 December 2019 and 2018 were amounted to Rp 17,750,602 and Rp 17,658,320, respectively. Further details are shown in Note 5.

II. Estimasi dan Asumsi

II. Estimates and Assumptions

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan dan entitas anaknya. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year/period are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing assumptions and circumstances about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company and its subsidiary. Such changes reflected in the assumptions as they occur.

(i) Nilai wajar atas instrumen keuangan

(i) Fair value of financial instruments

Nilai wajar instrumen keuangan yang secara aktif diperdagangkan di pasar keuangan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar yang berlaku pada penutupan pasar pada akhir tahun pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar (*arm's length market transactions*), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lainnya. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 36.

The fair value of financial instruments that are actively traded in organized financial markets is determined by reference to quoted market bid prices at the close of business at the end of the reporting year. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's length market transaction, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models. Further details are shown in Note 36.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/34

Exhibit E/34

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN (Lanjutan)

Pertimbangan Akuntansi yang Penting, Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

II. Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

(ii) Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan dan entitas anaknya telah menelaah pinjaman yang diberikan dan piutang pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus diakui dalam laporan laba rugi. Secara khusus, justifikasi oleh manajemen diperlukan dalam estimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan penurunan nilai. Dalam estimasi arus kas ini, Perusahaan membuat justifikasi tentang situasi keuangan debitur dan nilai realisasi bersih agunan. Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin berbeda, yang tercermin dalam perubahan cadangan perubahan kerugian penurunan nilai tersebut di masa mendatang.

Evaluasi cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif mencakup kerugian kredit yang melekat pada portofolio piutang pembiayaan dengan karakteristik risiko kredit yang sejenis ketika terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai piutang dalam portofolio tersebut. Dalam menentukan perlunya untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit, besarnya portofolio, konsentrasi kredit dan faktor-faktor ekonomi. Dalam mengestimasi cadangan yang dibutuhkan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian bawaan dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan keadaan ekonomi saat ini. Ketepatan dari cadangan ini bergantung pada asumsi model dan parameter yang digunakan dalam penentuan cadangan kolektif. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 5.

(iii) Estimasi umur manfaat aset tetap dan aset tak berwujud

Perusahaan dan entitas anaknya melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas. Lihat Catatan 10 untuk jumlah tercatat aset tetap.

(iv) Imbalan pasca-kerja

Nilai kini liabilitas imbalan pasca-kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pasca-kerja.

3. USE OF ESTIMATES AND JUDGEMENTS (Continued)

Significant Accounting Judgements, Estimates and Assumptions (Continued)

II. Estimates and Assumptions (Continued)

(ii) Allowance for impairment losses of financial assets

The Company and its subsidiary has reviewed loans and receivables at each statements of financial positions date to assess whether impairment should be recognized in the profit or loss or not. In particular, justification by management is required to estimate the amount and timing of future cash flows when determining impairment. In the estimation of cash flows, the Company makes the justification of the financial condition of debtors and net realizable value of collateral. These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, as reflected in changes in reserves of changes in these impairment losses in the future.

Allowance for impairment losses that collectively assessed includes inherent credit losses in financing receivables portfolios with similar credit risk characteristics when objective evidence of impairment exist for those portfolios. In assessing the need for collective allowances for impairment losses, management considers factors such as credit quality, portfolio size, credit concentrations and economic factors. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modeled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on the model assumptions and parameters used in determining collective allowances. Further details are shown in Note 5.

(iii) Useful life estimate for fixed assets and intangible assets

The Company and its subsidiary reviews periodically the estimated useful lives of fixed assets based on factors such as technical specification and future technological developments. Future results of operations could be materially affected by changes in these estimates brought about by changes in the factors mentioned. See Note 10 for the carrying amount of fixed assets.

(iv) Post-employment benefits

The present value of the post-employment benefits obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost (income) for pensions include the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of post-employment benefits obligations.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/35

Exhibit E/35

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN (Lanjutan)

Pertimbangan Akuntansi yang Penting, Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

II. Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

(iv) Imbalan pasca-kerja (Lanjutan)

Perusahaan dan entitas anaknya menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas.

Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pasca-kerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 17.

(v) Program kompensasi manajemen dan karyawan berbasis saham

Perusahaan dan entitas anaknya mengukur biaya *equity-settled transactions* karyawan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas pada tanggal diberikan. Estimasi nilai wajar untuk pembayaran berbasis saham untuk menentukan model penilaian yang paling sesuai, tergantung pada persyaratan dan kondisi pemberian. Estimasi ini juga mengharuskan menentukan *input* yang paling tepat untuk valuasi model termasuk masa manfaat yang diharapkan dari opsi saham, volatilitas dan *dividend yield* dan membuat asumsi yang digunakan.

(vi) Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan dan entitas anaknya mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 14b.

(vii) Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 14c.

3. USE OF ESTIMATES AND JUDGEMENTS (Continued)

Significant Accounting Judgements, Estimates and Assumptions (Continued)

II. Estimates and Assumptions (Continued)

(iv) Post-employment benefits (Continued)

The Company and its subsidiary determines the appropriate discount rate at the end of each reporting period. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the obligations.

In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related post-employment benefit obligation.

Other key assumptions for post-employment benefit obligations are based in part on current market conditions. Further details are shown in Note 17.

(v) Management and employees stock option program

The Company and its subsidiary measures the cost of equity-settled transactions with employees by reference to the fair value of the equity instruments at the date at which they are granted. Estimating fair value for share-based payment transactions requires determining the most appropriate valuation model, which is dependent on the terms and conditions of the grant. This estimate also requires determining the most appropriate inputs to the valuation model including the expected life of the share option, volatility and dividend yield and making assumptions about them.

(vi) Income tax

Significant judgement is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transaction and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company and its subsidiary recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are shown in Note 14b.

(vii) Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of the future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are shown in Note 14c.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/36

Exhibit E/36

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Kas dan setara kas terdiri dari:

Cash and cash equivalents consist of the followings:

	2019	2018	
Kas - Rupiah	<u>22.672</u>	<u>26.778</u>	Cash on hand - Rupiah
Bank			Cash in banks
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	185.740	200.999	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	145.781	159.599	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	22.475	30.935	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Syariah Mandiri Tbk	4.443	979	PT Bank Syariah Mandiri Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.165	1.965	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Permata Tbk	1.703	755	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.621	1.343	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Lain-lain (Saldo di bawah Rp 1.000)	620	28.742	Others (Balances below Rp 1,000)
Jumlah bank	<u>364.548</u>	<u>425.317</u>	Total cash in banks
Jumlah kas dan bank	<u>387.220</u>	<u>452.095</u>	Total cash on hand and in banks
Setara kas			Cash equivalents
Deposito berjangka			Time deposits
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	177.116	150.000	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	50.536	100.000	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	25.000	-	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	20.000	45.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	160	152	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Syariah Bukopin	-	8.000	PT Bank Syariah Bukopin
Jumlah setara kas	<u>272.812</u>	<u>303.152</u>	Total cash equivalents
Jumlah kas dan setara kas	<u>660.032</u>	<u>755.247</u>	Total cash and cash equivalents

Kisaran suku bunga kontraktual dari deposito berjangka diatas adalah sebagai berikut:

The range of the contractual interest rates from the above time deposits is as follows:

	2019	2018	
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun Rupiah	4,25% - 9,00%	6,00% - 9,75%	<i>Time deposit interest rate per annum Rupiah</i>

Tidak ada saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

There is no restricted cash and cash equivalents as of 31 December 2019 and 2018.

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit E/37

Exhibit E/37

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

5. PIUTANG PEMBIAYAAN

5. FINANCING RECEIVABLES

	2019	2018	
Piutang pembiayaan konvensional	22.920.454	22.687.472	Conventional financing receivables
Piutang pembiayaan murabahah	4.740	-	Murabahah financing receivables
Jumlah piutang pembiayaan - bruto	22.925.194	22.687.472	Total financing receivables - gross

	2019	2018	
Piutang pembiayaan - bruto	22.925.194	22.687.472	Financing receivables - gross
Pendapatan pembiayaan yang belum diakui	(4.312.425)	(4.267.223)	Unearned financing income
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(146.994)	(79.948)	Unamortized transaction costs
	18.465.775	18.340.301	
Pembiayaan bersama dan penerusan pinjaman - bersih	(715.173)	(681.981)	Joint financing and channeling - net
	17.750.602	17.658.320	
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(354.682)	(377.862)	Less allowance for impairment losses
Jumlah piutang pembiayaan - bersih	17.395.920	17.280.458	Total financing receivables - net

Angsuran piutang pembiayaan - bruto yang akan diterima dari konsumen sesuai dengan tanggal jatuh temponya adalah sebagai berikut:

The installments of financing receivables - gross, which will be collected from consumers in accordance with the due dates are as follows:

	2019	2018	
<= 1 tahun	13.169.095	12.680.351	<= 1 year
1 - 2 tahun	6.704.630	6.651.224	1 - 2 years
> 2 tahun	3.051.469	3.355.897	> 2 years
Jumlah	22.925.194	22.687.472	Total

Pengelompokan piutang pembiayaan - bruto menurut jumlah hari tunggakan adalah sebagai berikut:

The classification of financing receivables - gross based on days overdue are as follows:

	2019	2018	2019 %	2018 %	
Belum jatuh tempo	19.579.701	19.096.637	85,41	84,17	Current
Lewat jatuh tempo:					Past due:
1-30 hari	2.809.606	2.941.473	12,26	12,97	1-30 days
31-90 hari	378.563	427.298	1,65	1,88	31-90 days
91-120 hari	53.749	81.590	0,23	0,36	91-120 days
121-180 hari	71.590	95.270	0,31	0,42	121-180 days
> 180 hari	31.985	45.204	0,14	0,20	> 180 days
Jumlah	22.925.194	22.687.472	100,00	100,00	Total

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit E/38

Exhibit E/38

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

5. PIUTANG PEMBIAYAAN (Lanjutan)

5. FINANCING RECEIVABLES (Continued)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan berdasarkan penilaian secara individual dan kolektif adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses of financing receivables based on individual and collective assessments are as follows:

	2019			
	Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total	
Saldo awal	90.001	287.861	377.862	Beginning balance
Penambahan cadangan selama tahun berjalan - bersih	79.244	346.503	425.747	Additions to allowance during the year - net
Penghapusan	(35.630)	(413.297)	(448.927)	Written-off
Saldo akhir	133.615	221.067	354.682	Ending balance
	2018			
	Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total	
Saldo awal	14.993	222.489	237.482	Beginning balance
Penambahan cadangan selama tahun berjalan - bersih	106.942	402.240	509.182	Additions to allowance during the year - net
Penghapusan	(31.934)	(336.868)	(368.802)	Written-off
Saldo akhir	90.001	287.861	377.862	Ending balance

a. Piutang pembiayaan berdasarkan tujuan pembiayaan

a. Financing receivables based on purpose of financing

2019

	Konvensional/Conventional			Syariah/Sharia			
	Investasi/ Investment	Modal Kerja/ Working Capital	Multiguna/ Multi-purpose	Jumlah/ Total	Murabahah		Jumlah/ Total
Piutang pembiayaan - bruto	7.510.163	6.900.279	8.510.012	22.920.454	4.740	22.925.194	Financing receivables - gross
Pendapatan pembiayaan yang belum diakui	(1.225.874)	(1.403.833)	(1.681.705)	(4.311.412)	(1.013)	(4.312.425)	Unearned financing income
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(51.537)	(83.639)	(11.740)	(146.916)	(78)	(146.994)	Unamortized transaction cost
	6.232.752	5.412.807	6.816.567	18.462.126	3.649	18.465.775	
Pembiayaan bersama dan penerusan pinjaman - bersih	(149.964)	-	(565.209)	(715.173)	-	(715.173)	Joint financing and channeling - net
	6.082.788	5.412.807	6.251.358	17.746.953	3.649	17.750.602	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(159.845)	(54.492)	(140.308)	(354.645)	(37)	(354.682)	Allowance for impairment losses
Jumlah piutang pembiayaan - bersih	5.922.943	5.358.315	6.111.050	17.392.308	3.612	17.395.920	Total financing receivables - net

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit E/39

Exhibit E/39

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG PEMBIAYAAN (Lanjutan)

5. FINANCING RECEIVABLES (Continued)

a. Piutang pembiayaan berdasarkan tujuan pembiayaan
(Lanjutan)a. Financing receivables based on purpose of financing
(Continued)

	2018				
	Investasi/ Investment	Modal Kerja/ Working Capital	Multiguna/ Multipurpose	Jumlah/ Total	
Piutang pembiayaan - bruto	11.893.614	3.563.913	7.229.945	22.687.472	Financing receivables - gross
Pendapatan pembiayaan yang belum diakui	(2.332.252)	(454.753)	(1.480.218)	(4.267.223)	Unearned financing income
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(92.189)	(32.159)	44.400	(79.948)	Unamortized transaction cost
	9.469.173	3.077.001	5.794.127	18.340.301	
Pembiayaan bersama dan penerusan pinjaman - bersih	(209.000)	-	(472.981)	(681.981)	Joint financing and channeling - net
	9.260.173	3.077.001	5.321.146	17.658.320	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(170.570)	(153.199)	(54.093)	(377.862)	Allowance for impairment losses
Jumlah piutang pembiayaan - bersih	9.089.603	2.923.802	5.267.053	17.280.458	Total financing receivables - net

Pembiayaan investasi diberikan untuk pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi.

Investment financing were extended to finance capital goods and services needed for business/investment activities.

Pembiayaan modal kerja diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha.

Working capital financing were extended for working capital needs which fully utilized within one cycle of business activities.

Kegiatan pembiayaan investasi dan modal kerja ditujukan untuk debitur yang :

Investment and working capital financing activities were intended to borrowers which :

- memiliki usaha produktif; dan/atau
- memiliki ide untuk pengembangan usaha produktif.

- have productive businesses; and/or
- have ideas to develop the productive businesses.

Pembiayaan multiguna diberikan untuk pembiayaan barang dan/atau jasa untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif.

Multipurpose financing were extended for financing of goods/services for consumption and non-business related or productive activities.

b. Piutang pembiayaan berdasarkan jenis pengikatan

b. Financing receivables based on type of contract

	2019				
	Sewa pembiayaan/ Finance lease	Pembiayaan konsumen/ Consumer financing	Pembiayaan Murabahah/ Murabahah financing	Jumlah/ Total	
Piutang pembiayaan - bruto	11.828.009	11.092.445	4.740	22.925.194	Financing receivables - gross
Pendapatan pembiayaan yang belum diakui	(2.080.972)	(2.230.440)	(1.013)	(4.312.425)	Unearned financing income
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(121.466)	(25.450)	(78)	(146.994)	Unamortized transaction cost
	9.625.571	8.836.555	3.649	18.465.775	
Pembiayaan bersama dan penerusan pinjaman - bersih	-	(715.173)	-	(715.173)	Joint financing and channeling - net
	9.625.571	8.121.382	3.649	17.750.602	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(145.002)	(209.643)	(37)	(354.682)	Allowance for impairment losses
Jumlah piutang pembiayaan - bersih	9.480.569	7.911.739	3.612	17.395.920	Total financing receivables - net

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/40

Exhibit E/40

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

5. PIUTANG PEMBIAYAAN (Lanjutan)

5. FINANCING RECEIVABLES (Continued)

b. Piutang pembiayaan berdasarkan jenis pengikatan
(Lanjutan)b. Financing receivables based on type of contract
(Continued)

	2018			
	Sewa pembiayaan/ <i>Finance lease</i>	Pembiayaan konsumen/ <i>Consumer financing</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Piutang pembiayaan - bruto	14.159.288	8.528.184	22.687.472	Financing receivables - gross
Pendapatan pembiayaan yang belum diakui	(2.516.944)	(1.750.279)	(4.267.223)	Unearned financing income
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(127.255)	47.307	(79.948)	Unamortized transaction cost
	11.515.089	6.825.212	18.340.301	
Pembiayaan bersama dan penerusan pinjaman - bersih	-	(681.981)	(681.981)	Joint financing and channeling - net
	11.515.089	6.143.231	17.658.320	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(157.419)	(220.443)	(377.862)	Allowance for impairment losses
Jumlah piutang pembiayaan - bersih	11.357.670	5.922.788	17.280.458	Total financing receivables - net

Informasi pokok lainnya sehubungan dengan piutang pembiayaan adalah sebagai berikut:

Other significant information relating to financing receivables is as follows:

Persentase cadangan kerugian penurunan nilai terhadap jumlah piutang pembiayaan sebesar 2,00% dan 2,14% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Percentage of the allowance for impairment losses to financing receivables was 2.00% and 2.14% as of 31 December 2019 and 2018, respectively.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang pembiayaan tersebut.

The management believes that the allowance for impairment losses was sufficient to cover possible losses arising from uncollectible financing receivables.

Seluruh transaksi pembiayaan dilakukan dengan pihak ketiga.

All of the Company's financing transactions are entered into with third parties.

Jangka waktu kontrak pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan atas kendaraan bermotor dan alat-alat berat berkisar antara 6-60 bulan, serta perumahan (KPR) berkisar 12-180 bulan.

The period of financing for vehicle and heavy equipment contract ranged from 6-60 months, and housing ranges between 12-180 months.

Rincian bunga kontraktual per tahun untuk piutang pembiayaan adalah sebagai berikut:

The detail of contractual interest rates per annum on financing receivables are as follows:

	2019 %	2018 %	
Mobil	15 - 21	15 - 22	Cars
Sepeda motor	37 - 41	37 - 40	Motorcycles
Properti	17 - 20	17 - 20	Property
Alat berat dan mesin	14 - 17	14 - 17	Heavy equipment and machinery

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/41

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

5. PIUTANG PEMBIAYAAN (Lanjutan)

Informasi pokok lainnya sehubungan dengan piutang pembiayaan adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

Sebagai jaminan atas piutang pembiayaan yang diberikan, Perusahaan menerima jaminan dari konsumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas kendaraan bermotor dan properti (bangunan) yang dibiayai Perusahaan dan faktur atas kendaraan bermotor/alat berat/obyek jaminan yang dibiayai oleh Perusahaan.

Piutang pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 7.676.277 dan Rp 6.438.835 digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima (Catatan 13) dan sebesar Rp 2.258.451 dan Rp 3.255.420 digunakan sebagai jaminan surat berharga yang diterbitkan (Catatan 15).

Perusahaan bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi dalam menutup asuransi kendaraan bermotor konsumen yang dibiayai Perusahaan, terutama dengan PT Asuransi Asoka Mas, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi FPG Indonesia, PT AIA Financial, PT Asuransi Cigna, PT Commonwealth Life, PT FWD Life Indonesia, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Purna Artanugraha (ASPAN), dan PT MAPFRE ABDA Assistance. Seluruh perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan Perusahaan tersebut adalah pihak ketiga.

6. PIUTANG LAIN-LAIN

	2019
Piutang dalam proses penyelesaian - bersih	80.928
Piutang penerimaan angsuran konsumen	35.071
Piutang karyawan	20.279
Piutang opsi saham karyawan (MESOP)	5.306
Premi asuransi	3.855
Lain-lain	8.055
Jumlah	153.494

Piutang penerimaan angsuran konsumen merupakan pembayaran angsuran konsumen yang diantaranya dilakukan secara *online* melalui fasilitas layanan pembayaran pelanggan (*payment point*) seperti jaringan ATM Prima, ATM Bersama, Kantor Pos Indonesia, jaringan toko ritel Indomaret dan Alfamart (termasuk di dalamnya jaringan Alfa Midi, Lawson dan Alfa Express). Fasilitas *payment point* ini akan meneruskan angsuran yang dibayarkan konsumen tersebut ke rekening Perusahaan di beberapa bank dalam jangka waktu 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari dari tanggal angsuran konsumen diterima.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang dalam proses penyelesaian-pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 33.857 dan Rp 37.581 cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang dalam proses penyelesaian - pihak ketiga.

Exhibit E/41

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

5. FINANCING RECEIVABLES (Continued)

Other significant information relating to financing receivables is as follows: (Continued)

As the collateral to the financing receivables, the Company receives the Book of Vehicle Ownership (BPKB), Proprietary Certificate (SHM) and Property Use Right Certificate (SHGB) of the vehicles and property (building) financed by the Company and purchase invoices of the motor vehicles/heavy equipment/collateral asset financed by the Company.

Financing receivable as of 31 December 2019 and 2018 amounting to Rp 7,676,277 and Rp 6,438,835 were used as collateral to borrowings (Note 13) and amounting to Rp 2,258,451 and Rp 3,255,420 were used as collateral to securities issued, respectively (Note 15).

The Company engages several insurance companies, in covering the insurance on the consumers vehicles that financed by the Company, mainly with PT Asuransi Asoka Mas, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi FPG Indonesia, PT AIA Financial, PT Asuransi Cigna, PT Commonwealth Life, PT FWD Life Indonesia, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Purna Artanugraha (ASPAN) and PT MAPFRE ABDA Assistance. All insurance companies that the engaged by the Company are third parties.

6. OTHER RECEIVABLES

	2019	2018	
Piutang dalam proses penyelesaian - bersih	80.928	93.307	<i>Receivables in the settlement process - net</i>
Piutang penerimaan angsuran konsumen	35.071	61.491	<i>Customer installment receipt receivables</i>
Piutang karyawan	20.279	21.713	<i>Employee receivables</i>
Piutang opsi saham karyawan (MESOP)	5.306	7.618	<i>Employee share option (MESOP) receivables</i>
Premi asuransi	3.855	2.422	<i>Insurance premium</i>
Lain-lain	8.055	11.720	<i>Others</i>
Jumlah	153.494	198.271	Total

Customer installment receipt receivables are customer installment such paid through online customer's payment channel (payment point) such as ATM networks of Prima, ATM Bersama, the Indonesian Post Office, and outlets of Indomaret and Alfamart retail stores (including the store chains of Alfa Midi, Lawson and Alfa Express). These channels will transfer the installment paid to the Company's bank account in several bank within 1 (one) day up to 2 (two) days from the date that the customer installment is received.

Management believes that allowance for impairment losses of receivables in the settlement process - third parties as of 31 December 2019 and 2018 amounting to Rp 33,857 and Rp 37,581, respectively, are adequate to cover possible losses from uncollectible receivables from receivables in the settlement process - third parties.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/42

Exhibit E/42

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

7. ASET (LIABILITAS) DERIVATIF

Perusahaan memiliki beberapa kontrak *cross currency* dan *interest rate swap* dengan beberapa bank. Perincian dari kontrak-kontrak tersebut adalah sebagai berikut:

7. DERIVATIVE ASSETS (LIABILITIES)

The Company has several cross currency and interest rate swap contracts with several banks. The details of these contracts are as follows:

2019					
Pihak lawan/ Counterparty	Jumlah nosional (nilai penuh)/ Notional amount (full amount)	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Tanggal jatuh tempo/ Due date	Nilai wajar/Fair value Aset (liabilitas) derivatif/ Derivative assets (liabilities)	
<i>Cross Currency and Interest Rate Swap</i>					
PT Bank CIMB Niaga Tbk	USD 833.333	8-Dec-2016	10-Jan-2020	347	
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	USD 18.000.000	13-Jun-2017	22-Aug-2020	5.718	
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	USD 20.500.000	13-Jun-2017	11-Dec-2020	10.652	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	USD 5.333.333	21-Nov-2017	14-Dec-2020	1.287	
PT Bank ANZ Indonesia	USD 22.500.000	10-Jan-2019	18-Jan-2022	(17.263)	
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	USD 27.000.000	10-Jan-2019	23-Jan-2022	(19.899)	
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	USD 30.000.000	16-Apr-2019	29-Apr-2022	(19.357)	
PT Bank Permata Tbk	USD 30.000.000	16-Apr-2019	16-May-2022	(16.106)	
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	USD 35.000.000	16-Apr-2019	24-Jun-2022	(19.130)	
PT Bank Permata Tbk	USD 35.000.000	16-Apr-2019	15-Jul-2022	(21.704)	
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	USD 15.000.000	16-Apr-2019	15-Aug-2022	(10.029)	
PT Bank ANZ Indonesia	USD 45.000.000	23-Oct-2019	14-Nov-2022	(12.297)	
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	USD 30.000.000	23-Oct-2019	7-Nov-2022	(10.986)	
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	USD 10.000.000	27-Dec-2019	27-Mar-2020	(1.262)	
				(130.029)	

2018					
Pihak lawan/ Counterparty	Jumlah nosional (nilai penuh)/ Notional amount (full amount)	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Tanggal jatuh tempo/ Due date	Nilai wajar/Fair value Aset (liabilitas) derivatif/ Derivative assets (liabilities)	
<i>Cross Currency and Interest Rate Swap</i>					
PT Bank CIMB Niaga Tbk	USD 4.166.667	8-Dec-2016	10-Jan-2020	3.879	
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	USD 42.000.000	13-Jun-2017	22-Aug-2020	48.499	
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	USD 46.500.000	13-Jun-2017	11-Dec-2020	58.749	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	USD 10.666.667	21-Nov-2017	14-Dec-2020	10.742	
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	USD 10.000.000	9-Oct-2018	11-Apr-2019	(11.699)	
				110.170	

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/43

Exhibit E/43

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

7. ASET (LIABILITAS) DERIVATIF (Lanjutan)

Perusahaan melakukan kontrak *cross currency swap* dan *interest rate swap* dengan tujuan lindung nilai atas risiko fluktuasi arus kas yang ditimbulkan oleh kurs mata uang dan tingkat suku bunga atas pinjaman yang diterima.

Perubahan atas nilai wajar dari kontrak *cross currency swap* dan *interest rate swap* yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai, yang secara efektif menghapus variabilitas arus kas dari pinjaman terkait, dicatat di ekuitas. Nilai ini kemudian diakui dalam laporan laba rugi sebagai penyesuaian atas laba atau rugi selisih kurs dan beban bunga pinjaman terkait yang dilindungi nilai pada periode yang sama dimana selisih kurs dan beban bunga tersebut diakui pada perkiraan laba rugi.

(Kerugian) keuntungan kumulatif yang timbul dari perubahan nilai wajar instrumen derivatif pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar (Rp 87.938) dan Rp 1.684 disajikan sebagai "(Kerugian) keuntungan kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas-bersih" sebagai bagian "Ekuitas" pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan akan diakui dalam laporan laba rugi pada saat realisasinya.

7. DERIVATIVE ASSETS (LIABILITIES) (Continued)

The Company entered into *cross currency swap* and *interest rate swap* contracts to hedge the risk of fluctuations in cash flows arising from exchange rates and interest rates on borrowing.

Changes in the fair value of *cross currency swap* and *interest rate swap* contract designated hedging instruments that effectively offset the variability of cash flows associated with the borrowings are recorded in equity. The amounts subsequently are recognized to the profit or loss as adjustments of the exchange rate differences and interest payments related to the hedged borrowings in the same period in which the related exchange rate differences and interest affects profit or loss.

The cumulative (loss) gain arising from the changes in fair values of the derivative instruments as of 31 December 2019 and 2018 amounting to (Rp 87,938) and Rp 1,684 were presented as "Cumulative (loss) gain on derivative instrument for cash flow hedges - net" under the "Equity" section in the consolidated statement of financial position and will be recognized in the statement of profit or loss upon its realization.

8. BEBAN DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA

	2019
Sewa	57.391
Uang muka	2.212
Asuransi	324
Lain-lain	13.206
Jumlah	73.133

8. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES

	2018	
	50.555	Rent
	1.042	Advance payment
	299	Insurance
	1.534	Others
Total	53.430	Total

9. ASET IJARAH

Akun ini merupakan obyek sewa dari transaksi *ijarah* dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa dan *ijarah* multijasa dengan perincian sebagai berikut:

	2019
Multijasa	53.856
Akumulasi penyusutan	(12.784)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(481)
Aset ijarah - bersih	40.591

Penyusutan dan kerugian penurunan nilai dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

9. IJARAH ASSETS

This account represents the object of lease from *ijarah* transactions with the option of transferring ownership of leased objects and multijasa *ijarah* with the following details:

	2018	
	2.907	Multi service
	(504)	Accumulated depreciation
	-	Allowance for impairment losses
Ijarah assets - net	2.403	Ijarah assets - net

Depreciation and impairment losses was charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
 in Indonesian Language*

Ekshibit E/45

Exhibit E/45

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
 NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

10. ASET TETAP (Lanjutan)

Jumlah penyusutan yang dibebankan pada operasi adalah sejumlah Rp 82.206 dan Rp 74.607 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Catatan 27).

Perusahaan memiliki beberapa bidang tanah dengan status Hak Guna Bangunan ("HGB") yang memiliki masa manfaat yang akan berakhir antara tahun 2020 sampai tahun 2048. Manajemen Perusahaan beryakinan bahwa tidak akan terdapat kesulitan dalam memperpanjang hak atas tanah karena tanah tersebut diperoleh secara sah dan dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah.

Pengurangan aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari penghapusbukuan peralatan kantor dan rehabilitasi gedung kantor, serta penjualan aset tetap kendaraan dan peralatan kantor dengan rincian keuntungan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Hasil penjualan	22.507	20.465
Jumlah tercatat	<u>(11.776)</u>	<u>(11.177)</u>
Keuntungan atas penjualan aset tetap	<u>10.731</u>	<u>9.288</u>

Keuntungan atas penjualan aset tetap diakui sebagai bagian dari "Pendapatan Lain-lain" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2019, aset tetap berupa tanah dan bangunan sebesar Rp 303.052 dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh Perusahaan (Catatan 13).

Seluruh aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan terhadap risiko kerugian kebakaran, banjir dan risiko kerugian lainnya (*all risks*) dengan jumlah nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 454.315 dan Rp 388.841 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap terhadap risiko-risiko yang dipertanggungkan.

Manajemen Perusahaan dan entitas anaknya berkeyakinan bahwa tidak terdapat kondisi atau peristiwa yang menimbulkan indikasi penurunan nilai atas jumlah tercatat aset tetap, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk aset tetap.

Manajemen Perusahaan dan entitas anaknya berkeyakinan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan antara nilai wajar aset tetap dengan jumlah tercatat.

Seluruh aset tetap yang ada pada tanggal pelaporan digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Perusahaan.

10. FIXED ASSETS (Continued)

Depreciation charged to operations was amounted to Rp 82,206 and Rp 74,607 for the years ended 31 December 2019 and 2018, respectively (Note 27).

The Company owns several plots of land with "Property Use Rights" titles ("HGB") with remaining useful lives that will expire in the various years between 2020 to 2048. The management of the Company believes that there will be no difficulty in extending the land rights as the land were acquired legally and supported by sufficient evidences of ownership.

Deductions of fixed assets for the year ended 31 December 2019 and 2018 consisted of written off office equipment and leasehold improvement, and sales of fixed assets - vehicles and office equipment with details of gain on sale are as follows:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Hasil penjualan	22.507	20.465
Jumlah tercatat	<u>(11.776)</u>	<u>(11.177)</u>
Keuntungan atas penjualan aset tetap	<u>10.731</u>	<u>9.288</u>

Gain on sale of fixed assets is recognized as part of "Other Income" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

As of 31 December 2019, fixed assets in the form of land and building amounting to Rp 303,052 were pledged as collateral for the Company's loan facilities (Note 13).

All fixed assets, except for land, are covered against losses from fire, flood and other risks (all risks) with a total sum insured amounting to Rp 454,315 and Rp 388,841 as of 31 December 2019 and 2018, respectively. The management believes that the sum insured is sufficient to cover the possible losses that may arise from the said insured risks.

The management of the Company and its subsidiary believes that there were no conditions or event that indicate impairment in the carrying amount of its fixed assets, and therefore an allowance for impairment losses of fixed assets was not considered necessary.

The management of the Company and its subsidiary believes that there is no significant difference between the fair value and the carrying amount of fixed assets.

All of fixed assets as at the reporting date are fully used to support the Company's operation activities.

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit E/46

Exhibit E/46

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TAK BERWUJUD

11. INTANGIBLE ASSETS

	2019					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan Piranti lunak	94.534	4.620	-	2.955	102.109	Acquisition cost Software
Piranti lunak dalam penyelesaian	1.612	3.344	-	(2.955)	2.001	Software in progress
Jumlah Harga Perolehan	96.146	7.964	-	-	104.110	Total Acquisition Cost
Akumulasi amortisasi Piranti lunak	63.772	10.173	-	-	73.945	Accumulated amortization Software
Jumlah Tercatat	32.374				30.165	Carrying Amount
	2018					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan Piranti lunak	73.260	8.414	(2)	12.862	94.534	Acquisition cost Software
Piranti lunak dalam penyelesaian	1.692	12.782	-	(12.862)	1.612	Software in progress
Jumlah Harga Perolehan	74.952	21.196	(2)	-	96.146	Total Acquisition Cost
Akumulasi amortisasi Piranti lunak	54.400	9.374	(2)	-	63.772	Accumulated amortization Software
Jumlah Tercatat	20.552				32.374	Carrying Amount

Jumlah amortisasi yang dibebankan pada operasi adalah sejumlah Rp 10.173 dan Rp 9.374 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Catatan 27).

Amortization charged to operations was amounted to Rp 10,173 and Rp 9,374 for the years ended 31 December 2019 and 2018, respectively (Note 27).

12. ASET LAIN-LAIN

12. OTHER ASSETS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2019	2018	
Uang muka pembelian tanah	81.206	81.055	Advance for land acquisition
Lainnya	1.569	5.336	Others
Jumlah	82.775	86.391	Total

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/47

Exhibit E/47

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

13. PINJAMAN YANG DITERIMA - PIHAK KETIGA

13. FUND BORROWINGS - THIRD PARTIES

Pinjaman yang diterima terdiri dari

Borrowings consist of the followings:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Pinjaman (Dolar AS)			Borrowings (US Dollar)
Pinjaman Sindikasi			Syndicated Loan
(Agen: PT Bank Central Asia Tbk)	2.703.745	-	(Agent: PT Bank Central Asia Tbk)
Pinjaman Berjangka yang Dijamin			USD75M Secured Term loan Facility
(Agen: Standard Chartered Bank)	1.042.574	-	(Agent: Standard Chartered Bank)
Pinjaman Sindikasi			Syndicated Loan
(Agen: Standard Chartered Bank)	535.189	1.281.568	(Agent: Standard Chartered Bank)
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	139.010	144.810	MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch
PT Bank CTBC Indonesia	74.139	154.464	PT Bank CTBC Indonesia
JA Mitsui Leasing Singapore Pte. Ltd.	11.584	60.338	JA Mitsui Leasing Singapore Pte. Ltd.
PT Bank ANZ Indonesia	-	217.500	PT Bank ANZ Indonesia
Sub-jumlah pinjaman (Dolar AS)	<u>4.506.241</u>	<u>1.858.680</u>	Sub-total borrowings (US Dollar)
Pinjaman (Rupiah)			Borrowings (Rupiah)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.169.637	1.790.624	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT United Tractors Tbk	856.156	1.032.020	PT United Tractors Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	603.889	624.722	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank ANZ Indonesia	217.000	-	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Permata Tbk	188.604	447.294	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	91.667	225.000	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk			PT Bank Danamon Indonesia Tbk (formerly
(d/h PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk)	66.185	136.725	PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk)
PT Bank KEB Hana Indonesia	29.565	253.704	PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank Bukopin Tbk	25.000	-	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	10.694	108.472	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	-	340.000	Standard Chartered Bank, Jakarta Branch
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	66.667	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Bank of China (Hongkong) Limited, Jakarta Branch	-	37.500	Bank of China (Hongkong) Limited, Jakarta Branch
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	2.029	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Sub-jumlah pinjaman (Rupiah)	<u>3.258.397</u>	<u>5.064.757</u>	Sub-total borrowings (Rupiah)
Jumlah pinjaman	7.764.638	6.923.437	Total borrowings
Dikurangi:			Less:
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(34.617)	(23.577)	Unamortized transaction costs
Pinjaman - bersih	<u>7.730.021</u>	<u>6.899.860</u>	Borrowings - net

Kisaran suku bunga kontraktual setahun untuk pinjaman dari bank di atas adalah sebagai berikut:

The range of contractual interest rates per annum on the above bank loans are as follows:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Rupiah	5,00 - 10,50	5,00 - 12,00	Rupiah
Dolar AS	3,06 - 3,70	3,81 - 4,18	US Dollar

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/48

Exhibit E/48

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

13. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

13. FUND BORROWINGS (Continued)

Rincian dari pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut:

The detail of borrowings are as follows:

Nama Bank/ <i>Bank's Name</i>	Perjanjian terakhir/ <i>Latest agreement</i>	Jatuh tempo fasilitas/ <i>Facility due date</i>	Batas fasilitas/ <i>Facility limit</i>	Saldo pinjaman/ <i>Outstanding loan</i>	
				31 Desember/ <i>December 2019</i>	December <i>2018</i>
Dolar AS/US Dollar					
Pinjaman Sindikasi (Agen : PT Bank Central Asia Tbk)	15-Apr-2019	15-Aug-2022	USD 200.000.000	2.703.745	-
Pinjaman Berjangka yang dijaminan (Agen : Standard Chartered Bank)	21-Oct-2019	12-Nov-2022	USD 75.000.000	1.042.574	-
Pinjaman Sindikasi (Agen : Standard Chartered Bank)	6-Oct-2017	11-Dec-2020	USD 125.000.000	535.189	1.281.568
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	30-Jun-2019	31-Dec-2020	USD 10.000.000	139.010	144.810
PT Bank CTBC Indonesia	14-Nov-2017	14-Dec-2020	USD 16.000.000	74.139	154.464
JA Mitsui Leasing Singapore Pte.Ltd.	11-Oct-2016	10-Jan-2020	USD 10.000.000	11.584	60.338
PT Bank ANZ Indonesia	13-Jun-2019	30-Apr-2020	USD 15.000.000	-	217.500
Jumlah			USD 451.000.000	4.506.241	1.858.680
Rupiah					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	15-Aug-2016	27-Sep-2019	500.000	-	130.446
	26-Oct-2016	20-Feb-2020	500.000	8.852	194.363
	30-Mar-2017	23-Feb-2021	1.000.000	297.222	689.617
	23-Mar-2018	29-Mar-2021	500.000	174.256	301.325
	28-Jun-2018	19-Dec-2021	300.000	150.191	291.540
	13-Sep-2018	23-Jul-2021	200.000	116.667	183.333
	20-Feb-2019	29-Jun-2022	500.000	422.449	-
PT United Tractors Tbk	8-Mar-2019	11-Dec-2022	1.250.000	856.156	1.032.020
PT Bank Central Asia Tbk	10-Mar-2017	12-May-2020	450.000	44.167	194.167
	16-Jul-2018	26-Jul-2021	500.000	263.889	430.555
	24-Oct-2019	26-Dec-2022	500.000	295.833	-
PT Bank ANZ Indonesia	13-Jun-2019	7-Jan-2020	217.000	217.000	-
PT Bank Permata Tbk	21-May-2019	24-May-2022	650.000	188.604	447.294
PT Bank Pan Indonesia Tbk	6-Dec-2019	6-Jun-2023	350.000	91.667	225.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (d/h PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk)	6-Jun-2018	21-Jun-2021	167.500	66.185	136.725
PT Bank KEB Hana Indonesia	28-Sep-2018	16-May-2020	500.000	29.565	253.704
PT Bank Bukopin Tbk	15-Aug-2019	15-Aug-2020	500.000	25.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	22-Apr-2016	16-May-2019	120.000	-	16.667
	28-Sep-2016	30-Mar-2020	250.000	7.361	85.139
	22-Aug-2017	28-Dec-2020	250.000	3.333	6.666
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	10-Apr-2018	17-Apr-2019	340.000	-	340.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4-Mar-2019	22-Dec-2019	300.000	-	66.667
Bank of China (Hongkong) Limited, Jakarta Branch	20-Jun-2016	21-Jul-2019	150.000	-	37.500
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8-Jun-2017	10-Jun-2019	400.000	-	2.029
Jumlah Rupiah/Total Rupiah			10.394.500	3.258.397	5.064.757
Jumlah pinjaman/Total borrowings				7.764.638	6.923.437

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/49

Exhibit E/49

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

13. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

Pada tanggal 12 Juni 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Sindikasi Pinjaman Berjangka dengan Jaminan (*Term Loan*) sebesar USD 100.000.000 (nilai penuh) dengan sejumlah bank, dimana Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan MUFG Bank, Ltd., bersama-sama bertindak sebagai "*Mandated Lead Arranger and Bookrunner*", Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited sebagai Agen Fasilitas (*the "Facility Agent"*), dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Jaminan (*the "Security Agent"*).

Pada tanggal 6 Oktober 2017, Perusahaan menandatangani perubahan perjanjian di atas, dan perubahan mengenai total fasilitas pinjaman menjadi sebesar USD 125.000.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 28 Desember 2018, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Sindikasi Pinjaman Berjangka dengan Jaminan (*Term Loan*) sebesar USD 55.000.000 (nilai penuh) dengan sejumlah bank, dimana Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd dan Australia and New Zealand Banking Group Limited, bersama-sama bertindak sebagai "*Mandated Lead Arranger and Bookrunner*", serta PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Fasilitas (*the "Facility Agent"*), dan Agen Jaminan (*the "Security Agent"*).

Pada tanggal 15 April 2019, Perusahaan menandatangani perubahan perjanjian di atas, dan perubahan mengenai total fasilitas pinjaman menjadi sebesar USD 200.000.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 21 Oktober 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka dengan Jaminan (*Term Loan*) sebesar USD 75.000.000 (nilai penuh) dengan Standard Chartered Bank, Jakarta Branch serta, Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited sebagai Agen Fasilitas (*the "Facility Agent"*), dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Jaminan (*the "Security Agent"*).

Seluruh perjanjian di atas mencakup adanya pembatasan-pembatasan tertentu yang umumnya diharuskan untuk fasilitas-fasilitas kredit tersebut, antara lain, pembatasan untuk melakukan penggabungan usaha atau konsolidasi dengan pihak lain, mengadakan perjanjian pinjaman dengan pihak lain selain yang timbul dalam kegiatan usaha yang normal atau melakukan perubahan atas struktur modal dan/atau anggaran dasar tanpa adanya pemberitahuan/persetujuan tertulis dari kreditur dan mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, fasilitas pinjaman, selain sebagaimana dijelaskan pada paragraf di bawah, dijamin dengan piutang pembiayaan (Catatan 5).

Pada tanggal 31 Desember 2018, fasilitas Pinjaman *Money Market* dari PT Bank KEB Hana Indonesia dan PT Bank Pan Indonesia Tbk masing-masing senilai Rp 100.000 merupakan fasilitas pinjaman tanpa jaminan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, terdapat aset tetap yang dijaminan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh Perusahaan (Catatan 10).

13. FUND BORROWINGS (Continued)

On 12 June 2017, the Company entered into a Secured Syndicated Term Loan Facility Agreement amounting to USD 100,000,000 (full amount) with several banks, whereas Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation and MUFG Bank, Ltd., collectively acting as the Mandated Lead Arranger and Bookrunner, Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, whose acting as the Facility Agent, and PT Bank Central Asia Tbk, whose acting as the Security Agent.

On 6 October 2017, the Company signed an amendment to the above agreement and amendment related to the total facility increase to USD 125,000,000 (full amount).

On 28 December 2018, the Company entered into a Secured Syndicated Term Loan Facility Agreement amounting to USD 55,000,000 (full amount) with several banks, whereas Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd and Australia and New Zealand Banking Group Limited collectively acting as the Mandated Lead Arranger and Bookrunner, together with PT Bank Central Asia Tbk, whose acting as the Facility Agent and the Security Agent.

On 15 April 2019, the Company signed an amendment to the above agreement and amendment related to the total facility increase to USD 200,000,000 (full amount).

On 21 October 2019, the Company entered into a Secured Loan Facility Agreement amounting to USD 75,000,000 (full amount) with Standard Chartered Bank, Jakarta Branch also, Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, whose acting as the Facility Agent, and PT Bank Central Asia Tbk, whose acting as the Security Agent.

All loan agreements include certain covenants which are normally required for such credit facilities, such as limitations to initiate merger or consolidation with other parties, obtain loans from other parties except loans obtained in the normal course of business, or changes in its capital structure and/or articles of association without notification to/prior written approval from creditors and maintenance of certain agreed financial ratios.

As of 31 December 2019 and 2018, the loan facilities, except for as explained in below paragraph, are secured by financing receivables (Note 5).

As of 31 December 2018, Money Market loan facility from PT Bank KEB Hana Indonesia and PT Bank Pan Indonesia Tbk amounted to Rp 100,000, respectively, are not secured with any collateral.

As of 31 December 2019 and 2018, there were fixed assets pledged as collateral for the Company's loan facilities (Note 10).

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/50

Exhibit E/50

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

13. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perusahaan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas-fasilitas pinjaman ini.

13. FUND BORROWINGS (Continued)

Interest and principal loan payments have been paid by the Company on schedule.

As of 31 December 2019 and 2018, the Company has complied with all the requirements mentioned in the loan facility agreements.

14. PERPAJAKAN

14. TAXATION

a. Utang pajak

a. Taxes payable

	2019	2018	
Pajak Penghasilan:			<i>Income Taxes:</i>
Pasal 21	23.435	19.929	<i>Article 21</i>
Pasal 23	477	653	<i>Article 23</i>
Pasal 26	714	690	<i>Article 26</i>
Pasal 4(2) - Final	317	193	<i>Article 4(2) - Final</i>
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	1.661	1.524	<i>Value Added Tax (VAT)</i>
Pasal 29	46.667	44.074	<i>Article 29</i>
Jumlah	73.271	67.063	Total

b. Beban pajak penghasilan

b. Income tax expense

	2019	2018	
Kini	397.081	392.810	<i>Current</i>
Tangguhan	(16.518)	(20.584)	<i>Deferred</i>
Penyesuaian tahun lalu	8	79	<i>Adjustment on prior fiscal year</i>
Jumlah	380.571	372.305	Total

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atas laba sebelum pajak penghasilan, dengan beban pajak penghasilan sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the income tax expense calculated by applying the applicable tax rates to profit before income tax, and the income tax expense as presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the years ended 31 December 2019 and 2018 are as follows:

	2019	2018	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	1.092.253	1.840.099	<i>Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Rugi entitas anak sebelum pajak penghasilan	6.362	650	<i>Loss before tax of subsidiary</i>
Laba sebelum pajak Perusahaan	1.098.615	1.840.749	<i>Profit before tax of the Company</i>
Beban pajak dengan tarif pajak tunggal yang berlaku	219.723	368.150	<i>Tax expense at the applicable single tax rate</i>
Pengaruh pajak penghasilan atas: Beda tetap pada tarif pajak tunggal yang berlaku	160.840	4.076	<i>Tax effects on: Permanent differences at the applicable single tax rate</i>
Penyesuaian tahun lalu	8	79	<i>Adjustment on prior fiscal year</i>
Jumlah	380.571	372.305	Total

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/51

Exhibit E/51

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

14. PERPAJAKAN (Lanjutan)

14. TAXATION (Continued)

b. Beban pajak penghasilan (Lanjutan)

b. Income tax expense (Continued)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak, sebagaimana yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dengan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit before tax, as presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, and estimated taxable profit for the years ended 31 December 2019 and 2018 are as follows:

	2019	2018	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian -	1.092.253	1.840.099	<i>Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Rugi entitas anak sebelum pajak penghasilan	6.362	650	<i>Loss before tax of subsidiary</i>
Laba sebelum pajak Perusahaan	1.098.615	1.840.749	<i>Profit before tax of the Company</i>
Beda tetap:			Permanent differences:
Beban sewa	1.851	1.906	<i>Rent expenses</i>
Pendapatan keuangan yang pajaknya bersifat final	(54.177)	(24.252)	<i>Finance income subjected to final tax</i>
Beban asuransi	12.090	11.704	<i>Insurance expenses</i>
Beban depresiasi	3.264	3.041	<i>Depreciation expenses</i>
Beban lain-lain	827.494	27.982	<i>Other expenses</i>
Jumlah beda tetap	790.522	20.381	<i>Total permanent differences</i>
Beda temporer:			Temporary differences:
Gaji dan imbalan pasca-kerja	46.602	36.888	<i>Salaries and post-employment benefits</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan dan piutang lain-lain	372.893	384.983	<i>Allowance for impairment losses of financing receivables and other receivables</i>
Penghapusan piutang	(376.617)	(368.801)	<i>Receivables written-off</i>
Penyusutan aset tetap	(5.427)	807	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Keuntungan bersih atas penjualan aset tetap	(3.803)	(1.634)	<i>Net gain on sale of fixed assets</i>
Amortisasi biaya emisi surat berharga yang diterbitkan	4.064	(1.191)	<i>Amortization of securities issuance cost</i>
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas pinjaman yang diterima	(11.040)	10.114	<i>Unamortized transaction cost on fund borrowings</i>
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas piutang pembiayaan	69.596	41.754	<i>Unamortized transaction cost on financing receivables</i>
Jumlah beda temporer	96.268	102.920	<i>Total temporary differences</i>
Taksiran laba kena pajak	1.985.405	1.964.050	<i>Estimated taxable profit</i>
Tarif pajak	20%	20%	<i>Tax rate</i>
Taksiran beban pajak penghasilan - kini	397.081	392.810	<i>Estimated income tax expense - current</i>
Dikurangi : pajak dibayar dimuka	(350.414)	(348.736)	<i>Less : prepaid taxes</i>
Taksiran utang pajak kini	46.667	44.074	<i>Estimated current income tax payable</i>

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun 2019 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada saat Perusahaan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan.

The corporate income tax calculation for 2019 was a preliminary estimate made for accounting purposes and is subject to revision when the Company filed its Annual Corporate Income Tax Return.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/52

Exhibit E/52

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

14. PERPAJAKAN (Lanjutan)

14. TAXATION (Continued)

c. Pajak tangguhan

c. Deferred tax

Pengaruh pajak tangguhan atas beda temporer yang signifikan antara laporan komersial dan laporan fiskal terdiri dari:

The deferred tax effects of the significant temporary differences between commercial and fiscal reporting are as follows:

	31 Desember/ December 2018	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi / Credited (charged) to statement of profit or loss	Dikreditkan ke ekuitas dari pendapatan komprehensif lain/ Credited to equity from other comprehensive income	31 Desember/ December 2019	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					Deferred tax assets (liabilities)
Cadangan kerugian penurunan nilai	10.252	(3.480)	-	6.772	Allowance for impairment losses
Imbalan pasca-kerja	40.475	8.013	-	48.488	Post-employment benefits
Beban yang masih harus dibayar	17.723	1.307	-	19.030	Accrued expenses
Penyusutan aset tetap	(6.560)	(1.846)	-	(8.406)	Depreciation of fixed assets
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas piutang pembiayaan	15.464	13.919	-	29.383	Unamortized transaction cost on financing receivables
Biaya emisi surat berharga yang diterbitkan belum diamortisasi	(1.956)	813	-	(1.143)	Unamortized securities issued cost
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas pinjaman yang diterima	(4.715)	(2.208)	-	(6.923)	Unamortized transaction cost on fund borrowings
Penghasilan komprehensif lain	(2.301)	-	25.462	23.161	Other comprehensive income
Aset pajak tangguhan - bersih	68.382	16.518	25.462	110.362	Deferred tax assets - net

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/53

Exhibit E/53

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

14. PERPAJAKAN (Lanjutan)

14. TAXATION (Continued)

c. Pajak tangguhan (Lanjutan)

c. *Deferred tax (Continued)*

Pengaruh pajak tangguhan atas beda temporer yang signifikan antara laporan komersial dan laporan fiskal terdiri dari: (Lanjutan)

The deferred tax effects of the significant temporary differences between commercial and fiscal reporting are as follows: (Continued)

	31 Desember/ December 2017	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi / Credited (charged) to statement of profit or loss	Dikreditkan ke ekuitas dari pendapatan komprehensif lain/ Credited to equity from other comprehensive income	31 Desember/ December 2018	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					Deferred tax assets (liabilities)
Cadangan kerugian penurunan nilai	7.016	3.236	-	10.252	Allowance for impairment losses
Imbalan pasca-kerja	39.943	532	-	40.475	Post-employment benefits
Beban yang masih harus dibayar	10.877	6.846	-	17.723	Accrued expenses
Penyusutan aset tetap	(6.395)	(165)	-	(6.560)	Depreciation of fixed assets
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas piutang pembiayaan	7.113	8.351	-	15.464	Unamortized transaction cost on financing receivables
Biaya emisi surat berharga yang diterbitkan belum diamortisasi	(1.718)	(238)	-	(1.956)	Unamortized securities issued cost
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas pinjaman yang diterima	(6.738)	2.023	-	(4.715)	Unamortized transaction cost on fund borrowings
Penghasilan komprehensif lain	15.490	-	(17.791)	(2.301)	Other comprehensive income
Aset pajak tangguhan - bersih	65.588	20.585	(17.791)	68.382	Deferred tax assets - net

Manajemen berkeyakinan bahwa laba fiskal pada masa datang akan memadai untuk mengkompensasikan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan.

The management believes that future taxable profit will be sufficient to be compensated against the deductible of temporary differences.

d. Administrasi

d. *Administration*

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak. Koreksi terhadap kewajiban pajak Perusahaan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan Perusahaan tersebut telah ditetapkan.

Based on the Taxation Laws in Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax (DGT) may assess or amend taxes within 5 (five) years of the time the tax becomes due. Amendments to tax obligations of the Company are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.

Pada tanggal 28 Desember 2007, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 ("PP No. 81/2007") tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka".

On 28 December 2007, the President of the Republic Indonesia stipulated the Government Regulation No. 81 Year 2007 ("Gov. Reg. No. 81/2007") on "Reduction of the Rate of Income Tax on Resident Corporate Tax Payers in the Forum of Publicly-listed Companies".

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/54

Exhibit E/54

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

14. PERPAJAKAN (Lanjutan)

14. TAXATION (Continued)

d. Administrasi (Lanjutan)

d. Administration (Continued)

Pada tanggal 21 November 2013, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2013 ("PP No. 77/2013") tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" yang kemudian telah diubah kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2015 ("PP No. 56/2015") tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2013.

On 21 November 2013, the President of the Republic of Indonesia issued Government Regulation No. 77 Year 2013 ("Regulation No. 77/2013") on "Income Tax Rate Reduction Corporate Taxpayers in the Form of Publicly-listed Companies" which was later amended back through Government Regulation No. 56 of 2015 ("PP No. 56/2015 ") on the Amendment of Government Regulation No. 77 Year 2013.

PP No. 56/2015 ini mengatur perseroan terbuka dalam negeri di Indonesia dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif pajak penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri, dengan memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; saham tersebut harus dimiliki oleh paling sedikit 300 Pihak; masing-masing Pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh; dan harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu tahun pajak.

PP No. 56/2015 regulates publicly-listed companies in Indonesia can obtain the reduced income tax rate of 5% lower than the income tax rate corporate taxpayer in the country, provided they meet the prescribed criteria, ie at least 40% of the total paid-up shares recorded to be traded on the stock exchanges in Indonesia; the shares must be held by at least 300 Parties; each Party may only have a share of less than 5% of the total shares issued and fully paid; and must be met in a short time at least 183 calendar days within a tax year.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah memenuhi persyaratan di atas untuk mendapatkan penurunan tarif sebesar 5%, sehingga menggunakan tarif 20% untuk perhitungan PPh Badan.

As of 31 December 2019 and 2018, the Company has met requirements to obtain the reduced income tax rate of 5%, so that the rate using of 20% for corporate income tax calculation.

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Perusahaan melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan sistem *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within the statute of limitations, under prevailing regulations.

15. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

15. SECURITIES ISSUED

	2019	2018	
Nilai nominal:			Nominal value:
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016	-	658.000	Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016	133.000	683.000	Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017	460.000	460.000	Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017	400.000	500.000	Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018	1.219.000	2.165.000	Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018	552.000	740.000	Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019	1.000.000	-	Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019
Jumlah nilai nominal	3.764.000	5.206.000	Total nominal value
Dikurangi:			Less:
Biaya emisi Obligasi yang belum diamortisasi	(5.717)	(9.780)	Unamortized Bonds issuance cost
Jumlah - bersih	<u>3.758.283</u>	<u>5.196.220</u>	Total - net

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/55

Exhibit E/55

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

15. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (Lanjutan)

15. SECURITIES ISSUED (Continued)

	2019	2018
Utang Obligasi sesuai jatuh temponya:		
• < 1 tahun	1.613.000	2.442.000
• 1-2 tahun	1.651.000	1.113.000
• 2-3 tahun	500.000	1.651.000
	<u>3.764.000</u>	<u>5.206.000</u>
Amortisasi biaya emisi Obligasi yang dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Konsolidasian (Catatan 26)	<u>7.002</u>	<u>8.392</u>

Bonds payable by maturity profile:

- < 1 year •*
- 1-2 years •*
- 2-3 years •*

*Amortization of Bonds issuance costs
charged to the consolidated statement of
profit or loss and other comprehensive
income (Note 26)*

**Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III
Tahun 2016**

**Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia
Tahap III Tahun 2016**

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Status pembayaran/ Payment status	Peringkat/ Rating
Seri/Series A	Rp 200.000	9,75%	5 Maret/March 2017	Lunas/Paid	AA-(idn)
Seri/Series B	Rp 142.000	10,25%	25 Februari/ February 2018	Lunas/Paid	AA-(idn)
Seri/Series C	Rp 658.000	10,75%	25 Februari/ February 2019	Lunas/Paid	AA-(idn)

**Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I
Tahun 2016**

**Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia
Tahap I Tahun 2016**

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Status pembayaran/ Payment status	Peringkat/ Rating
Seri/Series A	Rp 317.000	8,10%	5 November 2017	Lunas/Paid	AA-(idn)
Seri/Series B	Rp 550.000	8,80%	25 Oktober/ October 2019	Lunas/Paid	A+(idn)
Seri/Series C	Rp 133.000	9,10%	25 Oktober/ October 2021	Belum jatuh tempo/Not yet due	A+(idn)

**Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II
Tahun 2017**

**Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia
Tahap II Tahun 2017**

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Status pembayaran/ Payment status	Peringkat/ Rating
Seri/Series A	Rp 540.000	8,00%	12 Maret/March 2018	Lunas/Paid	AA-(idn)
Seri/Series B	Rp 460.000	9,15%	2 Maret/March 2020	Belum jatuh tempo/Not yet due	A+(idn)

**Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III
Tahun 2017**

**Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia
Tahap III Tahun 2017**

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Status pembayaran/ Payment status	Peringkat/ Rating
Seri/Series A	Rp 335.000	6,75%	19 November 2018	Lunas/Paid	AA-(idn)
Seri/Series B	Rp 100.000	7,25%	9 November 2019	Lunas/Paid	A+(idn)
Seri/Series C	Rp 400.000	7,75%	9 November 2020	Belum jatuh tempo/Not yet due	A+(idn)

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/56

Exhibit E/56

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

15. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (Lanjutan)

15. SECURITIES ISSUED (Continued)

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Status pembayaran/ Payment status	Peringkat/ Rating
Seri/Series A	Rp 946.000	6,40%	16 Maret/March 2019	Lunas/Paid	AA-(idn)
Seri/Series B	Rp 253.000	7,25%	6 Maret/March 2020	Belum jatuh tempo/Not yet due	A+(idn)
Seri/Series C	Rp 966.000	7,60%	6 Maret/March 2021	Belum jatuh tempo/Not yet due	A+(idn)

Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018

Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Status pembayaran/ Payment status	Peringkat/ Rating
Seri/Series A	Rp 188.000	6,75%	6 Juli/July 2019	Lunas/Paid	A+(idn)
Seri/Series B	Rp 552.000	7,75%	26 Juni/June 2021	Belum jatuh tempo/Not yet due	A+(idn)

Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019

Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Status pembayaran/ Payment status	Peringkat/ Rating
Seri/Series A	Rp 500.000	9,00%	2 Maret/March 2020	Belum jatuh tempo/Not yet due	A+(idn)
Seri/Series B	Rp 500.000	10,50%	22 Februari/ February 2022	Belum jatuh tempo/Not yet due	A+(idn)

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perusahaan memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan dengan kategori lancar sebesar 60% untuk Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia dan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia, dari nilai pokok Obligasi yang terutang (Catatan 5).

According to the Bonds Trustee agreement, the Company provides collateral with fiduciary transfer of financing receivables amounting to 60% for Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia and Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia, of the outstanding principal amount of the Bonds (Note 5).

Selain itu, selama pokok Obligasi belum dilunasi, Perusahaan tidak diperkenankan antara lain, membagi dividen dalam hal Perusahaan lalai dalam membayar jumlah terutang obligasi, melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama, dan menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Perusahaan, kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari. Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

Moreover, during the time that the bonds principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, declare dividends in the event that the Company defaults in bond obligations, merge unless performed on the same business, and sells or hand over more than 50% of the Company's assets, except for daily operation activity. The Company has complied with the covenants on the trustee agreements.

Semua pembayaran pokok Obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Pembayaran bunga Obligasi dilakukan secara triwulan.

All Bonds principal is paid in full as they fall due. All Bonds Interest is paid on quarterly basis.

Pada tanggal 28 Maret 2019, Perusahaan telah menerima surat dari PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch") No. 66/DIR/RAT/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang menerangkan bahwa Fitch telah merevisi Peringkat Nasional Jangka Panjang dari 8 lembaga keuangan di Indonesia menyusul rekalisasi yang dilakukan Fitch terhadap skala peringkat nasional Indonesia. Setelah rekalisasi peringkat ini, peringkat kredit atas seluruh Obligasi Perusahaan pada saat ini direvisi menjadi "A+(idn)" dari "AA(idn)" outlook stabil.

On 28 March 2019, the Company has received a letter from PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch") No. 66/DIR/RAT/III/2019 dated 27 March 2019 which notify that Fitch has revised the National Long-Term Ratings of 8 Indonesian financial institutions in accordance with the recalibration of the agency's Indonesian national rating scale. Following this recalibration process, the credit rating of all outstanding Bonds issued by the Company has revised to "A+(idn)" from "AA(idn)" with stable outlook.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/57

Exhibit E/57

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

15. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (Lanjutan)

Rekalibrasi tersebut adalah untuk lebih baik mencerminkan perubahan terhadap kelayakan kredit relatif diantara emiten-emiten di Indonesia yang telah terjadi sejak peningkatan peringkat *sovereign* Republik Indonesia pada bulan Desember 2017 dan telah mengakibatkan revisi peringkat di antara lembaga-lembaga keuangan dan perusahaan-perusahaan non-keuangan. Revisi peringkat digunakan untuk mengubah peringkat tidak terkait dengan kualitas kredit dan hanya untuk mencerminkan perubahan dalam skala peringkat nasional.

15. SECURITIES ISSUED (Continued)

The recalibration is to better reflect changes in the relative creditworthiness among the country's issuers that have taken place since the upgrade of the sovereign rating of Republic Indonesia in December 2017 and has resulted in rating revisions among financial institutions and non-financial corporate issuers. Revision ratings are used to modify ratings for reasons that are not related to credit quality in order to reflect changes in the national rating scale.

16. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2019
Biaya terkait penyelesaian litigasi (Catatan 37)	491.665
Bonus dan tunjangan lainnya	170.682
Bunga	96.524
Jasa tenaga ahli	2.157
Lainnya (saldo dibawah Rp 1.000)	35.681
Jumlah	796.709

16. ACCRUED EXPENSES

	2018	
	-	<i>Litigation settlement related expenses (Note 37)</i>
	153.396	<i>Bonus and other allowances</i>
	77.439	<i>Interest</i>
	6.341	<i>Professional fees</i>
	46.028	<i>Others (balance below Rp 1,000)</i>
Jumlah	283.204	Total

17. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA

Sesuai dengan UU 13/2003, Perusahaan wajib memberikan imbalan pasca-kerja kepada karyawannya pada saat pemutusan hubungan kerja atau pada saat karyawan menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan pasca-kerja ini diberikan terutama berdasarkan masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau selesainya masa kerja.

17. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

In accordance with Law UU 13/2003, the Company is required to provide post-employment benefits to its employees when their employment is terminated or when they retire. These benefits are primarily based on years of service and the employees' compensation at termination or retirement.

Perusahaan dan entitas anaknya menyelenggarakan program pensiun untuk karyawan tetap yang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan Perusahaan, dimana program pensiun ini dikelola dan diadministrasikan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

The Company and its subsidiary has defined contribution pension program covering its qualified permanent employees who meets the Company's criteria, where the contribution pension program is defined and administered by PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Imbalan pasca-kerja meliputi pensiun, uang pisah, uang penghargaan dan imbalan lainnya dihitung oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, aktuaris independen, dalam laporannya bertanggal 6 Februari 2020 dan 8 Januari 2019 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit". Jumlah karyawan yang berhak memperoleh imbalan kerja tersebut untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah 6.845 dan 6.640 karyawan.

Post-employment benefits include pensions, severance pay, service pay and other benefits is calculated by PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, an independent actuary, in its report dated 6 February 2020 and 8 January 2019 for the years ended 31 December 2019 and 2018, by using the "Projected Unit Credit". Number of employees entitled for the employee benefits for the years ended 31 December 2019 and 2018 was 6,845 and 6,640 employees, respectively.

Liabilitas imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 didasarkan atas estimasi perhitungan aktuarial yang tercantum dalam laporan aktuarial di atas.

The liability for post-employment benefits as of 31 December 2019 and 2018 are based on estimated actuarial calculation as stated at the actuary report above.

Rincian liabilitas atas imbalan pasca-kerja yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of the liabilities for post-employment benefits recognized in the consolidated statements of financial position are as follows:

	2019	2018	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	313.810	249.508	<i>Present value of defined benefit obligation</i>
Nilai wajar aset program	(55.473)	(47.010)	<i>Fair value of plan asset</i>
Imbalan pasca-kerja	258.337	202.498	Post-employment benefits

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/58

Exhibit E/58

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

17. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

17. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (Continued)

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

Movements in the present value of defined benefit obligation recognised in the consolidated statement of financial position are as follows:

	2019	2018	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada awal tahun	249.508	244.807	<i>Present value of defined benefit obligation at beginning of period</i>
Biaya jasa kini	31.480	37.688	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	21.241	18.382	<i>Interest cost</i>
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan (sesuai provisi yang dihitung)	(3.188)	(2.986)	<i>Benefit payment from Company ((Based on computed provision)</i>
Pembayaran imbalan dari aset program	(3.284)	(2.330)	<i>Benefit payment from plan assets</i>
Penyesuaian liabilitas akibat pengakuan masa kerja lalu	1.148	1.813	<i>Liability assumed due to recognition of past services</i>
Penyesuaian liabilitas atas karyawan transfer keluar	(68)	-	<i>Liability released due to employee transferred out</i>
Pengukuran kembali atas nilai kini kewajiban imbalan pasti:			<i>Remeasurement of present value of defined benefit obligation:</i>
Kerugian (keuntungan) atas perubahan asumsi ekonomis	37.153	(53.190)	<i>Loss (gain) from changes in financial assumption</i>
Kerugian (keuntungan) atas penyesuaian pengalaman	(20.180)	5.324	<i>Loss (gain) from experience adjustments</i>
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir tahun	<u>313.810</u>	<u>249.508</u>	<i>Present value of defined benefit obligation at end of year</i>
	2019	2018	
Nilai wajar aset program pada awal tahun	47.010	45.091	<i>Fair value of plan assets at beginning of year</i>
Pendapatan bunga atas aset program	4.257	3.613	<i>Interest income on plan assets</i>
Perusahaan	6.000	6.000	<i>Company contribution</i>
Pembayaran imbalan dari aset program	(3.284)	(2.330)	<i>Benefit payment from plan assets</i>
Imbal hasil aset program (tidak termasuk pendapatan bunga)	1.490	(5.364)	<i>Return on plan assets excluding interest income</i>
Nilai wajar aset program pada akhir tahun	<u>55.473</u>	<u>47.010</u>	<i>Fair value of plan assets at end of year</i>
	2019	2018	
Saldo awal	202.498	199.716	<i>Beginning balance</i>
Iuran Perusahaan yang dibayarkan (aktual)	(6.000)	(6.000)	<i>Contribution to plan made by the Company</i>
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan (sesuai provisi yang dihitung)	(3.188)	(2.986)	<i>Benefits paid by the Company excluding excess benefits paid</i>
Beban yang diakui pada laporan laba rugi	59.048	59.195	<i>Expense recognized in profit loss statement</i>
Beban yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	15.483	(42.502)	<i>Expense recognized in other comprehensive income</i>
Biaya terminasi	(9.504)	(4.925)	<i>Termination benefit</i>
Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan	<u>258.337</u>	<u>202.498</u>	<i>Liability recognized in statement of financial position</i>

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit E/59

Exhibit E/59

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

17. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

17. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (Continued)

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in the consolidated statement of
profit or loss and other comprehensive income are as
follows:

	2019	2018	
Biaya jasa kini	31.480	37.688	Current service cost
Biaya bunga	21.241	18.382	Interest cost
Pendapatan bunga atas aset program	(4.257)	(3.613)	Interest income on plan assets
Penyesuaian liabilitas akibat pengakuan masa kerja lalu	1.148	1.813	Liability assumed due to recognition of past services
Penyesuaian liabilitas atas karyawan transfer keluar	(68)	-	Liability released due to employee transferred out
Biaya terminasi oleh Perusahaan	9.504	4.925	Termination benefit by Company
Jumlah beban	59.048	59.195	Total expenses

Riwayat penyesuaian pengalaman adalah sebagai berikut:

The history of experience adjustment are as follows:

	2019	31 Desember/December				
		2018	2017	2016		2015
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	(313.810)	(249.508)	(244.807)	(181.619)	(142.473)	Present value of defined benefit obligation
Nilai wajar aset program	55.473	47.010	45.091	41.227	30.506	Fair value of plan assets
Defisit	(258.337)	(202.498)	(199.716)	(140.392)	(111.967)	Deficit
Penyesuaian pengalaman liabilitas program	20.180	(5.324)	251	5.082	(279)	Experience adjustment on plan liabilities
Penyesuaian pengalaman aset program	1.490	(5.364)	2.798	1.605	(3.597)	Experience adjustment on plan assets

Kategori utama aset program per 31 Desember 2019 dan
2018 sebagai persentase dari total aset program adalah
pasar uang 50%, pendapatan tetap 30% dan saham 20%.

The main categories of plan assets as of 31 December 2019
and 2018 as percentage of total plan assets was money
market 50%, fixed income 30% and shares 20%.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan
perubahan tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji
sebesar 1% dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap
nilai kini liabilitas imbalan pasca-kerja:

The following table demonstrates the sensitivity to a
reasonably possible change in discount rates and salary
increment rate of 1%, with all other variables held
constant, of the present value of post-employment
benefits liabilities:

	2019				
	Tingkat diskonto/ Discount rate		Tingkat kenaikan gaji/ Salary increment rate		
	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Dampak pada nilai kini liabilitas imbalan pasca-kerja	275.827	359.484	360.520	273.968	Effect on present value of post- employment benefits liabilities
	2018				
	Tingkat diskonto/ Discount rate		Tingkat kenaikan gaji/ Salary increment rate		
	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Dampak pada nilai kini liabilitas imbalan pasca-kerja	221.340	283.052	282.482	218.981	Effect on present value of post- employment benefits liabilities

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit E/60

Exhibit E/60

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

17. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

17. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (Continued)

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan di atas:

Key assumptions used in the above calculation:

	2019	2018	
Asumsi ekonomi:			Economic assumptions:
- Tingkat diskonto per tahun	8,20%	8,80% - 9,60%	Annual discount rate -
- Kenaikan gaji per tahun	10%	10%	Annual salary increase -
Asumsi demografi:			Demographic assumptions:
- Tingkat kematian	Tabel Mortalitas Indonesia - 2011/ Mortality table of Indonesia - 2011		Mortality rate -
- Tingkat pengunduran diri	10% per tahun sebelum usia 31 dan terus menurun menjadi 0% pada usia 56/ 10% per annum before the age of 31 and linearly decreasing to 0% per annum at age of 56.		Turnover rate -
- Tingkat kecacatan per tahun	10% dari Tingkat Kematian/ 10% of Mortality Rates		Disability rate per annum -
- Tingkat pensiun	100% di usia 56/ 100% at age 56		Retirement rate -

18. DIVIDEN KAS DAN SALDO LABA YANG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

18. CASH DIVIDENDS AND APPROPRIATION OF RETAINED EARNINGS

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BFI Finance Indonesia Tbk pada tanggal 28 Mei 2019, Perusahaan menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 49 (nilai penuh) per saham atau setara dengan Rp 733.255 dari laba bersih tahun 2018, yang telah dibayarkan pada tanggal 28 Juni 2019. Perusahaan juga menyetujui untuk menyisihkan sebesar Rp 13.693 sebagai cadangan.

Based on the decision of Shareholders' Annual General Meeting on 28 May 2019, the Company approved cash dividend of Rp 49 (full amount) per share amounting to Rp 733,255 from 2018 net profit which has been distributed on 28 June 2019. The Company agreed to set aside Rp 13,693 for the reserve.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BFI Finance Indonesia Tbk pada tanggal 17 April 2018, Perusahaan menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 39 (nilai penuh) per saham dari laba bersih tahun 2017. Setelah memperhitungkan dividen tunai interim sebesar Rp 23 (nilai penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp 344.181 yang telah dibayarkan kepada pemegang saham pada tanggal 18 Desember 2017, sisanya sebesar Rp 16 (nilai penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp 239.430 yang telah dibayarkan pada tanggal 18 Mei 2018. Perusahaan juga menyetujui untuk menyisihkan sebesar Rp 13.574 sebagai cadangan.

Based on the decision of Shareholders' Annual General Meeting on 17 April 2018, the Company approved cash dividend of Rp 39 (full amount) per share from 2017 net profit. After taking into account the interim cash dividend amounting to Rp 23 (full amount) per share amounting to Rp 344,181 to the shareholders of the Company, which has been distributed on 18 December 2017, the remaining balance amounted to Rp 16 (full amount) per share amounting to Rp 239,430 which has been distributed on 18 May 2018. The Company agreed to set aside Rp 13,574 for the reserve.

19. UTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA

19. OTHER PAYABLES - THIRD PARTIES

	2019	2018	
Titipan konsumen	144.305	119.637	Customer deposits
Premi asuransi	37.200	26.839	Insurance premium
Utang kepada <i>supplier</i>	24.798	5.168	Payable to suppliers
Perolehan aset tetap dan aset tak berwujud	1.351	58.627	Fixed asset and intangible assets acquisition
Utang pengurusan fidusia	671	808	Fiducia processing payables
Lain-lain	52.217	51.898	Others
Jumlah	260.542	262.977	Total

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued in Indonesian Language

Ekshibit E/61

Exhibit E/61

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

20. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 berdasarkan laporan daftar pemegang saham dari PT Sirca Datapro Perdana, Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Nilai nominal/ <i>Amount</i>		Shareholders
			%	
Trinugraha Capital & CO SCA	6.835.249.660	170.881	42,80	Trinugraha Capital & CO SCA NT Asian Discovery Fund Others (each below 5%)
NT Asian Discovery Fund	1.581.275.640	39.532	9,90	
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	6.547.858.320	163.697	41,02	
	14.964.383.620	374.110	93,72	
Saham treasury	1.002.732.000	25.068	6,28	Treasury stock
Jumlah	15.967.115.620	399.178	100,00	Total

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 25 tanggal 18 April 2017 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui perubahan nilai nominal saham Perusahaan dari Rp 250 (nilai penuh) per saham menjadi Rp 25 (nilai penuh) per saham (pemecahan saham/stock split). Keputusan RUPSLB ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0134738 Tahun 2017 tanggal 9 Mei 2017.

Dengan demikian, per 31 Desember 2019 modal dasar Perusahaan yang telah ditempatkan seluruhnya dan disetor penuh adalah Rp 399.178 yang terdiri dari 15.967.115.620 saham dengan nilai nominal Rp 25 per saham.

Pada bulan Agustus 2018, Trinugraha Capital & Co. SCA menandatangani Perjanjian Jual Beli sesuai dengan nilai yang akan mereka jual sebesar 2.977.912.340 saham di BFI (19,9% dari total saham) ke Compass Banca SpA, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki Mediobanca SpA, dan sekitar 1.646 juta saham (sekitar 11%) di BFI ke Star Finance S.R.L. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, transaksi tersebut masih dalam proses.

Saham Treasury

Per tanggal 15 Oktober 2016 program *buyback shares* ini dinyatakan berakhir.

Perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, yang diperkenankan sesuai Peraturan OJK No.2/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perusahaan masing-masing adalah sebanyak 1.002.732.000 saham dengan nilai pembelian sebesar Rp 252.160.

Pelaksanaan pembelian kembali saham merupakan salah satu bentuk usaha Perusahaan untuk meningkatkan manajemen permodalan Perusahaan dimana pelaksanaannya akan meningkatkan nilai laba bersih per saham (*Earnings per Share/EPS*).

20. SHARE CAPITAL

The composition of the shareholder of the Company based on the share register of PT Sirca Datapro Perdana, the share registrar, as of 31 December 2019 and 2018, are as follows:

Based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of the Company as covered by Notarial Deed No. 25 dated 18 April 2017 of Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta the shareholders approved the changes of nominal value of shares from Rp 250 (full amount) to Rp 25 (full amount) per shares (stock split). The resolutions of the EGM has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in notification letter No.AHU-AH.01.03-0134738 Tahun 2017 dated 9 May 2017.

Therefore, as of 31 December 2019 the Company's issued and fully paid-up shares capital was amounted to Rp 399,178 which comprised of 15,967,115,620 shares with par value of Rp 25 per share.

In August 2018, Trinugraha Capital & Co. SCA have entered into Shares Sale and Purchase Agreement pursuant to which they will sell 2,977,912,340 shares in BFI (19.9% of total shares) to Compass Banca SpA, a wholly owned subsidiary of Mediobanca SpA, and approximately 1,646 million shares (c. 11%) in BFI to Star Finance S.R.L. Until 31 December 2019, the transaction is still under process.

Treasury stock

As of 15 October 2016 the shares buyback program was officially ended.

The Company has bought back its shares publicly traded on the Indonesia Stock Exchange, as allowed by OJK Regulation No.2/POJK.04/2013 dated 23 August 2013.

As of 31 December 2019 and 2018, total shares bought back by the Company were 1,002,732,000 shares for a total purchase price of Rp 252,160, respectively.

This repurchase transaction was intended to increase the Company's capital management where the implementation will increase the value of Earnings per Share (EPS).

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/62

Exhibit E/62

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

20. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Jumlah saham yang dimiliki anggota Dewan komisaris dan Direksi Perusahaan berdasarkan laporan daftar pemegang saham dari PT Sirca Datapro Perdana, biro administrasi efek, adalah sebanyak 464.770.360 dan 464.844.860 saham, yang merupakan kepemilikan sebesar 2,91% dari jumlah saham Perusahaan yang beredar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Anggota/ <i>Name of Members</i>	Jabatan/Positions	Jumlah Saham/Total Shares		%	
		2019	2018	2019	2018
Francis Lay Sioe Ho	Presiden Direktur/ <i>President Director</i>	389.885.080	389.885.080	2,44	2,44
Kusmayanto Kadiman	Presiden Komisaris/ <i>President Commissioner</i>	-	74.500	0,00	0,00
Sudjono	Direktur/Director	33.380.000	33.380.000	0,21	0,21
Sutadi	Direktur/Director	21.382.800	21.382.800	0,14	0,14
Sigit Hendra Gunawan	Direktur/Director	10.000.000	10.000.000	0,06	0,06
Andrew Adiwijanto	Direktur/Director	10.120.000	10.120.000	0,06	0,06
Johanes Sutrisno	Komisaris/Commissioner	2.480	2.480	0,00	0,00
Jumlah/ Total		464.770.360	464.844.860	2,91	2,91

20. SHARE CAPITAL (Continued)

The number of shares held by the member of the board of commissioners and directors of the Company based on the share register of PT Sirca Datapro Perdana, the share registrar, was 464,770,360 and 464,844,860 shares representing 2.91% of the total outstanding shares of the Company as of 31 December 2019 and 2018, respectively with detail as follows:

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, akun ini merupakan selisih lebih antara hasil yang diterima dengan nilai nominal dari setoran modal, penawaran umum perdana dan konversi dari obligasi konversi termasuk penyesuaian saldo karena kuasi reorganisasi.

21. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

On 31 December 2019 and 2018, this account represents the difference between amount received and par value from paid-in capital, initial public offering and conversion of convertible bonds including adjustments balance of quasi reorganization.

22. PENDAPATAN PIUTANG PEMBIAYAAN

	2019	2018
Pendapatan piutang pembiayaan pihak ketiga	3.919.168	3.781.584
Pendapatan administrasi	639.133	679.068
Denda keterlambatan	339.231	314.268
Pendapatan terminasi	180.031	161.254
Jumlah	5.077.563	4.936.174
Dikurangi:		
Bagian pendapatan yang dibiayai bank sehubungan dengan kerjasama penerusan pinjaman dan pembiayaan bersama (Catatan 31)	(81.845)	(43.028)
Pendapatan pembiayaan - bersih	4.995.718	4.893.146

22. FINANCING RECEIVABLES INCOME

*Financing receivables income
third parties
Administration income
Late charges
Termination income*

Less:

Portion of funds financed by banks in relation to channeling and joint financing cooperation (Note 31)

Financing income - net

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, amortisasi biaya transaksi yang diakui sebagai pengurang dari pendapatan pembiayaan masing-masing sebesar Rp 69.708 dan Rp 97.510.

For the years ended 31 December 2019 and 2018, the amortization of transaction costs recognized as a reduction to financing income was amounted to Rp 69,708 and Rp 97,510, respectively.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/63

Exhibit E/63

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

23. PENDAPATAN SYARIAH

23. SHARIA INCOME

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Marjin murabahah	239	-	<i>Murabahah margin Ijarah income</i>
Pendapatan ijarah	3.961	7	
Jumlah	<u>4.200</u>	<u>7</u>	Total

24. PENDAPATAN LAIN-LAIN

24. OTHER INCOME

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Pemulihan dari piutang yang dihapusbukukan dan piutang dalam proses penyelesaian Keuntungan bersih atas penjualan aset tetap (Catatan 10)	166.813	90.852	<i>Recovery on written-off receivables and receivable in the settlement process Gain on sale of fixed assets - net (Note 10)</i>
Lain-lain	10.731	9.288	
	<u>10.591</u>	<u>4.211</u>	<i>Others</i>
Jumlah	<u>188.135</u>	<u>104.351</u>	Total

25. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN

25. SALARIES AND BENEFITS EXPENSES

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Pihak ketiga			<i>Third parties Salaries and employee benefits Post-employment benefits (Note 17)</i>
Gaji dan imbalan kerja	1.097.365	955.673	
Imbalan pasca-kerja (Catatan 17)	52.536	53.998	
	<u>1.149.901</u>	<u>1.009.671</u>	
Pihak berelasi			<i>Related parties Salaries and employee benefits Post-employment benefits (Note 17,29)</i>
Gaji dan imbalan kerja	60.400	60.071	
Imbalan pasca-kerja (Catatan 17,29)	6.512	5.197	
	<u>66.912</u>	<u>65.268</u>	
Jumlah	<u>1.216.813</u>	<u>1.074.939</u>	Total

Lihat Catatan 29 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 29 for details of balances and transactions with related parties.

26. BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN

26. INTEREST AND FINANCING CHARGES

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Bunga atas pinjaman yang diterima	621.120	618.395	<i>Interest on borrowings</i>
Bunga atas surat berharga yang diterbitkan (Catatan 15)	380.038	408.863	
Amortisasi biaya emisi atas surat berharga yang diterbitkan (Catatan 15)	7.002	8.392	<i>Amortization on securities issued (Note 15)</i>
Jumlah	<u>1.008.160</u>	<u>1.035.650</u>	Total

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/64

Exhibit E/64

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**27. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES**

	2019	2018	
Honorarium tenaga ahli	125.052	40.592	<i>Professional fees</i>
Beban penerimaan angsuran	85.381	56.455	<i>Installment collection expense</i>
Penyusutan aset tetap (Catatan 10)	82.206	74.607	<i>Depreciation of fixed assets (Note 10)</i>
Perbaikan dan pemeliharaan	69.864	60.837	<i>Repairs and maintenance</i>
Perjalanan dinas dan transportasi	53.497	46.725	<i>Travel and transportation</i>
Pemasaran	34.313	37.459	<i>Marketing</i>
Pendidikan dan pelatihan	33.561	32.357	<i>Training and education</i>
Pengiriman, perangko dan materai	27.534	25.434	<i>Courier, postage and stamp duty</i>
Beban kantor	27.366	20.859	<i>Office expense</i>
Sewa kantor dan gudang	25.546	23.075	<i>Office and warehouse rental</i>
Komunikasi	23.131	19.860	<i>Communications</i>
Keanggotaan dan langganan	18.791	22.440	<i>Membership and subscription</i>
Listrik dan air	17.754	16.086	<i>Electricity and water</i>
Asuransi	15.903	15.032	<i>Insurance</i>
Biaya pihak ketiga	10.989	5.884	<i>Outsourced service expenses</i>
Amortisasi aset tak berwujud (Catatan 11)	10.173	9.374	<i>Amortization of intangible assets (Note 11)</i>
Legalisir dokumen dan fotokopi	4.588	3.080	<i>Legalized document and fotocopy</i>
Beban administrasi bank	2.349	1.603	<i>Bank administration charges</i>
Program CSR	1.855	1.767	<i>CSR program</i>
Lain-lain	35.030	28.142	<i>Others</i>
Jumlah	704.883	541.668	Total

28. BEBAN LAIN-LAIN**28. OTHER EXPENSES**

Rincian beban lain-lain adalah sebagai berikut:

The details of other expenses are as follows:

	2019	2018	
Biaya terkait penyelesaian litigasi	773.455	-	<i>Litigation settlement related expenses</i>
Penghapusan piutang dalam proses penyelesaian	22.593	13.678	<i>Written-off receivables in the settlement process</i>
(Pemulihan) penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang dalam proses penyelesaian	(3.724)	2.504	<i>(Recovery) provision for impairment losses of receivables in the settlement process</i>
Jumlah	792.324	16.182	Total

29. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI**29. RELATED PARTY TRANSACTIONS**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan dan entitas anaknya melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi tertentu sebagai berikut:

In carrying out its business activities, the Company and its subsidiary enters into transactions with certain related parties as the followings:

Pihak berelasi/ <i>Related party</i>	Sifat hubungan/ <i>Nature of relationship</i>	Transaksi/ <i>Transactions</i>
Karyawan/ <i>Employee</i>	Personil manajemen kunci/ <i>Key management personnel</i>	Imbalan kerja jangka-pendek/ <i>Short-term employees' benefits</i> Imbalan pasca-kerja/ <i>Post-employment benefits</i> Program kompensasi manajemen dan karyawan berbasis saham/ <i>Management and employee stock options program</i>

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/65

Exhibit E/65

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

29. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

29. RELATED PARTY TRANSACTIONS (Continued)

Saldo dan transaksi-transaksi kepada/dari pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

Balances and transactions to or from a related party are as follows:

Beban gaji dan tunjangan

Salaries and employee benefits

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Personil manajemen kunci:		
Imbalan kerja jangka-pendek	60.400	60.071
Imbalan pasca-kerja	<u>6.512</u>	<u>5.197</u>
	<u>66.912</u>	<u>65.268</u>
Persentase terhadap jumlah beban	<u>1,61%</u>	<u>2,05%</u>

*Key management personnel:
Short-term employees' benefits
Post-employment benefits*

Percentage of total expenses

Transaksi dengan pihak berelasi, kecuali beban gaji dan imbalan kerja kepada personil manajemen kunci, dilakukan dengan menggunakan persyaratan usaha normal.

Transaction with related parties, except salary expense and employee benefits to key management personnel, conducted by normal operations requirements.

30. SEGMENT OPERASI

30. OPERATING SEGMENT

Perusahaan dan entitas anaknya mengelola kegiatan usahanya dan mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis produk dan wilayah geografis. Laba atau rugi dari masing-masing segmen digunakan untuk menilai kinerja masing-masing segmen. Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha utama disajikan sebagai berikut:

The Company and its subsidiary manages its business activities and identifies its reported segments based on product categories and geographic area. Profit or loss from each segment is used to measure performance of each segment's information concerning the main segments are set out as follows:

	<u>2019</u>				
	<u>Mobil/ Cars</u>	<u>Sepeda motor/ Motorcycles</u>	<u>Lain-lain/ Others</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	
Laporan laba rugi					Statement of profit or loss
Pendapatan					Income
Pendapatan pembiayaan	3.405.770	1.065.403	528.745	4.999.918	<i>Financing income</i>
Lain-lain	<u>119.293</u>	<u>21.354</u>	<u>100.164</u>	<u>240.811</u>	<i>Others</i>
Jumlah pendapatan	<u>3.525.063</u>	<u>1.086.757</u>	<u>628.909</u>	<u>5.240.729</u>	Total income
Beban					Expenses
Beban operasional	1.939.611	584.928	1.197.641	3.722.180	<i>Operating expenses</i>
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>285.165</u>	<u>90.845</u>	<u>50.286</u>	<u>426.296</u>	<i>Provision for impairment losses</i>
Jumlah beban	<u>2.224.776</u>	<u>675.773</u>	<u>1.247.927</u>	<u>4.148.476</u>	Total expenses
Laba sebelum pajak	1.300.287	410.984	(619.018)	1.092.253	Profit before tax
Beban pajak penghasilan	-	-	(380.571)	(380.571)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	<u>1.300.287</u>	<u>410.984</u>	<u>(999.589)</u>	<u>711.682</u>	Profit for the year

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit E/66

Exhibit E/66

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

30. OPERATING SEGMENT (Continued)

	2019				
	Mobil/ Cars	Sepeda motor/ Motorcycles	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
Laporan posisi keuangan					Statement of financial position
Aset					Assets
Piutang pembiayaan - bersih	12.319.879	1.991.893	3.084.148	17.395.920	Financing receivables - net
Piutang ijarah - bersih	-	-	2.105	2.105	Ijarah receivables - net
Lain-lain	63.388	10.200	1.618.020	1.691.608	Others
Jumlah aset	12.383.267	2.002.093	4.704.273	19.089.633	Total assets
Liabilitas					Liabilities
Pinjaman yang diterima	-	-	7.730.021	7.730.021	Fund borrowings
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	-	-	3.758.283	3.758.283	Securities issued - net
Lain-lain	56.592	13.615	1.450.942	1.521.149	Others
Jumlah liabilitas	56.592	13.615	12.939.246	13.009.453	Total liabilities
	2018				
	Mobil/ Cars	Sepeda motor/ Motorcycles	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
Laporan laba rugi					Statement of profit or loss
Pendapatan					Income
Pendapatan pembiayaan	3.443.501	921.056	528.596	4.893.153	Financing income
Lain-lain	69.623	11.659	43.286	124.568	Others
Jumlah pendapatan	3.513.124	932.715	571.882	5.017.721	Total income
Beban					Expenses
Beban operasional	1.837.170	499.963	331.306	2.668.439	Operating expenses
Penyisihan kerugian penurunan nilai	374.404	114.191	20.588	509.183	Provision for impairment losses
Jumlah beban	2.211.574	614.154	351.894	3.177.622	Total expenses
Laba sebelum pajak	1.301.550	318.561	219.988	1.840.099	Profit before tax
Beban pajak penghasilan	-	-	(372.305)	(372.305)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	1.301.550	318.561	(152.317)	1.467.794	Profit for the year
Laporan posisi keuangan					Statement of financial position
Aset					Assets
Piutang pembiayaan - bersih	12.572.110	1.646.000	3.062.348	17.280.458	Financing receivables - net
Piutang ijarah - bersih	-	-	105	105	Ijarah receivables - net
Lain-lain	78.161	10.379	1.748.273	1.836.813	Others
Jumlah aset	12.650.271	1.656.379	4.810.726	19.117.376	Total assets
Liabilitas					Liabilities
Pinjaman yang diterima	-	-	6.899.860	6.899.860	Fund borrowings
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	-	-	5.196.220	5.196.220	Securities issued - net
Lain-lain	48.808	11.606	757.086	817.500	Others
Jumlah liabilitas	48.808	11.606	12.853.166	12.913.580	Total liabilities

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/67

Exhibit E/67

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

30. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

30. OPERATING SEGMENT (Continued)

Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan segmen usaha utama berdasarkan wilayah geografis:

The following tables present information concerning the main segments based on geographic area:

Segmen Geografis

Geographical Segments

	2019					
	Jawa dan Bali/ <i>Java and Bali</i>	Kalimantan/ <i>Kalimantan</i>	Sumatera/ <i>Sumatera</i>	Sulawesi dan Indonesia Timur/ <i>Sulawesi and East Indonesia</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Jumlah Pendapatan	2.873.533	574.040	954.122	839.034	5.240.729	Total Income
Jumlah Aset	13.028.260	2.244.097	2.807.308	1.009.968	19.089.633	Total Assets
	2018					
	Jawa dan Bali/ <i>Java and Bali</i>	Kalimantan/ <i>Kalimantan</i>	Sumatera/ <i>Sumatera</i>	Sulawesi dan Indonesia Timur/ <i>Sulawesi and East Indonesia</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Jumlah Pendapatan	2.757.943	525.031	949.529	785.218	5.017.721	Total Income
Jumlah Aset	12.757.381	2.270.219	3.154.759	935.017	19.117.376	Total Assets

31. PERJANJIAN KERJASAMA YANG PENTING

31. SIGNIFICANT COOPERATION AGREEMENTS

a. Pembiayaan Bersama

a. Joint Financing

Dalam kaitan untuk mendukung kebutuhan pendanaan untuk pengembangan usaha, Perusahaan juga melakukan berbagai kerjasama dengan perbankan, antara lain dalam bentuk perjanjian pembiayaan bersama (*joint financing*) yang dibukukan secara *off balance sheet*.

For the purpose to support funding requirement on business expansion, the Company has also engaged a partnership with banking institutions in the form of joint financing which are classified as "off balance sheet" transactions.

	2019	2018	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	727.714	668.358	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	-	6.433	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	12.132	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah	727.714	686.923	Total
Dikurangi:			Less:
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(1.545)	(2.627)	Unamortized transaction costs
Jumlah - bersih	726.169	684.296	Total - net

Dalam perjanjian kerjasama dengan skema pembiayaan bersama (*joint financing*) porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk konsumen dari masing-masing pihak adalah berkisar 5% - 10% dari Perusahaan, dan 90% - 95% dari pemberi pembiayaan bersama (bank). Sedangkan untuk jangka waktu pembiayaan bersama sampai dengan 48 (empat puluh delapan) bulan kepada konsumen.

Pursuant to the agreements with joint financing scheme, the amount of funds to be financed by each party range from 5% - 10% from the Company, and 90% - 95% from joint financing providers (banks). As for The tenor of joint financing scheme is available up to 48 (forty eight) months.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/68

Exhibit E/68

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

31. PERJANJIAN KERJASAMA YANG PENTING (Lanjutan)

31. SIGNIFICANT COOPERATION AGREEMENTS (Continued)

a. Pembiayaan Bersama (Lanjutan)

a. Joint Financing (Continued)

Rincian dari pembiayaan bersama adalah sebagai berikut:

The detail of joint financing are as follows:

Pemberi pembiayaan bersama/ Joint financing provider	Fasilitas maksimum pembiayaan/ Maximum financing facility	Perjanjian terakhir/ Latest agreement	Jangka waktu/ Period (bulan/ months)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000	19 November 2018	24
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	600.000	3 Juni/June 2016	24
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	500.000	10 Juni/June 2015	14
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	1.300.000	18 Desember/December 2014	24

Fasilitas tersebut di atas berlaku sampai dengan dibayarkannya angsuran terakhir piutang pembiayaan bersama oleh konsumen.

The above facility will be expired at the time customers pay the latest installment of joint financing receivables.

Perusahaan bersama dengan pemberi pembiayaan bersama di atas bertindak sebagai penyedia dana dalam pemberian pembiayaan kepada konsumen yang memenuhi kriteria tertentu. Perusahaan bertanggung jawab untuk mengelola dokumentasi dan administrasi setiap konsumen.

The Company, together with the joint financing providers mentioned above, extend credit to consumers in accordance with certain criteria laid down in agreements. The Company is responsible to maintain the customers' documentation and administration.

Kerjasama pembiayaan bersama yang dilakukan ini bersifat *without recourse*, dimana Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar atau menyetero angsuran pokok termasuk bunganya kepada pemberi pembiayaan bersama jika konsumen gagal melakukan pembayaran angsurannya kepada Perusahaan.

The joint financing facilities were arranged without recourse, whereby the Company is not obliged to pay installments including interest to joint financing providers in the event that the customers fail to meet their installment obligation to the Company.

b. Penyalur kendaraan

b. Dealers of Motor Vehicles

Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan beberapa penyalur kendaraan. Pembiayaan yang telah disetujui namun belum dibayarkan kepada penyalur kendaraan dicatat sebagai utang kepada penyalur kendaraan.

The Company has entered into cooperation agreements with dealers of motor vehicles. Approved financing that has not yet been paid to dealers are recorded as payable to dealers.

c. Asuransi

c. Insurance

Perusahaan mengadakan kerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi seperti PT Asuransi Asoka Mas, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi FPG Indonesia, PT AIA Financial, PT Asuransi Cigna, PT Commonwealth Life, PT FWD Life Indonesia, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Purna Artanugraha (ASPAN), dan PT MAPFRE ABDA Assistance dalam rangka penyediaan asuransi perlindungan kredit dan penutupan asuransi kendaraan bermotor yang dibiayai.

The Company has entered into cooperation agreements with insurance companies which are PT Asuransi Asoka Mas, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi FPG Indonesia, PT AIA Financial, PT Asuransi Cigna, PT Commonwealth Life, PT FWD Life Indonesia, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Purna Artanugraha (ASPAN) and PT MAPFRE ABDA Assistance to provide credit shield and insurance coverage of financed vehicles.

Perusahaan melakukan penutupan asuransi atas kendaraan bermotor demi kepentingan Perusahaan dalam kapasitasnya sebagai penyedia pembiayaan. Pembayaran premi asuransi yang telah diterima dari konsumen namun belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi dicatat sebagai utang premi asuransi.

The Company insures vehicles for the interest of the Company in its capacity as financing provider. Insurance premium payments received from customers that have not yet been paid to insurance companies are recorded as insurance premium payable.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/69

Exhibit E/69

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

32. LABA PER SAHAM

Laba per saham dasar dihitung dengan cara membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode berjalan.

32. EARNINGS PER SHARE

Earnings per share is calculated by dividing net profit available to shareholders by the weighted average common shares outstanding during the period.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Laba bersih untuk perhitungan laba per saham dasar	711.682	1.467.794	<i>Net profit for the computation of basic earning per shares</i>
Jumlah rata-rata tertimbang saham	14.964.383.620	14.964.383.620	<i>The weighted average of shares outstanding</i>
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	<u>48</u>	<u>98</u>	<i>Basic earnings per share (full amount)</i>

33. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Perubahan komponen penghasilan komprehensif lain yang tidak mempengaruhi laba rugi adalah sebagai berikut:

33. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

The movement of other comprehensive income component that have not yet affected the profit and loss were as follows:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Saldo awal tahun - sebelum pajak tangguhan	(40.242)	(111.405)	<i>Balance at the beginning of the year - before deferred tax</i>
(Kerugian) keuntungan aktuarial program manfaat pasti	(15.483)	42.502	<i>(Loss) gain on defined benefit actuarial program</i>
Bagian efektif dari perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai arus kas	(112.028)	46.452	<i>Effective portion of changes in fair value of cash flow hedging instruments</i>
	(167.753)	(22.451)	
Aset pajak tangguhan (Catatan 14c)	<u>25.462</u>	<u>(17.791)</u>	<i>Deferred tax assets (Note 14c)</i>
Saldo akhir tahun - setelah pajak tangguhan	<u>(142.291)</u>	<u>(40.242)</u>	<i>Balance at the end of year - after deferred tax</i>

34. PERUBAHAN PADA LIABILITAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

34. CHANGES IN LIABILITIES ARISED FROM FINANCING ACTIVITIES

Changes in liabilities arised from financing activities are as follows:

	<u>2019</u>					
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Arus kas/ <i>Cashflows</i>	Pergerakan non-kas/ <i>Non-cash changes</i>		Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Pergerakan valuta asing/ <i>Movement in foreign Exchange</i>			Pergerakan beban transaksi/ <i>Changes in transaction cost</i>			
Pinjaman yang diterima	6.899.860	968.773	(127.572)	(11.040)	7.730.021	<i>Funds borrowings</i>
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	5.196.220	(1.442.000)	-	4.063	3.758.283	<i>Securities issued - net</i>
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	<u>12.096.080</u>	<u>(473.227)</u>	<u>(127.572)</u>	<u>(6.977)</u>	<u>11.488.304</u>	<i>Total liabilities from financing activities</i>

Perusahaan dan entitas anaknya telah melakukan kebijakan lindung nilai untuk pinjaman yang diterima dalam mata uang asing.

The Company and its subsidiary has conducted hedge policy to borrowings denominated in foreign currencies.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/70

Exhibit E/70

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

35. MANAJEMEN RISIKO

Pendahuluan dan gambaran umum

Perkembangan dunia *multifinance* yang disertai dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas pembiayaan semakin mempertegas pentingnya tata kelola perusahaan yang sehat (*good corporate governance*) dan manajemen risiko yang dapat diandalkan. Kedua hal tersebut merupakan faktor penting yang menjadi perhatian para investor dalam penilaian pilihan target investasinya. Penerapan manajemen risiko di Perusahaan dan entitas anaknya pada dasarnya sudah dilakukan sejak perusahaan berdiri, meskipun dengan cara yang masih konvensional dan berkembang sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal.

Perusahaan dan entitas anaknya menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasional Perusahaan dan dapat dikelola secara praktis dan efektif setiap hari, dengan empat tipe risiko utama:

1. Risiko kredit
2. Risiko pasar
3. Risiko pendanaan dan likuiditas
4. Risiko operasional

Pengelolaan risiko di Perusahaan mencakup keseluruhan lingkup aktivitas usaha di Perusahaan, yang didasarkan pada kebutuhan akan keseimbangan antara fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan risikonya. Dengan kebijakan dan manajemen risiko yang berfungsi baik, maka manajemen risiko akan menjadi *strategic partner* bagi bisnis dalam mendapatkan hasil optimal dari operasi Perusahaan.

Dalam rangka pengembangan manajemen risiko yang sesuai, Perusahaan dan entitas anaknya terus mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko.

Kerangka manajemen risiko dituangkan dalam kebijakan, prosedur, batasan transaksi, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh aktivitas lingkup usaha. Untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut sesuai dengan perkembangan bisnis yang ada, maka evaluasi selalu dilakukan berkala sesuai dengan perubahan parameter risikonya.

35. RISK MANAGEMENT

Introduction and general description

The development in multifinance industry followed with the improvement in complexity of financing activity has emphasized more on the importance of good corporate governance and a reliable risk management. Such both matters are important factors, which bring the investors' attention in assessing their investment targeting. Basically, the implementation of risk management within the Company and its subsidiary had been carried out since the establishment of the Company, even though the Company was still using a conventional manner and keep improving in accordance with the recent development of internal and external circumstances.

The Company and its subsidiary realize that risk is an integral part of its operational activity and can be managed practically and effectively day by day, with the following four particular risks:

1. Credit risk
2. Market risk
3. Funding and liquidity risk
4. Operational risk

Risk management within the Company includes overall scope of business activity within the Company, which based on the necessity of balance between business operational function and its risk management thereof. By means of proper risk management and policy, thus the risk management will become a strategic partner to the business in obtaining optimal outcome from the Company's course of operation.

In the event of development of proper risk management, the Company and its subsidiary keep developing and improving the integrated and comprehensive framework of risk management system and internal control structure, in order that they are able to provide information as an early warning of any potential risk and accordingly, take appropriate actions to mitigate the risk.

The framework of risk management is implemented under the form of policy, procedures, transactional limits, authorizations, and other rules as well as various risk management instruments applicable to entire business activity. In order to ensure that the policy and procedures is in line with the current business development, evaluation is frequently carried out in accordance with the change in its risk parameter.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/71

Exhibit E/71

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

35. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

35. RISK MANAGEMENT (Continued)

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

Framework of risk management (Continued)

Dalam penerapan manajemen risiko, Perusahaan menyadari pentingnya memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan. Perusahaan bertumpu pada 4 (empat) pilar manajemen risiko sebagai berikut:

In the implementation of risk management, the Company realizes the importance of having an adequate mechanism to accommodate the risks faced by the Company. The Company has a mechanism that is based upon 4 (four) risk management pillars, in which could be described as follows:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang mencakup:

1. Active supervision by the Board of Commissioners and Directors, which includes:

- Menyetujui dan melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala;
- Menetapkan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko termasuk penetapan otoritas dalam pemberian batasan serta tinjauan atas kualitas portofolio secara berkala;
- Terdapatnya Komite Audit dan Manajemen Risiko dalam melakukan fungsi pengawasan.

- Approving and evaluating risk management policies on a regular basis;
- Establishing risk management policies and strategies, which include determining the authorization in limits and reviewing the quality of portfolio on a regular basis;
- Presence of Audit Committee and Risk Management Committee in carrying out their supervisory functions.

2. Kebijakan dan penerapan batasan

2. Policy and implementation limits

Perusahaan menyusun kebijakan-kebijakan manajemen risiko yang diperiksa secara berkala dan selalu disesuaikan dengan kondisi usaha terkini. Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam Prosedur Operasi Standar, Ketentuan Umum dan Surat Keputusan Dewan Direksi, dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan terkait. Perusahaan juga menerapkan batasan persetujuan atau otorisasi untuk transaksi kredit maupun yang bukan transaksi kredit.

The Company develops policies related to risk management, which are assessed periodically and aligned constantly to fit the most recent business situation. The policy is translated into Standard Operating Procedures and Internal Memo, which are being socialized to all employees. The Company also has policies concerning the level of authority on approval or authorization for both credit and non-credit transactions.

3. Identifikasi, pengukuran, pengawasan dan sistem informasi manajemen

3. Identification, measurement, monitoring, and management information system

Perusahaan memiliki perangkat untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengawasi risiko, terutama risiko kredit dan operasional melalui mekanisme pelaporan dan sistem informasi manajemen. Untuk menjamin ketersediaan data risiko yang terkini dan komprehensif, Perusahaan telah melakukan mengkonversi sistem operasi Perusahaan yang ada menjadi *centralized system* yang dikenal dengan CONFINS. Selain itu, Perusahaan juga melakukan implementasi sistem informasi *business intelligence* agar data atau informasi risiko dapat disediakan secara cepat dan akurat kepada pihak manajemen atau pihak ketiga lainnya.

The Company has a set of tools to identify, measure, and monitor risks, particularly the credit risk and operational risk through the existing reporting and management information system mechanism. In order to ensure the availability of updated and comprehensive risk data, the Company had converted the existing operating system into a centralized system, which known as CONFINS. Moreover, the Company has also implemented business intelligence information system in order that data or risk information could be provided to the management or other third parties on a prompt and accurate manner.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/72

Exhibit E/72

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

35. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

Dalam penerapan manajemen risiko, Perusahaan menyadari pentingnya memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan. Perusahaan bertumpu pada 4 (empat) pilar manajemen risiko sebagai berikut: (Lanjutan)

4. Pengendalian internal

Perusahaan memiliki Departemen Audit Internal yang secara independen melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Tanggungjawab dari Departemen Audit Internal mencakup:

- Menyediakan penilaian atas kecukupan dan efektifitas dari proses bisnis yang ada di dalam Perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan risiko Perusahaan;
- Melaporkan masalah-masalah penting yang terkait dengan proses pengendalian di dalam Perusahaan termasuk rekomendasi perbaikan yang potensial terhadap proses tersebut; dan
- Melakukan koordinasi strategis dengan fungsi pengendali dan pengawasan lainnya (manajemen risiko, hukum, sistem dan prosedur, dan audit eksternal).

Proses dan penilaian risiko

Pada dasarnya proses manajemen risiko dilakukan oleh masing-masing unit mengingat risiko yang dihadapi merupakan risiko individual yang melekat pada produk, transaksi maupun proses pada unit yang bersangkutan. Tugas utama dari Departemen Manajemen Risiko adalah menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta melakukan serangkaian proses untuk mengumpulkan, melakukan pengukuran dan pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Penetapan kebijakan manajemen risiko dilakukan melalui proses persetujuan Direksi.

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko utama Perusahaan, yaitu risiko yang timbul apabila konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara konsumen dengan Perusahaan.

Manajemen risiko yang telah diterapkan Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Diversifikasi portofolio menurut wilayah, sektor ekonomi dan industri, merk dan tipe barang.
- *Risk Adjusted Pricing Method*, yaitu penetapan tingkat bunga pembiayaan berdasarkan risiko yang dihadapi, antara lain dinilai dari tingkat uang muka yang dibayar konsumen, usia kendaraan yang dibiayai, jenis penutupan asuransi yang dipilih dan lain sebagainya.
- Adanya *Key Performance Indicators (KPI)* sebagai "early warning system" atas suatu masing-masing produk pembiayaan maupun kantor cabang.

35. RISK MANAGEMENT(Continued)

Framework of risk management (Continued)

In the implementation of risk management, the Company realizes the importance of having an adequate mechanism to accommodate the risks faced by the Company. The Company has a mechanism that is based upon 4 (four) risk management pillars, in which could be described as follows: (Continued)

4. Internal control

The Company has the Internal Audit Division in place, which independently reports on process and results of assessment to the Board of Commissioners and Directors. The responsibility of the Internal Audit Division includes:

- *Providing assessment on the adequacy and effectiveness of the entire existing business process within the Company;*
- *Conducting examination on compliance to the Company's risk policies;*
- *Reporting on significant issues related to the control activities within the Company, including potential improvements to these processes; and*
- *Coordinating with other controlling and supervisory functions (risk management, compliance, legal, system and procedures, and external auditor)*

Process and risk assessments

Basically, risk management processes are carried out by each unit considering that the risk faced represents individual risks which are embedded into the products, transactions, as well as process in the related unit. The primary task of Risk Management Division is to determine policies and procedures as well as doing a series of processes of collecting, measuring, and reporting to the Board of Commissioners and Directors. The determination of risk management policies is carried out through approval process by the Board of Directors.

1. Credit Risk

Credit risk is the main risk of the Company, that is the risk arising when the customer are unable to meet its obligation in accordance with the agreement as agreed upon between the customer and the Company.

Risk management that has been applied by the Company are as follows:

- *Diversify the portfolio by region, economic sector and industry, brand and type of goods.*
- *Risk Adjusted Pricing Method, namely setting the interest rate of financing based on the risks faced by, among others, assessed based on the level of advances paid by consumers, age of vehicles financed, type of insurance coverage selected and so forth.*
- *The Key Performance Indicators (KPI) as an "early warning system" of an individual loan products as well as branch offices.*

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/73

Exhibit E/73

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

35. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

35. RISK MANAGEMENT (Continued)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

Process and risk assessments (Continued)

1. Risiko Kredit (Lanjutan)

1. Credit Risk (Continued)

Manajemen risiko yang telah diterapkan Perusahaan adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

Risk management that has been applied by the Company are as follows: (Continued)

- Penanganan kontrak bermasalah yang dilakukan secara disiplin dan proaktif.
- Analisa atas kualitas portofolio secara periodik dan tindakan preventif dan sanksi bagi cabang-cabang yang kualitas portofolionya tidak sesuai target.

- *Handling of problematic contracts in a discipline and proactive manner.*
- *Analysis of portfolio quality through periodic and preventive actions and sanctions for branches whose quality of its portfolio is not on target.*

Tabel berikut menjelaskan eksposur maksimum sesuai dengan konsentrasi risiko kredit:

The following table illustrates the Company's maximum exposure based on credit risk concentration:

	2019			
	Korporasi/ Corporate	Ritel/ Retail	Eksposur maksimum/ Maximum exposure	
Kas dan setara kas	660.032	-	660.032	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan	2.324.872	15.425.730	17.750.602	Financing receivables
Piutang ijarah	-	2.174	2.174	Ijarah receivables
Piutang karyawan	-	20.279	20.279	Employee receivables
	2.984.904	15.448.183	18.433.087	
	2018			
	Korporasi/ Corporate	Ritel/ Retail	Eksposur maksimum/ Maximum exposure	
Kas dan setara kas	755.247	-	755.247	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan	2.314.370	15.343.950	17.658.320	Financing receivables
Piutang ijarah	-	106	106	Ijarah receivables
Aset derivatif	110.170	-	110.170	Derivative assets
Piutang karyawan	-	21.713	21.713	Employee receivables
	3.179.787	15.365.769	18.545.556	

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/74

Exhibit E/74

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

35. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

35. RISK MANAGEMENT (Continued)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

Process and risk assessments (Continued)

1. Risiko Kredit (Lanjutan)

1. Credit Risk (Continued)

Tabel berikut menjelaskan rincian aset keuangan Perusahaan yang dibedakan antara yang mengalami penurunan nilai dan yang tidak:

The following table illustrates the detail of financial assets distinguished between those which impaired and not impaired:

	2019			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Kas dan setara kas	660.032	-	660.032	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan	17.593.278	157.324	17.750.602	Financing receivables
Piutang ijarah	2.057	117	2.174	Ijarah receivables
Piutang karyawan	20.279	-	20.279	Employee receivables
	<u>18.275.646</u>	<u>157.441</u>	<u>18.433.087</u>	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai			<u>(354.751)</u>	Less: Allowance for impairment losses
			<u>18.078.336</u>	

	2018			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Kas dan setara kas	755.247	-	755.247	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan	17.436.681	221.639	17.658.320	Financing receivables
Piutang ijarah	106	-	106	Ijarah receivables
Aset derivatif	110.170	-	110.170	Derivative assets
Piutang karyawan	21.713	-	21.713	Employee receivables
	<u>18.323.917</u>	<u>221.639</u>	<u>18.545.556</u>	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai			<u>(377.863)</u>	Less: Allowance for impairment losses
			<u>18.167.693</u>	

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
 in Indonesian Language*

Ekshibit E/75

Exhibit E/75

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
 NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

35. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

35. RISK MANAGEMENT (Continued)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

Process and risk assessments (Continued)

1. Risiko Kredit (Lanjutan)

1. Credit Risk (Continued)

Tabel berikut menjelaskan rincian aset keuangan Perusahaan yang penilaian penurunannya dibedakan antara yang dinilai secara individual dan kolektif.

The following table illustrates the detail of financial assets distinguished between those assessed individually and collectively.

	2019			
	Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total	
Kas dan setara kas	660.032	-	660.032	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan	2.779.029	14.971.573	17.750.602	Financing receivables
Piutang ijarah	2.174	-	2.174	Ijarah receivables
Piutang karyawan	20.279	-	20.279	Employee receivables
	<u>3.461.514</u>	<u>14.971.573</u>	<u>18.433.087</u>	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai			<u>(354.751)</u>	Less: Allowance for impairment losses
			<u>18.078.336</u>	

	2018			
	Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total	
Kas dan setara kas	755.247	-	755.247	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan	3.101.996	14.556.324	17.658.320	Financing receivables
Piutang ijarah	106	-	106	Ijarah receivables
Aset derivatif	110.170	-	110.170	Derivative assets
Piutang karyawan	21.713	-	21.713	Employee receivables
	<u>3.989.232</u>	<u>14.556.324</u>	<u>18.545.556</u>	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai			<u>(377.863)</u>	Less: Allowance for impairment losses
			<u>18.167.693</u>	

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/76

Exhibit E/76

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

35. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

35. RISK MANAGEMENT (Continued)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

Process and risk assessments (Continued)

2. Risiko Pasar

2. Market Risk

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama berkaitan dengan perubahan nilai suku bunga dan nilai tukar mata uang yang akan menyebabkan berkurangnya pendapatan, atau bertambahnya biaya modal Perusahaan. Dengan pola aktivitas usaha yang dijalankan Perusahaan saat ini, risiko pasar Perusahaan adalah minimal. Perusahaan tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan dalam bentuk maupun menggunakan mata uang asing, sementara seluruh utang Perusahaan dalam mata uang asing telah diproteksi dengan swap dalam jumlah dan tanggal jatuh tempo yang sama dengan utangnya. Dalam hal suku bunga, seluruh bunga yang dibebankan ke konsumen adalah suku bunga tetap (*fixed interest rate*), sementara utang yang diperoleh sebagian besar juga dalam suku bunga tetap dan hanya sebagian kecil utang dalam bentuk bunga mengambang (*floating interest rate*).

Market risk is the risk primarily due to changes in interest rates and exchange rates which could resulting in decrease in revenue, or increase in cost of capital of the Company. With the pattern of business activity currently operated by the Company, the market risk of the Company is mitigated to the minimum level. The Company has neither financing business activity that denominated in foreign currencies, while all borrowings of the Company that denominated in foreign currencies have been protected by entering into swap transactions at amount and settlement date that similar to the borrowings thereof. In terms of interest rate, all interest rate charged to the customer is fixed interest rate, while most of the borrowings received bear fixed interest rate, and only a small portion the borrowings bear floating interest rate.

Manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

Risk management that has been applied by the Company are as follows:

- Mengelola risiko perubahan nilai tukar mata uang asing.
- Melakukan penelaahan atas tingkat bunga pembiayaan yang dikaitkan dengan tingkat suku bunga pinjaman.
- Membatasi eksposur dalam investasi yang memiliki harga pasar yang fluktuatif.

- Managing risks of foreign exchange rates.
- Performing review over the interest rate on financing associated with interest rate on borrowings.
- Limiting exposure in the investment that has fluctuating market prices.

Tabel berikut menjelaskan eksposur Perusahaan atas risiko nilai tukar mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2019. Termasuk didalamnya adalah instrumen keuangan Perusahaan pada nilai tercatat, dikategorikan berdasarkan jenis mata uang.

The following table illustrates the Company's exposure to foreign currency exchange rate risk as of 31 December 2019. Included in the table are financial instruments of the Company at carrying amounts, categorised by currency.

	2019		
	USD (Nilai penuh)/ (Full amount)	Nilai (Rp)/ Equivalent (Rp)	
Liabilitas			Liabilities
Pinjaman yang diterima	324.166.668	4.506.241	Fund borrowings
Beban yang masih harus dibayar	3.947.632	54.876	Accrued expenses
Jumlah liabilitas	328.114.300	4.561.117	Total liabilities
Liabilitas bersih	328.114.300	4.561.117	Net liabilities
Kontrak valuta berjangka pertukaran mata uang asing	(328.114.300)	(4.561.117)	Foreign currency swap transactions contract
Eksposur bersih dalam mata uang asing	-	-	Net exposure in foreign currency

Manajemen risiko tingkat suku bunga terhadap limit perubahan tingkat suku bunga dilengkapi dengan pemantauan atas sensitivitas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan terhadap beberapa skenario suku bunga baku maupun non-baku.

The management of interest rate risk against interest rate gap limits is supplemented by monitoring the sensitivity of the Company's financial assets and liabilities to various standard and non-standard interest rate scenarios.

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit E/77

Exhibit E/77

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

35. RISK MANAGEMENT (Continued)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

Process and risk assessments (Continued)

2. Risiko Pasar (Lanjutan)

2. Market Risk (Continued)

Tabel berikut menjelaskan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap pendapatan pembiayaan:

The following table illustrates the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the financing income:

	2019	2018	
<u>Pendapatan pembiayaan:</u>			<u>Financing income:</u>
Kenaikan suku bunga 1% (100 basis poin)	158.176	168.406	Increase in interest rate by 1% (100 basis point)
Penurunan suku bunga 1% (100 basis poin)	(158.176)	(168.406)	Decrease in interest rate by 1% (100 basis point)

Tabel berikut menjelaskan rincian aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal repricing atau tanggal jatuh tempo kontraktual untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga:

The following table illustrates the Company's financial assets and liabilities at carrying amounts, categorized by the earlier of contractual repricing of maturity dates to analyze the impact of changes in interest rate:

	2019						Jumlah/ Total	
	Tingkat bunga mengambang/ Floating rate		Tingkat bunga tetap/ Fixed rate					
	< 3 bulan/ months	3-36 bulan/ months	> 3 bulan/ months	3-12 bulan/ months	1-2 tahun/ years	> 2 tahun/ years		
Aset keuangan								Financial assets
Kas dan setara kas	660.032	-	-	-	-	-	660.032	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan	-	-	3.213.215	6.695.626	5.260.269	2.581.492	17.750.602	Financing receivables
Piutang ijarah	-	-	2.174	-	-	-	2.174	Ijarah receivables
Jumlah aset keuangan	660.032	-	3.215.389	6.695.626	5.260.269	2.581.492	18.412.808	Total financial assets
Liabilitas keuangan								Financial liabilities
Pinjaman yang diterima	58.035	320.629	1.311.867	2.815.432	2.112.658	1.111.400	7.730.021	Fund borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	1.211.606	397.546	1.649.305	499.826	3.758.283	Securities issued
Jumlah liabilitas keuangan	58.035	320.629	2.523.473	3.212.978	3.761.963	1.611.226	11.488.304	Total financial liabilities
Bersih	601.997	(320.629)	691.916	3.482.648	1.498.306	970.266	6.924.504	Net

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/78

Exhibit E/78

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

35. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

35. RISK MANAGEMENT (Continued)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

Process and risk assessments (Continued)

2. Risiko Pasar (Lanjutan)

2. Market Risk (Continued)

Tabel berikut menyajikan rincian aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal repricing atau tanggal jatuh tempo kontraktual untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga: (Lanjutan)

The following table presents the Company's financial assets and liabilities at carrying amounts, categorized by the earlier of contractual repricing of maturity dates to analyze the impact of changes in interest rate: (Continued)

	2018						Jumlah/ Total	
	Tingkat bunga mengambang/ Floating rate			Tingkat bunga tetap/ Fixed rate				
	< 3 bulan/ months	3-36 bulan/ months	> 3 bulan/ months	3-12 bulan/ months	1-2 tahun/ years	> 2 tahun/ years		
Aset keuangan								Financial assets
Kas dan setara kas	755.247	-	-	-	-	-	755.247	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan	-	-	3.149.599	6.475.856	5.221.521	2.811.344	17.658.320	Financing receivables
Piutang ijarah	-	-	106	-	-	-	106	Ijarah receivables
Jumlah aset keuangan	755.247	-	3.149.705	6.475.856	5.221.521	2.811.344	18.413.673	Total financial assets
Liabilitas keuangan								Financial liabilities
Pinjaman yang diterima	70.472	577.684	991.067	3.042.063	1.867.037	351.537	6.899.860	Fund borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	1.601.872	834.373	1.110.071	1.649.904	5.196.220	Securities issued
Jumlah liabilitas keuangan	70.472	577.684	2.592.939	3.876.436	2.977.108	2.001.441	12.096.080	Total financial liabilities
Bersih	684.775	(577.684)	556.766	2.599.420	2.244.413	809.903	6.317.593	Net

3. Risiko Likuiditas

3. Liquidity Risk

Risiko likuiditas merupakan risiko terkait dengan kemampuan sumber dana Perusahaan untuk memenuhi liabilitasnya pada jatuh tempo.

Liquidity risk is the risk associated with the ability of the Company to meet its obligations when they fall due.

Manajemen risiko yang diterapkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

Risk management that has been applied by the Company are as follows:

- Mendapatkan pinjaman dengan skedul pembayaran kembali pokok dan bunga yang sesuai dengan periode jatuh tempo piutang, sehingga tidak terjadi *mis-match*.
- Menjaga agar posisi kas dan Perusahaan selalu dalam posisi likuid untuk mendukung aktivitas pembiayaan selama minimal 7 hari.
- Memonitor posisi kas dan bank Perusahaan secara periodik, baik tahunan, bulanan, mingguan maupun harian, guna memastikan agar selalu terdapat surplus kas yang memadai.
- Menjaga agar jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode tertentu lebih besar dibanding dengan utang yang jatuh tempo pada periode yang sama.

- *Obtaining borrowings with principal and interest repayment schedule that aligns with the original maturities of receivables, in order to prevent mis-match.*
- *Maintaining the cash and bank position of the Company to remain in a liquid position in supporting the financing activities for at least 7 days.*
- *Monitoring the cash and bank position of the Company in a regular basis, whether annually, monthly, weekly or daily, to ensure that there is always sufficient cash surplus.*
- *Maintaining the number of receivables due in a certain period higher than the debts maturing in the same period.*

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/79

Exhibit E/79

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

35. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

35. RISK MANAGEMENT (Continued)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

Process and risk assessments (Continued)

3. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

3. Liquidity Risk (Continued)

Tabel berikut ini menyajikan profil perbedaan jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

The following table presents the maturity gap profile of the Company's financial assets and liabilities as of 31 December 2019 and 2018:

		2019							
		Tidak memiliki jatuh tempo/ Don't have maturity	< 1 bulan/ month	1-3 bulan/ months	>3-12 bulan/ months	1-3 tahun/ years	>3 tahun/ years	Jumlah/ Total	
Aset keuangan									Financial assets
	Kas dan setara kas	660.032	-	-	-	-	-	660.032	Cash and cash equivalents
	Piutang pembiayaan	-	1.458.919	1.754.296	6.695.626	7.378.350	463.411	17.750.602	Financing receivables
	Piutang ijarah	-	2.174	-	-	-	-	2.174	Ijarah receivables
	Piutang karyawan	-	2.252	1.318	7.882	8.210	617	20.279	Employees receivables
	Jumlah aset keuangan	660.032	1.463.345	1.755.614	6.703.508	7.386.560	464.028	18.433.087	Total financial assets
Liabilitas keuangan									Financial liabilities
	Pinjaman yang diterima	-	630.430	745.099	2.997.028	3.387.914	4.167	7.764.638	Fund borrowings
	Surat berharga yang diterbitkan	-	-	1.213.000	400.000	2.151.000	-	3.764.000	Securities issued
	Beban bunga yang masih harus dibayar	-	96.524	-	-	-	-	96.524	Accrued interest expenses
	Liabilitas derivatif	-	5.148	10.763	50.140	63.978	-	130.029	Derivative liabilities
	Utang kepada supplier	-	24.798	-	-	-	-	24.798	Payable to suppliers
	Utang premi asuransi	-	-	37.200	-	-	-	37.200	Insurance premium payables
	Jumlah liabilitas keuangan	-	756.900	2.006.062	3.447.168	5.602.892	4.167	11.817.189	Total financial liabilities
	Perbedaan jatuh tempo	660.032	706.445	(250.448)	3.256.340	1.783.668	459.861	6.615.898	Difference in maturity
		2018							
		Tidak memiliki jatuh tempo/ Don't have maturity	< 1 bulan/ month	1-3 bulan/ months	>3-12 bulan/ months	1-3 tahun/ years	>3 tahun/ years	Jumlah/ Total	
Aset keuangan									Financial assets
	Kas dan setara kas	755.247	-	-	-	-	-	755.247	Cash and cash equivalents
	Piutang pembiayaan	-	1.475.593	1.674.006	6.475.855	7.475.425	557.441	17.658.320	Financing receivables
	Piutang ijarah	-	106	-	-	-	-	106	Ijarah receivables
	Aset derivatif	-	4.915	12.777	39.763	52.715	-	110.170	Derivative assets
	Piutang karyawan	-	27	115	4.498	6.413	10.660	21.713	Employees receivables
	Jumlah aset keuangan	755.247	1.480.641	1.686.898	6.520.116	7.534.553	568.101	18.545.556	Total financial assets
Liabilitas keuangan									Financial liabilities
	Pinjaman yang diterima	-	303.118	762.362	3.251.326	2.606.631	-	6.923.437	Fund borrowings
	Surat berharga yang diterbitkan	-	-	1.604.000	838.000	2.764.000	-	5.206.000	Securities issued
	Beban bunga yang masih harus dibayar	-	77.439	-	-	-	-	77.439	Accrued interest expenses
	Utang kepada supplier	-	5.168	-	-	-	-	5.168	Payable to suppliers
	Utang premi asuransi	-	-	26.839	-	-	-	26.839	Insurance premium payables
	Jumlah liabilitas keuangan	-	385.725	2.393.201	4.089.326	5.370.631	-	12.238.883	Total financial liabilities
	Perbedaan jatuh tempo	755.247	1.094.916	(706.303)	2.430.790	2.163.922	568.101	6.306.673	Difference in maturity

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/80

Exhibit E/80

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

35. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang berpotensi menyebabkan kerugian operasional karena kesalahan karyawan baik yang disengaja maupun tidak; kegagalan sistem dan proses operasional serta tidak berfungsinya sistem pengendalian internal dalam operasional Perusahaan sehari-hari.

Manajemen risiko yang diterapkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Menerapkan sistem yang tersentralisasi sehingga proses bisnis dapat terkontrol secara sistem dan dimonitor dari waktu ke waktu.
- Menyiapkan *backup* dan *Disaster Recovery Plan* yang memadai bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atas sistem aplikasi utama Perusahaan, baik dari sisi *hardware* dan *software*.
- Menerapkan sistem audit kepatuhan yang berkelanjutan, baik di kantor cabang maupun kantor pusat.
- Menerapkan aturan kerja yang jelas (SOP) dan sanksi yang tegas atas penyimpangan yang terjadi, sesuai dengan tingkat kesalahan yang ditemukan.
- Adanya penanaman nilai-nilai dasar Perusahaan sejak dini kepada karyawan, sehingga dapat menghindarkan/mengurangi potensi penyimpangan.
- Adanya penilaian kinerja yang *fair* dan transparan serta adanya kesempatan untuk pengembangan karir.

5. Risiko Permodalan

Tujuan Perusahaan dan entitas anaknya dalam mengelola permodalannya adalah menjaga kelangsungan usaha Perusahaan untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya modal (*cost of capital*).

Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbalan hasil modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru untuk mengurangi pinjaman.

Konsisten dengan pelaku industri lainnya, Perusahaan dan entitas anaknya memonitor permodalan berdasarkan gearing ratio. Rasio ini dihitung dari nilai bersih pinjaman (termasuk obligasi dan medium-term notes) dibagi dengan jumlah modal. Jumlah modal diambil dari ekuitas yang tercantum dalam laporan posisi keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.012/2006 tanggal 26 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, juncto POJK 35/POJK.5/2018, jumlah maksimum gearing ratio adalah sebesar 10 kali dari total modal.

35. RISK MANAGEMENT (Continued)

Process and risk assessments (Continued)

4. Operational Risk

Operational risk is the risk that could potentially cause an operating loss due to employee error whether intentional or not; system failures and operational processes as well as the malfunction of the internal control system in the day-to-day operations.

Risk management that has been applied by the Company are as follows:

- *Implementing a centralized system in order that business processes can be controlled by the system and monitored from time to time.*
- *Preparing backup and Disaster Recovery Plan that is sufficient whenever unexpected event or condition occur towards the Company's major application systems, both in terms of hardware and software.*
- *Implementing a sustainable compliance audit system, both in branch offices or headquarters.*
- *Implementing a clear code of conduct (SOP) and strict sanctions for irregularities that occurred, according to level of error identified.*
- *Promoting the Company's core values to employees since the early stage, in order to avoid/reduce the potential for irregularities.*
- *Fair and transparent performance appraisal and opportunities for career development.*

5. Capital Risk

The Company and its subsidiary's objective in managing its capital is to keep the Company's capability in maintaining its going concern, so the Company could distribute the return to shareholders, and maintain the optimization of capital structure to reduce the cost of capital.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return for the results of capital to shareholders or issue new shares to reduce lending

Consistent with other players in the industry, the Company and its subsidiary monitor capital on the basis of the gearing ratio. This ratio is calculated as net debt (including bonds payable and medium-terms notes) divided by total capital. Total capital is calculated as shown in the statements of financial position.

Based on Minister of Finance of the Republic of Indonesia Regulation No. 84/PMK.012/2006 dated 26 September 2006 regarding Multifinance Company, in conjunction with OJK Regulation No.35/POJK.5/2018, the maximum gearing ratio is 10 times from total capital.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/81

Exhibit E/81

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

35. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

5. Risiko Permodalan (Lanjutan)

35. RISK MANAGEMENT (Continued)

Process and risk assessments (Continued)

5. Capital Risk (Continued)

Keterangan	PMK84/PMK.012/2006	Struktur Modal Perusahaan/ Company's Capital Structure		Description
		2019	2018	
Modal Disetor (dalam miliar Rupiah)	Minimal Rp 100 miliar/ Minimum Rp 100 billion	399	399	Paid-up Capital (in billion Rupiah)
Rasio Utang Terhadap Ekuitas	Maksimum 10x/ Maximum 10x	1,9	1,9	Debt to Equity Ratio
Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tingkat rasio utang terhadap ekuitas Perusahaan masing-masing berada pada kondisi sehat, yaitu 1,9 kali.		As of 31 December 2019 and 2018, debt-to-equity ratio level of the Company was healthy at 1.9 times, respectively.		

36. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan

Pada tabel berikut ini, instrumen keuangan telah dialokasikan berdasarkan klasifikasinya. Kebijakan akuntansi penting pada Catatan 2d menjelaskan bagaimana setiap kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur dan bagaimana pendapatan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian (perubahan nilai wajar instrumen keuangan) atas nilai wajar diakui.

Pengelompokan aset keuangan telah diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Demikian halnya dengan liabilitas keuangan telah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

36. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

Fair value of financial assets and financial liabilities

In the following table, financial instrument have been allocated based on their respective. Significant accounting policies in Note 2d describes how each category of financial assets and financial liabilities are measured and how revenue and expenses, including gains and losses (changes in fair value of financial instruments) in the fair value is recognized.

The classification of financial assets has been classified as financial assets measured at fair value through profit and loss, and loans and receivables. So with the financial liabilities has been classified as financial liabilities measured at amortized cost.

The following table sets out the carrying value and fair value of financial assets and financial liabilities as of 31 December 2019 and 2018:

2019	Nilai tercatat / Carrying amount				2019
	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ Fair value through profit and loss	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loan and receivables	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial Liabilities measured at amortized cost	Jumlah nilai tercatat/ Carrying value amount	
Aset keuangan					
Kas dan setara kas	-	660.032	-	660.032	660.032
Piutang pembiayaan - bersih	-	17.395.920	-	17.395.920	17.395.920
Piutang ijarah - bersih	-	2.105	-	2.105	2.105
Aset derivatif	-	-	-	-	-
Piutang karyawan	-	20.279	-	20.279	20.279
Jumlah	-	18.078.336	-	18.078.336	18.078.336
Liabilitas keuangan					
Pinjaman yang diterima	-	-	7.730.021	7.730.021	7.730.021
Liabilitas derivatif	130.029	-	-	130.029	130.029
Beban yang masih harus dibayar	-	-	796.709	796.709	796.709
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	3.758.283	3.758.283	3.758.283
Utang lain-lain	-	-	260.542	260.542	260.542
Jumlah	130.029	-	12.545.555	12.675.584	12.675.584

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/82

Exhibit E/82

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

36. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

36. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (Continued)

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan
(Lanjutan)

*Fair value of financial assets and financial liabilities
(Continued)*

2018	Nilai tercatat / Carrying amount					2018
	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ <i>Fair value through profit and loss</i>	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loan and receivables</i>	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial Liabilities measured at amortized cost</i>	Jumlah nilai tercatat/ <i>Carrying value amount</i>	Jumlah nilai wajar/ <i>Fair value amount</i>	
Aset keuangan						Financial assets
Kas dan setara kas	-	755.247	-	755.247	755.247	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan - bersih	-	17.280.458	-	17.280.458	17.280.458	Financing receivables - net
Piutang ijarah - bersih	-	105	-	105	105	Ijarah receivables - net
Aset derivatif	110.170	-	-	110.170	110.170	Derivative assets
Piutang karyawan	-	21.713	-	21.713	21.713	Employee receivables
Jumlah	110.170	18.057.523	-	18.167.693	18.167.693	Total
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Pinjaman yang diterima	-	-	6.899.860	6.899.860	6.899.860	Fund borrowings
Beban yang masih harus dibayar	-	-	283.204	283.204	283.204	Accrued expenses
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	5.196.220	5.196.220	5.196.220	Securities issued
Utang lain-lain	-	-	262.977	262.977	262.977	Other payables
Jumlah	-	-	12.642.261	12.642.261	12.642.261	Total

Metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar adalah sebagai berikut:

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

- Nilai wajar kas dan setara kas, deposito berjangka, beban yang masih harus dibayar dan utang lain-lain mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Estimasi nilai wajar terhadap pinjaman yang diterima yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa. Nilai wajar pinjaman yang diterima dengan tingkat suku bunga mengambang mendekati nilai tercatatnya karena tingkat suku bunganya sering ditinjau ulang.
- Piutang pembiayaan dan aset lain-lain dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat setelah dikurangi oleh beban penurunan nilai. Estimasi nilai wajar mencerminkan jumlah diskonto dari estimasi kini dari arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima. Arus kas yang diharapkan didiskontokan pada tingkat suku bunga pasar terkini untuk menentukan nilai wajar.
- Nilai wajar untuk aset keuangan derivatif ditetapkan menggunakan harga pasar.
- *The fair values of cash and cash equivalents, time deposit, accrued expenses and other payables approximate their carrying amounts largely due to short-term maturities of these instruments.*
- *The estimated fair value of fund borrowings not quoted in an active market is based on discounted cash flows using interest rates for new debts with similar remaining maturity. The fair value of floating rate fund borrowings approximate their carrying amounts because the interest rate is repriced frequently.*
- *Financing receivables and other assets are recorded at carrying amount net of charges for impairment. The estimated fair value represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received. Expected cash flows are discounted at current market rates to determine fair value.*
- *The fair value for derivative financial assets is based on market rates.*

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/83

Exhibit E/83

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

36. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

**Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan
(Lanjutan)**

Metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

- Nilai wajar agregat untuk surat berharga yang diterbitkan dihitung berdasarkan harga pasar kuotasi. Jika informasi ini tidak tersedia, model diskonto arus kas digunakan berdasarkan kurva *yield* terkini yang sesuai dengan sisa periode jatuh temponya.

PSAK 68, "Pengukuran Nilai Wajar" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- (a) harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1);
- (b) input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
- (c) input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

Aset keuangan Perusahaan yang diukur dan diakui pada nilai wajar (tingkat 2) adalah aset keuangan derivatif.

36. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (Continued)

**Fair value of financial assets and financial liabilities
(Continued)**

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value: (Continued)

- The aggregate fair values securities issued is calculated based on quoted market prices. For those notes where quoted market prices are not available, a discounted cash flow model is used based on a current yield curve appropriate for the remaining term of maturity.

SFAS No. 68, "Fair Value Measurement" requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

- (a) quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level 1);
- (b) inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices) (level 2); and
- (c) inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (level 3).

The Company's financial assets that are measured and recognised at fair value (level 2) are derivative financial assets.

37. LITIGASI

Ringkasan perkara antara Perusahaan dengan PT Aryaputra Teguharta (APT) dan PT Ongko Multicopora (OM).

Latar Belakang

APT dan OM (keduanya merupakan anak perusahaan Ongko Grup) dahulu merupakan pemegang saham BFI dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 111.804.732 (32,32%) dan 98.388.180 (28,44%). Pada saat krisis tahun 1998, anak-anak perusahaan Ongko Grup tidak dapat membayar utang kepada BFI sejumlah ± USD 100.000.000 (nilai penuh) yang mengakibatkan BFI turut gagal membayar utang kepada para krediturnya dan nyaris pailit.

Pada tanggal 1 Juni 1999, sebagai bagian dari rencana restrukturisasi utang BFI kepada para krediturnya, APT dan OM menggadaikan saham-saham mereka kepada BFI berdasarkan Perjanjian Gadai Saham tanggal 1 Juni 1999, sebagai jaminan atas utang anak-anak perusahaan Ongko Grup yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar kepada BFI.

Perjanjian Gadai Saham menetapkan bahwa saham-saham APT dan OM yang dijaminakan kepada BFI akan dialihkan kepada pihak ketiga sebagai kompensasi atas pembebasan utang anak-anak perusahaan Ongko Grup kepada BFI yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar tersebut. Hal ini merupakan inti dari rencana restrukturisasi utang BFI, dimana utang BFI kepada para kreditur juga akan diselesaikan melalui permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta.

37. LITIGATION

Summary of the case between the Company and PT Aryaputra Teguharta (APT) and PT Ongko Multicopora (OM).

Background

APT and OM (both of which are Ongko Group subsidiaries) were formerly BFI shareholders with 111,804,732 (32.32%) and 98,388,180 (28.44%) shares respectively. At the time of the 1998 crisis, the Ongko Group's subsidiaries were unable to pay debts to BFI in the amount of ± USD 100,000,000 (full amount) which resulted in BFI failing to pay its debts to its creditors and was almost bankrupt.

On 1 June 1999, as part of BFI's debt restructuring plan to its creditors, APT and OM pledged their shares to BFI under the Pledge Share Agreement dated 1 June 1999, as collateral for the debt of the Ongko Group subsidiaries due and not paid to BFI.

The Pledge Share Agreement stipulates that APT and OM pledged shares to BFI will be transferred to third party as compensation for the debts of the Ongko Group subsidiaries to BFI that are due and not paid. This is the core of BFI's debt restructuring plan, where BFI's debt to creditors will also be settled through an application for Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) at the Jakarta Commercial Court.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/84

Exhibit E/84

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

37. LITIGASI (Lanjutan)

Latar Belakang (Lanjutan)

Sebagai bagian dari rencana restrukturisasi utang BFI tersebut, serta dalam rangka pelaksanaan pengalihan gadai saham-saham APT dan OM kepada para pihak ketiga tersebut, BFI telah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari APT dan OM berdasarkan:

- (a) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 27 Januari 2000,
- (b) RUPSLB tanggal 22 Agustus 2000,
- (c) Persetujuan Pengalihan tanggal 7 Agustus 2000, dan
- (d) Surat Kuasa untuk Menjual Saham yang Tidak Dapat Ditarik Kembali tanggal 7 Agustus 2000.

BFI berhasil merestrukturisasi utangnya dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian dengan para kreditur dan telah disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta dengan Putusan nomor 04/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 19 Desember 2000.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian dengan para krediturnya yang sudah disahkan tersebut, BFI menanda-tangani Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 9 Februari 2001, dimana saham-saham APT dan OM yang ada di BFI dialihkan kepada para kreditur oleh BFI, dengan *The Law Debenture Trust Corporation* ("LDTC") sebagai Wali Amanat dari para kreditur.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Gadai Saham, BFI menyerahkan Surat Pembebasan Utang kepada Ongko Grup tanggal 12 Februari 2001, dan sejak saat itu APT dan OM bukan lagi pemegang saham BFI. Nilai saham APT dan OM pada saat itu sebesar Rp 5.300 (harga pasar pada saat itu sebesar Rp 25 per saham) dikompensasi dengan utang anak-anak perusahaan Ongko Grup yang dihapus-bukukan BFI senilai lebih dari Rp 1.000.000.

Pengalihan saham-saham mengacu Perjanjian Jual Beli Saham dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2001 melalui Bursa Efek Jakarta. Sebagai akibat dari pengalihan tersebut, LDTC tercatat sebagai pemegang saham BFI mewakili para kreditur.

Pada tahun 2003, ketika kondisi keuangan BFI mulai menunjukkan perbaikan, dan kurang lebih 3 (tiga) tahun setelah selesai restrukturisasi utang BFI, APT dan OM menuntut pengembalian saham-saham yang telah dijaminkan tersebut meskipun tidak memiliki keberatan sebelumnya, selama PKPU dan proses pengalihan saham (butir 3) dengan dalih bahwa Perjanjian Gadai Saham tersebut sudah kedaluwarsa, padahal dalam Perjanjian Gadai Saham tersebut berlaku dan mengikat sampai utang anak-anak perusahaan Ongko Grup yang dijamin oleh APT dan OM dibayar lunas kepada BFI.

OM dan APT mengajukan Gugatan secara terpisah terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam restrukturisasi utang, antara lain, BFI dan Direksi BFI yang menjabat pada saat itu (Francis Lay Sioe Ho, Yan Peter Wangkar dan Cornelius Henry Kho), LDTC (sebagai Wali Amanat), Ernst & Young (sebagai Auditor), Royal Bank of Scotland (sebagai Perwakilan Kreditur), Chase Manhattan Bank (sebagai Kustodian) untuk menuntut pengembalian saham-saham yang telah mereka gadaikan kepada BFI dan yang telah dialihkan oleh BFI kepada para krediturnya, tanpa ada pembayaran utang anak-anak perusahaan Ongko Grup yang dijamin oleh gadai saham APT dan OM, yang telah dihapus-bukukan oleh BFI.

37. LITIGATION (Continued)

Background (Continued)

As part of the BFI debt restructuring plan, as well as in order to carry out the transfer of the pledged shares for APT and OM to third parties, BFI has obtained approval from APT and OM based on:

- (a) Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated 27 January 2000,*
- (b) EGMS dated 22 August 2000,*
- (c) Consent to Transfer dated 7 August 2000, and*
- (d) Irrevocable Power of Attorney to Sell Shares dated 7 August 2000.*

BFI has successfully restructured its debt by signing a Settleme nt Agreement with creditors and has been approved by the Jakarta Commercial Court with Decision number 04/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. dated 19 December 2000.

In accordance with the provisions in the Settleme nt Agreement with creditors that has been approved, BFI signed the Share Sell and Purchase Agreement dated 9 February 2001, where the shares of APT and OM in BFI were transferred to creditors by BFI, with The Law Debenture Trust Corporation ("LDTC") as Trustee of creditors.

In accordance with the provisions in the Pledge Share Agreement, BFI submitted a Letter of Discharge of Indebtedness to the Ongko Group on 12 February 2001, and since then APT and OM are no longer shareholders of BFI. The share value of APT and OM at that time was Rp 5,300 (the current market price of Rp 25 per share) is compensated with the debt of the Ongko Group subsidiaries which were written off by BFI worth more than Rp 1,000,000.

The transfer of shares refers to the Share Sell and Purchase Agreement held on 11 May 2001 through the Jakarta Stock Exchange. As a result of the transfer, LDTC was listed as a BFI shareholder representing creditors.

In 2003, when the financial condition of BFI began to show improvement, and approximately 3 (three) years after the completion of the debt restructuring of BFI, APT and OM demanded the return of the pledged shares even though they had no previous objections, during PKPU and share transfer process (point 3) under the pretext that the Pledge Share Agreement has expired, even though the Pledge Share Agreement is valid and binding until the debt of the subsidiaries of the Group Ongko guaranteed by APT and OM is repaid in full to BFI.

OM and APT filed a lawsuit separately against the parties involved in debt restructuring, among others, BFI and the BFI Directors at that time (Francis Lay Sioe Ho, Yan Peter Wangkar and Cornelius Henry Kho), LDTC (as Trustee), Ernst & Young (as Auditor), Royal Bank of Scotland (as Creditors Representative), Chase Manhattan Bank (as Custodian) to demand the return of shares that they have mortgaged to BFI and which BFI has transferred to its creditors, without any debt repayment the subsidiaries of the Ongko Group are guaranteed by the pledges of APT and OM shares, which have been written off by BFI.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/85

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

37. LITIGASI (Lanjutan)

Latar Belakang (Lanjutan)

Berikut ini merupakan Putusan atas Gugatan APT dan OM di atas:

- (a) Putusan Perkara APT:
- i. Di tingkat Pengadilan Negeri (PN), sebagian Gugatan APT dikabulkan melalui Putusan nomor 123/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tanggal 14 April 2004.
 - ii. Di tingkat Banding, Pengadilan Tinggi (PT) mengabulkan Banding yang diajukan BFI melalui Putusan nomor 302/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 1 September 2004.
 - iii. Di tingkat Kasasi, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Kasasi dari APT melalui Putusan nomor 677K/Pdt/2005 tanggal 20 Juli 2005.
 - iv. Di tingkat Peninjauan Kembali (PK), MA mengabulkan sebagian Gugatan dari APT melalui Putusan nomor 240PK/Pdt/2006 tanggal 20 Februari 2007 ("PK 240"):
 - APT adalah pemilik sah atas saham-saham APT.
 - BFI dan Direksi BFI yang menjabat pada saat itu (Francis Lay Sioe Ho, Yan Peter Wangkar dan Cornelius Henry Kho) dihukum untuk:
 - mengembalikan dan menyerahkan saham-saham APT kepada APT.
 - membayar Rp 20 per hari sebagai uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pengembalian dan penyerahan saham APT kepada APT.
 - Gugatan APT terhadap pihak lain termasuk LDTC tidak dapat diterima.
 - Tuntutan APT berupa ganti kerugian tidak dapat diterima.
- (b) Putusan Perkara OM:
- i. Di tingkat PN, sebagian besar Gugatan OM dikabulkan melalui Putusan nomor 517/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tanggal 2 November 2004.
 - ii. Di tingkat Banding, PT mengabulkan Banding yang diajukan BFI melalui Putusan nomor 60/Pdt/2005/PT.DKI tanggal 23 Maret 2005.
 - iii. Di tingkat Kasasi, MA menolak permohonan Kasasi dari OM melalui Putusan nomor 1478K/Pdt/2005 tanggal 27 Oktober 2005.
 - iv. Di tingkat PK, MA menolak permohonan PK dari OM melalui Putusan nomor 115PK/Pdt/2007 tanggal 19 Juli 2007.

Putusan Pengadilan yang final dan mengikat telah menolak semua Gugatan yang diajukan oleh OM atas dasar pertimbangan hukum bahwa Perjanjian Gadai Saham adalah sah dan berlaku sampai utang anak-anak perusahaan Ongko Grup yang dijamin oleh saham OM telah dilunasi, dengan demikian penjualan saham OM oleh BFI kepada LDTC adalah sah menurut hukum.

Exhibit E/85

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

37. LITIGATION (Continued)

Background (Continued)

The following are the Court Decisions of APT and OM Lawsuit above:

- (a) *APT Case Verdicts:*
- i. *At the District Court (PN) level, part of APT lawsuit is granted through Decision number 123/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst dated 14 April 2004.*
 - ii. *At the Appeal level, the High Court (PT) grants the Appeal submitted by BFI through Decision number 302/Pdt/2004/PT.DKI dated 1 September 2004.*
 - iii. *At the Cassation level, the Supreme Court (MA) rejected the Cassation application from APT through Decision number 677K/Pdt/2005 dated 20 July 2005.*
 - iv. *At the Judicial Review (PK), the Supreme Court granted part of the Lawsuit from APT through Decision number 240PK/Pdt/2006 dated 20 February 2007 ("PK 240"):*
 - *APT is the legal owner of APT shares.*
 - *BFI and the BFI Board of Directors at that time (Francis Lay Sioe Ho, Yan Peter Wangkar and Cornelius Henry Kho) were punished for:*
 - *returning and submitting APT shares to APT.*
 - *paying Rp 20 per day as forced money (dwangsom) for the delay in returning and submitting APT shares to APT.*
 - *APT's lawsuit against other parties including LDTC is not acceptable.*
 - *APT's demands of compensation are not acceptable.*
- (b) *OM Case Verdict:*
- i. *At the PN level, most OM lawsuits are granted through Decision number 517/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst dated 2 November 2004.*
 - ii. *At the Appeal level, the PT granted the Appeal submitted by BFI through Decision number 60/Pdt/2005/PT.DKI dated 23 March 2005.*
 - iii. *At the Cassation level, the MA rejected the Cassation request from OM through Decision number 1478K/Pdt/2005 dated 27 October 2005.*
 - iv. *At the level of PK, the MA rejected the PK request from the OM through Decision number 115PK/Pdt/2007 dated 19 July 2007.*

The final and binding court ruling has rejected all claims filed by OM on the basis of legal considerations that the Pledge Share Agreement is valid until the debt of the Group Ongko guarantees by OM shares has been repaid, thus the transfer of OM shares by BFI to LDTC is lawful.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/86

Exhibit E/86

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

37. LITIGASI (Lanjutan)

Latar Belakang (Lanjutan)

APT telah beberapa kali berupaya melakukan eksekusi atas Putusan PK 240 dari sejak tahun 2007 melalui PN Jakarta Pusat. Upaya tersebut tidak berhasil karena tidak ada saham-saham terdaftar atas nama APT dalam daftar pemegang saham BFI, oleh karena itu Ketua PN Jakarta Pusat yang berbeda mengeluarkan Surat/ Penetapan "Tidak Dapat Dilaksanakan (*Non-Executable*)" sebagai berikut:

(a) Penetapan Ketua PN Jakarta Pusat (H. Cicut Sutiarmo, S.H., M.Hum.) nomor 079/2007.Eks tanggal 10 Oktober 2007, yang isinya dikutip sebagai berikut:

- i. "Menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 240PK/Pdt/2006 tanggal 20 Februari 2007, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah nomor 079/2007.Eks, tidak dapat dilaksanakan (*Non-Executable*);
- ii. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat dan memberitahukan isi Penetapan ini kepada Para Pihak."

(b) Surat Ketua PN Jakarta Pusat (Hj. Andriani Nurdin, S.H., M.H.) nomor W10.U1.HT.079/2007 Eks. 4758 VII.2009.01 tanggal 3 Juli 2009, yang isinya dikutip sebagai berikut:

- i. "Pada acara panggilan menghadap tertanggal 30 Juni 2009 tidak diketemukan hal-hal yang baru yang diajukan oleh Pemohon sehubungan dengan permohonannya;

Tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan Penetapan nomor 079/2007.Eks tanggal 10 Oktober 2007 tentang "Tidak Dapat Dilaksanakan (*Non-Executable*);"

(c) Surat Ketua PN Jakarta Pusat (H. Syahril Sidik, S.H., M.H.) nomor W10.U1.HT.079/2007 Eks. VIII.2009.03.6238 tanggal 24 Agustus 2009, yang isinya dikutip sebagai berikut:

- i. "Pada panggilan menghadap tanggal 30 Juni 2009 tidak diketemukan hal-hal yang baru yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi sehubungan dengan permohonannya;
- ii. Tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan Penetapan nomor 079/2007.Eks tanggal 10 Oktober 2007 tentang "Tidak Dapat Dilaksanakan (*Non-Executable*)".

(d) Surat Ketua PN Jakarta Pusat (Suharto, S.H., M.Hum.) nomor W10.U1.HT.079/2007 Eks. X.2013.01.11412 BD tanggal 7 Oktober 2013, yang isinya dikutip sebagai berikut:

- i. "Bahwa hingga saat ini saham-saham tersebut tidak dapat ditemukan, sehingga Penetapan "Tidak Dapat Dilaksanakan" (*Non Executable*) tetap sah;
- ii. Bahwa Pemohon Eksekusi hingga saat ini belum dapat membuktikan atau memberikan informasi tentang saham-saham yang telah dijual kepada publik."

37. LITIGATION (Continued)

Background (Continued)

APT has tried several times to execute the PK 240 Decision from 2007 through the PN Central Jakarta. The effort was unsuccessful because there were no shares registered under the name of APT in the list of BFI shareholders, therefore the Chairperson of the different PN Central Jakarta issued a Letter/ Stipulation "Non-Executable" as follows:

(a) Stipulation of the Chairperson of the PN Central Jakarta (H. Cicut Sutiarmo, S.H., M. Hum.) Number 079/2007.Eks dated 10 October 2007, whose contents are quoted as follows:

- i. "Stating that the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 240PK/Pdt/2006 dated 20 February 2007, which is registered in the Registrar's Office of the Central Jakarta District Court under number 079/2007.Eks, cannot be implemented (*Non-Executable*);
- ii. Order the Registrar of the Central Jakarta District Court to record and notify the contents of this Stipulation to the Parties."

(b) Letter from the Chairperson of the Central Jakarta District Court (Hj. Andriani Nurdin, S.H., M.H.) number W10.U1.HT.079/2007 Eks. 4758 VII.2009.01 dated 3 July 2009, the contents of which are quoted as follows:

- i. "At the summoning event dated 30 June 2009, no new matters were submitted by the Petitioner in connection with his petition;

There is no reason for the Central Jakarta District Court to cancel the Stipulation Number 079/2007.Eks dated 10 October 2007 concerning "Non-Executable";"

(c) Letter from the Chairperson of the Central Jakarta District Court (H. Syahril Sidik, S.H., M.H.) number W10.U1.HT.079/2007 Eks. VIII.2009.03.6238 dated 24 August 2009, the contents of which are quoted as follows:

- i. "Based on subpoena dated 30 June 2009, no new matters were found submitted by the Applicant for Execution in connection with his petition;
- ii. There is no reason for the Central Jakarta District Court to cancel the Stipulation Number 079/2007.Eks dated 10 October 2007 concerning "Non-Executable".

(d) Letter from the Chairperson of the Central Jakarta District Court (Suharto, S.H., M.Hum.) Number W10.U1.HT.079 / 2007 Eks. X.2013.01.11412 BD dated 7 October 2013, the contents of which are quoted as follows:

- i. "That until now these shares cannot be found, so that the Stipulation of "Non-Executable" remains valid;
- ii. Whereas the Execution Applicant has not yet been able to prove or provide information about shares that have been sold to the public."

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/87

Exhibit E/87

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

37. LITIGASI (Lanjutan)

37. LITIGATION (Continued)

Latar Belakang (Lanjutan)

Background (Continued)

(e) Surat Ketua PN Jakarta Pusat (Gusrizal, S.H., M.Hum.)
(e) nomor W10.U1.HT.079/2007 Eks. VI.2014.01.6758 BD
(e) tanggal 12 Juni 2014, yang isinya dikutip sebagai
(e) berikut:

(e) Letter from the Chairperson of the Central Jakarta
District Court (Gusrizal, S.H., M.Hum.) Number
W10.U1.HT.079/2007 Eks. VI.2014.01.6758 BD dated
12 June 2014, the contents of which are quoted as
follows:

i. "Bahwa tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat untuk membatalkan Penetapan
nomor 079/2007.Eks tanggal 10 Oktober 2007
tentang "Tidak Dapat Dilaksanakan (Non-
Executable)".

i. "That there is no reason for the Central Jakarta
District Court to cancel the Stipulation Number
079/2007.Eks dated 10 October 2007 concerning
"Non-Executable".

(f) Penetapan Ketua PN Jakarta Pusat (Dr. Yanto, S.H.,
M.H.) nomor 079/2007.Eks tanggal 26 Januari 2018,
yang isinya dikutip sebagai berikut:

(f) Stipulation of the Chairperson of the Central Jakarta
District Court (Dr. Yanto, S.H., M.H.) number
079/2007.Eks dated 26 January 2018, the contents of
which are cited as follows:

i. "Menyatakan eksekusi atas Putusan Peninjauan
Kembali Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 2007
nomor 240 PK/Pdt/2006 jo. Putusan Kasasi
Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Juli
2005 nomor 677 K/Pdt/2005 jo. Putusan Pengadilan
Tinggi Jakarta tanggal 1 September 2004
nomor 302/Pdt/2004/PT.DKI jo. Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 April 2004
nomor 123/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
tanggal 23 September 2014 nomor 79/2007.Eks
tidak dapat dilaksanakan oleh karena obyektif
eksekusi berupa saham-saham PT Aryaputra
Teguharta telah dijual dan tidak berada pada
penguasaan Para Tergugat lagi."

i. "Declared the execution of the Judicial Review
Decision of the Supreme Court dated
20 February 2007 number 240 PK/Pdt/2006 jo.
Cassation Decision of the Supreme Court of the
Republic of Indonesia dated 20 July 2005 number
677K/Pdt/2005 jo. the Decision of the Jakarta
High Court on 1 September 2004
number 302/Pdt/2004/PT.DKI jo. Decision of the
Central Jakarta District Court dated 14 April
2004 number 123/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST
based on Stipulation of the Chairperson of
the Central Jakarta District Court dated
23 September 2014 number 79/2007.Eks cannot
be implemented because the object execution of
shares of PT Aryaputra Teguharta has been sold
and is not in the possession of the Defendants
anymore."

**Gugatan APT di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Jakarta**

**APT Lawsuit in the Jakarta Administrative Court
(PTUN)**

Pada tanggal 26 Februari 2018, APT mengirimkan surat
kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
("Dirjen AHU") cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia ("Kemenkumham RI") untuk menuntut
pembatalan dan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara
yang telah menyetujui dan mencatat transaksi pengalihan
saham APT dari BFI kepada LDTC berdasarkan kesepakatan
perjanjian perdamaian, dan selanjutnya pengalihan oleh
LDTC kepada pihak ketiga, serta menyesuaikan profil
perusahaan BFI dengan mencantumkan APT sebagai pemilik
atau pemegang dari 32,32% saham di BFI. Permintaan APT
tersebut kemudian ditolak oleh Dirjen AHU melalui surat
nomor AHU.2.UM.01.01-802 tanggal 8 Maret 2018.

On 26 February 2018, APT sent a letter to the Directorate
General of General Legal Administration ("Director
General of AHU") cq. Minister of Law and Human Rights
of the Republic of Indonesia ("Kemenkumham RI")
to demand cancellation and revocation of State
Administrative Decrees that have approved and recorded
APT share transfer from BFI to LDTC as a result of
restructuring agreements, and later by LDTC to third
parties, as well as adjusting BFI's company profile by
stating APT as the owner or holder of a 32.32% stake of
BFI. APT request was later rejected by the
Director General of the AHU by letter number
AHU.2.UM.01.01-802 dated 8 March 2018.

Dikarenakan adanya penolakan tersebut, pada tanggal
16 Mei 2018, APT mengajukan Gugatan nomor
120/G/2018/PTUN-JKT terhadap Kemenkumham RI di
PTUN Jakarta dengan tuntutan berupa menyatakan tidak
sah dan mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang
diterbitkan oleh Dirjen AHU dan mengajukan Permohonan
Penundaan Pelaksanaan ("Schorsing") atas Obyektif Sengketa
TUN tersebut di bawah ini ("Obyektif Sengketa TUN"), yaitu:

Due to the refusal, on 16 May 2018, APT filed a lawsuit
Number 120/G/2018/PTUN-JKT against Kemenkumham
RI at the PTUN Jakarta claiming the Ministry has issued
invalid Decrees and demanding the State Administrative
Decrees issued by the Director General of AHU below
("TUN Dispute Object") to be revoked, and also submitted
an Application for Delay of Implementation ("Schorsing")
of TUN Dispute Object:

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/88

Exhibit E/88

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

37. LITIGASI (Lanjutan)

**Gugatan APT di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Jakarta (Lanjutan)**

- i. Surat Dirjen AHU nomor AHU.2.UM.01.01-802 tanggal 8 Maret 2018.
- ii. Persetujuan dan penerimaan laporan/pemberitahuan yang diterbitkan oleh Dirjen AHU atas akta perubahan anggaran dasar BFI dari tahun 2001-2017.
- iii. Data Profil Perusahaan BFI yang diterbitkan oleh Dirjen AHU.

Terkait Gugatan APT di atas, PTUN Jakarta mengabulkan permohonan BFI sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara tersebut melalui Putusan Sela tanggal 28 Juni 2018.

Terhadap perkara di atas, PTUN Jakarta mengabulkan Schorsing yang dimohonkan APT atas Obyek Sengketa TUN melalui Penetapan nomor 120/G/2018/PTUN-JKT tanggal 19 Juli 2018 ("Penetapan Schorsing"). Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2018, BFI telah mengajukan banding atas Penetapan tersebut kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.

PTUN Jakarta juga telah mengabulkan Gugatan APT terhadap Kemenkumham RI melalui Putusan nomor 120/G/2018/PTUN-JKT pada tanggal 12 November 2018 ("Putusan PTUN Jakarta"). BFI dan Kemenkumham RI menyatakan Banding atas Putusan tersebut masing-masing pada tanggal 12 dan 21 November 2018. Dengan demikian, Putusan PTUN Jakarta tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Banding dan Surat Pemberitahuan Penetapan, keduanya Nomor 27/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 28 Maret 2019, PTTUN Jakarta telah menerima permohonan Banding BFI terhadap Penetapan Schorsing melalui Penetapan nomor 27/B/2019/PT.TUN.JKT dengan menyatakan Penetapan Schorsing atas Obyek Sengketa TUN yang dikeluarkan oleh PTUN Jakarta dinyatakan batal dan dicabut serta tidak memiliki kekuatan hukum berlaku.

Pada tanggal yang sama, PTTUN Jakarta juga telah mengabulkan permohonan Banding BFI dan Kemenkumham RI terhadap Putusan PTUN Jakarta melalui Putusan nomor 27/B/2019/PT.TUN.JKT yang berisi:

- a. Membatalkan Putusan PTUN Jakarta,
- b. Menyatakan Penetapan nomor 27/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 22 Maret 2019 tentang pembatalan dan pencabutan Penetapan Schorsing berharga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat,
- c. Menerima Eksepsi BFI tentang kompetensi absolut pengadilan,
- d. Menyatakan Gugatan APT tidak dapat diterima.

37. LITIGATION (Continued)

**APT Lawsuit in the Jakarta Administrative Court
(PTUN) (Continued)**

- i. Letter of Director General of AHU number AHU.2.UM.01.01-802 dated 8 March 2018.
- ii. Approval and receipt of reports/ notifications issued by the Director General of AHU on the deed of amendment to BFI's articles of association from 2001-2017.
- iii. BFI Company Profile Data issued by the Director General of AHU.

Regarding APT lawsuit above, the PTUN Jakarta granted BFI's request as Defendant II Intervention in the case through Interlocutory Decision 28 June 2018.

With regard to the main case above, the PTUN Jakarta grants the Schorsing requested by APT for the TUN Dispute Object through Stipulation number 120/G/2018/PTUN-JKT on 19 July 2018 ("the Schorsing Stipulation"), and has been appealed by BFI on 20 July 2018 to the Jakarta Administrative High Court (PTTUN).

*On 12 November 2018, The PTUN Jakarta has also granted APT claim against the Kemenkumham RI through the Decision number 120/G/2018/PTUN-JKT ("the PTUN Jakarta Decision"). BFI and Kemenkumham RI has declared an Appeal on 12 and 21 November 2018 respectively, and therefore The PTUN Jakarta decision has no permanent legal force (*inkracht van gewijsde*).*

Based on the Notification Letter of Appeal Decision and Notification Letter of Stipulation, both Number 27/B/2019/PT.TUN.JKT dated 28 March 2019, the PTTUN Jakarta has received a request for BFI's Appeal of Schorsing Stipulation through Stipulation number 27/B/2019/PT.TUN.JKT by declaring the Schorsing Stipulation of TUN Dispute Objects issued by PTUN Jakarta is declared null and void and has no legal force.

At the same date, PTTUN Jakarta has also granted BFI and Kemenkumham's Appeal of RI against the Jakarta PTUN Decision through Decision number 27/B/2019/PT.TUN.JKT that states:

- a. Cancellation the PTUN Jakarta Decision,
- b. Declare Stipulation number 27/B/2019/ PT.TUN.JKT dated 22 March 2019 concerning cancellation and revocation of the Schorsing Stipulation valuable and has binding legal force,
- c. Accept BFI's exception about the absolute competence of the court,
- d. States that APT lawsuit cannot be accepted.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/89

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

37. LITIGASI (Lanjutan)

**Gugatan APT di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Jakarta (Lanjutan)**

Pada tanggal 10 April 2019, APT telah mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap Putusan PTTUN Jakarta nomor 27/B/2019/PT.TUN.JKT berdasarkan Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi nomor 120/G/2018/PTUN-JKT tanggal 15 April 2019. Berdasarkan website Mahkamah Agung Republik Indonesia, terhadap Permohonan Kasasi tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 26 September 2019 berdasarkan Putusan nomor 368 K/TUN/2019 dengan amar putusan pada intinya menolak Kasasi APT.

Gugatan APT di PN Jakarta Pusat

APT juga mengajukan Gugatan terhadap BFI dan pihak-pihak tersebut di bawah ini, di PN Jakarta Pusat:

- a) Gugatan nomor 521/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 19 September 2018 terhadap BFI dan Direksi BFI yang menjabat pada saat itu (Francis Lay Sioe Ho, Yan Peter Wangkar dan Cornellius Henry Kho) dengan tuntutan antara lain berupa pembayaran uang paksa (dwangsom) karena belum mengembalikan atau menyerahkan saham-saham APT yang dihitung sampai dengan tanggal Gugatan tersebut sebesar Rp 80.360.
- b) Gugatan nomor 527/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 24 September 2018 terhadap BFI, Direksi BFI yang menjabat pada saat ini (Francis Lay Sioe Ho, Sudjono, Sutadi, Sigit Hendra Gunawan dan Andrew Adiwijanto), Direksi BFI yang menjabat pada saat itu (Cornellius Henry Kho dan Yan Peter Wangkar), Harry Jesus Rodriguez Palmer (mantan Komisararis BFI), Notaris BFI (Aulia Taufani, SH., Fathiah Helmi, SH., dan Herna Gunawan, SH.) (seluruhnya selaku Tergugat), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Sirca Datapro Perdana (ketiganya selaku Turut Tergugat) dengan tuntutan antara lain berupa pembayaran dividen tahun buku 2002-2017 sebesar Rp 644.815, bunga sebesar Rp 133.930, ganti rugi immaterial karena tidak membayarkan dividen sebesar Rp 500.000 dan pembayaran bunga sebesar 6% per tahun dari sejak Putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan pembayaran dimaksud.
- c) Gugatan nomor 545/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 24 September 2018 terhadap BFI, Garibaldi Thohir (Boy Thohir), Trinugraha Capital & CO SCA, TPG Capital, Northstar Group PTE LTD, Compass Banca SPA, Mediobanca SPA, OJK, BEI (seluruhnya selaku Tergugat), serta PT Kliring Penjamin Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Sirca Datapro Perdana (ketiganya selaku Turut Tergugat), dengan tuntutan antara lain berupa pengembalian dan penyerahan 32,32% saham BFI kepada APT, serta pembatalan transaksi jual-beli saham yang dibuat oleh Trinugraha Capital & CO SCA dengan Compass Banca SPA dan pihak ketiga lainnya.

Exhibit E/89

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

37. LITIGATION (Continued)

**APT Lawsuit in the Jakarta Administrative Court
(PTUN) (Continued)**

On 10 April 2019, APT has filed a cassation appeal against the PTTUN Jakarta Decision number 27/B/2019/PT.TUN.JKT based on the Notice of Cassation Application number 120/G/2018/PTUN-JKT dated 15 April, 2019. Based on the website of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, pertaining to APT's cassation as mentioned above, on 26 September, 2019 the Supreme Court of the Republic of Indonesia based on decision number 368 K/TUN/2019 has issued a decision which essentially rejected APT's cassation.

APT Lawsuit in PN Central Jakarta

APT also filed a lawsuit against BFI and the parties below, in the Central Jakarta District Court:

- a) Claims number 521/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dated 19 September 2018 against BFI, President Director of BFI (Francis Lay Sioe Ho), and the former BFI Directors (Yan Peter Wangkar and Cornellius Henry Kho) with demands including payment of money forced (dwangsom) because they have not returned or handed over APT shares calculated up to the date of the lawsuit in the amount of Rp 80,360.
- b) Claims number 527/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dated 24 September 2018 against BFI, the current BFI Directors (Francis Lay Sioe Ho, Sudjono, Sutadi, Sigit Hendra Gunawan and Andrew Adiwijanto), former BFI Directors (Cornellius Henry Kho and Yan Peter Wangkar), Harry Jesus Rodriguez Palmer (former Commissioner of BFI), Notary (Aulia Taufani, SH., Fathiah Helmi, SH., and Herna Gunawan, SH.) (all as Defendants), as well as the Financial Services Authority (OJK), the Indonesia Stock Exchange (IDX), PT Sirca Datapro Perdana (all three as the Co-Defendants) with demands including payment of dividends for the financial year 2002-2017 of Rp 644,815, interest of Rp 133,930, immaterial compensation for not paying dividends of Rp 500,000 and interest payments of 6% per annum from the moment the Decision is legally enforceable until the payment is made.
- c) Claims number 545/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dated 24 September 2018 against BFI, Garibaldi Thohir (Boy Thohir), Trinugraha Capital & CO SCA, TPG Capital, Northstar Group PTE LTD, Compass Banca SPA, Mediobanca SPA, OJK, BEI (all as Defendants), and Indonesian Securities Guarantor Clearing House, Indonesian Central Securities Depository, PT Sirca Datapro Perdana (all three of them as the Co-Defendants), with demands including the return and delivery of 32.32% of BFI's shares to APT, and the cancellation of shares trading transactions made by Trinugraha Capital & CO SCA with Compass Banca SPA and other third parties.

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit E/90

Exhibit E/90

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

37. LITIGASI (Lanjutan)

Perjanjian Perdamaian

Pada tanggal 20 November 2019, BFI dan Aryaputra Teguharta (APT) menanda-tangani Akta Perdamaian berisi kesepakatan untuk mengakhiri dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi secara penuh dan final dengan cara damai atas perkara yang sekarang berlangsung termasuk semua perselisihan yang berkaitan dengan Putusan PK 240.

Perdamaian tersebut ditindak-lanjuti oleh APT dengan melakukan pencabutan dan/atau mendaftarkan Perjanjian Perdamaian atas semua Perkara yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai putusan sebagai berikut:

- a) Putusan Perdamaian tanggal 27 November 2019 yang menghukum BFI dan APT untuk mentaati Akta Perdamaian dalam perkara perdata nomor 521/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dan 527/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst,
- b) Penetapan tanggal 27 November 2019 mengenai pencabutan perkara perdata nomor 545/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst oleh APT.

Perdamaian tersebut juga ditindak-lanjuti APT dengan surat tanggal 20 November 2019 yang memberitahukan kepada Mahkamah Agung (MA), PTUN Jakarta, Kemenkumham RI dan BFI bahwa APT menerima Putusan Mahkamah Agung nomor 368 K/TUN/2019 dan melepaskan haknya untuk mengajukan upaya hukum lanjut apapun termasuk upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung nomor 368 K/TUN/2019.

Dalam kesepakatan perdamaian tersebut, BFI setuju untuk memberikan kompensasi kepada APT. Nilai kompensasi tersebut dan biaya terkait penyelesaian ini telah dicatat pada pos Beban Lain-lain (Catatan 28). Pada saat laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, BFI telah membayar penuh biaya-biaya tersebut diatas.

Selanjutnya, APT telah melakukan proses pembubaran/ melikuidasi perusahaan sesuai Keputusan Para Pemegang Saham APT yang tertuang dalam Akta Notaris tanggal 13 Januari 2020 serta telah mengumumkannya melalui dua koran nasional pada 22 Januari 2020 (harian Bisnis Indonesia dan Neraca).

Dengan demikian, maka seluruh sengketa hukum yang berlangsung sejak 2001 telah selesai sepenuhnya.

37. LITIGATION (Continued)

Settlement Agreement

On 20 November 2019, BFI and PT Aryaputra Teguharta (APT) signed the Settlement Deed containing an agreement to terminate and settle disputes that occurred in full and final in settlement for both current and future cases, including all disputes relating to PK 240 Decision.

The settlement was followed up by APT with the revoking and/ or registering the Settlement Agreement for all ongoing cases at the Central Jakarta District Court with the following decision:

- a) *The Settlement Decision dated 27 November 2019 which punished BFI and APT to comply with the Settlement Deed in Claims number 521/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst and 527/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst,*
- b) *Stipulation on 27 November 2019 concerning revocation of Claims number 545/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst by APT.*

The settlement was also followed up by APT with a letter dated 20 November 2019 informing the Supreme Court (MA), PTUN Jakarta, Kemenkumham RI and BFI that APT has accepted Decision of Supreme Court (MA) number 368K/TUN/2019 and waived its right to submit any further legal remedies including extraordinary remedies in the form of Judicial Review the Decision of Supreme Court (MA) number 368K/TUN/2019.

In the settlement agreement, BFI agreed to provide compensation to APT. The compensation amount and costs related to this settlement have been recorded in Other Expenses (Note 28). As at the issuance date of the consolidated financial statements, BFI has fully paid abovementioned costs.

Based on the foregoing, APT has carried out the liquidation process/ liquidated of the company in accordance with the Decrees of APT Shareholders as set in the notarial deed dated on 13 January 2020, and was announced in two national newspapers on 22 January 2020 (Bisnis Indonesia daily and Neraca Daily).

Thus, all legal disputes since 2001 have been completely resolved.

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit E/91

Exhibit E/91

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. REKLASIFIKASI

38. RECLASSIFICATIONS

Beberapa akun pada laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

A few accounts in the consolidated financial statements as of and for the years ended 31 December 2018 and 2017 were reclassified in order to conform with the presentation of consolidated financial statements as of 31 December 2019 as follows:

2018	Sebelum reklasifikasi/ Before reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Sesudah reklasifikasi/ After reclassification	2018
Aset				Assets
Piutang sewa pembiayaan	11.357.670	(11.357.670)	-	Finance lease receivables
Piutang pembiayaan konsumen	5.922.788	(5.922.788)	-	Consumer financing receivables
Piutang pembiayaan	-	17.280.458	17.280.458	Financing receivables
Aset ijarah	2.332	71	2.403	Ijarah assets
Liabilitas				Liabilities
Beban yang masih harus dibayar	287.878	(4.674)	283.204	Accrued expenses
Utang lain-lain	258.232	4.745	262.906	Other payables
Pendapatan				Income
Sewa pembiayaan	2.871.964	(2.871.964)	-	Finance lease
Pembiayaan konsumen	2.021.182	(2.021.182)	-	Consumer financing
Piutang pembiayaan	-	4.893.146	4.893.146	Financing receivables
Syariah	529	(522)	7	Sharia
Beban				Expenses
Beban gaji dan tunjangan Umum dan administrasi	1.050.204 566.925	24.735 (25.257)	1.074.939 541.668	Salaries and benefits General and administrative
Penyisihan kerugian penurunan nilai				Provision for impairment losses
Piutang sewa pembiayaan	215.537	(215.537)	-	Finance lease receivables
Piutang pembiayaan konsumen	293.645	(293.645)	-	Consumer financing receivables
Piutang pembiayaan	-	509.182	509.182	Financing receivables
2017	Sebelum reklasifikasi/ Before reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Sesudah reklasifikasi/ After reclassification	2017
Aset				Assets
Piutang sewa pembiayaan	9.435.315	(9.435.315)	-	Finance lease receivables
Piutang pembiayaan konsumen	5.739.410	(5.739.410)	-	Consumer financing receivables
Piutang pembiayaan	-	15.174.725	15.174.725	Financing receivables
Liabilitas				Liabilities
Beban yang masih harus dibayar	293.527	(1.867)	291.660	Accrued expenses
Utang lain-lain	214.721	1.867	216.588	Other payables
Pendapatan				Income
Sewa pembiayaan	2.281.670	(2.281.670)	-	Finance lease
Pembiayaan konsumen	1.654.331	(1.654.331)	-	Consumer financing
Piutang pembiayaan	-	3.936.001	3.936.001	Financing receivables
Beban				Expenses
Beban gaji dan tunjangan Umum dan administrasi	868.834 482.075	19.912 (19.912)	888.746 462.163	Salaries and benefits General and administrative
Penyisihan kerugian penurunan nilai				Provision for impairment losses
Piutang sewa pembiayaan	125.700	(125.700)	-	Finance lease receivables
Piutang pembiayaan konsumen	177.056	(177.056)	-	Consumer financing receivables
Piutang pembiayaan	-	302.756	302.756	Financing receivables



Tel : +62-21 5795 7300
Fax : +62-21 5795 7301
www.bdo.co.id

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
Certified Public Accountant
Licence No. 622/KM.1/2016

Prudential Tower, 17th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910 - Indonesia

This report is originally issued in Indonesian language

No. : 00058/2.1068/AU.1/09/1042-2/1/II/2020
Hal : Laporan Keuangan Konsolidasian
Per 31 Desember 2019

No. : 00058/2.1068/AU.1/09/1042-2/1/III/2020
Re : Consolidated Financial Statements
As of 31 December 2019

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
PT BFI Finance Indonesia Tbk
Tangerang Selatan

*The Shareholders, Board of Commissioners
and Directors
PT BFI Finance Indonesia Tbk
South Tangerang*

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT BFI Finance Indonesia Tbk ("Perusahaan") dan Entitas Anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT BFI Finance Indonesia Tbk ("the Company") and its Subsidiary, which comprise the consolidated statements of financial position as of 31 December 2019, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of Independent member firms.

Tanggung jawab auditor (Lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditors' responsibility (Continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Company and its Subsidiary as of 31 December 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan



Susanto Bong, SE, Ak, CPA, CA
NIAP AP.1042/
License No. AP.1042

19 Februari 2020/ 19 February 2020

IF/yn

Halaman ini sengaja dikosongkan

Untuk memilih topik-topik yang dibahas dalam Laporan Terintegrasi ini, Perusahaan meninjau kembali topik-topik yang telah dilaporkan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi BFI Finance yang diterbitkan pada 2018, dan menegaskan definisi topik-topik material yang disajikan dalam laporan ini.

Data dan informasi finansial disajikan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, sedangkan topik bahasan lain yang dilaporkan dipilih dari aspek-aspek keberlanjutan Perusahaan yang material berdasarkan Matriks Materialitas sebagaimana digambarkan berikut ini.

GRAFIK 30_MATRIKS MATERIALITAS BFI FINANCE

Pengaruh terhadap Persepsi Pemangku Kepentingan BFI Finance	Sangat Tinggi			<ul style="list-style-type: none"> Tata Kelola Perusahaan yang Baik (halaman 188) Pengembangan Usaha (halaman 128-149)
	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Pelestarian Lingkungan (halaman 305) Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan (halaman 305) 	<ul style="list-style-type: none"> Ketenagakerjaan (halaman 106-116) Pendidikan dan Pelatihan (halaman 110-112) Tanggung Jawab kepada Konsumen (halaman 130-133, 311) 	
	Sedang		<ul style="list-style-type: none"> Produktivitas Karyawan (halaman 113) 	
		Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Pengaruh terhadap Keberlanjutan BFI Finance				

Aspek-aspek dalam pelaporan dinilai materialitasnya berdasarkan opini internal dan eksternal yang telah didiskusikan sebelum penyusunan laporan.

Dalam laporan ini, tidak terdapat perubahan topik material yang dilaporkan dibandingkan di Laporan Tahunan Terintegrasi BFI Finance 2018.

Perusahaan melaporkan empat bidang program tanggung jawab sosial, yaitu (1) lingkungan, (2) praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, (3) pengembangan sosial dan kemasyarakatan, dan (4) tanggung jawab kepada konsumen.

Topik Material dan Rantai Pasokan Perusahaan

Bergerak di industri jasa keuangan, BFI Finance memiliki beberapa rantai pasokan yang lebih sederhana dibandingkan perusahaan manufaktur. Pemasok utama BFI Finance terdiri dari *dealer* dan *supplier* yang menyediakan barang yang akan dibiayai BFI Finance, perusahaan asuransi yang melakukan penutupan asuransi kerugian dan jiwa, konsultan yang memberikan berbagai jenis jasa termasuk teknologi informasi, dan pemasok barang dan jasa kebutuhan perkantoran. Tidak ada proses bisnis inti BFI Finance yang dilakukan oleh pihak eksternal.

Jumlah pemasok/*supplier* per 31 Desember 2019 adalah 9.703 dan 100% adalah pemasok lokal. Di 2019, tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap rantai pasokan Perusahaan di seluruh kegiatan operasionalnya.

TABEL 140_DAFTAR TOPIK MATERIAL DAN BATASANNYA DI BFI FINANCE

No.	Topik	Internal		Eksternal	
		BFI Finance	Konsumen	Pemasok	Masyarakat
1.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	√		√	
2.	Pengembangan Usaha	√		√	
3.	Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan	√			√
4.	Ketenagakerjaan	√			√
5.	Pendidikan dan Pelatihan	√			√
6.	Tanggung Jawab kepada Konsumen	√	√	√	
7.	Produktivitas Karyawan	√			
8.	Pelestarian Lingkungan	√			√

Pelibatan Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan Perusahaan, berdasarkan tingkat keterkaitannya dengan bisnis, adalah konsumen, pemegang saham, pemasok, karyawan, mitra kerja, masyarakat dan regulator. Perusahaan bekerja untuk membangun komunikasi yang transparan dengan tujuan untuk menciptakan dan memelihara rasa saling percaya.

BFI Finance menjalin dialog yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan dan harapan, menyelesaikan masalah, mengelola dampak, serta mengidentifikasi peluang, agar manfaatnya optimal bagi semua pihak.

TABEL 141_RANGKUMAN ISU PEMANGKU KEPENTINGAN BFI FINANCE 2019

Kelompok Pemangku Kepentingan	Metode Dialog dan Pelibatan	Isu yang Diangkat di 2019
Konsumen	Survei konsumen, data keluhan konsumen	Layanan konsumen, penjelasan informasi produk, akses layanan
Karyawan	Survei karyawan, pertemuan dengan perwakilan karyawan, rapat, <i>Town Hall Meeting</i> , <i>Leader's Talk</i> , <i>Internal Customer Survey (ICS)</i> , <i>Service Insight Community (SIC)</i> , dan M-BEAT	Kesejahteraan dan manfaat, pengembangan kompetensi dan karier, produktivitas
Pemegang Saham	Laporan triwulanan dan tahunan, <i>investor roadshow</i> , RUPS	Manfaat, pengembangan usaha, tata kelola dan akuntabilitas, kesehatan usaha
Pemasok	Pelibatan berbasis kontrak	Keberlanjutan pasokan, kinerja, ketepatan waktu
Mitra Kerja	Pelibatan berbasis kontrak, tinjauan kinerja	Kinerja, ketepatan waktu, evaluasi kontrak
Masyarakat	Forum, pertemuan, kemitraan dengan lembaga untuk kemasyarakatan	Dukungan pada kondisi sosioekonomi masyarakat dan lingkungan
Regulator	Pertemuan/rapat teratur, pelaporan	Kepatuhan, pengembangan usaha, tata kelola dan akuntabilitas, kesehatan usaha

BFI Finance melakukan pelibatan pemangku kepentingan lebih lanjut melalui partisipasinya dalam organisasi eksternal yang relevan dan mendukung tujuan Perusahaan.

BFI Finance berpartisipasi aktif dalam keanggotaan organisasi sebagai berikut:

1. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) sebagai anggota;
2. Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) sebagai anggota;
3. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebagai anggota;
4. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sebagai anggota; dan
5. Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI) sebagai anggota.

APPI	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia	MPV	<i>Multipurpose Vehicles</i>
APU-PPT	Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	MTN	<i>Medium Term Notes</i>
BAE	Biro Administrasi Efek	NPF	<i>Non-Performing Financing</i>
BCP	<i>Business Continuity Plan</i>	NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
BECOCO	<i>BFI Enhanced Core Competencies</i>	OJK	Otoritas Jasa Keuangan
BEI	Bursa Efek Indonesia	PDB	Produk Domestik Bruto
BELLA	<i>BFI Employee Personal Assistant</i>	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
CAGR	<i>Compound Average Growth Rate</i>	PSAK	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>	RI	Republik Indonesia
GCG	<i>Good Corporate Governance</i>	Rp	Rupiah
GLP	<i>Great Leaders Program</i>	RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
GRI	Global Reporting Initiative	RUPSLB	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
HC	<i>Human Capital</i>	RUPST	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
HCIS	<i>Human Capital Information System</i>	SDG	<i>Sustainable Development Goals</i>
IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan	SDM	Sumber Daya Manusia
IIRC	International Integrated Reporting Council	SEOJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
IPO	<i>Initial Public Offering</i>	SK	Surat Keputusan
IR	<i>Integrated Reporting</i>	SLA	<i>Service Level Agreement</i>
IT	<i>Information Technology</i>	SLIK	Sistem Layanan Informasi Keuangan
K3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	SMS	<i>Short Message Service</i>
KAP	Kantor Akuntan Publik	SR	<i>Sustainability Report</i>
KNKG	Komite Nasional Kebijakan Governance	TI	Teknologi Informasi
KPI	<i>Key Performance Indicator</i>	UU	Undang-Undang
KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia	UUS	Unit Usaha Syariah
M-BEAT	<i>Mobile BFI Edustream & Training</i>	USD	Dolar AS
MESOP	<i>Management and Employee Stock Options Program</i>		

SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016

1. Bentuk Laporan Tahunan

- | | |
|--|---|
| 1. Laporan tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan Salinan dokumen elektronik | √ |
| 2. Laporan tahunan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid dan dapat diperbanyak dgn kualitas baik | √ |
| 3. Laporan tahunan yang disajikan dalam bentuk Salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format pdf | √ |

2. Isi Laporan Tahunan

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Ketentuan umum | √ |
|-------------------|---|

a. Laporan tahunan wajib memuat informasi mengenai:

- | |
|--|
| 1) Ikhtisar data keuangan penting |
| 2) Informasi saham (jika ada) |
| 3) Laporan Direksi |
| 4) Laporan Dewan Komisaris |
| 5) Profil Emiten atau Perusahaan Publik |
| 6) Analisis dan Pembahasan Manajemen |
| 7) Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik |
| 8) Tanggung jawab sosial dan Lingkungan Emiten dan Perusahaan Publik |
| 9) LKT yang telah diaudit |
| 10) Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas kebenaran isi laporan tahunan |

b. Laporan tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami

2. Uraian isi Laporan Tahunan

- | | |
|---|-------|
| a. Ikhtisar Data Keuangan Penting | 16-17 |
| Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: | |
| 1) Pendapatan/penjualan | |
| 2) Laba bruto | |
| 3) Laba (rugi) | |
| 4) Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali | |
| 5) Total laba (rugi) komprehensif | |
| 6) Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali | |
| 7) Laba (rugi) per saham | |
| 8) Jumlah aset | |
| 9) Jumlah liabilitas | |
| 10) Jumlah ekuitas | |
| 11) Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset | |
| 12) Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas | |
| 13) Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan | |
| 14) Rasio lancar | |
| 15) Rasio liabilitas terhadap ekuitas | |
| 16) Rasio liabilitas terhadap jumlah aset | |
| 17) Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten dan jenis industrinya | |

SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016

b. Informasi Saham	
Informasi saham (jika ada) paling sedikit memuat:	
1) saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	18-19
a) Jumlah saham yang beredar	
b) Kapitalisasi pasar	
c) Harga tertinggi, terendah, dan penutupan	
d) Volume perdagangan	
2) Dalam hal terjadi aksi Korporasi, seperti pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sesuai poin 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	95
a) Tanggal pelaksanaan aksi Korporasi	
b) Rasio pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus dan perubahan nilai nominal saham	
c) Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi Korporasi	
d) Harga saham sebelum dan sesudah aksi Korporasi	
3) Dalam hal terjadi <i>suspension</i> dan/atau <i>delisting</i> saham dalam tahun buku, Emiten menjelaskan alasan <i>suspension</i> dan/atau <i>delisting</i> tersebut.	n/a
4) Dalam hal <i>suspension</i> dan/atau <i>delisting</i> sesuai poin 3 di atas masih berlangsung hingga akhir periode laporan tahunan, Emiten menjelaskan Tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan hal tersebut.	n/a
c. Laporan Direksi	38-45
Laporan Direksi paling sedikit memuat:	
1) Uraian singkat mengenai kinerja Emiten paling sedikit meliputi:	42-44
a) Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik	
b) Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan	
c) Kendala yang dihadapi Emiten	
2) Gambaran tentang prospek usaha	45
3) Penerapan tata kelola Emiten	44
4) Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada)	n/a
d. Laporan Dewan Komisaris	30-37
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat:	
1) Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten	32-33
2) Pengawasan terhadap implementasi strategi Emiten	32-33
3) Pandangan atas prospek usaha Emiten yang disusun oleh Direksi	37
4) Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten	36
5) Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada)	36
6) Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi	36-37
e. Profil Emiten	
Profil Emiten paling sedikit memuat:	
1) Nama Emiten termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku.	52
2) Akses terhadap Emiten termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten meliputi: alamat, telepon, facsimile, email dan alamat Situs Web.	52

SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016

3) Riwayat singkat Emiten.	54
4) Visi dan Misi Emiten.	53
5) Kegiatan usaha menurut AD terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan.	61
6) Struktur organisasi Emiten dalam bentuk bagan, paling singkat 1 tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan.	66
7) Profil Direksi, paling sedikit memuat:	74-76
a) Nama dan jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab	
b) Foto terbaru	
c) Usia	
d) Kewarganegaraan	
e) Riwayat pendidikan	
f) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
i. Dasar hukum penunjukan sebagai Direksi pada Emiten	
ii. Rangkap jabatan, baik sebagai Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Komite serta jabatan lainnya (jika ada)	
iii. Pengalaman kerja baik di dalam maupun di luar Emiten	
g) Jenis pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti oleh Direksi dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada)	
h) Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi	
8) Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	70-73
a) Nama	
b) Foto terbaru	
c) Usia	
d) Kewarganegaraan	
e) Riwayat pendidikan	
f) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
i. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten ybs	
ii. Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten ybs	
iii. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada)	
iv. Pengalaman kerja baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik	
g) Jenis pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti oleh anggota Dewan Komisaris dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada)	
h) Hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi	
i) Pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada)	217

SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016

9) Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan, susunan yang dicantumkan adalah susunan yang terakhir dan sebelumnya	212
10) Jumlah karyawan dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia karyawan dalam tahun buku	119-120
11) Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku yang terdiri dari:	88-90
a) Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Emiten	
b) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten	
c) Kelompok pemegang saham masyarakat (kurang dari 5%)	
12) Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan berdasarkan klasifikasi:	88-90
a) Kepemilikan institusi lokal	
b) Kepemilikan institusi asing	
c) Kepemilikan individu lokal	
d) Kepemilikan individu asing	
13) Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk bagan/skema	88
14) Nama entitas anak, Perusahaan Asosiasi, Perusahaan ventura bersama di mana Emiten memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Perusahaan tersebut (jika ada), untuk entitas anak ditambahkan informasi mengenai alamat	69
15) Kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek di mana saham Emiten dicatatkan (jika ada)	91-94
16) Kronologis pencatatan efek lainnya selain saham, yang memuat antara lain nama efek, tahun penerbitan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada)	96-102
17) Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal	103
18) Dalam hal terdapat profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada Emiten, diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi (fee), dan periode penugasan	103
19) Penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima Emiten baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku berakhir (jika ada) yang memuat:	11, 26-27
a) Nama penghargaan/sertifikasi	
b) Badan atau lembaga yang memberikan	
c) Masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikat (jika ada)	
f. Analisis dan Pembahasan Manajemen Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yang paling sedikit memuat:	
1) Tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten, paling sedikit mengenai:	138-145
a) Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya	
b) Pendapatan/penjualan	
c) Profitabilitas	

SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016

2) Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	151-174
a) Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset	151-160
b) Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas	161-164
c) Ekuitas	165
d) Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif, dan	166-173
e) Arus Kas	174
3) Kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan	175
4) Tingkat kolektibilitas piutang Perseroan dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan	176
5) Struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure</i>) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan	178
6) Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:	179
a) Tujuan dari ikatan tersebut	
b) Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut	
c) Mata uang yang menjadi denominasi	
d) Langkah yang direncanakan Emiten untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait	
7) Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	178-179
a) Jenis investasi barang modal	
b) Tujuan investasi barang modal	
c) Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan	
8) Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan	179
9) Prospek usaha dari Emiten dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya	185
10) Perbandingan target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai, mengenai:	177
a) Pendapatan/penjualan	
b) Laba (rugi)	
c) Struktur modal (<i>capital structure</i>)	
d) Hal lain yang dianggap penting bagi Emiten	
11) Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten untuk 1 tahun mendatang, meliputi:	185
a) Pendapatan/penjualan	
b) Laba (rugi)	
c) Struktur modal (<i>capital structure</i>)	
d) Kebijakan dividen	
e) Hal lain yang dianggap penting bagi Emiten	
12) Aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, paling sedikit strategi pemasaran dan pangsa pasar	146-149

SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016

13) Uraian mengenai dividen selama 2 tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit:	20, 180
a) Kebijakan dividen	
b) Tanggal dividen pembayaran kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas	
c) Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas)	
d) Jumlah dividen per tahun yang dibayar	
14) Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:	180
a) Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku	
b) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sesuai POJK tentang LRPD, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut	
15) Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:	181
a) Tanggal, nilai, dan objek transaksi	
b) Nama pihak yang melakukan transaksi	
c) Sifat hubungan afiliasi (jika ada)	
d) Penjelasan mengenai kewajaran transaksi	
e) Pemenuhan ketentuan terkait	
16) Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada)	182
17) Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada)	183
g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik	
Tata Kelola Emiten memuat uraian singkat, paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	
1) Direksi, mencakup antara lain:	222-238
a) Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi	
b) Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Direksi	
c) Prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik	
d) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut	
e) Informasi mengenai keputusan RUPS 1 tahun sebelumnya, meliputi:	209-210
i. Keputusan RUPS yang direalisasikan dalam tahun buku	
ii. Alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan	
f) Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku, meliputi:	206-208
i. Keputusan RUPS yang direalisasikan dalam tahun buku	
ii. Alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan	
g) Penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi	
2) Dewan Komisaris, mencakup antara lain:	210-221
a) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	
b) Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman Dewan Komisaris	

SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016

c)	Prosedur, dasar penetapan, struktur dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris	
d)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut	
e)	Kebijakan Emiten tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit meliputi:	
	i. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja	
	ii. Kriteria yang digunakan	
	iii. Pihak yang melakukan penilaian	
f)	Penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris	
g)	Dalam hal Dewan Komisaris tidak membentuk komite Nominasi dan Remunerasi, dimuat informasi paling sedikit mengenai:	
	i. Alasan tidak dibentuknya komite	
	ii. Prosedur nominasi dan remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku	
3)	Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam AD, paling sedikit memuat:	239-242
a)	Nama	
b)	Tugas dan tanggung jawab DPS	
c)	Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di Pasar Modal terhadap Emiten	
4)	Komite Audit, mencakup antara lain:	243-248
a)	Nama dan jabatannya dlm keanggotaan komite	
b)	Usia	
c)	Kewarganegaraan	
d)	Riwayat pendidikan	
e)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
	i. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite	
	ii. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada)	
	iii. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten	
f)	Periode dan masa jabatan anggota Komite Audit	
g)	Pernyataan independensi Komite Audit	
h)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut	
i)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada)	
j)	Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai yang dicantumkan dalam piagam (<i>charter</i>) komite audit	
5)	Komite lain yang dimiliki Emiten dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, seperti komite Nominasi dan Remunerasi, mencakup antara lain:	249-256
a)	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite	
b)	Usia	
c)	Kewarganegaraan	
d)	Riwayat pendidikan	

SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016

e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
i. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite	
ii. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada)	
iii. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten	
f) Periode atau masa jabatan anggota komite	
g) Uraian tugas dan tanggung jawab	
h) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman komite	
i) Pernyataan independensi komite	
j) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut	
k) Jenis pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku	
l) Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku	
6) Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain:	257-259
a) Nama	
b) Domisili	
c) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
i. Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris Perusahaan	
ii. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten	
d) Riwayat pendidikan	
e) Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku	
f) Uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku	
7) Unit Audit Internal, mencakup antara lain:	260-263
a) Nama kepala unit audit internal	
b) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
i. Dasar hukum penunjukan sebagai kepala Unit Audit Internal	
ii. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten	
c) Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada)	
d) Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku	
e) Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal	
f) Uraian tugas dan tanggung jawab	
g) Pernyataan bahwa telah memiliki piagam (<i>charter</i>) unit audit internal	
h) Uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku	
8) Uraian mengenai sistem pengendalian internal (<i>internal control</i>) yang diterapkan oleh Emiten, paling sedikit mengenai:	266-267
a) Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya	
b) Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal	
9) Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten, paling sedikit mengenai:	268-272
a) Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten	
b) Jenis risiko dan cara pengelolaannya dan	
c) Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten	

SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016

10) Perkara penting yang dihadapi oleh Emiten, Entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan komisaris (jika ada), antara lain meliputi:	273-281
a) Pokok perkara	
b) Status penyelesaian perkara	
c) Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten	
11) Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, oleh Otoritas lainnya pada tahun buku	281
12) Informasi mengenai kode etik, meliputi:	288-290
a) Pokok kode etik	
b) Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya	
c) Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten	
13) Informasi mengenai budaya Perusahaan (<i>corporate culture</i>) atau nilai-nilai Perusahaan (jika ada)	288-290
14) Uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten, antara lain mengenai:	18, 93-94, 166
a) Jumlah saham dan/atau opsi	
b) Jangka waktu pelaksanaan	
c) Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak	
d) Harga pelaksanaan	
15) Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>), antara lain meliputi:	295-296
a) Cara penyampaian laporan pelanggaran	
b) Perlindungan bagi pelapor	
c) Penanganan pengaduan	
d) Pihak yang mengelola pengaduan	
e) Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi:	
i. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku	
ii. Tindak lanjut pengaduan	
16) Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan bagi Emiten yang menerbitkan Efek bersifat Ekuitas, meliputi:	298-299
a) Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan dan/atau	
b) Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada)	
h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik	
1) Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten dan Perusahaan Publik meliputi kebijakan, jenis program, dan/atau biaya yang dikeluarkan, antara lain aspek:	303-314
a) Lingkungan hidup, antara lain:	305
i. Penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang	
ii. Sistem pengolahan limbah Perusahaan	
iii. Mekanisme pengaduan masalah lingkungan	
iv. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki	

SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016

b) Praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, antara lain:	310-311
i. Kesetaraan gender dan kesempatan kerja	
ii. Sarana dan kesempatan kerja	
iii. Tingkat perpindahan (<i>turnover</i>) karyawan	
iv. Tingkat kecelakaan kerja	
v. Pendidikan dan/atau pelatihan	
vi. Remunerasi	
vii. Mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan	
c) Pengembangan sosial dan masyarakat, antara lain:	305-309
i. Penggunaan tenaga kerja lokal	
ii. Pemberdayaan masyarakat sekitar Emiten antara lain melalui penggunaan bahan baku yang dihasilkan masyarakat atau pemberian edukasi	
iii. Perbaikan sarana dan prasarana sosial	
iv. Bentuk donasi lainnya dan	
v. Komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, serta pelatihan mengenai anti korupsi	
d) Tanggung jawab barang dan/atau jasa, antara lain:	311
i. Kesehatan dan keselamatan konsumen	
ii. Informasi barang dan/atau jasa	
iii. Sarana, jumlah dan penganggulangan atas pengaduan konsumen	
2) Dalam hal EPP menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan pada laporan tersendiri seperti <i>sustainability report</i> , maka EPP dikecualikan untuk mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan	n/a
3) <i>Sustainability report</i> sebagaimana poin 2 wajib disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan	n/a
i. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit	340-443
Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan wajib disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang telah diaudit oleh Akuntan. Laporan Keuangan dimaksud wajib memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam POJK tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan atau POJK tentang Laporan Berkala Perusahaan Efek	
j. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan	46-47

Indeks Isi GRI

Pengungkapan Umum

102-1	Nama organisasi	52
102-2	Kegiatan, merek, produk, dan jasa	53, 61
102-3	Lokasi kantor pusat	55, 60
102-4	Lokasi operasi	64
102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum	52
102-6	Pasar yang dilayani	64
102-7	Skala organisasi	55, 60
102-8	Informasi mengenai karyawan dan pekerja lain	119, 120, 121
102-9	Rantai pasokan	446
102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya	446
102-11	Pendekatan atau prinsip pencegahan	268-269
102-12	Inisiatif eksternal	447
102-13	Keanggotaan asosiasi	52
102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior	3
102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku	289
102-18	Struktur tata kelola	196
102-22	Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitennya	196
102-23	Ketua badan tata kelola tertinggi	196
102-25	Konflik kepentingan	181
102-26	Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strategi	196
102-28	Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi	232
102-30	Keefektifan proses manajemen risiko	270, 271
102-35	Kebijakan remunerasi	219
102-36	Proses untuk menentukan remunerasi	219
102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan	447
102-41	Perjanjian perundingan kolektif	310
102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan	446-447
102-43	Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan	446
102-44	Topik utama dan hal-hal yang diajukan	447
102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi	340
102-46	Menetapkan isi laporan dan batasan topik	1
102-47	Daftar topik material	446
102-48	Penyajian kembali informasi	4
102-49	Perubahan dalam pelaporan	4
102-50	Periode pelaporan	4
102-51	Tanggal laporan terbaru	4
102-52	Siklus pelaporan	4
102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan	282
102-54	Mengklaim pelaporan sesuai dengan Standar GRI	4
102-55	Indeks isi GRI	459
102-56	<i>Assurance</i> oleh pihak eksternal	4

Indeks Isi GRI**Pendekatan Manajemen**

103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	107-109, 113-116, 129-130, 194-195, 216-217, 272, 305
103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	107-109, 113-116, 129-130, 194-195, 216-217, 272, 305
103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	107-109, 113-116, 129-130, 194-195, 216-217, 272, 305

Kinerja Ekonomi

201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	312
201-3	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	310
201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	312

Dampak Ekonomi Tidak Langsung

203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	305, 307
203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	305, 307

Anti-korupsi

205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi	291
-------	--	-----

Kepegawaian

401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	113
401-3	Cuti melahirkan	115

Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen

402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional	116
-------	---	-----

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

403-1	Perwakilan pekerja dalam komite resmi gabungan manajemen-pekerja untuk kesehatan dan keselamatan	116
403-2	Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja, penyakit akibat pekerjaan, hari kerja yang hilang, dan ketidakhadiran, serta jumlah kematian terkait pekerjaan	117
403-3	Para pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit berbahaya tinggi terkait dengan pekerjaan mereka	117
403-4	Topik kesehatan dan keselamatan tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat buruh	116, 310

Pelatihan dan Pendidikan

404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	112
404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	114

Keanekaragaman dan Kesempatan Setara

405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan	214, 215, 227, 228
-------	---	--------------------

Kebijakan Publik

415-1	Kontribusi politik	312
-------	--------------------	-----

Pemasaran dan Pelabelan

417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa	133
417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	133

Privasi Pelanggan

418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	311
-------	--	-----



PT BFI Finance Indonesia Tbk

BFI Tower

Sunburst CBD Lot 1.2

Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo

BSD City, Tangerang Selatan 15322

Indonesia

 1500018

 corsec@bfi.co.id

 www.bfi.co.id

LAPORAN TAHUNAN
TERINTEGRASI

2019

PT BFI Finance Indonesia Tbk